



Kabupaten
Banyuwangi

Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Kabupaten
Banyuwangi
Tahun 2023





BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banyuwangi tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023 dengan menetapkannya dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan-Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

21. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
28. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
29. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

30. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031;

39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94);
40. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
42. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Banyuwangi tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 9/E);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2019;
45. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2020;
46. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi;
2. Bupati adalah Bupati Banyuwangi;
3. Pemerintah Kabupaten adalah pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Banyuwangi;
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2005-2025, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode selama Tahun 2005-2025;
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode selama Tahun 2021-2026;
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode selama Tahun 2021-2026;
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode selama 1 (satu) tahun;
9. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
10. RKPD Tahun 2023 adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023.

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

RKPD Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Banyuwangi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada Tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023.

Pasal 3

RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026 yang berisi program-program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi maupun dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 4

- (1) RKPD Tahun 2023 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:
- | | | |
|---------|---|---|
| BAB I | : | PENDAHULUAN |
| BAB II | : | GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH |
| BAB III | : | KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH |
| BAB IV | : | PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| BAB V | : | RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH |
| BAB VI | : | KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH |
| BAB VII | : | PENUTUP |
- (2) Uraian secara rinci RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan sebagai:

1. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD);
2. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2023.

Pasal 6

Dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2:

1. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menggunakan RKPD Tahun 2023 sebagai bahan Pembahasan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran dengan DPRD;
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menggunakan RKPD Tahun 2023 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

BAB III
PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 15 Juli 2022

BUPATI BANYUWANGI,



IPUKE FIESTIANDANI AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 15 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,



H. MUJIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2022 NOMOR /2

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I: PENDAHULUAN	I - 1
1.1 Latar Belakang.....	I - 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I - 4
1.3 Hubungan Antar Dokumen.....	I - 10
1.4 Maksud dan Tujuan.....	I - 11
1.5 Sistematika Dokumen RKPD	I - 12
BAB II: GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II - 1
2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah	II - 1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi	II - 1
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II - 14
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum.....	II - 39
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah	II - 130
BAB III: KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	III - 1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	III - 1
3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah.....	III - 1
3.1.2 Tantangan Dan Prospek Perekonomian Daerah.....	III - 17
3.1.3 Arah Kebijakan Perekonomian Daerah	III - 20
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	III - 26
3.2.1 Penghitungan Kapasitas Keuangan Daerah.....	III - 26
3.2.2 Arah Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah.....	III - 39
3.2.3 Arah Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah.....	III - 43
3.2.4 Arah Kebijakan Pengelolaan Pembiayaan Daerah	III - 46



BAB IV: PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH IV - 1

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan IV - 1

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023 IV - 7

4.2.1 Strategi dan arah kebijakan RKPD 2023 yang terkait dengan visi dan misi, strategi dan arah kebijakan RPJMD IV - 7

4.2.2 Arah Kebijakan/ Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 IV - 16

4.2.3 Perumusan Tema dan Prioritas pembangunan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023 IV - 19

4.2.4 Interkoneksi Linearitas arah kebijakan nasional dan provinsi Jatim dan Kabupaten Banyuwangi IV - 22

4.2.5 Interkoneksi permasalahan/isu strategis dengan Prioritas Pembangunan Daerah IV - 46

BAB V: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V - 1

BAB VI: KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH VI - 1

6.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) VI - 1

6.2 Indikator Kinerja Daerah (IKD) VI - 1

BAB VII: PENUTUP VII - 1

Lampiran Bab 2 Tabel 2.2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan Kabupaten Banyuwangi

Lampiran Bab 5 Tabel 5. 1: Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Wilayah Administrasi Kabupaten Banyuwangi	II - 2
Tabel 2. 2 Luas Tanah Berdasarkan Struktur Geologi Kabupaten Banyuwangi....	II - 3
Tabel 2. 3 Data Luas Panen, Rata-Rata Produksi dan Total Produksi Tanaman Bahan Makanan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021	II - 6
Tabel 2. 4 Data Luas Panen, Rata-Rata Produksi dan Total Produksi Sayuran Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021	II - 6
Tabel 2. 5 Data Luas Panen, Rata-Rata Produksi dan Total Produksi Buah-Buahan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021	II - 7
Tabel 2. 6 Luas Panen, Luas Tanaman dan Total Produksi Tanaman Perkebunan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021	II - 7
Tabel 2. 7 Produksi Daging, Susu dan Telur Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021	II - 8
Tabel 2. 8 Jumlah Penduduk Kabupaten Banyuwangi Pada Setiap kecamatan Tahun 2021	II - 12
Tabel 2. 9 PDRB ADHB Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017-2021 (dalam miliar)	II - 15
Tabel 2. 10 PDRB ADHK Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017-2021 (dalam miliar)	II - 16
Tabel 2. 11 Pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017-2021	II - 18
Tabel 2. 12 Indikator kesejahteraan masyarakat dari perspektif pemerataan	II - 19
Tabel 2. 13 Angka Kemiskinan Kabupaten Banyuwangi	II - 22
Tabel 2. 14 Kinerja Indikator Kinerja Utama	II - 33
Tabel 2. 15 Capaian indikator urusan pendidikan di Kabupaten Banyuwangi.....	II - 39
Tabel 2. 16 Ruas Jalan Menurut Statusnya	II - 47
Tabel 2. 17 Panjang Jalan Negara, Provinsi dan Kabupaten di Kabupaten Banyuwangi	II - 48
Tabel 2. 18 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Banyuwangi	II - 57
Tabel 2. 19 Capaian indikator kinerja program urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil	II - 73

Tabel 2. 20 Indikator program urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kabupaten Banyuwangi	II - 77
Tabel 2. 21: Capaian Indikator Pembangunan Keluarga, Kependudukan.....	II - 79
Tabel 2. 22: Indikator dan capaian indikator urusan perhubungan di Kabupaten Banyuwangi.....	II - 80
Tabel 2. 23: Indikator program urusan komunikasi dan informatika di Kabupaten Banyuwangi.....	II - 84
Tabel 2. 24: Indikator program urusan koperasi, usaha kecil dan menengah di Kabupaten Banyuwangi	II - 87
Tabel 2. 25: indikator program penanaman modal di Kabupaten Banyuwangi ...	II - 88
Tabel 2. 26: Indikator program urusan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Banyuwangi.....	II - 91
Tabel 2. 27: Indikator program urusan statistik di Kabupaten Banyuwangi.....	II - 94
Tabel 2. 28: Indikator program urusan kearsipan di Kabupaten Banyuwangi	II - 99
Tabel 2. 29: Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Banyuwangi	II - 106
Tabel 2. 30: Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Banyuwangi	II - 111
Tabel 2. 31: Indikator urusan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten Banyuwangi.....	II - 112
Tabel 2. 32: Indikator program urusan kelautan dan perikanan di Kabupaten Banyuwangi.....	II - 115
Tabel 2. 33: Indikator program urusan pariwisata di Kabupaten Banyuwangi...	II - 118
Tabel 2. 34: indikator program urusan pertanian di Kabupaten Banyuwangi	II - 121
Tabel 2. 35: Persentase Masyarakat Menggunakan Hak Politiknya	II - 129
Tabel 2. 36: Jenis penggunaan lahan di Kabupaten Banyuwangi.....	II - 134
Tabel 2. 37: Realisasi indikator kinerja tahun 2016-2020.....	II - 135
Tabel 2. 38: Isu Pembangunan menurut urusan pembangunan	II - 143
Tabel 3.1: Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Banyuwangi Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017 - 2021	III - 4
Tabel 3. 2: Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Banyuwangi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017 - 2021	III - 5
Tabel 3. 3: Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi	

Tahun 2017 - 2021	III - 11
Tabel 3. 4: Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018 – 2022.....	III - 27
Tabel 3. 5: Kriteria Tingkat Desentralisasi Fiskal	III - 29
Tabel 3. 6: Nilai Tingkat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Banyuwangi	III - 29
Tabel 3. 7: Kriteria Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.....	III - 30
Tabel 3. 8: Nilai Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Banyuwangi.....	III - 30
Tabel 3. 9: Persentase Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018 -2022	III - 31
Tabel 3. 10: Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018 – 2021	III - 32
Tabel 3. 11: Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018 - 2022	III - 35
Tabel 3. 12: Proporsi Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018 – 2022....	III - 36
Tabel 3.13. Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018 - 2022.....	III - 38
Tabel 3. 14: Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018 - 2021, APBD Tahun 2022, dan Hasil Proyeksi Tahun 2023 - 2024.....	III - 42
Tabel 3. 15: Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018 - 2021, APBD Tahun 2022, dan Hasil Proyeksi Tahun 2023 - 2024.....	III - 45
Tabel 3. 16: Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 - 2020, APBD Tahun 2021, dan Hasil Proyeksi Tahun 2023 – 2024.....	III - 47
Tabel 4. 1: Misi Pembangunan, Tujuan, Sasaran dan Indikator.....	IV - 6
Tabel 4. 2: Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pembangunan RPJMD Kabupaten Banyuwangi Periode Tahun 2021-2026	IV - 7
Tabel 4.3 Keselarasan Kebijakan RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026 dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023	IV - 22
Tabel 4.4 Keselarasan Tema dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023 dengan Provinsi Jawa Timur dan nasional Tahun 2023.....	IV - 23
Tabel 4.5 Keselarasan Target Indikator Sasaran Pembangunan Kabupaten Banyuwangi dengan Sasaran Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2023.....	IV - 24

Tabel 4. 6 Interkonektivitas Isu Strategis dengan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023IV - 25

Tabel 6. 1: Target Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023VI - 1

Tabel 6. 2: Target Capaian Indikator Kinerja Daerah Tahun 2023VI - 2

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1: Hubungan Dokumen RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya...	I - 11
Gambar 2.1: Peta Kabupaten Banyuwangi	II - 1
Gambar 2.2: Jenis Tanah Kabupaten Banyuwangi	II - 4
Gambar 2.3: Luas Wilayah Kabupaten Banyuwangi	II - 5
Gambar 2.4: Populasi Ternak Menurut Jenis Populasi Ternak Menurut Jenis Ternak Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021	II - 8
Gambar 2.5: Peta Rawan Bencana Gunung Berapi Kabupaten Banyuwangi	II - 10
Gambar 2.6: Peta Rawan Bencana Tsunami Kabupaten Banyuwangi	II - 11
Gambar 2.7: Jumlah Penduduk Tahun 2017-2021	II - 12
Gambar 2.8: Piramida penduduk Kabupaten Banyuwangi 2021	II - 14
Gambar 2.9: Indeks Daya Beli	II - 20
Gambar 2.10: Inflasi kabupaten Banyuwangi Tahun 2017-2021	II - 21
Gambar 2.11: Angka Melek Huruf Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017-2021 ...	II - 23
Gambar 2.12: Angka rata-rata lama sekolah.....	II - 24
Gambar 2.13: Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	II - 25
Gambar 2.14: Indeks Pendidikan Tahun 2017-2021	II - 26
Gambar 2.15: Indeks Kesehatan Tahun 2017-2021	II - 27
Gambar 2.16: Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Banyuwangi	II - 28
Gambar 2.17: Angka Kematian Ibu Kabupaten Banyuwangi dan Provinsi Jawa Timur	II - 29
Gambar 2.18: Data kematian ibu yang berkaitam dengan kehamilan, persalinan dan masa nifas.....	II - 29
Gambar 2.19: Angka Kematian Bayi	II - 30
Gambar 2.20: Angka Usia Harapan Hidup	II - 31
Gambar 2.21: Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2017-2021	II - 32
Gambar 2.22: Interpretasi Perhitungan Gap Expectation.....	II - 33
Gambar 2.23: Gap Expectation Pertumbuhan Ekonomi.....	II - 35
Gambar 2.24: Gap Expectation Persentase Penduduk Miskin.....	II - 36
Gambar 2.25: Gap Expectation Indeks Pembangunan Manusia.....	II - 36

Gambar 2.26: Gap Expectation Indeks Kepuasan Masyarakat.....	II - 37
Gambar 2.27: Gap Expectation Gini Rasio	II - 38
Gambar 2.28: Gap Expectation Tingkat Pengangguran Terbuka.....	II - 38
Gambar 2.29: Angka Partisipasi Murni (APM).....	II - 40
Gambar 2.30: Angka partisipasi kasar (APK) di Kabupaten Banyuwangi	II - 41
Gambar 2.31: Akreditasi Sekolah Minimal B	II - 42
Gambar 2.32: Persentase Guru Tersertifikasi Pendidik	II - 43
Gambar 2.33: Prevalensi Balita gizi kurang di Kabupaten Banyuwangi	II - 44
Gambar 2.34: Prevalensi Balita Stunting.....	II - 44
Gambar 2.35: Prevalensi Balita Stunting Kabupaten Banyuwangi dan Jawa Timur Tahun 2017-2021	II - 45
Gambar 2.36: Persentase panjang saluran irigasi 575 kabupaten dalam kondisi baik di Kabupaten Banyuwangi.....	II - 49
Gambar 2.37: Jumlah rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak di Kabupaten Banyuwangi.....	II - 49
Gambar 2.38: Persentase Kecukupan Luasan RTH Publik.....	II - 50
Gambar 2.39: Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan dan perdesaan	II - 51
Gambar 2.40: Jumlah desa/kelurahan yang open defecation free (ODF)/ stop buang air besar sembarangan	II - 52
Gambar 2.41: JRTHLT: Jumlah rumah tangga hunian layak dan terjangkau.....	II - 53
Gambar 2.42: Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja	II - 54
Gambar 2.43: Luasan kawasan Kumuh yang tertangani (Ha).....	II - 54
Gambar 2.44: Tingkat Waktu Tanggap (Response Rate Time) Penanggulangan Bahaya Bencana	II - 56
Gambar 2.45: Persentase Pelanggaran Perda yang Tertangani.....	II - 56
Gambar 2.46: IPMas Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017-2021	II - 58
Gambar 2.47: Capaian Indikator Indeks Rasa Aman	II - 58
Gambar 2.48: Capaian Indikator Presentase angka PMKS	II - 59
Gambar 2.49: Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Banyuwangi	II - 60
Gambar 2.50: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Banyuwangi dan Jawa Timur	II - 61
Gambar 2.51: Jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan ...	II - 62

Gambar 2.52: Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Banyuwangi dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2021	II - 64
Gambar 2.53: Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Banyuwangi dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2021	II - 64
Gambar 2.54: Skor PPH ketersediaan di Kabupaten Banyuwangi.....	II - 66
Gambar 2.55: Skor PPH konsumsi di Kabupaten Banyuwangi	II - 66
Gambar 2.56: Indeks kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Banyuwangi	II - 67
Gambar 2.57: Indeks Kualitas Air Tahun 2017-2021	II - 68
Gambar 2.58: Indeks Kualitas Udara Tahun 2017-2021	II - 69
Gambar 2.59: Indeks Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2017-2021	II - 69
Gambar 2.60: Penanganan Sampah rumah tangga.....	II - 70
Gambar 2.61: Persentase sampah yang dikelola.....	II - 71
Gambar 2.62: Banyaknya Sertifikat Tanah yang Dikeluarkan	II - 72
Gambar 2.63: Persentase pelayanan KTP-el kurang dari 2 jam di Kabupaten Banyuwangi.....	II - 73
Gambar 2.64: Persentase data kependudukan yang valid dan update di Kabupaten Banyuwangi.....	II - 74
Gambar 2.65: Persentase Bayi lahir procot pulang bawa akta di Kabupaten Banyuwangi.....	II - 75
Gambar 2.66: Jumlah desa mandiri di Kabupaten Banyuwangi	II - 76
Gambar 2.67: Indeks Desa Membangun Kabupaten Banyuwangi.....	II - 77
Gambar 2.68: Persentase KB aktif di Kabupaten Banyuwangi	II - 78
Gambar 2.69: Indeks angka kecelakaan lalu lintas (per 100.000 penduduk) di Kabupaten Banyuwangi	II - 81
Gambar 2.70: Persentase Pengguna Jasa Angkutan Penumpang Umum di Bidang Transportasi Darat di Kabupaten Banyuwangi.....	II - 82
Gambar 2.71: Persentase panjang jalan terlayani LPJU di Kabupaten Banyuwangi	II - 82
Gambar 2.72: Persentase pengembangan prasarana dan fasilitas perhubungan di Kabupaten Banyuwangi	II - 83
Gambar 2.73: Persentase infrastruktur IT yang berfungsi baik	II -84
Gambar 2.74: Jumlah informasi pemerintah daerah yang tersebarluaskan di Kabupaten Banyuwangi	II - 85

Gambar 2.75: Persentase aplikasi e-government yang berfungsi baik di Kabupaten Banyuwangi.....	II - 86
Gambar 2.76: Jumlah minat investasi di Kabupaten Banyuwangi.....	II - 89
Gambar 2.77: Investasi PMA dan PMDN Tahun 2017-2021	II - 90
Gambar 2.78: Persentase kesesuaian pelayanan investasi dan perizinan dengan SOP yang ditetapkan.....	II - 90
Gambar 2.79: Persentase pemuda terlatih yang menjadi wirausaha mandiri di Kabupaten Banyuwangi	II - 92
Gambar 2.80: Persentase pemuda terlatih di Kabupaten Banyuwangi	II - 93
Gambar 2.81: Persentase anggota pramuka yang terfasilitasi kegiatannya di Kabupaten Banyuwangi	II - 93
Gambar 2.82: Persentase pengamanan informasi daerah yang terselenggara baik....	II - 95
Gambar 2.83: Jumlah budaya lokal yang dikembangkan menjadi daya tarik wisata di Kabupaten Banyuwangi	II - 96
Gambar 2.84: Persentase jumlah pengunjung perpustakaan di Kabupaten Banyuwangi.....	II - 97
Gambar 2.85: Indeks Literasi Masyarakat.....	II - 98
Gambar 2.86: Indeks Tingkat Kegemaran Membaca masyarakat	II - 98
Gambar 2.87: Persentase arsip statis dan dinamis yang dikelola di Kabupaten Banyuwangi.....	II - 100
Gambar 2.88: Persentase arsip/ dokumen daerah dalam kondisi baik di Kabupaten Banyuwangi.....	II - 100
Gambar 2.89: Persentase terpenuhinya aspek kualitas dalam dokumen perencanaan	II - 101
Gambar 2.90: Persentase SKPD yang tercapai target programnya di Kabupaten Banyuwangi.....	II - 103
Gambar 2.91: Persentase data dan informasi perencanaan pembangunan yang dimanfaatkan sebagai policy brief di Kabupaten Banyuwangi.....	II - 104
Gambar 2.92: Pendapatan Asli Daerah.....	II - 105
Gambar 2.93: TPD: Total penerimaan pajak pemerintah daerah di Kabupaten Banyuwangi.....	II - 106
Gambar 2.94: Persentase pelaksanaan ujian dinas dan seleksi kompetensi jabatan di Kabupaten Banyuwangi	II - 107

Gambar 2.95: Persentase data dan informasi perencanaan pembangunan hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan sebagai policy brief di Kabupaten Banyuwangi.....	II - 108
Gambar 2.96: Persentase raperda yang disahkan menjadi perda tepat waktu di Kabupaten Banyuwangi	II - 109
Gambar 2.97: Indeks kepuasan masyarakat (IKM) di Kabupaten Banyuwangi.	II - 110
Gambar 2.98: Hasil SAKIP di Kabupaten Banyuwangi	II - 111
Gambar 2.99: Persentase laporan keuangan SKPD yang sesuai SAP dalam mendukung tercapainya WTP pada wilayah irban I	II - 113
Gambar 2.100: Persentase laporan keuangan SKPD yang sesuai SAP dalam mendukung tercapainya WTP pada wilayah irban II	II - 114
Gambar 2.101: Persentase laporan keuangan SKPD yang sesuai SAP dalam mendukung tercapainya WTP pada wilayah irban III	II - 114
Gambar 2.102: Produksi perikanan di Kabupaten Banyuwangi	II - 116
Gambar 2.103: Cakupan bina kelompok nelayan di Kabupaten Banyuwangi ...	II - 116
Gambar 2.104: Produksi perikanan kelompok nelayan di Kabupaten Banyuwangi	II - 117
Gambar 2.105: Length of stay di Kabupaten Banyuwangi	II - 119
Gambar 2.106: Jumlah wisatawan mancanegara di Kabupaten Banyuwangi...	II - 119
Gambar 2. 107: Jumlah kunjungan wisatawan nusantara di Kabupaten Banyuwangi .	II - 120
Gambar 2.108: Produksi daging di Kabupaten Banyuwangi	II - 122
Gambar 2.109: Produksi telur di Kabupaten Banyuwangi.....	II - 123
Gambar 2.110: Produksi Susu di Kabupaten Banyuwangi.....	II - 124
Gambar 2.111: Produktivitas padi atau bahan pangan utama lainnya per hektar di Kabupaten Banyuwangi	II - 124
Gambar 2.112: Jumlah realisasi ekspor di Kabupaten Banyuwangi	II - 125
Gambar 2.113: Rata-rata persentase kenaikan harga komoditas di Kabupaten Banyuwangi.....	II - 126
Gambar 2.114: Pertumbuhan sektor industri olahan dalam PDRB di Kabupaten Banyuwangi.....	II - 127
Gambar 2.115: Persentase peningkatan nilai penjualan (Omset) IKM di Kabupaten Banyuwangi.....	II - 127

Gambar 2.116: Persentase penempatan transmigran di Kabupaten Banyuwangi	II - 128
Gambar 2.117: Potensi Konflik Kabupaten Banyuwangi	II - 130
Gambar 2.118: Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita di Kabupaten Banyuwangi.....	II - 131
Gambar 2.119: Persentase pengeluaran konsumsi non pangan per kapita di Kabupaten Banyuwangi	II - 131
Gambar 2.120: ICOR Kabupaten Banyuwangi tahun 2017-2021.....	II - 132
Gambar 2.121: Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kabupaten Banyuwangi	II - 133
Gambar 2.122: Jenis penggunaan lahan di Kabupaten Banyuwangi.....	II - 134
Gambar 3. 1: Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2017 - 2021.....	III - 2
Gambar 3. 2: Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kabupaten Banyuwangi dengan Daerah Sekitar Tahun 2017 - 2021	III - 3
Gambar 3. 3: Klasifikasi Sektor PDRB Kabupaten Banyuwangi Berdasarkan Tipologi Klassen Tahun 2021	III - 7
Gambar 3. 4: Perkembangan Inflasi (Tahun Kalender) Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2017 - 2021	III - 9
Gambar 3. 5: Perkembangan Persentase Kemiskinan Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2017 - 2021	III - 12
Gambar 3. 6: Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 - 2021	III - 13
Gambar 3. 7: Persentase Kemiskinan Berdasarkan Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2021	III - 14
Gambar 3. 8: Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2017 - 2021	III - 15
Gambar 3. 9: Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Banyuwangi dengan Daerah Sekitar Tahun 2017 - 2021.....	III - 16
Gambar 3. 10: Perkembangan Gini Rasio Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2017 - 2021	III - 17

Gambar 3. 11: Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Banyuwangi dengan Daerah Sekitar Tahun 2017 – 2021 III - 18

Gambar 4. 1: Linieritas Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan ProgramIV - 1

Gambar 4. 2: Cascading Pencapaian Tujuan 1IV - 2

Gambar 4. 3: Cascading Pencapaian Tujuan 2.....IV - 4

Gambar 4. 4: Cascading Pencapaian Tujuan 3.....IV - 5

Gambar 4.5 Tema Pembangunan dan Prioritas Lima Tahunan Kabupaten Banyuwangi.....IV - 16

Gambar 4.6 Tahapan Perumusan Tema dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023.....IV - 20



Kabupaten
Banyuwangi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD, adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RPJPD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Hal-hal yang menjadi perhatian dalam menyusun RKPD ini juga mempertimbangkan hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, isu-isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan RKPD serta sinergitas antar sektor dan antar wilayah.

Rencana pembangunan tahunan daerah, yang selanjutnya disebut rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RPJPD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pada struktur dan tatanan pembangunan tahunan, dokumen perencanaan daerah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. RKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) ke dalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah.
2. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh organisasi perangkat daerah (PD) dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-Perangkat Daerah).
3. RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan penentuan Prioritas

dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan APBD.

4. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.

Mengingat kedudukan strategis RKPD, perhatian yang besar dan komprehensif seyogyanya diberikan sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen RKPD. Proses yang terdiri dari beberapa tahapan dan cakupan yang komprehensif dimaksudkan agar dapat menghasilkan dokumen RKPD yang berkualitas. Berkualitas dalam hal ini adalah telah memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya.
2. Program prioritas dalam RKPD harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus konsisten dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome) untuk program dan indikator kinerja keluaran (output) untuk kegiatan, yang bersifat realistis dan terukur.
5. Program dan kegiatan dalam RKPD harus dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Setiap tahunnya pemerintah daerah menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai bentuk dokumen perencanaan jangka pendek. RKPD disusun sebagai penjabaran arah kebijakan tahunan selama 5 tahun yang ada di dalam RPJMD, sesuai dengan program tahunan yang ada didalam RPJMD. RKPD berisi rencana kerja dari seluruh Perangkat Daerah (PD) pada tahun perencanaan, yang didasarkan pada arahan dan program prioritas yang telah dirumuskan pada Rancangan Awal RKPD, sehingga masing-masing PD memiliki arahan/ tema pembangunan yang jelas setiap tahunnya. Kedudukan RKPD Kabupaten Banyuwangi tahun 2023 dalam periode kedua RPJMD 2021-2026 Kabupaten Banyuwangi. Proses penyusunan RKPD melalui beberapa tahapan:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan musrenbang;

- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Dalam proses penyusunan Penyusunan RKPD dimulai pada minggu pertama bulan Desember 2 (dua) tahun sebelum tahun rencana. Penetapan terakhir RKPD paling lambat akhir bulan Juni. Maka keharusan, kepatuhan dan ketaatan Pemerintah Daerah untuk menyusun RKPD tepat waktu, tepat sasaran sesuai peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah.

Keterkaitan RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya maupun dengan dokumen anggaran, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, fungsi dan kedudukan RPJMD adalah menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD. Muatan dalam RPJMD akan dijabarkan secara operasional per tahun selama lima tahun menjadi prioritas perencanaan tahunan daerah yang dituangkan ke dalam RKPD yang berfungsi sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja (RENJA-PD) yang tetap mengacu pada RENSTRA Perangkat Daerah.

RKPD dalam menentukan prioritas memperhatikan telaah pada RPJMD Kabupaten Banyuwangi Periode 2021-2026 , selain itu perumusan tema pembangunan pada RKPD juga harus sinkron dengan agenda pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2023, agenda pembangunan provinsi dalam RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2023, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang penyusunan RKPD Tahun 2023.

Penyusunan RKPD Kabupaten Banyuwangi memperhatikan pendekatan yang berorientasi substansi proses dan substansi. Pendekatan proses meliputi teknokratik, partisipatif; politis; dan atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*) sedangkan pendekatan substansi meliputi holistik-tematik, integratif; dan spasial. Keseluruhan pendekatan terinternalisasi pada dokumen RKPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023.

Pendekatan teknokratis dilakukan dengan metode dan kerangka berpikir ilmiah yang terepresentasikan pada analisis trend pada permasalahan yang dilakukan oleh perangkat daerah. pendekatan partisipatif, visi dan misi kepala daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD serta pada RKPD memperhatikan Pokok-pokok Pokiran DPRD. Pendekatan Partisipatif memberikan gambaran usulan masyarakat pada tahapan Musrenbang, serta pendekatan atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*) yang menyelaraskan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah Kabupaten/Kota, Daerah provinsi, hingga nasional.

Pendekatan holistik-tematik mempertimbangkan isu/permasalahan dari berbagai urusan dan unsur. Pendekatan integrative dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah. Pendekatan spasial sebagaimana dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ini berlandaskan pada beberapa dasar hukum seperti dibawah ini:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan-Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 Nomor 19. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
14. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
27. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 4 Tahun 2016) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir yakni Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 259);
28. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225)
29. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
31. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

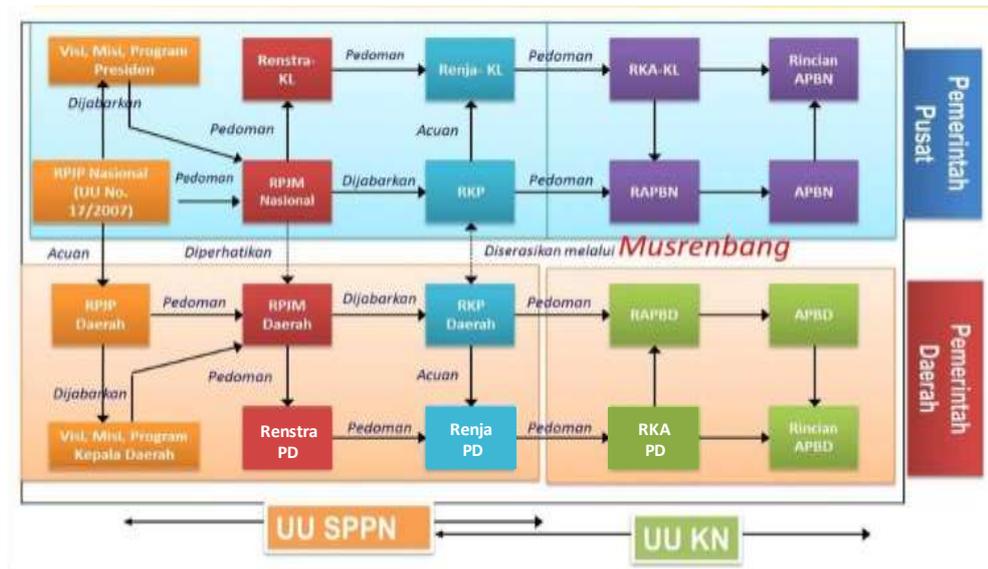
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
35. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 / PMK.07 / 2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa ; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
41. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
42. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
43. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025; (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
44. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
45. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94);
46. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024
47. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Banyuwangi tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032; (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 9/E);

49. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Nomor 10).
50. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2021 tentang RPJMD 2021-2026 tentang Rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, maka keberadaan RKPD Tahun 2023 juga sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun 2023. RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan jangka menengah daerah, yang dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana tahunan. Rencana kerja tahunan pada tingkat nasional dinamakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan pada tingkat daerah disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Hubungan Renstra K/L dengan RKP dan Renstra Perangkat Daerah dengan RKPD adalah bersifat mengikat yaitu penyusunan rencana tahunan harus berpedoman pada rencana lima tahunan. Sedangkan hubungan antara Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah adalah bersifat konsultatif yaitu penyusunan Renstra Perangkat Daerah harus memperhatikan Renstra K/L. Mengingat adanya keselarasan sistem perencanaan dan sistem penganggaran, maka RKPD harus dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu penyusunan RKPD tersebut, perlu dilakukan secara lebih rinci dengan tekanan utama pada penetapan program dan kegiatan. Penetapan program dan kegiatan tersebut harus pula mencakup indikator dan target kinerja serta perkiraan kebutuhan dana untuk mendukung pelaksanaan masing-masing program dan kegiatan. Hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1. 1 : Hubungan Dokumen RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023 adalah untuk menjamin sinkronisasi dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. RKPD Tahun 2023 merupakan pedoman dalam penyusunan RAPBD dan merupakan acuan dalam perumusan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) maupun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023. Selanjutnya RKPD tersebut juga dijadikan dasar untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

Tujuan disusunnya RKPD adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi semua pelaku pembangunan di Kabupaten Banyuwangi, dalam rangka mewujudkan pencapaian indikator dan target kinerja prioritas/ agenda/ program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023 - 2026 yang akhirnya ditujukan untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Adapun sistematika dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menjelaskan pengertian ringkas mengenai RKPD, proses penyusunan dan kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode penyusunan RPJMD, keterikatan dengan dokumen RPJMD, Renstra PD, Renja PD dan tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Menyebutkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perencanaan dan penganggaran serta tata cara penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan Musrenbang.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan secara ringkas hubungan dokumen RKPD dengan RPJMD Kabupaten Banyuwangi, RKPD Provinsi Jawa Timur, serta RKP nasional.

1.4. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang maksud, tujuan, dan sasaran penyusunan dokumen RKPD.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Subbab ini mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menguraikan tentang evaluasi pelaksanaan RKPD tahun yang lalu selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai acuan.

2.1 Kondisi Umum Daerah

Bagian ini menjelaskan dan menyajikan secara umum mengenai kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, evaluasi pelaksanaan RPJMD tahun berjalan, dan permasalahan.

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Bagian ini berisi kondisi umum geografis mengenai kondisi geografi dan demografi daerah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Subbab ini menjelaskan kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan.

Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut dijelaskan tentang fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, fokus seni budaya dan olahraga.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Berisi kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek pelayanan umum. Lebih lanjut dijelaskan tentang fokus urusan layanan wajib dan pilihan, serta fungsi penunjang urusan pemerintahan.

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Subbab ini berisi kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek daya saing daerah. Lebih lanjut dijelaskan tentang fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas wilayah/ infrastruktur, fokus iklim berinvestasi, dan fokus sumber daya manusia.

2.2 **Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan**

Bagian ini merupakan telaahan terhadap hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah. Evaluasi meliputi seluruh urusan baik wajib maupun pilihan pemerintah daerah khususnya menyangkut realisasi capaian kinerja program tahun lalu.

2.3 **Permasalahan Pembangunan Daerah**

Bagian ini mengemukakan beberapa permasalahan yang berhasil diidentifikasi baik yang berhubungan dengan pelaksanaan prioritas pembangunan daerah maupun program-program lain yang mendapatkan perhatian dalam rangka identifikasi permasalahan.

2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

Menjelaskan tentang permasalahan daerah yang dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD di tahun rencana serta prioritas lain dari kebijakan nasional/ provinsi yang bersifat mandatori.

2.3.2. Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah. Identifikasi permasalahan menjelaskan apa yang menjadi masalah dimasa lalu dan pada masa mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan. Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah harus konsisten dengan permasalahan yang dijabarkan dalam permasalahan perangkat daerah pada Renja Perangkat Daerah.

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendanaan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perkonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Bagian ini mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), juga kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen RPJMD provinsi. Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program, serta permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Menguraikan kebijakan yang akan ditempuh pemerintah daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Banyuwangi

Pada Subbab ini diuraikan substansi pembangunan Kabupaten Banyuwangi secara makro yang diturunkan dari RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 - 2026.

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023

Pada Subbab ini diuraikan keterkaitan antara pembangunan nasional, dan provinsi terhadap RKPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023. Selain itu pada

Subbab ini juga diuraikan secara lebih detail terkait tematik beserta intervensi pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP



Kabupaten
Banyuwangi

BAB II GAMBARAN UMUM

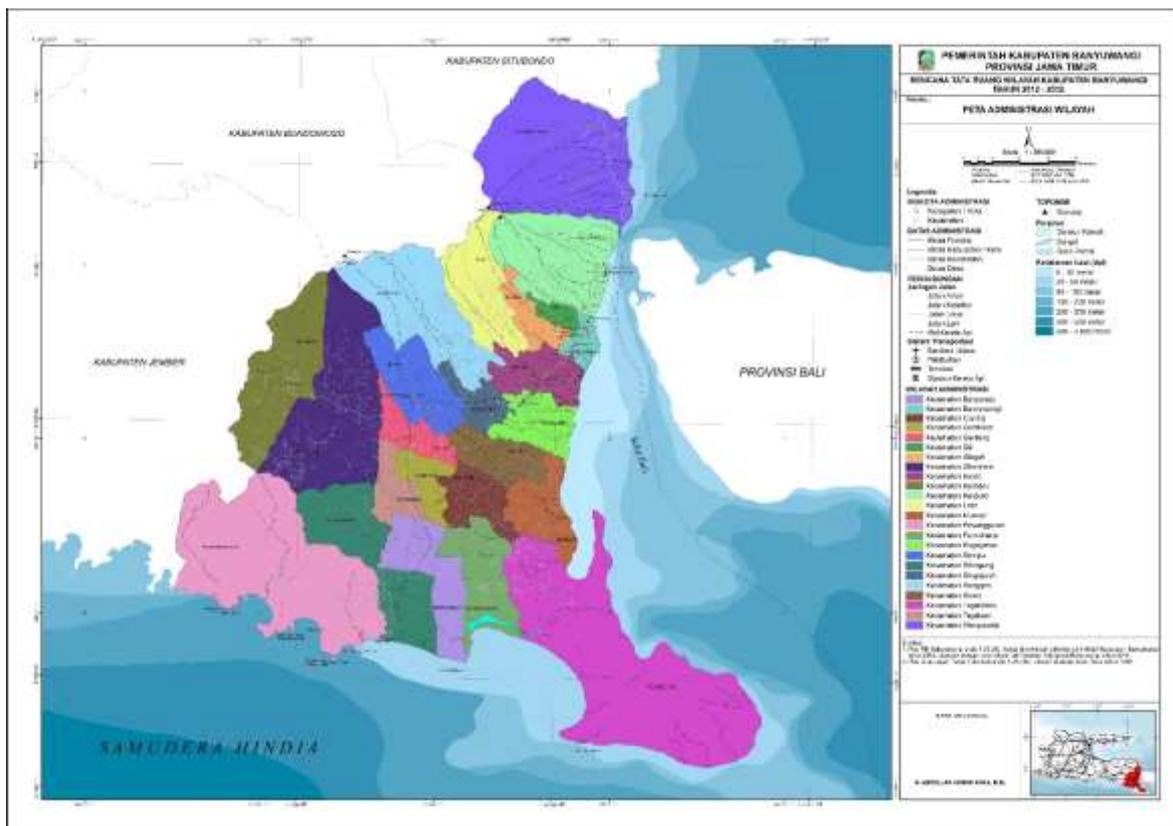
KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1. Luas Wilayah dan Batas Wilayah

Banyuwangi merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang terletak di bagian timur Pulau Jawa. Kabupaten Banyuwangi terletak diujung timur Provinsi Jawa Timur. Secara geografis, Kabupaten Banyuwangi terletak di Ujung Timur Pulau Jawa pada koordinat antara $7^{\circ} 43' - 8^{\circ} 46'$ Lintang Selatan dan $113^{\circ} 53' - 114^{\circ} 38'$ Bujur Timur.



Gambar 2.1 Peta Kabupaten Banyuwangi

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032

Secara geografis Kabupaten Banyuwangi berbatasan dengan Kabupaten Situbondo di sebelah Utara, Samudra Indonesia di sebelah Selatan, Kabupaten

Bondowoso di sebelah Barat, dan Selat Bali di sebelah Timur. Secara geografis Kabupaten Banyuwangi terletak di ujung timur Pulau Jawa. Wilayah daratannya terdiri atas dataran tinggi berupa pegunungan yang merupakan daerah penghasil produk perkebunan; dan dataran rendah dengan berbagai potensi produk hasil pertanian serta daerah sekitar garis pantai yang membujur dari arah utara ke selatan yang merupakan daerah penghasil berbagai biota laut. Luas wilayah Kabupaten Banyuwangi sekitar 5.782,50 km² yang merupakan kabupaten terluas di Provinsi Jawa Timur.

Tabel 2.1 Wilayah Administrasi Kabupaten Banyuwangi

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan	No	Kecamatan	Desa	Kelurahan
1	Pesanggaran	5	-	14	Rogojampi	10	-
2	Siliragung	5	-	15	Kabat	14	-
3	Bangorejo	7	-	16	Singojuruh	11	-
4	Purwoharjo	8	-	17	Sempu	7	-
5	Tegaldlimo	9	-	18	Songgon	9	-
6	Muncar	10	-	19	Glagah	10	2
7	Cluring	9	-	20	Licin	8	-
8	Gambiran	6	-	21	Banyuwangi	-	18
9	Tegalsari	6	-	22	Giri	2	4
10	Glenmore	7	-	23	Kalipuro	5	4
11	Kalibaru	6	-	24	Wongsorejo	12	-
12	Genteng	5	-	25	Blimbingsari	10	-
13	Srono	10	-	Jumlah		189	28

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022

Kabupaten Banyuwangi secara administratif terbagi menjadi 25 kecamatan dan 189 desa dan 28 kelurahan. Di Kabupaten Banyuwangi terdapat Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) yang merupakan kawasan strategis perkotaan Banyuwangi meliputi seluruh kelurahan di Kecamatan Banyuwangi, beberapa kelurahan di Kecamatan Giri, beberapa kelurahan di Kecamatan Glagah, beberapa kelurahan/desa di Kecamatan Kabat, dan beberapa kelurahan/desa di Kecamatan Kalipuro. Dari 25 kecamatan yang ada, terdapat satu kecamatan yang memiliki jumlah kelurahan terbanyak yaitu Kecamatan Banyuwangi dengan 18 kelurahan. Tiga kecamatan lain dengan jumlah desa terbanyak antara lain Kecamatan Kabat terdiri dari 14 Desa, Kecamatan Wongsorejo terdiri dari 12 Desa, dan Kecamatan Singojuruh terdiri dari 11 Desa.

2.1.1.2. Topografi

Topografi wilayah daratan Kabupaten Banyuwangi bagian barat dan utara pada umumnya pegunungan dan bagian selatan sebagian besar dataran rendah. Tingkat kemiringan rata-rata pada wilayah bagian barat dan utara 40°, dengan rata-rata curah

hujan lebih tinggi bila dibanding dengan bagian wilayah lainnya. Daratan rendah sebagian besar mempunyai tingkat kemiringan kurang dari 15°, dengan rata-rata curah hujan cukup memadai. Ketinggian tanah di Kabupaten Banyuwangi mencapai 0–2.500 meter dari permukaan laut dan berdasarkan klasifikasi Wilayah Tanah Usaha (WTU) ketinggian tersebut dibedakan atas:

- a. Ketinggian 0-50 meter diatas permukaan laut (mdpl), merupakan wilayah dengan dataran rendah, ataupun wilayah yang berada di sekitar kawasan pantai. Wilayah yang berada pada ketinggian tersebut meliputi sebagian dari Kecamatan Wongsorejo, Kalipuro, Giri, Banyuwangi, Kabat, Blimbingsari, Rogojampi, Muncar, Purwoharjo, Tegaldlimo, Bangorejo, Siliragung, Pesanggaran;
- b. Ketinggian 50-100 meter diatas permukaan laut (mdpl) meliputi sebagian dari Kecamatan Wongsorejo, Kalipuro, Giri, Glagah, Licin, Kabat, Rogojampi, Srono, Cluring, Purwoharjo, Bangorejo, Siliragung dan Pesanggaran;
- c. Ketinggian 100-500 meter diatas permukaan laut (mdpl), meliputi sebagian dari Kecamatan Wongsorejo, Kalipuro, Giri, Glagah Licin, Kabat, Cluring, Singojuruh, Rogojampi, Genteng, Sempu, Songgon, Glenmore, Kalibaru, Tegaldlimo, Siliragung, Pesanggaran, Bangorejo, Purwoharjo, Gambiran, Tegalsari;
- d. Ketinggian 500-1000 meter diatas permukaan laut (mdpl) merupakan wilayah berbukit yang meliputi sebagian Kecamatan Wongsorejo, Kalipuro, Glagah, Licin, Songgon, Sempu, Glenmore, Kalibaru, Siliragung, Pesanggaran;
- e. Ketinggian 1000-2000 meter diatas permukaan laut (mdpl) merupakan daerah pegunungan terletak di sebagian Kecamatan Wongsorejo, Kalipuro, Licin, Songgon, Glenmore, dan Kalibaru;
- f. Ketinggian diatas 2000 meter diatas permukaan laut (mdpl) meliputi sebagian Kecamatan Wongsorejo, Kalipuro, Licin, Songgon, Glenmore dan Kalibaru.

2.1.1.3. Geologi

Kondisi geologi setiap wilayah bervariasi memiliki peran bagi terbentuknya suatu bentukan lahan di wilayah tersebut. Jenis Tanah di Kabupaten Banyuwangi berdasarkan struktur geologi terdapat berbagai susunan/struktur geologi seperti pada tabel 2.2 berikut ini:

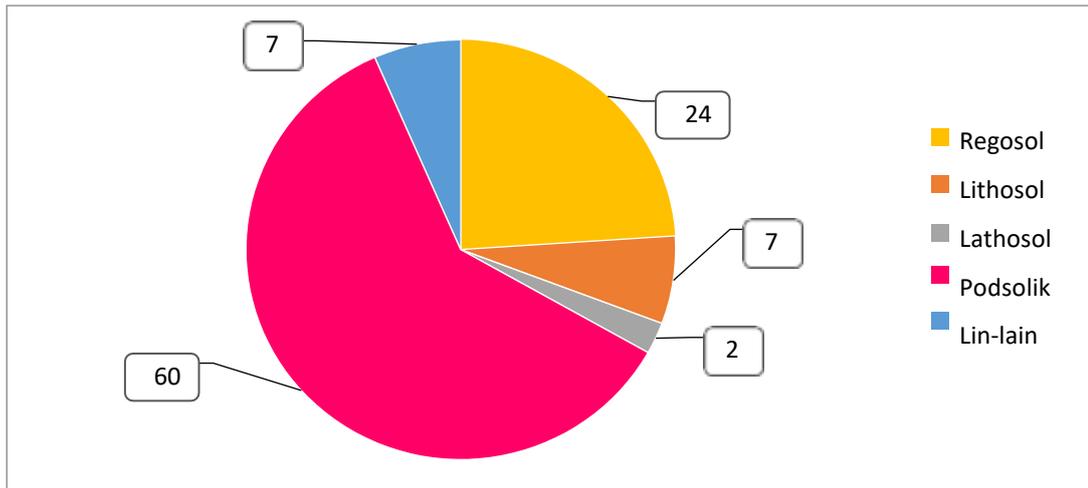
Tabel 2.2 Luas Tanah Berdasarkan Struktur Geologi Kabupaten Banyuwangi

Struktur Geologi	Luas (Ha)	(%)
Aluvium	134.525,00	23,27
Hasil Gunung Api kuartir muda	170.310,50	29,43
Hasil Gunung Api kuartir tua	59,283.00	10,26
Andesit	47.417,75	8,20

Struktur Geologi	Luas (Ha)	(%)
Miosen falses semen	89.177,25	15,43
Miosen falsen batu gamping	77.536,50	13,41

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032

Adapun keadaan jenis tanah di Kabupaten Banyuwangi dapat terlihat pada tabel berikut:



Gambar 2.2: Jenis Tanah Kabupaten Banyuwangi

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032

Dari data di atas dapat diketahui bahwa jenis tanah di Kabupaten Banyuwangi terdiri dari tanah regosol, litosol, latosol, podsolik dan gambut. Sebagian besar komposisi jenis tanah Kabupaten Banyuwangi didominasi oleh Tanah Podsolik sebesar 60%, Tanah Regosol 24%, Lithosol 7%, Gambut 7% dan jenis tanah Lathosol hanya 2% dari luas area di Kabupaten Banyuwangi.

2.1.1.4. Klimatologi

Kabupaten Banyuwangi terletak di selatan equator yang dikelilingi oleh Laut Jawa, Selat Bali dan Samudra Indonesia dengan iklim tropis yang terbagi menjadi 2 musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau.

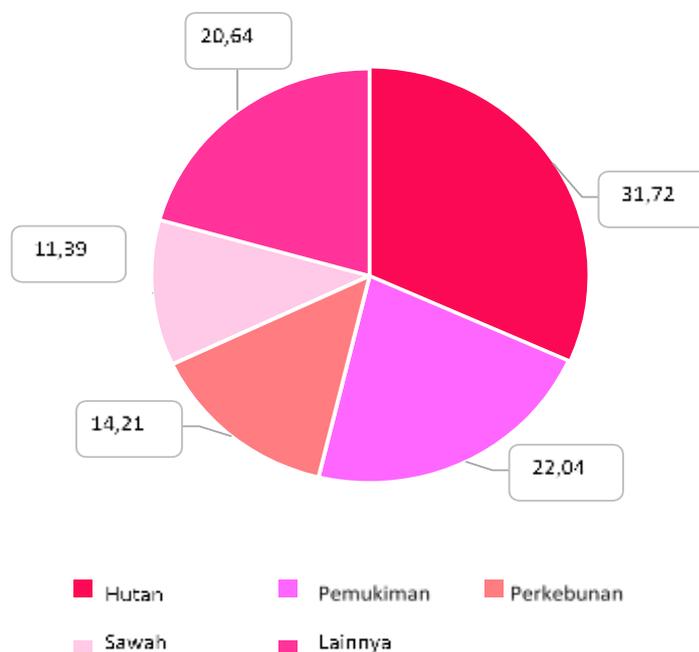
1. Rata-rata curah hujan selama tahun 2020 sebesar 133.7 mm. Curah hujan terendah terjadi pada Bulan April yaitu 40.7 mm, sedangkan curah hujan tertinggi terjadi pada Bulan Mei mencapai 232.4 mm;
2. Persentase rata-rata penyinaran matahari pada tahun 2020 mencapai 71.17%, terendah pada Bulan Desember sebesar 42% dan tertinggi pada Bulan September mencapai 89%;
3. Rata-rata kelembaban udara pada tahun 2020 mencapai 78.92 %. Kelembaban terendah terjadi pada Bulan Januari dengan rata-rata kelembaban udara sebesar

74%. Sebaliknya kelembaban tertinggi terjadi pada Bulan Mei, Oktober dan Desember dengan besaran 81%;

4. Rata-rata suhu udara terendah terjadi pada Bulan Juli 2020 sebesar 30 derajat celcius. Sedang tertinggi pada Bulan Januari sebesar 34.9 derajat celcius.

2.1.1.5. Penggunaan Lahan

Luas Wilayah Kabupaten Banyuwangi adalah sebesar $\pm 5.782,50 \text{ km}^2$. Wilayah Kabupaten Banyuwangi sebagian besar didominasi oleh kawasan hutan dibandingkan kawasan lainnya. Area kawasan hutan mencapai 183.396,34 ha atau sekitar 31,62 %, daerah persawahan sekitar 66.152 ha atau 11,44 %, perkebunan dengan luas sekitar 82.143,63 ha atau 14,21 %, sedangkan yang dimanfaatkan sebagai pemukiman mencapai luas sekitar 127.454,22 ha atau 22,04 %.



Gambar 2.3 Luas Wilayah Kabupaten Banyuwangi

Sumber: Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032

2.1.1.6. Potensi Pengembangan Wilayah

a. Pertanian

Potensi pertanian tanaman bahan makanan terbesar di Banyuwangi adalah produksi tanaman padi. Kabupaten Banyuwangi juga termasuk dalam lumbung padi di Provinsi Jawa Timur. Produksi padi Banyuwangi pada tahun 2021 adalah sebanyak 784.762 ton. Produksi tanaman pangan di Kabupaten Banyuwangi berikutnya yang dominan adalah jagung, dengan produksi sebanyak 252.631 ton. Potensi pertanian tanaman bahan makanan di Kabupaten Banyuwangi sangat besar, namun perkembangan potensi tersebut saat ini dan kedepan menghadapi beberapa tantangan yaitu alih fungsi lahan menjadi lahan pemukiman serta industri, alih fungsi komoditas dari pertanian

tanaman pangan ke pertanian hortikultura karena faktor keuntungan yang diperoleh petani hortikultura dirasa lebih besar daripada pertanian tanaman pangan.

Tabel 2.3 Data Luas Panen, Rata-Rata Produksi dan Total Produksi Tanaman Bahan Makanan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021

No	Jenis Tanaman	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Kw/Ha)*	Produksi (Ton)
1	Padi Sawah	118.319	68,94	784.762
2	Padi Ladang	1.168	60,17	7.028
3	Jagung	36.938	68,39	252.631
4	Kedelai	5.936	20,17	11.971
5	Kacang Tanah	403	16,38	660
6	Kacang Hijau	638	9,39	599
7	Ubi Kayu	461	229,28	10.570
8	Ubi Jalar	865	219,31	18.970

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi, 2022

Ket: *) Data Sementara

Produksi sayuran di yang dihasilkan di Kabupaten Banyuwangi meliputi terong, buncis, kubis, kacang panjang, tomat, bawang merah dan cabai sebagai komoditas. Komoditas terbesar adalah pada tanaman cabai yaitu pada komoditas cabai kecil dan cabai besar. Pada tahun 2021 hasil produksi cabai kecil di Kabupaten Banyuwangi mencapai 169.059 kuintal dan hasil produksi cabai besar mencapai 90.970 kuintal.

Tabel 2.4 Data Luas Panen, Rata-Rata Produksi dan Total Produksi Sayuran Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021

No	Jenis Sayuran	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Kw / Ha)*	Produksi (kuintal)
1	Cabe Besar	1.642	55,40	90.970
2	Cabe Kecil	4.842	34,92	169.059
3	Bawang merah	717	85,65	61.414
4	Tomat	320	88,95	28.463
5	Kacang Panjang	252	54,12	13.638
6	Kubis	36	179,19	6.451
7	Buncis	89	113,06	10.062
8	Terong	208	130,20	27.082

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi, 2022

Ket: *) Data Sementara

Kabupaten Banyuwangi juga memiliki potensi unggulan pertanian pada produksi buah-buahan. Salah satu buah yang terkenal dan menjadi perhatian adalah buah naga. Meskipun sebenarnya kuantitas produksi tidak sebanyak buah-buahan yang lain. Produksi buah terbanyak adalah buah pisang dengan jumlah produksi sebanyak 2.754.107 kuintal, sedangkan buah manggis menjadi komoditas dengan produksi terbanyak kedua setelah pisang yaitu sebanyak 2.441.286 kuintal.

Tabel 2.5 Data Luas Panen, Rata-Rata Produksi dan Total Produksi Buah-Buahan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021

No	Komoditas	Luas Panen (Ha)	Produksi (kuintal)	Produktivitas (Kw/Ha)
1	Semangka	21.208	303.971	14,33
2	Melon	218	57.595	264,20
3	Manggis	914	2.441.286	2670,99
4	Jeruk Siam	102.139	833.909	8,16
5	Durian	916	1.000.585	1092,34
6	Mangga	4.641	74.731	16,10
7	Buah Naga	25.123	1.343.387	53,47
8	Rambutan	1.605	34.540	21,52
9	Pisang	25.411	2.754.107	108,38

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi, 2022

b. Perkebunan

Produk olahan kopi merupakan salah satu produk yang cukup terkenal di Kabupaten Banyuwangi. Pada tahun 2021 produksi kopi di Kabupaten Banyuwangi mampu menyentuh angka 10.575 Ton. Komoditas tertinggi pada tahun 2021 adalah tanaman produksi kelapa kopra sebesar 33.719 ton dan kelapa deres sebesar 20.099 ton.

Tabel 2.6 Luas Panen, Luas Tanaman dan Total Produksi Tanaman Perkebunan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021

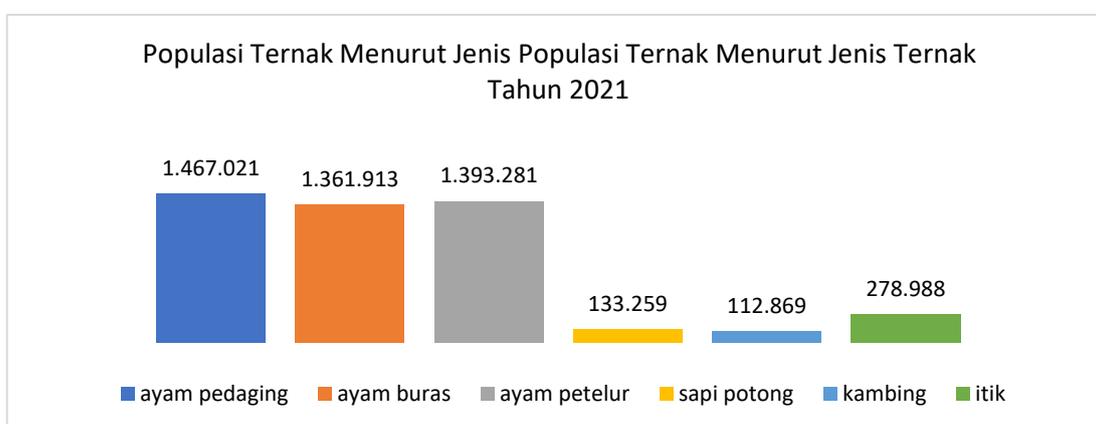
No	Jenis Tanaman	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Kw / Ha)	Produksi (Ton)
1	Tebu	108	730,00	7.884
2	Kopi	9690	10,91	10.575
3	Kakao	443	7,72	342
4	Cengkeh	613	3,15	193
5	Kelapa Kopra	21427	15,74	33.719
6	Kelapa Deres	2176	92,37	20.099

No	Jenis Tanaman	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Kw / Ha)	Produksi (Ton)
7	Kapuk Randu	64	3,59	23
8	Abacca	0	0	0
9	Karet	0	0	0

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi, 2022

c. Peternakan

Kabupaten Banyuwangi memiliki potensi dalam berbagai jenis hewan ternak. Namun bila berbicara tentang konsentrasi jumlah populasi ternak pada tahun 2021 maka yang mendominasi adalah ayam pedaging sebesar 1.467.021 ekor diikuti dengan ayam petelur sebanyak 1.361.281 ekor. Ada pula ternak lain yang terdapat di Kabupaten Banyuwangi seperti ayam buras, sapi potong, kambing, itik, dll.



Gambar 2. 4 Populasi Ternak Menurut Jenis Ternak Tahun 2021

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi, 2022

Tabel 2.7 Produksi Daging, Susu dan Telur Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021

No	Jenis	Produksi	Produksi	Produksi	Produksi	Produksi
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Sapi Potong(Kg)	2.789,671	2.289,729	2.824.891	1.886.986	3.633.596
2	Ayam Pedaging (Kg)	3.468,020	3.819,864	4.071.540	1.280.542	6.597.125
3	Ayam Kampung (Kg)	2.337,166	1.947,029	2.108.013	166.279	1.415.820
4	Susu (Kg)	1.673,452	1.397,635	1.392,753	1.738.537	1.564.915
5	Telur (Kg)	9.649,731	9.619,483	10.410.254	14.585.935	17.104.440

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi, 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat produksi hasil peternakan di Kabupaten Banyuwangi selama 5 (lima) tahun terakhir bergerak fluktuatif. Produksi hasil peternakan di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2021 yang meningkat signifikan yaitu pada produksi sapi potong sebesar 3.633.596 dari tahun sebelumnya sebesar 1.886.986. selanjutnya adalah ayam pedaging meningkat menjadi sebanyak 6.597.125 kg, ayam pedaging sebanyak 1.415.820 dan produksi telur sebanyak 17.104.440 dari tahun sebelumnya sebesar 14.585.935.

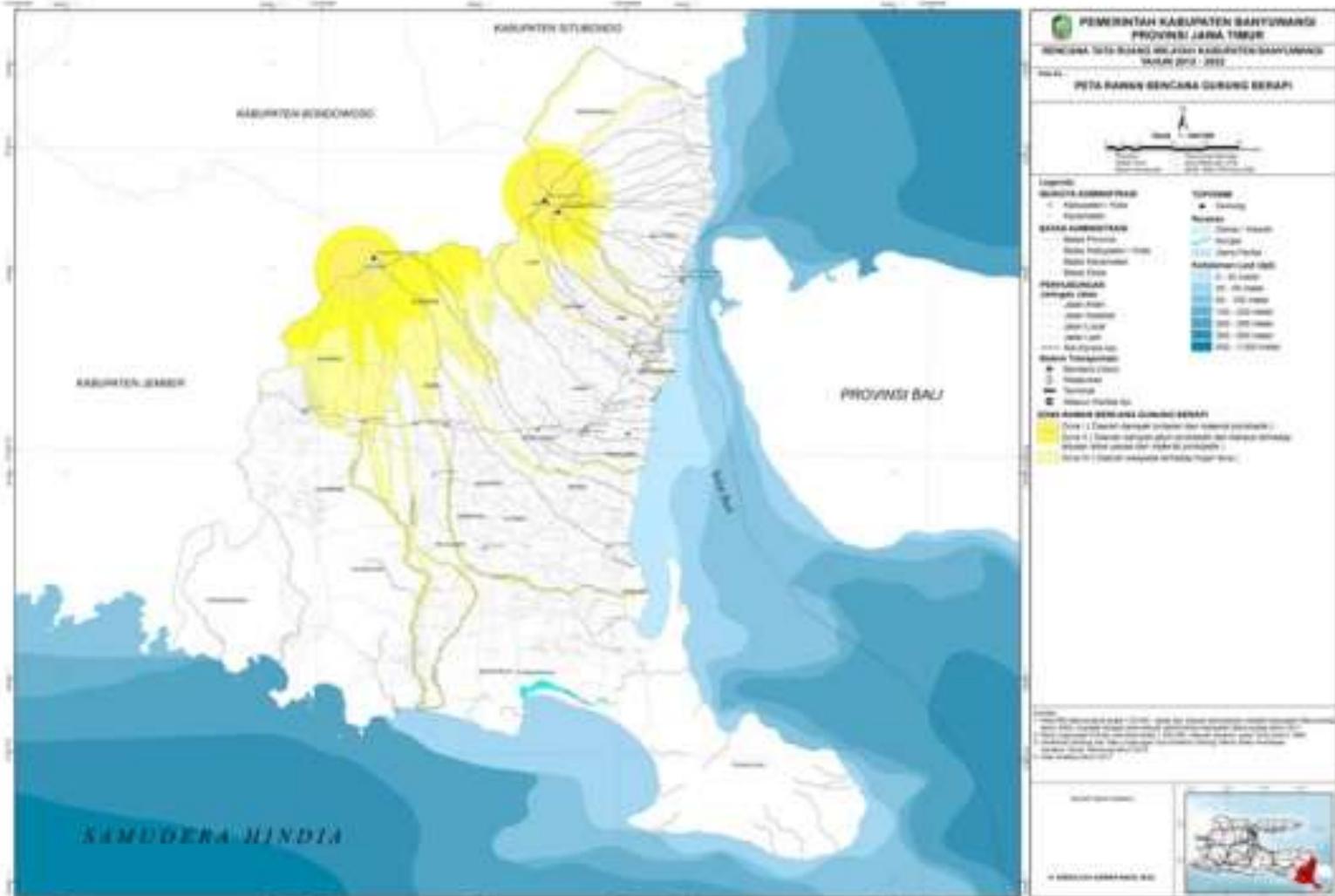
Sedangkan produksi hasil peternakan pada tahun 2021 yang menurun dibandingkan tahun 2020 yaitu susu sebesar 1.564.915 dari tahun sebelumnya sebesar 1.738.537 atau menurun sebanyak 173.622 kg.

Bisa dipahami pada tahun 2020 hingga 2021 wabah Covid-19 berdampak ke berbagai sektor perekonomian. Produksi ayam pedaging maupun ayam kampung di Kabupaten Banyuwangi menurun sangat drastis pada tahun 2020 begitu pula dengan produksi susu pada tahun 2021 yang mengalami penurunan, salah satu penyebabnya karena kondisi pandemi Covid-19 yang berakibat kepada kondisi ekonomi peternak ayam dalam pemeliharaan hewan ternaknya.

Upaya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk meningkatkan produksi pertanian dan membantu masyarakat di sektor pertanian salah satunya adalah pelayanan bergerak yakni Mobil Pelayanan Pertanian Terpadu (BILAPERDU). Pelayanan Bilaperdu ini meliputi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Dengan adanya layanan Bilaperdu ini permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan dapat dengan cepat segera dibantu penyelesaiannya.

2.1.1.7. Kawasan Rawan Bencana

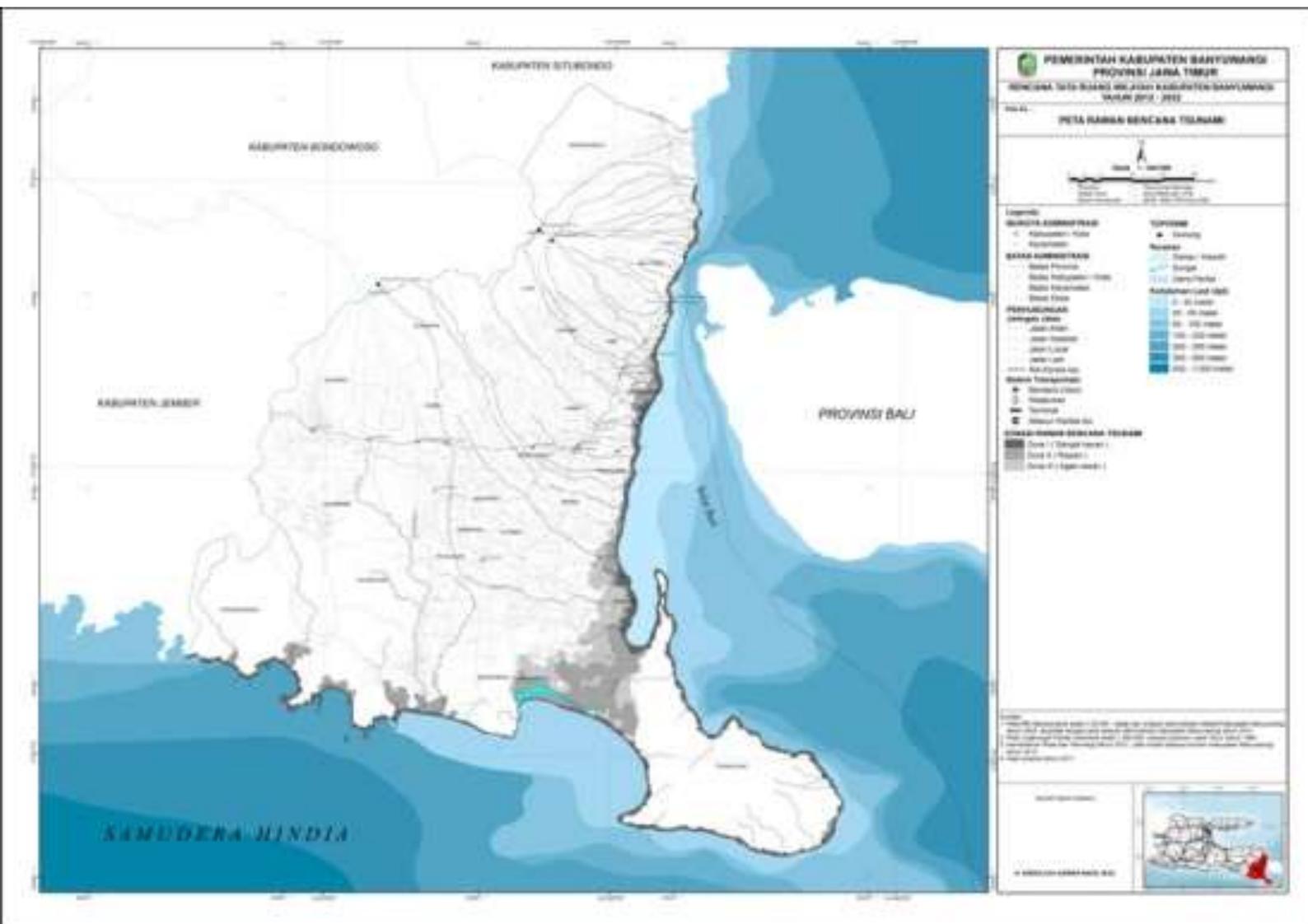
Secara geografis Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak pada pertemuan empat lempeng tektonik yaitu lempeng Benua Asia, Benua Australia, lempeng Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Pada bagian selatan dan timur Indonesia terdapat sabuk vulkanik yang memanjang dari Pulau Sumatera - Jawa - Nusa Tenggara - Sulawesi, yang sisinya berupa pegunungan vulkanik tua dan dataran rendah yang sebagian didominasi oleh rawa-rawa. Kondisi tersebut sangat berpotensi sekaligus rawan bencana seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir dan tanah longsor. Kabupaten Banyuwangi menjadi salah satu daerah dengan potensi bencana yang cukup tinggi. Kawasan rawan bencana merupakan kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi memaparkan bahwa potensi bencana gunung berapi menjadi yang paling diwaspadai.



Gambar 2.5 Peta Rawan Bencana Gunung Berapi Kabupaten Banyuwangi

Sumber: BPBD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032

Gempa bumi yang disebabkan karena interaksi lempeng tektonik dapat menimbulkan gelombang pasang apabila terjadi di Samudra. Dengan wilayah yang sangat dipengaruhi oleh pergerakan lempeng tektonik ini, Indonesia sering mengalami tsunami. Tsunami yang terjadi di Indonesia sebagian besar disebabkan oleh gempa-gempa tektonik di sepanjang daerah subduksi dan daerah seismik aktif lainnya (Puspito, 1994). Selama kurun waktu 1600-2000 terdapat 105 kejadian tsunami yang 90 persen di antaranya disebabkan oleh gempa tektonik, 9 persen oleh letusan gunung berapi dan 1 persen oleh tanah longsor (Latief dkk., 2000). Wilayah pantai di Indonesia merupakan wilayah yang rawan terjadi bencana tsunami terutama pantai barat Sumatera, pantai selatan Pulau Jawa, pantai utara dan selatan pulau-pulau Nusa Tenggara, pulau-pulau di Maluku, pantai utara Irian Jaya dan hampir seluruh pantai di Sulawesi. Berikut merupakan peta rawan bencana tsunami Kabupaten Banyuwangi.



Gambar 2.6 Peta Rawan Bencana Tsunami Kabupaten Banyuwangi

Sumber: BPBD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032

2.1.1.8. Demografi

Jumlah Penduduk Kabupaten Banyuwangi tahun 2019 sebanyak 1.612.917 jiwa. Jumlah penduduk Banyuwangi pada tahun 2020 meningkat cukup signifikan menjadi sebanyak 1.708.114 jiwa dan pada tahun 2021 jumlah penduduk di Kabupaten Banyuwangi kembali meningkat sebanyak 1.718.462 jiwa. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berupaya untuk menjaga stabilitas pertumbuhan penduduk agar proses pemerataan pembangunan juga dapat diterima oleh masyarakat secara adil dan merata. Dibawah ini terdapat perbedaan data yang bersumber dari BPS dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, hal ini dikarenakan adanya perbedaan konsep dan metode yang digunakan. BPS menggunakan pendekatan survey dalam penentuan jumlah penduduk, sedangkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menggunakan pendekatan administrasi dalam pendataan penduduk. Berikut merupakan Gambar jumlah penduduk Kabupaten Banyuwangi dalam 5 tahun terakhir:



Gambar 2.7: Jumlah Penduduk Tahun 2017-2021

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022

Tabel 2.8 Jumlah Penduduk Kabupaten Banyuwangi Pada Setiap kecamatan Tahun 2021

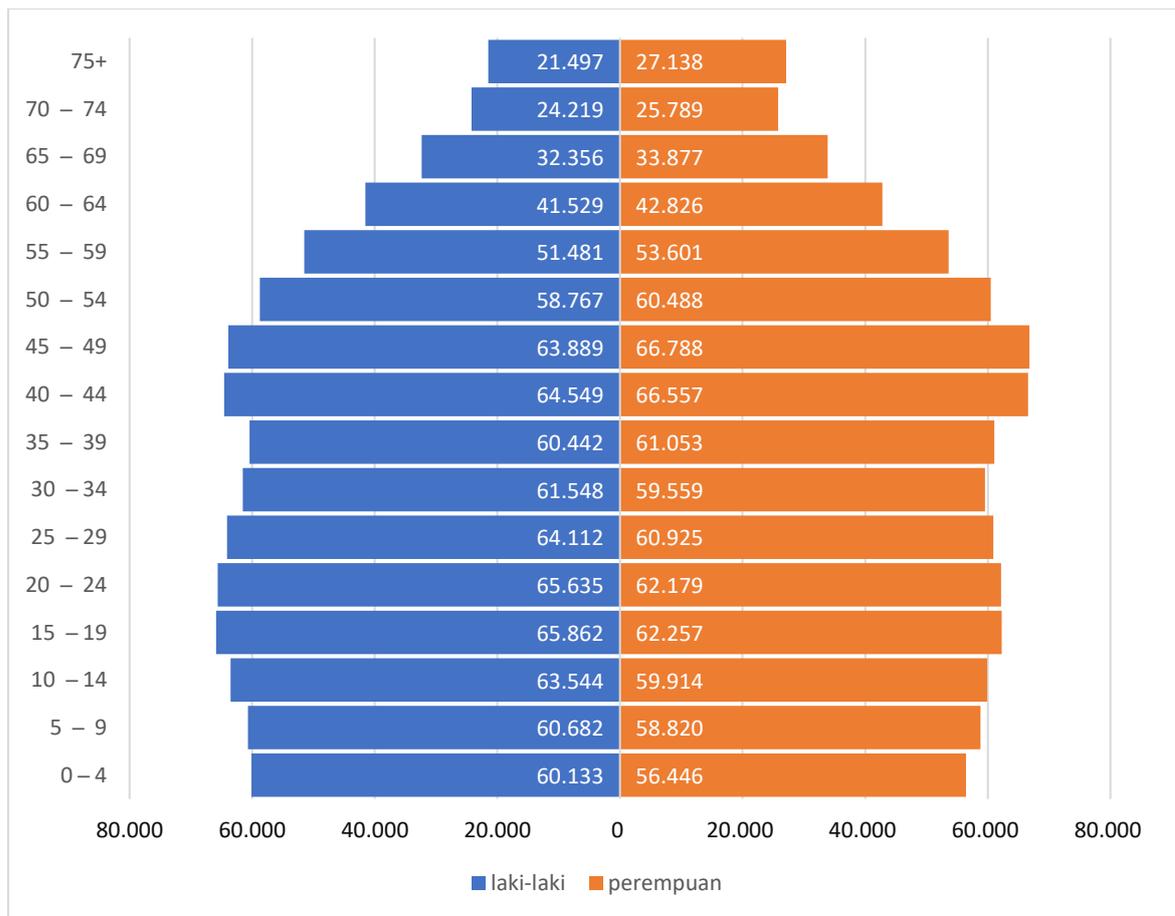
No	Kecamatan	Jumlah Penduduk		Jumlah Penduduk
		L	P	L + P
1	Pesanggaran	27.800	27.677	55.477
2	Bangorejo	33.881	33.436	67.317
3	Purwoharjo	35.635	35.278	70.913
4	Tegaldlimo	34.368	33.871	68.239
5	Muncar	69.803	68.727	138.530
6	Cluring	40.140	39.838	79.978
7	Gambiran	34.317	26.419	60.736
8	Srono	49.866	49.429	99.295
9	Genteng	47.877	47.337	95.214
10	Glenmore	38.496	39.095	77.591
11	Kalibaru	9.130	9.052	18.182
12	Singojuruh	26.275	26.407	52.682
13	Rogojampi	28.323	29.030	57.353
14	Kabat	32.651	32.570	65.221
15	Glagah	1.853	18.905	20.758
16	Banyuwangi	58.853	60.720	119.573
17	Giri	15.566	15.832	31.398
18	Wongsorejo	39.225	39.693	78.918
19	Songgon	29.474	29.500	58.974
20	Sempu	42.919	42.835	85.754

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk		Jumlah Penduduk
		L	P	L + P
21	Kalipuro	6.855	6.750	13.605
22	Siliragung	25.449	24.831	50.280
23	Tegalsari	26.643	26.306	52.949
24	Licin	4.926	4.944	9.870
25	Blimbingsari	27.945	28.489	56.434
JUMLAH				1.585.241

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi 2022

Berdasarkan total sebaran penduduk kabupaten Banyuwangi dapat dilihat bahwa pusat kependudukan terkonsentrasi di Kecamatan Banyuwangi yang merupakan wilayah perkotaan dan Kecamatan Muncar yang merupakan kawasan minapolitan sementara jumlah penduduk paling sedikit berada pada Kecamatan Licin yang wilayahnya berada pada dataran tinggi perbukitan. Tentunya daerah-daerah yang menjadi pusat pemerintahan, perekonomian juga memiliki daya tarik tersendiri terhadap perkembangan jumlah penduduk.

Perkembangan penduduk jika dilihat dari profil distribusinya, hingga tahun 2021 masih cukup bagus. Profil jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin menunjukkan postur yang cukup ideal antara usia produktif (umur 15-64 tahun) dan usia tidak produktif (umur di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun). Jumlah penduduk terbanyak adalah pada kelompok umur 40-44 tahun dengan jumlah 131.106 penduduk yang terdiri dari 64.549 penduduk berjenis kelamin laki-laki, dan 66.557 penduduk berjenis kelamin perempuan. Melihat bentuk piramida penduduk tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun 2021 hingga lima tahun ke depan profil penduduk Kabupaten Banyuwangi didominasi oleh usia produktif, sehingga diupayakan kebijakan yang tepat terkait menyiapkan kualitas angkatan kerja, menciptakan lapangan kerja serta menyiapkan dukungan sarana dan prasarana. Sedangkan untuk penduduk usia lanjut perluantisipasi kebutuhan layanan yang memadai. Berikut merupakan gambar piramida penduduk Kabupaten Banyuwangi berdasarkan data kependudukan tahun 2021.



Gambar 2.8 : Piramida penduduk Kabupaten Banyuwangi 2021

Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi, 2022

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.1.2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi dapat dilihat dari pergeseran Produk Domestik Regional Bruto atau (PDRB) Kabupaten Banyuwangi, Produk Domestik Regional Bruto merupakan jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Nilai tambah atas barang dan jasa yang dihitung dalam wilayah tertentu tersebut dihitung tanpa memperhatikan adakah perputaran ekonomi di wilayah tersebut dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut atau masyarakat lain. Secara umum penghitungan PDRB terdapat beberapa jenis yang meliputi PDRB yang dihitung berdasarkan pendekatan produksi yang dibagi menjadi 9 lapangan usaha (sektor), PDRB yang dihitung melalui pendekatan pendapatan, dan PDRB yang dihitung melalui pendekatan pengeluaran. Berdasarkan jenisnya setidaknya PDRB dihitung dengan 2 metode yakni PDRB ADHB (Atas Dasar Harga Berlaku) dan PDRB ADHK (Atas Dasar Harga Konstan).

PDRB ADHB merupakan nilai PDRB yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun tersebut. Hal tersebut bertujuan untuk dapat melihat pergeseran-

pergeseran yang terjadi dalam sektor ekonomi. Selain itu juga dapat melihat struktur ekonomi yang dimiliki oleh sebuah daerah. Berikut merupakan PDRB ADHB Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017-2021 dihitung dalam Miliar:

Tabel 2.9: PDRB ADHB Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017-2021 (dalam miliar)

Kategori	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian	24,345.12	24,329.42	24,541.48	24,081.01	25,028.72
B	Pertambangan dan Penggalian	5,504.25	5,963.32	6,211.03	5,913.07	6,229.80
C	Industri Pengolahan	7,768.10	8,521.54	9,351.68	9,422.28	10,585.83
D	Listrik, Gas, dan Air Bersih	31.56	33.70	35.31	34.91	35.80
E	Pengadaan Air, Pengelolaan, Limbah dan Daur Ulang	42.02	44.29	47.21	49.71	52.66
F	Konstruksi	8,994.18	10,517.95	12,005.04	11,362.04	11,892.21
G	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	10,898.01	12,474.56	14,017.66	13,120.38	14,287.01
H	Transportasi dan Pergudangan	2,294.32	2,501.20	2,706.10	2,369.89	2,375.36
I	Penyedia Akomodasi dan Makanan	1,885.46	2,137.88	2,425.55	2,105.92	2,270.05
J	Informasi dan Komunikasi	2,955.66	3,225.75	3,566.03	3,887.66	4,185.34
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,278.07	1,377.53	1,449.97	1,449.27	1,517.53
L	Real Estate	1,063.76	1,170.66	1,268.36	1,301.74	1,344.64
M,N	Jasa Perusahaan	161.18	178.92	194.92	186.23	192.93

Kategori	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,637.26	1,745.03	1,822.84	1,845.59	1,819.14
P	Jasa Pendidikan	2,160.70	2,363.86	2,573.71	2,681.29	2,706.60
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	247.16	278.49	302.06	351.71	373.53
R,S,T,U	Jasa Lainnya	863.39	982.93	1,076.76	940.19	1,018.86
		72,130.20	77,847.03	83,595.71	81,102.89	85,916.02

Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi 2022

Tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2021 kontribusi terbesar PDRB Kabupaten Banyuwangi adalah pada sektor pertanian, perdagangan, hotel, dan restoran, konstruksi, industri pengolahan, pertambangan, dan penggalian. Kinerja perekonomian Kabupaten Banyuwangi kurun waktu 2017-2021 menunjukkan peningkatan yang diindikasikan dengan meningkatnya nilai nominal Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) lima tahun terakhir. Pada tahun 2017 nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sebesar 72,130.20 M, pada tahun 2021 mencapai 85,916.02 M, terjadi peningkatan sebesar 13,785.82 M selama lima tahun. Sedangkan PDRB ADHK adalah jenis PDRB yang isinya menggambarkan nilai tambah barang dan jasa, dihitung menggunakan harga yang dihitung pada tahun tertentu sebagai dasar, pada periode ini tahun yang menjadi tahun dasar adalah tahun 2010. PDRB ADHK juga dapat merepresentasikan pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya. Berikut merupakan PDRB ADHK Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017-2021 dihitung dalam Miliar:

Tabel 2.10: PDRB ADHK Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017-2021 (dalam miliar)

Kategori	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian	15.607,16	15.493,02	15.406,89	14.950,32	15.205,35
B	Pertambangan dan Penggalian	4.190,09	4.452,01	4.537,98	4.217,40	4.284,78
C	Industri Pengolahan	5.650,45	6.053,06	6.529,09	6.504,55	7.026,82

Kategori	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
D	Listrik, Gas, dan Air Bersih	27,27	28,22	29,16	29,07	29,61
E	Pengadaan Air, Pengelolaan, Limbah dan Daur Ulang	32,40	33,75	35,54	37,33	39,50
F	Konstruksi	5.796,35	6.480,90	7.279,34	6.883,65	7.179,57
G	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	7.466,41	8.307,60	9.105,39	8.505,87	9.112,10
H	Transportasi dan Pergudangan	1.480,97	1.560,39	1.653,50	1.455,06	1.448,89
I	Penyedia Akomodasi dan Makanan	1.266,57	1.403,08	1.559,99	1.343,94	1.401,86
J	Informasi dan Komunikasi	2.636,57	2.867,27	3.126,16	3.397,12	3.652,23
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	893,10	947,34	987,16	984,55	1.001,78
L	Real Estate	774,02	830,06	885,09	901,97	930,06
M,N	Jasa Perusahaan	116,47	124,80	133,08	124,93	127,65
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.087,89	1.133,61	1.158,67	1.115,98	1.106,38
P	Jasa Pendidikan	1.638,94	1.760,73	1.886,45	1.945,44	1.978,50
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	195,27	210,14	223,21	257,93	269,93
R,S,T,U	Jasa Lainnya	620,53	681,71	737,34	640,02	676,06
		49.480,44	52.367,69	55.274,03	53.295,11	55.471,07

Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi 2022

Kontribusi terbesar PDRB ADHK di Kabupaten Banyuwangi terbesar pada tahun 2021 terdapat pada sektor pertanian, pertambangan dan penggalan, industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, hotel dan restoran, penyedia akomodasi dan makanan, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, dan jasa pendidikan. Pada tahun

2020 nilai PDRB ADHK Kabupaten Banyuwangi mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 55.274,03 miliar menjadi 53.295,11 miliar. Namun, pada tahun 2021 PDRB ADHK berhasil ditingkatkan menjadi sebesar 55.471,07 miliar. Hal ini dikarenakan beberapa lapangan usaha berhasil mengalami peningkatan yang cukup besar seperti pada sektor pertanian, industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, hotel dan restoran, informasi dan informatika, serta jasa keuangan dan asuransi. Sehingga dengan bertambahnya nilai ADHK pada sektor tersebut turut meningkatkan PDRB ADHK di Kabupaten Banyuwangi.

Tabel 2.11: Pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017-2021

Kategori	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian	1.49	-0.73	-0.56	-2.96	1.71
B	Pertambangan dan Penggalian	8.06	6.25	1.93	-7.06	1.60
C	Industri Pengolahan	3.67	7.13	7.86	-0.38	8.03
D	Listrik, Gas, dan Air Bersih	4.37	3.48	3.34	-0.3	1.85
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2.09	4.18	5.31	5.03	5.80
F	Konstruksi	8.08	11.81	12.32	-5.44	4.30
G	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	9.12	11.3	9.6	-6.58	7.13
H	Transportasi dan Pergudangan	6.3	5.36	5.97	-12	-0.42
I	Penyedia Akomodasi dan Makanan	10.91	10.78	11.18	-13.85	4.31
J	Informasi dan Komunikasi	8.65	8.75	9.03	8.67	7.51
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6.42	6.07	4.2	-0.26	1.75
L	Real Estate	6.37	7.24	6.63	1.91	3.11
M,N	Jasa Perusahaan	6.28	7.15	6.64	-6.13	2.18
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.45	4.2	2.21	-3.68	-0.86

Kategori	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
P	Jasa Pendidikan	7.39	7.43	7.14	3.13	1.70
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9.8	7.61	6.22	15.55	4.65
R,S,T,U	Jasa Lainnya	8.68	9.86	8.16	-13.2	5.63
		5,45	5,84	5,55	-3,58	4,08

Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi 2022

Terdapat beberapa poin penting bila melihat laju pertumbuhan beberapa sektor PDRB ADHK Kabupaten Banyuwangi, tentunya dengan mempertimbangkan adanya pandemi Covid-19 pada tahun 2020 dan 2021 yang menyebabkan anomali pada pertumbuhan beberapa sektor PDRB, beberapa point tersebut di antaranya adalah:

1. Sektor dengan pertumbuhan yang mengalami peningkatan pada tahun 2021 meliputi pertanian, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Konstruksi, Perdagangan, Hotel, dan Restoran, Penyedia Akomodasi dan Makanan, Jasa Keuangan dan Asuransi, Real Estate, dan Jasa Lainnya;
2. Sedangkan pertumbuhan sektor PDRB yang masih memerlukan perhatian khusus untuk ditingkatkan diantaranya adalah Transportasi dan Pergudangan, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Jasa Pendidikan dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.

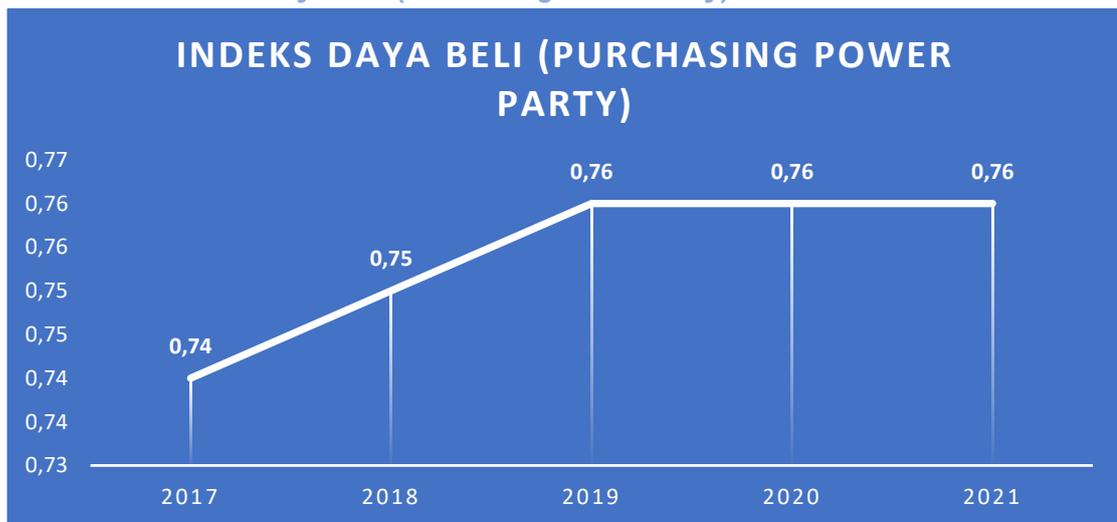
Tabel 2.12: Indikator kesejahteraan masyarakat dari perspektif pemerataan

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Laju pertumbuhan PDRB per kapita.		8	8	7	-3	4.08
2	PDRBpkt: PDRB per kapita pada periode ke t	Ribu Rupiah	45.015,80	48.358,92	51.794,42	50.131,15	52.692,85
3	PDRB per kapita.	Ribu Rupiah	45.015,80	48.358,92	51.794,42	50.131,15	52.692,85
4	Koefisien Gini.		0,34	0,31	0,31	0,32	0,37

Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi 2022

Berdasarkan data di atas, capaian indikator laju pertumbuhan PDRB per kapita bersifat fluktuatif sejak tahun 2017 sampai dengan 2021, indikator PDRBpkt memiliki tren capaian meningkat namun pada tahun 2020 mengalami penurunan, namun pada tahun 2021 mengalami peningkatan. Indikator PDRBpkt -1 dan indikator PDRB per kapita juga memiliki tren capaian meningkat. Begitu pula dengan PDRB per kapita yang memiliki tren capaian meningkat namun mengalami penurunan pada tahun 2020 dan berhasil meningkat pada tahun 2021. Sedangkan untuk koefisien gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Koefisien Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna. Perubahan Gini Ratio merupakan indikasi dari adanya perubahan distribusi pengeluaran penduduk. Gini Ratio mengalami penurunan berarti distribusi pengeluaran penduduk mengalami perbaikan. Kabupaten Banyuwangi sendiri memiliki nilai koefisien gini sebesar 0,37 pada tahun 2021, mengalami peningkatan sebesar 0,05 dimana pada tahun 2020 nilai koefisien gini sebesar 0,32. Terlepas dari hal tersebut, koefisien gini di Kabupaten Banyuwangi masih cukup jauh dari batas nilai ketimpangan sempurna.

2.1.2.1.2. Indeks Daya Beli (Purchasing Power Party)



Gambar 2.9 Indeks Daya Beli

Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi 2022

Indeks Daya Beli masyarakat adalah salah satu tolak ukur yang dapat mengestimasi pendapatan masyarakat secara *riil*. Sedangkan Indeks daya beli adalah indeks yang mengukur standar hidup layak dengan menghitung kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan. Dari data yang ditampilkan di atas dapat dilihat bahwa indeks daya beli masyarakat Kabupaten Banyuwangi meningkat pada setiap tahunnya dari tahun 2017 sampai dengan 2021. Di tahun 2017 sampai dengan 2018 gambaran mengenai tingkat rata-rata konsumsi per kapita dan pendapatan rata-rata per kapita 0,74. Sedangkan pada tahun 2018 mengalami peningkatan dari tahun

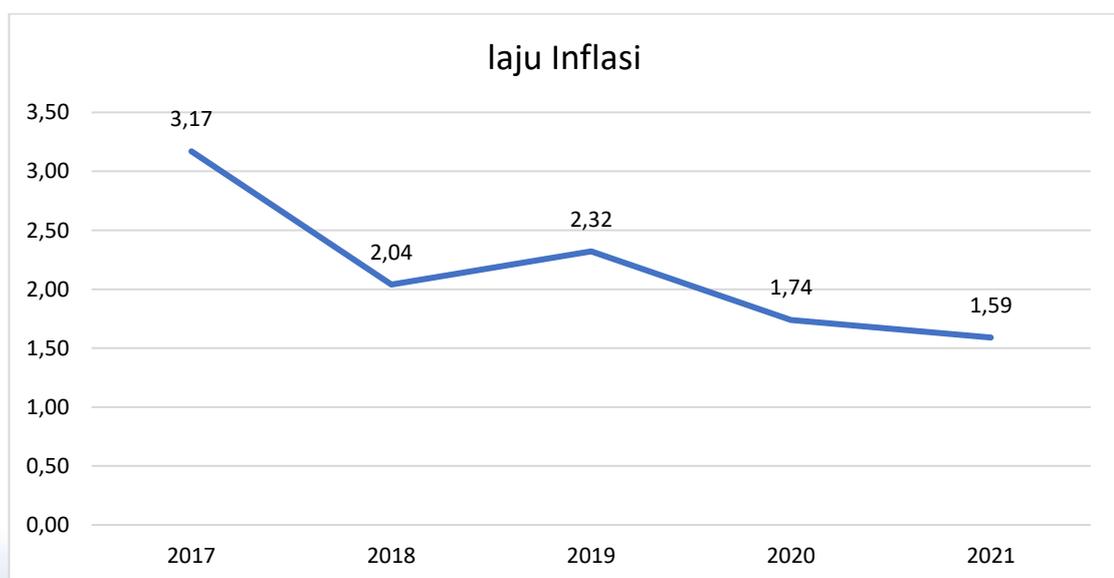
sebelumnya yaitu menjadi 0,75. dan yang terakhir pada tahun 2019- 2021 angka berada di 0,76 dengan menggambarkan bahwa gabungan rata- rata antara konsumsi per kapita dengan pendapatan per kapita.

2.1.2.1.3. Laju inflasi

Dalam ilmu ekonomi, inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (*continue*) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu.

Inflasi dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu tarikan permintaan (kelebihan likuiditas/uang/alat tukar) dan yang kedua adalah desakan (tekanan) produksi atau distribusi (kurangnya produksi (*Product or Service*) dan/atau juga termasuk kurangnya distribusi). Sebab pertama lebih dipengaruhi dari peran negara dalam kebijakan moneter (Bank Sentral), sedangkan untuk sebab kedua lebih dipengaruhi dari peran negara dalam kebijakan eksekutor yang dalam hal ini dipegang oleh Pemerintah (*Government*) seperti *fiskal* (perpajakan /pungutan /insentif /disinsentif), kebijakan pembangunan infrastruktur, regulasi, dll.

Secara umum peningkatan inflasi setiap tahunnya merupakan fenomena yang wajar. Namun hal yang perlu diperhatikan adalah seberapa besar peningkatan inflasi tersebut dan apakah daerah mampu untuk mengendalikan inflasi tersebut dengan paket kebijakannya. Berikut merupakan gambaran inflasi Kabupaten Banyuwangi dalam 6 tahun ke belakang.



Gambar 2.10: Inflasi kabupaten Banyuwangi Tahun 2017-2021

Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi 2022

Laju inflasi di Kabupaten Banyuwangi dalam 5 tahun terakhir berjalan fluktuatif dengan rata-rata inflasi diangka 2.17%. Laju inflasi 2017 cukup tinggi sebesar 3,17%. Angka tersebut kemudian dapat ditekan kembali pada tahun 2018 mencapai 2,04% dan meningkat perlahan ditahun 2019 mencapai 2,32% dan menurun cukup signifikan menjadi 1,74% ditahun 2020. Pada tahun 2021 laju inflasi di Kabupaten Banyuwangi dapat ditekan kembali menjadi sebesar 1,59%. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks harga kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 2,26% dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 1,30%. Melihat dalam capaian Kabupaten Banyuwangi dalam rangka menekan laju inflasi tersebut menunjukkan Kabupaten Banyuwangi tergolong masih dapat mengendalikan laju inflasinya yang mana masih di bawah rata-rata Nasional maupun Provinsi Jawa Timur ditahun yang sama.

2.1.2.1.4. Angka Kemiskinan

Usaha pemerintah dan masyarakat untuk terus mengentaskan kemiskinan makin menunjukkan hasil positif. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat persentase kemiskinan Indonesia semakin menurun. Untuk mengukur kemiskinan, menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidak mampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Dalam hal ini akan disajikan data dalam bentuk tabel mengenai angka kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut:

Tabel 2.13: Angka Kemiskinan Kabupaten Banyuwangi

No	Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/tahun)	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin
1	2017	319,236	138,54	8,64
2	2018	339,891	125,50	7,80
3	2019	353,873	121,37	7,52
4	2020	373,679	130,37	8,06
5	2021	387,084	130,93	8,07

Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi 2022

Tabel diatas merupakan data angka kemiskinan Kabupaten Banyuwangi selama 5 tahun terakhir. Angka kemiskinan terendah terjadi pada tahun 2019 dengan jumlah penduduk miskin sebesar 121,37 dan persentase penduduk miskin sebesar 7,52%.

Kemudian pada tahun 2021 persentase penduduk miskin mengalami peningkatan sebesar 0,01%. Hal ini dipengaruhi oleh peningkatan jumlah penduduk miskin yang meningkat menjadi 130,93 dari tahun sebelumnya sebesar 130,37 dengan garis kemiskinan sebesar 387,084 (rupiah/kapita/tahun).

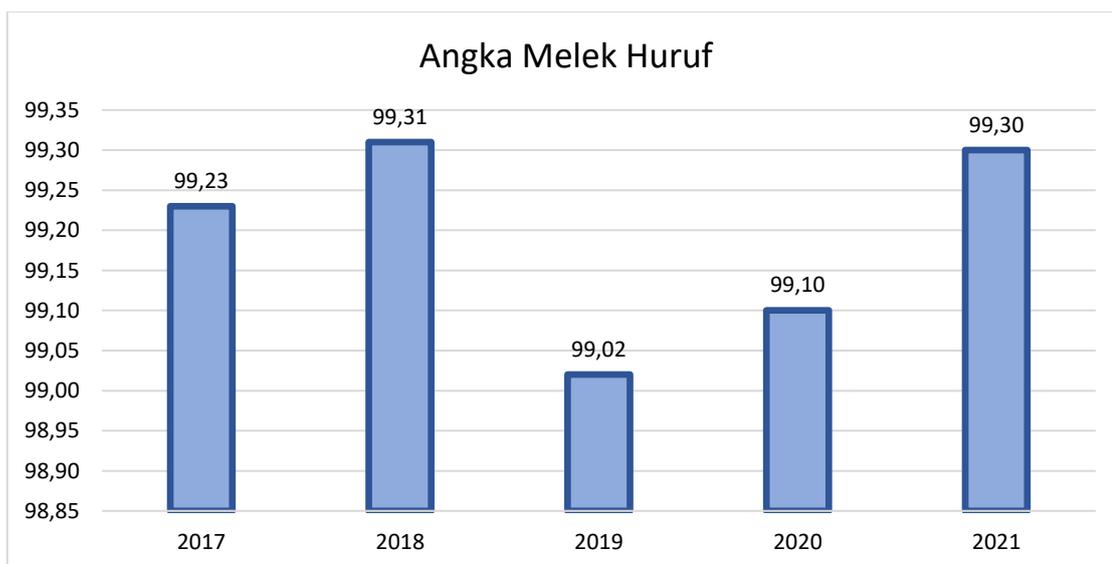
2.1.2.2. Kesejahteraan Sosial

2.1.2.2.1. Pendidikan

2.1.2.2.1.1. Angka melek huruf

Angka melek huruf merupakan indikator dalam urusan pendidikan yang secara langsung merepresentasikan tingkat melek huruf atau tingkat buta huruf di sebuah daerah. Angka melek huruf dihitung dengan menghitung proporsi penduduk usia 15 tahun keatas, yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis tanpa harus memahami / mengerti apa yang dibaca dan ditulis. Secara umum dahulunya, angka melek huruf merupakan salah satu indikator penting yang merepresentasikan meratanya pendidikan di sebuah wilayah, hal tersebut dikarenakan keterampilan membaca dan menulis dianggap sebagai sebuah dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan. Angka melek huruf juga masuk dalam salah satu indikator komposit Indeks Pembangunan Manusia.

Namun seiring berjalannya waktu angka melek huruf perlahan tidak lagi dianggap sebagai sebuah tolok ukur penting yang merepresentasikan akses, kualitas, maupun sistem pendidikan di sebuah wilayah. Hal tersebut dikarenakan capaian angka melek huruf di seluruh daerah telah melonjak pesat yang salah satunya dengan wajib belajar 9 tahun. Bahkan Angka Melek Huruf (AMH) yang sebelumnya masuk ke dalam indikator komposit IPM dikeluarkan dan diganti dengan Harapan Lama Sekolah (HLS).



Gambar 2.11: Angka Melek Huruf Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017-2021

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022

Secara empiris, dalam 5 tahun terakhir capaian angka melek huruf di Kabupaten Banyuwangi berada diatas 99%, terlihat pada tahun 2017 memiliki capaian hingga 99,23%. Pada tahun 2018 terus mengalami kenaikan hingga mencapai angka 99,31%. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2019 angka melek huruf menunjukkan adanya penurunan hingga menjadi 99,02% dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan kembali menjadi 99,10%. Pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan yang cukup signifikan menyentuh angka 99,30%. Tidak ada isu khusus dalam perjalanannya, untuk meningkatkan Angka Melek Huruf Pada tahun 2014, Kabupaten Banyuwangi telah meluncurkan inovasi Gempita Perpus (Gerakan Pemberantasan Tri Buta dan Anak Putus Sekolah). Inovasi ini melibatkan semua guru penerima sertifikasi untuk memberikan pengajaran baca, tulis, hitung kepada warga belajar yang pelaksanaan pembelajarannya dilaksanakan di balai desa, ruang kelas sekolah ataupun tempat ibadah pada sore dan malam hari. Belum tercapainya angka 100% sebagai kondisi ideal yang seharusnya, dikarenakan masih terdapat usia lanjut dan difabel berat yang memang buta huruf. Kendala terbesar adalah terbatasnya kemampuan masyarakat yang berusia lanjut, selain itu motivasi untuk belajar baca dan tulis di usia tersebut juga sangat rendah.

2.1.2.2.1.2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terbentuk dari 3 dimensi Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan, dan Indeks *Purchasing Power Parity*. Salah satu representasi dari kualitas pembangunan manusia direpresentasikan melalui pembangunan pendidikan itu sendiri. Secara umum Indeks Pendidikan dibentuk dari 2 indikator komposit yakni rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Berikut capaian rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah Kabupaten Banyuwangi.

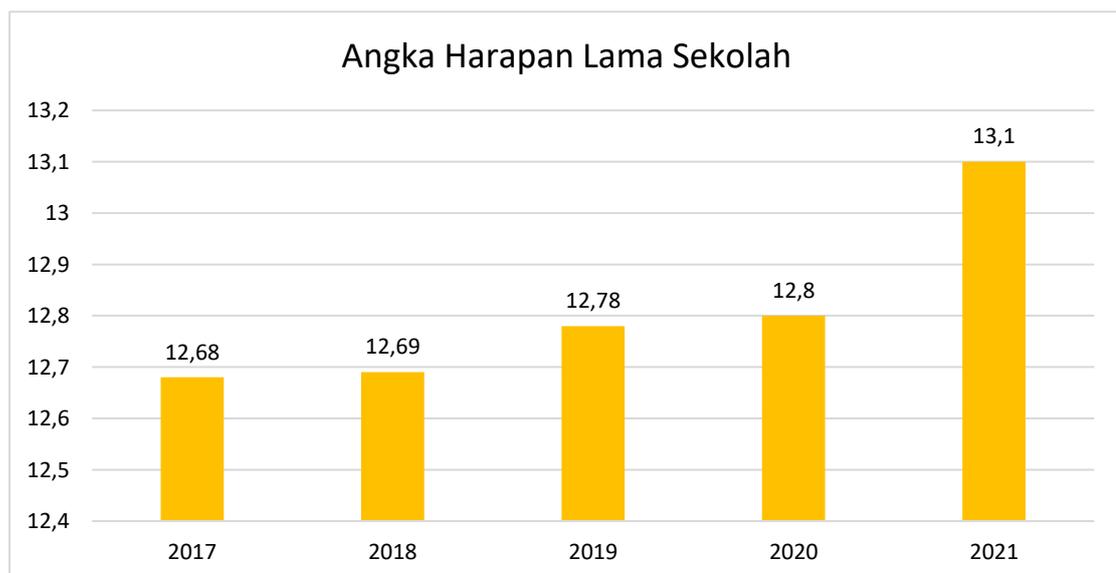


Gambar 2.12: Angka rata-rata lama sekolah

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022

Rata-rata Lama Sekolah (RLS)/ Mean Years School (MYS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak. Data angka rata-rata lama sekolah memiliki tren capaian meningkat dengan capaian tahun 2017 sebesar 7,11. Pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 7,12. Pada tahun 2019 masih mengalami peningkatan menjadi 7,13 dan pada tahun 2020 masih mengalami peningkatan menjadi 7,16. Sedangkan pada tahun 2021 capaian angka rata-rata lama sekolah berhasil meningkat secara signifikan dengan angka 7,42. Permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Banyuwangi dalam bidang Pendidikan yang berkaitan dengan kasus rata-rata lama sekolah ialah kurangnya akses Pendidikan menengah sebagai kelanjutan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. HLS Kabupaten Banyuwangi pada 5 (lima) tahun terakhir secara stabil mengalami peningkatan. Secara signifikan peningkatan ini terjadi pada tahun 2021 hingga menyentuh angka 13,1 dari tahun sebelumnya sebesar 12,8. Secara keseluruhan capaian yang dihasilkan mengalami peningkatan, namun hal tersebut masih belum sepenuhnya sempurna. Hal tersebut dikarenakan oleh permasalahan mengenai masih adanya anak putus sekolah di Kabupaten Banyuwangi. Serta fasilitas sekolah seperti bangunan, listrik, internet dan computer sepenuhnya belum tersedia dan terfasilitasi.



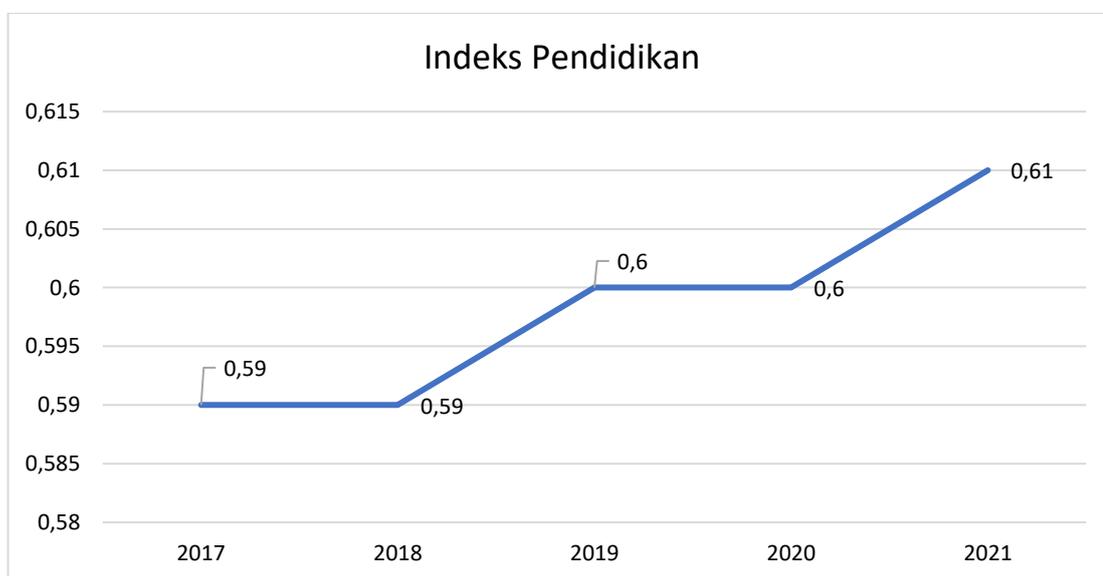
Gambar 2.13 Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022

Hal yang perlu diperhatikan dari temuan realisasi dua indikator RLS dan HLS adalah, masih terdapatnya gap antara RLS dan HLS. RLS yang menggambarkan kondisi eksisting masyarakat yang bersekolah umur 25 tahun ke atas masih jauh berada di bawah HLS yang mana lebih menggambarkan ekspektasi dari anak pada umur tertentu untuk mengenyam pendidikan lebih lanjut. Masih terdapatnya gap antara RLS dan HLS menunjukkan sistem pendidikan yang mana bertujuan menjamin hak masyarakat untuk menempuh pendidikan sesuai jenjang yang diharapkan pada suatu daerah, nyatanya belum dapat berjalan dengan baik. Selain itu rendahnya RLS juga bisa disebabkan oleh masih tingginya generasi tua diatas 25 tahun yang sudah telanjur tidak mengenyam pendidikan lebih lanjut lagi, sehingga capaian RLS Kabupaten Banyuwangi cenderung rendah.

2.1.2.2.1.3. Indeks Pendidikan

Indeks Pendidikan dapat diketahui dengan terlebih dahulu menghitung angka rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah dan dibagi dua. Indeks pendidikan merupakan komponen dalam penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dimana tinggi rendahnya nilai IPM sebuah daerah ditentukan oleh nilai dari masing-masing komponennya. Dari gambar di bawah dapat diketahui bahwa indeks Pendidikan dari tahun 2017 sampai dengan 2021 meningkat pada tahunnya secara rata-rata. Pada tahun 2017 indeks Pendidikan berada pada angka 0,59 dan naik dalam dua tahun kemudian menjadi 0,6 di tahun 2019 dan 2020. Sedangkan pada tahun 2021 indeks mengalami kenaikan kembali menjadi 0,61.



Gambar 2.14: Indeks Pendidikan Tahun 2017-2021

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022

2.1.2.2.2. Kesehatan

2.1.2.2.2.1. Indeks Kesehatan

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. IPKM merupakan indikator komposit yang menggambarkan kemajuan pembangunan kesehatan yang dirumuskan dari 30 indikator kesehatan. Indeks tersebut disusun oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitubangkes) Kementerian Kesehatan RI. Berikut merupakan data Indeks Kesehatan Kabupaten Banyuwangi tahun 2017-2021:



Gambar 2.15: Indeks Kesehatan Tahun 2017-2021

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022

Pada gambar diatas dapat diketahui bahwa dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 indeks Kesehatan berada di angka yang stagnan yakni 0,77. Sedangkan pada tiga tahun selanjutnya yakni di tahun 2019 sampai tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 0,78. Sedangkan indeks Kesehatan sendiri dapat diketahui melalui Salah satu standar yang ditetapkan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan pembangunan manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM dibentuk melalui pendekatan tiga dimensi dasar, yaitu lamanya hidup, pengetahuan, dan penghidupan yang layak.

2.1.2.2.2.2. Angka Kematian Ibu

Banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup. Yang dimaksud dengan Kematian Ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi

kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh.

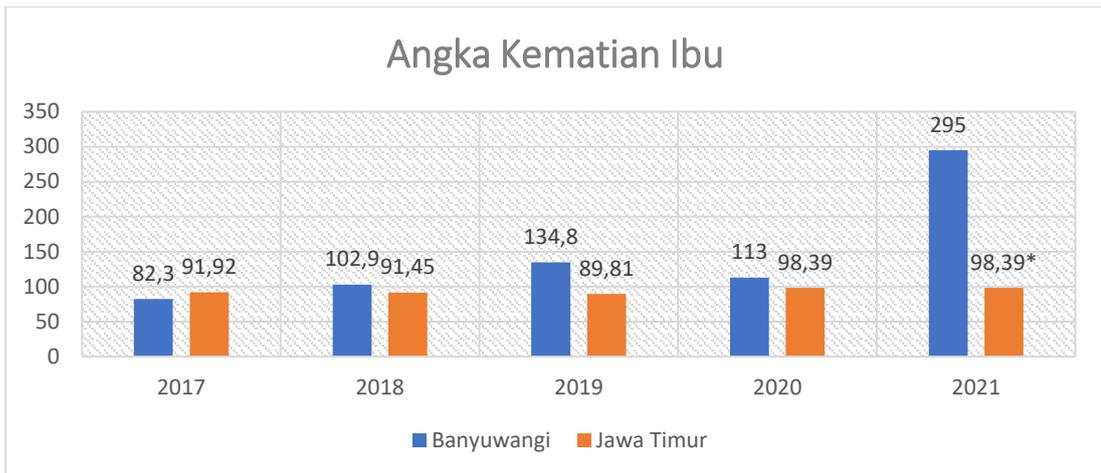


Gambar 2.16 Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Banyuwangi

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi 2022

Angka Kematian Ibu (AKI) memiliki tren capaian meningkat dengan capaian tahun 2017 sebesar 82,3. Akan tetapi pada tahun 2018 terlihat adanya peningkatan capaian hingga menjadi 102,9. Angka tersebut terus meningkat hingga pada tahun 2019 angka capaian menjadi 134,8. Berbeda dari tahun sebelumnya, angka kematian ibu pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup drastis menjadi 113 dan pada tahun 2021 angka kematian ibu di Kabupaten Banyuwangi mengalami peningkatan cukup signifikan mencapai angka 295 per 100.000 KH. Jika dibandingkan dengan Kabupaten Banyuwangi, AKI Jawa Timur memiliki capaian yang fluktuatif setiap tahunnya.

Angka kematian ibu tertinggi Jawa Timur terjadi pada tahun 2020 dan 2021 mencapai angka 98,39. Sementara itu AKI Kabupaten Banyuwangi justru mengalami peningkatan hingga mencapai 134,8 pada tahun 2019, yang mana pada tahun yang sama Jawa Timur memiliki capaian 89,81. Peningkatan tren angka kematian ibu di Kabupaten Banyuwangi terjadi karena berbagai faktor diantaranya peningkatan tren kenaikan kematian ibu dengan kehamilan, persalinan dan masa nifas, faktor lainnya yaitu batas risiko normal menjadi abnormal sangat tipis sehingga kejadian abnormal yang menimbulkan kematian kadang terjadi sangat cepat, kadang kala kematian tidak dapat dicegah. Selain itu juga dipengaruhi oleh masih rendahnya pengetahuan ibu hamil dan juga keluarga ibu hamil mengenai gejala permasalahan perihal kehamilan.



Gambar 2.17 Angka Kematian Ibu Kabupaten Banyuwangi dan Provinsi Jawa Timur

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi 2022

Ket: *) Data Sementara

Sama seperti Angka Kematian Ibu, data kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan dan masa nifas di Kabupaten Banyuwangi dalam kurun waktu 5 tahun memiliki tren capaian yang negatif dengan adanya peningkatan angka capaian pada tahun-tahun terakhir. Pada 2017 memiliki capaian sebesar 19,00. Akan tetapi pada tahun 2018 tercatat adanya peningkatan capaian hingga menjadi 24,00 dan peningkatan terus terjadi hingga pada tahun 2019 menjadi 31,00. Pada tahun 2020 berhasil mengalami penurunan menjadi 26,64 dan berdasarkan capaian 4 tahun terakhir maka diproyeksikan pada tahun 2021 angka kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan dan masa nifas di Kabupaten Banyuwangi menunjukkan adanya peningkatan menjadi 31,47.



Gambar 2.18 Data kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan dan masa nifas

Sumber: Data Diolah Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi 2022

Ket: *) Data Sementara

2.1.2.2.2.3. Angka Kematian Bayi

Angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup). Realisasi capaian AKB dari tahun 2017 sebesar 4,8 dan mengalami peningkatan pada tahun 2018 menjadi sebesar 5,9. Pada tahun 2019 AKB dapat ditekan hingga menyentuh angka 4,7. Namun pada tahun 2020 mengalami sedikit peningkatan menjadi 5,1 dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi sebesar 6,07 per 1000 kelahiran hidup.



Gambar 2.19: Angka Kematian Bayi

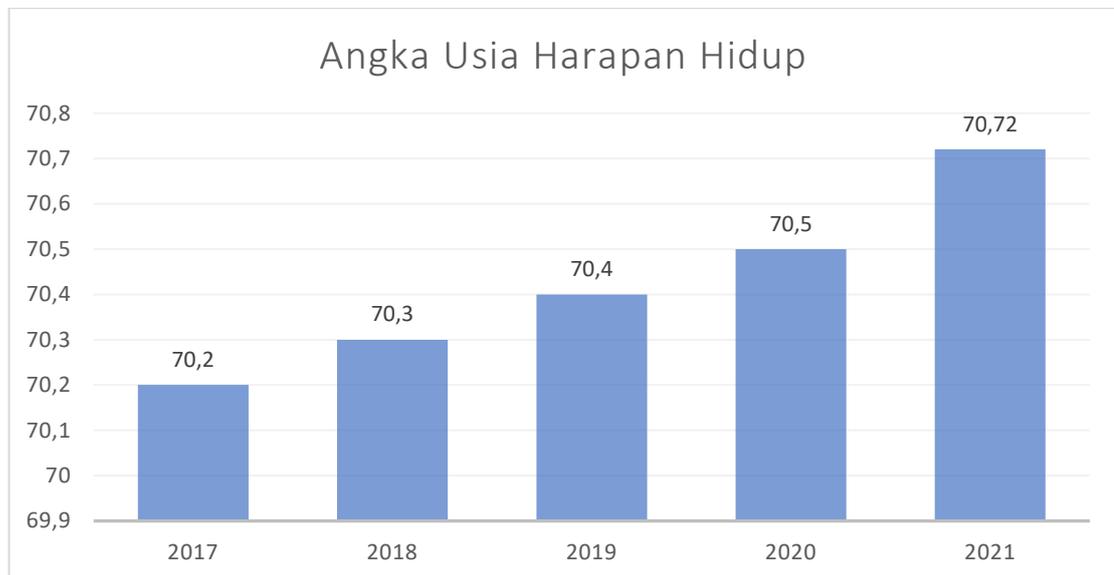
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022

Meningkatnya tingkat kematian balita per 1000 kelahiran merupakan salah satu penyebab dari naiknya angka kematian bayi pada 1000 kelahiran, penyebab lainnya adalah batas risiko normal menjadi abnormal sangat tipis sehingga kejadian abnormal yang menimbulkan kematian kadang terjadi sangat cepat, kadang kala kematian tidak dapat dicegah.

2.1.2.2.2.4. Angka Usia Harapan Hidup

Angka Usia Harapan Hidup adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Angka usia harapan hidup di Kabupaten Banyuwangi dalam 5 tahun terakhir memiliki tren capaian yang meningkat. Capaian angka usia harapan hidup masyarakat Banyuwangi pada tahun 2017 sebesar 70,2. Pada tahun 2018 capaian angka harapan hidup masyarakat Banyuwangi masih mengalami peningkatan menjadi 70,3 dan masih terus meningkat hingga pada tahun 2019 mencapai angka 70,4. Pada tahun 2020 angka usia harapan hidup masyarakat Banyuwangi Kembali mengalami peningkatan menjadi 70,5. Secara signifikan angka usia

harapan hidup di Kabupaten Banyuwangi meningkat hingga menyentuh angka 70,72. Dari capaian peningkatan Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Banyuwangi diprediksi akan berpengaruh meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia. Sehingga diperlukan intervensi pembangunan sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan hidup penduduk lanjut usia.



Gambar 2.20 Angka Usia Harapan Hidup

Sumber: Data Diolah Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi 2022

2.1.2.2.3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Kualitas sumber daya manusia dapat terlihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang pada hakikatnya merupakan suatu proses investasi jangka panjang. Upaya pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk menyelaraskan pertumbuhan ekonomi agar dapat berjalan seiring dengan pembangunan manusia telah dilakukan melalui berbagai program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan standar hidup serta kapabilitas penduduk. Kemajuan pembangunan manusia secara umum dapat ditunjukkan dengan melihat perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencerminkan pencapaian kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan, serta naiknya daya beli masyarakat yang berpengaruh terhadap kenaikan angka IPM Kabupaten Banyuwangi.



Gambar 2.21: Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2017-2021

Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki tren capaian yang terus meningkat dari tahun 2017-2021. Pada tahun 2017 angka capaian IPM sebesar 69,64 dan mengalami peningkatan pada tahun 2018 yang mencapai angka 70,06. Pada tahun 2019 IPM Kabupaten Banyuwangi mencapai angka 70,59 dan terus meningkat menjadi 70,62 pada tahun 2020. Kemudian peningkatan cukup tinggi terjadi pada tahun 2021 hingga mencapai angka 71,38.

2.1.2.3. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD adalah sebanyak 6 indikator meliputi Pertumbuhan Ekonomi, Persentase Penduduk Miskin, Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Kepuasan Masyarakat, Gini Rasio, dan yang terakhir adalah Tingkat Pengangguran Terbuka. Keenam Indikator tersebut memberikan representasi atas kesejahteraan masyarakat yang mewakili berbagai sudut pandang. Capaian kinerja secara umum pada keenam IKU memiliki perkembangan yang baik, bahkan diantaranya cukup signifikan jika dibandingkan dengan kondisi pada saat awal RPJMD disusun atau kinerja pada tahun 2020. Diantara Indikator yang mengalami perkembangan cukup baik adalah kinerja dalam menurunkan jumlah penduduk miskin yang direpresentasikan pada Indikator Persentase Penduduk Miskin, dimana pada tahun 2020 masih terdapat 8.06% penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan, dan berhasil diantaskan secara perlahan hingga menjadi 7.58%. Indeks pembangunan Manusia dari yang sebelumnya sebesar 70.62 pada tahun 2020, menjadi 71.38 pada tahun 2021. Sedangkan Indikator yang memiliki capaian kinerja paling lemah adalah Gini Rasio yang mengalami penurunan cukup besar dari yang semula sebesar 0.32 pada tahun 2020, menjadi 0.37 pada tahun 2022.

Tabel 2.14: Kinerja Indikator Kinerja Utama

No	Indikator Makro	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Realisasi		Target	
			2021	2022	2023	2026
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	-3.58	4.08	4,27	4.54	5.34
2	Persentase Penduduk Miskin(%)	8.06	8.07	7,58	7.49	7.01
3	Indeks Pembangunan Manusia	70.62	71.38	71.02	71.27	72.59
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	87.03	90.00	90,1	90.62	92.01
5	Gini Rasio	0.32	0.37	0,32	0.31	0.3
6	Tingkat Pengangguran Terbuka(%)	5.34	5.42	5,00	4.84	4.38

Dalam rangka memperdalam analisis terkait dengan capaian kinerja Indikator kinerja Utama Kabupaten Banyuwangi, perlu kiranya dilakukan analisis Gap Expectation untuk melihat kinerja dari setiap IKU yang telah ditetapkan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan IKU yang kinerjanya normal, cepat atau lambat. Berikut merupakan interpretasi dari capaian kinerja IKU menggunakan analisis Gap Expectation:



Gambar 2.22: Interpretasi Perhitungan Gap Expectation

Metode penghitungan Gap Expectation memberikan gambaran kinerja dengan periode efektif RPJMD selama 5 tahun. Tahun efektif yang dimaksudkan adalah tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Tahun 2026 tidak dimasukkan kedalam rentang tahun perhitungan dikarenakan pada tahun tersebut merupakan tahun terakhir RPJMD dimana pada tahun tersebut terjadi peralihan periode RPJMD kepada kepala daerah terpilih yang baru. Memperhatikan hal tersebut, maka tahun yang lebih representative untuk dijadikan sebagai target akhir kinerja dan sebagai pembanding adalah target yang ditetapkan pada tahun 2025.

Melihat rentang waktu kinerja yang akan diukur selama 5 tahun, idealnya capaian kinerja minimal yang harus diperoleh setiap tahunnya adalah sebesar 20%. Dengan demikian, capaian kinerja yang setidaknya diperoleh setiap IKU adalah sebesar 20% dari target yang telah ditetapkan di tahun 2025.

Untuk meningkatkan relevansi perhitungan, maka sebelum dibandingkan antara Realisasi tahun berkenaan dengan target tahun 2025, maka dilakukan pengurangan terlebih dahulu menggunakan realisasi pada tahun dasar RPJMD yakni tahun 2020. Hal tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan nilai capaian kinerja pemerintah yang lebih murni dengan asumsi tahun dasar merupakan starting point atau merupakan titik nol pembangunan untuk periode RPJMD Tahun 2021-2026. Rumus perhitungan yang digunakan untuk menghitung kinerja secara umum (Bersifat Positif) adalah sebagai berikut:

Rumus Indikator Positif:

$$\begin{aligned} & \text{Gap Expetation} \\ & = \frac{(\text{Realisasi Tahun Bersangkutan} - \text{Realisasi Tahun Dasar})}{(\text{Target Tahun 2025} - \text{Realisasi Tahun Dasar})} \times 100 \end{aligned}$$

Sedangkan untuk indikator yang bersifat negasi atau yang memiliki penafsiran secara terbalik seperti Tingkat kemiskinan dan Indeks Gini, dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Rumus Indikator Negasi:

$$\begin{aligned} & \text{Gap Expetation} \\ & = \frac{(\text{Realisasi Tahun Dasar} - \text{Realisasi Tahun Bersangkutan})}{(\text{Target Tahun Dasar} - \text{Realisasi Tahun 2025})} \times 100 \end{aligned}$$

Hasil perhitungan menggunakan rumus tersebut, menghasilkan besaran persentase capaian nilai kinerja yang telah dicapai hingga tahun berkenaan. Dengan mengetahui persentase capaian kinerja maka dapat diketahui juga sisa beban kinerja pemerintah untuk mencapai target yang telah ditetapkan untuk tahun 2025. Langkah selanjutnya berdasarkan analisis ini, pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi mendapatkan gambaran berapa effort kinerja yang harus dikeluarkan hingga akhir periode RPJMD yang sekaligus mengukur berhasil atau

tidaknya Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026 beserta Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam pencapaian Visi dan Misi yang merupakan janji politik antara Kepala Daerah terkait dengan konstituennya.

1. Pertumbuhan Ekonomi

Capaian Pertumbuhan Ekonomi sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, pada tahun 2021 telah Kembali pulih dari kondisi yang cukup memprihatinkan pada tahun 2020. Capaian Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 telah mencapai sebesar 4.08%. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu representasi dari kerja keras pemerintah Bersama masyarakat untuk bangkit Bersama. Capaian pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 telah memberikan kontribusi pada pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 86% dari target yang telah ditetapkan untuk akhir periode RPJMD atau tahun 2026 sebesar 5.34%. dengan realisasi kinerja tersebut maka dapat diketahui besaran Gap Expectation dari Indikator pertumbuhan ekonomi yakni sebesar 14%. Dengan besaran capaian kinerja tersebut, maka effort yang dibutuhkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 5.34% pada tahun 2026 diharapkan dapat lebih mudah untuk dicapai. Namun disisi lain, tercapainya target yang sangat signifikan tersebut dapat mengindikasikan adanya kelemahan dalam perencanaan target kinerja, sehingga target dapat dengan mudah untuk dicapai.



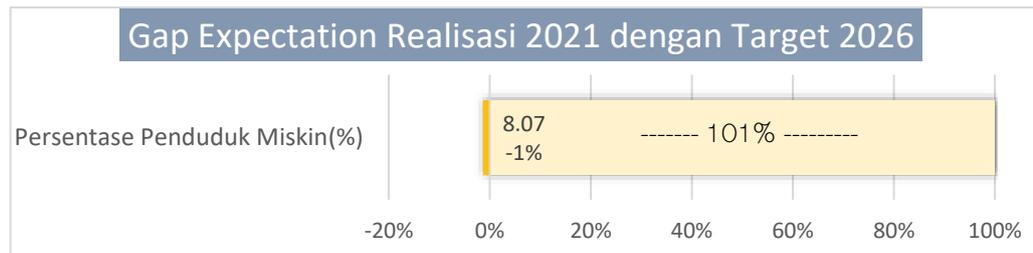
Gambar 2.23: Gap Expectation Pertumbuhan Ekonomi

Sumber: Data Diolah BAPPEDA Kabupaten Banyuwangi 2022

2. Persentase Penduduk Miskin

Capaian Indikator kinerja berkaitan dengan kemiskinan dalam hal ini adalah persentase penduduk miskin memiliki capaian yang dapat dikategorikan cukup rendah yaitu mencapai 8.07%. Bahkan jika dilihat melalui analisis Gap Expectation, capaian Indikator tersebut menunjukkan kinerja yang minus satu persen (-1%). Hal tersebut dikarenakan persentase penduduk miskin pada tahun 2021 lebih tinggi bahkan jika dibandingkan dengan tahun dasar yaitu tahun 2020 yang hanya mencapai 8.06%. Melihat capaian kinerja tersebut, maka dapat diinterpretasikan bahwa pemerintah masih belum

mampu atau memiliki kinerja dalam hal menekan jumlah penduduk miskin, sehingga perlu kiranya dilakukan Analisa lebih dalam supaya treatment yang diberikan dapat lebih optimal, atau dapat dilakukan reprojeksi target kinerja, karena target yang telah ditetapkan dirasa terlalu berat. Pada Indikator persentase penduduk miskin pemerintah Kabupaten Banyuwangi masih memiliki beban kinerja sebesar 101% untuk pembangunan lima tahun kedepan.

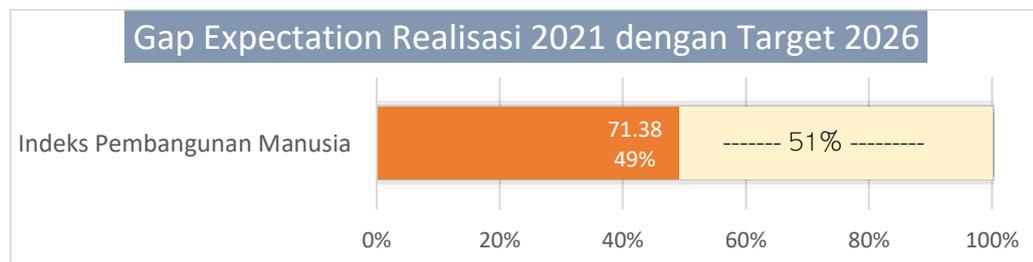


Gambar 2.24: Gap Expectation Persentase Penduduk Miskin

Sumber: Data Diolah BAPPEDA Kabupaten Banyuwangi 2022

3. Indeks Pembangunan Manusia

Capaian Indikator Indeks Pembangunan manusia sebagai representasi capaian pembangunan pada SDM di Kabupaten Banyuwangi memiliki capaian kinerja yang cukup baik. Capaian nilai IPM sebesar 71.38 pada tahun 2021 memberikan kontribusi kinerja sebesar 49% terhadap target pencapaian kinerja pada tahun 2025. Dilihat dari besar kinerjanya, maka Indikator IPM dapat dikategorikan pada Indikator yang memiliki kinerja baik. Berdasarkan capaian kinerjanya, maka pada Indikator IPM masih terdapat Gap Expectation sebesar terhadap pencapaian target kinerja tahun 2025 sebesar 51%.

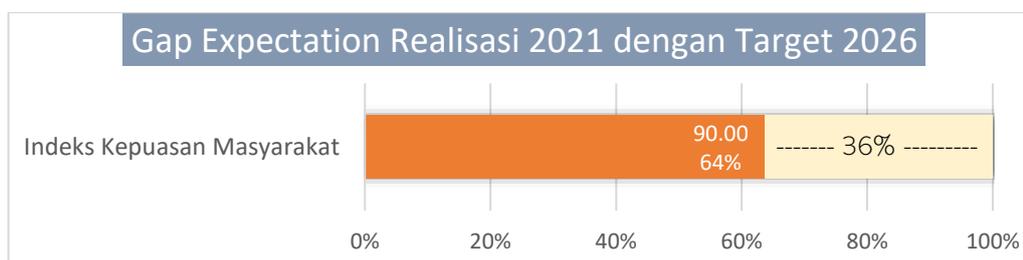


Gambar 2.25: Gap Expectation Indeks Pembangunan Manusia

Sumber: Data Diolah BAPPEDA Kabupaten Banyuwangi 2022

4. Indeks Kepuasan Masyarakat

Capaian kinerja pada Indeks kepuasan masyarakat sebagai representasi keberhasilan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat memiliki kinerja yang baik dengan capaian IKM sebesar 90. Namun jika capaian tersebut jika dianalisis menggunakan metode Gap Expectation, maka realisasi tersebut menunjukkan adanya kemungkinan kelemahan dalam penentuan besaran target kinerja. Dengan kontribusi kinerja sebesar 64% terhadap target capaian pada tahun 2025, maka gap expectation Indikator tersebut selama 3-4 tahun kedepan adalah sebesar 36%.

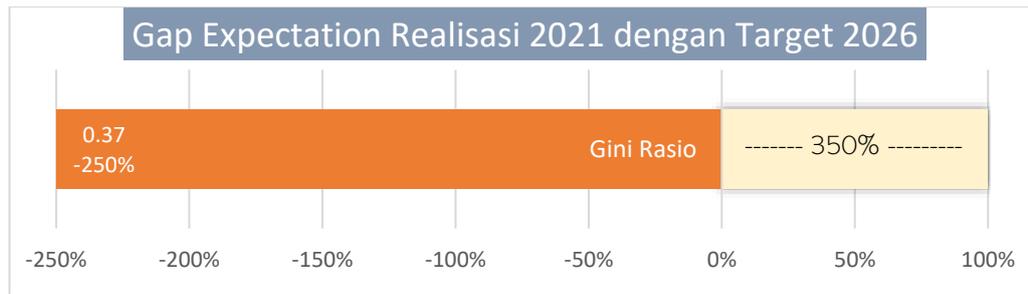


Gambar 2.26: Gap Expectation Indeks Kepuasan Masyarakat

Sumber: Data Diolah BAPPEDA Kabupaten Banyuwangi 2022

5. Gini Rasio

Capaian kinerja Gini Rasio yang merupakan representasi tingkat kesenjangan antar kelas pendapatan di Kabupaten Banyuwangi merupakan Indikator yang memiliki capaian kinerja paling minim. Pada tahun 2021, tingkat kesenjangan antar kelas pendapatan justru mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan dengan tahun 2020, dari yang sebelumnya hanya sebesar 0.32 menjadi 0.37 pada tahun 2021. Hal tersebut mengakibatkan hasil analisis menggunakan metode Gap expectation menunjukkan hasil negative bahkan hingga menyentuh angka -250%. Dengan besaran tersebut, menunjukkan bahwa pemerintah harus berusaha dengan sangat keras dalam menekan angka ketimpangan antar kelas pendapatan jika ingin target yang telah ditetapkan pada tahun 2025 dapat tercapai. Gap expectation atau sisa kinerja yang harus diberikan untuk dapat mencapai target tahun 2025 adalah sebesar 350%.

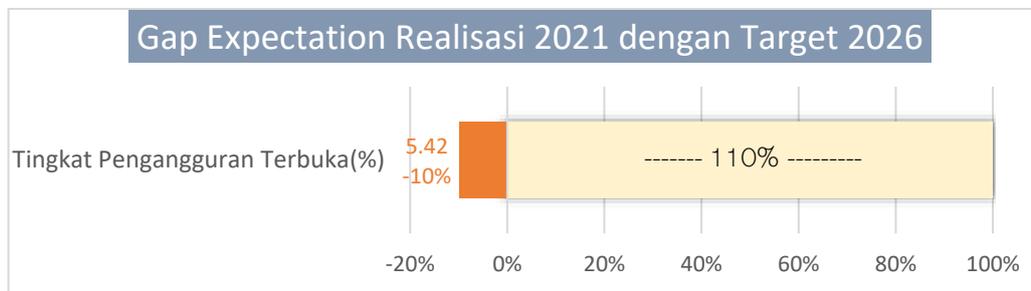


Gambar 2.27: Gap Expectation Gini Rasio

Sumber: Data Diolah BAPPEDA Kabupaten Banyuwangi 2022

6. Tingkat Pengangguran Terbuka

Realisasi kinerja pada indikator tingkat pengangguran terbuka memiliki kinerja yang kurang baik, hampir sama dengan Indikator sebelumnya, tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2021 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2020 dari yang sebelumnya 5.34% menjadi 5.42% pada tahun 2021. Hal tersebut mengakibatkan hasil perhitungan gap expectation menunjukkan kinerja minus yaitu sebesar -10%. Dengan capaian kinerja tersebut, maka sisa kinerja atau upaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2025 masih cukup besar yaitu mencapai 110%.



Gambar 2.28: Gap Expectation Tingkat Pengangguran Terbuka

Sumber: Data Diolah BAPPEDA Kabupaten Banyuwangi 2022

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1. Pelayanan Urusan Wajib

2.1.3.1.1. Pendidikan

Urusan pendidikan merupakan salah satu dari urusan wajib yang masuk dalam pelayanan dasar. Artinya adalah wajib diselenggarakan oleh seluruh pemerintah baik pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten atau kota. Sedangkan pelayanan dasar yang dimaksud adalah urusan pendidikan merupakan pelayanan dasar yang paling dibutuhkan oleh masyarakat. Berikut merupakan capaian penyelenggaraan urusan pendidikan di Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Tabel 2.15 Capaian indikator urusan pendidikan di Kabupaten Banyuwangi

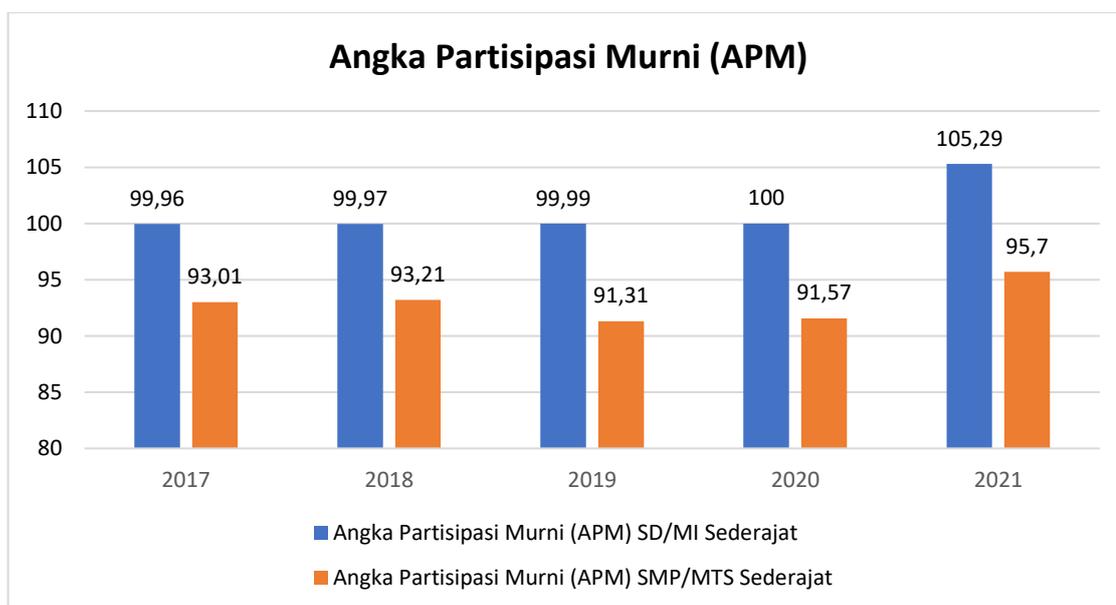
Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Angka Partisipasi Murni (APM)						
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Sederajat	%	99,96	99,97	99,99	100	105,29
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS Sederajat	%	93,01	93,21	91,31	91,57	95,70
Angka Partisipasi Kasar (APK)						
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	106,57	105,44	109,47	104,45	105,77
SD/MI Sederajat	%	106,57	103,33	102,81	102,04	111,05
SMP/MTS Sederajat	%	107,15	104,64	105,24	110,24	123,92
SMA/SMK/MA Sederajat	%	100	100	100	101,54	126,30
Akreditasi Sekolah Minimal B						
Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	%	96,71	97,68	97,68	100	100*
Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	%	80	85,56	87,03	87,38	90,19*
Total Persentase Guru Tersertifikasi Pendidik	%	45,01	46,80	54,62	57,60	56,31
TK	%	32,62	40,08	40,37	42,47	45,69
SD/MI Sederajat	%	45,85	45,92	58,03	62,01	70,10
SMP/MTS Sederajat	%	52,54	53,75	58,27	59,80	53,13
Angka Putus Sekolah						
SD/MI Sederajat	%	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01
SMP/MTS Sederajat	%	0,22	0,17	0,17	0,15	0,15
SMA/SMK/MA Sederajat	%	0,54	0,269	0,389	0,38	0,17*
Angka Melanjutkan Sekolah						

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
SD/MI Sederajat	%	107.13	104.25	107,28	105,62	100,51
SMP/MTS Sederajat	%	97.45	100.62	133,07	100,65	104,13

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi 2022

Ket: *) Data Sementara

Salah satu representasi dari kinerja urusan pendidikan adalah Angka Partisipasi Murni (APM) masing-masing jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. APM adalah proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Sehingga APM pada suatu daerah dapat merepresentasikan seberapa besar penduduk yang bersekolah tepat waktu, atau menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah dengan umur yang sesuai dengan ketentuan kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan yang sedang ditempuh.



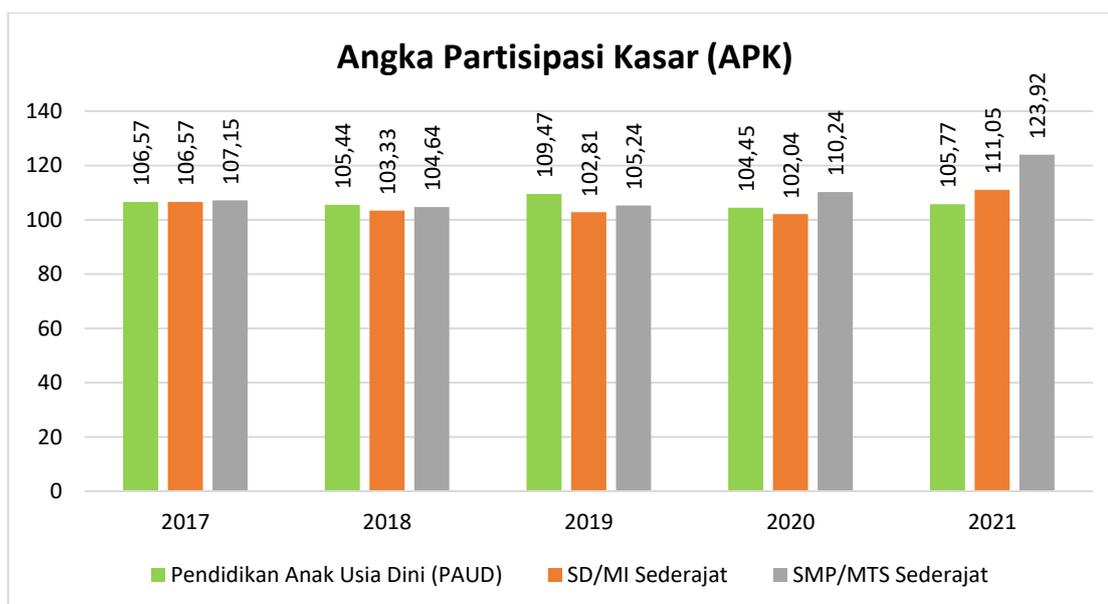
Gambar 2.29 Angka Partisipasi Murni (APM)

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi 2022

Pada gambar di atas menggambarkan capaian APM SD/MI sederajat dan APM SMP/MTS sederajat di Kabupaten Banyuwangi. Merujuk definisi APM pada paragraf sebelumnya, kondisi ideal APM di sebuah daerah direpresentasikan dengan capaian 100% APM di setiap jenjang. Capaian 100% pada APM merepresentasikan penduduk di sebuah daerah dapat bersekolah tepat waktu, tidak ada yang tertinggal kelas, maupun terlalu atau terlalu muda sesuai jenjang seharusnya. Capaian pada gambar di atas

menunjukkan bahwa capaian APM SD/MI sederajat secara progresif meningkat dari tahun 2017 yang sudah mencapai 99,96%. Berbeda dengan capaian APM SD/MI sederajat, capaian APM SMP/MTS sederajat justru mengalami fluktuasi. Meningkat cukup progresif dari tahun 2017 yang mencapai 93,01% hingga pada tahun 2018 mencapai 93.21% namun justru mengalami penurunan pada tahun 2019 mencapai 91.31%. Pada tahun 2020 terjadi peningkatan tipis yang mana APM meningkat menjadi 91.57% atau meningkat 0.26% dari tahun sebelumnya dan pada tahun 2021 kembali meningkat mencapai angka 95,7%.

Indikator selanjutnya adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) masing-masing jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. APK merepresentasikan jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama. Sehingga nilai APK dapat menunjukkan seberapa besar kapasitas sistem pendidikan dapat menampung siswa dari kelompok usia sekolah tertentu. Berikut merupakan capaian APK Kabupaten Banyuwangi masing-masing jenjang

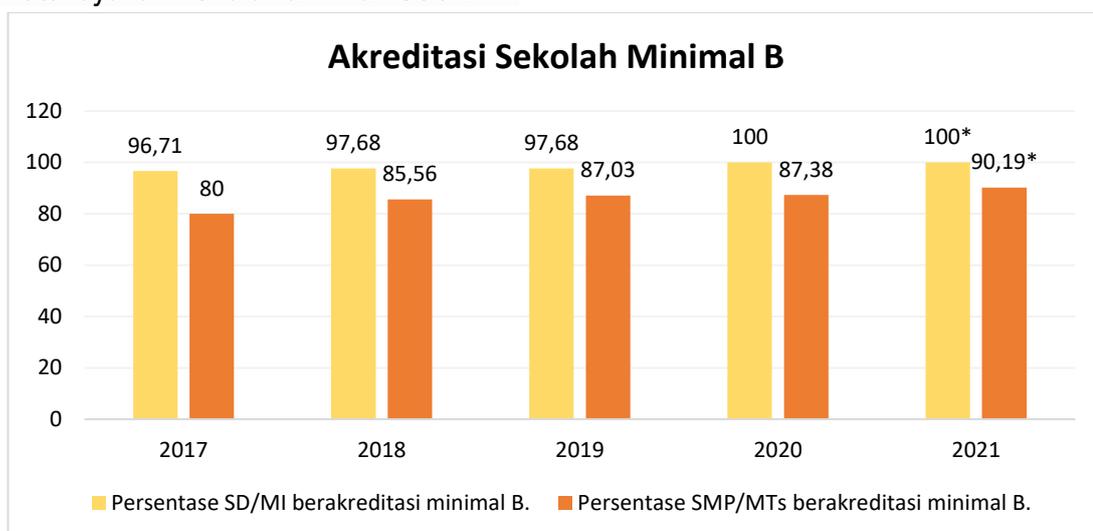


Gambar 2.30 Angka partisipasi kasar (APK) di Kabupaten Banyuwangi

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi 2022

Gambar diatas menunjukkan bahwa pada masing-masing jenjang APK Kabupaten Banyuwangi berada diangka 100% lebih. Artinya adalah jumlah penduduk yang sekolah pada jenjang tersebut melebihi jumlah penduduk usia tertentu pada jenjang tersebut. Keadaan tersebut bisa diakibatkan oleh beberapa poin seperti adanya pendaftaran siswa usia dini, pendaftaran siswa yang telat bersekolah, atau pengulangan kelas. Walaupun APK berada diangka 100% lebih, namun belum semua penduduk

memperoleh layanan akses dan mutu pendidikan anak usia dini serta masih rendahnya mutu layanan Pendidikan Anak Usia Dini.



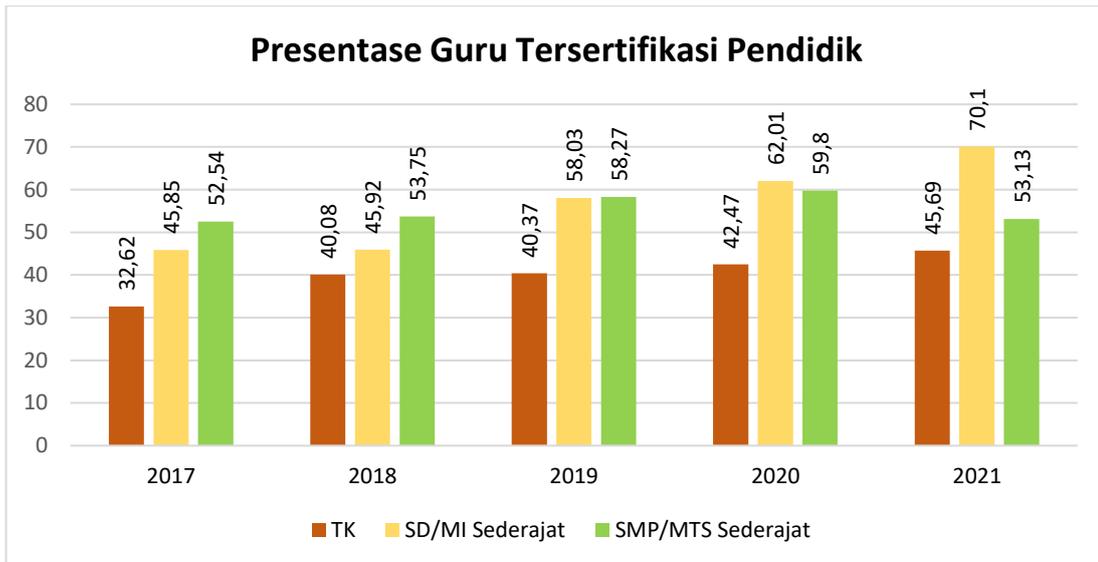
Gambar 2.31 Akreditasi Sekolah Minimal B

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022

Ket: *) *Data Sementara*

Akreditasi sekolah di Kabupaten Banyuwangi minimal B setiap tahun meningkat secara stabil, baik pada jenjang SD/MI sederajat maupun pada jenjang SMP/MTs sederajat. Untuk jenjang SD/MI sederajat meningkat pada tahun 2018 dan 2019 yang mencapai 97,68% dari tahun 2017 yang mencapai 96,71%. Kemudian pada tahun 2020 mencapai 100% dan diproyeksikan pada tahun 2021 capaian tersebut terus bertahan pada angka 100% yang mana sekolah di Kabupaten Banyuwangi pada jenjang SD/MI sederajat telah memiliki akreditasi A dan B. Sedangkan untuk akreditasi pada jenjang SMP/MTs sederajat pada 5 tahun terakhir menunjukkan peningkatan secara stabil pula. Capaian tersebut meningkat setiap tahunnya hingga pada tahun 2021 meningkat pesat mencapai 90,19% dan pada tahun 2020 sebesar 87,39%. Peningkatan pesat terjadi pada tahun 2018 yang mana meningkat 5,56% poin jika dibandingkan dengan tahun 2017 yang masih mencapai 80%. Walaupun akreditasi sekolah minimal B cenderung mengalami peningkatan, namun masih terdapat Lembaga baru yang belum terakreditasi ataupun terakreditasi B.

Indikator selanjutnya yang fokus sebagai representasi dari pembangunan kualitas pendidikan adalah Persentase guru tersertifikasi pendidik. Tenaga pengajar atau guru merupakan aktor utama dalam pembangunan pendidikan di daerah. Sertifikasi guru menunjukkan bahwa guru tersebut dapat memperoleh standar minimum kemampuan. Sehingga semakin tingginya guru tersertifikasi di daerah sekaligus juga dapat menunjukkan kualitas pendidikan di wilayah tersebut. Berikut merupakan persentase guru tersertifikasi di Kabupaten Banyuwangi per masing-masing jenjang pendidikan.



Gambar 2.32 Presentase Guru Tersertifikasi Pendidik

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022

Gambar diatas menunjukkan secara keseluruhan pada setiap jenjang pendidikan memiliki pola yang sama yaitu meningkat secara stabil pada 4 tahun terakhir. Namun, pada tahun 2021 untuk jenjang pendidikan SD/MI/ sederajat dan SMP/MTS/ sederajat mengalami peningkatan. Capaian pada tahun 2021 untuk jenjang pendidikan SD/MI/ sederajat mencapai angka 70,10% dari tahun sebelumnya hanya mencapai 62,01% sehingga persentase guru tersertifikasi pendidik pada jenjang pendidikan SD/MI/ sederajat menurun sebesar 16,32%. Hal yang sama terjadi pada jenjang pendidikan SMP/MTS/ sederajat yang mengalami penurunan pada tahun 2021 hanya mencapai angka 53,13% dari tahun sebelumnya sebesar 59,80%. Sehingga pada tahun 2019 dan 2021 persentase guru tersertifikasi pendidik pada jenjang pendidikan SMP/MTS/ sederajat menurun sebesar 6,67%. Sedangkan untuk jenjang pendidikan TK pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu mencapai angka 45,69% dari tahun sebelumnya sebesar 42,47% pada tahun 2019. Peningkatan yang cukup signifikan mencapai 27,63%. Meskipun pada prinsipnya penyelenggaraan sertifikasi dilaksanakan oleh pemerintah pusat dengan bantuan tim asesor terkait, namun pengembangan kompetensi hingga guru tersebut layak untuk memiliki sertifikat pendidik merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi.

2.1.3.1.2. Kesehatan

2.1.3.1.2.1. Prevalensi Gizi Buruk

Gizi buruk diketahui dengan cara pengukuran berat badan menurut tinggi badan dan/atau umur dibandingkan standar dengan atau tanpa tanda-tanda klinis. Prevalensi balita gizi kurang di Kabupaten Banyuwangi dalam 5 tahun terakhir memiliki tren capaian menurun, meskipun sempat meningkat pada tahun 2018 hingga pada angka 0.56 akan tetapi pada tahun-tahun berikutnya Persentase gizi buruk di Banyuwangi dapat semakin

menurun. Hal ini merupakan capaian yang baik hingga dapat menyentuh angka 0.49 di tahun 2019. Berbeda dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2020 persentase balita gizi buruk mengalami peningkatan yang signifikan hingga mencapai 1,2 dan pada tahun 2021 diproyeksikan akan mengalami peningkatan kembali menjadi 1,25 sehingga keadaan ini berpengaruh pada masih tingginya angka kematian bayi. Sehingga perlu ditangani secara cepat dan tepat.



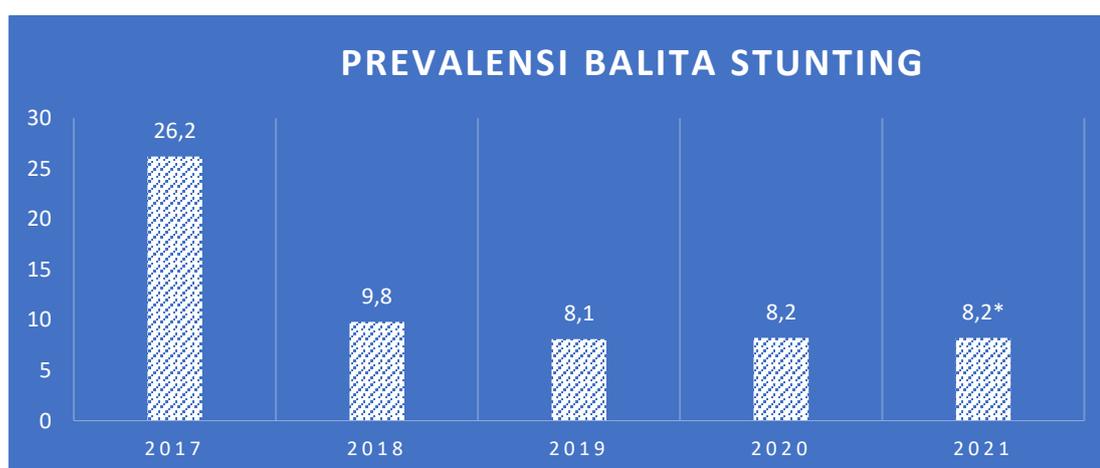
Gambar 2.33 Prevalensi Balita gizi kurang di Kabupaten Banyuwangi

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022

Ket: *) Data Sementara

2.1.3.1.2.2. Stunting

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak di bawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai terutama dalam 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000HPK), yaitu dari janin sampai anak berusia dua tahun;

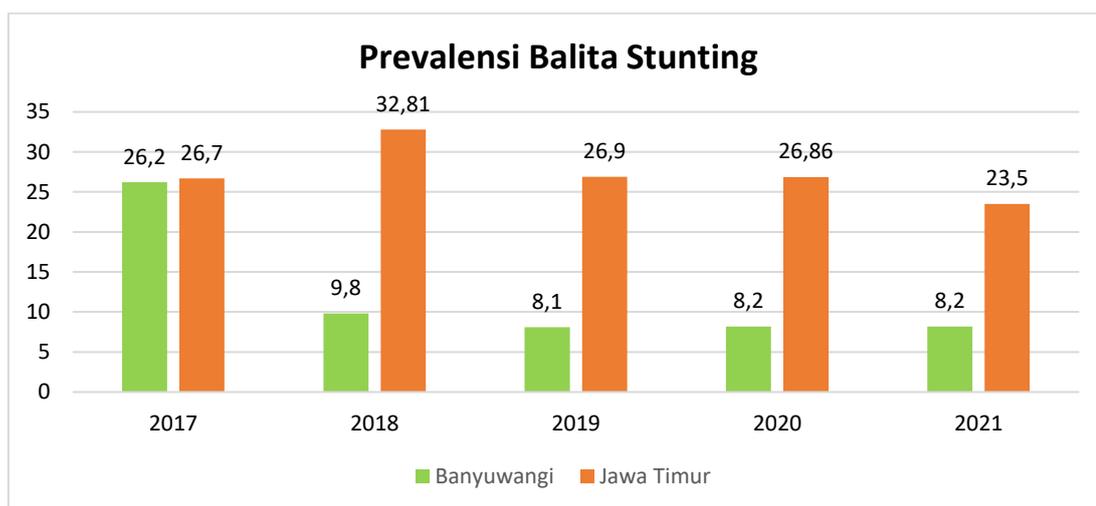


Gambar 2.34: Prevalensi Balita Stunting

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022

Ket: *) Data Sementara

Angka prevalensi stunting di Kabupaten Banyuwangi memiliki tren menurun jika dibandingkan Jawa Timur dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Penurunan stunting terbesar di Kabupaten Banyuwangi terjadi pada tahun 2018 yang menurun sebanyak 16.4 jika dibandingkan pada tahun 2017 yang mencapai angka 26.2, hal ini berbanding terbalik dengan angka stunting Jawa Timur yang mengalami kenaikan menjadi 32.81 di tahun 2018 dari yang sebelumnya mencapai angka 26.7. Pada tahun 2019 prevalensi stunting di Kabupaten Banyuwangi mengalami penurunan menjadi 8.1 dan Jawa Timur menjadi 26.9. Pada tahun 2020 prevalensi balita stunting di Banyuwangi mengalami sedikit peningkatan menjadi 8.2, demikian pula pada tahun 2021 angka stunting di Kabupaten Banyuwangi masih stabil pada angka 8,2 sedangkan Jawa Timur berhasil menurunkan angka stunting menjadi 23,5 dari tahun sebelumnya sebesar 26,86 pada tahun 2019. Peningkatan angka stunting di Kabupaten Banyuwangi ini bisa terjadi karena masih adanya balita yang berstatus gizinya, pendek dan sangat pendek selain itu juga karena masih rendahnya pengetahuan ibu balita terhadap peningkatan gizi balitanya.



Gambar 2.35: Prevalensi Balita Stunting Kabupaten Banyuwangi dan Jawa Timur Tahun 2017-2021

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022

Upaya konvergensi pencegahan dan penanggulangan stunting di Kabupaten Banyuwangi dilaksanakan melalui intervensi gizi spesifik maupun intervensi gizi sensitif dengan strategi pendekatan :

1. Kemandirian Keluarga;
2. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas);
3. Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan;
4. Posyandu;
5. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

Implementasi dari strategi pendekatan tersebut diatas diwujudkan dalam program dan kegiatan berupa :

1. Pemantauan dan pendampingan gizi kepada remaja putri, wanita usia subur, ibu hamil dan menyusui serta bayi baru lahir dan balita, berupa kegiatan pemberian tablet tambah darah, vitamin, PMT, MP-ASI, pencegahan cacangan bagi ibu hamil, kelas ibu hamil serta pelayanan kesehatan peduli remaja (PKPR);
2. Optimalisasi kegiatan posyandu/taman posyandu, germas, gerakan seribu hari pertama kehidupan dan PHBS, bersinergi dengan pemerintah desa/kelurahan dalam dukungan operasionalnya;
3. Penyelenggaraan kelas parenting tentang pola pengasuhan anak, peningkatan kualitas PAUD dan pembinaan UKS;
4. Optimalisasi layanan penyediaan bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin;
5. Pengembangan kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L);
6. Penataan kawasan kumuh, rumah layak huni, akses air bersih serta sanitasi perdesaan padat karya;
7. Pengelolaan persampahan;
8. Optimalisasi pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

Upaya-upaya tersebut diatas telah dituangkan dalam landasan regulasi pelaksanaan konvergensi pencegahan dan penanggulangan stunting di Kabupaten Banyuwangi meliputi :

1. Surat Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : Kep.42/M.PPN/HK/04/2020 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2021;
2. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : Kep.10/M.PPN/HK/02/2021 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2022
3. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 68 Tahun 2020 tentang Konvergensi Pencegahan dan Penanggulangan Stunting di Kabupaten Banyuwangi
4. Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: Kep.42/M.PPN/HK/04/2020 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2021;
5. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : Kep.10/M.PPN/HK/02/2021 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2022;
6. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 68 Tahun 2020 tentang Konvergensi Pencegahan dan Penanggulangan Stunting di Kabupaten Banyuwangi;

7. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/12/KEP/429.011/2021 tentang Tim Percepatan Konvergensi Pencegahan dan Penanggulangan Stunting di Kabupaten Banyuwangi;
8. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/57/KEP/429.011/2021 tentang Penetapan Desa Prioritas Percepatan Konvergensi Pencegahan dan Penanggulangan Stunting di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021.

2.1.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.1.3.1.3.1. Status dan Panjang jalan

Jalan di Kabupaten Banyuwangi memiliki beberapa kategori status kepemilikan, diantaranya adalah Jalan Nasional, Jalan Provinsi, dan Jalan Kabupaten. Jalan Nasional di kabupaten selama lima tahun memiliki panjang yang stagnan yaitu diangka 122.97 Km, berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No : 290/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional adalah sebagai berikut:

Tabel 2.16: Ruas Jalan Menurut Statusnya

No.	No Ruas			Nama Ruas	Panjang (Km)
1	026			Bajulmati (Bts.Kabupaten. Situbondo) - Ketapang	26,36
2	074			Bts. Kabupaten. Jember - Genteng Kulon	30,02
3	075			Genteng Kulon - Jajag - Benculuk	16,1
4	076			Benculuk – Rogojampi	17,01
5	077			Rogojampi - Bts. Kota Banyuwangi	10,23
6	077	11	K	Jln. S. Parman (Banyuwangi)	1,49
7	077	12	K	Jln. Adi Sucipto (Banyuwangi)	1,4
8	077	13	K	Jln. A. Yani (Banyuwangi)	1,31
9	077	14	K	Jln. Pb. Sudirman (Banyuwangi)	1,19
10	078	11	K	Jln. Basuki Rakhmat (Banyuwangi)	1,54
11	078	12	K	Jln. Yos Sudarso (Banyuwangi)	2,82
12	078	13	K	Jln. Gatot Subroto (Banyuwangi)	3,5
13	106			Srono – Muncar	10
				Total	122,97

Sumber: Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banyuwangi 2022

Tabel 2.17: Panjang Jalan Negara, Provinsi dan Kabupaten di Kabupaten Banyuwangi

Kategori Jalan	2017	2018	2019	2020	2021
Jalan Negara	134.2	134.2	134.2	134.2	134.2
Jalan Provinsi	91.07	91.07	91.07	91.07	91.07
Jalan Kabupaten	2771.25	2771.25	2771.25	2771.25	2771.25

Sumber: Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banyuwangi 2022

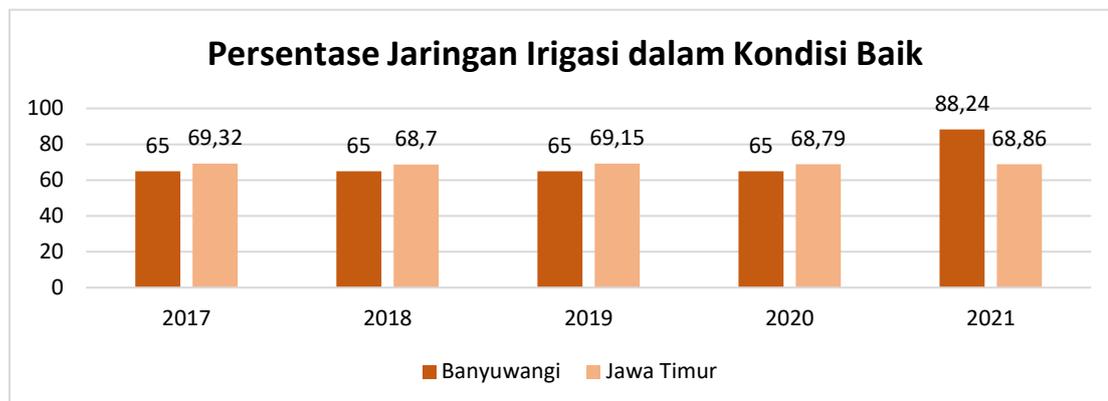
Berdasarkan SK Gubernur Jawa Timur No : 188/128/KPTS/013/2016 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Provinsi, dari tahun 2016-2020 memiliki panjang 134.2 km. Jalan Provinsi juga memiliki panjang jalan yang stagnan dari tahun 2017-2020. Panjang Jalan Provinsi di Kabupaten Banyuwangi stagnan pada 91.07 km dari tahun 2016-2020. Panjang jalan Kabupaten menurut SK Bupati Banyuwangi No: 258 Tahun 2016 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten, selama 5 tahun cukup stagnan dengan penambahan pada tahun 2017 yang sebelumnya sepanjang 2771 pada tahun 2016 menjadi 2771.25 pada tahun 2017, dan terus stagnan hingga tahun 2021.

Kondisi kemantapan jalan di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2021 memiliki target sebesar 72% dan terealisasi sebesar 74%. Sehingga Kabupaten Banyuwangi memiliki capaian sebesar 103%. Hal ini tercermin dalam indikator presentase kondisi jalan dalam kondisi baik dalam kecepatan >20 km/jam. Upaya mempertahankan kemantapan jalan di Kabupaten Banyuwangi dilakukan melalui peningkatan pembangunan dan pemeliharaan jalan secara rutin dan berkala.

2.1.3.1.3.2. Persentase Panjang Saluran Irigasi dalam Kondisi Baik

Persentase Panjang saluran irigasi dalam kondisi baik di Provinsi Jawa Timur memiliki capaian yang fluktuatif dari tahun 2017 hingga tahun 2021. Capaian paling rendah justru terjadi pada tahun 2021 sebesar 68,86. Hal ini dikarenakan tren capaian pada 4 tahun terakhir yang cukup fluktuatif dan capaian tertinggi pada saat tahun 2017 yaitu sebesar 69,32. Persentase panjang saluran irigasi dalam kondisi baik di Kabupaten Banyuwangi dari tahun 2017-2020 dalam kondisi stagnan. Panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik dan teknis terlihat stagnan dikarenakan setiap tahunnya Dinas PU Pengairan melakukan kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi, namun juga ada beberapa jaringan irigasi yang lain mengalami kerusakan ringan diakibatkan faktor alam dan umur bangunan.

Namun, pada tahun 2021 jaringan irigasi dalam kondisi baik di Kabupaten Banyuwangi mengalami peningkatan yang signifikan hingga menyentuh angka 88,24.

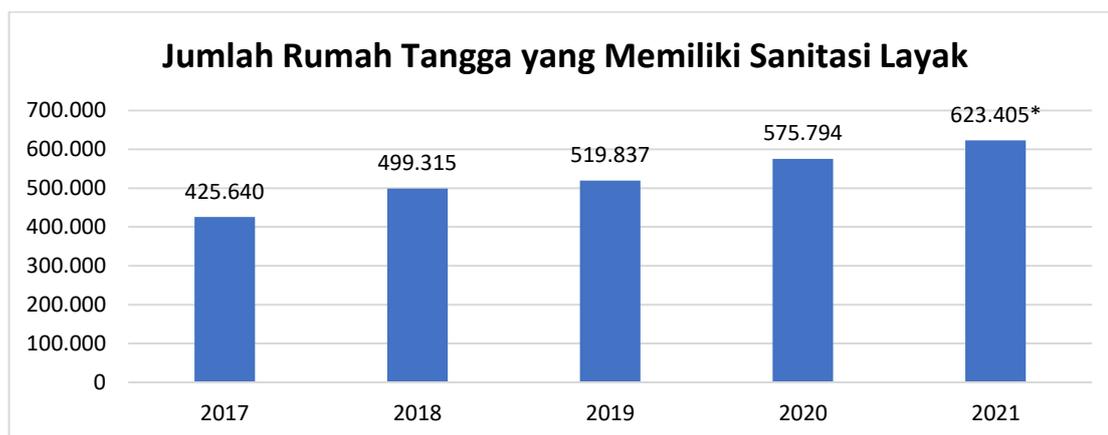


Gambar 2.36 Persentase panjang saluran irigasi kabupaten dalam kondisi baik di Kabupaten Banyuwangi

Sumber: Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banyuwangi 2022

2.1.3.1.3.3. Jumlah rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak adalah perbandingan antara jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak terhadap jumlah rumah tangga, dinyatakan dalam persen (%). Fasilitas sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan yaitu fasilitas tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu, dilengkapi dengan kloset jenis leher angsa, serta tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik atau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).



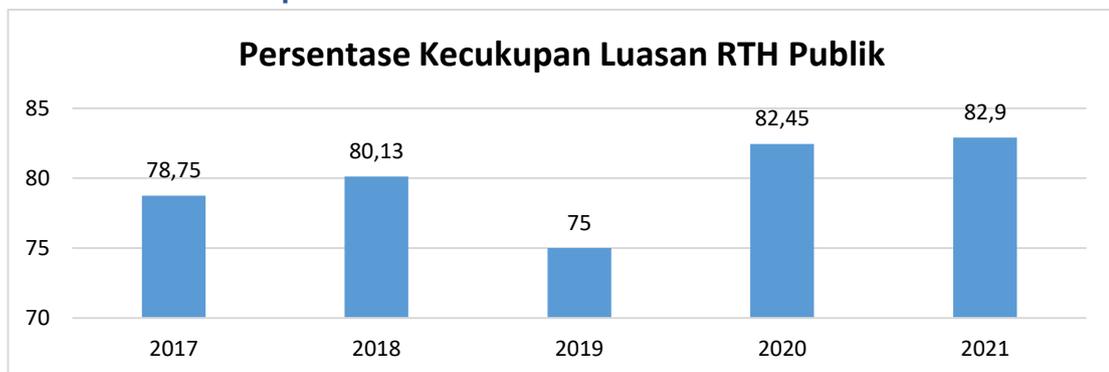
Gambar 2.37 Jumlah rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak di Kabupaten Banyuwangi

Sumber: Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banyuwangi 2022

Ket: *) Data Sementara

Jumlah rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak di Kabupaten Banyuwangi dalam kurun waktu 5 tahun memiliki tren capaian yang positif dengan adanya peningkatan capaian pada setiap tahunnya. Dengan posisi awal ditahun 2017 sejumlah 425.640 rumah tangga, kemudian meningkat menjadi 499.315 rumah tangga ditahun 2018. Jumlah tersebut terus meningkat hingga pada tahun 2019 menyentuh angka 519.837 dan kembali meningkat di tahun 2020 menjadi 575.794. Pada tahun 2021 jumlah rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak diproyeksikan akan terus mengalami peningkatan hingga sebanyak 623.405 rumah tangga. Walaupun memiliki tren capaian yang positif, namun masih ada rumah tangga yang belum memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan. Sanitasi merupakan kebutuhan dasar manusia, sehingga semakin lama kesadaran masyarakat akan pentingnya keluarga yang sehat dengan sanitasi yang layak maka akan semakin meningkat akses terhadap sanitasi yang layak.

2.1.3.1.3.4. Cakupan Luasan RTH Publik



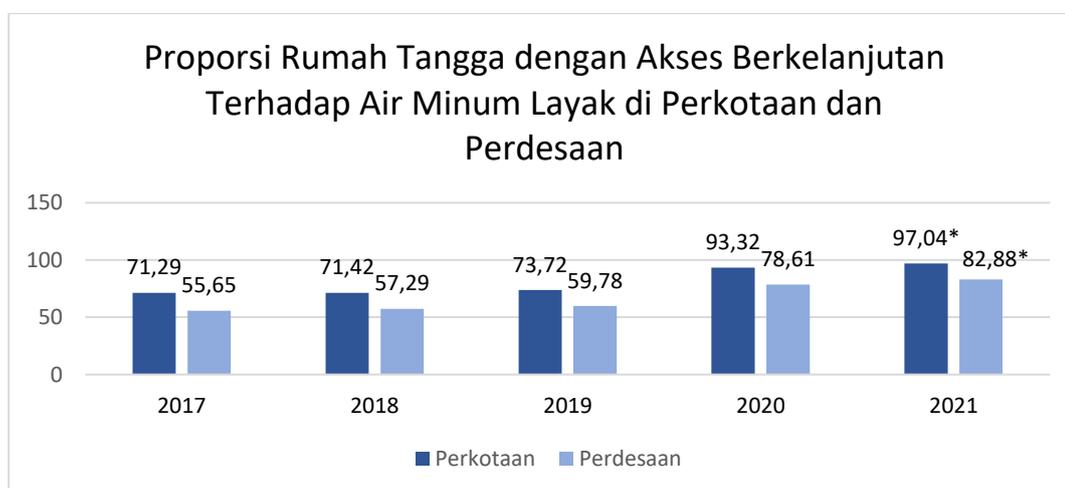
Gambar 2.38: Persentase Kecukupan Luasan RTH Publik

Sumber: Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banyuwangi 2022

Kecukupan luasan RTH publik di Kabupaten Banyuwangi setidaknya harus menyediakan RTH publik minimal 20% dari total luas Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) Banyuwangi melalui pembangunan taman kota, taman lokal dan taman lingkungan. Luasan RTH publik pada tahun 2017 memiliki capaian 78,75% dan mengalami peningkatan hingga mencapai 80,13% di tahun 2018. Namun di tahun 2019 mengalami penurunan hingga menjadi 75%, kemudian kembali meningkat menjadi 82,45% pada tahun 2020 dan berhasil mengalami peningkatan kembali pada tahun 2021 menjadi sebesar 82,90%. Peningkatan ini terjadi karena pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengadakan lomba pengelolaan RTH yang mendorong pemerintah desa untuk memaksimalkan pengelolaan RTH. Dari data diatas dapat diketahui bahwa persentase luasan RTH publik di Kabupaten Banyuwangi bersifat fluktuatif dan berubah-ubah sehingga diperlukan penambahan kawasan ruang terbuka hijau, reboisasi, pengendalian ijin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang dan penindakan tegas bagi pelanggaran ijin tata bangunan dan lingkungan.

2.3.1.1.3.5 Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan dan pedesaan

Air minum merupakan suatu kebutuhan bagi manusia untuk terus dapat bertahan hidup, oleh karena itu air minum yang layak sangat dibutuhkan agar manusia memperoleh kehidupan yang sehat dan berkelanjutan. Air minum yang berkualitas (layak) adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 m dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tangki, air sumur dan mata air tidak terlindung. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak adalah perbandingan antara rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum berkualitas (layak) dengan rumah tangga seluruhnya



Gambar 2.39: Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan dan pedesaan

Sumber: Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banyuwangi 2022

Ket: *) Data Sementara

Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan di Kabupaten Banyuwangi selama lima tahun terakhir memiliki capaian yang lebih tinggi daripada di pedesaan, walaupun sama-sama mengalami peningkatan setiap tahunnya. Di perkotaan akses terhadap air minum layak pada tahun 2017 memiliki capaian sebesar 71,29 sedangkan di pedesaan 55,65, pada tahun 2018 di perkotaan naik menjadi 71,42 dan di pedesaan mencapai 57,29. Pada tahun 2019 akses air minum layak di perkotaan Kembali meningkat menjadi 73,27 dan di pedesaan meningkat menjadi 59,78. Pada tahun 2020 di perkotaan meningkat menjadi 93,32 dan di pedesaan mencapai 78,61. Oleh karena itu, maka pada tahun 2021 diproyeksikan akan kembali mengalami peningkatan baik di pedesaan menjadi 82,88 dan di perkotaan menjadi 97,04. Semakin besar persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak

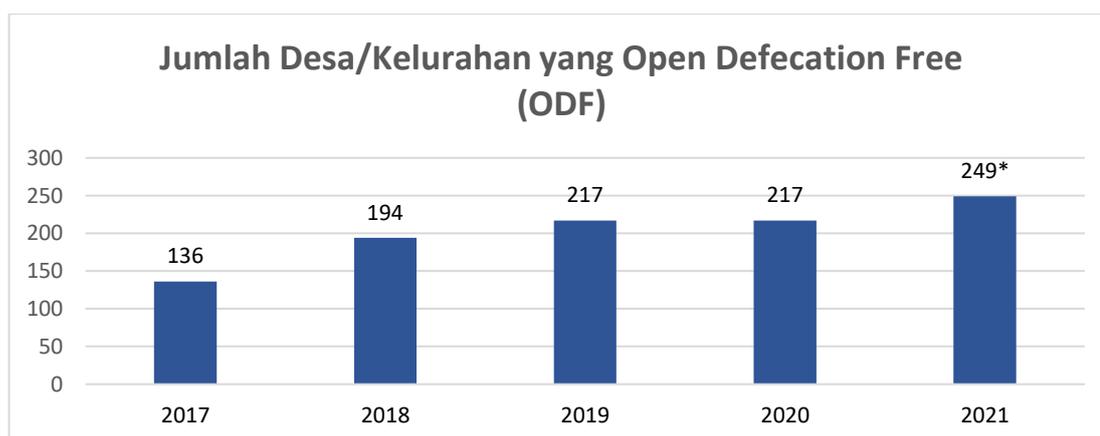
menunjukkan semakin baiknya kondisi rumah tangga di suatu daerah sehingga harus dioptimalkan terutama dalam daerah perdesaan.

Capaian SPM pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2019 dengan indikator pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari hari memiliki capaian SPM sebesar 93% dengan target sebanyak 522.843 KK dan terealisasi sebanyak 487.020 KK. Sedangkan capaian SPM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2020 dengan indikator pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari hari memiliki capaian SPM sebesar 86,4% dengan target 539.355 KK dan terealisasi sebesar 466.110 KK. Sehingga dapat dilihat bahwa capaian SPM untuk indikator pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari hari mengalami sedikit penurunan pada tahun 2020. Selanjutnya, untuk indikator penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik pada tahun 2020 memiliki capaian sebesar 92,1% dengan target sebanyak 553.730 KK dan terealisasi sebanyak 509.844 KK.

2.1.3.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

2.1.3.1.4.1. Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF).

Jumlah desa/kelurahan yang *Open Defecation Free* (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) di Kabupaten Banyuwangi memiliki tren capaian meningkat yang sangat bagus. Berawal dengan sejumlah 136 desa/kelurahan yang ODF Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2017 yang kemudian capaiannya meningkat menjadi 194 desa/kelurahan di tahun 2018 dan meningkat kembali menjadi 217 desa/kelurahan yang ODF di tahun 2019 hingga tahun 2020. Pada tahun 2021 diproyeksikan akan meningkat menjadi 249 dan untuk lebih rinci data tersaji dalam gambar berikut:



Gambar 2.40 Jumlah desa/kelurahan yang open defecation free (ODF)/ stop buang air besar sembarangan

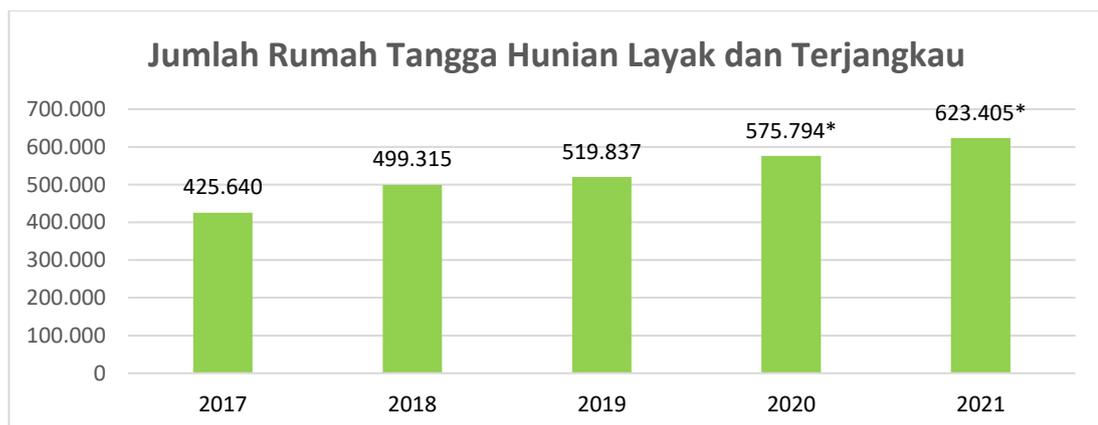
Sumber: Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banyuwangi 2022

Ket: *) Data Sementara

Deklarasi yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2020 mendeklarasikan bahwa Desa Ketapang, Kelurahan Klatak dan Kecamatan Kalipuro telah ODF. Sehingga di hari itu dideklarasikan bahwa seluruh desa/kelurahan di Kabupaten Banyuwangi telah ODF atau bebas dari buang air sembarangan. Dalam mencapai ODF, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus berupaya dan berinovasi supaya kondisi ini dapat berlangsung secara berkelanjutan sehingga kedepannya Kabupaten Banyuwangi dapat dinyatakan ODF secara tingkat Kabupaten.

2.1.3.1.4.2. JRTHLT: Jumlah rumah tangga hunian layak dan terjangkau.

JRTHLT: di Kabupaten Banyuwangi dalam kurun waktu 5 tahun memiliki tren capaian yang meningkat. Capaian pada tahun 2017 tercatat sebanyak 425.640. Pada tahun 2018 jumlah rumah tangga hunian layak dan terjangkau meningkat menjadi 499.315. Jumlah tersebut terus meningkat hingga pada tahun 2019 menjadi 519.837. Pada tahun 2020 diproyeksikan masih terjadi peningkatan jumlah menjadi 575.794. Berdasarkan capaian selama 4 tahun terakhir, maka pada tahun 2021 diproyeksikan akan mengalami peningkatan menjadi 623.405,10.



Gambar 2.41 JRTHLT: Jumlah rumah tangga hunian layak dan terjangkau

Sumber: Data Diolah Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022

Ket: *) Data Sementara

2.1.3.1.4.3. Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.

Kabupaten Banyuwangi dalam kurun waktu 5 tahun terlihat memiliki tren capaian yang positif. Berdasarkan data yang tersaji dalam gambar di bawah maka dapat terlihat secara keseluruhan masih sedikit rumah tangga di Banyuwangi yang telah terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja yaitu <1%. Capaian tertinggi yaitu pada tahun 2017 di mana lebih dari 0.5% rumah tangga di Kabupaten Banyuwangi telah terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja. Meskipun secara jumlah angka masih sangat sedikit tetapi sudah ada peningkatan pada setiap tahunnya. Sehingga dengan tren capaian yang positif tersebut, pada tahun 2020 proporsi rumah tangga yang terlayani sistem

pengelolaan tinja akan meningkat menjadi 0.51%. Berdasarkan capaian selama 4 tahun terakhir, maka pada tahun 2021 diproyeksikan akan mengalami penurunan menjadi 0,46.



Gambar 2.42 Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.

Sumber: Data Diolah Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022

Ket: *) Data sementara

2.1.3.1.4.4. Luasan Kawasan Kumuh yang Tertangani

Kondisi pemukiman kumuh di Kabupaten Banyuwangi secara umum berada pada Kawasan pesisir. Pada umumnya tingkat kepadatan bangunan dapat diklasifikasikan ke dalam kepadatan sedang dan kawasan pemukiman kumuh seluruhnya berada pada Kawasan perkotaan. Lokasi Kawasan kumuh di Kabupaten Banyuwangi tersebar di 3 kelurahan yakni Kelurahan Mandar, Kelurahan Lateng, dan Kelurahan Kepatihan yang semuanya berada di kecamatan Banyuwangi. Berikut luas Kawasan kumuh yang tertangani dalam kurun waktu 5 tahun.



Gambar 2.43: Luasan kawasan Kumuh yang tertangani (Ha)

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman Tahun 2022

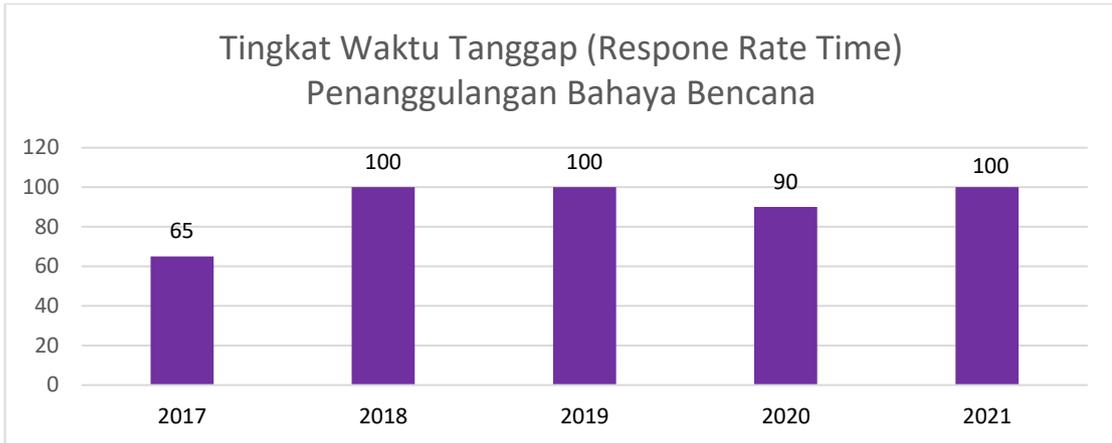
Luasan kawasan kumuh yang tertangani (Ha) memiliki tren capaian meningkat dengan capaian tahun 2017 memiliki peningkatan capaian hingga menjadi 17,1. Pada tahun 2018 memiliki peningkatan capaian hingga menjadi 20,6. Pada tahun 2019 masih terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 58 dan pada tahun 2020 menunjukkan adanya penurunan hingga menjadi 10. Menurunnya luasan Kawasan kumuh yang tertangani di Kabupaten Banyuwangi terjadi karena beberapa faktor seperti adanya 48,65% rumah tangga yang belum memiliki akses layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan, terdapat sebanyak 5,61% rumah tangga belum memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan, serta belum adanya kelurahan/ desa yang memiliki Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. Namun, pada tahun 2021 luasan kawasan kumuh yang tertangani mengalami peningkatan yang signifikan hingga menyentuh angka 77,9 Ha.

Capaian SPM pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Banyuwangi dengan indikator penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota dan indikator fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Kabupaten/Kota pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 belum dilaksanakan. Hal ini dikarenakan hingga tahun 2020 tidak ada bencana yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi.

2.1.3.1.5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

2.1.3.1.5.1. Tingkat Waktu Tanggap (*response rate time*) Penanggulangan Bahaya Bencana

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana yang setiap saat bisa mengancam, mungkin tidak bisa dicegah, tetapi bisa diupayakan untuk mengurangi risiko bencana yang terjadi. Tingkat Waktu Tanggap (*response rate time*) merupakan salah satu cara dalam mengupayakan penanggulangan bahaya bencana, jika waktu tanggapnya semakin cepat maka penanggulangan bahaya juga akan cepat diselesaikan. Tingkat Waktu Tanggap (*response rate time*) Penanggulangan Bahaya Bencana di Kabupaten Banyuwangi memiliki tren capaian yang meningkat yang mana pada tahun 2017 dan 2018 mencapai angka 65% dan mengalami peningkatan menjadi 100% di tahun 2018 dan 2019. Pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan menjadi 90%. Namun, pada tahun 2021 diproyeksikan akan mengalami peningkatan menjadi 100%. Keterbatasan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia, sarpras damkar, dan tidak adanya dokumen mitigasi bencana kebakaran merupakan kendala dalam penanggulangan bahaya bencana di Kabupaten Banyuwangi.

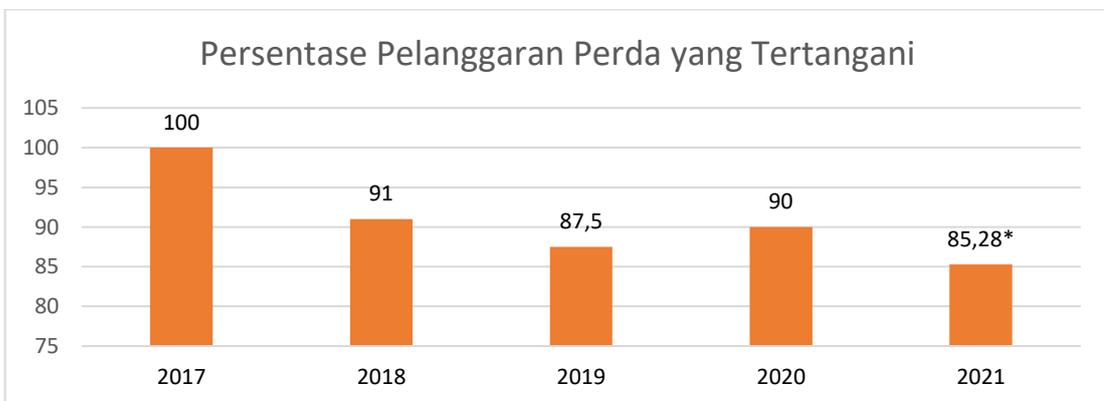


Gambar 2.44: Tingkat Waktu Tanggap (Response Rate Time) Penanggulangan Bahaya Bencana

Sumber: BPBD Kabupaten Banyuwangi 2022

2.1.3.1.5.2. Persentase Pelanggaran Perda yang Tertangani

Penanganan terhadap pelanggaran perda sudah selayaknya ditegakkan untuk memelihara ketenteraman dan ketertiban umum yang aman dan kondusif. Pelanggaran perda yang tertangani di Kabupaten Banyuwangi memiliki tren yang fluktuatif. Pada tahun 2017 pelanggaran perda yang tertangani mencapai angka 100%, kemudian mengalami penurunan menjadi 91% di tahun 2018 dan Kembali menurun hingga mencapai 87,5% di tahun 2019. Walaupun selama dua tahun sebelumnya mengalami penurunan, pada tahun 2020 kembali meningkat menjadi 90%. Pada tahun 2021 diproyeksikan akan mengalami penurunan menjadi 85,28. Adanya tren yang menurun dalam penanganan terhadap perda dikarenakan minimnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta masih adanya indikator pembentuk indeks rasa aman yang perlu di tingkatkan.



Gambar 2.45: Persentase Pelanggaran Perda yang Tertangani

Sumber: Stuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022

Ket: *) Data sementara

2.1.3.1.5.3. Indeks Risiko Bencana

Kajian Risiko Bencana dilakukan dengan melakukan perhitungan pada komponen bahaya (*hazard*), kerentanan (*vulnerability*), dan kapasitas (*capacity*) di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota. Komponen bahaya adalah fenomena alam yang dapat menyebabkan bencana seperti gempa bumi, letusan gunung api, tsunami, banjir, dan lainnya. Komponen kerentanan adalah (1) kondisi fisik, (2) sosial budaya, (3) ekonomi, dan (4) lingkungan yang rentan terpapar bencana. Sementara komponen kapasitas adalah dari unsur ketahanan daerah seperti kebijakan dan kelembagaan, pendidikan dan pelatihan, logistik, kapasitas mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan darurat; dan kapasitas pemulihan. Kabupaten Banyuwangi memiliki indeks risiko bencana dengan capaian menurun pada 5 tahun terakhir. Pada tahun 2021 memiliki capaian sebesar 128,03 menurun sebanyak 10,95 dari tahun sebelumnya dimana capaian tahun 2020 adalah 138,98.

Tabel 2.16 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Banyuwangi

Indikator	Realisasi				
	2017	2018	2019	2020	2021
Indeks Risiko Bencana	206,44	168,29	153,92	138,98	128,03

Sumber: InaRISK, 2021

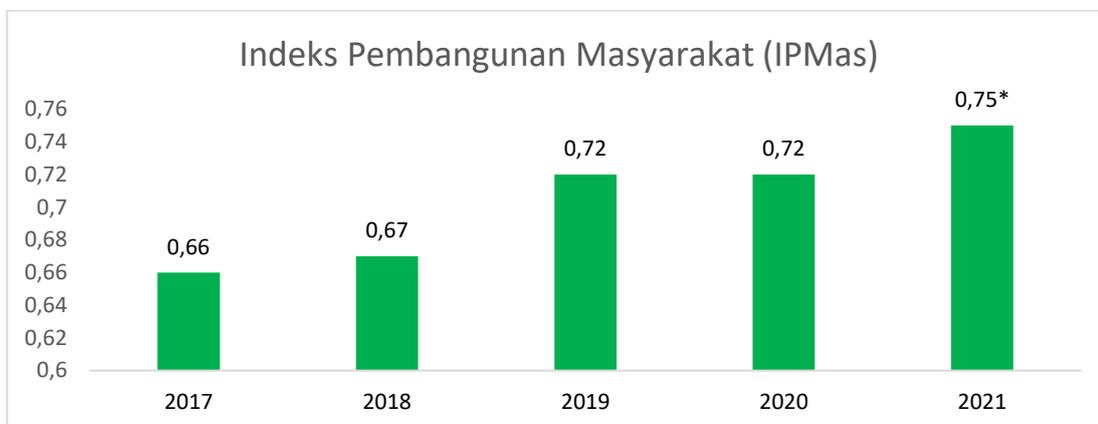
Realisasi pencapaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2019 untuk indikator Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, Indikator Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, dan Indikator Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran memiliki angka capaian sebesar 100%. Namun pada indikator Pelayanan Informasi rawan bencana memiliki capaian sebesar 2,5 % dengan target 10 layanan dan terealisasi sebanyak 4 layanan. Kemudian, untuk capaian SPM pada tahun 2020 keseluruhan indikator yang terdiri dari pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum, pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana serta pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran secara keseluruhan telah memiliki angka capaian SPM sebesar 100%.

2.1.3.1.6. Sosial

2.1.3.1.6.1. Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)

Indeks pembangunan masyarakat Kabupaten Banyuwangi dari tahun 2017 hingga tahun 2021 selalu mengalami kenaikan. Dari yang hanya sebesar 0,66 pada tahun 2017 menjadi 0,67 pada tahun 2018. Pada tahun 2019 kembali meningkat mencapai angka 0,72 dan sudah mendapatkan kategori pembangunan masyarakat baik, jika

dibandingkan dengan nasional maupun IPMas Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2019 masih lebih tinggi. Pada tahun 2020 tetap pada angka 0,72 dan tahun 2021 diproyeksikan akan mengalami peningkatan menjadi 0,75. Secara lebih jelas dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

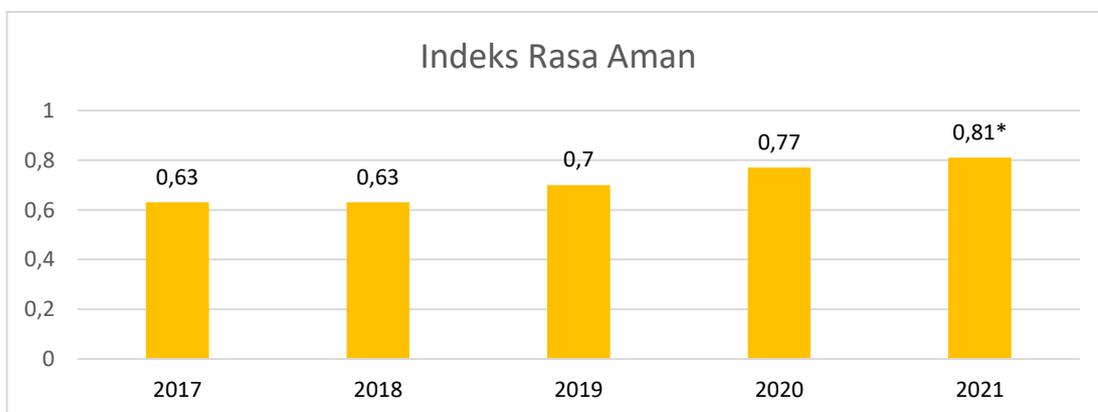


Gambar 2.46 IPMas Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017-2021

Sumber: Data Diolah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022

Ket: *) Data sementara

2.1.3.1.6.2. Indeks Rasa Aman



Gambar 2.47 Capaian Indikator Indeks Rasa Aman

Sumber: Data Diolah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022

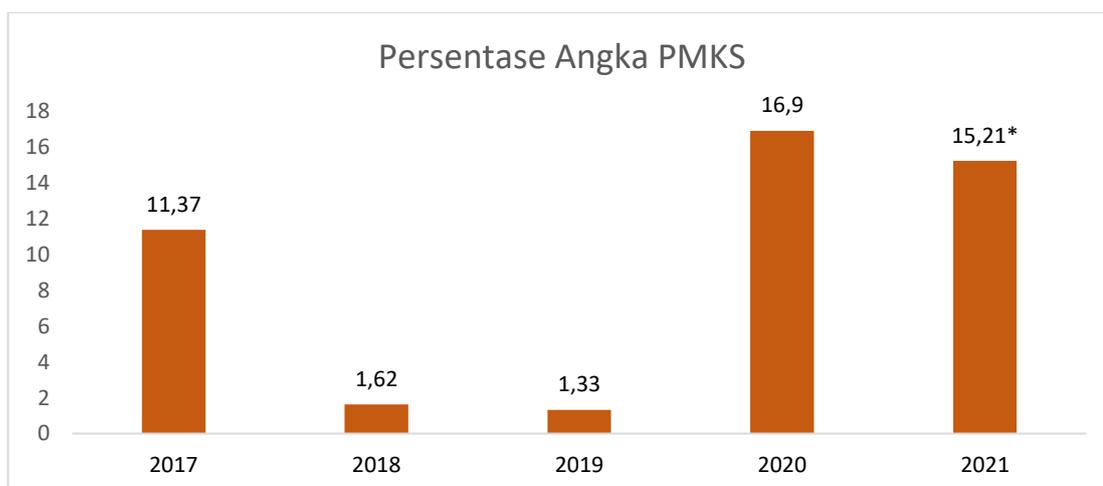
Ket: *) Data sementara

Indeks rasa aman terdiri dari 4 indikator yakni kesadaran hukum, organisasi sipil, mitigasi risiko sosial, dan penyelesaian sengketa secara beradab. Indikator indeks rasa aman pada tahun 2017 yaitu mencapai 0,63. Di tahun selanjutnya pada tahun 2018 tetap tidak mengalami kenaikan yaitu diangka 0,63. Pada tahun 2019 angka indeks rasa aman dapat menyentuh angka 0,7. Kenaikan capaian ini menjadi bukti bahwa tingkat

ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat sudah cukup terjamin. Sehingga diproyeksikan pada tahun 2020 menjadi sebesar 0,77 dan tahun 2021 capaian indeks rasa aman di Kabupaten Banyuwangi kembali meningkat dengan angka 0,81.

2.1.3.1.6.3. Persentase Angka PMKS

Keberhasilan capaian pada setiap indikator urusan sosial menunjukkan bahwa komitmen Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam melaksanakan kebijakannya sudah menunjukkan *pro poor* serta memberikan perhatian lebih pada masyarakat yang memiliki kapasitas rendah. Hal ini terlihat dari menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Banyuwangi yang pada tahun 2017 sebesar 11,73%. Perkembangan yang sangat baik terlihat dari capaian angka PMKS yang menurun drastis pada tahun 2018 yaitu mencapai angka 1,62% dan terus menurun hingga di tahun 2019 angka PMKS menyentuh angka 1,33%. Berbeda dari dua tahun sebelumnya, pada tahun 2020 persentase angka PMKS mengalami kenaikan hingga mencapai angka 16,9%, hal ini terjadi karena adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan pembatasan ruang gerak masyarakat sehingga mempengaruhi aktivitas ekonomi dan pendapatan yang akan terus menurun. Namun, pada tahun 2021 diproyeksikan akan mengalami penurunan menjadi sebesar 15,21%.



Gambar 2.48 Capaian Indikator Presentase Angka PMKS

Sumber: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021

Ket: *) Data sementara

2.1.3.1.7. Tenaga Kerja

2.1.3.1.7.1. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Berikut merupakan tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Banyuwangi tahun 2017-2021:



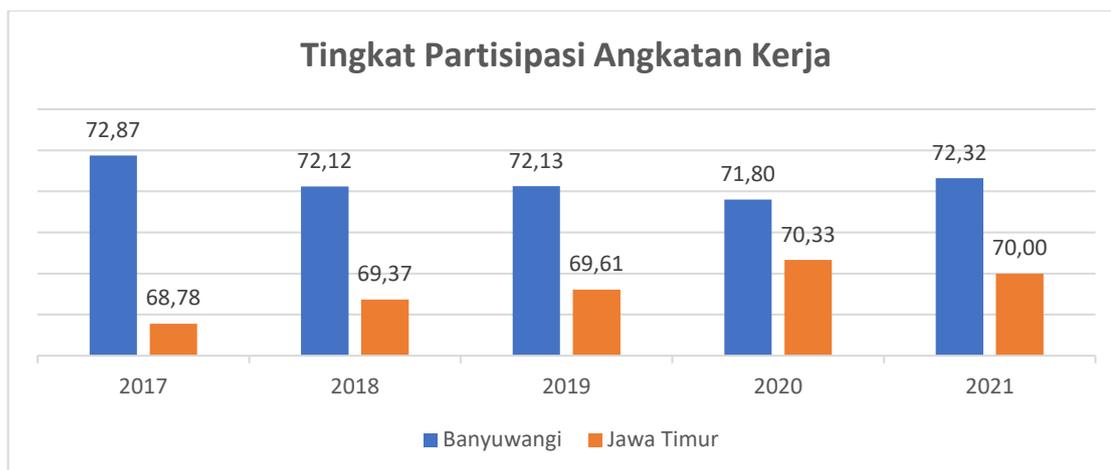
Gambar 2.49 Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Banyuwangi

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Perindustrian Kabupaten Banyuwangi 2022

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Banyuwangi dalam kurun waktu 5 tahun memiliki tren capaian yang negatif dengan adanya peningkatan angka capaian pada setiap tahunnya. Pada tahun 2017, TPT Kabupaten Banyuwangi mencapai 3,07, kemudian bertambah menjadi 3,67 di tahun 2018. Angka tersebut masih terus mengalami peningkatan hingga di tahun 2019 mencapai 4,08. Di tahun 2020 hingga 2021, capaian angka TPT Kabupaten Banyuwangi berada di atas angka 5, yaitu tahun 5,34 di tahun 2020, dan 5,42 di tahun 2021. Munculnya pandemi Covid-19 di sekitar bulan Maret 2020 yang masih belum selesai hingga akhir tahun 2021 ini, berimbas pada peningkatan angka TPT Kabupaten Banyuwangi tersebut.

2.1.3.1.7.2. Tingkat partisipasi angkatan kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah Persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.



Gambar 2.50: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Banyuwangi dan Jawa Timur

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Perindustrian Kabupaten Banyuwangi 2022 dan BPS Provinsi Jawa Timur 2022

Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Banyuwangi dalam kurun waktu 5 tahun menunjukkan tren yang fluktuatif. Di tahun 2017 capaian TPAK Kabupaten Banyuwangi berada pada angka 72,87, namun turun menjadi 72,12 pada tahun 2018. Tahun 2019 mengalami sedikit peningkatan menjadi 72,13, lalu turun kembali menjadi 71,80 pada tahun 2020 dan mengalami peningkatan di tahun 2021 menjadi 72,32. Berbeda dengan Kabupaten Banyuwangi, capaian TPAK di Jawa Timur selama 5 tahun terakhir menunjukkan tren yang meningkat. Jika di tahun 2017 tercapai sebesar 68,78, di tahun 2021 capaian TPAK Jawa Timur mencapai angka 70,00. Walaupun demikian, TPAK Jawa Timur masih lebih rendah jika dibandingkan dengan TPAK Kabupaten Banyuwangi dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

2.1.3.1.8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.1.3.1.8.1. Persentase Jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan

Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum (UU. No. 35 Tahun 2014). Isu kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan ini penting, tidak hanya karena masalah kesehatan moral atau masalah masyarakat yang ditimbulkan, tapi juga karena ancaman kekerasan domestik yang membuat gerakan dan tindakan perempuan terbatas di dalam rumah sehingga membatasi pilihan hidup mereka. *Global Burden of Disease* mengestimasi bahwa lebih dari 30% perempuan >15 tahun mendapat pelecehan fisik atau seksual dari pasangannya selama masa hidup mereka.

Mengetahui insiden dan prevalensi kekerasan menjadi langkah awal untuk memastikan kebijakan pencegahan tepat sasaran. Indikator ini mengukur terjadinya

kekerasan fisik dan/atau seksual terhadap perempuan. Karena sebagian besar kasus kekerasan terhadap perempuan dilakukan oleh suami atau pasangan intim, maka indikator ini tepat untuk menangkap sebagian besar kasus kekerasan yang dialami perempuan. Pengukuran kekerasan terhadap perempuan lebih cocok menggunakan *time lag* 12 bulan, karena dapat menggambarkan perubahan level dan risiko kekerasan dari waktu ke waktu dibandingkan dengan pengukuran menggunakan *time lag* seumur hidup.



Gambar 2.51 Jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan

Sumber: Data Diolah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022

Ket: *) Data Sementara

Jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan di Kabupaten Banyuwangi dalam kurun waktu 5 tahun memiliki tren capaian yang fluktuatif. Tahun 2017 jumlah kekerasan tercatat sebanyak 73. Kemudian pada tahun 2018 menunjukkan adanya penurunan hingga menjadi 71. Namun di tahun 2019 terjadi peningkatan hingga mencapai angka 93, lalu turun menjadi 78 pada tahun 2020. Selanjutnya untuk data sementara pada tahun 2021 jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan mengalami peningkatan mencapai angka 86,01. Tren yang fluktuatif ini dikarenakan masih tingginya angka kekerasan pada perempuan serta belum optimalnya sosialisasi penanganan kasus pada perempuan. Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak saat ini ditangani melalui P2TP2A yang merupakan hasil kolaborasi pemerintah, penegak hukum, dan organisasi masyarakat sipil.

Sesuai dengan SK Bupati Banyuwangi Nomor : 188/97/KEP/2011/2020 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Banyuwangi (P2TP2A) dengan tugas :

- Menyusun rencana pedoman umum implementasi rencana aksi perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Banyuwangi

- Menyusun implementasi pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi rencana aksi perempuan dan anak dimaksud
- Memberikan dan/atau meminta saran, pertimbangan dan rekomendasi kepada instansi/pihak lain terkait dan/atau para ahli dari unsur pemerintah dan masyarakat;

Bahwa pusat pelayanan terpadu tersebut dibantu oleh sekretariat tetap dan 3 (tiga) devisi antara lain : devisi penanganan dan reintegrasi korban, devisi advokasi dan penegakan hukum.

Melalui peran aktif P2TP2A Kabupaten Banyuwangi akan bertekad memperluas cakupan pelayanan terhadap Perempuan dan Anak. Beberapa diantaranya diimplementasikan melalui : Ruang Rindu, Banyuwangi *Children Center* dan Forum Anak sehingga diharapkan kasus kekerasan perempuan dan anak dapat ditemukan solusinya. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memberikan dan melindungi hak perempuan dan anak antara lain berupa :”lahir procoot pulang bawa akta, duta cegah perkawinan anak, sakina (stop kematian ibu dan anak), *one student one client* (satu mahasiswa dampingi ibu hamil), sekolah asuh sekolah, garda ampuh, rumah aman bagi perempuan dan anak korban kekerasan” dan lain sebagainya.

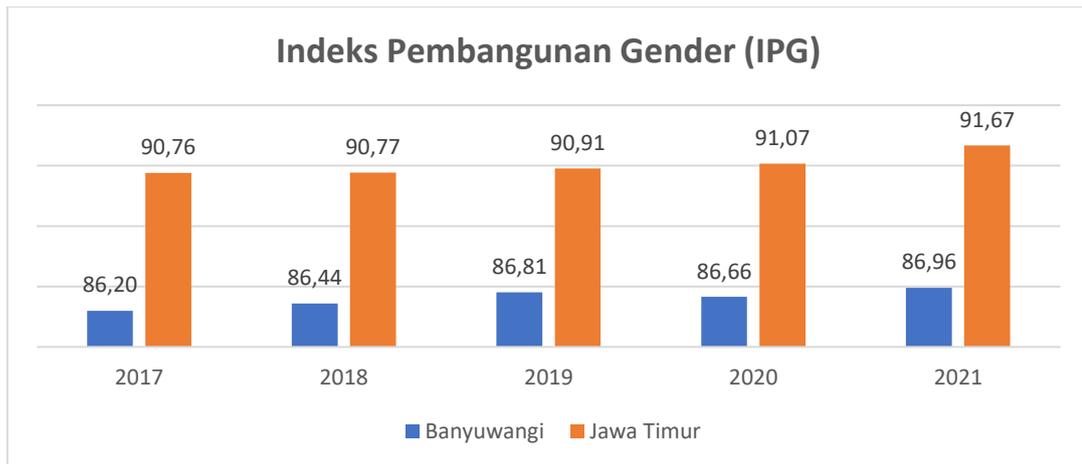
2.1.3.1.8.2. Perencanaan Pembangunan Responsif Gender

Pasal 262 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara tegas menyatakan pentingnya menyusun RPJMD yang berkeadilan. Dalam penjelasannya, yang dimaksud berkeadilan disini adalah prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender, dan usia.

Penekanan kepada perencanaan pembangunan yang berkeadilan khususnya berkeadilan gender ini bukan tanpa sebab. Beberapa tahun ini makin dirasakan kesenjangan gender dalam kehidupan sosial masyarakat. Tingkat kekerasan yang makin tinggi, kualitas hidup perempuan dan anak miskin yang makin rentan dan beberapa persoalan termasuk persoalan infrastruktur yang belum sesuai dengan kepentingan perempuan dan anak-anak.

Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan manusia selain Indeks Pembangunan Manusia adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

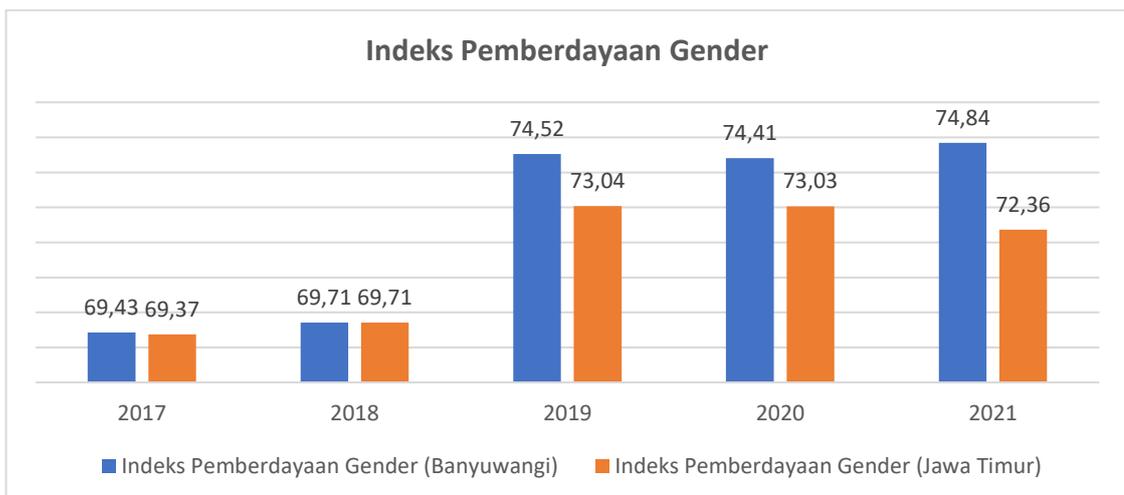
IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Banyuwangi tahun 2021 tercapai sebesar 86,96 (kategori tinggi).



Gambar 2.52 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Banyuwangi dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2021

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Prov Jawa Timur, 2022

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Banyuwangi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan. Tahun 2017 tercapai sebesar 86,20, lalu meningkat menjadi 86,44 di tahun 2018, bertambah menjadi 86,81 pada tahun 2019, kemudian tahun 2020 mencapai 86,66, dan di tahun 2021 meningkat menjadi 86,96. Capaian IPG Kabupaten Banyuwangi mencapai 86,96 di tahun 2021 ini termasuk dalam kategori tinggi yang artinya harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, usia harapan hidup, pengeluaran per kapita sudah hampir terdapat kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Sama halnya dengan capaian IPG Jawa Timur selama kurun waktu 5 tahun terakhir, mengalami peningkatan secara signifikan dalam setiap tahunnya. Tahun 2017 tercapai sebesar 90,76 dan terus meningkat setiap tahunnya hingga mencapai 91,67 pada tahun 2021.



Gambar 2.53 Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Banyuwangi dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2021

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Prov Jawa Timur, 2022

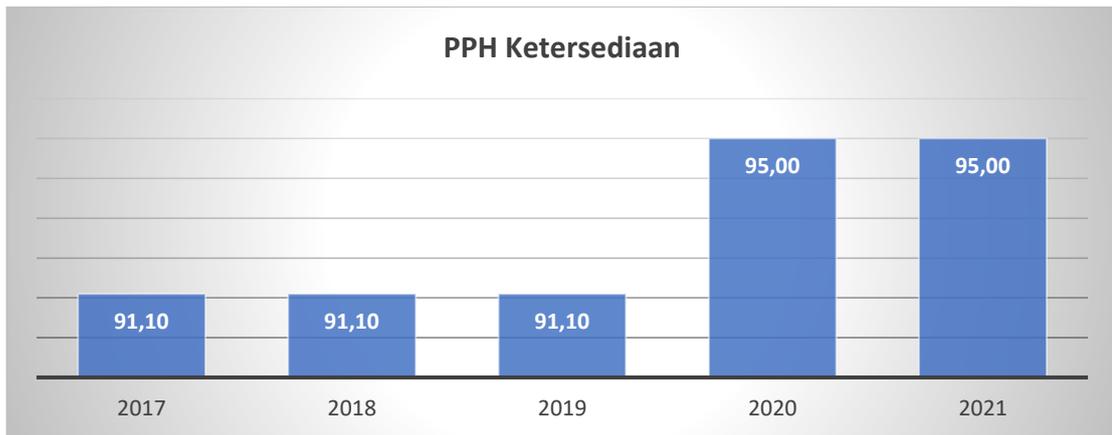
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menunjukkan apakah wanita dapat secara aktif berperan serta dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG Kabupaten Banyuwangi cenderung meningkat, di tahun 2017 tercapai sebesar 69,43, lalu bertambah menjadi 69,71 di tahun 2018, meningkat menjadi 74,52 di tahun 2019 dan di tahun 2020 sebesar 74,41, dan capaian di tahun 2021 mencapai 74,84. Jika dibandingkan dengan capaian IDG Jawa Timur, capaian IDG Kabupaten Banyuwangi lebih tinggi. Capaian IDG Jawa Timur pada tahun 2017 sebesar 69,37, bertambah menjadi 69,71 di tahun 2018, lalu meningkat hingga mencapai 73,04 pada tahun 2019, di tahun 2020 73,03 serta capaian data IDG tahun 2021 sebesar 72,36. Tren yang positif dari capaian IDG Kabupaten Banyuwangi dari tahun 2017-2021 karena berbagai kegiatan di Kabupaten Banyuwangi mendukung responsif gender. Misal inovasi Banyuwangi Children Center, Sakina, dan kegiatan lain yang melindungi anak dan perempuan dalam setiap perannya. Belum adanya aplikasi untuk pemenuhan data gender dan anak merupakan salah satu yang harus segera diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan data.

2.1.3.1.9. Pangan

2.1.3.1.9.1. Skor PPH Ketersediaan

Pola Pangan Harapan (PPH) sebagai komposisi kelompok pangan utama yang bila di konsumsi dapat memenuhi kebutuhan gizi baik dalam jumlah, maupun mutu dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya, dan agama. Konsep PPH merupakan manifestasi konsep gizi seimbang yang didasarkan pada konsep Triguna Pangan. Keseimbangan jumlah antar kelompok pangan merupakan syarat terwujudnya keseimbangan gizi, dengan demikian PPH dapat digunakan sebagai ukuran keseimbangan dan keanekaragaman pangan. Dengan terpenuhi kebutuhan energi dari berbagai kelompok pangan sesuai PPH secara implisit kebutuhan zat gizi juga terpenuhi.

Skor PPH Ketersediaan di Kabupaten Banyuwangi dalam kurun waktu 2017 hingga 2019 menunjukkan kondisi yang stagnan. Capaian skor PPH Ketersediaan Kabupaten Banyuwangi di tahun 2017-2019 mencapai 91,1. Kemudian di tahun 2020 mencapai angka 95 hingga di tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan pangan di Kabupaten Banyuwangi sudah baik dalam pemenuhan kebutuhan gizi dan keseimbangan gizi. Meskipun skor PPH ketersediaan memiliki tren yang positif, namun ada beberapa masalah yang harus menjadi perhatian seperti kurang optimalnya pengelolaan pascapanen dan pengolahan hasil pertanian yang disebabkan karena petani sebagai pelaku usaha seringkali dihadapkan pada realita rendahnya minat konsumen lokal terhadap produk olahan atau produk premium pertanian dengan label harga di atas rata-rata, sedangkan jaringan pemasaran untuk menjangkau konsumen luar kota masih kurang optimal.

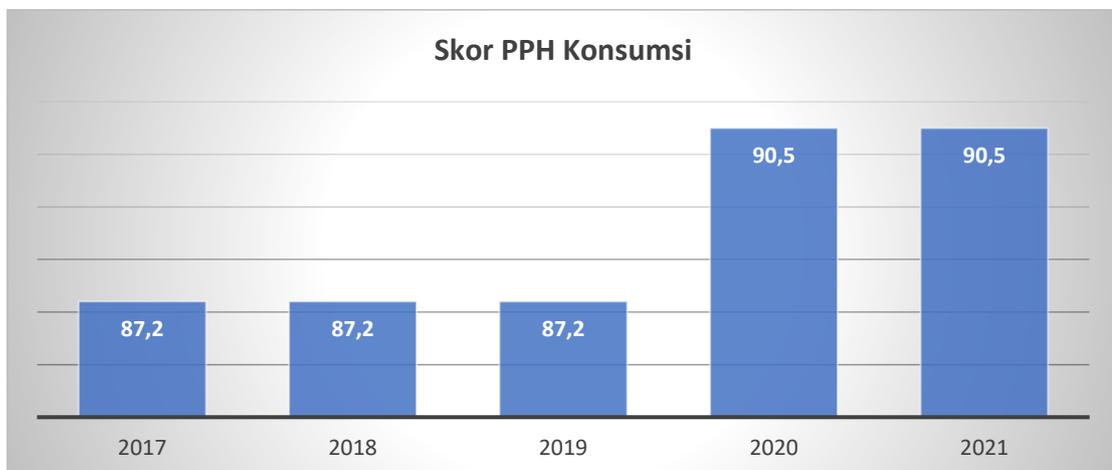


Gambar 2.54 Skor PPH ketersediaan di Kabupaten Banyuwangi

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022

2.1.3.1.9.2. Skor PPH Konsumsi

Skor pola konsumsi pangan mencerminkan mutu gizi konsumsi pangan dan tingkat keragaman konsumsi pangan dan seimbang. Penetapan PPH bertujuan untuk menghasilkan suatu komposisi norma (standar) pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi penduduk, yang mempertimbangkan keseimbangan gizi berdasarkan cita rasa, daya cerna, daya terima, masyarakat, kuantitas dan kemampuan daya beli.



Gambar 2.55 Skor PPH konsumsi di Kabupaten Banyuwangi

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022

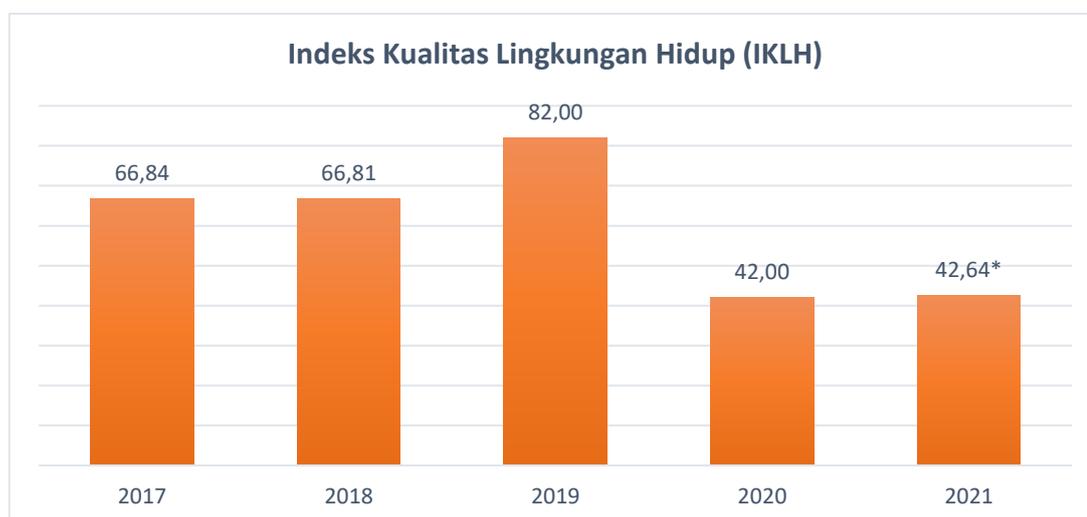
Sejalan dengan skor PPH ketersediaan, Skor PPH Konsumsi di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2017 hingga tahun 2019 dalam kondisi yang stagnan, yaitu sebesar 87,2. Kemudian di tahun 2020 mencapai angka 90,5 dan bertahan hingga di tahun 2021. Masih belum optimalnya cadangan pangan yang dikelola masyarakat melalui pemberdayaan kelembagaan Lumbung Pangan Masyarakat secara berkelanjutan merupakan satu hal yang perlu dimaksimalkan oleh Kabupaten Banyuwangi.

2.1.3.1.10. Lingkungan Hidup

2.1.3.1.10.1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) telah dikembangkan sejak tahun 2009, yang merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional dan menjadi acuan bersama bagi semua pihak dalam mengukur kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penghitungan IKLH terdiri dari tiga komponen yaitu: Indeks Kualitas Air (IKA); Indeks Kualitas Udara (IKU); dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Banyuwangi dalam kurun waktu lima tahun memiliki tren capaian yang fluktuatif. Pada tahun 2017, capaian IKLH Kabupaten Banyuwangi sebesar 66,84, namun turun menjadi 66,81 pada tahun 2018. Tahun 2019 mengalami peningkatan kembali mencapai 82,00, namun di tahun 2020 turun menjadi 42,00 dan di tahun 2021 capaian data sementara capaian IKLH Kabupaten Banyuwangi berada di angka 42,64.



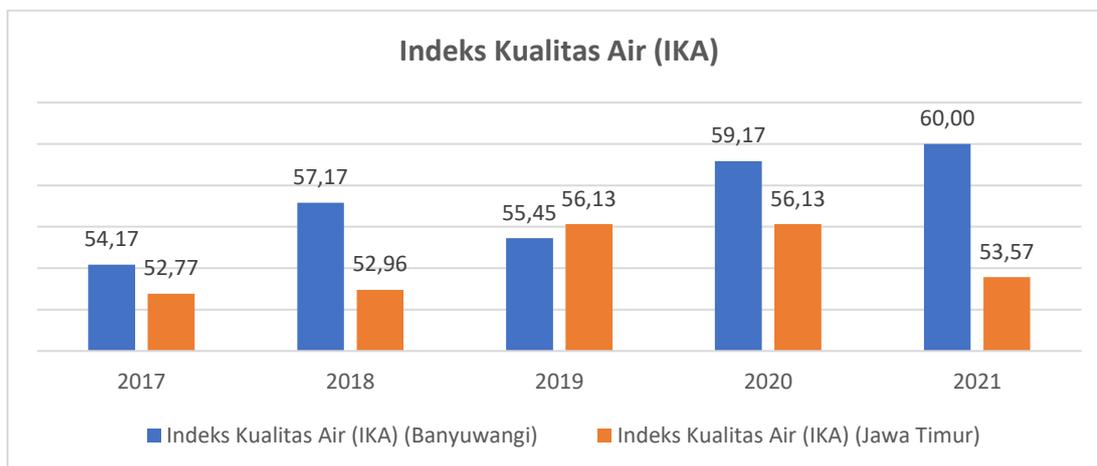
Gambar 2.56 Indeks kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Banyuwangi

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi 2022

Ket: *) Data Sementara

Komponen IKLH yang pertama adalah Indeks Kualitas Air (IKA). Kualitas air yang baik, bersih dan sehat menjadi kebutuhan penting bagi manusia dan makhluk hidup yang lain. Indeks Kualitas Air dapat memberikan informasi kualitas air yang digunakan upaya pengendalian pencemaran air dengan konsep bahwa nilai indeks yang semakin tinggi menunjukkan kualitas air yang semakin baik. IKA Kabupaten Banyuwangi memiliki capaian yang meningkat dari tahun 2017 hingga 2021. Capaian IKA Kabupaten Banyuwangi di tahun 2017 sebesar 54,17, kemudian meningkat hingga 57,17 pada tahun 2018. Di tahun 2019 capaian IKA Kabupaten Banyuwangi mengalami penurunan menjadi 55,45 dan kemudian melonjak mencapai angka 59,17 di tahun 2020 dan tahun 2021 bertambah mencapai 60,00. Penurunan IKA di Kabupaten Banyuwangi terjadi

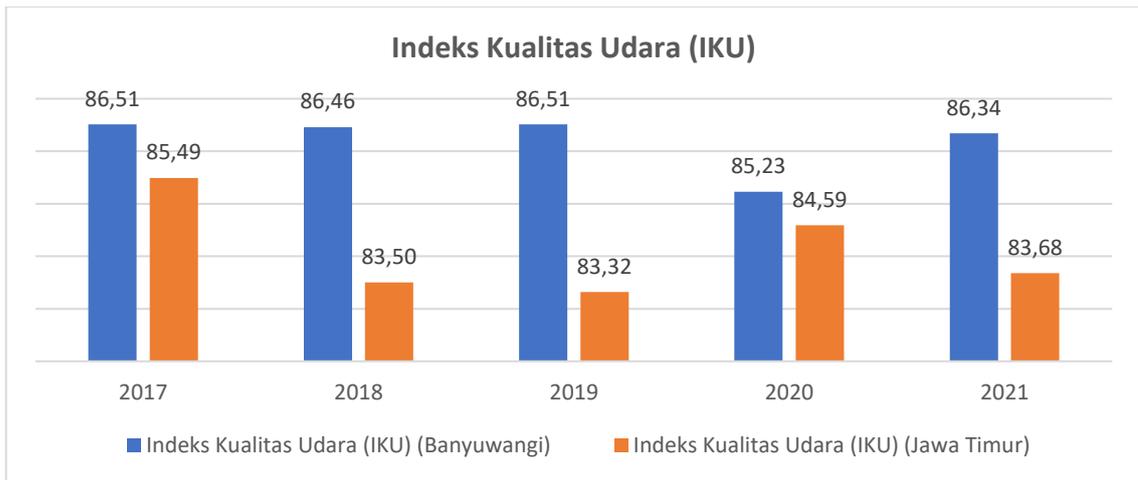
karena belum optimalnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup serta adanya penurunan kualitas air. Berbeda halnya dengan capaian IKA Jawa Timur yang mengalami penurunan capaian di tahun 2019 hingga tahun 2020 sebesar 56,13, namun di tahun 2021 turun menjadi 53,57. IKA Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 menunjukkan bahwa kualitas air di kabupaten Banyuwangi semakin baik dibanding tahun sebelumnya.



Gambar 2.57 Indeks Kualitas Air Tahun 2017-2021

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi 2022

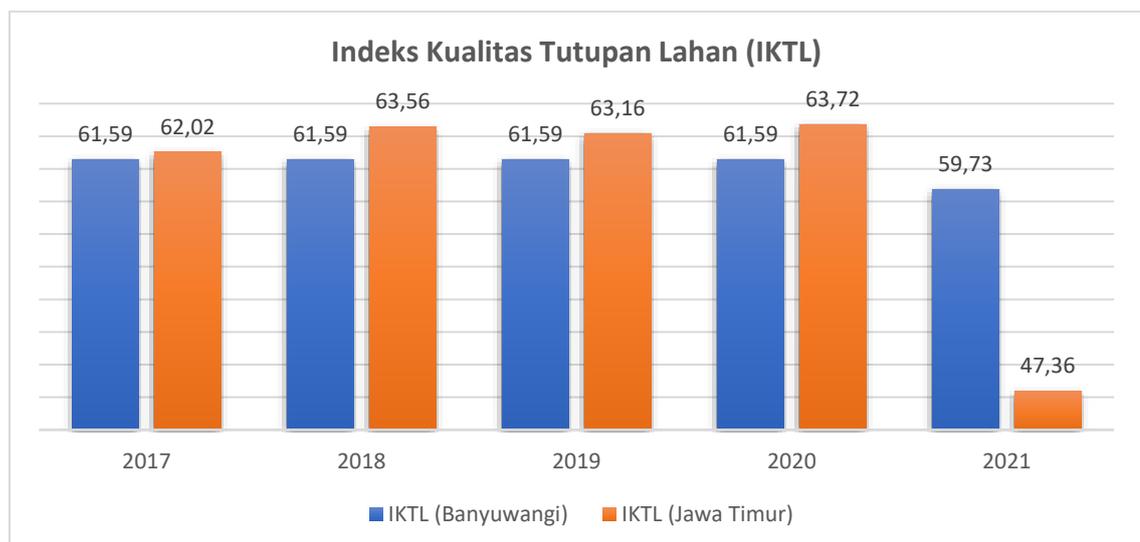
Komponen IKLH selanjutnya adalah Indeks Kualitas Udara (IKU). Kualitas udara berhubungan erat dengan tingkat kesehatan masyarakat dan kegiatan pembangunan. Capaian IKU Kabupaten Banyuwangi tahun 2017 sebesar 86,51, lalu turun menjadi 86,46 di tahun 2018, kembali mencapai 86,51 di tahun 2019, namun di tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 85,23 dan di tahun 2021 menjadi 86,34. Kemudian untuk capaian IKU Jawa Timur selama lima tahun terakhir, tertinggi di tahun 2017 sebesar 85,49 dan terendah terjadi di tahun 2019 sebesar 83,32. Pada tahun 2020 meningkat sebesar 84,59 dan tahun 2021 mencapai 83,68 dibandingkan tahun sebelumnya. Banyak sekali faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap penurunan kualitas udara diantaranya yaitu laju pertumbuhan penduduk yang cepat diiringi dengan pembangunan dan sarana transportasi yang meningkat akan menghasilkan polutan yang menyebabkan menurunnya kualitas udara. Selain itu adanya kegiatan pembangunan dan alihfungsi lahan serta kurang optimalnya pengendalian pencemaran udara juga berpengaruh terhadap kualitas udara.



Gambar 2.58 Indeks Kualitas Udara Tahun 2017-2021

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi 2022

Komponen IKLH selanjutnya adalah Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Capaian IKTL Kabupaten Banyuwangi dari tahun 2017 hingga tahun 2020 stagnan pada angka 61,59. Lalu di tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 59,73. Berbeda dengan capaian IKTL Jawa Timur yang cenderung meningkat dari tahun 2017 sebesar 62,02 lalu meningkat menjadi 63,56 pada tahun 2018, sedikit mengalami penurunan di tahun 2019 menjadi 63,16 dan meningkat kembali mencapai 63,72 pada tahun 2020. Namun di tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 47,36. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada perubahan yang signifikan perubahan luasan tutupan lahan di Kabupaten Banyuwangi yang dikarenakan kurang optimalnya pengelolaan lahan dan sumber air.



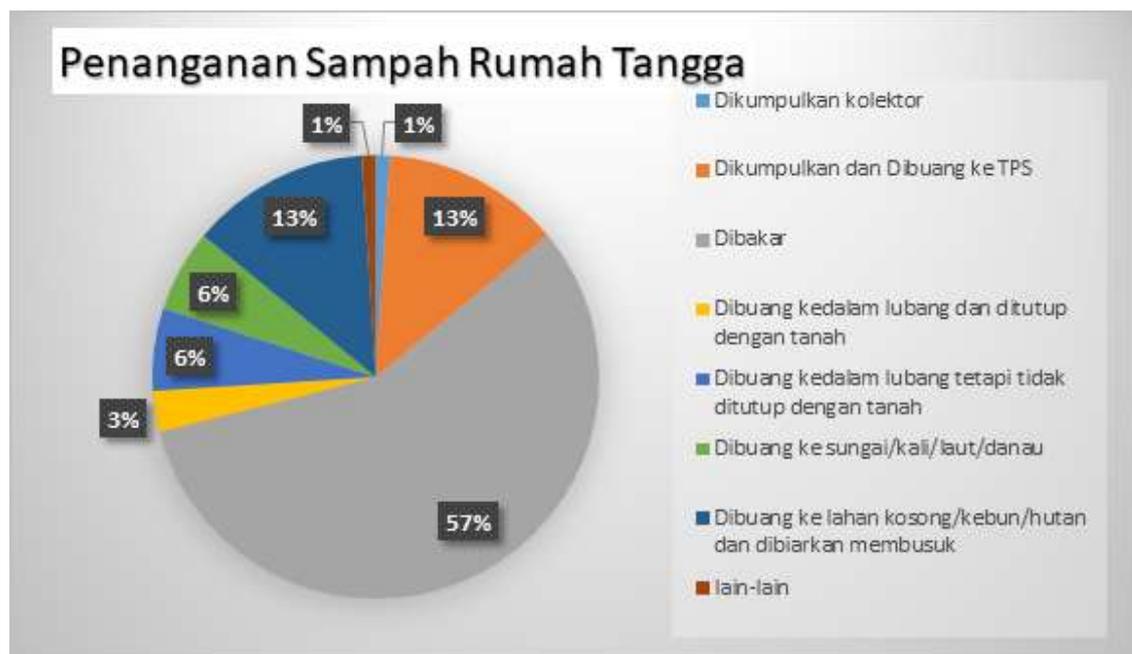
Gambar 2.59 Indeks Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2017-2021

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi 2022

2.1.3.1.10.2. Persentase sampah yang dikelola

Sampah merupakan salah satu masalah yang menjadi perhatian di Kabupaten Banyuwangi karena sampah dapat mencemari serta merusak lingkungan terutama mencemari kualitas udara dan air dalam suatu Kawasan. Sampah yang belum tertangani tersebar di wilayah perdesaan terutama kawasan pesisir, hal ini terjadi karena aktivitas ekonomi banyak terjadi di kawasan pesisir seperti wisata dan industri. Sumber-sumber sampah di Kabupaten Banyuwangi berasal dari sisa sampah rumah tangga, sampah pertanian, sampah dari pasar, sampah perkantoran, sampah rumah sakit, sampah sekolah, sampah industri, sampah konstruksi bangunan gedung, sampah peternakan dan sampah perikanan. Besarnya produksi sampah di Kabupaten Banyuwangi berbanding lurus dengan jumlah penduduk di masing-masing kecamatan.

Jumlah produksi sampah di Kabupaten Banyuwangi dalam satu tahun mencapai 6.900 ton. Dari jumlah produksi sampah tersebut tidak semua bisa ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Hanya sekitar 42 % atau 2.900 ton yang bisa diangkut ke TPA. Sisanya sebesar 60% dari produksi sampah tersebut masih memerlukan pengolahan supaya tidak mencemari lingkungan.

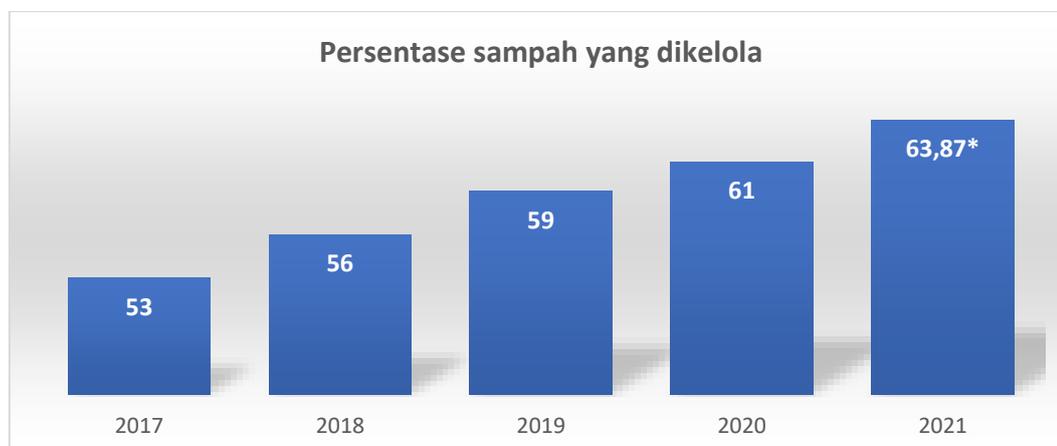


Gambar 2.60: Penanganan Sampah rumah tangga

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi 2022

Pola penanganan sampah di Kabupaten Banyuwangi bertumpu pada kawasan perkotaan khususnya Ibu Kota Kecamatan, sedangkan sebagian besar lainnya dikelola secara mandiri oleh masyarakat baik melalui pengelolaan TPS 3R maupun Bank sampah. Pada kawasan-kawasan perdesaan, penanganan sampah dilakukan secara konvensional yaitu melalui sistem gali urug terkendali. Hal ini disebabkan karena masih tersedianya lahan untuk pembuangan sampah dengan model galian/juglangan

Pemerintah Banyuwangi sudah melakukan berbagai cara seperti penambahan armada pengangkut sampah dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan sampah. Berikut capaian persentase sampah yang dikelola Kabupaten Banyuwangi dalam kurun waktu lima tahun terakhir.



Gambar 2.61: Persentase sampah yang dikelola

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi 2022

Ket: *) Data Sementara

Pada tahun 2017 persentase sampah yang dikelola memiliki capaian angka sebesar 53%. Lalu di tahun 2018 tercapai sebesar 56%, kemudian pada tahun 2019 persentase sampah yang dikelola mengalami peningkatan pencapaian menjadi 59%. Di tahun 2020 persentase sampah yang dikelola kembali bertambah mencapai 61%, lalu di tahun 2021 berdasarkan data sementara kembali bertambah menjadi 63,87%. Kontribusi dalam pengelolaan sampah tidak saja dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tetapi juga masyarakat melalui pemilahan sampah organik dan anorganik dimulai dari lingkungan rumah tangga, hingga perusahaan sebagai wujud tanggung jawab sosial dengan penyediaan tempat sampah di wilayah pesisir/pantai dengan kerjasama dengan kelompok sadar wisata. Pelibatan dasa wisma dalam hal ini sangat membantu dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Beberapa inovasi dilakukan Kabupaten Banyuwangi dalam mengelola sampah dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga pengelolaan sungai dan pesisir. Misalnya : inovasi Sekolah Membawa Sampah, Pengelolaan Sampah Karya Desa Muncar, Merdeka dari Sampah dan Festival Sungai Bersih, diharapkan dengan inovasi tersebut dapat mengurangi sampah dan daur ulangnya bisa bermanfaat. Banyaknya inovasi dalam pengelolaan harus diikuti dengan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup.

Salah satu upaya pengelolaan limbah B3 yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi mulai tahun 2014 hingga saat ini adalah dengan melakukan pengawasan, memonitor, sekaligus mendata timbulan limbah B3 yang dihasilkan oleh kegiatan/industri di wilayah Kabupaten Banyuwangi. Untuk Hasil pengawasan yang dilakukan pada 49 industri dan/atau kegiatan usaha menunjukkan

masih ada beberapa perusahaan yang belum memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pengelolaan lingkungan (dokumen UKL-UPL), belum mempunyai IPAL atau hasil uji kualitas limbah cairnya belum memenuhi baku mutu kualitas limbah cair, belum memiliki izin pengelolaan limbah B3 dan izin pembuangan limbah cair (Sumber : Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2019)

2.1.3.1.11. Pertanahan

2.1.3.1.11.1. Banyaknya Sertifikat Tanah yang Dikeluarkan

Sertifikat tanah merupakan salah satu bukti kepemilikan atas tanah. Sertifikat tanah memiliki beberapa jenis diantaranya hak milik, hak pakai, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pengelolaan, wakaf, dan hak per juni 1996 hak tanggungan. Sertifikat yang dikeluarkan di Kabupaten Banyuwangi memiliki tren yang meningkat, pada tahun 2017 sertifikat tanah yang dikeluarkan mencapai 44.091. Pada tahun selanjutnya, mengalami peningkatan yang cukup tinggi hingga mencapai angka 73.659 di tahun 2018 dan mencapai 85.097 di tahun 2019, namun pada tahun 2020 angka ini menurun drastis hingga mencapai 40.209. Kemudian di tahun 2021 mengalami peningkatan kembali menjadi 70.021.



Gambar 2.62: Banyaknya Sertifikat Tanah yang Dikeluarkan

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022

2.1.3.1.12. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil merupakan urusan wajib pemerintah daerah yang memiliki fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pelaksanaan koordinasi kebijakan dibidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pelaksanaan kebijakan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas dan pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Berikut capaian indikator kinerja program urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil:

Tabel 2.17 Capaian indikator kinerja program urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Pelayanan KTP-el kurang dari 2 jam	%	89,1	95	15,4	28,5	98,04
2	Persentase Data Kependudukan yang valid dan update	%	91	93	92	94,5	94,93*
3	Persentase Bayi lahir procot pulang bawa akta	%	74,8	82	80,9	86,4	98,81

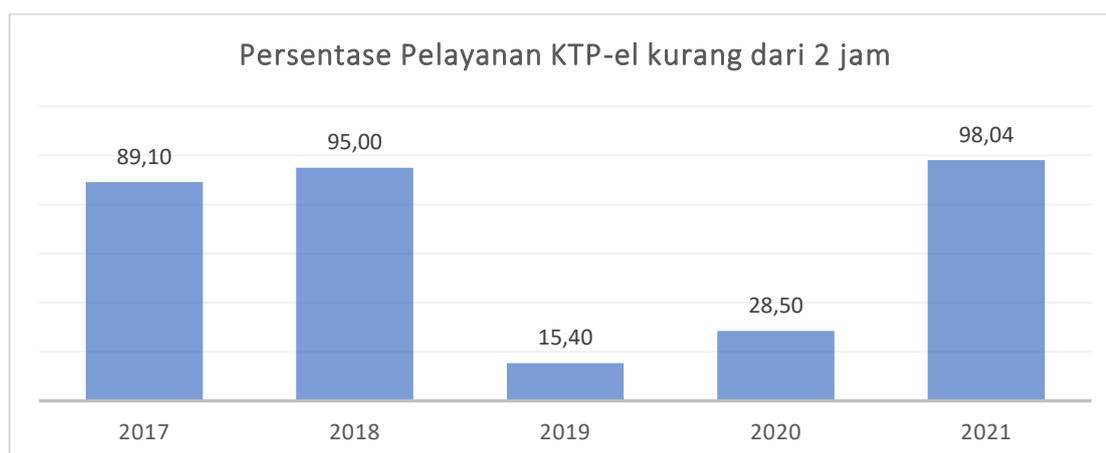
Sumber: Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi 2022

Ket: *) Data Sementara

Capaian indikator di atas merupakan representasi atas kinerja pemerintah Kabupaten Banyuwangi dari tahun 2017 hingga tahun 2021. Dari data diatas dapat dilihat terdapat indikator yang memiliki tren fluktuatif pada setiap tahun yaitu indikator persentase pelayanan KTP-el kurang dari 2 jam, sedangkan untuk indikator persentase bayi lahir procot pulang bawa akta dan indikator persentase data kependudukan yang valid dan *update* mengalami penurunan pada tahun 2019.

2.1.3.1.12.1. Persentase Pelayanan KTP-el kurang dari 2 jam

Persentase pelayanan KTP-el kurang dari 2 jam merupakan salah satu indikator urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil, capaian indikator ini bersifat fluktuatif semenjak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Berikut capaian indikator persentase pelayanan KTP-el kurang dari 2 jam yang melekat pada urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil:



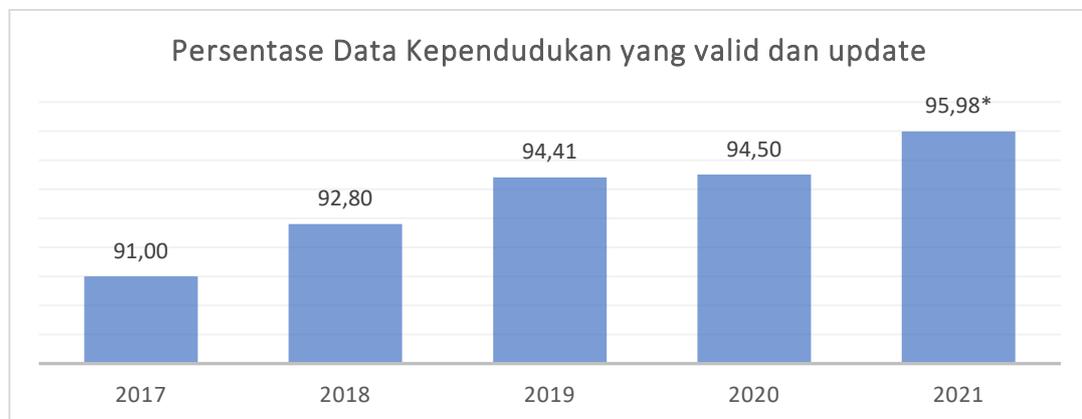
Gambar 2.63 Persentase pelayanan KTP-el kurang dari 2 jam di Kabupaten Banyuwangi

Sumber: Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi 2022

Berdasarkan gambar di atas, indikator persentase pelayanan KTP-el kurang dari 2 jam bergerak fluktuatif pada setiap tahunnya, pada tahun 2017 indikator tersebut tercapai sebesar 89,10%, lalu meningkat hingga 95% pada tahun 2018. Namun di tahun 2019 mengalami penurunan drastis menjadi 15,40%, dan di tahun 2020 meningkat menjadi 28,50%. Namun pada tahun 2021 kembali mengalami kenaikan persentase pelayanan mencapai 98,04%.

2.1.3.1.12.2. Persentase Data kependudukan yang valid dan update

Capaian indikator persentase data kependudukan yang valid dan update memiliki tren data fluktuatif dari tahun 2017 hingga tahun 2021. Berikut capaian indikator persentase data kependudukan yang valid dan update pada urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil di Kabupaten Banyuwangi.



Gambar 2.64 Persentase data kependudukan yang valid dan update di Kabupaten Banyuwangi

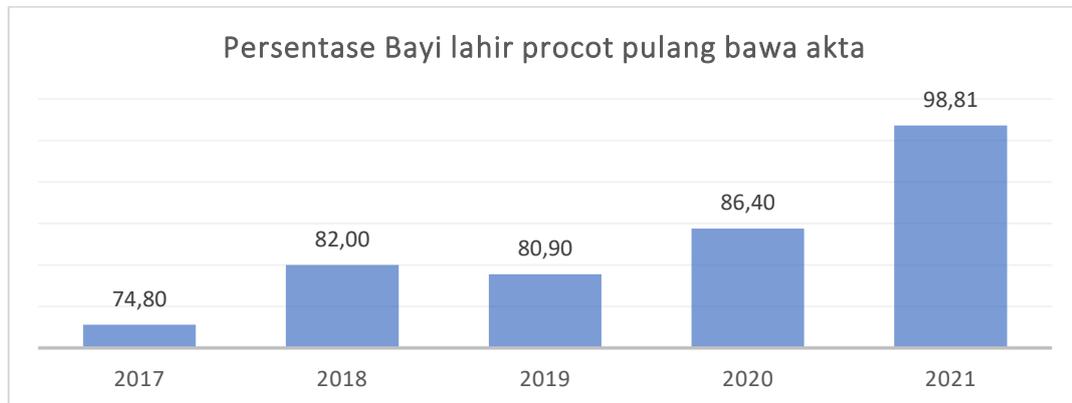
Sumber: Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi 2022
Ket: *) Data Sementara

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa persentase data kependudukan semakin tahun semakin valid dan semakin update dengan capaian di atas 90% setiap tahunnya. Dengan terwujudnya database kependudukan yang valid dan update sangat membantu pemerintah daerah dalam mendukung tertib administrasi kependudukan dan tertib administrasi pelayanan publik.

2.1.3.1.12.3. Persentase Bayi lahir procot pulang bawa akta

Akta kelahiran adalah surat tanda bukti kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil tiap daerah, bukan surat keterangan lahir dari rumah sakit/dokter/bidan/kelurahan. Akta Kelahiran merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara bagi individu yang baru lahir. Berdasarkan Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam indikator ini mengukur persentase bayi lahir yang

menggunakan pelayanan bayi lahir procot pulang bawa akta, berikut capaian indikator persentase bayi lahir procot pulang bawa akta.



Gambar 2.65 Persentase Bayi lahir procot pulang bawa akta di Kabupaten Banyuwangi

Sumber : Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi 2022

Berdasarkan gambar tersebut, Persentase bayi lahir procot pulang bawa akta dari tahun 2017 hingga tahun 2021 memiliki tren capaian yang meningkat. Capaian persentase di tahun 2017 yang mencapai 74,8% kemudian meningkat menjadi 82,0% di tahun 2018. Sedikit mengalami penurunan di tahun 2019 menjadi 80,9% dan melonjak kembali di tahun 2020 dengan capaian sebesar 86,4% dan tahun 2021 mencapai 98,81%. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Banyuwangi semakin sadar untuk melakukan kepengurusan administrasi secara tertib sejak bayi dalam kandungan.

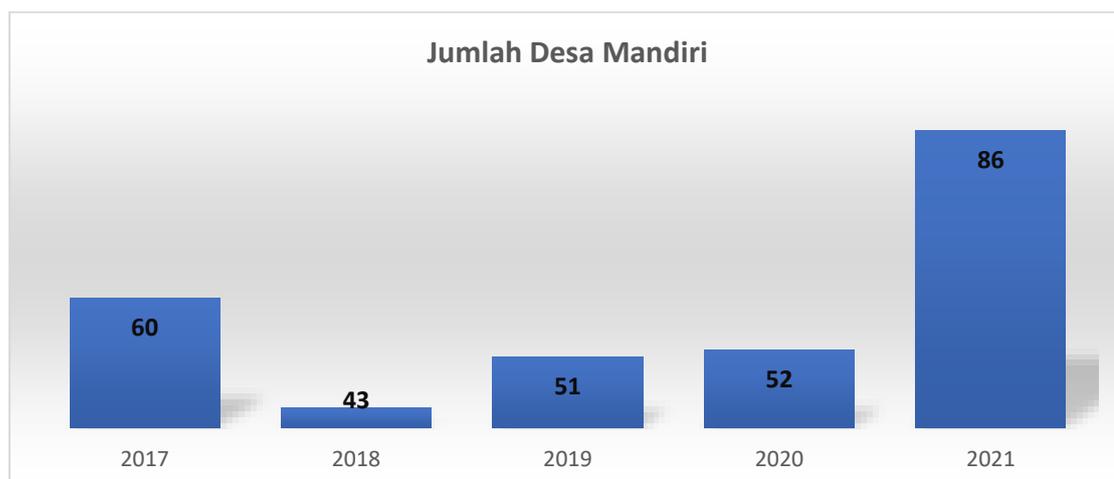
2.1.3.1.13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan urusan wajib yang harus melekat pada setiap pemerintah daerah kabupaten atau kota. Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa terkait pemberdayaan usaha ekonomi pedesaan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan. Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa memiliki beberapa indikator yang dapat merepresentasikan kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam urusan tersebut, yaitu jumlah desa mandiri dan indeks desa membangun.

Indikator tersebut menjadi salah satu acuan dalam menilai bagaimana kinerja pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam menjalankan fungsi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa. Untuk dapat lebih mudah menganalisis capaian indikator program kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Banyuwangi dapat dilihat pada gambar setiap indikator yang melekat dalam urusan pemberdayaan masyarakat dan desa sebagai berikut:

2.1.3.1.13.1. Jumlah Desa Mandiri

Desa Mandiri adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik. Dalam Undang - Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Desa Mandiri adalah desa yang memiliki nilai Indeks Desa Membangun (IDM) lebih dari 75. Berikut capaian indikator jumlah desa mandiri yang ada di Kabupaten Banyuwangi:



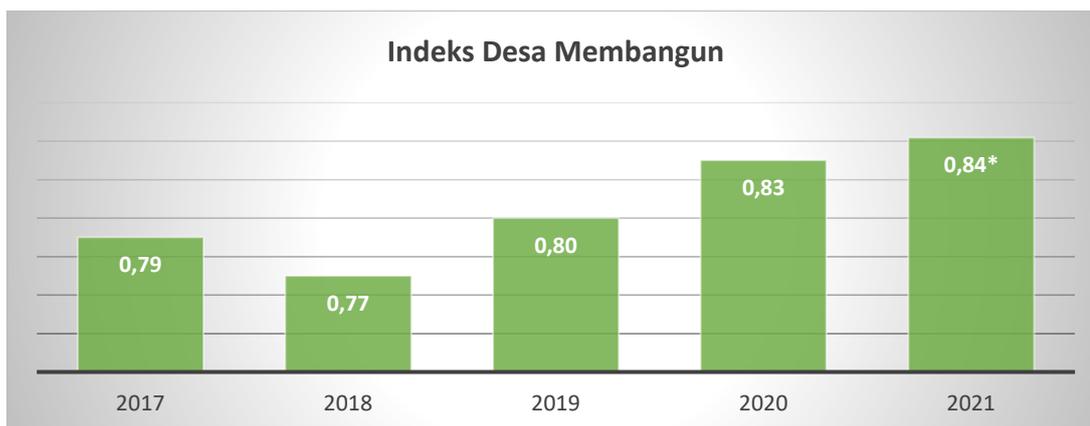
Gambar 2.66 Jumlah desa mandiri di Kabupaten Banyuwangi

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi, 2022

Jumlah Desa Mandiri di Kabupaten Banyuwangi menunjukkan tren angka yang fluktuatif pada kurun waktu 5 tahun terakhir. Di tahun 2017 terdapat sebanyak 60 desa mandiri, namun di tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 43 desa mandiri. Kemudian di tahun 2019 mengalami peningkatan kembali menjadi sebanyak 51 desa mandiri, dan bertambah 1 desa menjadi 52 desa mandiri pada tahun 2020 dan di tahun 2021 terdapat sebanyak 86 desa mandiri di Kabupaten Banyuwangi.

2.1.3.1.13.2. Indeks Desa Membangun

Indeks Desa Membangun (IDM) adalah indeks komposit yang dibentuk dari indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi desa. Tujuan dari IDM adalah untuk menetapkan status kemajuan dan kemandirian desa, serta menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan desa. Berikut capaian Indeks Desa Membangun Kabupaten Banyuwangi:



Gambar 2.67: Indeks Desa Membangun Kabupaten Banyuwangi

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi, 2022

Ket: *) Data Sementara

Sebagaimana diketahui bahwa tren IDM Kabupaten Banyuwangi selama 5 tahun terakhir mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hal ini tidak lepas dari upaya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi beserta stakeholder terkait untuk mengintervensi kemandirian desa melalui program dan inovasi diantaranya smart kampung dan pemberdayaan ekonomi berbasis desa.

2.1.3.1.14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana merupakan salah satu pelayanan urusan wajib yang harus dilaksanakan pada pemerintahan daerah kabupaten atau kota. Setiap urusan memiliki indikator program yang merupakan representasi dari kinerja pemerintah dalam menjalankan urusan tersebut, berikut indikator program urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kabupaten Banyuwangi:

Tabel 2.20 Indikator program urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kabupaten Banyuwangi

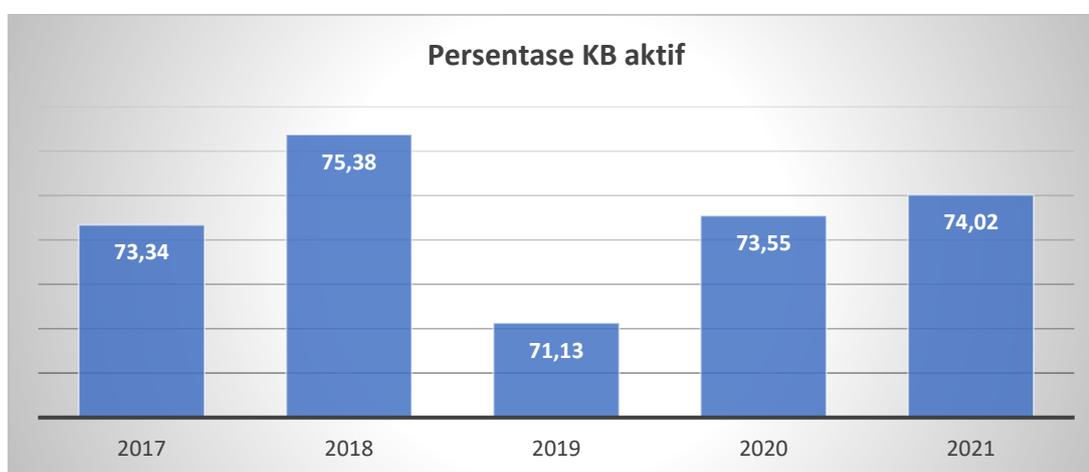
No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase KB aktif	%	73,34	75,38	71,13	73,55	74,02
2	Persentase Kelompok Tribina (BKB, BKLBKR) dan UPPKS	%		85	97,5	97,53	98,25
3	Laju pertumbuhan penduduk	%		0,35	0,36	0,94	0,40

Sumber: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa pada indikator persentase KB aktif memiliki capaian yang bergerak fluktuatif sejak tahun 2017 hingga tahun 2021. Untuk dapat menganalisis lebih lanjut pergerakan capaian kedua indikator tersebut maka dapat melihat pada uraian di bawah ini:

2.1.3.1.14.1. Persentase KB aktif

KB aktif adalah jumlah peserta KB yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi, di mana untuk menghitung persentase KB aktif maka jumlah tersebut dibandingkan dengan jumlah usia subur dikali 100, Keluarga berencana merupakan program yang sangat penting dalam upaya pengendalian penduduk sehingga Persentase KB aktif dijadikan sebagai indikator yang dapat merepresentasikan kinerja pemerintah dalam urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana.



Gambar 2.68 Persentase KB aktif di Kabupaten Banyuwangi

Sumber: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Banyuwangi 2022

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui Persentase KB aktif di Kabupaten Banyuwangi dalam kurun waktu 5 tahun memiliki tren capaian yang fluktuatif. Dimana pada tahun 2017 capaian persentase KB aktif di Kabupaten Banyuwangi sebesar 73,34%, kemudian naik di tahun 2018 menjadi 75,38%. Namun di tahun 2019 mengalami penurunan mencapai 71,13%, dan kembali naik mencapai 73,55% pada tahun 2020. Kemudian di tahun 2021 capaian persentase KB aktif di Kabupaten Banyuwangi meningkat menjadi 74,02%. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya cakupan peserta KB aktif yaitu ekonomi, budaya, pendidikan, agama dan status wanita dalam masyarakat.

2.1.3.1.14.2. Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana

Terkait dengan pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) yang berfokus dan menjadikan keluarga sebagai sandaran pembangunan, dimana program ini mengarahkan bagaimana keluarga mempunyai rencana berkeluarga, mempunyai anak, mempunyai pendidikan sehingga terbentuk keluarga-keluarga yang berkualitas, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi secara konsisten melaksanakan kegiatan pembinaan yang mencakup pada 3 aspek, yaitu keluarga, kependudukan dan kesehatan reproduksi, dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 2.21 Capaian Indikator Pembangunan Keluarga, Kependudukan

URAIAN	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	KETERANGAN
Total Fertility Rate (TFR)	%	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10*	SUSENAS
Age Spesifik Fertly Rate (ASFR)	%	29,55	23,84	21,99	21,99	18,98*	SUSENAS
Contracepsi Prevalensi Rate (CPR)	%	74,9	75,38	75,2	74,02	73,95*	Statistik Rutin BKKBN
Unmeet Need (UN)	%	14,14	11,29	10,62	10,92	9,59*	Statistik Rutin BKKBN
Usia Kawin Pertama (UKP) di bawah 21 Tahun	%	9,76	9,56	8,91	9,45	9,16*	Statistik Rutin BKKBN

Sumber: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Banyuwangi 2022

Ket: *) Data Sementara

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian Total Fertility Rate (TFR) di angka 2,1 adalah bagian untuk mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang di Kabupaten Banyuwangi. Kemudian untuk capaian Age Spesifik Fertly Rate (ASFR) selama 5 tahun terakhir menunjukkan capaian yang menurun, dari tahun 2017 yang sebesar 29,55% menjadi 18,98% di tahun 2021 sesuai data sementara. Kemudian untuk capaian Contracepsi Prevalensi Rate (CPR) selama 5 tahun terakhir menunjukkan capaian fluktuatif yang cenderung menurun. Capaian Unmeet Need (UN) di Kabupaten Banyuwangi menunjukkan tren menurun, ini menandakan semakin tingginya kesadaran wanita usia subur untuk menggunakan kontrasepsi dan semakin mudahnya akses terhadap pelayanan kontrasepsi.

Selanjutnya juga ada capaian usia kawin pertama (UKP) di bawah 21 tahun yang cenderung mengalami penurunan. Capaian kinerja tersebut tentu menjadi modal bagi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk terus meningkatkan kualitas dan cakupan

layanan melalui peningkatan layanan penyuluhan Keluarga Berencana, penyuluhan dan pembinaan kesehatan reproduksi remaja, perluasan cakupan layanan peserta KB Mandiri.

2.1.3.1.15. Perhubungan

Urusan perhubungan merupakan urusan wajib dimana urusan ini mengatur tentang perumusan kebijakan, pedoman dan standar teknis bidang perhubungan, pengujian kendaraan bermotor, angkutan umum dan barang, pengawasan dan pengendalian izin perhubungan dan lain sebagainya. Berikut indikator dan capaian indikator urusan perhubungan di Kabupaten Banyuwangi:

Tabel 2.18 Indikator dan capaian indikator urusan perhubungan di Kabupaten Banyuwangi

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Indeks Angka kecelakaan Lalu lintas (per 100.000 penduduk)	Indeks	40,38	37,61	35,03	32,77	40,29
2	Persentase pengguna jasa angkutan penumpang umum di bidang transportasi darat	%	82	84	86	30	100
3	Persentase panjang jalan terlayani LPJU	%	31	37	41,71	49	54,63*
4	Persentase pengembangan prasarana dan fasilitas perhubungan	%	77,5	80	82,5	85	87,50*

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi 2022

Ket: *) Data Sementara

Capaian indikator program urusan perhubungan sebagaimana data diatas dapat disimpulkan bahwa upaya pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam penyelenggaraan urusan perhubungan berjalan cukup maksimal dimana indikator yang terdapat dalam urusan tersebut memiliki tren yang cenderung membaik. Dapat diambil contoh adalah pada indikator indeks angka kecelakaan lalu lintas.

2.1.3.1.15.1. Indeks Angka kecelakaan Lalu lintas (per 100.000 penduduk)

Indeks angka kecelakaan lalu lintas bertujuan untuk mengetahui angka kecelakaan. Indeks angka kecelakaan lalu lintas digunakan sebagai data dalam menganalisis kinerja pemerintah kabupaten atau kota dalam penyelenggaraan urusan

perhubungan sebagai langkah dalam mengevaluasi pelayanan di bidang perhubungan untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Berikut gambar indeks angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Banyuwangi tahun 2017 sampai tahun 2021:



Gambar 2.69 Indeks angka kecelakaan lalu lintas (per 100.000 penduduk) di Kabupaten Banyuwangi

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi 2022

Terjadinya kecelakaan lalu lintas ini dapat dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain faktor manusia/pemakai jalan, faktor kendaraan, faktor jalan dan lingkungan, meningkatnya volume kendaraan, dan regulasi tentang transportasi. Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa Indeks Angka kecelakaan Lalu lintas (per 100.000 penduduk) di Kabupaten Banyuwangi dalam kurun waktu lima tahun memiliki tren capaian yang positif dengan adanya penurunan pada setiap tahunnya. Di tahun 2021 indeks angka kecelakaan lalu lintas di kabupaten Banyuwangi berada pada angka 40,29. Adanya kolaborasi antara Dinas Perhubungan dan pihak kepolisian dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas, melalui berbagai inovasi kegiatan membuahkan hasil yang positif. Disisi lain juga menandakan semakin tingginya kesadaran masyarakat akan keselamatan dalam berkendara.

2.1.3.1.15.2. Persentase pengguna jasa angkutan penumpang umum di bidang transportasi darat

Transportasi darat merupakan salah satu moda transportasi yang mayoritas dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Banyuwangi. Salah satunya dengan angkutan umum yang dapat membantu kegiatan sehari-hari masyarakat. Berikut capaian 5 tahun terakhir untuk persentase pengguna jasa angkutan penumpang umum di bidang transportasi darat:



Gambar 2.70 Persentase Pengguna Jasa Angkutan Penumpang Umum di Bidang Transportasi Darat di Kabupaten Banyuwangi

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi 2022

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa persentase pengguna jasa angkutan umum di bidang transportasi darat di Kabupaten Banyuwangi mengalami kondisi penurunan dalam 2 tahun terakhir. Tahun 2020 sebanyak 30% dan semakin meningkat kembali mencapai 100% di tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak kembali para masyarakat di Kabupaten Banyuwangi yang menggunakan jasa angkutan umum dalam kesehariannya.

2.1.3.1.15.3. Persentase panjang jalan terlayani LPJU

LPJU atau singkatan dari istilah Lampu Penerangan Jalan Umum merupakan salah satu sarpras di sepanjang jalanan yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Sarpras ini memberikan manfaat bagi masyarakat saat menggunakan jalan dalam kondisi gelap. Semakin besar persentase panjang jalan yang terlayani LPJU, maka dapat dikatakan semakin terpenuhinya kebutuhan sarpras di jalan tersebut. Berikut capaiannya di Kabupaten Banyuwangi dalam 5 tahun terakhir:



Gambar 2.71 Persentase panjang jalan terlayani LPJU di Kabupaten Banyuwangi

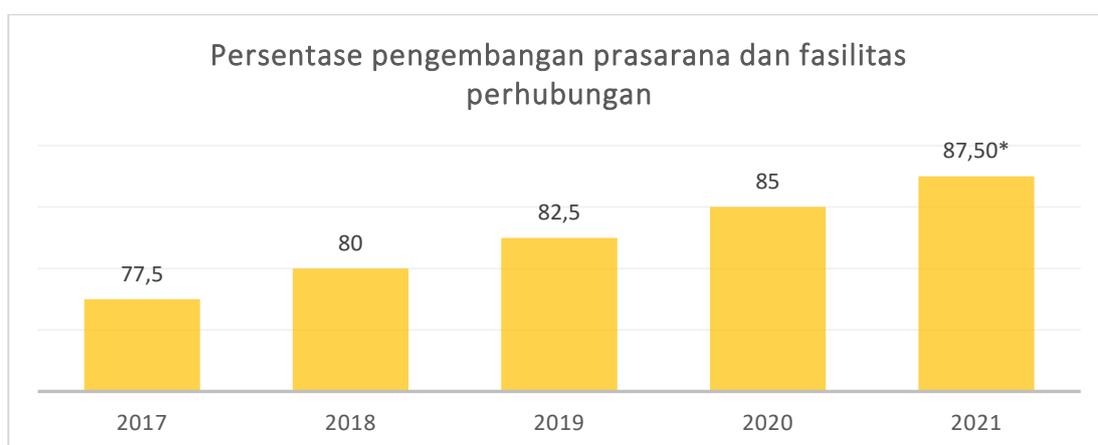
Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi 2022

Ket: *) Data Sementara

Berdasarkan data diatas dapat diketahui jika dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, persentase panjang jalan terlayani LPJU di Kabupaten Banyuwangi cenderung meningkat. Berawal dari sebesar 31% di tahun 2017 kemudian bertambah menjadi 37% pada tahun 2018. Kemudian naik menjadi 41,71% pada tahun 2019 dan menjadi 49% di tahun 2020. Sesuai pada data sementara, di tahun 2021 capaian indikator ini juga mengalami peningkatan mencapai 54,63%.

2.1.3.1.15.4. Persentase pengembangan prasarana dan fasilitas perhubungan

Persentase pengembangan prasarana dan fasilitas perhubungan merupakan salah satu indikator dalam bidang perhubungan yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Berikut disajikan data capaian selama 5 tahun terakhir:



Gambar 2.72 Persentase pengembangan prasarana dan fasilitas perhubungan di Kabupaten Banyuwangi

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi 2022

Ket: *) Data Sementara

Sesuai pada data diatas dapat diketahui jika dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, persentase pengembangan prasarana dan fasilitas perhubungan di Kabupaten Banyuwangi cenderung meningkat. Capaian dalam 5 tahun terakhir selalu berada di atas 70%. Yang mana pada tahun 2021 pada data sementara didapatkan capaian sebesar 87,50% untuk persentase pengembangan prasarana dan fasilitas perhubungan.

2.1.3.1.16. Komunikasi dan Informatika

Urusan Komunikasi dan informatika merupakan urusan wajib yang artinya wajib diselenggarakan oleh seluruh pemerintah baik pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten atau kota. Setiap urusan memiliki indikator yang dapat merepresentasikan kinerja pemerintah dalam penyelenggaraan urusan tersebut. Berikut indikator program urusan komunikasi dan informatika di Kabupaten Banyuwangi beserta capaiannya pada tahun 2017 hingga tahun 2021:

Tabel 2.19 Indikator program urusan komunikasi dan informatika di Kabupaten Banyuwangi

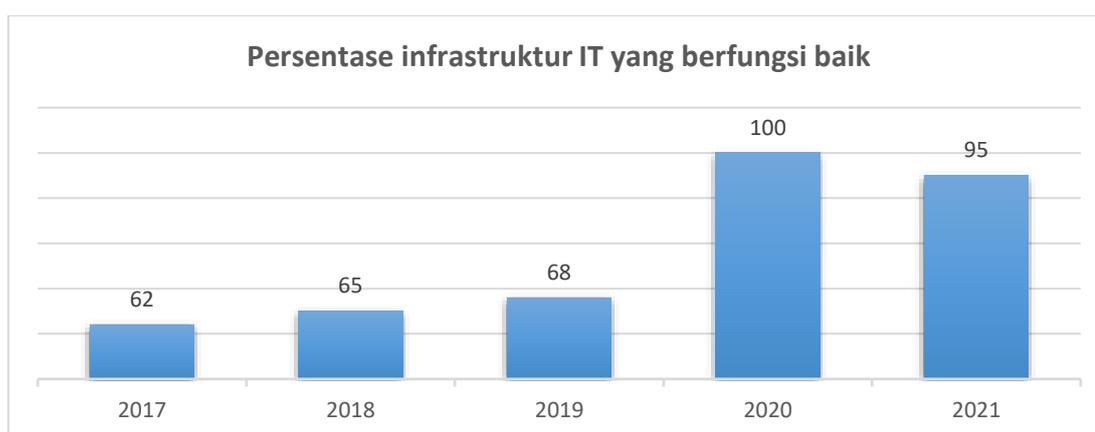
No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase infrastruktur IT yang berfungsi baik	%	62	65	68	100	95
2	Jumlah informasi pemerintah daerah yang tersebarluaskan	Jumlah	250	275	300	686	300
3	Persentase aplikasi e-government yang berfungsi baik	%	50	55	60	62,5	100

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022

Berdasarkan data diatas, seluruh capaian indikator yang melekat pada urusan komunikasi dan informatika di Kabupaten Banyuwangi memiliki tren yang terus meningkat. Berikut beberapa gambar peningkatan capaian kinerja indikator yang melekat pada urusan komunikasi dan informatika di Kabupaten Banyuwangi:

2.1.3.1.16.1. Persentase infrastruktur IT yang berfungsi baik

Infrastruktur merupakan kebutuhan dasar fisik yang sangat penting dalam pemenuhan fasilitas guna menunjang pelayanan informasi dan teknologi yang optimal. Berikut indikator persentase infrastruktur IT yang berfungsi dengan baik di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2017 hingga tahun 2021:



Gambar 2.73 Persentase infrastruktur IT yang berfungsi baik

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi 2022

Beberapa inovasi berbasis IT yang digencarkan Bupati Azwar Anas beberapa tahun terakhir memiliki pengaruh yang baik terhadap indikator persentase infrastruktur IT yang berfungsi baik di Kabupaten Banyuwangi, sehingga dalam kurun waktu 5 tahun terakhir indikator tersebut memiliki tren capaian yang positif. Di tahun 2017 tercatat infrastruktur IT yang berfungsi dengan baik sebesar 62% dan terus naik hingga tahun 2021 mencapai sebesar 95% yang artinya seluruh pelayanan berbasis IT berfungsi dengan baik. Pengembangan aplikasi IT yang dikenal dengan *E-government* ini mempunyai banyak manfaat diantaranya yaitu pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat, Peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum, Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh, serta Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien.

2.1.3.1.16.2. Jumlah informasi pemerintah daerah yang tersebarluaskan

Informasi merupakan kebutuhan dasar dalam segala aspek, berbagai macam perkembangan informasi perlu disebarluaskan agar dapat terjangkau kepada seluruh masyarakat begitu halnya informasi pemerintah daerah. Informasi pemerintah daerah menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten atau kota yang melekat pada urusan komunikasi dan informasi, sehingga indikator jumlah informasi pemerintah daerah yang tersebarluaskan dapat merepresentasikan kinerja pemerintah daerah dalam urusan tersebut. Berikut capaian indikator jumlah informasi pemerintah daerah yang tersebarluaskan di Kabupaten Banyuwangi:



Gambar 2.74 Jumlah informasi pemerintah daerah yang tersebarluaskan di Kabupaten Banyuwangi

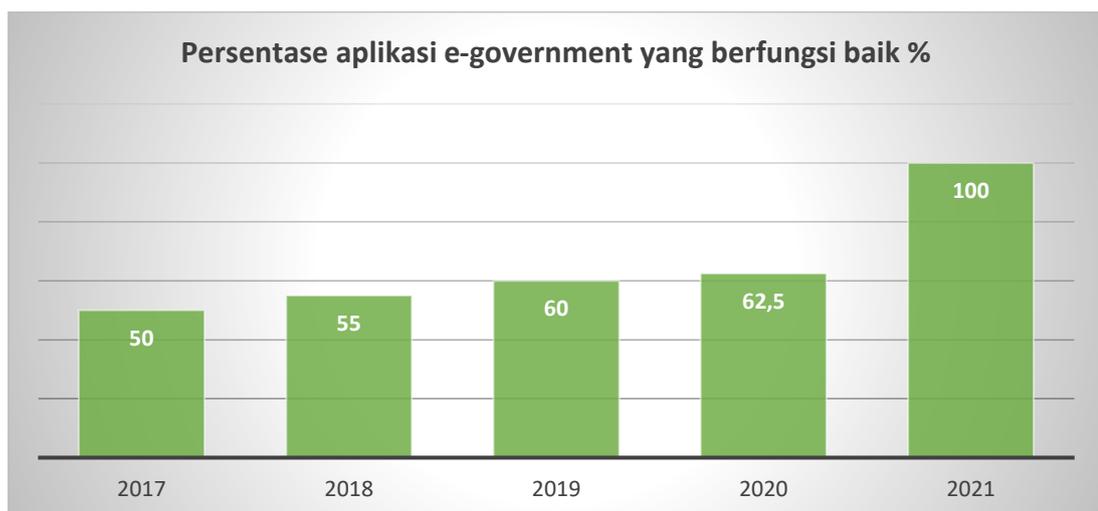
Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi 2022

Sejalan dengan meningkatnya infrastruktur IT yang berfungsi dengan baik maka informasi Pemerintah Daerah juga dapat ditingkatkan persebarannya. Karena selain mengencarkan inovasi berbasis IT, Bupati Azwar Anas juga menginginkan adanya

transparansi informasi Pemerintah Daerah di Banyuwangi. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir indikator jumlah informasi pemerintah daerah yang tersebar luaskan tersebut memiliki tren capaian yang positif. Di tahun 2017 tercatat infrastruktur IT yang berfungsi dengan baik sebanyak 250, kemudian jumlah informasi pemerintah daerah yang tersebarluaskan di Banyuwangi terus meningkat hingga di tahun 2021 mencapai 300 informasi. Capaian di tahun 2021 ini mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, karena di tahun 2020 jumlah informasi pemerintah daerah yang tersebarluaskan mencapai 686 informasi.

2.1.3.1.16.3. Persentase aplikasi e-government yang berfungsi baik

Aplikasi e-government merupakan aplikasi yang dimiliki oleh pemerintah saat ini yang membantu mempermudah dalam menjalankan kegiatannya. Aplikasi ini memanfaatkan internet untuk menggunakannya sehingga lebih *up to date*. Aplikasi ini membantu pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat secara lebih cepat dan mudah. Berikut capaian indikator persentase aplikasi e-government yang berfungsi baik di Kabupaten Banyuwangi:



Gambar 2.75 Persentase aplikasi e-government yang berfungsi baik di Kabupaten Banyuwangi

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi 2022

Sejalan dengan meningkatnya jumlah informasi yang tersebarluaskan maka aplikasi e-government yang berfungsi dengan baik Pemerintah Daerah juga dapat ditingkatkan persebarannya. Karena selain mengencarkan inovasi berbasis IT, Bupati Azwar Anas juga menginginkan adanya transparansi informasi Pemerintah Daerah di Banyuwangi. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir indikator persentase aplikasi e-government yang berfungsi dengan baik memiliki tren capaian yang positif. Di tahun

2017 tercatat persentase aplikasi e-government yang berfungsi dengan baik sebanyak 50%, kemudian capaian tersebut terus meningkat hingga di tahun 2021 mencapai 100%.

2.1.3.1.17. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan baik pada pemerintah pusat, daerah provinsi, kabupaten atau kota. Setiap urusan memiliki indikator program yang dapat merepresentasikan kinerja pemerintah dalam melaksanakan urusan tersebut. Berikut indikator program urusan koperasi, usaha kecil dan menengah di Kabupaten Banyuwangi beserta capaiannya pada tahun 2017 hingga tahun 2021:

Tabel 2.20 Indikator program urusan koperasi, usaha kecil dan menengah di Kabupaten Banyuwangi

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase koperasi aktif	%	81,30	83,00	83,56	84,13	84,91
2	Persentase peningkatan volume usaha koperasi	%	14,85	15,60	15,72	18,70	16,12
3	Persentase usaha mikro yang mengalami perkembangan usaha	%	12,50	15,20	17,63	20,00	10,86

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022

Secara garis besar indikator program urusan koperasi, usaha kecil dan menengah di Kabupaten Banyuwangi memiliki tren yang meningkat, namun terdapat beberapa indikator yang mengalami penurunan. Capaian persentase koperasi aktif selama kurun waktu 5 tahun terakhir cenderung meningkat. Pada tahun 2017 terealisasi sebesar 81,30% dan di tahun 2021 meningkat hingga mencapai 84,91%. Indikator selanjutnya yaitu persentase peningkatan volume usaha koperasi, yang juga cenderung mengalami peningkatan selama 4 tahun terakhir dan menurun di 1 tahun terakhirnya. Di tahun 2017 tercapai sebesar 14,85% dan terus meningkat setiap tahunnya hingga mencapai 18,70% di tahun 2020, namun mengalami penurunan di tahun 2021 menjadi 16,12%. Berikutnya terdapat indikator persentase usaha mikro yang mengalami perkembangan usaha. Capaian indikator ini juga mengalami peningkatan signifikan setiap tahunnya. Tahun 2017 tercapai sebesar 12,50% dan mengalami pertambahan hingga sebesar 20% di tahun 2020. Namun capaian ini turun menjadi 10,86% di tahun 2021.

2.1.3.1.18. Penanaman Modal

Urusan penanaman modal merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan pada pemerintah pusat hingga pemerintah kabupaten atau kota, setiap urusan memiliki indikator program yang dapat merepresentasikan kinerja pemerintah kabupaten atau kota dalam melaksanakan urusan tersebut. Berikut capaian kinerja indikator program penanaman modal di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2017 hingga tahun 2021:

Tabel 2.21 indikator program penanaman modal di Kabupaten Banyuwangi

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Minat investasi	Rp. Triliun	2,3	3,8	3,9	3,4	6,54
2	Realisasi investasi PMA dan PMDN		2,5	3,8	4,6	4,2	6,5
3	Persentase Kesesuaian Pelayanan Investasi dan Perizinan dengan SOP yang telah Ditetapkan	%	83	88	90	95	77,1

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Banyuwangi 2022

2.1.3.1.18.1. Jumlah Minat investasi

Jumlah minat investasi merupakan indikator pada urusan penanaman modal dengan tujuan memetakan minat Investasi dari Investor untuk menanamkan investasi di Kabupaten Banyuwangi. Indikator ini memiliki tren naik berdasarkan data tahun 2017 hingga 2019, sedangkan pada tahun 2020 jumlah minat investasi di masa pandemi covid-19 mengalami penurunan.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mendorong pengembangan infrastruktur jalan, fasilitas umum maupun listrik di kawasan wisata minat khusus untuk menggaet wisatawan sekaligus meningkatkan potensi investasi daerah. Di tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menyiapkan Peraturan Daerah (Perda) khusus terkait pemberian insentif bagi penanam modal di daerah Kabupaten Banyuwangi. Bentuk insentif yang diberikan direncanakan berupa pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah, pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah, pemberian dana stimulan, atau pemberian bantuan modal. Berikut gambar capaian indikator jumlah minat investasi pada urusan penanaman modal di Kabupaten Banyuwangi:



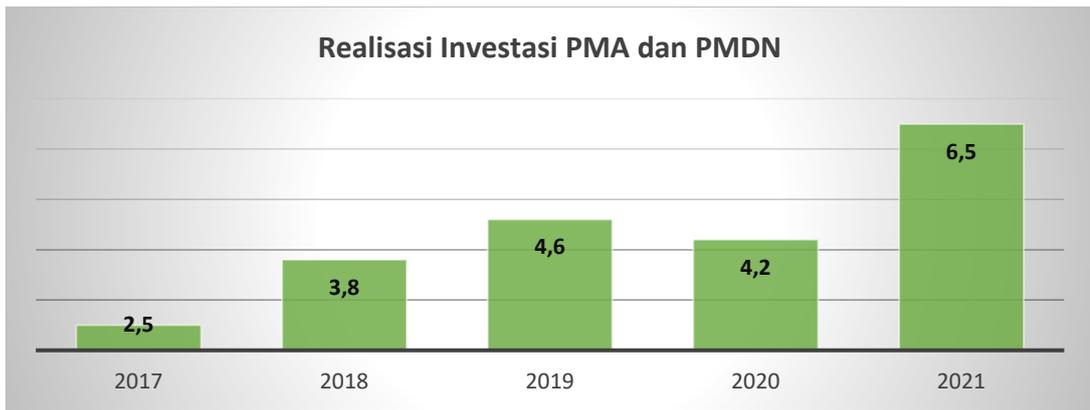
Gambar 2.76 Jumlah minat investasi di Kabupaten Banyuwangi

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Banyuwangi 2022

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa jumlah minat investasi di Kabupaten Banyuwangi terus meningkat. Dengan angka capaian 2,3 di tahun 2017 kemudian dapat meningkat menjadi 3,8 di tahun 2018. Pada tahun 2019 peningkatan angka capaian kembali terjadi sehingga mencapai 3,9. Pada tahun 2020 jumlah minat investasi di Kabupaten Banyuwangi mengalami penurunan hingga menyentuh angka 3.4 Triliun. Adanya pandemi covid 19 dan adanya kebijakan pembatasan sosial dapat berdampak juga pada minat investasi yang cenderung turun di Tahun 2020. Capaian di tahun 2020 ini kemudian meningkat di tahun 2021 menjadi 6,54 Triliun. Hal ini menunjukkan jika sudah ada perbaikan dalam minat investasi setelah masa pandemi Covid-19.

2.1.3.1.18.2. Realisasi Investasi PMA dan PMDN

Jika dilihat dari jumlah nilai realisasi investasi PMA dan PMDN pada tahun 2021 mencapai 6,5 T. Hal tersebut tentunya tidak terlepas dari upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi agar nilai investasi di Kabupaten Banyuwangi terus meningkat, karena investasi dan pariwisata merupakan sektor penyumbang PDRB terbesar di Kabupaten Banyuwangi. Kabupaten Banyuwangi banyak diminati investor, karena memiliki sumber daya alam yang melimpah, seperti pertanian, perkebunan, pertambangan, hingga sektor ekonomi kreatif. Sehingga, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memberikan kemudahan perizinan serta kenyamanan investasi. Pada tahun 2019, Kabupaten Banyuwangi telah ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai prioritas pengembangan wilayah Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut berimbas terhadap nilai pertumbuhan investasi di Kabupaten Banyuwangi, sehingga Kabupaten Banyuwangi merupakan daerah tujuan investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Indonesia.



Gambar 2.77: Investasi PMA dan PMDN Tahun 2017-2021

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Banyuwangi 2022

2.1.3.1.18.3. Persentase Kesesuaian Pelayanan Investasi dan Perizinan dengan SOP yang telah Ditetapkan

Pelayanan investasi dan perizinan memiliki proses yang cukup panjang serta memiliki standar operasional yang harus dijalankan secara runtut sehingga indikator persentase kesesuaian pelayanan investasi dan perizinan dengan SOP yang telah ditetapkan perlu diperhitungkan guna menginterpretasikan kinerja urusan penanaman modal di Kabupaten Banyuwangi. Berikut gambar indikator persentase kesesuaian pelayanan investasi dan perizinan dengan SOP yang telah ditetapkan pada urusan penanaman modal di Kabupaten Banyuwangi:



Gambar 2.78 Persentase kesesuaian pelayanan investasi dan perizinan dengan SOP yang ditetapkan

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Banyuwangi 2022

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa persentase kesesuaian pelayanan investasi dan perizinan dengan SOP yang telah ditetapkan memiliki tren capaian meningkat. Tahun 2017 tercapai sebesar 83,0% lalu meningkat menjadi 88,0% di tahun 2018, di tahun 2019 kembali meningkat menjadi 90,0% dan di tahun 2020

tercapai 95,0%. Namun capaian di tahun 2020 menurun di tahun 2021 menjadi 77,1%. Dengan adanya berbagai inovasi dan penggunaan IT di bidang pelayanan publik maka kesesuaian pelayanan investasi dan perizinan dengan SOP yang telah ditetapkan cenderung meningkat. Karena peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi tuntutan yang selalu disuarakan oleh berbagai kalangan, baik itu kalangan dunia usaha maupun masyarakat maka Pemerintah Kabupaten Banyuwangi meluncurkan beberapa inovasi diantaranya yaitu Mall Pelayanan Publik, Pasar pelayanan Publik di Rogojampi, Pasar Pelayanan Publik di Genteng untuk mewujudkan pelayanan yang lebih baik.

2.1.3.1.19. Kepemudaan dan Olahraga

Urusan Kepemudaan dan Olahraga merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan pada pemerintah pusat hingga pemerintah kabupaten atau kota, setiap urusan memiliki indikator program yang dapat merepresentasikan kinerja pemerintah kabupaten atau kota dalam melaksanakan urusan tersebut. Berikut capaian kinerja indikator program urusan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2017 hingga tahun 2021:

Tabel 2.22 Indikator program urusan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Banyuwangi

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Pemuda Terlatih Yang Menjadi Wirausaha Mandiri	%	54	40	65	100	100*
2	Persentase Pemuda Terlatih	%	6,35	38	69	100	0,67
3	Persentase Anggota Pramuka Yang Terfasilitasi Kegiatannya	%	10,34	60	88	100	90

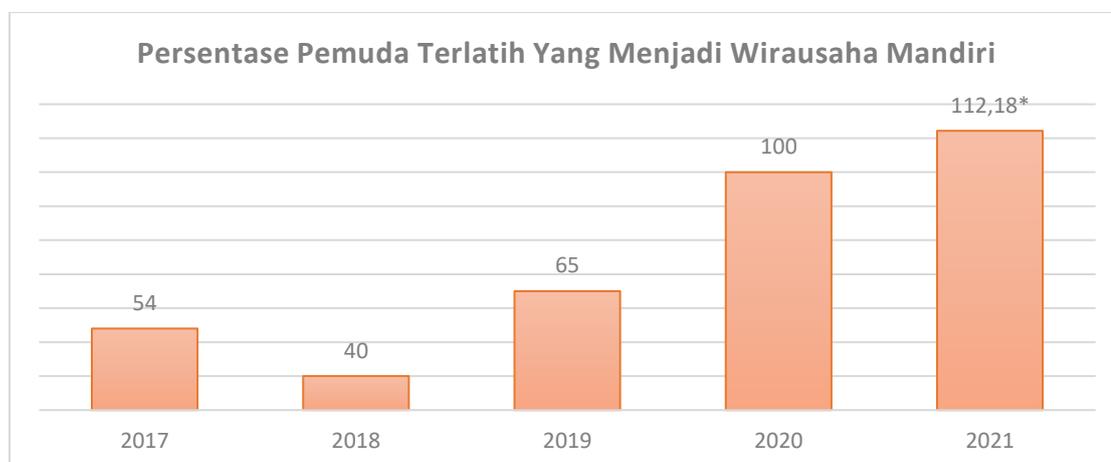
Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022
Ket: *) Data Sementara

Berdasarkan data diatas, indikator program kinerja urusan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Banyuwangi mengalami peningkatan baik pada indikator persentase pemuda terlatih yang menjadi wirausaha mandiri, persentase pemuda terlatih, dan persentase anggota pramuka yang terfasilitasi kegiatannya. Berikut beberapa gambar indikator urusan kepemudaan dan olahraga pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021:

2.1.3.1.19.1. Persentase Pemuda Terlatih Yang Menjadi Wirausaha Mandiri

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus mendorong pada pemuda di daerah Banyuwangi untuk dapat terlatih dan memiliki wirausaha mandiri. Dorongan tersebut

memiliki dampak yang positif bagi persentase pemuda yang menjadi wirausaha mandiri di Banyuwangi. Berikut data capaian indikator persentase pemuda terlatih yang menjadi wirausaha mandiri di Kabupaten Banyuwangi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir:



Gambar 2.79 Persentase pemuda terlatih yang menjadi wirausaha mandiri di Kabupaten Banyuwangi

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022

Ket: *) Data Sementara

Berdasarkan data diatas dapat dilihat Persentase Pemuda Terlatih Yang Menjadi Wirausaha Mandiri dalam kurun waktu 5 (lima) tahun memiliki tren capaian yang positif dan terus meningkat. Capaian tahun 2017 sebesar 54%, sedikit mengalami penurunan menjadi 40% pada tahun 2018. Namun di tahun 2019 kembali meningkat mencapai 65%, dan di tahun 2020 tercapai hingga 100%. Capaian ini meningkat menjadi 112,18% di tahun 2021 sesuai data sementara. Beberapa program pelatihan yang telah dilakukan oleh Dinas Pemuda dan olahraga kepada para pemuda dapat membuahkan hasil yang positif dengan semakin meningkatnya pemuda terlatih yang menjadi wirausaha mandiri.

2.1.3.1.19.2. Persentase Pemuda Terlatih

Selain melakukan pelatihan kepada para pemuda untuk menjadi wirausaha mandiri, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi juga memberikan pelatihan lainnya kepada para pemuda. Dorongan tersebut memiliki dampak yang positif bagi persentase pemuda terlatih di Banyuwangi. Berikut data capaian indikator persentase pemuda terlatih di Kabupaten Banyuwangi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir:



Gambar 2.80 Persentase pemuda terlatih di Kabupaten Banyuwangi

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022

Grafik diatas menunjukkan bahwa persentase pemuda terlatih di Kabupaten Banyuwangi mengalami penurunan di tahun terakhir. Tahun 2017 hanya tercapai 6,35% kemudian di tahun 2018 terdapat sebanyak 38%, meningkat menjadi 69% di tahun 2019, lalu bertambah menjadi 100% di tahun 2020, hingga tahun 2021 mengalami penurunan drastis menjadi 0,67%. Hal ini perlu dievaluasi lebih lanjut penyebab penurunan capaian persentase pemuda terlatih di Kabupaten Banyuwangi.

2.1.3.1.19.3. Persentase Anggota Pramuka Yang Terfasilitasi Keegiatannya

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi juga memberikan fasilitas kegiatan terhadap anggota pramuka di daerahnya. Hal ini membuktikan jika Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mendukung penuh potensi para pemuda dalam pelaksanaan kegiatan positifnya. Berikut data capaian indikator persentase anggota pramuka yang terfasilitasi kegiatannya di Kabupaten Banyuwangi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir:



Gambar 2.81 Persentase anggota pramuka yang terfasilitasi kegiatannya di Kabupaten Banyuwangi

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022

Grafik diatas menunjukkan bahwa persentase anggota pramuka yang terfasilitasi kegiatannya di Kabupaten Banyuwangi cenderung mengalami peningkatan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Tahun 2017 baru tercapai sebesar 10%, lalu melonjak hingga mencapai 60% di tahun 2018. Capaian ini terus meningkat hingga mencapai 88% pada tahun 2019, kemudian di tahun 2020 menjadi sebesar 100% hingga di tahun 2021 mengalami sedikit penurunan menjadi 90%. Hal ini menunjukkan jika Pemerintah Kabupaten Banyuwangi selalu mengupayakan untuk memfasilitasi kegiatan anggota pramuka di daerahnya.

2.1.3.1.20. Statistik

Urusan statistik merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan pada pemerintah pusat hingga pemerintah kabupaten atau kota, setiap urusan memiliki indikator program yang dapat merepresentasikan kinerja pemerintah kabupaten atau kota dalam melaksanakan urusan tersebut. Berikut capaian kinerja indikator program urusan statistik di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2017 hingga tahun 2021:

Tabel 2.23 Indikator program urusan statistik di Kabupaten Banyuwangi

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase data informasi dan statistik daerah yang tersusun dengan baik	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi 2022

Sesuai pada tabel di atas dapat diketahui jika capaian persentase data informasi dan statistik daerah yang tersusun dengan baik selama kurun waktu 5 tahun terakhir selalu berada di angka 100%, mulai dari tahun 2017 hingga di tahun 2021. Hal ini menunjukkan jika Kabupaten Banyuwangi selalu konsisten dalam menyusun data informasi dan statistik daerah dengan baik setiap tahunnya.

2.1.3.1.21. Persandian

Urusan Persandian merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan pada pemerintah pusat hingga pemerintah kabupaten atau kota, setiap urusan memiliki indikator program yang dapat merepresentasikan kinerja pemerintah kabupaten atau kota dalam melaksanakan urusan tersebut. Berikut capaian kinerja indikator program urusan persandian di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2017 hingga tahun 2021:

2.1.3.1.21.1. Persentase Pengamanan Informasi Daerah Yang Terselenggara Baik

Pengamanan informasi merupakan salah satu tupoksi yang dimiliki oleh Bidang Statistik dan Persandian di dalam Dinas Komunikasi dan Informatika. Penyelenggaraan pengamanan informasi daerah di Kabupaten Banyuwangi terlihat berjalan dengan baik.

Tercermin dengan selalu terpenuhinya target setiap tahunnya sehingga angka capaian persentase pengamanan informasi daerah yang terselenggara baik menunjukkan angka 100% di setiap tahun dalam kurun waktu 5 tahun yaitu tahun 2017 sampai tahun 2021.



Gambar 2.82 Persentase pengamanan informasi daerah yang terselenggara baik

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi, 2022

2.1.3.1.22. Kebudayaan

Urusan kebudayaan merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan pada pemerintah pusat hingga pemerintah kabupaten atau kota, setiap urusan memiliki indikator program yang dapat merepresentasikan kinerja pemerintah kabupaten atau kota dalam melaksanakan urusan tersebut. Berikut capaian kinerja indikator program urusan kebudayaan di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2017 hingga tahun 2021:

2.1.3.1.22.1. Jumlah Budaya Lokal Yang Dikembangkan Menjadi Daya Tarik Wisata

Pariwisata telah menjadi bidang yang di andalkan oleh Banyuwangi dalam beberapa tahun terakhir. Wisata yang ditawarkan tidak hanya berbentuk wisata alam akan tetapi juga merambah kepada pariwisata budaya yang disuguhkan melalui festival-festival yang beberapa tahun terakhir telah diselenggarakan. Jumlah festival yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus bertambah setiap tahunnya dari awalnya berjumlah 10 festival pada tahun 2012 hingga menjadi 123 festival yang tersebar di setiap bulan di tahun 2020. Jumlah festival yang terus bertambah tersebut berdampak pada meningkatnya jumlah budaya lokal yang dikembangkan menjadi daya tarik wisata, capaian tahun 2017-2021 tersaji dalam gambar berikut :



Gambar 2.83 Jumlah budaya lokal yang dikembangkan menjadi daya tarik wisata di Kabupaten Banyuwangi

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi 2022

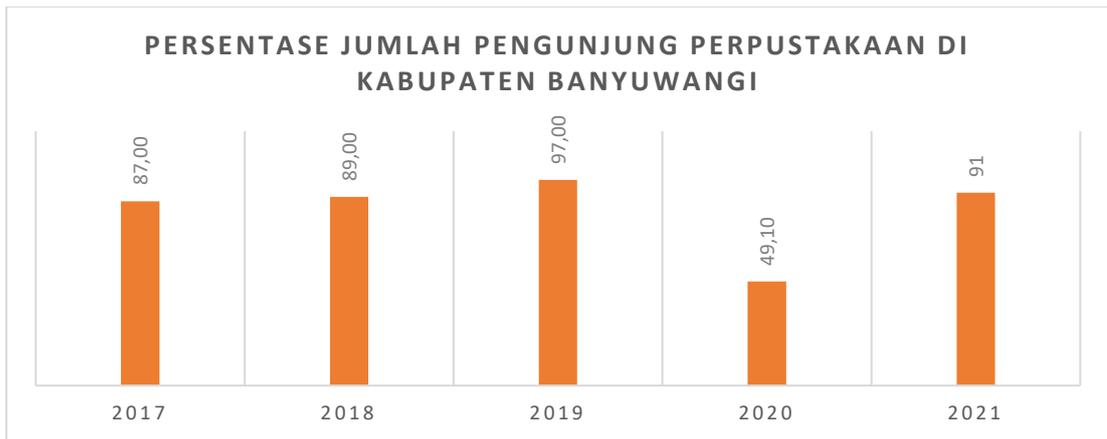
Gambar diatas menunjukkan bahwa jumlah budaya lokal yang dikembangkan menjadi daya tarik wisata di Kabupaten Banyuwangi cenderung turun dalam 2 tahun terakhir. Berawal dari 24 budaya lokal di tahun 2017 kemudian meningkat menjadi 32 budaya lokal pada tahun 2018. Di tahun 2019 juga kembali meningkat hingga mencapai 36 budaya lokal. Pada tahun 2020 jumlah budaya lokal yang dikembangkan menjadi daya Tarik wisata menurun hanya menjadi 28 budaya lokal. Karena dampak dari adanya pembatasan sosial akibat pandemi covid 19 sehingga beberapa festival budaya yang batal dilaksanakan. Kemudian di tahun 2021, jumlah budaya lokal yang dikembangkan menjadi daya tarik wisata di Kabupaten Banyuwangi kembali menurun menjadi 14 budaya lokal.

2.1.3.1.23. Perpustakaan

Urusan perpustakaan merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan pada pemerintah pusat hingga pemerintah kabupaten atau kota, setiap urusan memiliki indikator program yang dapat merepresentasikan kinerja pemerintah kabupaten atau kota dalam melaksanakan urusan tersebut. Berikut capaian kinerja indikator program urusan perpustakaan di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2017 hingga tahun 2021:

2.1.3.1.23.1. Persentase Jumlah Pengunjung Perpustakaan

Persentase minat baca di Kabupaten Banyuwangi terus meningkat dan hal ini tercermin dari meningkatnya jumlah pengunjung perpustakaan di Banyuwangi. Berikut data capaian persentase jumlah pengunjung perpustakaan di Kabupaten Banyuwangi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir:



Gambar 2.84 Persentase jumlah pengunjung perpustakaan di Kabupaten Banyuwangi

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banyuwangi, 2022

Berdasarkan gambar diatas memperlihatkan bahwa persentase jumlah pengunjung perpustakaan di Kabupaten Banyuwangi memiliki tren capaian meningkat ditahun 2017 hingga tahun 2019. Capaian persentase jumlah pengunjung perpustakaan di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2017 sebanyak 87% lalu bertambah menjadi 89% di tahun 2018 dan pada tahun 2019 mencapai 97%. Namun pada tahun 2020 hingga tahun 2021 persentase pengunjung Perpustakaan mengalami penurunan menjadi hanya sebesar 49,1% dan tahun 2021 meningkat mencapai angka 91%. Penurunan tersebut merupakan dampak dari terjadinya pandemi Covid-19, yang menyebabkan adanya pembatasan interaksi penduduk (kerumunan) selama tahun 2020 hingga di tahun 2021. Selain itu beberapa masalah selain menurunnya jumlah pengunjung perpustakaan adalah kurangnya koleksi buku perpustakaan, kurangnya tenaga SDM Perpustakaan dan Pustakawan, kurangnya jumlah Perpustakaan berstandart Nasional Perpustakaan. kurangnya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi / promosi, rendahnya minat masyarakat menjadi anggota perpustakaan, serta belum meratanya layanan perpustakaan.

Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Tahun 2020, diketahui bahwa IPLM Kabupaten Banyuwangi sebesar 5,6 cukup rendah jika dibandingkan dengan IPLM Nasional sebesar 12,93 dan IPLM Provinsi Jawa Timur sebesar 13,44.



Gambar 2.85: Indeks Literasi Masyarakat

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banyuwangi, 2022

Sedangkan Indeks Tingkat Kegemaran Membaca (ITKM) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 sebesar 56,13 masuk dalam kategori sedang berada di atas ITKM nasional sebesar 55,74.



Gambar 2 86: Indeks Tingkat Kegemaran Membaca masyarakat

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banyuwangi, 2022

Terhadap kondisi tersebut tentu Pemerintah Kabupaten Banyuwangi secara konsisten akan terus berupaya untuk meningkatkan IPLM dan ITKM sebagai cerminan tingkat budaya literasi masyarakat, melalui layanan mobil perpustakaan keliling, penambahan koleksi buku, digitalisasi koleksi pustaka, sosialisasi kegiatan gemar

membaca melalui event Banyuwangi Festival serta bekerjasama dengan berbagai pihak untuk perluasan jangkauan layanan perpustakaan kepada seluruh lapisan masyarakat.

2.1.3.1.24. Kearsipan

Urusan kearsipan merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan pada pemerintah pusat hingga pemerintah kabupaten atau kota, setiap urusan memiliki indikator program yang dapat merepresentasikan kinerja pemerintah kabupaten atau kota dalam melaksanakan urusan tersebut. Berikut capaian kinerja indikator program urusan kearsipan di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2017 hingga tahun 2021:

Tabel 2.24 Indikator program urusan kearsipan di Kabupaten Banyuwangi

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Arsip Statis Dan Dinamis Yang Dikelola	%	80	85	88	95	80
2	Persentase Arsip/Dokumen Daerah Dalam Kondisi Baik	%	87	90	92	98	101*

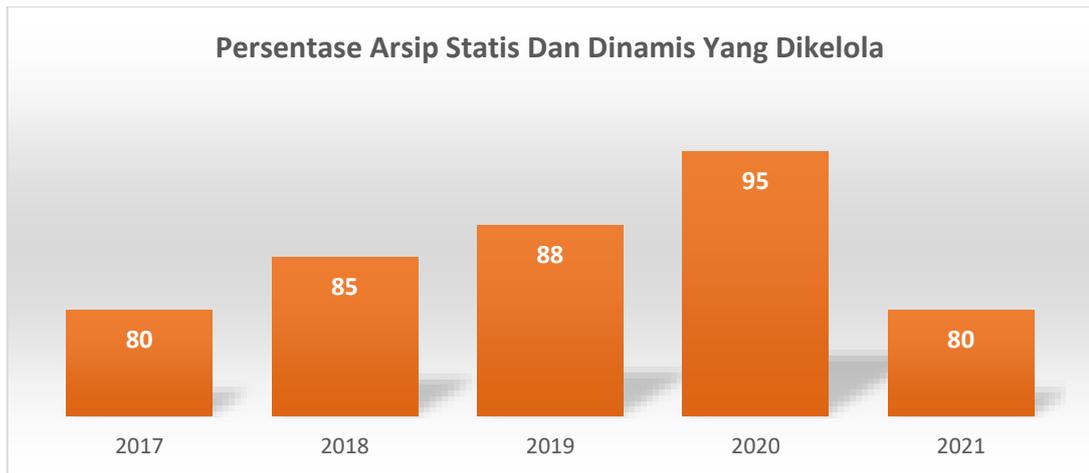
Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banyuwangi, 2022

Ket: *) Data Sementara

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui indikator persentase arsip statis dan dinamis yang dikelola, indikator persentase arsip/dokumen daerah dalam kondisi baik, indikator persentase sarpras kearsipan dalam kondisi baik memiliki tren data meningkat sejak tahun 2017 hingga tahun 2021. Berikut gambar capaian beberapa indikator urusan kearsipan di Kabupaten Banyuwangi:

2.1.3.1.24.1. Persentase Arsip Statis Dan Dinamis Yang Dikelola

Arsip statis adalah arsip yang tidak dipergunakan secara langsung untuk perencanaan, pelaksanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya maupun untuk penyelenggaraan sehari-hari administrasi negara. Sedangkan arsip dinamis adalah arsip yang dipergunakan secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya atau dipergunakan secara langsung dalam penyelenggaraan administrasi negara. Berikut merupakan data capaian persentase arsip statis dan dinamis yang dikelola di Kabupaten Banyuwangi dalam kurun waktu 5 tahun:



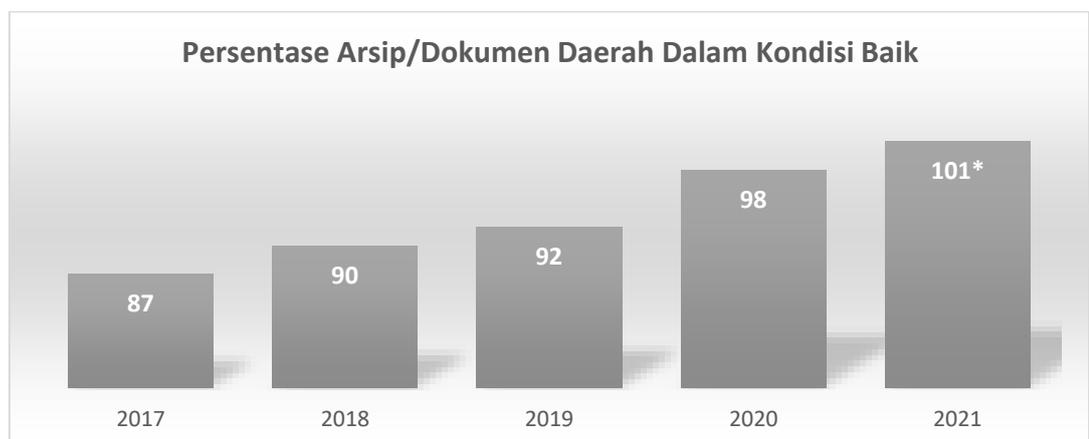
Gambar 2.87 Persentase arsip statis dan dinamis yang dikelola di Kabupaten Banyuwangi

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banyuwangi, 2022

Data diatas memperlihatkan bahwa dalam kurun waktu 5 tahun, capaian persentase arsip statis dan dinamis yang dikelola di Kabupaten Banyuwangi mengalami peningkatan. Tahun 2017 tercapai sebesar 80% dan di tahun 2018 meningkat mencapai 85%. Kemudian di tahun 2019 meningkat hingga 88%, lalu tahun 2020 bertambah mencapai 95% dan di tahun 2021 turun menjadi 80%.

2.1.3.1.24.2. Persentase Arsip/Dokumen Daerah Dalam Kondisi Baik

Pengelolaan arsip daerah juga harus memperhatikan kondisi dari arsip tersebut. Selain adanya peningkatan pada arsip yang dikelola, maka persentase kondisi baik dari arsip tersebut juga terus meningkat di Kabupaten Banyuwangi. Secara rinci datanya tersaji dalam gambar berikut:



Gambar 2.88 Persentase arsip/ dokumen daerah dalam kondisi baik di Kabupaten Banyuwangi

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banyuwangi, 2022

Ket: *) Data Sementara

Berdasarkan gambar di atas, dalam kurun waktu 5 tahun, capaian persentase arsip/ dokumen daerah dalam kondisi baik di Kabupaten Banyuwangi cenderung dalam tren yang meningkat. Tercapai sebesar 87% di tahun 2017, lalu bertambah menjadi 90% pada tahun 2018, dan di tahun 2019 kembali meningkat mencapai angka 92%. Pada tahun 2020 bertambah hingga 98% sampai di tahun 2021 pada data sementara mencapai 101%.

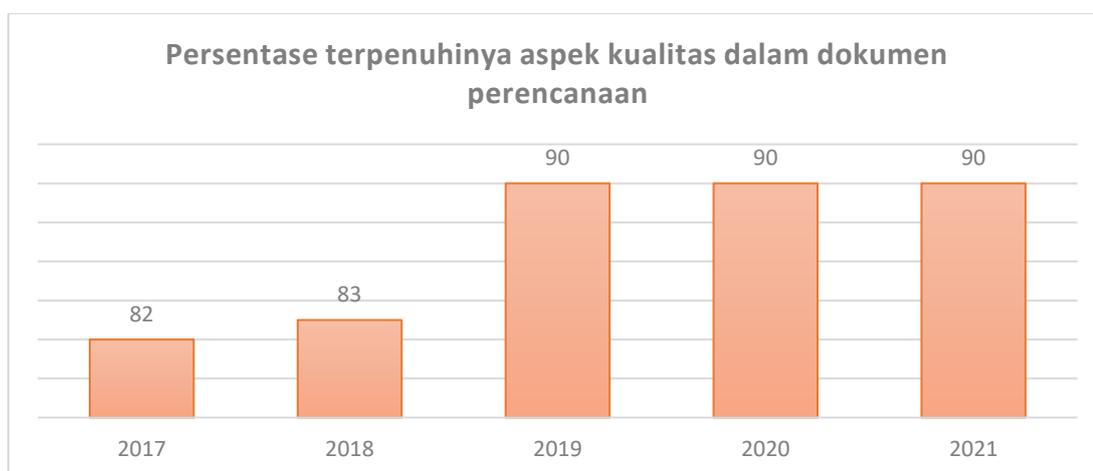
2.1.3.2. Unsur penunjang

2.1.3.2.1. Perencanaan

Urusan perencanaan merupakan salah satu urusan penunjang yang melaksanakan fungsi-fungsi mengenai perencanaan yang bersifat strategis yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Secara rinci capaian dari beberapa indikator urusan perencanaan dapat dilihat pada poin-poin berikut:

2.1.3.2.1.1. Persentase Terpenuhinya Aspek Kualitas dalam Dokumen Perencanaan

Dokumen perencanaan merupakan dokumen yang di susun oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan perangkat daerah dalam kurun waktu tertentu. Dokumen perencanaan yang disusun oleh Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten memiliki jangka waktu perencanaan 20 tahun atau yang selanjutnya disebut RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah), dokumen perencanaan 5 tahun yang selanjutnya disebut RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) serta dokumen perencanaan untuk kurun waktu 1 tahun rencana yang selanjutnya disebut RKP (Rencana Kerja Pemerintah Daerah). Berikut merupakan data capaian persentase terpenuhinya aspek kualitas dalam dokumen perencanaan di Kabupaten Banyuwangi:



Gambar 2.89 Persentase terpenuhinya aspek kualitas dalam dokumen perencanaan

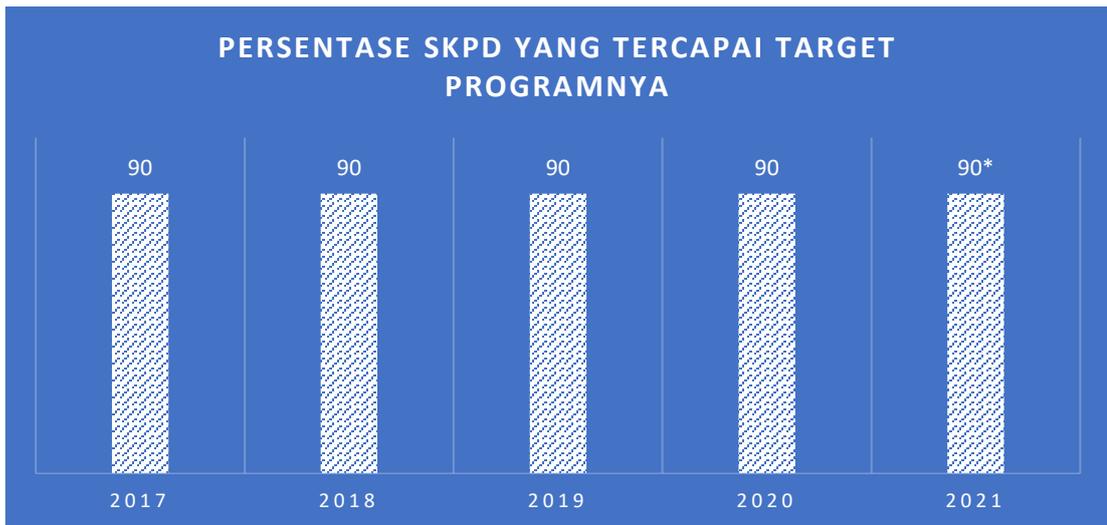
Sumber: BAPPEDA Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022

Persentase terpenuhinya aspek kualitas dalam dokumen perencanaan memiliki tren capaian yang meningkat. Pada tahun 2017 persentase kualitas dokumen perencanaan Kabupaten Banyuwangi mencapai 82% dan terus meningkat pada tahun 2018 menjadi 83%. Pada tahun 2019 kembali terlihat adanya peningkatan yang cukup baik pada persentase terpenuhinya aspek kualitas dokumen perencanaan di Kabupaten Banyuwangi hingga mencapai angka 90% sampai di tahun 2021. Hal ini berpengaruh pada nilai komponen perencanaan dalam Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Kabupaten Banyuwangi sebagaimana komponen perencanaan dalam penilaian AKIP mempunyai bobot 30%, untuk nilai komponen perencanaan dalam penilaian AKIP Kabupaten Banyuwangi dalam 5 tahun terakhir sebagai berikut : Tahun 2016 sebesar 26,85, pada tahun 2017 mengalami penurunan sedikit menjadi 26,69 kembali menurun pada tahun 2018 menjadi 25,75 dan pada tahun 2019 naik menjadi 26,59 dan terakhir mencapai 26,82 pada tahun 2020. Sehingga capaian nilai komponen perencanaan dalam AKIP Kabupaten Banyuwangi adalah 89,4%. Dalam case diatas dapat dilihat dari permasalahan mengenai adanya kebijakan nasional yang berdampak pada perubahan kebijakan daerah secara mendadak sehingga menyebabkan inkonsistensi perencanaan pembangunan di daerah.

Kemudian sesuai hasil data sementara, menunjukkan bahwa capaian persentase terpenuhinya aspek kualitas dalam dokumen perencanaan di Kabupaten Banyuwangi meningkat mencapai 94% di tahun 2021. Capaian ini menunjukkan jika sudah ada peningkatan kualitas dari dokumen perencanaan yang dibuat oleh Kabupaten Banyuwangi.

2.3.1.24.2 Persentase SKPD yang Tercapai Target Programnya

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan perpanjangan tangan kepala daerah dalam mengimplementasikan visi misi yang ingin dicapai dalam periode kepemimpinannya. Visi misi yang telah di bentuk oleh kepala daerah selanjutnya diturunkan hingga menjadi program-program yang harus dijalankan oleh setiap perangkat daerah dalam suatu daerah. Kabupaten Banyuwangi memiliki 52 SKPD yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, 18 Dinas, Satpol PP, 6 Badan, 25 Kecamatan. Berikut merupakan data capaian persentase SKPD yang tercapai target programnya di Kabupaten Banyuwangi:



Gambar 2.90 Persentase SKPD yang tercapai target programnya di Kabupaten Banyuwangi

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022

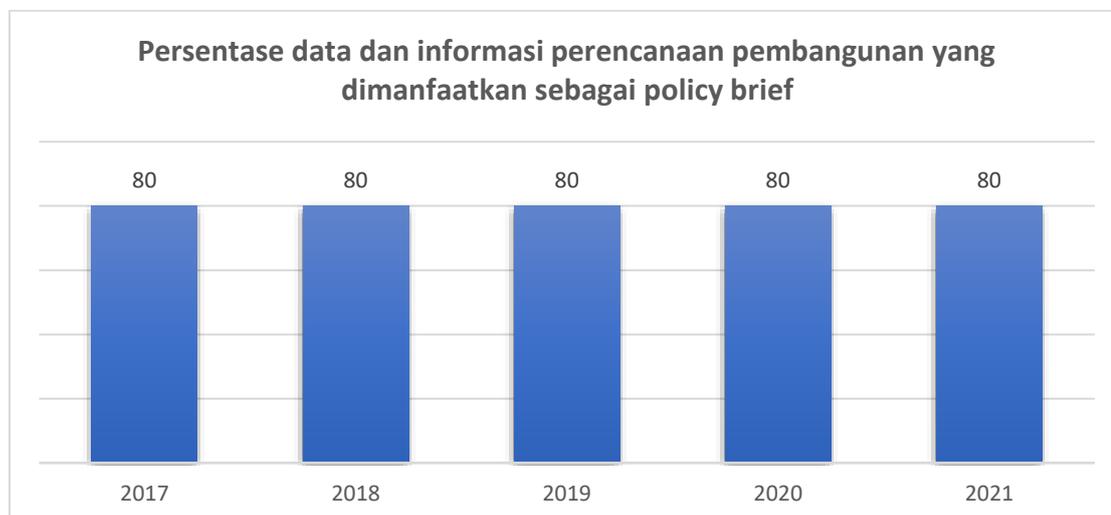
Ket: *) Data Sementara

Persentase SKPD yang tercapai target programnya pada Kabupaten Banyuwangi selama kurun waktu 5 tahun menunjukkan tren capaian yang stagnan. Berdasarkan gambar diatas maka terlihat bahwa capaian persentase SKPD yang tercapai target programnya Kabupaten Banyuwangi tahun 2017-2021 memiliki angka capaian yang stabil yaitu berada pada angka 90%. Hal ini seiring dengan perubahan kebijakan pemerintah tahun 2017 dari pendekatan *money follow function* menjadi *money follow program*. Permasalahan pembangunan daerah pada perencanaan pembangunan kesra dan pemerintahan yang begitu kompleks serta bersifat dinamis sesuai dengan perubahan kebijakan dan regulasi yang ada. Proses dan mekanisme perencanaan pembangunan membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan sehingga seringkali tidak tepat waktu dan berdampak pada pembangunan SKPD yang tercapai sesuai target cenderung bergerak stagnan.

2.1.3.2.1.2. Persentase Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan yang dimanfaatkan sebagai *Policy Brief*

Penentu kebijakan membutuhkan sebuah *policy brief* dalam proses menentukan keputusan. *Policy brief* adalah ringkasan dari analisis terhadap suatu kebijakan yang ditujukan untuk level penentu kebijakan tertinggi dan bertujuan mengidentifikasi isu-isu tertentu, serta membuat pilihan kebijakan, bukti-bukti baru, dan rekomendasi baru bagi kebijakan yang akan dirancang. Pengambilan keputusan untuk sebuah kebijakan membutuhkan analisis mengenai perencanaan pembangunan sehingga keputusan yang diambil benar-benar menjadi solusi atas masalah perencanaan pembangunan yang terjadi. Data dan informasi perencanaan pembangunan di kelompok dalam tiga bidang yaitu data dan informasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi, data dan informasi perencanaan pembangunan bidang kesra dan pemerintahan dan data dan

informasi perencanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana wilayah dan lingkungan hidup. Berikut merupakan data capaian persentase data dan informasi perencanaan pembangunan yang dimanfaatkan sebagai *policy brief* di Kabupaten Banyuwangi:



Gambar 2.91 Persentase data dan informasi perencanaan pembangunan yang dimanfaatkan sebagai *policy brief* di Kabupaten Banyuwangi

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022

Persentase data dan informasi perencanaan pembangunan yang dimanfaatkan sebagai *policy brief* di Kabupaten Banyuwangi selama kurun waktu 5 tahun menunjukkan tren capaian yang stagnan. Berdasarkan gambar diatas maka terlihat bahwa capaian Persentase data dan informasi perencanaan pembangunan ekonomi yang dimanfaatkan sebagai *policy brief* di tahun 2017 hingga tahun 2021 memiliki angka capaian yang stabil yaitu berada pada angka 80%. Hal tersebut dikarenakan adanya masalah dalam pembangunan daerah yang terletak pada perencanaan pembangunan kesra dan pemerintahan yang bersifat dinamis dan berubah-ubah. Permasalahan yang harus ditangani oleh SKPD stempat mengenai tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan.

2.1.3.2.2. Keuangan

Urusan Keuangan merupakan salah satu urusan penunjang yang melaksanakan fungsi-fungsi mengenai keuangan yang bersifat strategis yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Secara rinci capaian dari beberapa indikator urusan keuangan dapat dilihat pada poin-poin berikut:

2.1.3.2.2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang didapatkan dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. PAD Kabupaten Banyuwangi menunjukkan adanya peningkatan pada setiap tahunnya. Peningkatan PAD yang diperoleh Banyuwangi didominasi oleh sektor pariwisata yang beberapa tahun terakhir memang digencarkan pembangunannya. Berikut merupakan rincian data peningkatan PAD Kabupaten Banyuwangi dalam kurun waktu 5 tahun:



Gambar 2.92 Pendapatan Asli Daerah

Sumber: BAPENDA Kabupaten Banyuwangi, 2022

Pada Tahun 2017 PAD Kabupaten Banyuwangi sebesar 388,94 M meningkat 5,73%, kondisi ini terus berlanjut sampai dengan Tahun 2018 dimana PAD meningkat mencapai 450,06 M. Tahun 2019 PAD Kabupaten Banyuwangi melonjak tajam hingga mencapai angka 645,45 M. Namun di tahun 2020 PAD Kabupaten Banyuwangi mengalami penurunan menjadi Rp. 453,09 Miliar, hal ini terjadi dikarenakan turunnya penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah akibat terdampak oleh pandemi Covid-19. Kurangnya Kepatuhan Wajib Pajak Self Assesment Dalam Membayar Kewajiban Pajaknya sehingga pada tahun 2020 pendapatan asli daerah Kabupaten Banyuwangi mengalami penurunan daripada tahun sebelumnya. Capaian ini mengalami perbaikan di tahun 2021 yang mengalami peningkatan mencapai angka Rp. 520,02 Miliar.

2.1.3.2.2.2. Total Penerimaan Pajak Daerah

Sejalan dengan peningkatan PAD, Penerimaan Pajak Daerah (TPD) Kabupaten Banyuwangi memiliki tren capaian meningkat. Tahun 2017 capaian Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Banyuwangi mencapai Rp. 152,811 Miliar, lalu meningkat menjadi Rp. 178, 917 Miliar pada tahun 2018 dan di tahun 2019 mencapai Rp. 196,835 Miliar. Namun capaian ini mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi sebesar Rp. 191,620 Miliar dan kembali membaik di tahun 2021 sebesar Rp. 206,147 Miliar. COVID-19 yang telah terjadi hampir 1,5 tahun sangat memukul semua sektor utamanya pariwisata.

Banyuwangi yang menjadikan pariwisata sebagai payung pembangunan otomatis sangat terdampak.

Seperti diketahui salah satu penyumbang terbesar Pajak Daerah adalah sektor pariwisata. Selama Bulan April hingga Juni 2020 (3 bulan) destinasi wisata tutup, tentu dengan ditutupnya destinasi wisata ini memberikan dampak kepada hotel, restoran dan usaha jasa pariwisata lainnya sehingga juga mengakibatkan penerimaan pajak hotel, restoran dan hiburan mengalami penurunan selama Tahun 2020 hingga tahun 2021. Hal tersebut juga dikarenakan karena adanya isu permasalahan data wajib Pajak Belum Terdata Dan Terupdate Secara Optimal, sehingga para wajib pajak tidak merasa memiliki kewajiban dalam membayar pajak.



Gambar 2.93 TPD: Total penerimaan pajak pemerintah daerah di Kabupaten Banyuwangi

Sumber: BAPENDA Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022

2.1.3.2.2.3. Opini BPK terhadap LKPD

Tabel 2.25 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Banyuwangi

Indikator	Realisasi				
	2017	2018	2019	2020	2021
Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: LKPJ Kabupaten Banyuwangi, 2021

Pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK adalah pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Tujuan pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Sedangkan, Opini WTP diberikan dengan kriteria: sistem pengendalian internal memadai dan tidak

ada salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan. Secara keseluruhan laporan keuangan telah menyajikan secara wajar sesuai dengan SAP. Kabupaten Banyuwangi sendiri selama 5 tahun terakhir memiliki capaian tetap dengan kategori WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

2.1.3.2.3. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan merupakan salah satu urusan penunjang yang melaksanakan fungsi-fungsi mengenai kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang bersifat strategis yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Secara rinci capaian dari indikator urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dapat dilihat pada poin berikut:

2.1.3.2.3.1. Persentase Pelaksanaan Ujian Dinas dan Seleksi Kompetensi Jabatan



Gambar 2.94 Persentase pelaksanaan ujian dinas dan seleksi kompetensi jabatan di Kabupaten Banyuwangi

Sumber: BKPP Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022

Ket: *) Data Sementara

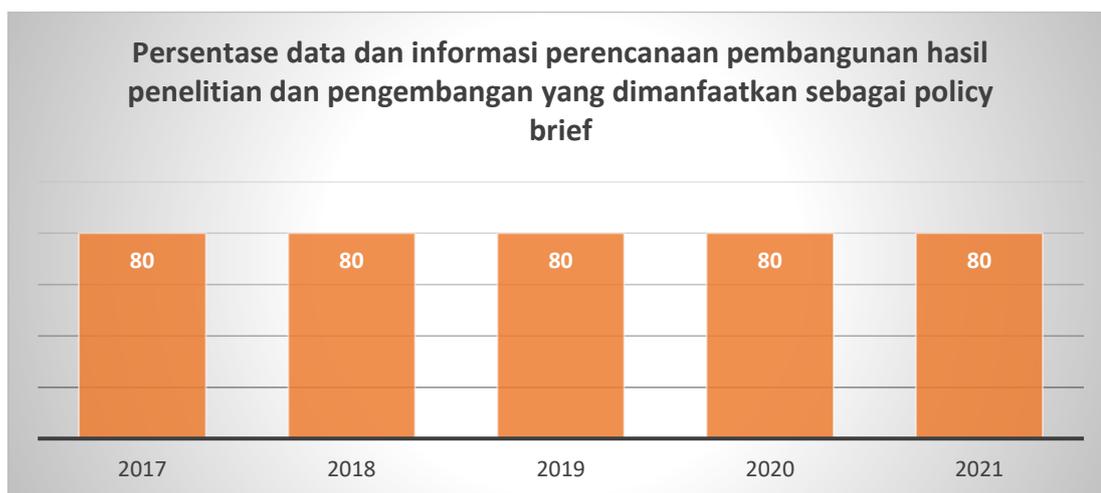
Persentase pelaksanaan ujian dinas dan seleksi kompetensi jabatan di Kabupaten Banyuwangi dalam kurun waktu 5 tahun memiliki tren capaian stagnan. Di tahun 2017 hingga tahun 2021 capaian persentase pelaksanaan ujian dinas dan seleksi kompetensi jabatan memiliki angka capaian 100%. Hal ini menunjukkan jika Kabupaten Banyuwangi selalu konsisten dalam menyelenggarakan ujian dinas dan seleksi kompetensi jabatan dalam setiap tahunnya.

2.1.3.2.4. Penelitian dan Pengembangan

Urusan Penelitian dan Pengembangan merupakan salah satu urusan penunjang yang melaksanakan fungsi-fungsi mengenai penelitian dan pengembangan yang bersifat

strategis yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Secara rinci capaian dari indikator urusan penelitian dan pengembangan dapat dilihat pada poin berikut:

2.1.3.2.4.1. **Persentase Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Hasil Penelitian dan Pengembangan yang dimanfaatkan sebagai *Policy Brief***



Gambar 2.95 Persentase data dan informasi perencanaan pembangunan hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan sebagai *policy brief* di Kabupaten Banyuwangi

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022

Persentase data dan informasi perencanaan pembangunan hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan sebagai *policy brief* di Kabupaten Banyuwangi selama kurun waktu 5 tahun menunjukkan tren capaian yang stagnan. Berdasarkan gambar diatas maka terlihat bahwa capaian persentase data dan informasi perencanaan pembangunan hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan sebagai *policy brief* dari tahun 2017 hingga di tahun 2021 memiliki angka capaian yang stabil yaitu berada pada angka 80%. Masih belum adanya SDM dalam bidang kelitbangan (peneliti) yang kompeten di dalam bidangnya. Selain itu juga disebabkan oleh permasalahan mengenai hasil penelitian dan pengembangan yang belum optimal sedngkan itu digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah dan dalam penetapan suatu kebijakan.

2.1.3.3. **Unsur Pendukung**

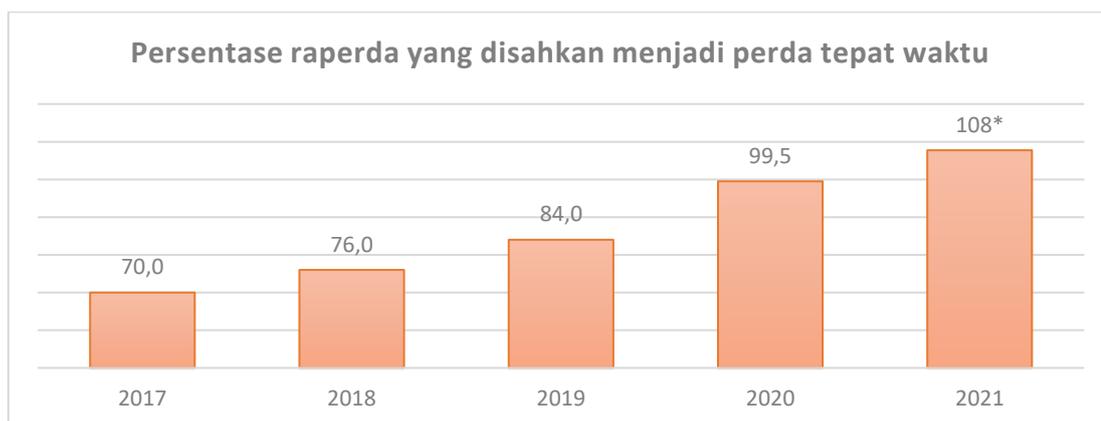
2.1.3.3.1. **Sekretariat DPRD**

Urusan Sekretariat DPRD merupakan salah satu urusan penunjang yang melaksanakan fungsi-fungsi mengenai kesekretariatan DPRD yang bersifat strategis yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah. Secara rinci capaian dari indikator-indikator urusan kesekretariatan DPRD dapat dilihat pada poin-poin berikut:

2.1.3.3.1.1. Raperda yang disahkan menjadi Perda Tepat Waktu

Persentase Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) tepat waktu di Kabupaten Banyuwangi memiliki tren capaian yang positif. Secara rinci datanya tersaji dalam gambar berikut:



Gambar 2.96 Persentase raperda yang disahkan menjadi perda tepat waktu di Kabupaten Banyuwangi

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022

Ket: *) Data Sementara

Berdasarkan gambar diatas maka dapat dilihat bahwa persentase raperda yang disahkan menjadi perda tepat waktu memiliki tren capaian meningkat Pada tahun 2017 capaian persentase raperda yang disahkan menjadi perda tepat waktu di Kabupaten Banyuwangi sebesar 70% dan terus meningkat sampai pada tahun 2018 menjadi 76%. Kemudian pada tahun 2019 masih mengalami peningkatan menjadi 84% dan meningkat menjadi 99.5% pada tahun 2020 hingga tahun 2021 sebesar 108% sesuai data sementara. Dengan demikian maka capaian raperda yang disahkan menjadi perda dengan tepat waktu berhasil ditingkatkan oleh OPD setempat.

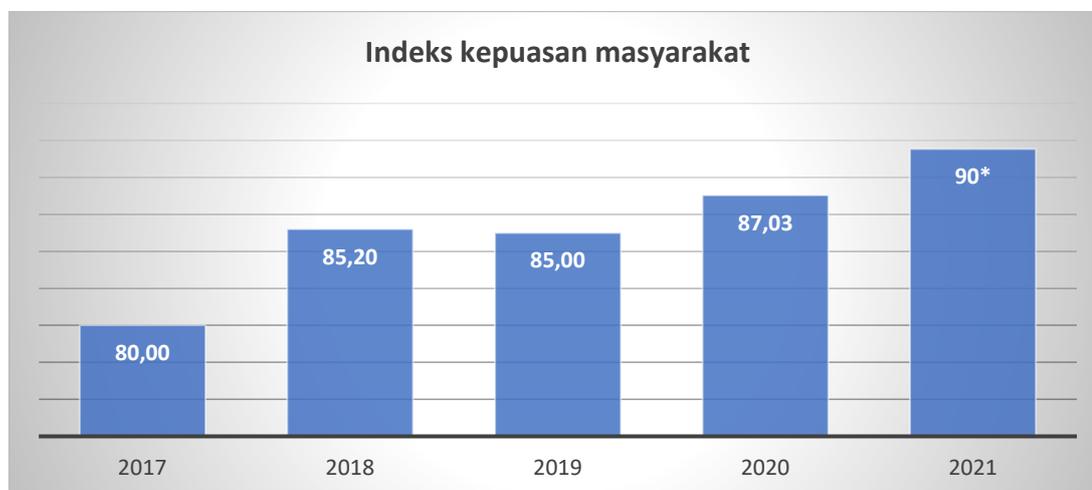
2.1.3.3.2. Sekretariatan

Urusan Sekretariatan merupakan salah satu urusan penunjang yang melaksanakan fungsi-fungsi mengenai kesekretariatan yang bersifat strategis yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Secara rinci capaian dari indikator-indikator urusan kesekretariatan dapat dilihat pada poin-poin berikut:

2.1.3.3.2.1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur

penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Banyuwangi memiliki tren capaian yang positif yang secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.97 Indeks kepuasan masyarakat (IKM) di Kabupaten Banyuwangi

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi 2022

Ket: *) Data Sementara

Tercatat adanya peningkatan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Banyuwangi dalam kurun waktu 5 tahun yaitu mulai tahun 2017 hingga tahun 2021. Dengan capaian tahun 2017 sebesar 80, kemudian meningkat mencapai 85,20 di tahun 2018. Pada tahun 2019 sedikit mengalami penurunan menjadi 85. Namun kembali meningkat mencapai 87,03 pada tahun 2020 dan tahun 2021 meningkat mencapai 90 sesuai data sementara. Hal tersebut membuktikan bahwa kinerja pelayanan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi baik dan menjadi penilaian positif dari masyarakat sekitar.

2.1.3.3.2.2. Nilai SAKIP

Banyuwangi merupakan Kabupaten yang memiliki predikat SAKIP A selama empat tahun berturut-turut yaitu dari tahun 2016 sampai pada tahun 2020. Berikut rincian skor atas perolehan predikat SAKIP yang dimiliki Kabupaten Banyuwangi:



Gambar 2.98 Hasil SAKIP di Kabupaten Banyuwangi

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi, 2022

Berdasarkan gambar tersebut hasil SAKIP dalam kurun waktu 5 tahun terakhir di Kabupaten Banyuwangi memiliki tren capaian yang positif dengan adanya peningkatan skor di setiap tahunnya. Capaian nilai SAKIP di tahun 2017 sebesar 81,26 kemudian meningkat menjadi 82,17 di tahun 2018. Angka tersebut kembali meningkat mencapai 83,23 pada tahun 2019, dan di tahun 2020 bertambah menjadi 83,86. Selanjutnya di tahun 2021, capaian nilai SAKIP Kabupaten Banyuwangi mencapai angka 93,18. Perolehan capaian nilai SAKIP selama 5 tahun terakhir ini membuat Kabupaten Banyuwangi mencapai predikat SAKIP A berturut-turut.

2.1.3.3.2.3. Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi merupakan gambaran sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Kabupaten Banyuwangi sendiri pada tahun 2021 memiliki indeks reformasi birokrasi memiliki skala 77* dengan target 78, oleh karena itu maka indeks capaian di Kabupaten Banyuwangi untuk indeks reformasi birokrasi sebesar 98,72.

2.1.3.3.2.4. Indeks Inovasi Daerah

Tabel 2.30 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Banyuwangi

Indikator	Realisasi				
	2017	2018	2019	2020	2021
Indeks Inovasi Daerah	Sangat inovatif				

Sumber: LKPJ Kabupaten Banyuwangi, 2021

Indeks Inovasi Daerah merupakan himpunan dari Inovasi Daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Kabupaten Banyuwangi pada 5 tahun terakhir memiliki capaian kategori yang stagnan yaitu bertahan dengan kategori sangat inovatif.

2.1.3.4. Unsur Pengawasan

2.1.3.4.1. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Urusan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah merupakan salah satu urusan penunjang yang melaksanakan fungsi-fungsi mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang bersifat strategis yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Tabel 2.31 Indikator urusan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten Banyuwangi

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Laporan Keuangan SKPD yang Sesuai SAP dalam Mendukung Tercapainya WTP pada Wilayah Irban I	%	100	100	100	100	100*
4	Persentase Laporan Keuangan SKPD yang Sesuai SAP dalam Mendukung Tercapainya WTP pada Wilayah Irban II	%	100	100	100	100	100*
7	Persentase Laporan Keuangan SKPD yang Sesuai SAP dalam Mendukung Tercapainya WTP pada Wilayah Irban III	%	100	100	100	100	100*

Sumber: Inspektorat Kabupaten Banyuwangi 2022

Ket: *) Data Sementara

Berdasarkan tabel diatas, secara garis besar indikator-indikator dari urusan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah memiliki tren capaian yang positif. Secara rinci capaian dari masing-masing indikator urusan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah tersebut dijelaskan pada poin-poin berikut:

2.1.3.4.1.1. **Persentase Laporan Keuangan SKPD yang Sesuai SAP dalam Mendukung Tercapainya WTP pada Wilayah Irbani I**



Gambar 2.99 Persentase laporan keuangan SKPD yang sesuai SAP dalam mendukung tercapainya WTP pada wilayah irban I

Sumber: Inspektorat Kabupaten Banyuwangi tahun 2022

Ket: *) Data Sementara

Persentase laporan keuangan SKPD yang sesuai SAP dalam mendukung tercapainya WTP pada wilayah Irban I di Kabupaten Banyuwangi selama kurun waktu 5 tahun menunjukkan tren capaian positif yang stabil. Berdasarkan gambar berikut maka terlihat bahwa capaian persentase laporan keuangan SKPD yang sesuai SAP dalam mendukung tercapainya WTP pada wilayah Irban I tahun 2017-2021 memiliki angka capaian yang stabil yaitu berada pada angka 100.

2.1.3.4.1.2. **Persentase Laporan Keuangan SKPD yang Sesuai SAP dalam Mendukung Tercapainya WTP pada Wilayah Irbani II**

Seperti halnya persentase laporan keuangan SKPD yang sesuai SAP dalam mendukung tercapainya WTP pada wilayah Irban I maka pada wilayah irban II persentase laporan keuangan SKPD yang sesuai SAP dalam mendukung tercapainya WTP nya selama kurun waktu 5 tahun terakhir juga menunjukkan tren capaian positif yang stabil. Berdasarkan gambar berikut maka terlihat bahwa capaian persentase laporan keuangan SKPD yang sesuai SAP dalam mendukung tercapainya WTP pada wilayah Irban II tahun 2017-2021 memiliki angka capaian yang stabil yaitu berada pada angka 100.



Gambar 2.100 Persentase laporan keuangan SKPD yang sesuai SAP dalam mendukung tercapainya WTP pada wilayah irban II

Sumber: Inspektorat Kabupaten Banyuwangi tahun 2022

Ket: *) Data Sementara

2.1.3.4.1.3. Persentase Laporan Keuangan SKPD yang Sesuai SAP dalam Mendukung Tercapainya WTP pada Wilayah Irban III

Seperti halnya persentase laporan keuangan SKPD yang sesuai SAP dalam mendukung tercapainya WTP pada wilayah Irban I dan wilayah Irban II maka pada wilayah Irban III persentase laporan keuangan SKPD yang sesuai SAP dalam mendukung tercapainya WTP nya selama kurun waktu 5 tahun terakhir juga menunjukkan tren capaian positif yang stabil. Berdasarkan gambar berikut maka terlihat bahwa capaian persentase laporan keuangan SKPD yang sesuai SAP dalam mendukung tercapainya WTP pada wilayah Irban III tahun 2017-2021 memiliki angka capaian yang stabil yaitu berada pada angka 100.



Gambar 2.101 Persentase laporan keuangan SKPD yang sesuai SAP dalam mendukung tercapainya WTP pada wilayah irban III

Sumber: Inspektorat Kabupaten Banyuwangi tahun 2022

Ket: *) Data Sementara

2.1.3.5. Urusan Pilihan

2.1.3.5.1. Kelautan dan Perikanan

Urusan kelautan dan perikanan merupakan urusan pilihan yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Banyuwangi, setiap urusan memiliki indikator program yang dapat merepresentasikan kinerja pemerintah kabupaten atau kota dalam melaksanakan urusan tersebut. Berikut capaian kinerja indikator program urusan kelautan dan perikanan di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2017 hingga tahun 2021:

Tabel 2.26 Indikator program urusan kelautan dan perikanan di Kabupaten Banyuwangi

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Produksi Perikanan	ton	68.353	103.082	110.231	39.611	72.291
2	Cakupan bina Kelompok Nelayan	kelompok	25	54	77	67	10
3	Produksi perikanan kelompok nelayan	ton	1629,3	1908,4	2187,4	2466,4	2745,4*

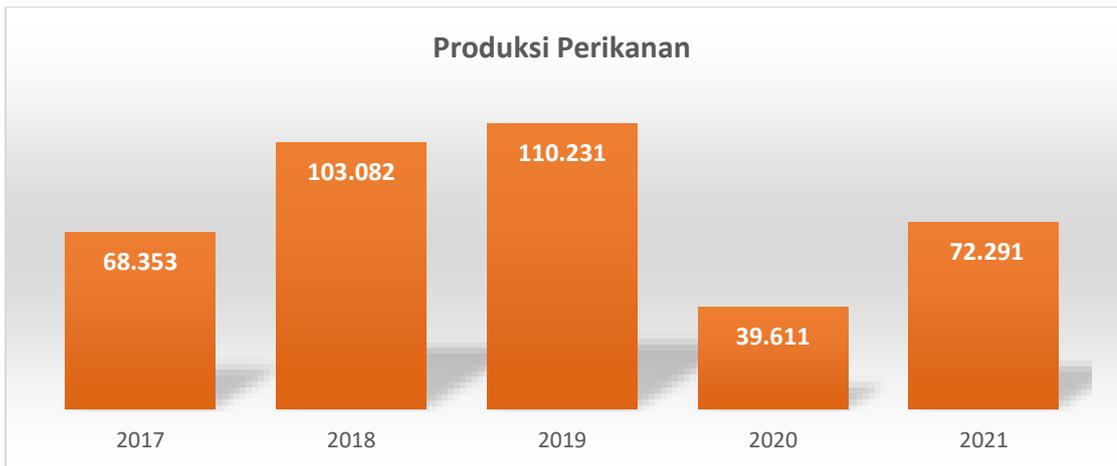
Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Banyuwangi, 2022

Ket: *) Data Sementara

Berdasarkan data diatas, indikator program kinerja pada urusan kelautan dan perikanan secara garis besar memiliki tren data meningkat sejak tahun 2017 hingga tahun 2021. Berikut gambar capaian pada beberapa indikator urusan kelautan dan perikanan di Kabupaten Banyuwangi:

2.1.3.5.1.1. Produksi Perikanan

Kabupaten Banyuwangi merupakan daerah yang berada di ujung Pulau Jawa. Letak wilayahnya tersebut menyebabkan Banyuwangi memiliki sebagian batas wilayah berupa laut. Sebagian besar masyarakat yang bertempat tinggal di pesisir pantai memiliki profesi pekerjaan sebagai nelayan, contohnya seperti daerah Muncar yang dikenal sebagai daerah penghasil ikan di daerah Banyuwangi. Pelabuhan Perikanan Pantai Muncar juga merupakan salah satu penghasil ikan terbesar di Jawa Timur, dan nomor dua Nasional. Komoditas utama yang dihasilkan nelayan Banyuwangi adalah ikan lemuru yang menjadi bahan baku ikan kalengan seperti sarden. Berikut merupakan gambar data produksi perikanan kelompok tani di Kabupaten Banyuwangi:



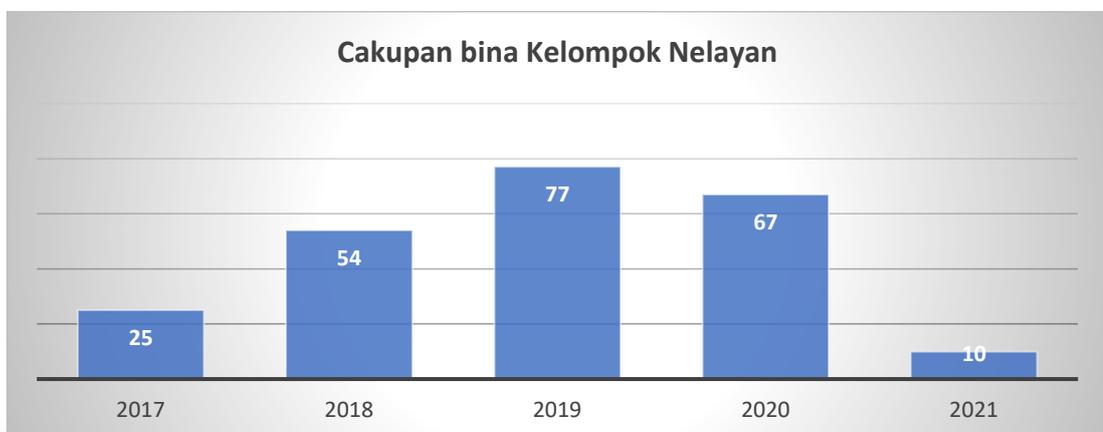
Gambar 2.102 Produksi perikanan di Kabupaten Banyuwangi

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Banyuwangi, 2022

Gambar yang menunjukkan data diatas menunjukkan bahwa produksi perikanan di Kabupaten Banyuwangi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir memiliki tren capaian meningkat dengan capaian tahun 2017 sebesar 68.353 Ton. Kemudian di tahun 2018 semakin melonjak mencapai angka 103.082 Ton dan di tahun 2019 mencapai 110.231 Ton. Namun, pada tahun 2020 produksi perikanan mengalami penurunan drastis menjadi 39,611 Ton. Capaian di tahun 2021 mengalami perbaikan dibandingkan dengan capaian di tahun 2020, yaitu mencapai 72.291 Ton.

2.1.3.5.1.2. Cakupan bina Kelompok Nelayan

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menyelenggarakan pembinaan kepada Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan dan Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) dengan harapan dapat meningkatkan kemandirian pelaku usaha perikanan. Berikut gambar angka capaian cakupan bina kelompok nelayan di Kabupaten Banyuwangi:



Gambar 2.103 Cakupan bina kelompok nelayan di Kabupaten Banyuwangi

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Banyuwangi 2022

Berdasarkan gambar diatas cakupan bina kelompok nelayan di Kabupaten Banyuwangi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir memiliki tren capaian fluktuatif. Di tahun 2017 jumlah cakupan bina kelompok nelayan sebanyak 25 kelompok dan terus meningkat menjadi 54 kelompok pada tahun 2018. Pada tahun 2019 angka capaian terus meningkat menjadi 77 kelompok. Namun di tahun 2020 cakupan bina nelayan menurun menjadi 67 kelompok dan di tahun 2021 menjadi sebanyak 10 cakupan.

2.1.3.5.1.3. Produksi perikanan kelompok nelayan

Sebagian besar pekerjaan masyarakat Kabupaten Banyuwangi adalah nelayan. Hal ini karena potensi wilayah yang sangat mendukung dan juga kondisi alam di wilayahnya. Setiap tahunnya jumlah produksi perikanan dari kelompok nelayan Kabupaten Banyuwangi berbeda, karena dapat dipengaruhi oleh cuaca atau kondisi alam di tahun tersebut. Berikut gambaran capaian produksi perikanan kelompok nelayan Kabupaten Banyuwangi selama 5 tahun terakhir:



Gambar 2.104 Produksi perikanan kelompok nelayan di Kabupaten Banyuwangi

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Banyuwangi 2022

Ket: *) Data Sementara

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui jika capaian produksi perikanan kelompok nelayan di Kabupaten Banyuwangi cenderung meningkat. Pada tahun 2017 tercapai sebanyak 1629,3 Ton ikan, kemudian meningkat menjadi 1908,4 Ton di tahun 2018. Angka tersebut kembali meningkat mencapai 2187,4 Ton pada tahun 2019, lalu semakin bertambah hingga 2466,4 di tahun 2020 dan di tahun 2021 meningkat kembali mencapai 2745,4 sesuai data sementara.

2.1.3.5.2. Pariwisata

Urusan pariwisata merupakan urusan pilihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, setiap urusan memiliki indikator program yang dapat merepresentasikan kinerja pemerintah kabupaten atau kota dalam melaksanakan urusan

tersebut. Berikut capaian kinerja indikator program urusan pariwisata di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2017 hingga tahun 2021:

Tabel 2.27 Indikator program urusan pariwisata di Kabupaten Banyuwangi

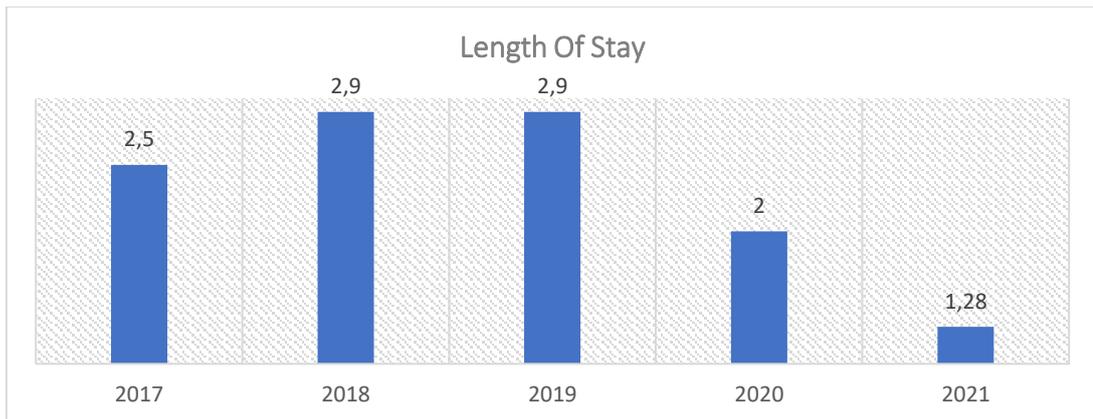
No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Length Of Stay	Hari	2,5	2,9	2,9	2	1,28
2	Jumlah wisatawan mancanegara		98.970	127.420	101.622	11.707	1.772
3	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara		4.832.999	4.939.934	5.307.054	440.145	430.906

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022

Berdasarkan data diatas, capaian indikator pada urusan pariwisata di Kabupaten Banyuwangi secara garis besar memiliki tren data meningkat sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Berikut beberapa gambar capaian indikator urusan pariwisata di Kabupaten Banyuwangi:

2.1.3.5.2.1. Length of Stay

Kabupaten Banyuwangi merupakan daerah yang sedang gencar melakukan pembangunan pada bidang pariwisata. Selain gencarnya pembangunan, kegiatan promosi pariwisata juga sedang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi. Saat ini Banyuwangi telah dikenal sebagai daerah yang kaya akan pariwisata alam yang wajib dikunjungi para wisatawan. Dengan banyaknya jumlah wisata yang kali ini dikenal wisatawan memiliki dampak positif terhadap lamanya wisatawan tinggal (*Length of Stay*) di Banyuwangi. Para wisatawan rata-rata membutuhkan waktu dua sampai tiga hari untuk tinggal di Banyuwangi dan menikmati pariwisata yang ada. Berikut data capaian *Length of Stay* di Kabupaten Banyuwangi:



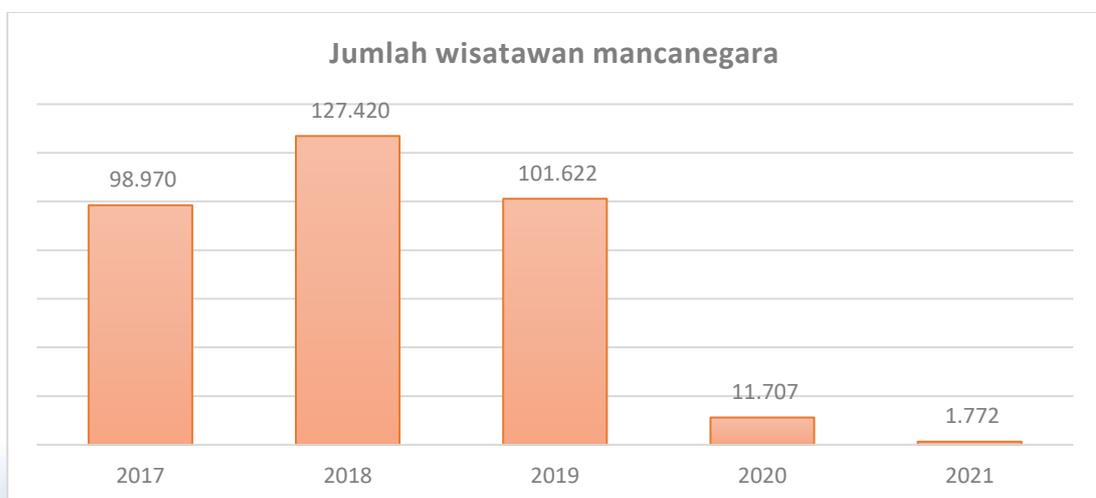
Gambar 2.105 Length of stay di Kabupaten Banyuwangi

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, 2022

Berdasarkan data diatas indikator *Length Of Stay* di Kabupaten Banyuwangi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir memiliki tren capaian stagnan. Di tahun 2017 capaian *length of stay* di Kabupaten Banyuwangi sebesar 2,5, lalu meningkat menjadi 2,9 di tahun 2018 dan tahun 2019. Namun di tahun 2020 hingga tahun 2021, capaian tersebut turun menjadi 2 hari di tahun 2020 dan 1,28 atau satu setengah hari di tahun 2021. Hal ini mengartikan bahwa rata-rata wisatawan yang berkunjung ke Banyuwangi akan *length of stay* selama 2 hari.

2.1.3.5.2.2. Jumlah wisatawan mancanegara

Destinasi wisata di Kabupaten Banyuwangi mengundang banyak pengunjung untuk menikmatinya. Tidak hanya para wisatawan dalam negeri atau nusantara, melainkan juga banyak yang berasal dari mancanegara. Selain gencarnya pembangunan, kegiatan promosi pariwisata juga sedang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi. Berikut capaian jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir:



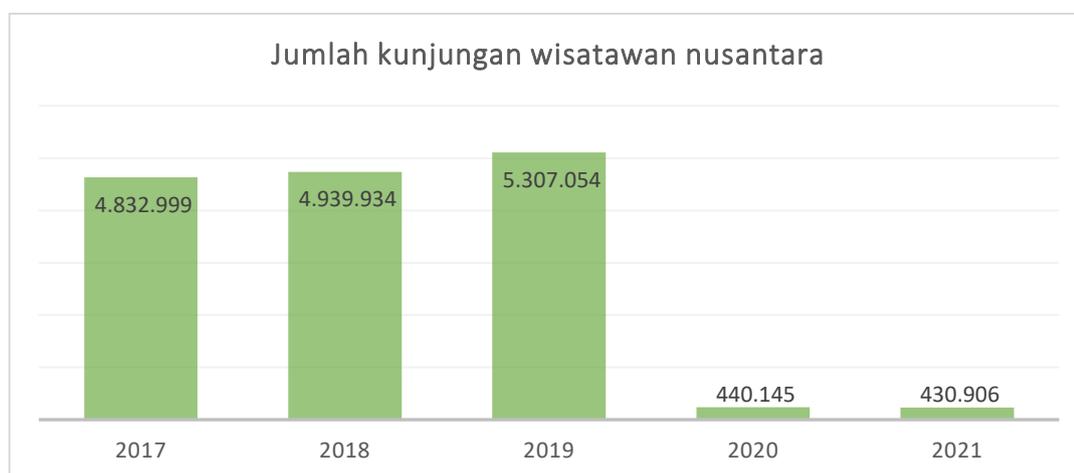
Gambar 2.106 Jumlah wisatawan mancanegara di Kabupaten Banyuwangi

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, 2022

Sesuai data diatas, jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi cenderung mengalami penurunan. Di tahun 2017 mencapai 98.970 wisatawan, lalu bertambah hingga 127.420 wisatawan pada tahun 2018. Namun mengalami penurunan di tahun 2019 menjadi 101.622, dan semakin turun menjadi 11.707 pada tahun 2020. Penurunan ini disebabkan oleh munculnya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia dan juga negara lainnya. Sehingga berdampak pada semakin menurunnya angka wisawatan. Di tahun 2021 didapatkan hasil capaian sebesar 1.772 wisatawan saja.

2.1.3.5.2.3. Jumlah kunjungan wisatawan nusantara

Selain banyak para wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi, juga terdapat banyak wisatawan nusantara sendiri yang berkunjung. Hal ini dapat dilihat dari grafik jumlah kunjungan wisatawan nusantara dalam 5 tahun terakhir:



Gambar 2.107 Jumlah kunjungan wisatawan nusantara di Kabupaten Banyuwangi

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, 2022

Grafik diatas menggambarkan jika jumlah kunjungan wisatawan nusantara di Kabupaten Banyuwangi selama 2 tahun terakhir dalam kondisi yang menurun. Di tahun 2017 mencapai 4.832.999 wisatawan, lalu bertambah hingga 4.939.934 wisatawan pada tahun 2018. Selanjutnya di tahun 2019 menjadi 5.307.054, dan mengalami penurunan tajam di tahun 2020 menjadi 440.145 wisatawan. Di tahun 2021 didapatkan hasil capaian sebesar 430.906 wisatawan. Yang mengartikan bahwa jumlah kunjungan wisawatan nusantara ke Kabupaten Banyuwangi selama masa pandemi Covid-19 mengalami penurunan tajam dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang tidak dilanda pandemi Covid-19.

2.1.3.5.3. Pertanian

Urusan pertanian merupakan urusan pilihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, setiap urusan memiliki indikator program yang dapat merepresentasikan kinerja pemerintah kabupaten atau kota dalam melaksanakan urusan tersebut. Berikut capaian kinerja indikator program urusan pertanian di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2017 hingga tahun 2021:

Tabel 2.28 indikator program urusan pertanian di Kabupaten Banyuwangi

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Pertumbuhan PDRB sektor pertanian	%	1,49	-0,73	-0,56	-2,96	1,71
2	Produksi daging	Ton	10.596,12	10.114,48	7.770,93	3.836,89	3.633,59
3	Produksi telur	Ton	12.351,10	12.200,89	12.843,48	7.422,77	14.077,06
4	Produksi susu	Ton	1673.5	1397.6	1392.8	769.8	156.4
5	Jumlah kelompok dan Usaha peternakan yang tumbuh	Kelompok	606	615	625	538	535,28*
6	Angka kejadian penyakit	%	3,9	4,22	2,8	3	4
7	Usaha produk hewan yang bersertifikasi PRA/NKV	Unit	4	5	6	7	1
8	Produktivitas padi atau bahan pangan	Kwintal/ Hektar	65,5	65,88	66,20	66,24	68,94

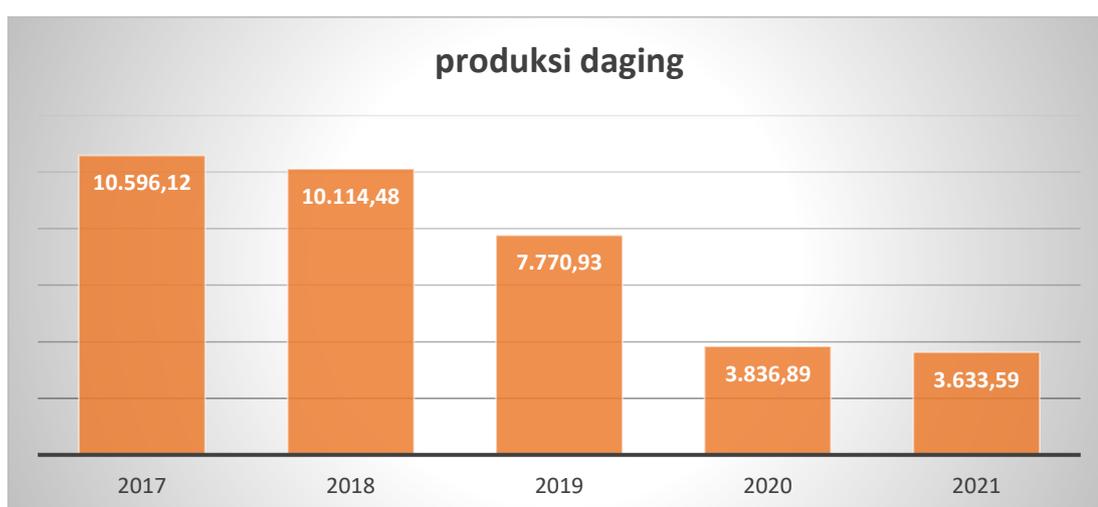
No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2017	2018	2019	2020	2021
	utama lainnya per Hektar						
9	Persentase peningkatan produksi tanaman hortikultura unggulan daerah	%	3,35	3,35	3,41	3,57	3,46*

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi, 2022
Ket: *) Data Sementara

Berdasarkan data diatas, capaian indikator urusan pertanian memiliki tren yang meningkat pada tahun 2017 hingga tahun 2021. Berikut beberapa gambar capaian indikator kinerja pada urusan pertanian di Kabupaten Banyuwangi:

2.1.3.5.3.1. Produksi daging

Produksi daging di Kabupaten Banyuwangi di dominasi oleh produksi daging ayam dan daging sapi. Sedangkan produksi daging terkecil adalah pada produksi daging kuda dan babi. Berikut data capaian produksi daging secara keseluruhan di Kabupaten Banyuwangi:



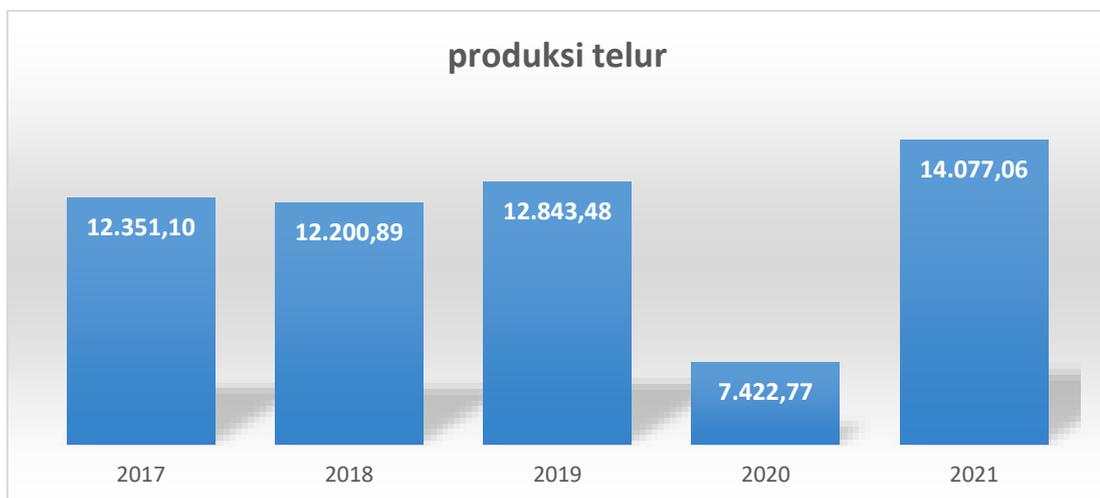
Gambar 2.108 Produksi daging di Kabupaten Banyuwangi

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi, 2022

Gambar diatas menunjukkan bahwa produksi daging di Kabupaten Banyuwangi memiliki tren capaian yang menurun. Tahun 2017 tercapai sebanyak 10.596,12 Ton, lalu turun menjadi 10.114,48 Ton di tahun 2018. Angka tersebut kembali turun menjadi 7.770,93 Ton pada tahun 2019, dan semakin turun menjadi 3.836,89 Ton pada tahun 2020 dan tahun 2021 semakin menurun hingga 3.633,59 Ton. Penurunan yang drastis di tahun 2020 hingga 2021 ini disebabkan karena adanya pandemi covid-19 yang melanda seluruh wilayah di Indonesia, salah satunya Banyuwangi.

2.1.3.5.3.2. Produksi Telur

Produksi telur di Kabupaten Banyuwangi didominasi oleh produksi telur burung puyuh dan telur ayam. Sedangkan produksi telur terkecil yaitu produksi telur dari itik. Berikut data capaian produksi telur secara keseluruhan di Kabupaten Banyuwangi:



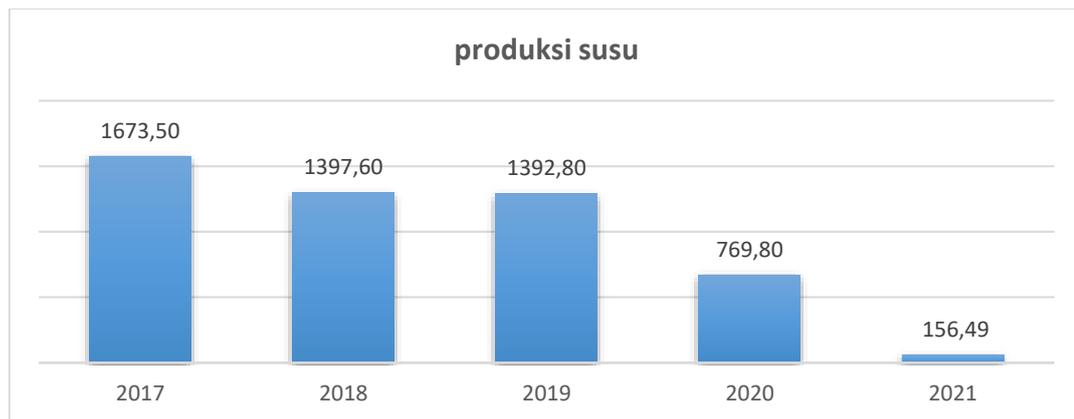
Gambar 2.109 Produksi telur di Kabupaten Banyuwangi

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi, 2022

Gambar diatas menunjukkan bahwa produksi telur di Kabupaten Banyuwangi memiliki tren capaian yang fluktuatif. Tahun 2017 tercapai sebanyak 12.351, 10 Ton produksi telur, lalu mengalami penurunan di tahun 2018 menjadi 12.200,89 Ton. Tahun 2019 kembali meningkat mencapai 12.843,48 Ton. Namun di tahun 2020 mengalami penurunan drastis mencapai 7.422,77 Ton. Lalu di tahun 2021 kembali melonjak hingga mencapai angka 14.077,06 Ton produksi telur di Kabupaten Banyuwangi.

2.1.3.5.3.3. Produksi Susu

Susu yang di produksi di Kabupaten Banyuwangi merupakan susu sapi perah rakyat. Secara garis besar jumlah produksi susu di Kabupaten Banyuwangi terus menurun jumlahnya pada setiap tahun. Secara rinci datanya tersaji pada gambar berikut:



Gambar 2.110 Produksi Susu di Kabupaten Banyuwangi

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi, 2022

Gambar diatas menunjukkan produksi susu di Kabupaten Banyuwangi dalam kurun waktu 5 tahun memiliki tren capaian menurun. Di tahun awal yaitu tahun 2017 tercapai sebanyak 1.673,50 Ton susu, lalu turun menjadi 1.397,60 Ton di tahun 2018. Angka tersebut semakin menurun di tahun 2019 menjadi 1.392,80 Ton, di tahun 2020 justru semakin turun drastis menjadi 769,80 Ton hingga di tahun 2021 mencapai 156,49 Ton susu.

2.1.3.5.3.4. Produktivitas padi atau bahan pangan utama lainnya per Hektar

Rata-rata produktivitas bahan pangan utama per hektar di Kabupaten Banyuwangi di dominasi oleh ubi kayu dan ubi jalar. Meskipun produksi dan luas panen tertinggi masih didominasi oleh padi. Sedangkan produktivitas/hektar terendah adalah kacang hijau. Secara lengkap data capaian produktivitas bahan pangan secara menyeluruh tersaji dalam gambar berikut:



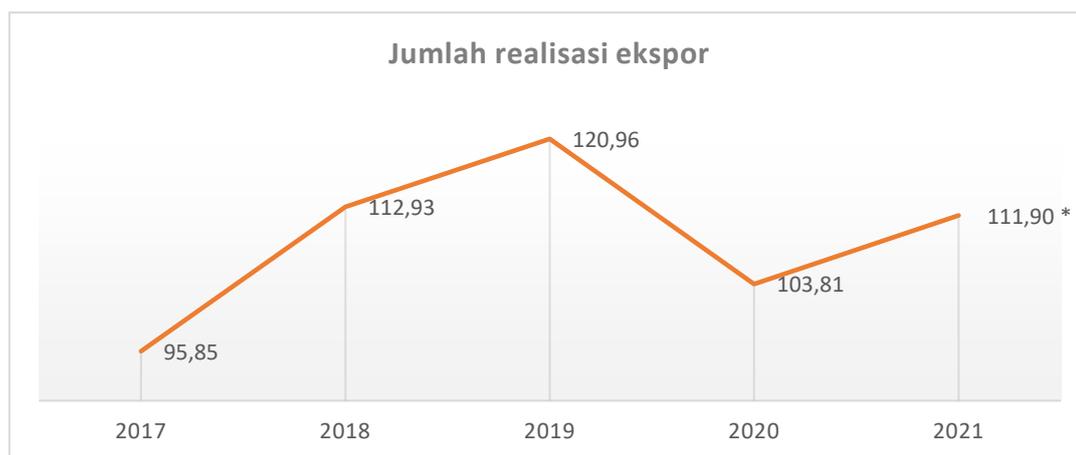
Gambar 2.111 Produktivitas padi atau bahan pangan utama lainnya per hektar di Kabupaten Banyuwangi

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022

Gambar diatas menunjukkan produktivitas padi atau bahan pangan utama lainnya per Hektar di Kabupaten Banyuwangi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir memiliki tren capaian meningkat. Pada tahun 2017 tercapai sebanyak 65,50 lalu meningkat menjadi 65,88 di tahun 2018. Tahun 2019 capaian ini kembali bertambah hingga 66,20 dan di tahun 2020 mencapai 66,24 hingga di tahun 2021 bertambah mencapai 68,94.

2.1.3.5.4. Perdagangan

2.1.3.5.4.1. Jumlah Realisasi Ekspor



Gambar 2.112 Jumlah realisasi ekspor di Kabupaten Banyuwangi

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022

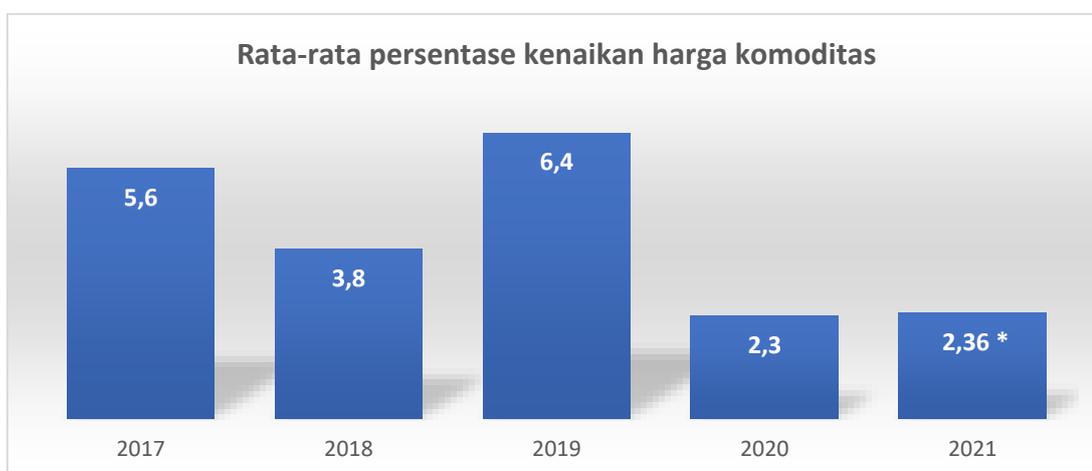
Ket: *) Data Sementara

Jumlah realisasi ekspor Kabupaten Banyuwangi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terlihat mengalami fluktuatif yang cenderung menurun. Di tahun 2017 capaian jumlah realisasi ekspor mencapai angka 95,85, kemudian meningkat hingga 112,93 pada tahun 2018 dan bertambah menjadi 120,96 di tahun 2019. Namun pada tahun 2020 capaian jumlah realisasi ekspor mengalami penurunan menjadi 103,81 dan di tahun 2021 sesuai data sementara mengalami peningkatan mencapai 111,90.

Beberapa komoditas yang berhasil di ekspor Kabupaten Banyuwangi meliputi beras organik, beberapa komoditas hortikultura seperti manggis, kopi, hingga komoditas perikanan. Kopi menjadi produk unggulan berkualitas ekspor yang di miliki Kabupaten Banyuwangi. Pada tahun 2019 Kabupaten Banyuwangi dapat mengekspor kopi robusta ke Italia, Jepang, dan Inggris sebesar 378 ton. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus melakukan pelatihan peningkatan kompetensi petani kopi, mulai dari pelatihan budidaya hingga pascapanen dengan harapan dapat meningkatkan kualitas barang dan meningkatkan ekspor kopi.

2.1.3.5.4.2. Rata-rata Persentase Kenaikan Harga Komoditas

Rata-rata persentase kenaikan harga komoditas Kabupaten Banyuwangi terlihat menunjukkan tren yang fluktuatif selama 5 tahun terakhir. Fluktuasi rata-rata persentase kenaikan harga komoditas terlihat berjalan selaras dengan laju inflasi Kabupaten Banyuwangi. Pada tahun 2017 rata-rata persentase kenaikan harga komoditas di Kabupaten Banyuwangi mencapai angka 5,6%. Namun mengalami penurunan di tahun 2018 menjadi 3,8%. Capaian tersebut kembali meningkat di tahun 2019 dengan mencapai angka 6,4%. Tahun berikutnya yaitu tahun 2020, capaian rata-rata persentase kenaikan harga komoditas ini mengalami penurunan kembali menjadi 2,3%, lalu di tahun 2021 sesuai data sementara mengalami sedikit peningkatan mencapai 2,36%.



Gambar 2.113 Rata-rata persentase kenaikan harga komoditas di Kabupaten Banyuwangi

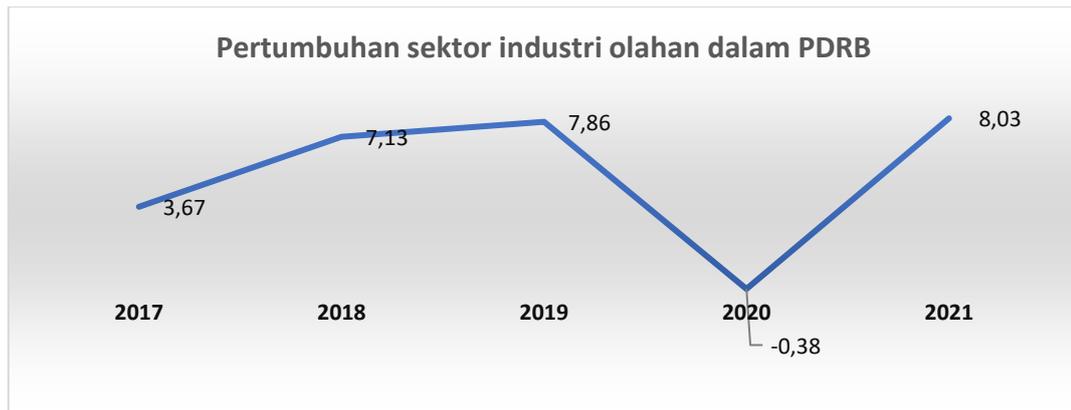
Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022

Ket: *) Data Sementara

2.1.3.5.5. Perindustrian

2.1.3.5.5.1. Pertumbuhan Sektor Industri Olahan dalam PDRB

Pertumbuhan Sektor Industri Olahan dalam PDRB Kabupaten Banyuwangi dalam kurun waktu 5 tahun menunjukkan tren yang positif. Pada tahun 2017 angka Pertumbuhan Sektor Industri Olahan dalam PDRB berada di angka capaian 3,67. Kemudian Pertumbuhan Sektor Industri Olahan dalam PDRB Kabupaten Banyuwangi perlahan meningkat menjadi 7,13 pada tahun 2018 dan angka tersebut terus meningkat pada tahun 2019 menjadi 7,86. Selanjutnya di tahun 2020, capaian mengalami penurunan drastis hingga mencapai minus (-) 0,38, hal ini dikarenakan kondisi perindustrian yang terkena dampak dari Covid-19. Kemudian di tahun 2021 meningkat mencapai 8,03 yang artinya telah mengalami perbaikan kembali.



Gambar 2.114 Pertumbuhan sektor industri olahan dalam PDRB di Kabupaten Banyuwangi

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian Kabupaten Banyuwangi 2022

2.1.3.5.5.2. Persentase Peningkatan Nilai Penjualan (Omset) IKM

Persentase Peningkatan Nilai Penjualan (Omset) IKM Kabupaten Banyuwangi dalam kurun waktu 5 tahun menunjukkan data yang sangat fluktuatif. Pada tahun 2017 persentase peningkatan nilai penjualan (omset) IKM di Kabupaten Banyuwangi berada di angka 6,70. Namun di tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 1,67 dan kembali meningkat mencapai 6,70 pada tahun 2018. Tahun 2019 capaian Persentase Peningkatan Nilai Penjualan (Omset) IKM kembali mengalami penurunan yang sangat drastis, yaitu mencapai -11,53. Hal ini disebabkan karena adanya pandemi covid-19 yang mempengaruhi aspek kehidupan masyarakat, salah satunya dalam hal nilai penjualan (omset) IKM. Kemudian pada tahun 2021 sesuai data sementara menunjukkan bahwa persentase peningkatan nilai penjualan (omset) IKM kembali meningkat hingga mencapai angka 8,03.



Gambar 2.115 Persentase peningkatan nilai penjualan (Omset) IKM di Kabupaten Banyuwangi

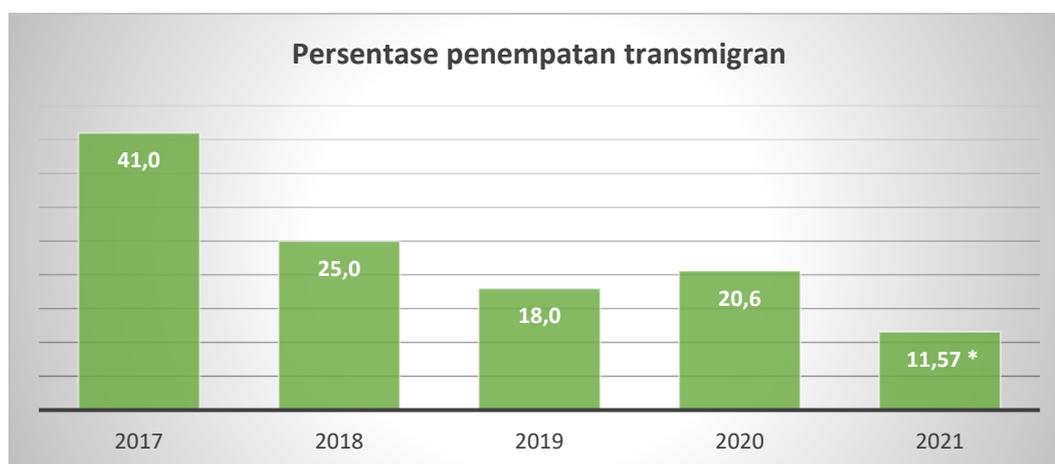
Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian Kabupaten Banyuwangi 2022

Ket: *) Data Sementara

2.1.3.5.6. Transmigrasi

2.1.3.5.6.1. Persentase Penempatan Transmigran

Program transmigrasi yang di berikan pemerintah mendapatkan respons baik dari masyarakat Banyuwangi. Tidak sedikit masyarakat Banyuwangi berminat untuk menjadi transmigran ke kabupaten lain, khususnya di daerah luar Pulau Jawa. Pemerintah daerah mendukung minat masyarakat menjadi transmigran dengan memberikan pembinaan dan pelatihan sehingga nantinya para calon transmigran bisa lebih terampil dan bertahan. Respons yang diberikan pihak penerima transmigran asal Banyuwangi juga cukup bagus, transmigran asal Banyuwangi dinilai berhasil dan diminati oleh beberapa daerah penerima. Sehingga transmigran asal Banyuwangi tidak ada yang kembali ke Banyuwangi setelah diberangkatkan. Akan tetapi kuota transmigran yang diterima Kabupaten Banyuwangi tidak selalu sesuai dengan jumlah KK yang mendaftarkan diri. Berikut data persentase penempatan transmigran di Kabupaten Banyuwangi:



Gambar 2.116 Persentase penempatan transmigran di Kabupaten Banyuwangi

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi 2022

Ket: *) Data Sementara

Persentase penempatan transmigran di Kabupaten Banyuwangi dalam kurun waktu 5 tahun memiliki tren capaian yang fluktuatif dan cenderung menurun. Persentase penempatan transmigran terlihat cukup tinggi pada tahun 2017 yaitu mencapai 41%. Akan tetapi pada tahun 2018 kembali mengalami penurunan hingga menjadi 25% dan angka tersebut terus menurun hingga pada tahun 2019 menjadi 18%. Pada tahun 2020 persentase penempatan transmigran kembali meningkat dengan angka capaian menjadi 20,6%, namun di tahun 2021 menurun kembali menjadi 11,57%.

2.1.3.6. Urusan Pemerintahan Umum

2.1.3.6.1. Persentase Masyarakat yang Menggunakan Hak Politiknya

Semakin banyak angka golput dan kurangnya minat masyarakat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilihan baik nasional ataupun regional, menurunnya partisipasi

masyarakat dalam pemilihan akan berimbang pada kualitas demokrasi. Hal ini tidak sebanding dengan hasil pemilihan yang memberikan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap seluruh elemen masyarakat melalui peraturan berikut kebijakan yang nantinya akan dikeluarkan sebagai wujud pelaksanaan visi dan misi calon yang sudah terpilih. Sikap acuh terhadap pesta demokrasi ini, juga tak sebanding dengan harapan yang tinggi masyarakat terhadap kemajuan pembangunan dimasa mendatang. Berdasarkan data yang terdapat dalam tabel, diketahui jika capaian persentase masyarakat yang menggunakan hak politiknya berada di angka 63% kemudian dalam tahun 2018 persentase masyarakat yang menggunakan hak politiknya mencapai angka 65%. Sedangkan pada tahun berikutnya mengalami peningkatan hingga 70% yang artinya bahwa pada tahun 2019 masyarakat mulai sadar akan partisipasi mereka dalam kegiatan politik. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 65% kembali, hal tersebut seiring dengan adanya pandemic covid-19 yang mengharuskan untuk menjaga protocol Kesehatan. Begitu juga dengan tahun 2021, karena pandemi covid-19 belum selesai, capaian hanya sedikit mengalami peningkatan menjadi 67%.

Tabel 2.29: Persentase Masyarakat Menggunakan Hak Politiknya

No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Persentase Masyarakat yang Menggunakan Hak Politiknya	63%	65%	70%	65%	67%*

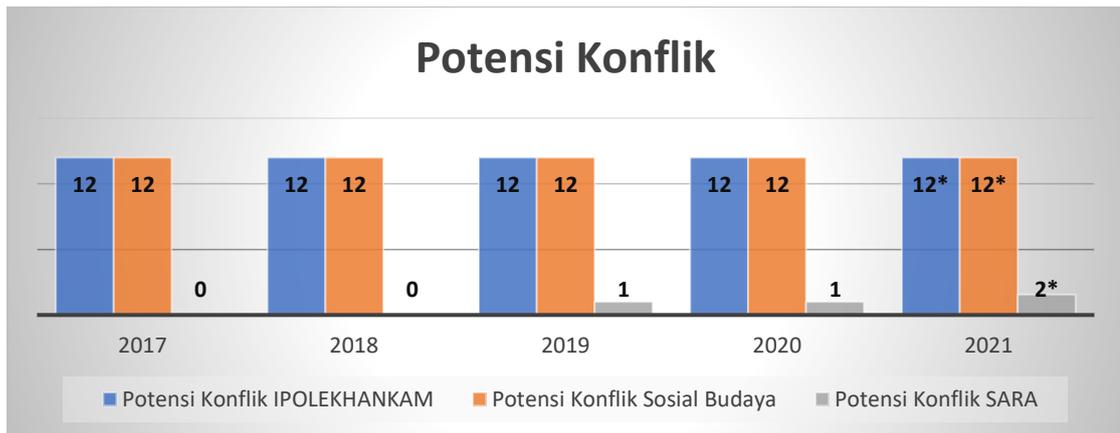
Sumber: Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi, 2022

Ket: *) Data Sementara

2.1.3.6.2. Potensi Konflik

Posisi strategis Banyuwangi berada di ujung timur Pulau Jawa berbatasan dengan Pulau Bali merupakan jalur utama lintas nasional yang menghubungkan wilayah Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur. Kondisi Sosio kultural di Banyuwangi terdiri dari beraneka ragam suku adat dan kebudayaan yang turut membawa potensi terjadinya konflik horizontal di masyarakat.

Tren selama lima tahun terakhir sejak Tahun 2017 hingga 2021, menunjukkan bahwa angka potensi konflik IPOLEKHANKAM dan konflik Sosial budaya berada pada posisi stagnan yakni sebanyak 12 kasus yang terjadi setiap tahunnya. Sedangkan selama lima tahun terakhir untuk angka potensi konflik sara mengalami kenaikan, khususnya di tiga tahun terakhir yaitu pada Tahun 2019 hingga tahun 2020 terjadi satu konflik tiap tahunnya. Pada tahun 2021, konflik SARA di Kabupaten Banyuwangi mengalami kenaikan menjadi 2 konflik. Fakta ini menjadi catatan bagi pemerintah daerah bersama stakeholder terkait untuk mewujudkan stabilitas Banyuwangi baik dari segi sosial, ekonomi maupun ketertiban masyarakat, dimana hal tersebut menjadi modal utama bagi masyarakat diluar Banyuwangi untuk mau berkunjung bahkan berinvestasi di Banyuwangi.



Gambar 2.117: Potensi Konflik Kabupaten Banyuwangi

Sumber: Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi, 2022

Ket: *) Data Sementara

Untuk menjaga stabilitas dimaksud, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berkolaborasi dengan stakeholder terkait secara intensif perlu melaksanakan program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan melalui wadah Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) dengan sasaran generasi muda. Selain itu pengawasan terhadap organisasi masyarakat dan peningkatan kewaspadaan nasional dan deteksi dini penanganan konflik sosial juga harus dilaksanakan secara komprehensif melalui wadah Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA). Melalui program dan kegiatan tersebut diharapkan mampu mewujudkan Kabupaten Banyuwangi yang semakin maju, sejahtera dan berkah.

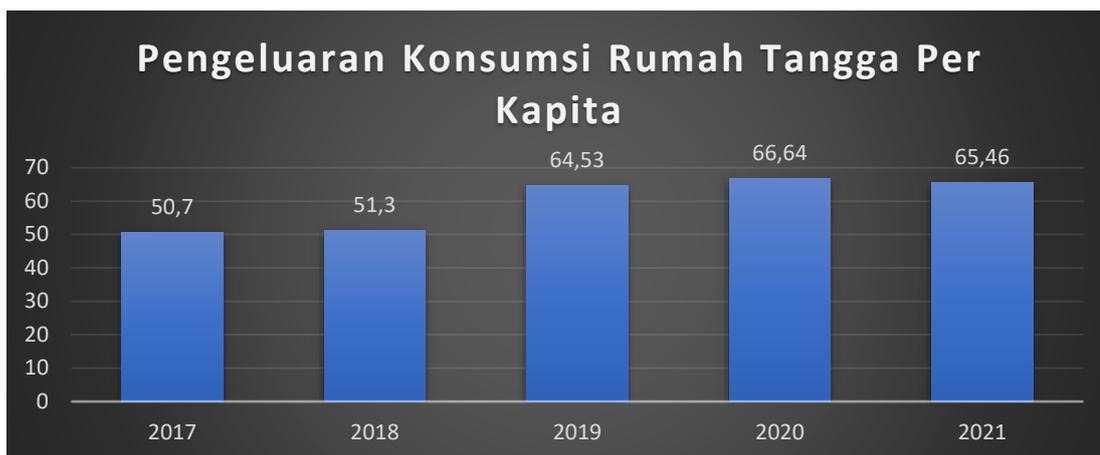
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1. Kemampuan Ekonomi

2.1.4.1.1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

2.1.4.1.1.1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita di Kabupaten Banyuwangi dalam kurun waktu 5 tahun memiliki tren capaian yang fluktuatif dengan capaian tahun 2017 menjadi 50,7. Pada tahun 2018 pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita terlihat Kembali meningkat hingga menjadi 51,3. Kemudian pada tahun 2019 meningkat kembali menjadi 64,53. Pada tahun 2020 tetap meningkat menjadi 66,64, namun pada tahun 2021 mengalami sedikit penurunan menjadi sebesar 65,46.

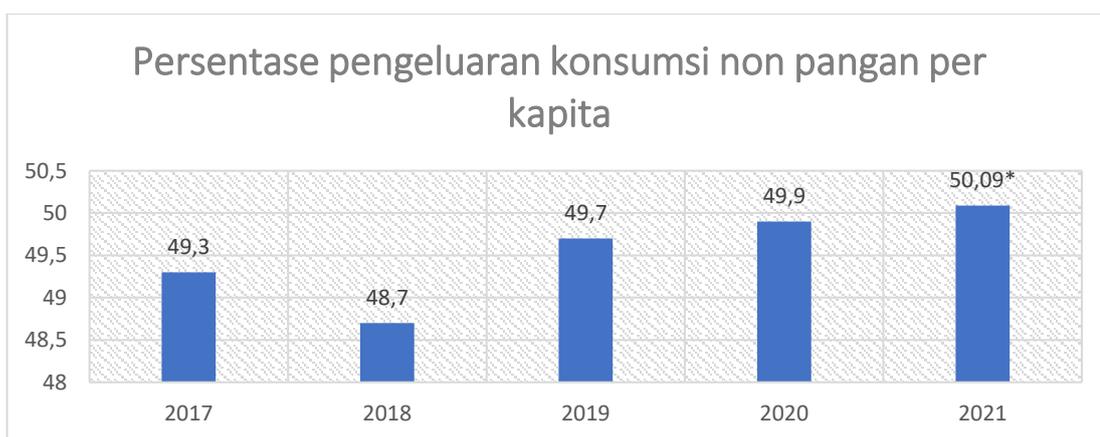


Gambar 2.118 Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita di Kabupaten Banyuwangi

Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi, 2022

2.1.4.1.1.2. Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita

Persentase pengeluaran konsumsi non pangan per kapita di Kabupaten Banyuwangi dalam kurun waktu 5 tahun juga memiliki tren capaian yang fluktuatif dengan capaian tahun 2017 persentase pengeluaran konsumsi non pangan per kapita menunjukkan capaian sebesar 49,3 dan angka capaian kembali menurun pada tahun 2018 menjadi 48,7. Persentase pengeluaran konsumsi non pangan per kapita terlihat kembali meningkat hingga menjadi 49,7 pada tahun 2019. Pada tahun 2020 meningkat dengan capaian sebesar 49,9 dan diproyeksikan akan kembali meningkat menjadi 50,09 pada tahun 2021.



Gambar 2.119 Persentase pengeluaran konsumsi non pangan per kapita di Kabupaten Banyuwangi

Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi, 2022

Ket: *) Data Sementara

2.1.4.2. Iklim Investasi

2.1.4.2.1. Incremental Capital Output Ratio (ICOR)

Incremental Capital Output Ratio (ICOR) adalah sebuah parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (output), dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran), sebagai contoh, misalnya besarnya investasi pada satu tahun di negara A adalah sebesar Rp 300 miliar, sedangkan tambahan output yang diperoleh dari hasil penanaman investasi itu adalah Rp 60 miliar, maka nilai ICOR negara A adalah sebesar 5 ($300\text{miliar}/60\text{ miliar}$). Angka ini menunjukkan bahwa untuk menaikkan 1 unit output diperlukan investasi sebesar 5 unit. Kabupaten Banyuwangi memiliki tren nilai yang meningkat dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Pada tahun 2017 ICOR memiliki capaian 6,1. Berbeda dengan sebelumnya, pada tahun 2018 ICOR mengalami penurunan menjadi 5,77 dan Kembali meningkat menjadi 6,17 di tahun 2019. Pada tahun 2020 ICOR Kabupaten Banyuwangi memiliki capaian yang cukup drastis yakni mencapai 8,45 dan diproyeksikan akan terus meningkat hingga tahun 2021 hingga mencapai angka 8,83 yang merupakan capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir. Berdasarkan nilai tersebut dapat dilihat bahwa tingkat efisiensi investasi di Kabupaten Banyuwangi cenderung kurang efisien, mengingat nilai modal yang dibutuhkan semakin besar. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai ICOR yang semakin besar jika dilihat dari perbandingan antara tahun 2017 dengan tahun 2020 atau tahun 2019 sekalipun (sebelum adanya pandemi COVID-19).



Gambar 2.120: ICOR Kabupaten Banyuwangi tahun 2017-2021

Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi 2022

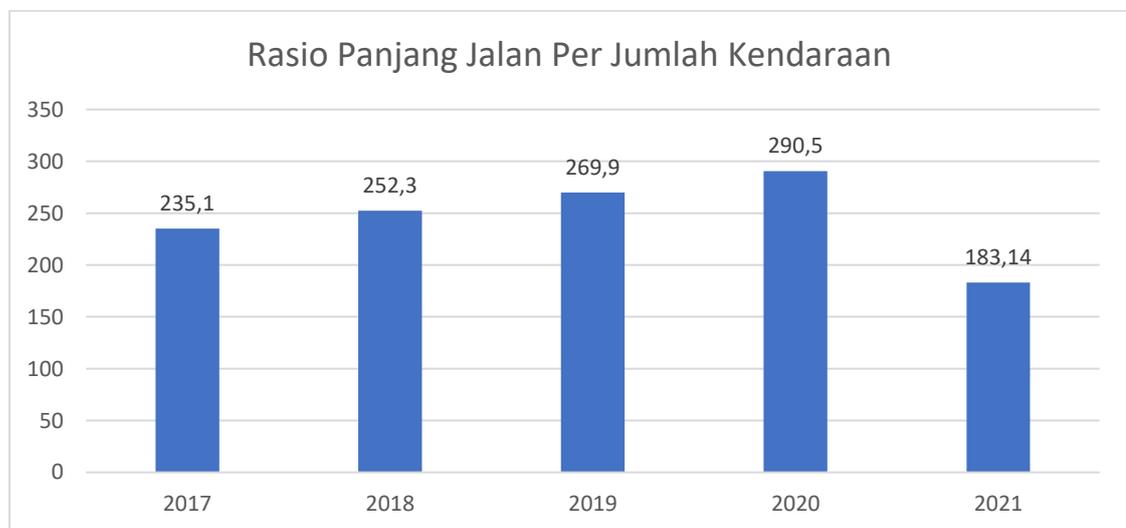
Ket: *) Data Sementara

2.1.4.3. Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur

2.1.4.3.1. Perhubungan

2.1.4.3.1.1. Rasio Panjang jalan per jumlah kendaraan

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kabupaten Banyuwangi dalam kurun waktu 5 tahun memiliki tren capaian meningkat dengan capaian tahun 2017 sebesar 235,1. Peningkatan rasio Panjang jalan masih menunjukkan peningkatan capaian pada tahun 2018 yaitu sebesar 252,3 dan masih meningkat kembali pada tahun 2019 hingga menjadi 269,9. Dengan tren data yang terus meningkat tersebut maka pada tahun 2020 capaian pada rasio panjang jalan per jumlah kendaraan tetap meningkat dengan angka menyentuh 290,5. Pada tahun 2021 mengalami penurunan cukup signifikan menjadi sebesar 183,14.



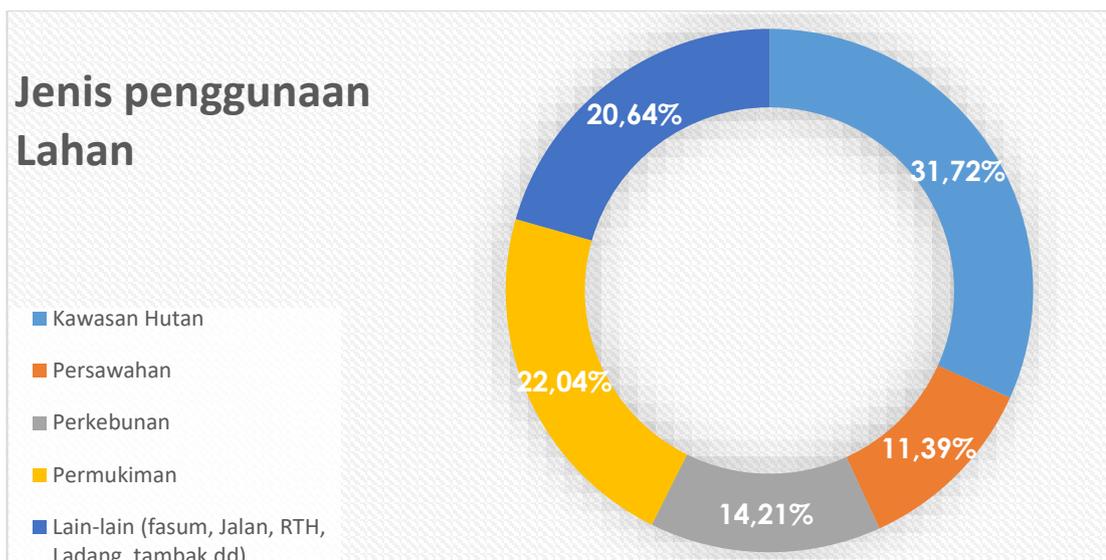
Gambar 2.121 Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kabupaten Banyuwangi

Sumber: Data Diolah Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banyuwangi, 2022

2.1.4.3.2. Penataan Ruang

2.1.4.3.2.1. Luas wilayah produktif

Luas wilayah produktif di Kabupaten Banyuwangi dapat dilihat dari proporsi penggunaan lahan. Kabupaten Banyuwangi mempunyai luas wilayah 578.250 Ha, dari luas tersebut penggunaan lahan di Kabupaten Banyuwangi masih didominasi lahan tidak terbangun berupa hutan, sawah dan lain sebagainya. Profil tersebut menunjukkan bahwa lahan produktif memiliki proporsi yang masih cukup besar mencapai 25% dari keseluruhan lahan yang ada.



Gambar 2.122 Jenis penggunaan lahan di Kabupaten Banyuwangi

Sumber: Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022

Nilai tersebut diperoleh dengan menjumlahkan lahan yang dipergunakan untuk persawahan dan perkebunan. Dengan proporsi masing-masing sebesar 11% dan 14%. Berikut merupakan detail proporsi penggunaan lahan di Kabupaten Banyuwangi.

Tabel 2.30 Jenis penggunaan lahan di Kabupaten Banyuwangi

No	Jenis penggunaan Lahan	Luas	
		Ha	%
1	Kawasan Hutan	183.396,34	31,72%
2	Persawahan	66.152	11,39%
3	Perkebunan	82.143,63	14,21%
4	Permukiman	127.454,22	22,04%
5	Lain-lain (fasum, Jalan, RTH, Ladang, tambak,dd)	119.103,81	20,64%
Jumlah		578.250	100%

Sumber: Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022

Tabel 2.31: Realisasi indikator kinerja tahun 2016-2021

Indikator	Capaian kinerja						Standar/ Target	Interpr etasi :
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Aspek Kesejahteraan Sosial								
Angka Melek Huruf	99.14%	99.23%	99.31%	99.02%	99.10%	99.30%		
Angka usia harapan hidup	70.1	70.2	70.3	70.5	70.7	70.72		
Aspek Pelayanan Umum								
Pelayanan Urusan Wajib								
Urusan Pendidikan								
Total Persentase Guru Tersertifikasi Pendidik	47.06	45.01	46.8	54.62	57.6	55.16		
Total Persentase Guru Tersertifikasi Pendidik TK	35.44	32.62	40.08	40.37	42.47	66.68		
Total Persentase Guru Tersertifikasi Pendidik SD/MI	48.73	45.85	45.92	58.03	62.01	45.69		
Total Persentase Guru Tersertifikasi Pendidik SMP/MTS	54.09	52.54	53.75	58.27	59.8	53.13		
Kesehatan								
Jumlah Puskesmas	45	45	45	45	45	45		
Jumlah tenaga kesehatan	2278	2278	3574	3628	3479.1	4658		
Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan	0.14	0.14	0.22	0.22	0.24			
Proporsi peserta jaminan Kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan	2808	3724	3682	3640	3493			
Jumlah penduduk yang terdaftar jaminan kesehatan (BPJS)	789116	823819	195667	940499	643774.5			
Pekerjaan umum dan Penataan Ruang								
KABR: kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau	18,243,5 76.00	17,234,4 24.00	17,265,9 60.00	18,101,6 64.00	17,426,78 9.60			
Peningkatan Jumlah Bangunan Pelayanan Publik Berfungsi Baik	64	65	28	40	106			
Perkotaan	71.29	71.42	73.27	93.32	93.32*			

Indikator	Capaian kinerja						Standar/ Target	Interpr etasi :
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Perdesaan	55.65	57.29	59.78	78.61	78.61*			
Persentase Panjang Jaringan Irigasi yang Rusak yang Diperbaiki	60	60	61	62	92			
Persentase Ketersediaan air baku	80	82	84	88	92			
Luas cakupan Air bersih	75	80	81	82	83			
Persentase ketersediaan air pada musim hujan dan musim kemarau (degradasi DAS)	60	65	70	75	80			
Jumlah Ketersediaan Database Sumberdaya Air	45	50	55	60	65			
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Air	50	60	70	75	80			
Persentase Daerah bebas bencana akibat daya rusak air	85	90	91	92	93			
Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dengan kecepatan > 20 km	98.30	92.20	97.67	97.69	74.45			
KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
Jumlah korban meninggal akibat bencana	14	21	5	1	8	25		
persentase penanganan darurat bencana	96.56	96.56	99	99	99*	85		
persentase pemulihan dampak bencana	98.17	98.17	98.13	98.13	98.13*	70		
SOSIAL								
Indeks gotong royong	0.55	0.63	0.63	0.69	0.74	n/a		

Indikator	Capaian kinerja						Standar/ Target	Interpr etasi :
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TENAGA KERJA								
Persentase tenaga kerja formal	11.421	11.032	10.347	10.347	9.249			
Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	44	33	33	33	27.5	31.68		
Persentase Kelompok Usaha Perempuan Mandiri	52	52	52	66.7	67.6			
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	86.01	86.2	86.44	86.81	86.66	86.96		
PANGAN								
Persentase keamanan pangan $\geq 80\%$	80	80	80	90	88			
PERTANAHAN								
Banyaknya sertifikat tanah yang dikeluarkan	25330	44091	73659	85097	40209			
administrasi kependudukan dan catatan sipil								
Jumlah inovasi pelayanan kependudukan yang dikembangkan	0	1	1	1	2*	2		
Jumlah desa tertinggal.	1	0	0	0	0	0		
Indeks Ketahanan Ekonomi	0.74	0.76	0.72	0.75	0.79	0.77		
Indeks Ketahanan Lingkungan	0.79	0.8	0.77	0.8	0.82	0.84		
Indeks ketahanan Sosial	0.79	0.8	0.82	0.86	0.87	0.87		
Persentase Remaja yang Bermasalah dengan Seks Bebas Napza Termasuk HIV/AIDS	0.03	0.27	0.23	0.28	0.35			
Persentase peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR Mandiri			72	90	90*			
Perhubungan								
Jumlah dermaga penyeberangan.	3	3	3	3	3	3		
Jumlah pelabuhan strategis.	2	2	2	2	2	2		

Indikator	Capaian kinerja						Standar/ Target	Interpr etasi :
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Persentase peningkatan aksesibilitas transportasi laut	12.1	13.08	14.2	15.2	15.9			
Persentase Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	82	84	86	88	90			
Persentase potensi local kemacetan dan kepadatan lalu lintas angkutan jalan	75	77.5	80	82.5	85			
Persentase peningkatan sarana prasarana transportasi Darat	64.1	67.8	71.5	79	82.1			
Indeks angka kecelakaan transportasi darat	43.3	40.8	37.6	35	32.3			
Kualitas prasarana dan fasilitas transportasi Darat komunikasi dan informasi	100	100	100	100	100	100		
Persentase aplikasi IT yang mendukung city branding dan layanan publik yang berfungsi baik	50	50	55	60	62.5	100		
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah								
Persentase pertumbuhan jumlah anggota koperasi	2.8	3.7	0.5	0.7	0,0*			
Persentase koperasi sehat	24.5	34.2	34.9	35.2	16,0*	36.12		
Persentase wirausaha mikro baru yang tumbuh	0.25	0.3	0.35	0.45	0.5			
Rasio Pemerataan Unit Usaha Mikro Kecil dan Menengah	22.2	20.5	21	21.5	22			
Penanaman Modal								
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Data dan Informasi Penanaman Modal	83	83	86	91	92.5			
Kepemudaan dan Olahraga								
Jumlah Atlet Berprestasi	220	588	135	913	712			
Jumlah Insan Olahraga Yang Berprestasi	0	14	60	70	72			
Jumlah Even	9	10	9	11	1			

Indikator	Capaian kinerja						Standar/ Target	Interpr etasi :
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jumlah Pemuda Pelopor Meningkatkan	17	9	14	0	0	0		
Persentase Organisasi Pemuda Yang Memenuhi Ketentuan	72	40	80	12	16			
Persentase Sarana Dan Prasarana Yang Memenuhi Standar	136	80	100	60	80			
Persandian								
Persentase Pengamanan Informasi Daerah Yang Terselenggara Baik	100	100	100	100	100	100		
Kearsipan								
Persentase Sarpras Kearsipan Dalam Kondisi Baik	80	87	89	89	93			
Pendapatan Asli Daerah	367,87	388,94	450,06	495,69	482,74	505.89		
Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan								
Persentase Pelaksanaan Ujian Dinas dan Seleksi Kompetensi Jabatan	100	100	50	33	8.3			
Sekretariat DPRD								
Proporsi Kursi yang diduduki Perempuan di Parlemen Tingkat Pusat, Parlemen Daerah dan Pemerintah Daerah	0.22	0.22	0.24	0.26	0.26	0.26		
Sekretariatan								
Indeks Kepuasan Masyarakat	75	75	78	79.5	87.03			
Nilai SAKIP	80.13	81.26	82.17	83.23	84.25*			
Persentase Penggunaan E-procurement terhadap Belanja Pengadaan.	21.3	21.3	19.1	42	37.5			
Persentase Laporan Keuangan SKPD yang Sesuai SAP dalam Mendukung Tercapainya WTP pada Wilayah Irban I	100	100	100	100	100			

Indikator	Capaian kinerja						Standar/ Target	Interpr etasi :
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Persentase Rekomendasi Temuan yang Selesai ditindaklanjuti: Keuangan Negara/Daerah dan Administrasi pada Wilayah Irbn I	55	55	40	65	80			
Persentase Hasil Evaluasi SAKIP dengan Nilai Minimal A pada wilayah Irbn I	50	50	56	80	80			
Persentase Laporan Keuangan SKPD yang Sesuai SAP dalam Mendukung Tercapainya WTP pada Wilayah Irbn II	100	100	100	100	100			
Persentase Rekomendasi Temuan yang Selesai ditindaklanjuti: Keuangan Negara/Daerah dan Administrasi pada Wilayah Irbn II	55	55	40	75	100			
Persentase Hasil Evaluasi SAKIP dengan Nilai Minimal A pada Wilayah Irbn II	50	50	56	80	80			
Persentase Laporan Keuangan SKPD yang Sesuai SAP dalam Mendukung Tercapainya WTP pada Wilayah Irbn III	100	100	100	100	100			
Pelayanan urusan pilihan								
Kelautan dan Perikanan								
Konsumsi Ikan	30.2	30.3	31.1	33.1	32			
Pariwisata								
Prosentase Kunjungan Wisatawan	107.9	150.1	155.5	174.2	3			
Pertanian								
Pertumbuhan Sektor Pertanian Terhadap PDRB	2.81	1.49	-0.73	-0.56	-2.96	1.71		
Angka kematian ternak	0.46	0.42	0.3	0.3	0,22*			

Indikator	Capaian kinerja						Standar/ Target	Interpr etasi :
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Persentase sarana dan Prasarana tanaman pangan yang dimanfaatkan	100	100	100	100	100			
Jumlah sertifikasi produk tanaman pangan	1	2	2	4	2			
Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan unggulan daerah	3.33	3.35	3.35	3.41	3.57			
Jumlah sertifikasi produk perkebunan dan hortikultura	4	4	3	5	2			
Persentase peningkatan produksi tembakau	3.14	3.25	3.25	3.41	3.57			
Jumlah sertifikasi tembakau	0	0	0	0	0	0		
Perdagangan								
Presentasi Tertib Niaga Barang Kena Cukai	2.2	5.6	3.8	6.4	2.3			
Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Tertib Niaga	8.4	8.4	11.3	11.3	19.6			
Perindustrian								
Persentase cakupan pengembangan sentra industri	50	53.7	57.9	53.7	98.8			
Rasio ketimpangan pendapatan IKM wilayah kecamatan	16	15	15.2	15	18			
Persentase peningkatan sertifikasi standardisasi dan HKI	50	27.4	27	39.1	25			
Pertumbuhan Industri	19253	19428	19446	18130	18992.5			
Persentase peningkatan jumlah IKM yang bermitra dalam klaster	17.1	17.1	17.1	22	30			

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun berjalan dan Realisasi RPJMD

Pada sub bab ini dijelaskan hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan. Evaluasi detail pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai tahun berjalan disajikan dalam lampiran

2.3. Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah

2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah

Sebagaimana telah diuraikan pada sub bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa isu yang cukup relevan untuk menjadi perhatian bagi pembangunan di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022. Beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi berdasarkan prioritas dan sasaran pembangunan daerah setidaknya adalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya akses Pendidikan menengah sebagai kelanjutan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
2. Masih adanya murid putus sekolah
3. Adanya kasus Balita Stunting di Masyarakat
4. Tingkat kesejahteraan dari sudut pandang pembangunan masyarakat semakin meningkat
5. Persentase PMKS di Banyuwangi masih cukup tinggi
6. Belum optimalnya penyerapan tenaga kerja
7. Gap pembangunan manusia dari sisi keseimbangan gender masih cukup jauh tertinggal jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur
8. Rendahnya kualitas SDM pengelola koperasi.
9. Masih belum pulihnya sektor pariwisata akibat pandemi Covid-19
10. #Aktivitas ekonomi pada sektor pertanian sudah mulai pulih

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Selain berdasarkan permasalahan berdasarkan prioritas pembangunan daerah, identifikasi permasalahan juga dilakukan berdasarkan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Diantara permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.32: Isu Pembangunan menurut urusan pembangunan

Urusan	Isu
Pendidikan	#Masih belum optimalnya sarana prasarana pendidikan, khususnya pada jenjang menengah
Kesehatan	#Tingkat kecukupan gizi bagi balita masih belum merata
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	# Ketersediaan RTH semakin meningkat
	# Masih ada rumah tangga yang belum mendapatkan akses sanitasi yang layak
	# Belum semua rumah tangga mendapat akses terhadap air minum layak
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	#Terdapat tren penurunan cakupan layanan sistem pengelolaan lumpur tinja
	#Luasan kawasan kumuh semakin menurun
Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	#Waktu tanggap darurat penanggulangan bencana semakin baik
	#Terdapat kasus pelanggaran perda yang masih belum tertangani
Sosial	#Tingkat kesejahteraan dari sudut pandang pembangunan masyarakat semakin meningkat
	#Persentase PMKS di Banyuwangi masih cukup tinggi
Tenaga Kerja	# Masih kurangnya tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	#Adanya kecenderungan peningkatan kekerasan terhadap perempuan dan anak
	#tingkat pemberdayaan gender semakin membaik
Pangan	Kecukupan dan ketersediaan pangan sudah semakin membaik
Lingkungan Hidup	#IKLH selama dua tahun terakhir menurun sangat signifikan
	#Sampah yang belum terkelola masih cukup banyak

Urusan	Isu
	#mayoritas penanganan sampah rumah tangga masih dilakukan dengan cara dibakar
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	#Pelayanan KTP sudah normal kembali
	# Masih adanya Masyarakat yang enggan untuk melakukan Perekaman KTP-el dikarenakan Aksesibilitas Tempat Layanan Masih Jauh.
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	# Belum optimalnya capaian KB aktif
Perhubungan	# Masih minimnya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan
	#Masih cukup tingginya angka kecelakaan lalulintas, bahkan ada kecenderungan mengalami peningkatan
Komunikasi dan Informatika	#Penggunaan infrastruktur IT sudah semakin optimal
	#infrastruktur penunjang E-Gov dapat diselenggarakan dengan baik
Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	# Rendahnya kemampuan untuk meningkatkan akses dan peluang pasar.
	# Rendahnya kemampuan dan akses terhadap sumber-sumber permodalan.
Penanaman Modal	#semakin pulihnya iklim investasi di Kabupaten banyuwangi
Kepemudaan dan Olahraga	#Terdapat penurunan persentase pemuda yang terlatih
	# Belum optimalnya fasilitasi kegiatan kepemudaan
Statistik	#Belum maksimalnya OPD yang menggunakan data statistik sektoral
Kebudayaan	#belum optimalnya aktivitas pengelolaan, pelestarian dan pengembangan warisan budaya
Perpustakaan	# Rendahnya indeks Kegemaran membaca Masyarakat
	# Rendahnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Urusan	Isu
Kelautan dan Perikanan	#Menurunnya kelompok nelayan yang mendapat pembinaan
Pertanian	# Masih ada usaha produk hewan yaNg belum bersertifikat PRA/NKV
	# Ancaman penyakit zoonosis (yg menular dari hewan ke manusia) seperti rabies, flu burung, brucellosis, antrax, dll akibat posisi Banyuwangi sebagai pintu masuk lalu lintas ternak dari luar pulau Jawa.
Perdagangan	#Aktivitas perdagangan besar sudah mulai pulih kembali
Perindustrian	#Aktivitas ekonomi pada sektor perindustrian sudah mulai pulih kembali
Perencanaan	# Adanya kebijakan nasional yang berdampak pada perubahan kebijakan daerah secara mendadak sehingga menyebabkan inkonsistensi perencanaan pembangunan di daerah
Keuangan	#Kuranginya Kepatuhan Wajib Pajak Self Assesment Dalam Membayar Kewajiban Pajaknya
Penelitian dan Pengembangan	#Belum optimalnya hasil penelitian dan pengembangan digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah dan dalam penetapan suatu kebijakan
Pengawasan	# Belum Optimalnya Efektivitas Pengendalian Korupsi di Instansi dan Badan Usaha Pemerintah dan kurangnya upaya mengkuantifikasi kemajuan pengelolaan risiko korupsi di dalam organisasi serta pemahaman terkait dengan pencegahan, pengelolaan atau Pengendalian korupsi
	#Peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup Pemerintah Daerah
	#Masih didapatkannya permasalahan yang sama meskipun sudah dilakukan pemeriksaan dan ditindak lanjuti (temuan berulang)



Kabupaten
Banyuwangi

BAB III KERANGKA EKONOMI

DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pada pembahasan sub bab arah kebijakan ekonomi daerah turut memberikan gambaran mengenai kondisi ekonomi tahun lalu, antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah dan beberapa indikator terkait lainnya, seperti: inflasi, kemiskinan, pengangguran, dan indeks gini. Selain itu, dalam sub bab ini juga turut memberikan gambaran mengenai perkiraan tahun berjalan terhadap beberapa indikator, serta arah kebijakan ekonomi daerah itu sendiri yang didalamnya memasukkan arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), serta kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen RPJMD provinsi.

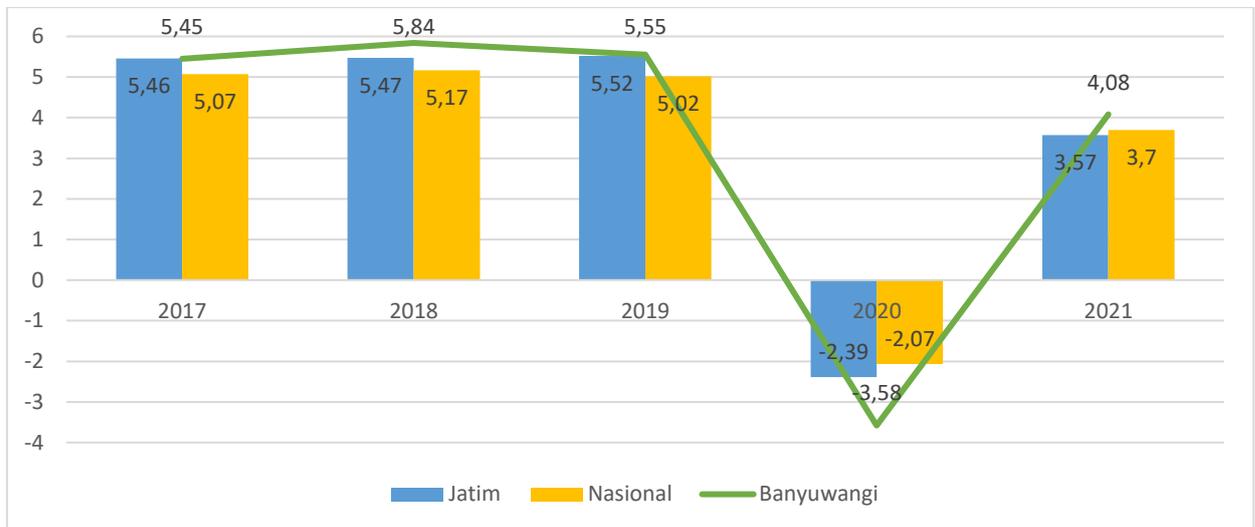
3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah

A. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu daerah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Selain itu pertumbuhan ekonomi disuatu daerah menjadi alat ukur untuk melihat atau menganalisa seberapa jauh tingkat perkembangan perekonomian di daerah tersebut.

Pertumbuhan ekonomi dihasilkan dari perkembangan berbagai aktivitas ekonomi yang tercermin pada PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Atas Dasar Harga Konstan dalam setiap tahunnya. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi selama tahun 2017 hingga 2020 menunjukkan kondisi yang semakin melambat, dimana pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan secara signifikan terjadi pada tahun 2020 yang disebabkan oleh dampak Covid-19, dimana aktivitas ekonomi terkendala oleh adanya penyebaran Virus Corona dan adanya kebijakan-kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat. Pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi tercatat sebesar 5.45 %, sedangkan pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan menjadi 5.84%. Pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi melambat sehingga menjadi 5.55%. Seiring dengan adanya dampak Covid-19, maka pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 mengalami perlambatan yang berkontraksi menjadi -3.58%. Sedangkan pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi menunjukkan kondisi yang semakin baik dengan pertumbuhan sebesar 4.08%.

Untuk mengetahui secara lebih jelas terkait dengan perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi, serta pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur dan Nasional pada tahun 2017 hingga 2021 secara lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3.1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2017 - 2021

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Banyuwangi, Prov. Jawa Timur dan Pusat, 2022

Bila membandingkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur dan nasional dapat terlihat kecenderungan diatas rata rata nasional dan Provinsi Jawa Timur. Tahun 2017 pertumbuhan lebih tinggi dibanding nasional tetapi lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur. Tahun 2018 dan tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi lebih meningkat dibandingkan dengan rata rata ekonomi nasional dan Jawa Timur. Tahun 2020 Kabupaten Banyuwangi mengalami kontraksi ekonomi yang lebih rendah dibandingkan rata – rata nasional dan Provinsi Jawa Timur yang disebabkan oleh pandemi covid-19 yang mendorong perlambatan pada sektor sektor produktif Kabupaten Banyuwangi. Pada Tahun 2021 pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan PPKM yang berbeda dengan kebijakan sebelumnya yaitu PSBB. Kondisi pertumbuhan ekonomi mulai stabil di tahun 2021. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi mengalami pertumbuhan menjadi 4.08, lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi pertumbuhan ekonomi nasional maupun provinsi Jawa Timur. Sehingga dengan demikian Pemerintah Kabupaten Banyuwangi harus berusaha lebih maksimal untuk menjaga dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, agar kondisinya selalu berada di atas pertumbuhan rata-rata Provinsi Jawa Timur, dengan melaksanakan program dan kegiatan dibidang ekonomi yang mampu menjadi pendorong untuk lebih meningkatkan aktivitas produksi ditahun berikutnya, sehingga Kabupaten Jawa Timur memiliki daya saing daerah dari sisi ekonomi yang semakin kuat. Berikut disajikan data pertumbuhan ekonomi pada masing-masing kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2021.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Banyuwangi, Prov. Jawa Timur dan Pusat, 2022

Gambar 3.2 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kabupaten Banyuwangi dengan Daerah Sekitar Tahun 2017 - 2021

Bila melihat pada kondisi daerah lainnya di daerah sekitar Banyuwangi ada 3 kabupaten yang berbatasan langsung, dapat diketahui bahwa pada tahun 2021 terdapat sebanyak 3 daerah Kabupaten yaitu Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten Jember. Posisi Kabupaten Banyuwangi dengan 3 kabupater yang berbatasan kecenderungan nya lebih tinggi sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, tetapi tahun 2020 pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi yang lebih tinggi dibandingkan tiga kabupaten tersebut.

Bila melihat kondisi pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Barat Atas Dasar Harga Konstan 2010 sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, maka masing-masing sektor memiliki pertumbuhan yang beragam dalam setiap tahunnya, dimana pada tahun 2021 Industri Pengolahan menempati urutan pertama yang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi sebesar 8.03%. Sektor pada urutan kedua yang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi adalah Informasi dan Komunikasi dengan pertumbuhan pada tahun 2021 mencapai 7.51%. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menempati urutan ketiga sebagai sumber pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi dengan pertumbuhan pada tahun 2021 mencapai 7.13%. Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang menempati urutan keempat sebagai sumber pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi dengan pertumbuhan pada tahun 2021 mencapai 5.8%. Dimana sektor Jasa lainnya, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, maupun

sektor Konstruksi pada tahun 2021 masih bertahan dan mengalami pertumbuhan diatas pertumbuhan PDRB, dengan pertumbuhan masing-masing mencapai sebesar 5.63%, 4.65%, 4.31%, 4.3% dan 3.11%. Untuk mengetahui pertumbuhan sektor-sektor Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang mendorong pertumbuhan ekonomi di Banyuwangi secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Banyuwangi Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017 - 2021

No	Lapangan Usaha	Tahun/ Persen (%)				
		2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.49	-0.73	-0.56	-2.96	1.71
B	Pertambangan dan Penggalian	8.06	6.25	1.93	-7.06	1.6
C	Industri Pengolahan	3.67	7.13	7.86	-0.38	8.03
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4.37	3.48	3.34	-0.3	1.85
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2.09	4.18	5.31	5.03	5.8
F	Konstruksi	8.08	11.81	12.32	-5.44	4.3
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9.12	11.3	9.6	-6.58	7.13
H	Transportasi dan Pergudangan	6.3	5.36	5.97	-12	-0.42
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10.91	10.78	11.18	-13.85	4.31
J	Informasi dan Komunikasi	8.65	8.75	9.03	8.67	7.51
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6.42	6.07	4.2	-0.26	1.75
L	Real Estate	6.37	7.24	6.63	1.91	3.11
M,N	Jasa Perusahaan	6.28	7.15	6.64	-6.13	2.18
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.45	4.2	2.21	-3.68	-0.86
P	Jasa Pendidikan	7.39	7.43	7.14	3.13	1.7
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9.8	7.61	6.22	15.55	4.65
R,S,T,U	Jasa lainnya	8.68	9.86	8.16	-13.2	5.63
Produk Domestik Regional Bruto		5.45	5.84	5.55	-3.58	4.08

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi, 2022

Melihat pertumbuhan pada masing-masing sektor sebagaimana yang terdapat pada tabel di atas juga dapat diketahui berbagai sektor yang hampir dalam setiap tahunnya memiliki pertumbuhan diatas pertumbuhan PDRB, yaitu : sektor Industri Pengolahan, Sektor Informasi

dan Komunikasi , dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor,

Melihat pada struktur perekonomian Kabupaten Banyuwangi yang secara lebih jelas ditunjukkan melalui persentase distribusi PDRB untuk masing-masing sektor, maka dapat diketahui bahwa dalam beberapa tahun terakhir (2017 - 2021) terdapat 5 sektor ekonomi yang memiliki kontribusi yang besar (berada di atas rata-rata PDRB), yaitu, sektor sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan persentase pada tahun 2021 yang mencapai 29.13%, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan kontribusi sebesar 16.63%, sektor Konstruksi dengan kontribusi sebesar 13.84%, serta Industri Pengolahan sebesar 12.32 %. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa keberadaan 4 sektor tersebut memiliki peran yang lebih besar dalam struktur perekonomian Kabupaten Banyuwangi. Distribusi persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Banyuwangi Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha Tahun 2017 - 2021 secara lebih lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Banyuwangi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017 - 2021

No	Lapangan Usaha	Tahun/ Persen (%)				
		2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	33.75	31.25	29.36	29.69	29.13
B	Pertambangan dan Penggalian	7.63	7.66	7.43	7.29	7.25
C	Industri Pengolahan	10.77	10.95	11.19	11.62	12.32
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
F	Konstruksi	12.47	13.51	14.36	14.01	13.84
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15.11	16.02	16.77	16.18	16.63
H	Transportasi dan Pergudangan	3.18	3.21	3.24	2.92	2.76
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.61	2.75	2.9	2.6	2.64
J	Informasi dan Komunikasi	4.1	4.14	4.27	4.79	4.87
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.77	1.77	1.73	1.79	1.77
L	Real Estate	1.47	1.5	1.52	1.61	1.57
M,N	Jasa Perusahaan	0.22	0.23	0.23	0.23	0.22
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.27	2.24	2.18	2.28	2.12
P	Jasa Pendidikan	3	3.04	3.08	3.31	3.15
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.34	0.36	0.36	0.43	0.44
R,S,T,U	Jasa lainnya	1.2	1.26	1.29	1.16	1.19
Produk Domestik Regional Bruto		100	100	100	100	100

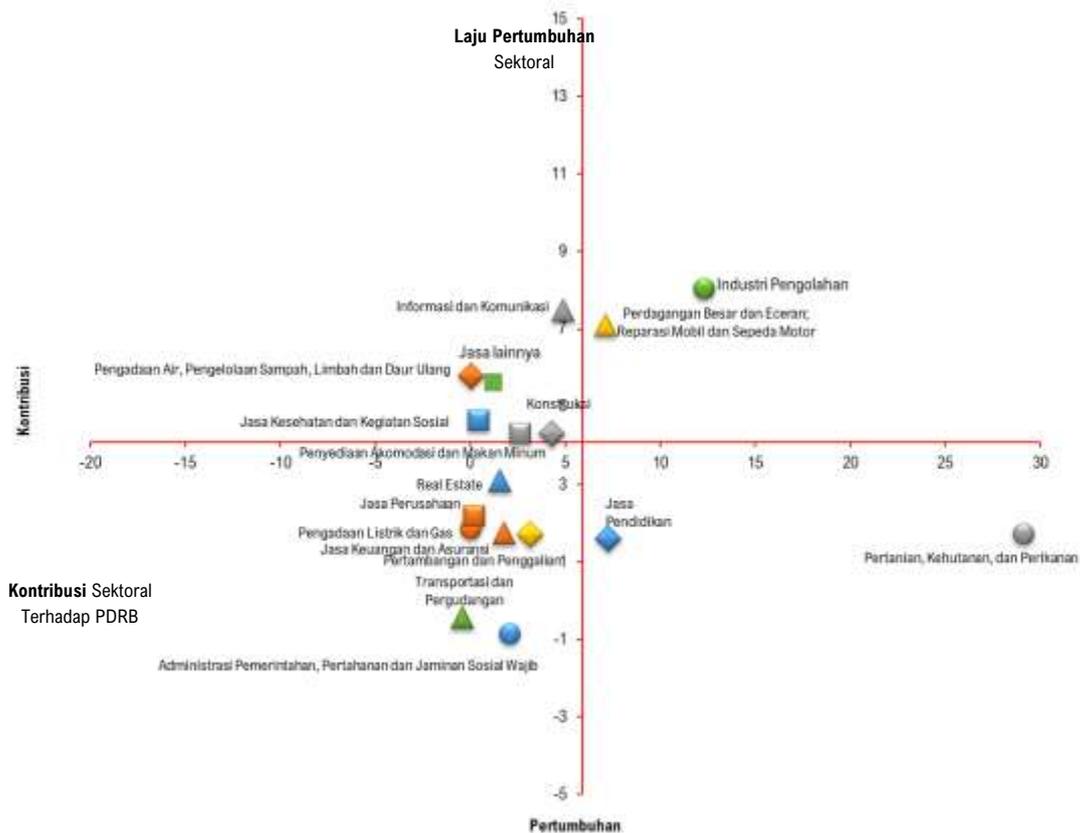
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi, 2022

Dengan mempertimbangkan pada pertumbuhan dan kontribusi masing-masing sektor PDRB sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka selanjutnya dapat dilakukan analisis Tipologi Klassen. Teknik Tipologi Klassen dapat digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan sektoral daerah. Analisis ini mendasarkan pengelompokan suatu sektor dengan melihat pertumbuhan dan kontribusi sektor tertentu terhadap total PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto) suatu daerah.

Dengan menggunakan analisis Tipologi Klassen, suatu sektor dapat dikelompokkan ke dalam 4 kategori, yaitu: sektor prima, sektor potensial, sektor berkembang, dan sektor terbelakang. Penentuan kategori suatu sektor ke dalam empat kategori di atas didasarkan pada laju pertumbuhan kontribusi sektoral dan rerata besar kontribusi sektoralnya terhadap PDRB, sebagai berikut:

1. Kuadran I = Sektor Prima (sektor yang memiliki pertumbuhan tinggi dan memiliki kontribusi yang tinggi terhadap perekonomian Daerah);
2. Kuadran II = Sektor Potensial (sektor yang memiliki pertumbuhan tinggi, namun memiliki kontribusi yang rendah);
3. Kuadran III = Sektor Berkembang (Sektor yang memiliki pertumbuhan rendah, namun memiliki kontribusi yang tinggi);
4. Kuadran IV = Sektor Terbelakang (sektor yang memiliki pertumbuhan rendah dan memiliki kontribusi yang rendah).

Untuk mengetahui Klasifikasi sektor PDRB Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Tipologi Klassen pada tahun 2021 secara lebih jelas dapat dilihat pada gambar dan matrix sebagai berikut.



Gambar 3.3 Klasifikasi Sektor PDRB Kabupaten Banyuwangi Berdasarkan Tipologi Klassen Tahun 2021

Klasifikasi Sektor PDRB Kabupaten Banyuwangi Berdasarkan Tipologi Klassen tahun 2021 menunjukkan bahwa terjadi pergeseran unggulan. Covid 19 memberikan pertumbuhan Jasa kesehatan dan kegiatan sosial serta komunikasi dan informatika menjadi sektor potensial, dikarenakan di tahun 2021 suatu kebutuhan yang diperlukan pada masa pandemi. Selain itu pada sektor potensial meliputi juga sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Konstruksi; dan Jasa Lainnya.

Sektor prima terdapat industri pengolahan, dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Pada tahun 2021 kedua sektor tersebut mengalami peningkatan pada pertumbuhan dan kontribusi yang artinya ini menjadi keunggulan dari Kabupaten Banyuwangi. Sedangkan sektor berkembang yaitu sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dan jasa pendidikan yang artinya pertumbuhan dibawa rata-rata namun kontribusi diatas rata-rata, sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan masih mendominasi.

Tujuh sektor antara lain Pertambangan & Pengalihan; Real Estat; Jasa Perusahaan; Pengadaan Listrik dan Gas; Jasa Keuangan dan Asuransi; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Transportasi dan Pergudangan merupakan sektor terbelakang karena bukan potensi

yang dimiliki oleh kabupaten Banyuwangi, artinya bahwa pertumbuhan yang rendah serta kontribusi yang di bawah rata-rata.

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi, 2022 (data diolah)

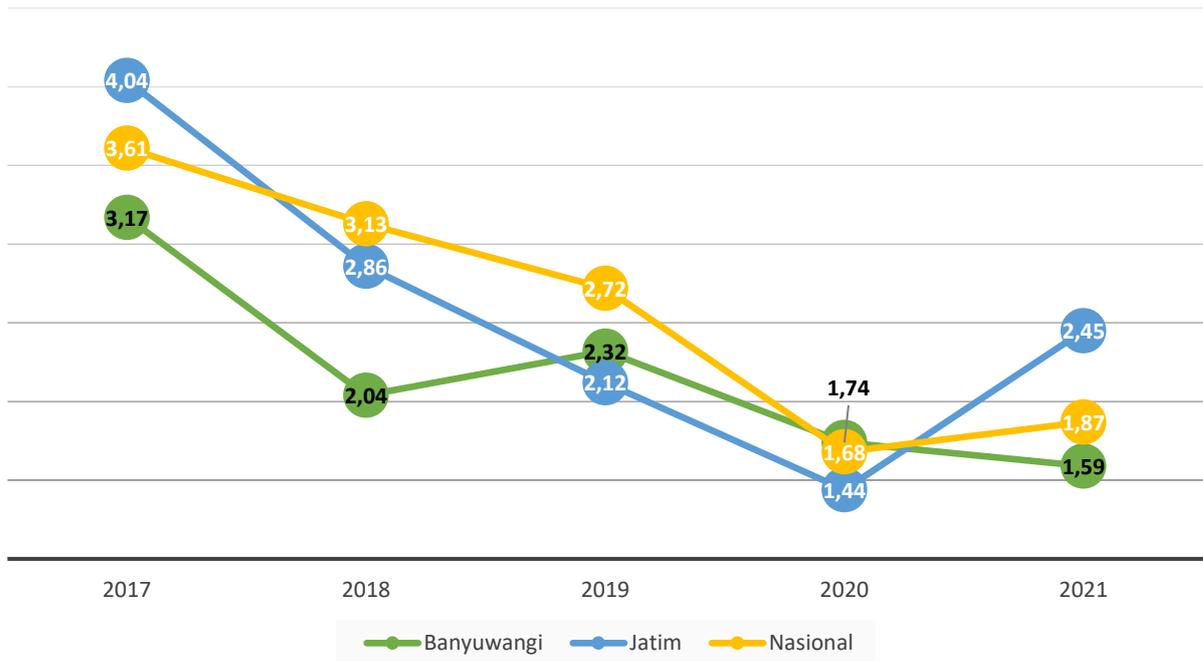
	Y sektor < Y PDRB	Y sektor > Y PDRB
r sektor ≥ r PDRB	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Informasi dan Komunikasi; ▪ Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; ▪ Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; ▪ Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; ▪ Konstruksi; ▪ Jasa Lainnya. <p style="text-align: right;">II (Sektor Potensial)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Industri Pengolahan; ▪ Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; <p style="text-align: right;">I (Sektor Prima)</p>
r sektor < r PDRB	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertambangan & Penggalian; ▪ Real Estat; ▪ Jasa Perusahaan; ▪ Pengadaan Listrik dan Gas; ▪ Jasa Keuangan dan Asuransi; ▪ Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; ▪ Transportasi dan Pergudangan. <p style="text-align: right;">IV (Sektor Terbelakang)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; ▪ Jasa Pendidikan. <p style="text-align: right;">III (Sektor Berkembang)</p>

B. Inflasi

Inflasi merupakan suatu ukuran yang menggambarkan dinamika perkembangan harga sekelompok barang dan jasa yang biasa dikonsumsi masyarakat dan juga merupakan salah satu indikator yang menentukan keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Angka inflasi juga digunakan sebagai salah satu dasar untuk merumuskan suatu kebijakan baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sedangkan yang dimaksud laju inflasi adalah kenaikan atau penurunan inflasi dari periode ke periode atau dari tahun ke tahun. Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). Indeks Harga Konsumen (IHK) menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. IHK merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang dan jasa.

Laju inflasi di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2017 hingga 2021 menunjukkan adanya fluktuasi, dimana laju inflasi selama tahun 2017 tercatat sebesar 3,17%, sedangkan

pada tahun 2018 mengalami penurunan, dimana laju inflasi pada tahun 2018 menjadi 2,04%, dan mengalami kenaikan di tahun 2019 dan tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 1,74. Sedangkan pada tahun 2021 laju inflasi di Kabupaten Banyuwangi mengalami kenaikan menjadi 1,59%. Bila melihat pada perkembangan laju inflasi di Kabupaten Banyuwangi dalam 5 tahun terakhir dapat disimpulkan bahwa tingkat inflasi yang terjadi masih dalam kategori ringan, dimana laju inflasi berada dibawah 10%, sehingga kondisinya masih terkendali. Berikut disajikan data mengenai perkembangan inflasi Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2017 hingga 2021.



Gambar 3.4 Perkembangan Inflasi (Tahun Kalender) Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2017 - 2021

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa TImur dan Pusat, 2022

Laju inflasi dapat terjadi pada tingkat yang ringan, sedang, berat, dan hiperinflasi. Inflasi ringan terjadi apabila kenaikan harga berada di bawah 10%; inflasi sedang antara 10% hingga 30%; dan inflasi berat antara 30% hingga 100%; dan hiperinflasi atau inflasi tidak terkendali terjadi apabila kenaikan harga berada di atas 100%. Kestabilan inflasi merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Terkait inflasi ada tiga hal yang perlu diwaspadai : Pertama, Inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan terus turun sehingga standar hidup dari masyarakat turun dan akhirnya menjadikan semua orang terutama orang miskin bertambah miskin. Kedua, Inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian (*uncertainty*) bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan.

Pengalaman empiris menunjukkan bahwa inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi dan produksi yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi.

C. Kemiskinan

Salah satu konsep penghitungan kemiskinan makro yang diaplikasikan di banyak negara termasuk Indonesia adalah konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan konsep ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan. Dalam aplikasinya dihitunglah garis kemiskinan absolut. Garis kemiskinan merupakan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan yang dihitung berdasarkan pengeluaran rumah tangga per bulan dibagi dengan jumlah anggota rumah tangga. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan disebut penduduk miskin. Dalam penghitungannya, GK merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).

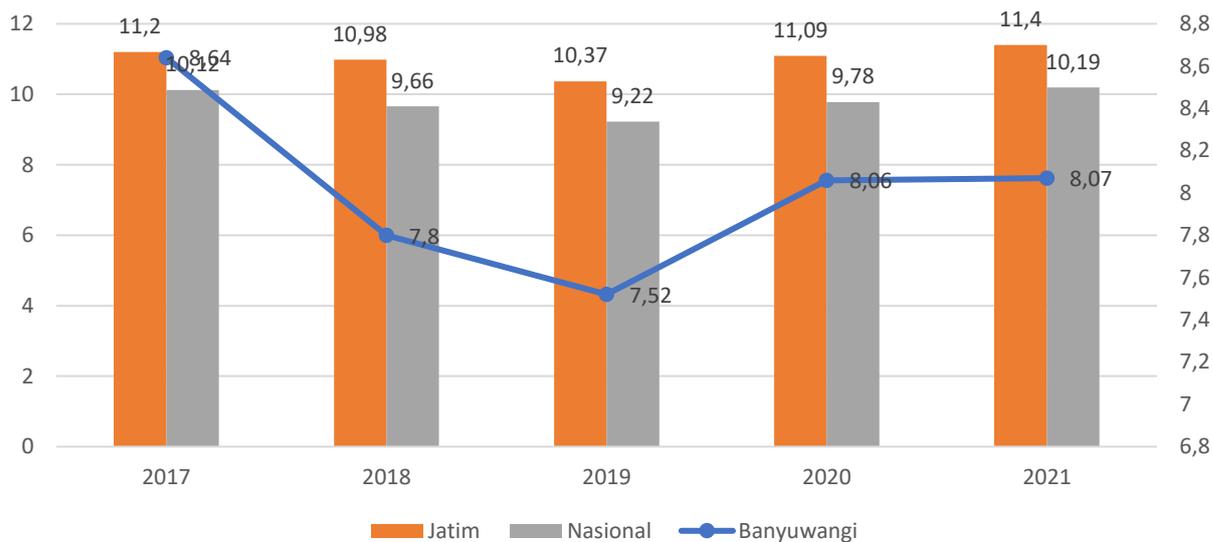
Garis kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi dalam setiap tahun mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut terjadi disebabkan oleh adanya kenaikan harga-harga, sehingga nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dan non makanan juga semakin bertambah. Pada tahun 2017 garis kemiskinan Kabupaten Banyuwangi tercatat sebesar Rp. 319.236 per kapita per bulan, dimana pada tahun 2021 garis kemiskinan Kabupaten Banyuwangi tercatat sebesar Rp. 387.084 per kapita per bulan atau mengalami kenaikan dari tahun 2017 sebesar 21,25%, yaitu sebanyak Rp. 67.848. Berdasarkan pada hasil perhitungan besarnya garis kemiskinan, maka selanjutnya dapat diketahui jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banyuwangi. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kabupaten Banyuwangi dalam rentang waktu tahun 2017 hingga 2021 mengalami tren yang menurun, yaitu dari 138 ribu jiwa menjadi 130 ribu jiwa. Penurunan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banyuwangi dari tahun 2017 hingga 2021 tercatat sebanyak 7.6 ribu jiwa atau sebesar 5.49%. Dalam lima tahun terakhir, penurunan jumlah penduduk miskin paling banyak terjadi pada tahun 2018 yang mencapai 9.41%. Seiring dengan dampak yang ditimbulkan oleh adanya Covid-19, maka jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2020 mengalami peningkatan dari 9 ribu jiwa pada tahun 2020 menjadi 130.370 ribu jiwa atau mengalami peningkatan sebesar 6.90%. Adapun perkembangan jumlah penduduk miskin dan garis kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2017 hingga 2021 secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 - 2021

Keterangan	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Penduduk Miskin (org)	138.540,00	125.500,00	121.370,00	130.370,00	130.930,00
Garis Kemiskinan (Rp/ Kapita/ Bulan)	319.236,00	339.891,00	353.873,00	373.679,00	387.084,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi, 2022

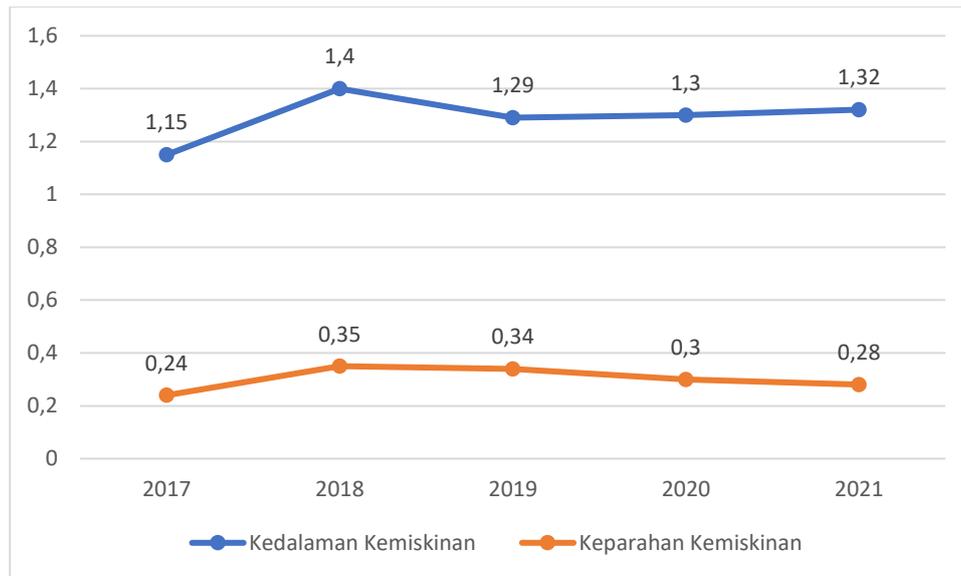
Bila ditinjau pada besarnya persentase penduduk miskin (persentase kemiskinan), maka dapat diketahui bahwa persentase kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi dari tahun 2017 hingga 2021 memiliki tren yang serupa dengan jumlah penduduk miskin. Persentase kemiskinan memiliki tren menurun dalam setiap tahunnya semenjak tahun 2017 hingga 2020. Pada tahun 2017 persentase penduduk miskin di Kabupaten Banyuwangi tercatat sebesar 8.64% dan mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 7.8%. Seiring dengan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, maka persentase penduduk miskin pada tahun 2019 kembali mengalami penurunan hingga menjadi 7.52%, Pada tahun tahun 2020 dengan persentase kemiskinan mencapai 8.06% dan tahun 2021 seiring dengan dampak yang ditimbulkan dari adanya Covid-19, maka persentase kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi mengalami peningkatan menjadi 8.07%. Persentase kemiskinan pada tahun 2021 yang mencapai 8.07%. Walaupun persentase kemiskinan pada tahun 2021 mengalami peningkatan, namun besarnya persentase masih berada dibawah tahun 2019 dan masih jauh berada dibawah Provinsi Jawa TImur dan Nasional, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penanganan kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi masih berjalan dengan baik. Terjadinya peningkatan persentase kemiskinan pada tahun 2021 juga dialami oleh sebagian besar daerah di Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya persentase kemiskinan Provinsi Jawa Timur dan Nasional pada tahun 2021. Untuk mengetahui secara lebih jelas terkait dengan perkembangan persentase kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur dan Nasional pada tahun 2017 hingga 2021 dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3.5 Perkembangan Persentase Kemiskinan Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2017 - 2021

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Banyuwangi, Prov. Jawa Timur dan Pusat, 2022

Persoalan kemiskinan pada dasarnya tidak terbatas hanya tentang jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain upaya memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga terkait dengan bagaimana mengurangi kesenjangan di antara penduduk miskin. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan dapat diketahui dengan melihat indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*) adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sedangkan Indeks Keparahannya Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Untuk mengetahui perkembangan hasil perhitungan dari kedua indeks tersebut di Kabupaten Banyuwangi dapat dilihat pada gambar berikut.



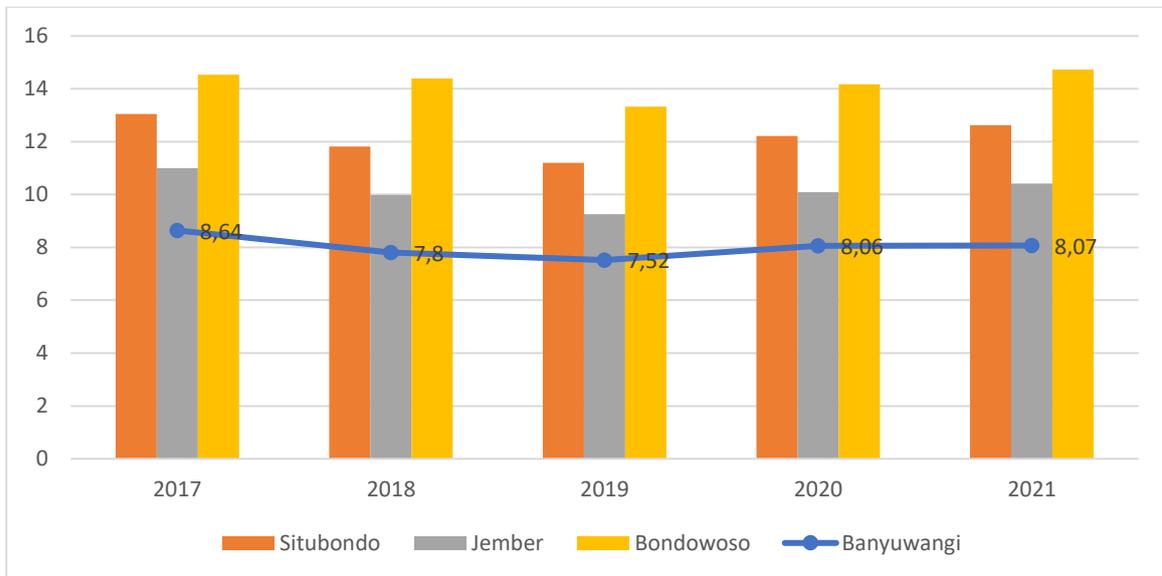
Gambar 3.6 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 - 2021

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi, 2022

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2017 hingga 2020 cenderung mengalami tren fluktuatif, dimana pada tahun 2018 nilai indeks mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya (2017) sebesar 0,25 atau dari 1.15 menjadi 1.4, sedangkan pada tahun 2019 nilai indeks memiliki posisi menurun pada angka 1.29. Pada tahun 2020 nilai indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami peningkatan sebesar 0,01 sehingga menjadi 1.3. Sedangkan pada tahun tahun 2021 nilai indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami peningkatan sehingga menjadi 1.32 atau meningkat sebesar 0.02, namun nilainya masih berada dibawah tahun 2019. Terjadinya peningkatan nilai indeks ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Banyuwangi cenderung menjauh garis kemiskinan, dan sebaliknya apabila terjadi penurunan dari nilai indeks, maka rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Banyuwangi semakin mendekati bawah garis kemiskinan. Semakin besarnya nilai indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2021 dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2019 dan sebelumnya menunjukkan bahwa kondisi kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi semakin buruk, karena dengan rata-rata pengeluaran penduduk miskin yang mendekati garis kemiskinan, berarti kondisi kesejahteraan penduduk tersebut semakin menurun.

Bila melihat nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Banyuwangi memiliki tren yang hampir serupa dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan kecenderungan menurun, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami penurunan. Jika dibandingkan dengan tahun 2018, nilai indeks ini telah mengalami penurunan pada tahun 2021, sedangkan pada tahun 2021 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami penurunan pada angka yang masih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2018. Penurunan nilai indeks keparahan kemiskinan menunjukkan bahwa kesenjangan pengeluaran antar penduduk miskin semakin

berkurang. Sebaliknya jika terjadi kenaikan nilai indeks ini berarti bahwa kesenjangan pengeluaran antar penduduk miskin semakin melebar. Walaupun pada tahun 2021 nilai indeks mengalami penurunan, namun bila dibandingkan dengan kondisi tahun 2018 dan sebelumnya, maka nilai indeks pada tahun 2021 masih berada di bawahnya, sehingga kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesenjangan pengeluaran antar penduduk miskin di Kabupaten Banyuwangi masih termasuk dalam kategori baik/ rendah.



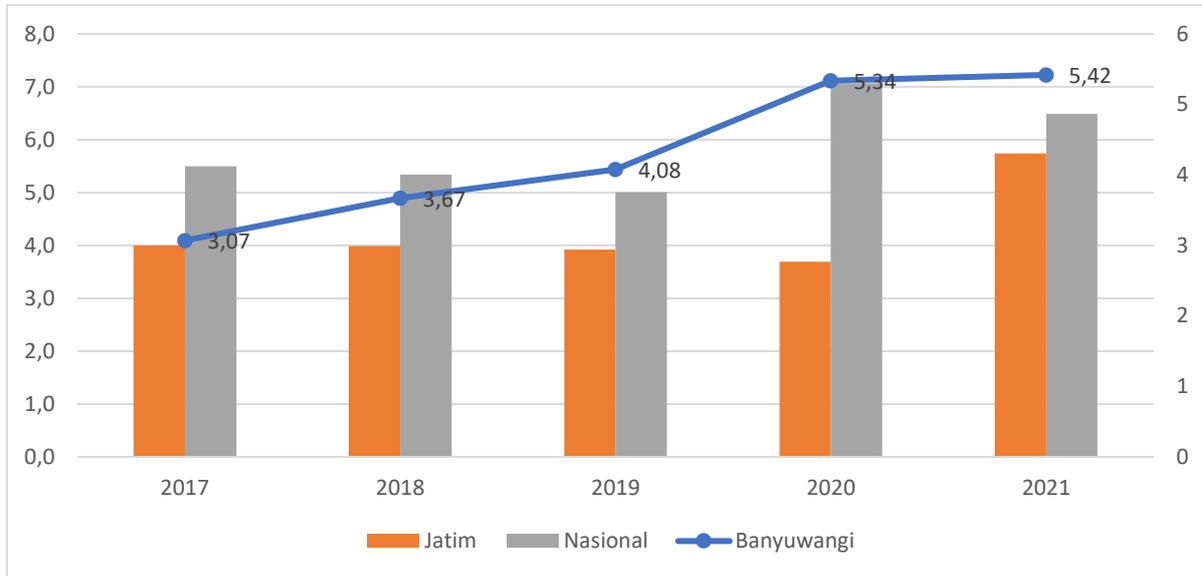
Gambar 3.7 Persentase Kemiskinan Berdasarkan Kabupaten Banyuwangi dengan daerah sekitar Tahun 2017 - 2021

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2022

D. Pengangguran

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur pengangguran pada suatu daerah adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja, sehingga berdasarkan definisi tersebut dan rumus yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), maka besar kecilnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dapat ditentukan oleh 2 variabel, yaitu: Jumlah Angkatan Kerja dan Jumlah Pengangguran. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Banyuwangi dalam setiap tahun mengalami tren yang meningkat dalam 5 tahun terakhir. Pada tahun 2017 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Banyuwangi tercatat sebesar 3,07 dan mengalami peningkatan pada tahun 2018 menjadi 3.67. Pada tahun 2019 seiring dengan meningkat jumlah pengangguran, maka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Banyuwangi juga mengalami penurunan menjadi 4.08. Sedangkan pada tahun 2020 seiring dengan adanya dampak Pandemi Covid-19 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Banyuwangi kembali mengalami peningkatan menjadi 5.34. Pada tahun 2021 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) masih tercatat sebesar 5.42, dan hanya mengalami peningkatan sebesar 1.26 dari tahun 2020. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Banyuwangi sebesar 5.42 memiliki arti

bahwa pada setiap 100 penduduk angkatan kerja terdapat sekitar 5 penduduk yang mencari pekerjaan.



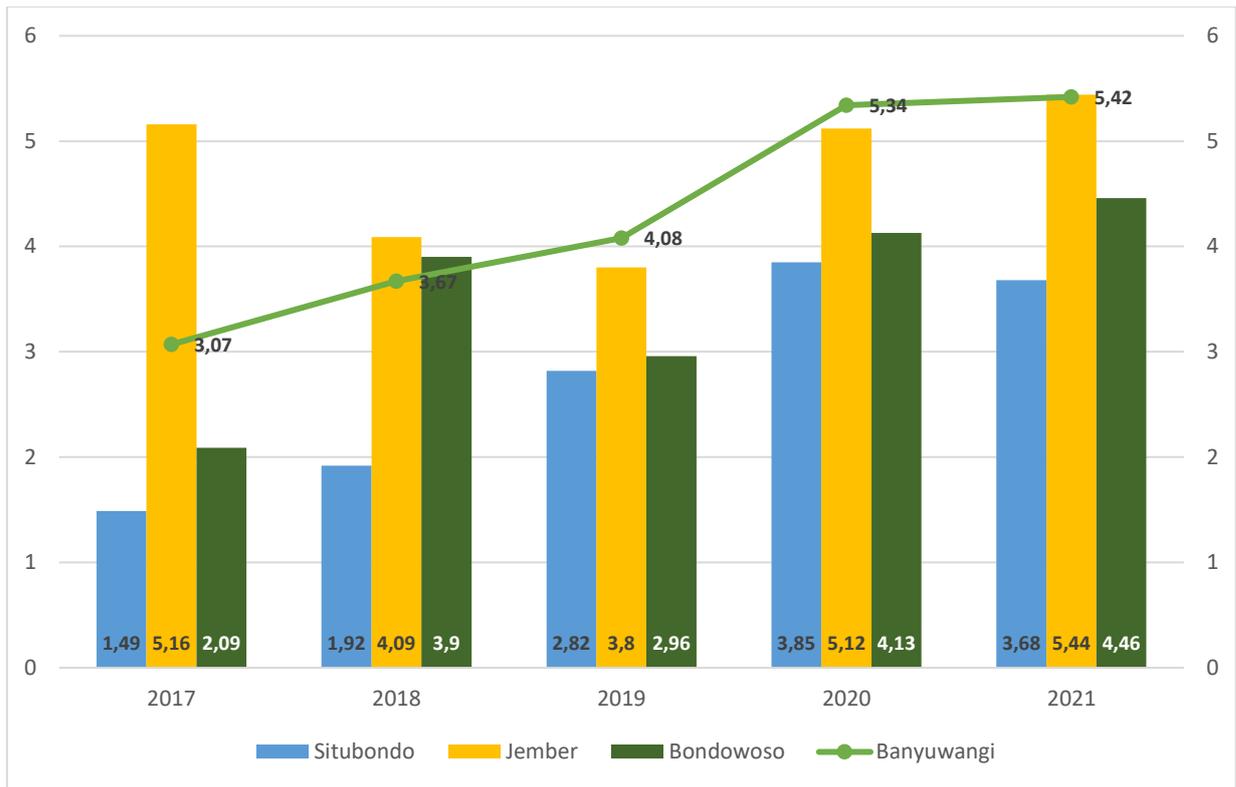
Gambar 3.8 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2017 - 2021

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Banyuwangi, Prov. Jawa Timur dan Pusat, 2022

Kondisi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Banyuwangi bila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional pada tahun 2017 hingga 2021 masih berada atas Nasional dan Provinsi Jawa Timur, namun pada tahun 2020 dan 2021 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Banyuwangi masih tetap dibawah Nasional dan berada di atas Provinsi Jawa Timur, sedangkan tren yang terjadi pada tahun 2020 dan 2021 memang merupakan kondisi yang secara umum dialami oleh sebagian besar Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur maupun di Indonesia, mengingat meningkatnya jumlah pengangguran yang signifikan pada tahun 2020 lebih disebabkan oleh dampak pandemi Covid-19 yang juga dirasakan oleh sebagian besar daerah di Indonesia.

Bahwa kontribusi ekonomi tidak tampak nyata menurunkan pengangguran,, banyak tumbuh sektor informal tp tidak tumbuh di sektor formal.

Terkait dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), jumlah pengangguran merupakan salah satu variabel yang menarik untuk dibahas secara lebih mendalam, mengingat pengangguran menjadi suatu persoalan dalam pembangunan yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Keberadaan pengangguran menggambarkan banyaknya orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak.



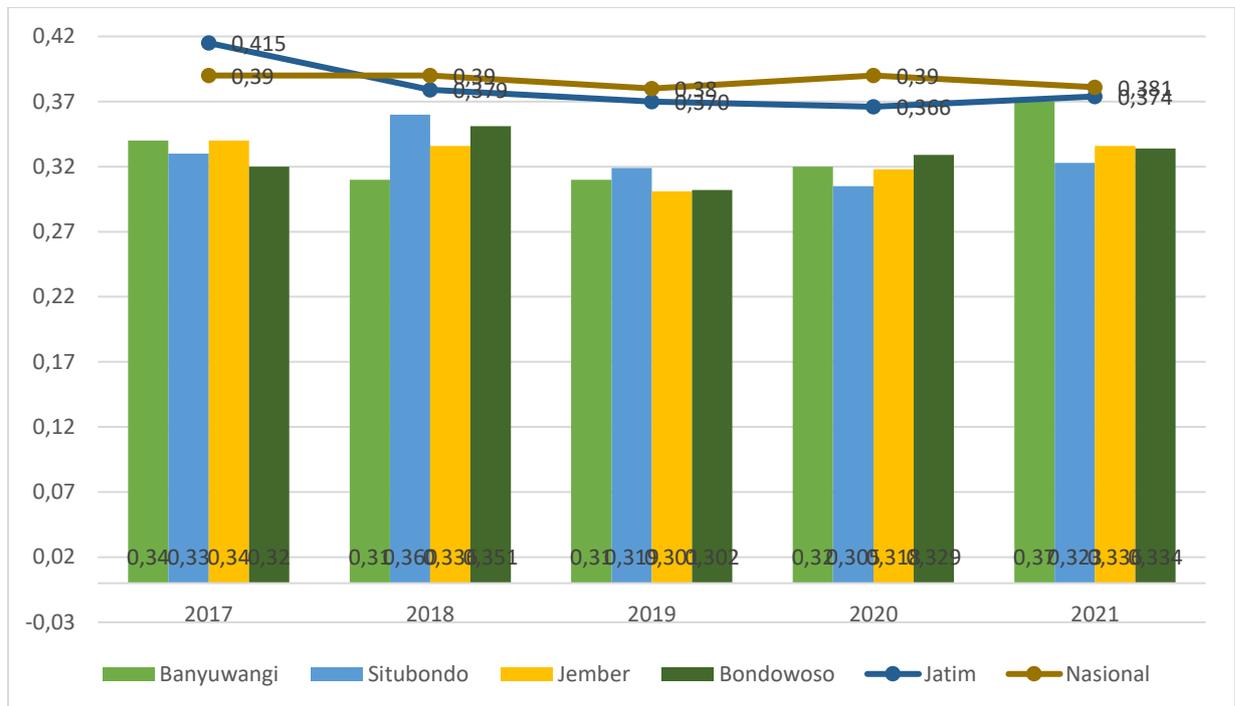
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2022

Gambar 3.9 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Banyuwangi dengan Daerah Sekitar Tahun 2017 - 2021

E. Gini Rasio

Suatu daerah bisa dianggap sejahtera dapat diketahui dengan melihat bagaimana daerah tersebut mendistribusikan pendapatan, apakah didistribusikan secara merata atau terjadi ketimpangan. Distribusi pendapatan mencerminkan ketimpangan atau meratanya hasil pembangunan suatu daerah baik yang diterima masing-masing orang atau dari kepemilikan faktor-faktor produksi dikalangan penduduknya. Untuk mengetahui ketimpangan atau meratanya pendapatan pada suatu daerah dapat dilihat dari Koefisien Gini. Koefisien Gini adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna, dimana semua nilai sama) hingga satu (ketimpangan yang sempurna, dimana satu orang menguasai semuanya dan yang lainnya nihil). Koefisien Gini dihitung dengan pengukuran ketimpangan atau ketidakmerataan pendapatan yang relatif sangat sederhana, yaitu dengan menghitung rasio bidang yang terletak antara garis diagonal dengan kurva terhadap bidang yang terletak antara kurva dengan garis vertikal dan horisontal sebelah kanan. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Nilai Rasio Gini yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Rasio Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Rasio Gini diupayakan agar

mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk. Untuk mengetahui gini rasio Kabupaten Banyuwangi dalam beberapa tahun terakhir (2017 - 2021) secara lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3.10 Perkembangan Gini Rasio Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2017 - 2021

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Banyuwangi, Prov. Jawa Timur dan Pusat, 2022

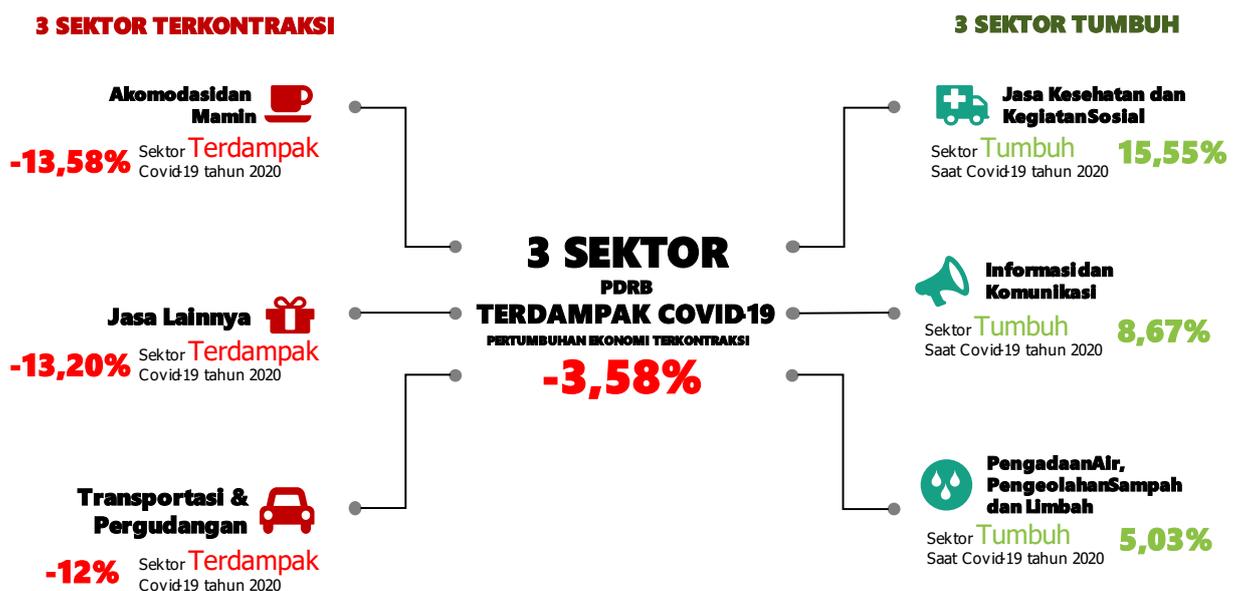
Melihat data pada gambar di atas dapat diketahui bahwa gini rasio Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2017 tercatat sebesar 0,309. Hal ini berarti bahwa di Kabupaten Banyuwangi distribusi pendapatan penduduk relatif merata. Bila melihat pada perkembangan dari tahun ke tahun dapat diketahui bahwa nilai gini rasio Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2018 cenderung mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2017. Hal ini berarti bahwa distribusi penduduk pada tahun 2018 relatif lebih merata. Pada tahun 2019 dan 2020 nilai gini rasio Kabupaten Banyuwangi mengalami peningkatan dengan nilai masing-masing tahun sebesar 0,308 dan 0,333, namun pada tahun 2021 nilai gini rasio Kabupaten Banyuwangi kembali mengalami penurunan menjadi 0,317.

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Saat ini perekonomian global termasuk Indonesia mengalami ketidakpastian. Perlambatan ekonomi telah berdampak pada kinerja pertumbuhan ekonomi, khususnya pada tahun 2020. Berbagai daerah mengalami ketidakstabilan di sektor ekonomi akibat krisis yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19. Ketidakstabilan kondisi perekonomian akibat pandemi

Covid-19 semakin dirasakan dalam kehidupan masyarakat, khususnya rumah tangga. Konsumsi rumah tangga, sebagai penopang utama perekonomian melambat secara signifikan, dimana pada akhirnya memengaruhi kinerja industri dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Rumah tangga yang terdampak terdapat dua sisi secara bersamaan, yaitu kontraksi pendapatan dan keterbatasan ruang konsumsi. Kontraksi pendapatan terjadi karena adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), pengurangan gaji, dan penurunan laba usaha, sementara keterbatasan ruang konsumsi diantaranya karena adanya pembatasan mobilitas masyarakat.

Kondisi ekonomi di daerah turut mengalami kontraksi yang cukup dalam, berdasarkan data yang diperoleh dapat diketahui bahwa Kabupaten Banyuwangi merupakan 5 daerah yang memiliki laju pertumbuhan diatas capaian Provinsi Jawa Timur dengan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 yang mengalami perlambatan sehingga mencapai 0,98%, dimana pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2019 telah mampu tumbuh sebesar 5,79%. Secara lebih terperinci dari capaian pada tahun 2020 terdapat 7 sektor di Kabupaten Banyuwangi yang terkontraksi, sedangkan 10 sektor lainnya dapat bertahan dengan mengalami pertumbuhan, berikut disajikan data tiga sektor yang terdampak signifikan dan tiga sektor yang tumbuh berdasarkan data pertumbuhan PDRB Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2020.



Gambar 3.11 Pertumbuhan PDRB Kabupaten Banyuwangi yang terdampak Covid Tahun 2020

Diantara 7 sektor yang mengalami kontraksi akibat dari pandemi Covid-19, tiga diantaranya yaitu Akomadasi dan makanan minuman dengan kontraksi sebesar -13.58%, pada sektor jasa lainnya dengan kontraksi sebesar -13.20%, dan sektor transportasi dan pergudangan sebesar -12 %, adapun ketiga sektor tersebut mengalami kontraksi yang cukup dalam mengingat bahwa ketiganya sangat bergantung kepada mobilitas masyarakat pariwisata

dan jasa transportasi dalam pemenuhan sumberdaya manusia maupun bahan baku, sedangkan pandemi Covid-19 mengharuskan adanya pembatasan kegiatan yang berdampak pada diharuskannya pariwisata untuk berhenti beroperasi. Sedangkan 3 sektor perekonomian di Kabupaten Banyuwangi yang mampu bertahan diantara 10 sektor lainnya adalah sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang tumbuh sebesar 15,55%, sektor Informasi dan komunikasi tumbuh sebesar 8.67 %, dan sektor pengadaan air, pengolahan sampah dan limbah mengalami pertumbuhan sebesar 5.03%.

Dalam mempercepat penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi di Indonesia, per 20 Juli 2020 pemerintah memutuskan untuk mengubah struktur organisasi terkait Covid-19. Yang semula penanganan Covid-19 dilakukan Gugus Tugas Covid-19 berubah namanya menjadi Satgas Penanganan Covid-19 yang khusus menangani pandemi Covid-19, dan Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang fokus memulihkan sektor perekonomian akibat pandemi. Kedua satuan tugas itu berada di bawah Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN). Perubahan struktur organisasi ini merupakan milestone yang sangat penting, untuk memastikan seluruh program yang sudah ditentukan dapat dikoordinasikan, dijalankan dengan baik, dan juga dievaluasi dengan baik pula sehingga penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.

Pemerintah kembali melanjutkan program perlindungan sosial (perlinsos) pada 2021. Perlinsos merupakan salah satu program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagai upaya mengurangi dampak Covid-19 terhadap masyarakat, khususnya bagi permasalahan ekonomi. Perlinsos memiliki alokasi anggaran terbesar yang bertujuan memberi dukungan daya beli untuk menekan laju kemiskinan serta mendorong konsumsi masyarakat. Didalam perlinsos terdapat sejumlah program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (Bantuan Sembako), dan Bantuan Sosial Tunai (BST). Pada 2020, program ini mencapai realisasi 100%. Ada perbaikan pelaksanaan di tahun 2021 setelah melalui tahap evaluasi program di 2020 lalu. Terdapat tiga program perlindungan sosial dalam rangka PEN yang diluncurkan 2021 yakni Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (Bantuan Sembako), dan Bantuan Sosial Tunai (BST). Kompleksitas dan keterhubungan berbagai dimensi dalam penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Diperlukan koordinasi dan kolaborasi yang solid antara pemerintah, dunia usaha, tenaga medis, dan kelompok masyarakat.

Dinamika perekonomian yang cenderung makin kompleks dan dinamis, baik pada tingkat global, nasional maupun daerah telah menyebabkan semakin tingginya aspek ketidakpastian (*uncertainty*) terkait pergerakan dan hubungan antar variabel-variabel ekonomi. Hal ini menjadi tantangan kedepan dalam perekonomian nasional maupun di daerah. Hal tersebut menuntut para pembuat kebijakan, masyarakat maupun dunia usaha untuk selalu mengamati dan mensiasati setiap perkembangan, termasuk membuat perkiraan-perkiraan tentang gambaran perekonomian di masa mendatang sebagai acuan dalam menyusun perencanaan serta keputusan-keputusan strategis ke depan.

3.1.3. Arah Kebijakan Perekonomian Daerah

Pembangunan ekonomi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024 diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan dan penggunaan sumber daya ekonomi, dalam memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor. Hasilnya diharapkan mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas yang ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata.

Pembangunan ekonomi dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu: (1) pengelolaan sumber daya ekonomi, dan (2) peningkatan nilai tambah ekonomi. Kedua pendekatan ini menjadi landasan bagi sinergi dan keterpaduan kebijakan lintas sektor yang mencakup sektor pangan dan pertanian, kemaritiman, perikanan dan kelautan, industri pengolahan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital. Pelaksanaan kedua fokus tersebut didukung dengan perbaikan data untuk menjadi rujukan pemantauan dan evaluasi capaian pembangunan, serta perbaikan kualitas kebijakan.



Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi

Arah kebijakan dalam rangka pengelolaan sumber daya ekonomi pada tahun 2020 - 2024 mencakup:

1. **Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT)** yang dilaksanakan dengan strategi: (a) mempercepat pengembangan pembangkit energi baru dan terbarukan; (b) meningkatkan pasokan bahan bakar nabati; (c) meningkatkan pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi; (d) meningkatkan pemenuhan energi bagi industri; serta (e) mengembangkan industri pendukung EBT.
2. **Peningkatan kuantitas/ ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi** yang dilaksanakan dengan strategi: (a) memantapkan kawasan hutan berfungsi lindung; (b) mengelola hutan berkelanjutan; (c) menyediakan air untuk pertanian dan perikanan darat; (d) menyediakan air baku untuk kawasan prioritas; (e) memelihara, memulihkan, dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan infrastruktur hijau; serta (f) mengembangkan waduk multiguna.
3. **Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan** yang dilaksanakan dengan strategi: (a) meningkatkan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan; (b) meningkatkan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut terutama melalui peningkatan produktivitas dan teknik produksi secara berkelanjutan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok; (c) meningkatkan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian, perikanan serta kepastian pasar; (d) menjaga keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim, sistem pertanian

presisi, pengelolaan lahan dan air irigasi; serta (e) meningkatkan tata kelola sistem pangan nasional.

4. **Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan** yang meliputi strategi: (a) menjadikan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) sebagai basis spasial dalam pembangunan perikanan berkelanjutan (*sustainable fisheries*), transformasi kelembagaan dan fungsi WPP, meningkatkan kualitas pengelolaan WPP, serta pengelolaan dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir; (b) mengelola ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan secara berkelanjutan; (c) meningkatkan produksi, produktivitas, standardisasi, jaminan mutu dan keamanan produk kelautan dan perikanan; (d) meningkatkan fasilitasi usaha, pembiayaan, teknologi dan pasar; peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan nelayan terpadu; perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil; serta (e) meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM, inovasi teknologi dan riset kemaritiman, kelautan dan perikanan serta penguatan database kelautan dan perikanan. Di samping itu, terus dilanjutkan upaya penguatan tata kelola dan implementasi kegiatan kemaritiman, serta memperkuat komitmen pelaksanaan target SDG 14 Ekosistem Lautan (*Life Below Water*).



Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi

Arah kebijakan dalam rangka peningkatan nilai tambah ekonomi pada tahun 2020 - 2024 mencakup:

1. **Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi** yang dilaksanakan dengan strategi: (a) meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro kecil dan usaha menengah besar; (b) meningkatkan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha; (c) meningkatkan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi; (d) meningkatkan penciptaan peluang usaha dan start-up; serta (e) meningkatkan nilai tambah usaha sosial.
2. **Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi** yang dilaksanakan dengan strategi: (a) meningkatkan industrialisasi berbasis pengolahan komoditas pertanian, kehutanan, perikanan, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir; (b) meningkatkan industrialisasi melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa; (c) meningkatkan daya saing destinasi dan industri pariwisata yang didukung penguatan rantai pasok dan ekosistem pariwisata; (d) meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital; (e) memperbaiki iklim usaha dan meningkatkan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan; serta (f) mengembangkan industri halal.

Industrialisasi secara umum dilaksanakan melalui: (a) peningkatan produktivitas; (b) penguatan rantai pasok atau nilai melalui harmonisasi kebijakan yang mempengaruhi

efisiensi alur input-proses-output-distribusi, dan pengembangan pemasok; (c) diversifikasi dan peningkatan kualitas produk industri hulu, antara dan hilir untuk penyediaan bahan baku, bahan antara/ penolong dan barang jadi; (d) perluasan pengembangan permesinan termasuk untuk mendukung pemutakhiran mesin-mesin industri dan perluasan aktivitas industri di perdesaan; (e) penguatan infrastruktur pendukung industri, termasuk untuk standardisasi dan sertifikasi; (f) penguatan jasa industri; (g) penguatan penerapan manajemen industri modern; (h) penguatan *circular economy* sebagai sumber efisiensi dan nilai tambah; dan (i) penyediaan insentif untuk penumbuhan dan peningkatan skala industri termasuk melalui pembiayaan industri.

Pengembangan hilirisasi industri pertanian dan kehutanan difokuskan pada pengolahan turunan komoditas utama seperti peternakan, kelapa sawit, kelapa, karet, kayu, rotan, sagu, kakao, kopi, tanaman obat, buah-buahan, florikultura dan rempah-rempah, pengembangan indikasi geografis tanaman jamu/ obat, serta standardisasi proses dan produk jamu nasional. Pengembangannya juga diperkuat dengan pendekatan yurisdiksi berkelanjutan, praktik budidaya pertanian berkelanjutan, dan *agroforestry*.

Pengembangan Kawasan Industri (KI) diutamakan untuk KI di luar Pulau Jawa yang mencakup 9 KI prioritas yang difokuskan pada percepatan penyediaan sarana penunjang, fasilitasi perizinan, peningkatan investasi, revitalisasi pasca bencana, serta kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBUS). Kesembilan KI prioritas yaitu: KI Sei Mangkei, KI Bintan Aerospace, KI Galang Batang, KI Sadai, KI Ketapang, **KI Surya Borneo**, KI Palu, KI Teluk Weda, dan KI Teluk Bintuni.

3. **Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)** dilaksanakan dengan strategi: (a) meningkatkan diversifikasi, nilai tambah, dan daya saing produk ekspor dan jasa; (b) meningkatkan akses dan pendalaman pasar ekspor; (c) mengelola impor; (d) meningkatkan kandungan dan penggunaan produk dalam negeri termasuk melalui pengadaan pemerintah yang efektif; (e) meningkatkan partisipasi dalam jaringan produksi global; (f) meningkatkan citra dan diversifikasi pemasaran pariwisata, serta produk kreatif dan digital; serta (g) meningkatkan efektivitas *Preferential Trade Agreement (PTA)*/ *Free Trade Agreement (FTA)*/ *Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)* dan diplomasi ekonomi.
4. **Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi** yang dilaksanakan dengan strategi: (a) meningkatkan pendalaman sektor keuangan; (b) mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital dan industri 4.0; (c) meningkatkan sistem logistik dan stabilitas harga; (d) meningkatkan penerapan praktik berkelanjutan pada industri pengolahan dan pariwisata; (e) reformasi fiskal; serta (f) meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi perkembangan ekonomi, terutama pangan dan pertanian, kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, maka tujuan pembangunan terkait dengan ekonomi lebih diarahkan untuk **Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mendorong pengembangan ekonomi kreatif serta pemerataan pembangunan melalui konektivitas antar wilayah**, dengan sasaran Meningkatnya pertumbuhan sektor potensial dan industri kreatif dengan mendorong masuknya investasi daerah. Adapun beberapa strategi yang dilaksanakan meliputi:

1. Peningkatan produktivitas disertai dengan Penguatan Daya Saing produk industri pengolahan;
2. Peningkatan penggunaan teknologi industri;
3. Peningkatan produktivitas disertai dengan penguatan daya saing produk agro dan mina industri;
4. Peningkatan penggunaan teknologi pada agro dan mina industri;
5. Peningkatan produksi dan produktivitas pertambangan dan penggalian yang berkelanjutan;
6. Peningkatan dan Penguatan Kelembagaan Koperasi dan UMKM (melalui Reformasi Koperasi, Pengawasan dan Transformasi UMKM informasi menjadi Formal);
7. Pengembangan Produk dan Pemasaran bagi Koperasi dan UMKM;
8. Pengembangan destinasi dan promosi wisata;
9. Peningkatan kualitas SDM dan infrastruktur Pariwisata;
10. Peningkatan Akselerasi dan integrasi industri kepariwisataan;
11. Penciptaan iklim usaha dan investasi yang kondusif;
12. Peningkatan kenyamanan pelayanan dan efisiensi dalam perijinan berinvestasi;
13. Peningkatan promosi dan informasi peluang investasi.

Arah kebijakan Ekonomi Tahun 2023 tidak terlepas dari Tema RKP 2023 yaitu 'Peningkatan Produktivitas **untuk transformasi Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan**' 8 Arah Kebijakan tahun 2023 meliputi ;

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim;
2. Peningkatan kualitas SDM : Kesehatan dan Pendidikan;
3. **Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job**
4. **Mendorong pemulihan dunia usaha;**
5. **Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;**
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim);
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain: air bersih dan sanitasi;
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Maka yang perlu di perhatikan dalam menyusun tema arah kebijakan ekonomi daerah harus berpedoman pada tiga poin yaitu Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job, Mendorong pemulihan dunia usaha dan Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan.

Tema RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 adalah ‘Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Sumberdaya Manusia untuk Mendukung Daya Saing Daerah Menyambut Era Industry Perdagangan dan Jasa Berbasis Agro Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.’”

Selanjutnya dapat ditambahkan 7 prioritas Pembangunan sebagai berikut ;

- 1. Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata**
- 2. Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur**
- 3. Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan**
4. Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal
5. Peningkatan Kemandirian Pangan, dan Pengelolaan Sumber Daya Energi
6. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup
7. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur

Maka yang perlu di perhatikan dalam menyusun tema arah kebijakan ekonomi daerah harus berpedoman pada tiga poin yaitu Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata, Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan

Arah Kebijakan Perekonomian Daerah Kabupaten Banyuwangi tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi yang telah disusun, dimana dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 - 2026, pembangunan terkait dengan ekonomi termuat dalam tujuan 1, yaitu **Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan yang Berdampak pada Penurunan Kemiskinan**, dengan sasaran Meningkatnya Produktifitas dan Daya Saing Potensi Unggulan Daerah yang Berkelanjutan Meningkatnya Lapangan Kerja dan Pemerataan Pendapatan untuk Keberdayaan Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi yang dapat dijalankan adalah dengan Membangun infrastruktur tematik untuk pengembangan pariwisata yang diikuti dengan berkembangnya produktivitas sektor UMKM dan Pertanian yang disertai penguatan investasi, akses pasar dan pendampingan pelaku usaha yang mampu menyerap tenaga kerja lokal dan tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan serta strategi meningkatkan kesejahteraan keluarga di desa melalui penyediaan lapangan kerja yang padat karya dan bantuan permodalan wirausaha dengan memperhatikan peran perempuan dalam keberpihakan akses pendapatan dan perlindungan hukum.

Dengan memperhatikan telaah pada arah kebijakan nasional dan Jawa Timur pada yang tertuang pada RKP tahun 2023. Maka di tetapkan arah kebijakan ekonomi Banyuwangi yaitu:

- 1. Mempercepat transformasi digital sektor pertanian, pariwisata, dan UMKM**
- 2. Pembangunan infrastruktur terintegrasi penunjang kawasan ekonomi strategis guna membuka kesempatan kerja baru**

Adapun beberapa arah kebijakan yang lebih operasional yang dapat dilaksanakan meliputi:

- Bantuan Penyediaan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan
- Penguatan Kelembagaan kelompok petani dan nelayan dalam meningkatkan manajemen pengelolaan
- Bantuan stimulan asuransi gagal panen pada petani dan nelayan
- penguatan pengenalan konsumsi perikanan tangkap maupun budidaya lokal
- peningkatan infrastruktur irigasi dan embung untuk menanggulangi debit air dan kekeringan
- penyediaan sistem penyediaan air bersih di kawasan pedesaan
- peningkatan kualitas jalan penunjang perekonomian masyarakat
- Percepatan infrastruktur tematik dan fasilitas publik pendukung kawasan pariwisata strategis
- Penguatan jaringan usaha dan kemitraan usaha mikro dengan menjalin kolaborasi pasar domestik maupun luar negeri
- Penguatan Kualitas dan diversifikasi produk UMKM serta kelembagaan pelaku usaha UMKM melalui pendampingan UMKM naik kelas dan siap ekspor
- Peningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang, pengembangan pasar dalam dan luar negeri, serta perlindungan konsumen dan pasar tradisional
- Pendampingan kelembagaan, sertifikasi dan bantuan kepada pelaku pariwisata dan ekraf
- Peningkatan Promosi Pariwisata Kabupaten Banyuwangi Lokal Pasca Pandemi Covid-19
- Pengendalian alih fungsi lahan produktif dan rehabilitasi lahan kritis guna meningkatkan kualitas penataan ruang
- Mengurangi pencemaran air dan reduksi emisi karbon dengan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup
- pengelolaan persampahan bersama masyarakat
- Membangun konektivitas perhubungan
- Peningkatan mitigasi dan penanggulangan bencana
- teknologi untuk memenuhi Kebutuhan Pasar.
- Mengembangkan klaster industri, kemitraan dan pemanfaatan teknologi untuk menyerap tenaga kerja.
- Pelaksanaan inkubasi bisnis penciptaan pengusaha muda baru sebagai skema pemulihan ekonomi.
- Pengembangan ekonomi desa dengan kemitraan dan BUMDes yang berfokus pada pariwisata, pertanian dan UMKM.
- Peningkatan ketahanan keluarga melalui kesempatan pendidikan dan usaha bagi perempuan serta bantuan hukum perlindungan perempuan dan anak
- Peningkatan bantuan usaha dan logistik bagi PMKS yang tepat sasaran.

3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.2.1 Penghitungan Kapasitas Keuangan Daerah

3.2.1.1. Analisis Penghitungan Penerimaan Daerah

1. Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Keuangan daerah memiliki peran yang sangat penting dalam dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yakni dalam rangka pembiayaan pelaksanaan pembangunan yang sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah yang dimiliki. Oleh karena itu perlu disusun sebuah kebijakan mengenai keuangan daerah yang cermat dan akurat agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik.

Keuangan Daerah terdiri atas penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Pendapatan daerah merupakan bentuk dari penerimaan daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah terdiri atas 3 komponen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer yang terdiri atas Transfer Dari Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah, serta Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi cenderung mengalami tren meningkat dalam kurun waktu 5 tahun (2018 - 2022) akan tetapi mengalami sedikit penurunan pada dua tahun terakhir. Untuk lebih jelasnya realisasi dan rata-rata pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi tahun anggaran 2018 hingga 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.4. Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018 – 2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	APBD 2022	Rata-rata Pertumbuhan (%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	PENDAPATAN	2,997,644,018,346.54	3,143,282,624,113.33	3,267,186,614,944.60	3,181,210,231,920.83	2,989,972,508,533.00	0.04%
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	450,066,949,215.18	495,691,172,682.08	482,740,174,377.22	520,021,954,381.20	518,001,960,943.00	3.71%
1.1.1.	Pajak daerah	178,917,948,412.33	196,835,027,082.59	191,620,754,462.00	206,146,187,700.00	202,758,444,613.00	3.33%
1.1.2.	Retribusi daerah	45,463,161,118.00	48,292,208,982.40	45,631,411,394.00	43,211,935,541.00	73,860,633,768.00	16.58%
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	15,169,787,750.70	16,659,277,057.90	20,666,815,797.40	21,491,551,361.34	25,000,000,000.00	13.55%
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	210,516,051,934.15	233,904,659,559.19	224,821,192,723.82	249,172,279,778.86	216,382,882,562.00	1.22%
1.2	Pendapatan Transfer	2,416,047,253,365.00	2,521,085,575,825.00	2,339,531,673,666.00	2,500,041,854,276.00	2,408,739,805,597.00	0.09%
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	2,203,199,795,537.00	2,277,156,675,363.00	2,157,953,688,002.00	2,244,848,461,387.00	2,300,079,443,000.00	1.15%
1.2.1.1	Dana Perimbangan	1,960,992,382,687.00	2,005,264,847,963.00	1,852,125,074,002.00	1,982,325,720,387.00	2,045,645,290,000.00	1.21%
1.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil	161,490,144,982.00	163,512,357,403.00	-	-	-	-24.69%
1.2.1.1.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	1,375,784,247,000.00	1,438,463,198,000.00	1,463,768,018,106.00	1,622,205,084,853.00	1,475,213,546,000.00	2.02%
1.2.1.1.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	423,717,990,705.00	403,289,292,560.00	388,357,055,896.00	360,120,635,534.00	570,431,744,000.00	10.65%
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	-	-	94,924,042,000.00	42,442,282,000.00	32,723,793,000.00	-5.72%
1.2.1.3	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-	0.00%
1.2.1.4	Dana Keistimewaan	-	-	-	-	-	0.00%
1.2.1.5	Dana Desa	-	-	210,904,572,000.00	220,080,459,000.00	221,710,360,000.00	0.19%
1.2.1.6	Dana Penyesuaian	242,207,412,850.00	271,891,827,400.00	-	-	-	-
1.2.2	Transfer Antar-Daerah	212,847,457,828.00	243,928,900,462.00	181,577,985,664.00	255,193,392,889.00	108,660,362,597.00	-6.96%
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	203,200,571,328.00	236,071,359,365.00	173,818,367,314.00	247,238,037,389.00	108,660,362,597.00	-6.00%
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	9,646,886,500.00	7,857,541,097.00	7,759,618,350.00	7,955,355,500.00	-	-29.32%
1.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	131,529,815,766.36	126,505,875,606.25	444,914,766,901.38	161,146,423,263.63	63,230,741,993.00	30.83%
1.3.1	Hibah	131,529,815,766.36	126,505,875,606.25	146,836,659,652.38	145,516,896,475.63	11,982,000,000.00	-20.10%
1.3.2	Dana darurat	-	-	-	-	-	0.00%
1.3.3	Lain-lain pendapatan	-	-	298,078,107,249.00	15,629,526,788.00	51,248,741,993.00	33.29%

Sumber: LRA Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018 - 2021 dan APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022

Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi secara umum menunjukkan tren yang positif pada 3 tahun pertama yaitu tahun anggaran 2018 - 2020. Pada tahun 2018 - 2020 tersebut Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi terus meningkat pada setiap tahunnya dari Rp. 2.997.644.018.346,54 di tahun 2018 hingga menjadi Rp. 3.267.186.614.944,60 di tahun 2020, akan tetapi pada tahun 2021 Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam laporan realisasi anggaran tahun 2021 diperkirakan mengalami penurunan sebesar -2,63% dengan nilai sebesar Rp. 3.181.210.231.920,83. Tren penurunan pendapatan kemudian berlanjut pada tahun 2022 yang dapat dilihat pada APBD 2022 yakni sebesar Rp. 2.989.972.508.533,00 atau mengalami penurunan -6,01% dari tahun sebelumnya. Asumsi terjadinya penurunan Pendapatan Daerah di tahun 2021 dikarenakan adanya penurunan yang cukup besar pada lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan persentase -63,78%. Lebih terperinci penurunan sebesar -94,76% yakni pada komponen lain-lain pendapatan. Komponen hibah juga demikian, menurun tipis dari tahun sebelumnya mencapai 0,9%. Sedangkan pada tahun 2022 yang tertuang dalam APBD tahun 2022 menunjukkan, penurunan terjadi pada semua komponen pendapatan. Pendapatan asli daerah turun -0,39%, pendapatan transfer turun mencapai -3,65%, sedangkan dua komponen terbesar yang mengalami penurunan ialah transfer antar daerah yang turun mencapai -57,42% dan lain-lain pendapatan daerah yang sah mencapai -60,76%. Pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan yang keduanya merupakan komponen dari transfer antar daerah turun cukup drastis mencapai -56,05% untuk pendapatan bagi hasil dan -100% pada bantuan keuangan. Sedangkan pada komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah, komponen paling merosot ialah hibah yang mencapai -91,77%.

Melihat pada rata-rata pertumbuhan masing-masing komponen pendapatan maka dapat diketahui bahwa Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah memiliki nilai rata-rata pertumbuhan paling tinggi yaitu sebesar 30,83%. Meskipun memiliki rata-rata pertumbuhan paling tinggi, tetapi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada tahun 2018 realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Banyuwangi tercatat Rp. 131.529.815.766,36. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah menurun menjadi Rp. 126.505.875.606,25 pada tahun 2019, dan kembali meningkat cukup tinggi pada tahun 2020 dengan pertumbuhan mencapai sebesar 251,69% menjadi Rp. 444.914.766.901,38. Akan tetapi pada tahun 2021 (LRA Audited 2021) realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah kembali menurun sebesar -63,78% atau menjadi Rp. 161.146.423.263,63. Tahun 2022 mengalami penurunan kembali mencapai -60,76% yakni pada angka lain-lain pendapatan daerah yang sah mencapai Rp 63.230.741.993,00.

Selanjutnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi yang memiliki rata-rata pertumbuhan tertinggi setelah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, yaitu sebesar 3,71%. Sedangkan satu komponen pendapatan lainnya yaitu Pendapatan Transfer memiliki rata-rata pertumbuhan yang paling kecil pada angka 0,09%. Melihat pada nilai realisasi PAD Kabupaten Banyuwangi maka menunjukkan tren yang meningkat pada setiap tahunnya terkecuali pada tahun 2020 yang sempat menurun sebesar -2,61% dan tahun 2022 yang mencapai -0,39%. Di tahun pertama yaitu pada tahun 2018 jumlah PAD Kabupaten Banyuwangi menunjukkan angka Rp. 450.066.949.215,18 dan terus meningkat pada kurun waktu 5 tahun hingga pada tahun 2022 menjadi Rp. 518.001.960.943,00.

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terus meningkat terhadap Pendapatan Daerah diharapkan dapat meningkatkan desentralisasi fiskal pada Kabupaten Banyuwangi. Perbandingan angka Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2022 terhadap Pendapatan Daerah

tahun 2022 menghasilkan nilai desentralisasi fiskal sebesar 17,32% yang mengalami peningkatan dari nilai desentralisasi fiskal tahun 2021 sebesar 16,35% dan tahun 2020 sebesar 14,78%. Akan tetapi dengan nilai yang telah meningkat tersebut menunjukkan tingkat desentralisasi fiskal yang masih termasuk dalam kategori kurang, karena berada pada range angka 10,01 - 20,00. Untuk mengetahui kriteria dan nilai rasio desentralisasi fiskal Kabupaten Banyuwangi dalam beberapa tahun terakhir untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

Tabel 3.5. Kriteria Tingkat Desentralisasi Fiskal

Persentase PAD terhadap Total Pendapatan Daerah	Tingkat Desentralisasi Fiskal
0,00 - 10,00	Sangat Kurang
10,01 - 20,00	Kurang
20,01 - 30,00	Sedang
30,01 - 40,00	Cukup
40,01 - 50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Tabel 3.6. Nilai Tingkat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Banyuwangi

Keterangan	2020	2021	2022
Nilai	14,78%	16,35%	17,32%
Kriteria	KURANG	KURANG	KURANG

Sumber: data diolah, 2022

Tingkat Desentralisasi Fiskal adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Rasio desentralisasi fiskal menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pengelolaan keuangan daerah menunjukkan ukuran keberhasilan suatu daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah, maka semakin tinggi kemampuan keuangan daerah dalam membiayai urusan pembangunan, pelayanan, dan pemerintahannya. Angka 17,32% pada tahun 2022 menunjukkan bahwa tingkat desentralisasi fiskal Kabupaten Banyuwangi telah mendekati tingkat sedang. Kemampuan desentralisasi keuangan daerah Kabupaten Banyuwangi dalam memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah untuk membiayai urusan pembangunan, pelayanan, dan pemerintahannya terus ditingkatkan sehingga nilai desentralisasi fiskal dapat mendekati kriteria sedang.

Adanya tren meningkat pada nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta kecilnya rata-rata pertumbuhan pada Pendapatan Transfer dapat mengindikasikan bahwa Kabupaten Banyuwangi semakin mandiri dalam melaksanakan pengelolaan keuangannya. Tingkat kemandirian keuangan

daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai rumah tangganya sendiri tanpa bergantung pada dana yang diberikan pemerintah pusat, sehingga dalam hal ini daerah hanya mengandalkan dari penerimaan pajak daerah sebagai sumbernya. Rasio kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dari rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap jumlah bantuan pemerintah pusat dan pinjaman. Adapun hasil perhitungan dan kriteria penilaiannya dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

Tabel 3.7. Kriteria Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0 - 25	Instruktif
Rendah	25 - 50	Konsultatif
Sedang	50 - 75	Partisipatif
Tinggi	75 - 100	Delegatif

Tabel 3.8. Nilai Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Banyuwangi

Keterangan	2020	2021	2022
Nilai	20,63%	20,80%	21,51%
Kriteria	INSTRUKTIF	INSTRUKTIF	INSTRUKTIF

Sumber: data diolah, 2021

Perbandingan angka Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2022 terhadap bantuan pemerintah pusat dan pinjaman tahun 2022 menunjukkan nilai kemandirian keuangan daerah sebesar 21,51% yang mengalami peningkatan dari nilai kemandirian keuangan daerah tahun 2021 sebesar 20,80% dan tahun 2020 sebesar 20,63%. Nilai rasio kemandirian keuangan pada tahun 2020 sampai pada tahun 2022 tersebut berkisar pada angka 0 - 25 yang jika dilihat pada tabel pola hubungan dan tingkat kemampuan daerah, maka range angka tersebut menggambarkan kemampuan Kabupaten Banyuwangi yang masih **sangat rendah** dan memiliki pola hubungan **instruktif** dalam membiayai urusan pemerintahan, pembangunan, dan layanan kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi masih sangat bergantung pada Pemerintah Pusat dalam hal keuangan melalui Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer antar Daerah.

1. Analisis Sumber Pendapatan Daerah

Analisis Sumber Pendapatan Daerah dilakukan untuk memperoleh gambaran proporsi dari setiap sumber pendapatan daerah yang paling dominan kontribusinya terhadap pendapatan daerah. Pendapatan Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Untuk melihat persentase masing-masing sumber Pendapatan Daerah terhadap total Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2018 hingga 2022 secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.9. Persentase Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018 -2022

No.	Uraian	Proporsi					Rata-rata Proporsi (%)
		2018	2019	2020	2021	APBD 2022	
1	PENDAPATAN	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	15.01%	15.77%	14.78%	16.35%	17.32%	15.85%
1.1.1.	Pajak daerah	5.97%	6.26%	5.87%	6.48%	6.78%	6.27%
1.1.2.	Retribusi daerah	1.52%	1.54%	1.40%	1.36%	2.47%	1.66%
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	0.51%	0.53%	0.63%	0.68%	0.84%	0.64%
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	7.02%	7.44%	6.88%	7.83%	7.24%	7.28%
1.2	Pendapatan Transfer	80.60%	80.21%	71.61%	78.59%	80.56%	78.31%
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	73.50%	72.45%	66.05%	70.57%	76.93%	71.90%
1.2.1.1	Dana Perimbangan	65.42%	63.80%	56.69%	62.31%	68.42%	63.33%
1.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil	5.39%	5.20%	0.00%	0.00%	0.00%	2.12%
1.2.1.1.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	45.90%	45.76%	44.80%	50.99%	49.34%	47.36%
1.2.1.1.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	14.14%	12.83%	11.89%	11.32%	19.08%	13.85%
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	0.00%	0.00%	2.91%	1.33%	1.09%	1.07%
1.2.1.3	Dana Otonomi Khusus	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
1.2.1.4	Dana Keistimewaan	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
1.2.1.5	Dana Desa	0.00%	0.00%	6.46%	6.92%	7.42%	4.16%
1.2.1.6	Dana Penyesuaian	8.08%	8.65%	0.00%	0.00%	0.00%	3.35%
1.2.2	Transfer Antar-Daerah	7.10%	7.76%	5.56%	8.02%	3.63%	6.41%
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	6.78%	7.51%	5.32%	7.77%	3.63%	6.20%
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	0.32%	0.25%	0.24%	0.25%	0.00%	0.21%
1.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	4.39%	4.02%	13.62%	5.07%	2.11%	5.84%
1.3.1	Hibah	4.39%	4.02%	4.49%	4.57%	0.40%	3.58%
1.3.2	Dana darurat	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
1.3.3	Lain-lain pendapatan	0.00%	0.00%	9.12%	0.49%	1.71%	2.27%

Sumber: LRA Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018 - 2021 dan APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022 (diolah)

Berdasarkan tabel proporsi sumber-sumber pendapatan diatas maka dapat diketahui bahwa sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2018 -2022 paling banyak disumbang oleh Pendapatan Transfer yang memiliki rata-rata proporsi lebih dari 50%, yaitu sebesar 78,31%. Selanjutnya Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi disumbang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan rata-rata proporsi sebesar 15,85%. Sisanya sebesar 5,84% dari Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi disumbang oleh Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Meskipun memiliki rata-rata proporsi yang paling besar diantara 3 komponen Pendapatan Daerah, akan tetapi besaran proporsi Pendapatan Transfer memiliki kecenderungan menurun dengan titik tertinggi pada tahun 2018 sebesar 80,60% dan titik terendah pada tahun 2020 sebesar 71,61%. Proporsi Pendapatan Transfer yang besar paling banyak disumbang oleh Transfer dari

Pemerintah Pusat dengan rata-rata pertahunnya sebesar 71,90%. Angka proporsi Transfer dari Pemerintah Pusat yang tinggi ini diperoleh dari tingginya proporsi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang didapatkan oleh Kabupaten Banyuwangi pada setiap tahunnya, sehingga rata-rata proporsi DAU pada tahun 2018 hingga 2022 menunjukkan angka 47,86% dan DAK sebesar 13,85%. Sedangkan Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan sebagai komponen dari Transfer Pemerintah Pusat tidak pernah terealisasi dan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi pada setiap tahunnya dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

Berbeda dengan proporsi pada Pendapatan Transfer, maka nilai proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyuwangi menunjukkan kecenderungan meningkat. Dengan kontribusi sebesar 15,01% di tahun 2018 kemudian perlahan meningkat hingga pada tahun 2022 diperkirakan menjadi 17,32% meskipun sempat menurun pada tahun 2020 pada angka 14,78%. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara lain berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan, serta Lain-lain PAD yang Sah. Dari ke empat sumber tersebut, Lain-lain PAD yang Sah memiliki sumbangsih paling besar terhadap Pendapatan Daerah yaitu dengan rata-rata proporsi sebesar 7,28% dan Pajak daerah dengan rata-rata proporsi sebesar 6,27%. Sedangkan sumbangsih terkecil dalam komponen PAD adalah Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan yang pada setiap tahunnya memiliki kontribusi kurang dari 1%, yaitu dengan rata-rata proporsi sebesar 0,64%.

Sedangkan pada Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, kontribusi dalam komponennya hanya disumbang oleh Hibah dengan rata-rata proporsi sebesar 3,65% dan Lain-lain Pendapatan dengan rata-rata setiap tahunnya mencapai 2,19%. Secara umum nilai proporsi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dari tahun 2018 hingga tahun 2022 berada pada angka 5,84%, pada tahun 2020 dengan adanya tambahan dari komponen Lain-lain Pendapatan sebesar Rp. 298.078.107.249,00 menambah besaran proporsi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah hingga memiliki proporsi menjadi sebesar 13,62%. Melihat hasil perhitungan terhadap proporsi sumber-sumber pendapatan Kabupaten Banyuwangi menunjukkan bahwa proporsi terbesar adalah pada Pendapatan Transfer, sedangkan proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih kecil, maka kondisi tersebut sesuai dengan penjelasan sebelumnya bahwa kemandirian keuangan daerah Kabupaten Banyuwangi masih tergolong rendah karena dalam pembiayaan pemerintahannya masih mengandalkan bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi.

2. Analisis Kinerja Realisasi Pendapatan

Analisis kinerja realisasi Pendapatan Daerah dirumuskan untuk mengetahui perkembangan realisasi setiap objek Pendapatan Daerah. Analisis kinerja realisasi pendapatan daerah dilaksanakan dengan membandingkan antara nilai yang dianggarkan dalam perubahan APBD dengan realisasi pendapatan daerah pada tahun tertentu. Untuk melihat kinerja realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.10. Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018 – 2021

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021
		(%)	(%)	(%)	(%)
1	PENDAPATAN	96.30%	96.67%	101.01%	95.45%
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	72.11%	95.77%	85.41%	113.98%
1.1.1.	Pajak daerah	69.93%	93.79%	95.72%	109.03%
1.1.2.	Retribusi daerah	60.57%	86.47%	65.76%	168.82%

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021
		(%)	(%)	(%)	(%)
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	69.06%	106.77%	84.77%	113.44%
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	77.59%	99.00%	82.89%	108.62%
1.2	Pendapatan Transfer	102.38%	98.08%	99.32%	92.38%
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	101.25%	95.76%	97.87%	98.04%
1.2.1.1	Dana Perimbangan	101.41%	95.25%	97.53%	97.79%
1.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil	139.98%	84.46%	0.00%	0.00%
1.2.1.1.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	100.00%	100.00%	97.63%	82.34%
1.2.1.1.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	95.74%	85.22%	97.16%	126.45%
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%
1.2.1.3	Dana Otonomi Khusus	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
1.2.1.4	Dana Keistimewaan	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
1.2.1.5	Dana Desa	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%
1.2.1.6	Dana Penyesuaian	100.00%	99.71%	0.00%	0.00%
1.2.2	Transfer Antar-Daerah	115.66%	126.80%	120.53%	42.58%
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	116.47%	128.11%	121.64%	43.95%
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	100.78%	97.04%	100.00%	0.00%
1.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	102.16%	97.03%	141.76%	83.14%
1.3.1	Hibah	102.16%	97.03%	103.33%	92.06%
1.3.2	Dana darurat	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
1.3.3	Lain-lain pendapatan	0.00%	0.00%	173.55%	0.00%

Sumber: LRA Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018 - 2021 (diolah)

Kinerja Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2018 hingga 2021 menunjukkan tren yang positif dengan adanya peningkatan kinerja pada setiap tahunnya. Pada tahun 2018 perbandingan realisasi Pendapatan Daerah dengan anggaran Pendapatan daerah menunjukkan angka 96,30%. Kemudian pada tahun 2019 Pendapatan Daerah terealisasi 96,67% dari yang dianggarkan. Nilai kinerja dari realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi terus meningkat hingga pada tahun 2020 menjadi 101,01% dan kembali turun menjadi 95,45% pada tahun 2021.

Berbeda dengan tren yang muncul pada perhitungan kinerja Pendapatan Daerah, kinerja pada masing-masing komponen Pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah memiliki tren hasil kinerja yang fluktuatif. Fluktuasi juga terjadi pada perhitungan kinerja Pendapatan Transfer, menurunnya kinerja Dana Bagi Hasil dalam Dana Perimbangan pada tahun 2019 menyebabkan kinerja Pendapatan Transfer pada tahun tersebut sedikit menurun dari tahun 2018, sedangkan pada tahun 2020 kembali meningkat dan 2021 kinerjanya kembali menurun akan tetapi dengan nilai kinerja yang masih lebih rendah bila dibandingkan pada tahun 2018.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan komponen Pendapatan dengan nilai kinerja paling tinggi diantara 2 komponen lainnya. Nilai terendah dari kinerja Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berada pada angka 83,14% yang terjadi pada tahun 2021. Sedangkan kinerja tertinggi yang dapat dicapai adalah 141,76% yang terjadi pada tahun 2020. Tingginya nilai kinerja pada Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dikarenakan capaian kinerja pada masing-masing komponennya yang juga tinggi. Selain komponen pada tahun tertentu yang tidak terdapat

anggaran ataupun realisasi, maka kinerja secara umum menunjukkan angka yang lebih dari 100% anggaran, terkecuali pada Dana Hibah di tahun 2019 dan 2021 dengan kinerja sebesar 97,03% dan 92,06%.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah satu-satunya komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi yang selama 4 tahun berturut-turut (2017 - 2020) tidak pernah mencapai hasil kinerja 100% dari anggaran. Namun trend kinerja kurang baik tersebut dijawab tuntas pada tahun 2021 dengan presentase sebesar 113,98%. Pada tahun 2018 capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 72,11% dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 hingga menjadi 95,77%. Nilai kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyuwangi kembali mengalami penurunan menjadi 85,41% di tahun 2020 dan akhirnya dapat melampaui target dengan persentase sebesar 113,98% pada tahun 2021.

3.2.1.2. Analisis Penghitungan Pengeluaran Daerah

3. Kinerja Realisasi Belanja Daerah

Pengeluaran daerah dapat dilihat dari belanja daerah yang terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Sedangkan belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, dan Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/ atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Untuk mengetahui secara lebih jelas terkait dengan hasil rata-rata pertumbuhan realisasi Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.11. Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018 - 2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	LRA Unaudited 2021	APBD 2022	Rata-rata Pertumbuhan (%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
2	BELANJA	Rp 2,753,665,811,332.60	Rp 3,021,315,752,989.13	Rp 3,140,479,804,668.47	Rp 3,093,593,254,516.97	Rp 3,014,992,377,641.00	2.41%
2.1	Belanja Operasi	Rp 1,945,420,887,034.24	Rp 2,087,908,048,366.24	Rp 2,097,944,747,525.44	Rp 1,986,204,516,139.36	Rp 2,070,759,313,951.00	1.68%
2.1.1	Belanja Pegawai	Rp 1,185,271,560,490.67	Rp 1,181,297,068,018.67	Rp 1,089,065,087,928.26	Rp 1,077,767,889,579.00	Rp 922,468,149,121.00	-5.90%
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	Rp 676,695,287,639.77	Rp 826,714,837,347.57	Rp 802,356,277,246.18	Rp 812,104,772,920.36	Rp 999,041,095,330.00	10.86%
2.1.3	Belanja Bunga	Rp 14,836,209,103.80	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0.00%
2.1.4	Belanja Subsidi	Rp -	0.00%				
2.1.5	Belanja Hibah	Rp 61,221,365,000.00	Rp 63,169,340,000.00	Rp 180,849,655,351.00	Rp 35,181,062,240.00	Rp 134,938,069,500.00	98.12%
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	Rp 7,396,464,800.00	Rp 16,726,803,000.00	Rp 25,673,727,000.00	Rp 61,150,791,400.00	Rp 14,312,000,000.00	60.31%
2.2	Belanja Modal	Rp 480,382,663,298.36	Rp 529,542,999,045.89	Rp 558,244,296,362.03	Rp 661,103,400,609.61	Rp 504,235,179,417.00	2.59%
2.2.1	Belanja Modal Tanah	Rp 17,236,577,363.00	Rp 163,772,791.00	Rp 51,868,800.00	Rp -	Rp 11,530,000,000.00	-66.84%
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 89,525,778,055.06	Rp 91,456,350,790.66	Rp 122,673,468,936.60	Rp 94,308,993,620.40	Rp 97,271,544,980.00	4.08%
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 109,612,985,076.37	Rp 135,227,013,081.81	Rp 129,356,513,551.00	Rp 148,719,626,588.21	Rp 96,919,634,537.00	-0.21%
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 260,540,727,453.93	Rp 302,054,399,032.42	Rp 304,976,409,004.43	Rp 414,624,441,901.00	Rp 287,863,040,345.00	5.57%
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp 3,466,595,350.00	Rp 641,463,350.00	Rp 1,186,036,070.00	Rp 3,450,338,500.00	Rp 10,650,959,555.00	100.75%
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	Rp -	0.00%				
2.3	Belanja Tidak Terduga	Rp -	Rp 295,756,250.00	Rp 90,224,430,281.00	Rp 29,019,869,108.00	Rp 29,019,869,108.00	-16.96%
2.4	Belanja Transfer	Rp 327,862,261,000.00	Rp 403,568,949,327.00	Rp 394,066,330,500.00	Rp 417,265,468,660.00	Rp 410,978,015,165.00	6.28%
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	Rp 11,427,967,700.00	Rp 26,320,409,997.00	Rp 26,390,119,500.00	Rp 21,013,403,477.00	Rp 20,193,979,415.00	26.58%
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	Rp 316,434,293,300.00	Rp 377,248,539,330.00	Rp 367,676,211,000.00	Rp 396,252,065,183.00	Rp 390,784,035,750.00	5.77%

Sumber: LRA Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 - 2020 dan APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021

Berdasarkan data pada tabel rata-rata pertumbuhan realisasi belanja daerah sebagaimana yang telah disajikan di atas dapat diketahui bahwa rata-rata pertumbuhan belanja daerah Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2018 hingga 2022 tercatat sebesar 2,41%. Tren pertumbuhan realisasi belanja daerah mengalami fluktuatif dalam setiap tahunnya, dimana pada tahun 2019 pertumbuhan realisasi belanja daerah mencapai -9,72%, sedangkan pada tahun 2020 mengalami pertumbuhan positif sebesar 3,94%. Pada tahun 2021 persentase pertumbuhan belanja daerah Kabupaten Banyuwangi mengalami penurunan mencapai -1,49%, dan berdasarkan data APBD 2022 tingkat pertumbuhan belanja daerah pada tahun 2022 diperkirakan akan turun mencapai -2,54%. Melihat kondisi pada masing-masing jenis belanja, belanja daerah dengan pertumbuhan terbesar adalah belanja aset modal mencapai 7.584,63%, yang disebabkan oleh adanya peningkatan jumlah realisasi pada tahun 2020 yaitu dari Rp. 295.756.250,00 pada tahun 2019 menjadi Rp. 90.224.430.281,00. Belanja daerah dengan pertumbuhan terendah adalah belanja modal tanah mencapai -66,84%, dimana belanja modal tanah cukup fluktuatif, dimana belanja terbesar ialah pada tahun 2018 dengan nilai 17M dan kemudian turun pada tahun 2019 diangka 163juta.. Sedangkan belanja subsidi dan belanja aset tetap lainnya rata-rata pertumbuhan sebesar 0% karena tidak terdapat realisasi dalam setiap tahunnya.

4. Analisis Proporsi Sumber Belanja Daerah

Analisis proporsi sumber Belanja Daerah dilakukan untuk memperoleh gambaran proporsi dari setiap sumber belanja daerah yang paling dominan kontribusinya. Sumber belanja daerah mencakup 4 jenis belanja, yaitu: belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Untuk melihat persentase proporsi sumber belanja daerah Kabupaten Banyuwangi secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.12. Proporsi Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018 – 2022

No.	Uraian	Proporsi					Rata-rata Proporsi (%)
		2018	2019	2020	2021	APBD 2022	
2	BELANJA	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
2.1	Belanja Operasi	70.65%	69.11%	66.80%	64.20%	68.68%	67.89%
2.1.1	Belanja Pegawai	43.04%	39.10%	34.68%	34.84%	30.60%	36.45%
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	24.57%	27.36%	25.55%	26.25%	33.14%	27.37%
2.1.3	Belanja Bunga	0.54%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.11%
2.1.4	Belanja Subsidi	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2.1.5	Belanja Hibah	2.22%	2.09%	5.76%	1.14%	4.48%	3.14%
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	0.27%	0.55%	0.82%	1.98%	0.47%	0.82%
2.2	Belanja Modal	17.45%	17.53%	17.78%	21.37%	16.72%	18.17%
2.2.1	Belanja Modal Tanah	0.63%	0.01%	0.00%	0.00%	0.38%	0.20%
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.25%	3.03%	3.91%	3.05%	3.23%	3.29%
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.98%	4.48%	4.12%	4.81%	3.21%	4.12%
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	9.46%	10.00%	9.71%	13.40%	9.55%	10.42%
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0.13%	0.02%	0.04%	0.11%	0.35%	0.13%
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

No.	Uraian	Proporsi					Rata-rata Proporsi (%)
		2018	2019	2020	2021	APBD 2022	
2.3	Belanja Tidak Terduga	0.00%	0.01%	2.87%	0.94%	0.96%	0.96%
2.4	Belanja Transfer	11.91%	13.36%	12.55%	13.49%	13.63%	12.99%
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	0.42%	0.87%	0.84%	0.68%	0.67%	0.70%
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	11.49%	12.49%	11.71%	12.81%	12.96%	12.29%

Sumber: LRA Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018 - 2021 dan APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022 (diolah)

Melihat data proporsi belanja daerah Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2018 hingga 2021 dan APBD 2022 menunjukkan bahwa setiap tahunnya porsi belanja terbesar didominasi oleh belanja operasi khususnya pada belanja pegawai yang pada tahun 2021 menunjukkan proporsi sebesar 34,84%, kemudian disusul oleh belanja barang dan jasa sebesar 26,25% sehingga belanja operasi tercatat sebagai porsi alokasi belanja terbesar dengan total mencapai 64,20% pada tahun 2021. Persentase proporsi belanja operasi mendominasi belanja daerah hampir setengah lebih dari total belanja. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Sedangkan belanja modal memiliki alokasi/ porsi pada tahun 2021 sebesar 21,37% dan belanja transfer dengan proporsi sebesar 13,49%.

5. Analisis Pengeluaran Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan Dana Cadangan, dan/ atau pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Pengeluaran pembiayaan mencakup:

- a. Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;
- b. Penyertaan modal daerah;
- c. Pembentukan Dana Cadangan;
- d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/ atau
- e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mengetahui secara lebih jelas terkait dengan rata-rata pertumbuhan realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Banyuwangi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.13. Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018 - 2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	APBD 2022	Rata-rata Pertumbuhan (%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
3	PEMBIAYAAN	Rp 693,063,527,542	Rp 65,113,714,660	Rp 191,180,583,675	Rp 320,994,127,944	Rp 34,000,000,000	20.37%
3.1	Penerimaan Pembiayaan	Rp 257,081,585,805	Rp 65,113,714,660	Rp 187,080,583,675	Rp 310,594,127,944	Rp 25,000,000,000	21.68%
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	Rp 38,173,792,436	Rp 65,077,764,660	Rp 187,080,583,675	Rp 310,594,127,944	Rp 25,000,000,000	58.01%
	Penghematan Belanja						
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0.00%
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0.00%
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	Rp 218,860,543,369	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0.00%
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	Rp 47,250,000	Rp 35,950,000	Rp -	Rp -	Rp -	-30.98%
3.1.6	Penerimaan Pembiayaan lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0.00%
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	Rp 435,981,941,737	Rp -	Rp 4,100,000,000	Rp 10,400,000,000	Rp 9,000,000,000	-28.37%
3.2.1.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	Rp 435,981,941,737	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0.00%
3.2.2.	Penyertaan Modal Daerah	Rp -	Rp -	Rp 4,100,000,000	Rp 10,400,000,000	Rp 9,000,000,000	-3.37%
3.2.3.	Pembentukan Dana Cadangan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0.00%
3.2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0.00%
3.2.5.	Pengeluaran Pembiayaan lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0.00%

Sumber: LRA Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018 - 2021 dan APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022

Berdasarkan data rata-rata pertumbuhan realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2018 - 2021 dan APBD 2022 diketahui bahwa penerimaan pembiayaan memiliki nilai rata-rata pertumbuhan sebesar 21,68%. Rata-rata pertumbuhan pada penerimaan pembiayaan yang memiliki nilai paling besar, yaitu terdapat pada SiLPA sebesar 58,01%. Pada tahun 2018 realisasi SiLPA sebesar Rp 38.173.792.436,05, pada tahun 2019 sebesar Rp. 65.077.764.659,93, pada tahun 2020 sebesar Rp. 187.080.583.675,13, pada tahun 2021 sebesar Rp. 310.594.065.944, dan pada APBD 2022 diperkirakan SiLPA ditargetkan sebesar Rp. 25.000.000.000. Sedangkan pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan pembiayaan lainnya memiliki rata-rata pertumbuhan 0% karena tidak ada realisasi setiap tahunnya. Untuk pengeluaran pembiayaan di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2018 hingga 2022 terdiri dari Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo yang hanya terealisasi pada tahun 2018 sebanyak Rp. 435.981.941.737,30, serta Penyertaan Modal Daerah yang terealisasi pada tahun 2020 dan tahun 2021 dengan jumlah realisasi masing-masing sebanyak Rp. 4.100.000.000,00 dan Rp. 10.400.000.000. Pada APBD 2022 realisasi Penyertaan Modal Daerah di Kabupaten Banyuwangi diperkirakan/ dianggarkan sebanyak Rp. 9.000.000.000,00.

3.2.2 Arah Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2023 bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2023 diproyeksikan lebih rendah dibandingkan dengan realisasi yang terjadi pada tahun 2021 maupun APBD Tahun 2022, yaitu mencapai Rp. 2.504.159.201.065, mengingat pada tahun tersebut masih berada dalam masa recovery / pemulihan kondisi ekonomi maupun kehidupan sosial masyarakat setelah terjadinya pandemi Covid-19. Untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2023 diperkirakan / diproyeksikan mencapai Rp. 554.010.000.000,- atau memiliki proporsi sebesar 22,12% dari total proyeksi Pendapatan Daerah. Sedangkan untuk Pendapatan Transfer diproyeksikan mencapai Rp. 1.898.052.459.072,00 atau memiliki proyeksi sebesar 74,48% dari total proyeksi Pendapatan Daerah, sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah diproyeksikan sebanyak Rp. 52.096.741.993,- atau sebesar 2,08% dari total proyeksi Pendapatan Daerah.

Selain rincian pendapatan diatas, terdapat beberapa poin penting dalam pengelolaan pendapatan daerah yang perlu diperhatikan terutama berkaitan dengan dinamika regulasi pemerintah pusat. Merujuk terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, dijelaskan bahwa dalam pengelolaan pendapatan daerah terdapat pergeseran alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional, yang sebelumnya masuk dalam komponen Pendapatan Asli Daerah bergeser pada komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang mana masuk kedalam komponen Lain-lain pendapatan. Oleh sebab itu diproyeksi pergeseran anggaran pada tahun 2023 terkait alokasi Dana Kapitasi JKN Kabupaten Banyuwangi ialah sebesar Rp 51.248.741.993,00. Selain itu pergeseran anggaran juga berkaitan terkait pos alokasi BOS dari pemerintah pusat, yang sebelumnya berada pada komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tepatnya pada komponen hibah. Merujuk terhadap Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler dijelaskan bahwa terdapat pergeseran dalam

alokasi pendapatan dimana sebelumnya masuk dalam komponen hibah, bergeser kepada Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Pendapatan Transfer.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan selalu diupayakan menjadi sumber utama pendapatan daerah, sehingga Kabupaten Banyuwangi diharapkan dapat meningkatkan kemandirian daerah/ mengurangi ketergantungan secara finansial terhadap Pemerintah Pusat. Untuk itu dalam kondisi normal kebijakan Pendapatan Daerah perlu difokuskan pada upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh sebab itu, perlu diupayakan adanya intensifikasi maupun ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), antara lain melalui pajak daerah, serta meningkatkan pengelolaan aset-aset daerah. Capaian realisasi pendapatan daerah pada dasarnya dapat dipengaruhi oleh kondisi makro ekonomi pada tingkat nasional, regional, dan lokal. Selain itu, kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi juga dapat berpengaruh pada capaian pendapatan daerah Kabupaten Banyuwangi. Namun demikian, dalam situasi recovery untuk mengatasi dampak terjadinya Covid-19, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tetap berupaya secara optimal untuk menambah kapasitas fiskal daerah dengan meningkatkan pendapatan daerah, dan dalam kondisi tertentu dapat mengeluarkan kebijakan relaksasi dalam mekanisme pemungutan pajak daerah. Berikut merupakan arah kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023:

1. Mengembangkan penggunaan teknologi informasi dalam meningkatkan pemberian pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah, atau dengan kata lain penggunaan sistem online di dalam pembayaran dan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah;
2. Pemberian insentif fiskal secara terukur untuk kegiatan ekonomi strategis termasuk melanjutkan pemulihan dan melakukan transformasi ekonomi.
3. Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran pajak dan retribusi daerah melalui kegiatan sosialisasi, perbaikan mekanisme pengendalian dan pengawasan, perbaikan sistem dan prosedur administrasi pemungutan yang cepat, sederhana dan akuntabel, serta pemberian reward and punishment bagi wajib pajak daerah/ retribusi daerah, maupun petugas yang mengelola pajak daerah dan retribusi daerah;
4. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya pajak daerah dan retribusi daerah melalui pemberian pendidikan dan pelatihan, maupun pemberian bimbingan teknis;
5. Melakukan pendataan obyek dan wajib pajak yang saat ini belum terdata, dan melakukan pendataan ulang terhadap obyek pajak dan wajib pajak yang mengalami perubahan secara lebih detail. Keberadaan data tersebut selanjutnya digunakan untuk menghitung potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak daerah, sehingga dengan demikian dapat dijadikan sebagai dasar untuk menggali potensi wajib pajak daerah yang ada;
6. Optimalisasi aset dan kekayaan daerah. Hal ini difokuskan pada pemanfaatan aset dan kekayaan daerah untuk diversifikasi usaha, sehingga dapat mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui revitalisasi gedung, lahan atau aset daerah lainnya yang dapat dimanfaatkan atau disewakan;
7. Meningkatkan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mengoptimalkan pengelolaan/ peningkatan kinerja BUMD, serta melakukan revitalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
8. Untuk mempertahankan perolehan dana transfer maupun pendapatan lainnya dari pemerintah pusat, maka pemerintah Kabupaten Banyuwangi perlu menyusun program-program yang in line dengan pemerintah pusat. Selain itu, perangkat daerah perlu kreatif dan inovatif dalam menyusun kegiatan yang akan diajukan untuk dibiayai oleh Pemerintah Pusat;

9. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi juga secara aktif melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait dengan optimalisasi pendapatan transfer yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
10. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi akan berkoordinasi secara aktif dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mendukung program-program pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Banyuwangi melalui hibah maupun bentuk dukungan lainnya;
11. Melakukan koordinasi secara rutin dengan OPD yang terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi maupun instansi pemerintah/ swasta yang memiliki peran dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Banyuwangi.
12. Pemberian insentif pajak sebagai bentuk adaptasi ekonomi rebound pasca Covid, sekaligus menarik dan memperluas objek pajak daerah Kabupaten Banyuwangi.

Tabel 3.14. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018 - 2021, APBD Tahun 2022, dan Hasil Proyeksi Tahun 2023 - 2024

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	APBD 2022	Proyeksi/ Target pada Tahun 2023	Proyeksi/ Target pada Tahun 2024
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	PENDAPATAN	2,997,644,018,347	3,143,282,624,113	3,267,186,614,945	3,181,210,231,921	2,989,972,508,533	2,504,159,201,065	2,482,757,295,065
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	450,066,949,215	495,691,172,682	482,740,174,377	520,021,954,381	518,001,960,943	554,010,000,000	570,010,000,000
1.1.1.	Pajak daerah	178,917,948,412	196,835,027,083	191,620,754,462	206,146,187,700	202,758,444,613	223,500,000,000	229,954,757,134
1.1.2.	Retribusi daerah	45,463,161,118	48,292,208,982	45,631,411,394	43,211,935,541	73,860,633,768	78,720,000,000	80,993,460,768
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	15,169,787,751	16,659,277,058	20,666,815,797	21,491,551,361	25,000,000,000	24,950,000,000	25,670,564,611
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	210,516,051,934	233,904,659,559	224,821,192,724	249,172,279,779	216,382,882,562	226,840,000,000	233,391,217,487
1.2	Pendapatan Transfer	2,416,047,253,365	2,521,085,575,825	2,339,531,673,666	2,500,041,854,276	2,408,739,805,597	1,898,052,459,072	1,861,498,553,072
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	2,203,199,795,537	2,277,156,675,363	2,157,953,688,002	2,244,848,461,387	2,300,079,443,000	1,696,923,906,000	1,660,370,000,000
1.2.1.1	Dana Perimbangan	1,960,992,382,687	2,005,264,847,963	1,852,125,074,002	1,982,325,720,387	2,045,645,290,000	1,475,213,546,000	1,440,290,000,000
1.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil	161,490,144,982	163,512,357,403	-	-	-	182,259,118,000	147,330,000,000
1.2.1.1.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	1,375,784,247,000	1,438,463,198,000	1,463,768,018,106	1,622,205,084,853	1,475,213,546,000	1,292,954,428,000	1,292,950,000,000
1.2.1.1.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	423,717,990,705	403,289,292,560	388,357,055,896	360,120,635,534	570,431,744,000	-	-
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	-	-	94,924,042,000	42,442,282,000	32,723,793,000	-	-
1.2.1.3	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.4	Dana Keistimewaan	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.5	Dana Desa	-	-	210,904,572,000	220,080,459,000	221,710,360,000	221,710,360,000	220,080,000,000
1.2.1.6	Dana Penyesuaian	242,207,412,850	271,891,827,400	-	-	-	-	-
1.2.2	Transfer Antar-Daerah	212,847,457,828	243,928,900,462	181,577,985,664	255,193,392,889	108,660,362,597	201,128,553,072	201,128,553,072
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	203,200,571,328	236,071,359,365	173,818,367,314	247,238,037,389	108,660,362,597	201,128,553,072	201,128,553,072
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	9,646,886,500	7,857,541,097	7,759,618,350	7,955,355,500	-	-	-
1.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	131,529,815,766	126,505,875,606	444,914,766,901	161,146,423,264	63,230,741,993	52,096,741,993	51,248,741,993
1.3.1	Hibah	131,529,815,766	126,505,875,606	146,836,659,652	145,516,896,476	11,982,000,000	848,000,000	-
1.3.2	Dana darurat	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Lain-lain pendapatan	-	-	298,078,107,249	15,629,526,788	51,248,741,993	51,248,741,993	51,248,741,993

Sumber: LRA Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018 - 2021 dan APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022

3.2.3 Arah Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah

Belanja daerah Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2023 terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Realisasi belanja daerah Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2023 diperkirakan / diproyeksikan mencapai Rp. 2.568.555.808.065,-. Bila dibandingkan dengan kondisi pada tahun-tahun sebelumnya, jumlah belanja daerah diperkirakan lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 realisasi belanja daerah di Kabupaten Banyuwangi tercatat sebanyak Rp. 3.093.593.254.517,- sedangkan berdasarkan pada APBD tahun 2022 tercatat sebanyak Rp. 3.014.992.377.641,-. Belanja daerah Kabupaten Banyuwangi yang lebih rendah pada dasarnya terdorong oleh adanya penyesuaian terhadap pendapatan daerah Kabupaten Banyuwangi yang diperkirakan mengalami kontraksi sebagai dampak dari terjadinya Covid-19. Bila melihat pada struktur belanja daerah Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2023 dapat diketahui bahwa belanja operasi pada tahun 2023 diperkirakan / diproyeksikan sebanyak Rp. 1.882.369.185.007,- atau memiliki proporsi sebesar 73,28%, sedangkan belanja modal diperkirakan / diproyeksikan sebanyak Rp. 247.558.607.894,- atau memiliki proporsi sebesar 9,63%, belanja transfer diperkirakan diproyeksikan mencapai 418.628.015.165,- atau memiliki proporsi sebesar 16,29%, dan belanja tidak terduga diperkirakan/ diproyeksikan sebanyak Rp. 20.000.000,- atau memiliki proporsi sebesar 0,77%.

Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka berikut merupakan arah kebijakan belanja daerah Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Penerapan zero based budgeting melalui peningkatan efisiensi belanja operasional, fokus terhadap program prioritas, serta mengawal pelaksanaan anggaran berbasis hasil (result based);
2. Penajaman belanja barang, penguatan belanja modal, reformasi belanja pegawai serta efektivitas belanja bansos dan subsidi;
3. Belanja hibah dan bantuan sosial diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang mendukung program prioritas, *recovery* dan penanganan dampak pandemi Covid-19 yang penyalurannya dilakukan dengan memperhatikan pada peraturan/ ketentuan yang berlaku;
4. Belanja daerah lainnya juga diarahkan untuk mendukung *recovery* dan penanganan dampak pandemi Covid-19 pada semua bidang;
5. Menerapkan konsep *money follows* program prioritas dalam pengalokasian anggaran, serta pengelolaan belanja daerah yang berbasis kinerja (*performance based*), sehingga setiap belanja akan bermuara untuk mendukung capaian indikator kinerja;
6. Belanja daerah diupayakan memenuhi *mandatory spending*, seperti pendidikan sebesar minimal 20% dan kesehatan 10%. Selain itu, belanja daerah diarahkan untuk menyelenggarakan urusan wajib dan urusan pilihan dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku dan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM);
7. Belanja Tidak Terduga tetap dialokasikan dalam rangka mengantisipasi pengeluaran untuk keadaan darurat, termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya, serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya;
8. Belanja daerah diarahkan untuk tetap memberikan pemenuhan belanja pegawai, peningkatan kesejahteraan ASN dengan tetap memperhatikan efisiensi dan efektifitas anggaran, serta menjaga proporsi belanja pegawai berada dibawah 50%;

9. Untuk menunjang pemerataan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Banyuwangi, maka seoptimal mungkin Dana Transfer Umum (DTU) dialokasikan/ digunakan untuk belanja infrastruktur;
10. Belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah;
11. Belanja Bantuan Keuangan dialokasikan dengan memperhatikan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa sebagai jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan setelah dikurangi DAK;
12. Melakukan koordinasi secara rutin dengan seluruh OPD di Lingkungan Pemerintah untuk mendorong peningkatan penyerapan anggaran dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan belanja daerah;
13. Menyesuaikan proporsi belanja pegawai sesuai dengan arahan UU 1 Tahun 2022 diangka maksimal 30% (diluar tunjangan guru); dan
14. Meningkatkan proporsi belanja infrastruktur pelayanan publik pada angka minimal 40% dari total belana APBD di luar belanja bagi hasil dan / atau transfer kepada Daerah dan / atau desa. Berkaitan dengan data realisasi belanja daerah Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2018 hingga 2021, APBD tahun 2022, serta hasil proyeksi belanja daerah pada tahun 2023 dan 2024 secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.15. Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018 - 2021, APBD Tahun 2022, dan Hasil Proyeksi Tahun 2023 - 2024

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	APBD 2022	Proyeksi/ Target pada Tahun 2023	Proyeksi/ Target pada Tahun 2024
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
2	BELANJA	2,753,665,811,333	3,021,315,752,989	3,140,479,804,668	3,093,593,254,517	3,014,992,377,641	2,568,555,808,065	2,505,669,869,110
2.1	Belanja Operasi	1,945,420,887,034	2,087,908,048,366	2,097,944,747,525	1,986,204,516,139	2,070,759,313,951	1,882,369,185,007	1,794,950,000,000
2.1.1	Belanja Pegawai	1,185,271,560,491	1,181,297,068,019	1,089,065,087,928	1,077,767,889,579	922,468,149,121	1,015,372,756,006	1,014,420,000,000
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	676,695,287,640	826,714,837,348	802,356,277,246	812,104,772,920	999,041,095,330	681,491,686,500	741,500,000,000
2.1.3	Belanja Bunga	14,836,209,104	-	-	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5	Belanja Hibah	61,221,365,000	63,169,340,000	180,849,655,351	35,181,062,240	134,938,069,500	172,592,742,500	10,200,000,000
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	7,396,464,800	16,726,803,000	25,673,727,000	61,150,791,400	14,312,000,000	12,912,000,000	28,830,000,000
2.2	Belanja Modal	480,382,663,298	529,542,999,046	558,244,296,362	661,103,400,610	504,235,179,417	247,558,607,894	286,130,000,000
2.2.1	Belanja Modal Tanah	17,236,577,363	163,772,791	51,868,800	-	11,530,000,000	5,000,000,000	10,000,000,000
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	89,525,778,055	91,456,350,791	122,673,468,937	94,308,993,620	97,271,544,980	22,600,157,380	36,380,000,000
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	109,612,985,076	135,227,013,082	129,356,513,551	148,719,626,588	96,919,634,537	31,392,395,050	52,450,000,000
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	260,540,727,454	302,054,399,032	304,976,409,004	414,624,441,901	287,863,040,345	186,077,055,464	183,960,000,000
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3,466,595,350	641,463,350	1,186,036,070	3,450,338,500	10,650,959,555	2,489,000,000	3,340,000,000
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Belanja Tidak Terduga	-	295,756,250	90,224,430,281	29,019,869,108	29,019,869,108	20,000,000,000	29,019,869,110
2.4	Belanja Transfer	327,862,261,000	403,568,949,327	394,066,330,500	417,265,468,660	410,978,015,165	418,628,015,165	395,570,000,000
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	11,427,967,700	26,320,409,997	26,390,119,500	21,013,403,477	20,193,979,415	20,193,979,415	31,460,000,000
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	316,434,293,300	377,248,539,330	367,676,211,000	396,252,065,183	390,784,035,750	398,434,035,750	364,110,000,000

Sumber: LRA Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018 - 2021 dan APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022

3.2.4 Arah Kebijakan Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Proyeksi anggaran untuk pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian, yaitu: penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan terutama bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA), dimana pada tahun 2023 realisasi SiLPA diproyeksikan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yaitu menjadi Rp. 64.396.607.000,00. Peningkatan SiLPA Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2023 dikarenakan masih terdapatnya Gap antara proyeksi pendapatan dan belanja pada tahun tersebut, sehingga perlu diseimbangkan dengan komponen SiLPA yang diproyeksi meningkat dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2023 kebutuhan belanja yang melebihi pendapatan dikarenakan terdapat alokasi dana berkaitan dengan persiapan Pemilu serentak yang tahapannya akan dimulai per akhir tahun 2023. Sedangkan DAK dan Dana Insentif Daerah tidak dapat diproyeksikan dikarenakan sifatnya yang sangat dinamis. Meskipun demikian sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) dari tahun ke tahun diharapkan akan semakin rendah dengan batas yang ideal, karena Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) sebagai salah satu tolok ukur tingkat kesinergian antara perencanaan dan penganggaran. Semakin kecil Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) menunjukkan kualitas perencanaan dan penganggaran yang baik. Namun demikian, nilai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) juga dapat mengindikasikan efisiensi belanja dari yang telah dianggarkan tanpa meninggalkan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi pemerintah daerah. Oleh karena itu, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) yang tinggi perlu diteliti lebih mendalam terkait penyebab terjadinya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA), apakah karena faktor lemahnya sinergi perencanaan dan penganggaran, atau karena efisiensi belanja dalam pelaksanaan program dan kegiatan, atau karena berbagai peraturan yang menghambat penyerapan, atau disebabkan faktor lainnya.

Berikut merupakan arah kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut:

1. Menjaga agar keuangan daerah tetap dalam kondisi surplus anggaran, dan jika terjadi defisit anggaran sedapat mungkin ditutup dengan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun lalu, sehingga dengan demikian posisi sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun lalu diupayakan berada dalam batas yang ideal;
2. Mendorong peningkatan keterlibatan swasta dalam mendukung program-program pembangunan di Kabupaten Banyuwangi. Hal ini dapat dilakukan kerjasama pemerintah swasta (KPS) atau Kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (KPDBU). Untuk menunjang pelaksanaan, maka Pemerintah Kabupaten Banyuwangi perlu menyediakan daftar bidang-bidang yang dapat menjadi arena pilihan swasta untuk menyalurkan dana PKBL dan CSR-nya, sehingga pelaksanaan CSR/ PKBL akan sangat membantu dalam pembiayaan program pembangunan pemerintah daerah;

Untuk mengetahui secara lebih jelas terkait dengan realisasi pembiayaan daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2018 hingga 2021, APBD tahun 2022, dan hasil proyeksi pembiayaan daerah tahun 2023 hingga 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.16. Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 - 2020, APBD Tahun 2021, dan Hasil Proyeksi Tahun 2023 – 2024

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	APBD 2022	Proyeksi/ Target pada Tahun 2023	Proyeksi/ Target pada Tahun 2024
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
3	PEMBIAYAAN	693,063,527,542	65,113,714,660	191,180,583,675	320,994,127,944	34,000,000,000	64,396,607,000	22,912,574,045
3.1	Penerimaan Pembiayaan	257,081,585,805	65,113,714,660	187,080,583,675	310,594,127,944	25,000,000,000	64,396,607,000	22,912,574,045
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	38,173,792,436	65,077,764,660	187,080,583,675	310,594,127,944	25,000,000,000	64,396,607,000	22,912,574,045
	Penghematan Belanja							
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-		
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-		
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	218,860,543,369	-	-	-	-		
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	47,250,000	35,950,000	-	-	-		
3.1.6	Penerimaan Pembiayaan lainnya	-	-	-	-	-		
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	435,981,941,737	-	4,100,000,000	10,400,000,000	9,000,000,000	-	-
3.2.1.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	435,981,941,737	-	-	-	-		
3.2.2.	Penyertaan Modal Daerah	-	-	4,100,000,000	10,400,000,000	9,000,000,000		
3.2.3.	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-		
3.2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-		
3.2.5.	Pengeluaran Pembiayaan lainnya	-	-	-	-	-		

Sumber: LRA Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018 - 2021 dan APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022



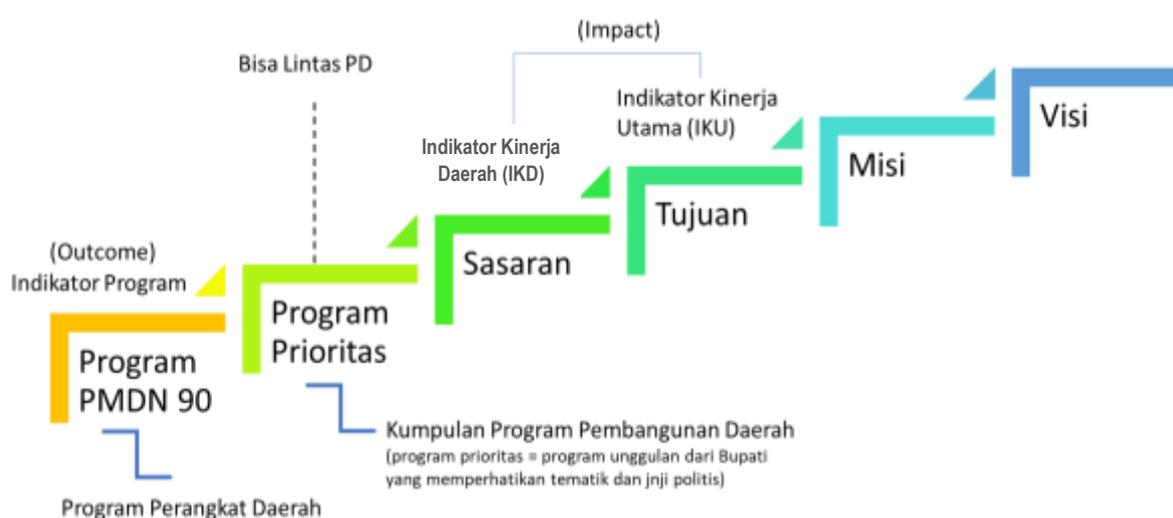
Kabupaten
Bangsawangi

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan Sasaran RKPD merupakan turunan dari tujuan dan sasaran RPJMD. Tujuan dan sasaran merupakan hasil dari perumusan capaian strategis Kabupaten Banyuwangi yang merepresentasikan atau tolok ukur keberhasilan atau kegagalan pemerintah. Sehingga, syarat utama penentuan tujuan dan sasaran adalah *measurable* yang direpresentasikan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) atau indikator tujuan sebagai indikator keberhasilan bupati dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) atau indikator kinerja sasaran RPJMD.



Gambar 4.1: Linieritas Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program

Tujuan dan sasaran merupakan acuan dalam penyusunan *logframe* Kabupaten Banyuwangi. Gambaran *cascading* diatas menunjukkan gambaran pola intervensi yang harus dilakukan secara berjenjang dan disertai dengan indikator keberhasilan yang melekat didalamnya. Masing masing sasaran terdapat intervensi program prioritas yang merupakan kumpulan dari program program pembangunan daerah terdapat keterlibatan lintas perangkat daerah/ lintas urusan untuk mendorong pencapaian sasaran Pemerintah Daerah. Program prioritas daerah ditransformasikan ke program nomenklatur di Permendagri 90 tahun 2019 yang menfokuskan Langkah intervensi tersebut harus lakukan bersama-sama oleh Perangkat Daerah. Keberadaan Program Prioritas Daerah (Program Pemda) dalam arsitektur kinerja merupakan inovasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam mewujudkan pendekatan *money follow*

program yang berorientasi pada pendekatan tematik. Program prioritas daerah dilaksanakan bersama dengan perangkat daerah yang berperan dalam pencapaian Misi .

Berikut merupakan penjabaran Tujuan dan Sasaran pembangunan RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021 yang di ikuti dengan gambar arsitektur kinerja Banyuwangi dalam bentuk cascading dan proses bisnis pencapaian tujuan pembangunan:

Tujuan I: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Yang Berdampak Pada Penurunan Kemiskinan

Dalam rangka pencapaian Misi Pembangunan 1: Membangun Ekonomi Inklusif dan Pemerataan Infrastruktur yang mampu mengungkit produktifitas sektor unggulan dan menguatkan ketahanan lingkungan, maka tujuan dan sasaran pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

a. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan yang Berdampak pada Penurunan Kemiskinan, dengan sasaran pembangunan sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya Produktifitas dan Daya Saing Potensi Unggulan Daerah yang Berkelanjutan
- 2) Meningkatnya Lapangan Kerja dan Pemerataan Pendapatan untuk Keberdayaan Keluarga



Gambar 4.2 : Cascading Pencapaian Tujuan 1

Rumusan dari tujuan diatas menerjemahkan sebuah pertumbuhan harus mampu menciptakan kesempatan ekonomi bagi penduduk miskin, serta memastikan bahwa semua kelompok masyarakat yang terpinggirkan bisa terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan. Pendekatan ekonomi inklusif dalam pembangunan dengan merupakan basis pembangunan ekonomi yang diharapkan akan menghasilkan pola pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, mengurangi ketimpangan pendapatan antarkelompok pendapatan dan ketimpangan pembangunan antar wilayah, serta efektif mempercepat penanggulangan kemiskinan. Untuk mencapai tujuan dari pembangunan ekonomi inklusif dirumuskan sasaran yaitu pertama, meningkatnya produktifitas dan daya saing potensi unggulan daerah yang berkelanjutan. Kedua, meningkatnya lapangan kerja dan pemerataan pemerataan pendapatan untuk keberdayaan keluarga.

Meningkatnya produktifitas dan daya saing potensi unggulan daerah yang berkelanjutan, diartikan bahwa produktifitas, daya saing dan berkelanjutan menjadi fokus dari Kabupaten Banyuwangi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas, pariwisata tidak lagi menjadi lokomotif tunggal untuk menggerakkan roda ekonomi di Kabupaten Banyuwangi karena sektor pariwisata sangat rentan terhadap perubahan kondisi eksternal, salah satunya pandemi Covid-19. Dalam 5 tahun ke depan, sektor pertanian dan UMKM tidak hanya sekedar menjadi gerbong yang ditarik oleh lokomotif pariwisata tetapi didorong untuk menjadi lokomotif utama yang bisa menggerakkan perekonomian Kabupaten Banyuwangi pada saat sektor pariwisata sedang lesu.

Dalam struktur perekonomian Kabupaten Banyuwangi, sektor pertanian terepresentasi pada kategori A lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan, sedangkan sektor UMKM terepresentasi pada kategori C lapangan usaha industri pengolahan dan kategori G lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, sehingga indikator PDRB sektor unggulan merupakan kumulatif dari PDRB kategori A, C dan G. Sementara itu untuk membangkitkan kembali sektor pariwisata difokuskan untuk peningkatan daya saing pariwisata yang diukur dengan indeks daya saing pariwisata.

Dalam membangun potensi unggulan tidak lepas dari pembangunan infrastruktur sebagai konektifitas perputaran perekonomian. Makna berkelanjutan di sasaran artinya bahwa pembangunan ekonomi tetap memperhatikan aktivitas pengelolaan lingkungan hidup dan kesiapsiagaan bencana agar perekonomian tetap stabil.

Meningkatnya lapangan kerja dan pemerataan pemerataan pendapatan untuk keberdayaan keluarga. Masalah kemiskinan menjadi perhatian khusus Kabupaten Banyuwangi untuk di tanggulangi. Kemiskinan di sebabkan karena belum meratanya akses terhadap pendapatan masyarakat. Dalam mengurangi kemiskinan Kabupaten Banyuwangi mempunyai fokus. Pertama, melalui peningkatan lapangan pekerjaan melalui penciptaan wirausaha baru yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Kedua, pemberdayaan ekonomi di utamakan di wilayah pedesaan karena sebagian besar kemiskinan berada diwilayah pedesaan. Ketiga, memberikan jaminan sosial kepada masyarakat yang miskin absolut artinya secara fisik sudah tidak berdaya. Keempat, peran perempuan dalam aktivitas ekonomi diperlukan untuk

keberdayaan dari keluarga serta memberikan perhatian kepada perlindungan perempuan dan anak.

Tujuan II: Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia Yang Unggul Dan Berkarakter

Dalam rangka pencapaian Misi Pembangunan 2: Membangun SDM Unggul Berkarakter dan Harmonisasi Sosial yang Kondusif, maka tujuan dan sasaran pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

- a. **Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia Yang Unggul Dan Berkarakter**, dengan sasaran pembangunan sebagai berikut:
 1. Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Komoditas Pangan dan Non Pangan
 2. Meningkatnya Stabilitas Sosial Masyarakat yang Berkarakter dan Berbudaya



Gambar 4.3 : Cascading Pencapaian Tujuan 2

Rumusan dari tujuan diatas menerjemahkan SDM yang menghasilkan manusia yang cerdas, sehat, mandiri, kompetitif yang sesuai nilai-nilai moral kehidupan sosial. Untuk mewujudkan tujuan di atas dirumuskan sasaran pertama, meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Komoditas Pangan dan Non Pangan dan kedua, Meningkatnya Stabilitas Sosial Masyarakat yang Berkarakter dan Berbudaya.

Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Komoditas Pangan dan Non Pangan, sasaran ini utamanya menciptakan lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. Pemerataan kualitas inilah yang masih akan menjadi tantangan pembangunan manusia di Kabupaten Banyuwangi lima tahun mendatang. Untuk mencapai nilai pembangunan manusia Kabupaten

Banyuwangi memberikan upaya pemerataan dan perbaikan kualitas di pendidikan dan kesehatan, serta memberikan upaya stabilitas harga pangan dan non pangan agar terjangkau masyarakat.

Sasaran kedua, **Meningkatnya Stabilitas Sosial Masyarakat yang Berkarakter dan Berbudaya**. Untuk menjaga stabilitas sosial masyarakat Kabupaten Banyuwangi senantiasa harus menjunjung tinggi aturan-aturan, norma-norma, adat-istiadat, dan atau nilai-nilai kehidupan yang ada di masyarakat yang diwujudkan dalam ketaatan pada berbagai pranata sosial atau aturan sosial, sehingga dalam kehidupan di masyarakat itu akan tercipta ketenangan, kenyamanan, ketentraman dan kedamaian.

Tujuan III : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik

Dalam rangka pencapaian Misi Pembangunan 3: Membangun Layanan Publik dan Tatakelola Pemerintahan yang Inovatif dan Dinamis, maka tujuan dan sasaran pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

- a. **Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik**, dengan sasaran pembangunan yaitu
 1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang berorientasi Pada Layanan sampai Desa.



Gambar 4.4: Cascading Pencapaian Tujuan 3

Rumusan dari tujuan diatas menerjemahkan pelayanan publik yang berorientasi untuk kepuasan masyarakat. Oleh karena itu, organisasi pemerintah memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat melalui percepatan implementasi reformasi birokrasi secara optimal. Untuk mewujudkan tujuan di atas dirumuskan sasaran meningkatnya tata kelola Pemerintahan yang berorientasi pada layanan sampai desa. Sasaran dari misi ketiga yaitu **Meningkatnya Tata Kelola**

Pemerintahan yang berorientasi Pada Layanan sampai Desa yang artinya tata kelola pemerintahan yang baik diharapkan kedepan focus pada 3 area: pertama, layanan publik yang inovatif dan berkualitas di pemerintahan kabupaten sampai di tingkat pemerintahan desa, kedua, kapasitas kelembagaan yang efektif dan efisien, ketiga manajemen sumber daya manusia aparatur yang semakin baik.

Pada tabel 4.1 berikut merupakan misi, tujuan dan sasaran beserta indikator dan target di tahun 2023. Target 2023 menjadi upaya yang harus tercapai di RKPD Tahun 2023, karena di tahun 2023 menjadi pertanggungjawaban kepala daerah dan perangkat daerah Kabupaten Banyuwangi.

Tabel 4. 1 Misi Pembangunan, Tujuan, Sasaran dan Indikator

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target
				2023
Membangun Ekonomi Inklusif dan Pemerataan Infrastruktur yang mampu mengungkit produktifitas sektor unggulan dan menguatkan ketahanan lingkungan;	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan berkelanjutan yang berdampak pada Penurunan Kemiskinan	Pertumbuhan Ekonomi (%)		4,54
		Meningkatnya Produktifitas dan Daya Saing Potensi Unggulan Daerah yang Berkelanjutan	Indeks Daya Saing Pariwisata	3
			Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan (%)	3,26
			Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	81,16
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	71,19
			Indeks Resiko Bencana	68
		Persentase Penduduk Miskin (%)		7,49
		Meningkatnya Lapangan Kerja dan Pemerataan Pendapatan untuk Keberdayaan Keluarga	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,84
			Gini Ratio	0,31
			Indeks Pemberdayaan Gender	3
Membangun SDM Unggul berkarakter dan Harmonisasi Sosial yang Kondusif;	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia Yang Unggul Dan Berkarakter	Indeks Pembangunan Manusia		71.27
		Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Komoditas Pangan dan Non Pangan	Indeks Pengeluaran	0.78
			Indeks Pendidikan	0.61
			Indeks Kesehatan	0.78
		Meningkatnya Stabilitas Sosial Masyarakat yang berkarakter dan Berbudaya	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	64,5
			Indeks Pembangunan Kebudayaan	57.80
Membangun Layanan Publik dan Tatakelola Pemerintahan yang Inovatif dan Dinamis;	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat		90,62
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang berorientasi Pada	Nilai SAKIP	84,6
			Indeks Reformasi Birokrasi	80

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target
				2023
		Layanan sampai Desa	Indeks Profesionalisme Aparatur	80,01
			Indeks Inovasi Daerah (kategori)	Sangat inovatif

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023

4.2.1 Strategi dan arah kebijakan RKPD 2023 yang terkait dengan visi dan misi, strategi dan arah kebijakan RPJMD

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design perencanaan* pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Perumusan strategi hasil analisis SWOT, SWOT dipilih untuk dirumuskan menjadi rumusan strategi yang disesuaikan dengan permasalahan dan rumusan visi, misi, tujuan sasaran Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Setelah melalui proses penilaian dirumuskan strategi terpilih seperti dijelaskan:

Tabel 4. 2 Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pembangunan RPJMD Kabupaten Banyuwangi Periode Tahun 2021-2026

Visi: Terwujudnya Banyuwangi yang Semakin Maju, Sejahtera, dan Berkah		
Misi I: Membangun Ekonomi Inklusif dan Pemerataan Infrastruktur yang mampu mengungkit produktifitas sektor unggulan dan menguatkan ketahanan lingkungan		
Tujuan	Sasaran	Strategi
T1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan yang Berdampak pada Penurunan Kemiskinan	S1.1 Meningkatnya Produktifitas dan Daya Saing Potensi Unggulan Daerah yang Berkelanjutan	ST.1 Membangun infrastruktur tematik untuk pengembangan pariwisata yang diikuti dengan berkembangnya produktivitas sektor UMKM dan Pertanian yang disertai penguatan investasi, akses pasar dan pendampingan pelaku usaha yang mampu menyerap tenaga kerja lokal dan tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan

Tujuan	Sasaran	Strategi
	S1.2 Meningkatnya Lapangan Kerja dan Pemerataan Pendapatan untuk Keberdayaan Keluarga	ST. 2 Meningkatkan Kesejahteraan keluarga di Desa melalui penyediaan lapangan kerja yang padat karya dan bantuan permodalan wirausaha dengan memperhatikan peran perempuan dalam keberpihakan akses pendapatan dan perlindungan hukum
Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi II: Membangun SDM Unggul Berkarakter dan Harmonisasi Sosial yang Kondusif		
T.2 Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia Yang Unggul Dan Berkarakter	S2.1 Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Komoditas Pangan dan Non Pangan	ST 3Menciptakan SDM yang unggul dan berdaya saing yang berfokus pada keterjangkauan pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi, peningkatan preventif dan promotif dalam kesehatan, serta kestabilan harga pangan untuk keterjangkauan daya beli masyarakat.
	S2.2 Meningkatnya Stabilitas Sosial Masyarakat yang Berkarakter dan Berbudaya	ST 4 Penguatan Modal Sosial yang meletakkan kapitalisasi atas nilai-nilai dan kekayaan budaya melalui proses modernisasi, serta menjaga kondusifitas daerah

Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi III: Membangun Layanan Publik dan Tatakelola Pemerintahan yang Inovatif dan Dinamis;		
T.3 Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	S.3.1 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang berorientasi Pada Layanan sampai Desa	ST 5 Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan sampai desa yang berorientasi pada peningkatan kapasitas fiskal daerah.

ST.1 Membangun infrastruktur tematik untuk pengembangan pariwisata yang diikuti dengan berkembangnya produktivitas sektor UMKM dan Pertanian yang disertain penguatan investasi, akses pasar dan pendampingan pelaku usaha yang mampu menyerap tenaga kerja lokal dan tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan

Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu bagian dari strategi yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk menunjang pembangunan di sektor ekonomi. Kabupaten Banyuwangi dengan luas wilayah yang mencapai 5.782,50 Km² memerlukan ketersediaan infrastruktur yang memadai dan merata sebagai roda penggerak pengembangan sektor unggulan, dimana Kabupaten Banyuwangi memiliki berbagai potensi di sektor Pariwisata, UMKM, dan Pertanian yang harus terus dikembangkan.

Pariwisata saat ini menjadi salah satu motor penggerak perekonomian di Kabupaten Banyuwangi. Pengembangan sektor pariwisata sangat terkait dan bergantung pada perkembangan infrastruktur yang tersedia. Peran infrastruktur menjadi sangat penting, karena dengan pengembangan infrastruktur dan sistem infrastruktur yang tersedia akan dapat mendukung perkembangan sektor tersebut, dimana kemudahan akses maupun ketersediaan sarana dan prasarana akan mendorong masyarakat Kabupaten Banyuwangi maupun dari luar daerah untuk berkunjung ke destinasi pariwisata yang terdapat di Kabupaten Banyuwangi. Apalagi Kabupaten Banyuwangi menjadi salah satu wilayah pengembangan di Provinsi Jawa Timur yang termasuk dalam Kawasan Selingkar Ijen sebagai Pendukung Kawasan Bromo-Tengger-Semeru. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 80 Tahun 2019, pada sektor pariwisata potensi geopark yang sudah ada di Kabupaten Banyuwangi dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata baru berbasis geologi dengan didukung oleh berbagai sarana dan prasarana. Selain itu, pembangunan dan pengembangan kawasan pendukung sektor perekonomian di bidang infrastruktur dan industri di Kabupaten Banyuwangi berpotensi untuk dikembangkan sebagai program pemerataan pembangunan di Kawasan Pendukung Selingkar Ijen. Untuk itu dibidang pariwisata diperlukan percepatan pembangunan infrastruktur tematik

dan fasilitas publik pendukung kawasan pariwisata strategis, disamping dilakukan pendampingan kepada pelaku pariwisata dan peningkatan promosi pariwisata Kabupaten Banyuwangi pasca Pandemi Covid-19.

Pembangunan di Kabupaten Banyuwangi mampu mendorong pengembangan pariwisata diharapkan juga turut mendukung berkembangnya produktivitas sektor UMKM dan Pertanian yang disertai penguatan investasi, akses pasar dan pendampingan pelaku usaha. Infrastruktur memiliki peran yang sangat penting baik dalam proses produksi maupun dalam menunjang distribusi komoditi ekonomi. Fasilitas transportasi memungkinkan produk (barang dan jasa) dapat dipasarkan dari Kabupaten Banyuwangi menuju daerah lain di Indonesia atau luar negeri, sehingga dengan demikian turut meningkatkan akses pasar dari produk-produk yang dihasilkan di Kabupaten Banyuwangi. Apalagi Kabupaten Banyuwangi memiliki berbagai komoditas dengan hasil produksi tertinggi di Sektor Agropolitan, seperti: jeruk siam, buah naga, jagung, kedelai, kopi, dan padi ladang yang dapat dikembangkan. Keberadaan infrastruktur juga merupakan elemen yang sangat penting dalam mendukung proses produksi dari sektor-sektor ekonomi, seperti pertanian, perdagangan dan industri (UMKM). Keberadaan infrastruktur akan mendorong terjadinya peningkatan produktivitas bagi faktor-faktor produksi, serta mendukung berkembangnya investasi di Kabupaten Banyuwangi. Untuk itu diperlukan pengembangan konektivitas perhubungan, penyediaan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan, peningkatan infrastruktur irigasi dan embung dalam mendukung ketersediaan air bersih khususnya di kawasan pedesaan, maupun peningkatan kualitas jalan. Selain itu, untuk menunjang berkembangnya produktivitas sektor UMKM dan Pertanian perlu adanya penguatan jaringan usaha dan kemitraan usaha mikro, peningkatan sistem dan jaringan distribusi barang; pengembangan pasar dalam dan luar negeri, serta perlindungan konsumen dan pasar tradisional; penguatan Kualitas dan diversifikasi produk UMKM serta kelembagaan pelaku usaha UMKM melalui pendampingan; penguatan kelembagaan kelompok petani dan nelayan; serta pemberian bantuan stimulan asuransi gagal panen.

Dengan berkembangnya sektor pariwisata di Kabupaten Banyuwangi, serta meningkatnya produktivitas sektor UMKM dan Pertanian yang ditunjang dengan adanya perkembangan investasi akan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan bagi penduduk lokal. Sehingga dengan demikian jumlah tenaga kerja lokal yang terserap akan semakin banyak dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Banyuwangi akan semakin menurun.

Seiring dengan berkembangnya aktivitas ekonomi masyarakat di Kabupaten Banyuwangi diperlukan adanya keseimbangan terhadap ekosistem lingkungan, dimana dari aktivitas ekonomi yang dijalankan oleh masyarakat dipastikan tidak memiliki dampak/ merusak kelestarian lingkungan hidup. Pembangunan di bidang ekonomi perlu dibarengi dengan pembangunan sektor lingkungan, agar terwujud pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, tingkat risiko terhadap bencana juga turut diperhatikan. Jangan sampai dengan meningkatnya pembangunan ekonomi justru menimbulkan permasalahan baru bagi lingkungan hidup dan menimbulkan terjadinya bencana, atau bahkan pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan akan sia-sia dengan hadirnya bencana tanpa adanya pertimbangan terhadap tingkat risiko dari bencana tersebut. Sehingga untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan diperlukan

mitigasi dan pengendalian terhadap bencana yang berpotensi terjadi di Kabupaten Banyuwangi. Selain itu, untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Banyuwangi diperlukan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka mengurangi pencemaran air dan reduksi emisi karbon; diperlukan pengelolaan persampahan bersama dengan masyarakat, serta diperlukan adanya pengendalian alih fungsi lahan produktif dan rehabilitasi lahan kritis.

Berikut merupakan arah kebijakan dalam pembangunan ekonomi Kabupaten Banyuwangi:

- Bantuan Penyediaan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan
- Penguatan Kelembagaan kelompok petani dan nelayan dalam meningkatkan manajemen pengelolaan
- Bantuan stimulan asuransi gagal panen pada petani dan nelayan
- penguatan pengenalan konsumsi perikanan tangkap maupun budidaya lokal
- peningkatan infrastruktur irigasi dan embung untuk menanggulangi debit air dan kekeringan
- penyediaan sistem penyediaan air bersih di kawasan pedesaan
- peningkatan kualitas jalan penunjang perekonomian masyarakat
- Percepatan infrastruktur tematik dan fasilitas publik pendukung kawasan pariwisata strategis
- Penguatan jaringan usaha dan kemitraan usaha mikro dengan menjalin kolaborasi pasar domestik maupun luar negeri
- Penguatan Kualitas dan diversifikasi produk UMKM serta kelembagaan pelaku usaha UMKM melalui pendampingan UMKM naik kelas dan siap ekspor
- Peningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang, pengembangan pasar dalam dan luar negeri, serta perlindungan konsumen dan pasar tradisional
- Pendampingan kelembagaan, sertifikasi dan bantuan kepada pelaku pariwisata dan ekraf
- Peningkatan Promosi Pariwisata Kabupaten Banyuwangi Lokal Pasca Pandemi Covid-19
- Pengendalian alih fungsi lahan produktif dan rehabilitasi lahan kritis guna meningkatkan kualitas penataan ruang
- Mengurangi pencemaran air dan reduksi emisi karbon dengan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup
- pengelolaan persampahan bersama masyarakat
- Membangun konektivitas perhubungan
- Peningkatan mitigasi dan penanggulangan bencana

ST. 2 Meningkatkan Kesejahteraan keluarga di Desa melalui penyediaan lapangan kerja yang padat karya dan bantuan permodalan wirausaha dengan memperhatikan peran perempuan dalam keberpihakan akses pendapatan dan perlindungan hukum.

Peningkatan kesejahteraan keluarga di desa dapat dilakukan dari berbagai sisi pada konteks ekonomi. Salah satunya dengan penyediaan lapangan kerja melalui proyek padat karya sehingga dapat mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja lokal. Hal tersebut dapat disokong dengan adanya pelatihan pada angkatan kerja guna meningkatkan kompetensi dan kapasitas

SDM mengenai ekonomi berbasis teknologi dan digital yang akan berdampak pada peningkatan daya saing pada kebutuhan industry saat ini serta pengembangan klaster industry yang lebih luas.

Titik utama peningkatan kesejahteraan juga dapat dilakukan melalui peningkatan pendapatan yang dapat dilakukan dengan pengembangan wirausaha maupun penumbuhan wirausaha baru. Adanya bantuan usaha yang tepat sasaran serta pengembangan peningkatan iklim wirausaha yang simultan dirasa dapat menjadi strategi yang tepat. Sedangkan penumbuhan wirausaha baru dilakukan dengan peningkatan iklim wirausaha yakni melalui program inkubasi bisnis pada pengusaha muda baru di Banyuwangi yang dapat menjadi skema pemulihan ekonomi daerah. Penumbuhan wirausaha baru didukung dengan adanya bantuan usaha dan logistic melalui program bagi alat usaha gratis untuk warga. dan program Gerakan ekonomi rakyat bantu warung yang memberikan bantuan untuk mendorong warung lebih berdaya.

Pemulihan ekonomi haruslah disokong oleh berbagai pihak, mulai dari setiap individu termasuk perempuan perlu diberdayakan untuk memiliki akses pendapatan guna menyokong ketahanan ekonomi keluarga. Perempuan diberdayakan dengan diberikan akses pendidikan, bantuan modal usaha serta perlindungan hukum mengingat angka kekerasan perempuan yang tinggi pada Kabupaten Banyuwangi. Perempuan diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan dan kesejahteraan ekonomi keluarga.

Selain pada sisi individu, peningkatan kesejahteraan keluarga di desa juga perlu disokong oleh pemerintah desa melalui kemitraan dengan lembaga-lembaga perekonomian dan penyelenggaraan BUMDes dengan memanfaatkan potensi yang ada meliputi pariwisata, pertanian dan UMKM. Beberapa program difokuskan pada hal tersebut yakni meliputi peningkatan kualitas UMKM melalui pendampingan yang inklusif dan terintegrasi, peningkatan kelas UMKM, serta mendorong masyarakat untuk mensupport produk-produk UMKM.

- Peningkatan Kapasitas dan kompetensi Angkatan Kerja yang berbasis digital dan teknologi untuk memenuhi Kebutuhan Pasar.
- Mengembangkan klaster industri, kemitraan dan pemanfaatan teknologi untuk menyerap tenaga kerja.
- Pelaksanaan inkubasi bisnis penciptaan pengusaha muda baru sebagai skema pemulihan ekonomi.
- Pengembangan ekonomi desa dengan kemitraan dan BUMDes yang berfokus pada pariwisata, pertanian dan UMKM.
- Peningkatan ketahanan keluarga melalui kesempatan pendidikan dan usaha bagi perempuan serta bantuan hukum perlindungan perempuan dan anak
- Peningkatan bantuan usaha dan logistik bagi PMKS yang tepat sasaran.

ST 3 Menciptakan SDM yang unggul dan berdaya saing yang berfokus pada keterjangkauan pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi, peningkatan preventif dan promotif dalam kesehatan, serta kestabilan harga pangan untuk keterjangkauan daya beli masyarakat.

Strategi menciptakan SDM unggul dan berdaya saing tentunya memperhatikan Tujuan dan Sasaran Pembangunan SDM Kabupaten Banyuwangi dengan tujuan yakni “Menciptakan Kualitas Pembangunan Manusia yang Unggul dan Berkarakter” kemudian tujuan pembangunan SDM tersebut diturunkan kedalam saran “Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Komoditas Pangan dan Non Pangan”.

Berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa strategi pembangunan SDM merupakan *tools* untuk terciptanya SDM yang unggul dan berakarakter, dimana representasi SDM unggul dan berakarakter di Kabupaten Banyuwangi ialah SDM yang mana dapat memiliki akses dan kualitas pada sektor pendidikan, kesehatan, dan komoditas pangan dan non pangannya. Untuk mencapai hal tersebut Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menetapkan poin-poin penting strategi pengembangan SDM yakni pendidikan dasar yang terjangkau hingga pendidikan tinggi, peningkatan preventif dan promotive kesehatan, dan stabilisasi harga pangan guna menjangkau daya beli masyarakat. Harapannya dengan demikian akan terciptanya tujuan pembangunan SDM yang Unggul dan Berkarakter.

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi, strategi kemudian akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program prioritas dalam pencapaian pembangunan. Arah kebijakan pembangunan disusun lebih konkrit yang sekaligus memberikan arahan dan panduan agar strategi dapat berjalan lebih optimal. Berikut merupakan arah kebijakan dalam pembangunan SDM Kabupaten Banyuwangi:

- Peningkatan ketersediaan, akses, distribusi, keamanan, dan penguatan cadangan, serta konsumsi pangan yang beragam dalam stabilitas harga pangan dan barang penting
- peningkatan kualitas pendidikan yang mengedepankan nilai nilai agama, etika, dan budaya lokal serta mendukung kebutuhan pasar tenaga kerja
- Peningkatan dukungan kerjasama perguruan tinggi dan pendidikan kejuruan
- Keberpihakan beasiswa lanjut yang dapat menjangkau masyarakat desa
- Peningkatan kemandirian masyarakat dalam upaya kesehatan promotif dan preventif,
- Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang menjangkau seluruh desa
- Penguatan Desa dalam menghadapi penyakit menular
- Peningkatan kesejahteraan, Kompetensi dan Profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- Penguatan literasi berbasis digital

ST 4 Penguatan Modal Sosial yang meletakkan kapitalisasi atas nilai-nilai dan kekayaan budaya melalui proses modernisasi, serta menjaga kondusifitas daerah

Strategi menciptakan penguatan modal sosial masyarakat Kabupaten Banyuwangi tentunya memperhatikan Tujuan dan Sasaran Pembangunan SDM Kabupaten Banyuwangi. Pembangunan modal sosial yang dibangun dilandaskan dalam ruang lingkup masyarakat yang berakarakter dan berbudaya. Modal sosial yang kondusif tentunya menjadi modal utama dalam pembangunan daerah. Modal sosial yang kuat akan meningkatkan semangat gotong-royong,

meningkatkan produktivitas, mengurangi kriminalitas, serta dapat mendorong setiap upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Selain itu keberagaman sosial budaya Kabupaten Banyuwangi juga merupakan modal berharga, khususnya Kabupaten Banyuwangi yang menjadikan pariwisata budaya sebagai prioritas daerah. Masyarakat yang berbudaya akan menciptakan daya tarik pariwisata tersendiri di Kabupaten Banyuwangi.

Modal sosial tidak hanya tentang hubungan antara masyarakat dengan masyarakat, pembangunan modal sosial di Kabupaten Banyuwangi juga dibangun antara hubungan masyarakat dengan pemerintah. Menjaga harmonisasi hubungan baik antara pemerintah dengan masyarakat bertujuan untuk menciptakan suasana yang kondusif, sehingga masyarakat mau dan mampu untuk berkontribusi terhadap pembangunan Kabupaten Banyuwangi. Sejalan dengan uraian diatas, berikut merupakan arah kebijakan pembangunan modal sosial masyarakat Kabupaten Banyuwangi:

- fasilitasi forum keagamaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dalam menjaga kerukunan dan solidaritas
- Peningkatan insentif, pelestarian, dan pengakuan atas seni dan budaya lokal, serta penguatan minat budaya untuk pariwisata dan ketertarikan siswa atas budaya lokal
- penegakan perda dengan edukasi masyarakat

ST 5 Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan sampai desa yang berorientasi pada peningkatan kapasitas fiskal daerah

Pemerintahan yang dinamis dan adaptif artinya memeberikan perbaikan internal pemerintah, peningkatan layanan publik, dan pemerintahan yang memperhatikan kebutuhan adaptif masyarakatnya. pemerintahan adaptif adalah pemerintahan yang mau mengerti kebutuhan rakyatnya secara progresif. Pemerintahan ini mampu melihat berbagai masalah dengan berbagai sudut pandang sehingga dapat menemukan penanganan yang lebih efektif dan mengena bagi rakyat. Pemerintahan yang dinamis adalah pemerintah yang bertindak progresif dan adaptif guna mewujudkan hasil yang efektif bagi daerah dan masyarakat.

Masyarakat sebagai customer yang harus dilayani menuntut pelayanan prima, cepat, dan tanggap. Dalam pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi harus beradaptasi dengan tuntutan agile birokrasi atau birokrasi yang tangkas. Media peningkatan kualitas layanan bisa dilakukan dengan digitalisasi layanan publik dan menempatkannya dekat dengan masyarakat dan lebih efektif dan efisien. Termasuk bagaimana pemerintah Kabupaten Banyuwangi mampu merespon secara cepat keluhan-keluhan dari masyarakat. Hal tersebut tidak akan terwujud tanpa berbasis aplikasi serta mendukung seluruh aktivitas pelayanan kepada masyarakat sampai desa.

Optimalisasi Pendapatan Daerah bertujuan untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian daerah serta memperkuat struktur keuangan daerah, karena merupakan salah satu tolok ukur/ indikator kemampuan dan cermin dari kemandirian daerah. Penurunan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih dianggap sebagai hambatan dan harus segera dievaluasi secara sungguh-sungguh oleh Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan pelayanan dan

fasilitas kepada masyarakat. Untuk itu pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus selalu ditingkatkan dan dilakukan secara efektif dan efisien. Disisi lain, penyediaan alternatif pembiayaan pembangunan daerah perlu ditempuh oleh Pemerintah Daerah sebagai terobosan dalam memperbanyak sumber penerimaan daerah yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan di Kabupaten Banyuwangi. Salah satu wujud peningkatan pendapatan asli daerah melalui revitalisasi peran BUMD dan inovasi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah.

Berikut merupakan arah kebijakan dalam pembangunan manajemen pemerintahan dan layanan publik Kabupaten Banyuwangi yaitu:

- Permudah dan percepat pelayanan perijinan usaha dan kependudukan sampai ke tingkat desa
- Penguatan perencanaan, keuangan, pengawasan dan kelembagaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel berbasis e-government
- Penguatan aparaturnya yang profesional dan adaptif
- Peningkatan Infrastruktur teknologi informatika yang menunjang pelayanan publik
- Optimalisasi fungsi BUMD dalam peningkatan kapasitas fiskal daerah
- Inovasi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan diatas, maka dapat disimpulkan tema atau fokus pembangunan. Tema dan prioritas Daerah pembangunan akan memberi arah yang jelas bagi pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan di RPJMD setiap tahun. Penetapan tema tahunan pada RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan arahan yang mengacu dari tema pembangunan tahap keempat pada RPJPD Kabupaten Banyuwangi dan tema dan prioritas daerah dijadikan acuan scenario tahunan pada RKPD, maka tema pembangunan Tahun 2021-2026 disajikan pada Gambar 6.1 berikut ini.



Gambar 4.5 Tema Pembangunan dan Prioritas Lima Tahunan Kabupaten Banyuwangi

Tema tahun 2023 yang di tetapkan pada RPJMD Kabupaten Banyuwangi yaitu **“percepatan pembangunan ekonomi inklusif dan berkualitas yang di akselerasi oleh infrastruktur tematik pariwisata dalam mendukung kawasan ekonomi strategis”**. tetapi isu mengalami perubahan pada tahun 2023, sehingga terjadi penyesuaian tema di tahun 2023 yang mengakomodir hasil evaluasi capaian kinerja dan arah kebijakan nasional maupun arah kebijakan provinsi. Prioritas RPJMD tahun pada tahun 2023 antara lain:

1. Akselerasi infrastruktur layanan dasar dan fasilitasi publik pendukung geopark ijen serta infrastruktur yang beririsan dengan nasional
2. Pembangunan infrastruktur penunjang lingkungan hidup dan kebencanaan
3. Membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan berbudaya
4. Penguatan pariwisata yang didukung oleh agrowisata dan industri olahan wisata berkelanjutan
5. Peningkatan manajemen pemerintahan dan layanan sampai tingkat desa

4.2.2 Arah Kebijakan/ Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2023

Arah kebijakan pembangunan beserta program prioritas pemerintah pusat dijabarkan dalam RKP tahun 2023. Sebelum pada arah kebijakan tahunan pusat perlu mempertimbangkan agenda pembangunan nasional. Tema atau arah kebijakan pembangunan tahun 2023 tersebut dituangkan kedalam beberapa Prioritas Nasional meliputi 7 agenda pembangunan nasional yang tertuang di dalam dokumen RPJMN 2020 - 2024 adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.

Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui: (a) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan (b) Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan dan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan berkelanjutan dan inklusif melalui: (a) Pengembangan sektor/ komoditas/ kegiatan unggulan daerah; (b) Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang; (c) Penguatan kemampuan SDM dan iptek berbasis keunggulan wilayah; (d) Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan (e) Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui: (a) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; (b) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial; (c) Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta; (d) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas; (e) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda; (f) Pengentasan kemiskinan; dan (g) Peningkatan produktivitas dan daya saing.

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Revolusi Mental sebagai gerakan Kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui: (a) Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila; (b) Pemajuan dan pelestarian kebudayaan; (c) Moderasi beragama; dan (d) Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

5. **Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar**

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional Melalui: (a) Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar; (b) Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi; (c) Pembangunan infrastruktur perkotaan; (d) Pembangunan energi dan ketenagalistrikan; dan (e) Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital.

6. **Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim**

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim diarahkan melalui: (a) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup; (b) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan (c) Pembangunan Rendah Karbon.

7. **Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**

Negara wajib hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa, serta menegakkan kedaulatan negara melalui: (a) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas; (b) Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan; (c) Perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber; (d) Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; (e) Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; dan (f) Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan Industri Pertahanan.

Badan Perencanaan pembangunan nasional (Bappenas) mengeluarkan tema dan prioritas RKP Tahun 2023. Arah kebijakan pembangunan beserta program prioritas pemerintah pusat dijabarkan dalam RKP tahun 2023. Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2023: “**Peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan**”, pembangunan nasional diarahkan pada 8 (delapan) fokus pembangunan yang meliputi:

1. **Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;**
2. **Peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan;**
3. **Penganggulan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job;**
4. **mendorong pemulihan dunia usaha;**
5. **revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;**
6. **pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim);**
7. **Percepatan Pembangunan infrastruktur dasar antara lain: air bersih dan sanitasi;**
8. **Pembangunan ibu kota nusantara.**

Sesuai aturan pada sistem perencanaan pembangunan nasional bahwa pembangunan harus sinergitas dengan provinsi dan nasional. Maka pemerintah daerah Kabupaten/ kota di Jawa Timur harus mengintegrasikan dan sinergi dengan tema dan prioritas yang telah dirumuskan. Dibawah merupakan tema dan prioritas pembangunan yang dirumuskan oleh pemerintah daerah provinsi Jawa Timur :

Tema Provinsi Jawa Timur

1. Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia serta Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan berkelanjutan untuk mendukung Daya Saing Daerah dalam Menyambut era Industri Perdagangan dan Jasa Berbasis Agro.

Prioritas Pembangunan Jawa Timur:

Prioritas Jatim 1: Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata

Prioritas Jatim 2: Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur

Prioritas Jatim 3: Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan

Prioritas Jatim 4: Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal

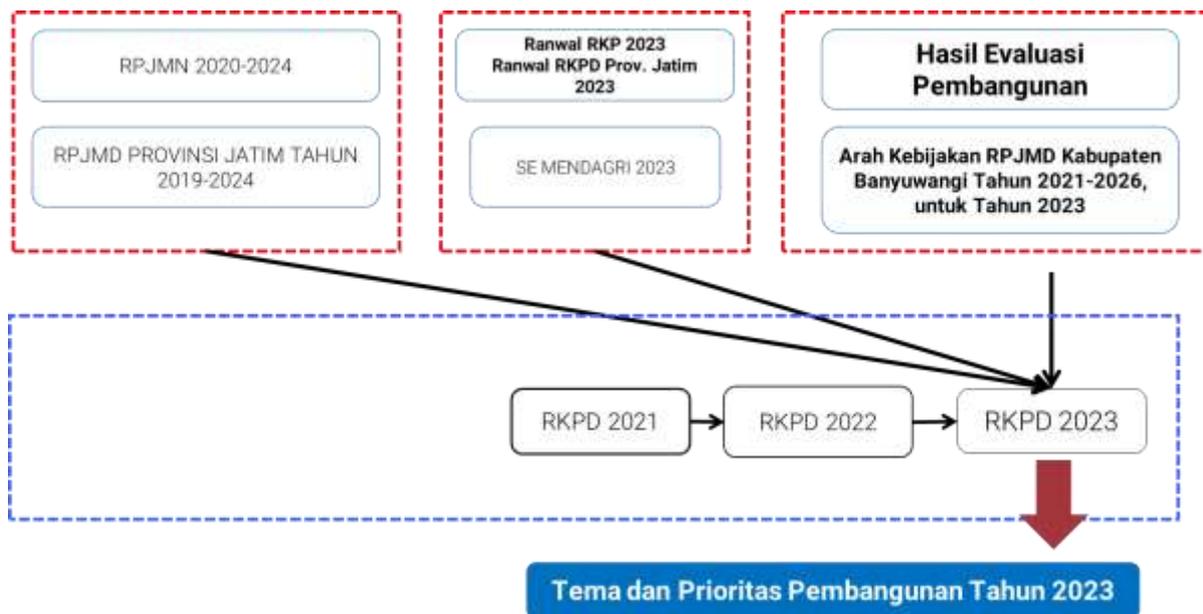
Prioritas Jatim 5: Peningkatan Kemandirian Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Energi

Prioritas Jatim 6: Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup

Prioritas Jatim 7: Peningkatan Ketertarikan, Ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur

4.2.3 Perumusan Tema dan Prioritas pembangunan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023

Penyusunan tema pembangunan RKPD Kabupaten Banyuwangi 2023 mempedomani tujuan dan sasaran pembangunan RPJMD Kabupaten Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 - 2026 pada tahun perencanaan bersangkutan, mempertimbangkan aspek tema indikatif yang telah dirumuskan RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 -2026 serta arah kebijakan umum pembangunan sebagai referensi tema indikatif. Pilihan tema pembangunan RKPD Kabupaten Banyuwangi 2023 yang ada memperhatikan internalisasi paradigma yang mempedomani RKP 2023 dan RKPD Provinsi Jawa Timur beserta tema pembangunan nasional yang termuat, memperhatikan fokus tematik, serta identifikasi masalah yang telah dibahas pada awal bab dokumen ini sehingga diharapkan sinergitas perencanaan pembangunan Tahun 2023 di Daerah Kabupaten Banyuwangi dapat tercapai.



Gambar 4.6 Tahapan Perumusan Tema dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023

Mengacu pada kerangka penyusunan tema pembangunan tersebut maka telah diketahui bahwasanya tematik pembangunan pada RKP tahun 2023 adalah **“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang inklusif dan Berkelanjutan”**,. Sedangkan tematik pembangunan Provinsi Jawa Timur Untuk tahun 2023 adalah **“Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia serta Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan berkelanjutan untuk mendukung Daya Saing Daerah dalam Menyambut era Industri Perdagangan dan Jasa Berbasis Agro”**. Jika mengacu pada tema nasional kabupaten Banyuwangi perlu mengakomodir substansi transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan, sedangkan untuk tema provinsi jawa timur mengakomodir pemerataan sumberdaya manusia untuk daya saing era industri perdagangan dan jasa berbasis Agro. Sedangkan menurut tema pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD di tahun 2023 yaitu **Percepatan Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkualitas yang di Akselerasi oleh Infrastruktur Tematik Pariwisata dalam Mendukung Kawasan Ekonomi Strategis**. maka dengan mempertimbangkan evaluasi isu strategis dan linearitas tema pembangunan nasional dan provinsi jawa timur, serta arah tema pembangunan tahun 2023 yang di tetapkan di RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2021 – 2026 maka ditetapkan rumusan penyesuaian tema RKPD Kabupaten Banyuwangi tahun 2023 yaitu :

“Akselerasi Pemulihan Ekonomi Inklusif Berbasis Digitalisasi, Infratruktur Tematik, Harmoni dan Pengembangan SDM”.

Rumusan tema RKPD tahun 2023 pada kalimat **Akselerasi Pemulihan Ekonomi inklusif** terbentuk dari konsistensi pada tema pembangunan yang telah ditetapkan tematik pembangunan pada RKP tahun 2023 dan RPJMD di tahun 2023 yang mengimplisitkan

pemulihan ekonomi inklusif melalui pengembangan pariwisata diharapkan juga turut mendukung berkembangnya produktivitas sektor UMKM dan Pertanian yang disertai penguatan investasi, akses pasar dan pendampingan pelaku usaha lokal yang terdampak, harapannya dapat pulih karena covid -19 tahun 2020 dan tahun 2021 mengkontraksi ekonomi. Kata inklusif di harapkan dapat membangun pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan, serta akses dan kesempatan.

Berbasis Digitalisasi, Infrastruktur Tematik, Harmoni dan Pengembangan SDM sebagai pedoman atau dasar untuk bergerak dalam mencapai ekonomi inklusif. **Digitalisasi** sebagai bentuk transformasi ekonomi yang pada era modern mayoritas transaksi ekonomi menggunakan digitalisasi. **Infrastuktur tematik** di fokuskan pengembangan infrastruktur dan sistem infrastruktur yang tersedia akan dapat mendukung perkembangan sektor strategis, dimana kemudahan akses maupun ketersediaan sarana dan prasarana akan mendorong masyarakat Kabupaten Banyuwangi maupun dari luar daerah untuk mobilisasi dan distribusi, serta didorong roda perekonomian harapannya dapat berputar lebih massif. **Berbasis harmoni** yang pada dasarnya mendorong masyarakat mematuhi norma yang berlaku, bersikap kooperatif dalam menyelesaikan suatu masalah, dan saling menghargai, menghormati keanekaragaman yang ada di masyarakat. Harmoni sosial erat kaitannya dengan kesetaraan sosial, dimana ini bisa diartikan sebagai tata politik sosial di mana semua orang yang berada dalam suatu masyarakat atau kelompok tertentu memiliki status yang sama. Setidaknya, ini mencakup hak yang sama di bawah hukum, merasakan keamanan, memperoleh hak suara, mempunyai kebebasan untuk berbicara dan berkumpul, dan sejauh mana hak tersebut tidak merupakan hak-hak yang bersifat atau bersangkutan secara personal. Wujud harmoni untuk mempersiapkan pilkada serentak pada tahun 2024. Terakhir yaitu **Pengembangan SDM** , pengembangan SDM interkoneksi dengan yang dirumuskan pada tematik pembangunan Provinsi Jawa Timur Untuk tahun 2023 yaitu Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Sumberdaya Manusia. Pengembangan prioritas SDM masih menjadi prioritas karena nilai IPM yang merupakan representasi pembangunan kualitas SDM masih belum dapat bersaing di nasional.

Berdasarkan tema RKPD Kabupaten Banyuwangi 2023 **Akselarasi Pemulihan Ekonomi Inklusif Berbasis Digitalisasi, Infrastruktur Tematik, Harmoni dan Pengembangan SDM** dapat dirumuskan Prioritas Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut:

1. Mempercepat transformasi digital sektor pertanian, pariwisata, dan UMKM
2. Penguatan ketahanan kesehatan masyarakat melalui pendekatan promotif – preventif dan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan
3. Pembangunan infrastruktur terintegrasi penunjang kawasan ekonomi strategis guna membuka kesempatan kerja baru
4. Penguatan stabilitas sosial dan politik masyarakat dalam menghadapi pilkada serentak 2024

5. Peningkatan SDM unggul dan berbudaya melalui pendidikan vocational dan pengembangan local talent
6. Otomasi Layanan Publik dan manajemen pemerintahan hingga ke desa

Prioritas pembangunan Daerah yang dirumuskan pada RKPD Tahun 2023 masih mempertimbangkan prioritas Pembangunan yang ada sebelumnya di RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023. Berikut merupakan tabel yang memperhatikan Keselarasan Kebijakan RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026 dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023.

Tabel 4.3 Keselarasan Kebijakan RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026 dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023

Prioritas Pembangunan RPJMD Tahun 2023	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023
Akselarasi infrastruktur layanan dasar dan fasilitasi publik pendukung geopark ijen serta infrastruktur yang beririsan dengan nasional	Pembangunan infrastruktur terintegrasi penunjang kawasan ekonomi strategis guna membuka kesempatan kerja baru
Pembangunan infrastruktur penunjang lingkungan hidup dan kebencanaan	
Membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan berbudaya	Penguatan ketahanan kesehatan masyarakat melalui pendekatan promotif – preventif dan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan
	Peningkatan SDM unggul dan berbudaya melalui pendidikan vocational dan pengembangan local talent
Penguatan pariwisata yang didukung oleh agrowisata dan industri olahan wisata berkelanjutan	Mempercepat transformasi digital sektor pertanian, pariwisata, dan UMKM
Peningkatan manajemen pemerintahan dan layanan sampai tingkat desa	Otomasi Layanan Publik dan manajemen pemerintahan hingga ke desa
	Penguatan stabilitas sosial dan politik masyarakat dalam menghadapi pilkada serentak 2024

4.2.4 Interkoneksi Linearitas arah kebijakan nasional dan provinsi Jatim dan Kabupaten Banyuwangi

Interkoneksi linearitas untuk menjamin kesesuaian arah kebijakan pembangunan yang di atur oleh undang undang 25 Tahun 2004 yang menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antarDaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah. Gambar dibawah merupakan bukti bahwa Keselarasan antara tema dan prioritas pembangunan nasional dengan provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Banyuwangi.

Tabel 4.4 Keselarasan Tema dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023 dengan Provinsi Jawa Timur dan nasional Tahun 2023

	Nasional	Jawa Timur	Kabupaten Banyuwangi
Tema Pembangunan	Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang inklusif dan Berkelanjutan	Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Sumberdaya Manusia untuk Mendukung Daya Saing Daerah Menyambut Era Industri Perdagangan dan Jasa Berbasis Agro guna meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Akselarasi Pemulihan Ekonomi Inklusif Berbasis Digitalisasi, Infratraktur Tematik, Harmoni dan Pengembangan SDM
Prioritas Pembangunan	Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal 2.Peningkatan Kemandirian Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Energi 3. Peningkatan Kemandirian Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Energi 	Penguatan stabilitas sosial dan politik masyarakat dalam menghadapi pilkada serentak 2024
	Peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan;	Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan	<p>Penguatan ketahanan kesehatan masyarakat melalui pendekatan promotif – preventif dan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan</p> <p>Peningkatan SDM unggul dan berbudaya melalui pendidikan vocational dan pengembangan local talent</p>

	Nasional	Jawa Timur	Kabupaten Banyuwangi
	1. Pengangguran pengangguran disertai dengan peningkatan decent job;	Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata	Mempercepat transformasi digital sektor pertanian, pariwisata, dan UMKM
	2. mendorong pemulihan dunia usaha;		
	3. revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;		
	pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim);	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup	Pembangunan infrastruktur terintegrasi penunjang kawasan ekonomi strategis guna membuka kesempatan kerja baru
	Percepatan Pembangunan infrastruktur dasar antara lain: air bersih dan sanitasi;	Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur	
	Pembangunan ibu kota nusantara.	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur	Otomasi Layanan Publik dan manajemen pemerintahan hingga ke desa

Tabel berikut merupakan Keselarasan Target Indikator Sasaran Pembangunan Kabupaten Banyuwangi dengan Sasaran Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2023. Indikator makro sasaran nasional merupakan pertimbangan yang harus di capai oleh Kabupaten Banyuwangi. Dengan tema dan prioritas yang telah dirumuskan diharapkan mampu mencapai target Jawa Timur dan Nasional.

Tabel 4.5 Keselarasan Target Indikator Sasaran Pembangunan Kabupaten Banyuwangi dengan Sasaran Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2023

Indikator Sasaran Pembangunan	Target Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023	Target Jawa Timur Tahun 2023	Target Nasional Tahun 2023
Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,54	3,45 - 5,15	5,3 - 5,9
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,27	73,08 - 73,57	73,29 - 73,35
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	4,84	3,82 - 5,41	5,3 - 6,0
Persentase Penduduk Miskin (%)	7,49	9,35 - 10,55	7,0 - 8,5
Rasio Gini	0,31	0,3645- 0,3638	0,375 - 0,378

4.2.5 Interkoneksi permasalahan/isu strategis dengan Prioritas Pembangunan Daerah

Tabel 4. 6 Interkonektivitas Isu Strategis dengan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023

Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis	Prioritas Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023	Indikator Sasaran	Target 2023	Program Prioritas Daerah RPJMD (Janji Politis)	Sinkronisasi Program PMDN 90	Indikator Kinerja Program	Target 2023	Pagu Indikatif RPJMD Tahun 2023 (dalam Juta)	Perangkat Daerah
#Tingkat kesejahteraan dari sudut pandang pembangunan masyarakat semakin meningkat #Persentase PMKS di Banyuwangi masih cukup tinggi	Kesenjangan Sosial	Pengurangan Kemiskinan pedesaan dan Penguatan kualitas ketahanan pangan	Gini Ratio	0,31	Percepatan Pengurangan Kemiskinan	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS yang tertangani	37	1.168,99	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
						Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Pelayanan Perlindungan dan jaminan sosial	11,9		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
						Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adar	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	6		773,44

Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis	Prioritas Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023	Indikator Sasaran	Target 2023	Program Prioritas Daerah RPJMD (Janji Politik)	Sinkronisasi Program PMDN 90	Indikator Kinerja Program	Target 2023	Pagu Indikatif RPJMD Tahun 2023 (dalam Juta)	Perangkat Daerah
			Indeks Pengeluaran	0,78			Persentase lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terafiliasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	70		
					Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok	5,2	247,22	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	
					Program Stabilisasi Sumberdaya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Skor PPH Ketersediaan	95,4	653,36	Dinas Pertanian dan Pangan	
					Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu	87	70,63	Dinas Pertanian dan Pangan	
#Waktu tanggap darurat penanggulangan bencana semakin baik	Penguatan Modal Sosial masyarakat	Penguatan stabilitas sosial dan politik masyarakat dalam	Indeks Pembangunan Kebudayaan	57.8	Menjaga Stabilitas Sosial, Keagamaan dan Kerukunan Warga	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase budaya lokal (ritual adat dan tradisi) yang dikembangkan menjadi atraksi	70,58	706,34	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis	Prioritas Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023	Indikator Sasaran	Target 2023	Program Prioritas Daerah RPJMD (Janji Politis)	Sinkronisasi Program PMDN 90	Indikator Kinerja Program	Target 2023	Pagu Indikatif RPJMD Tahun 2023 (dalam Juta)	Perangkat Daerah
#Terdapat kasus pelanggaran perda yang masih belum tertangani #belum optimalnya aktivitas pengelolaan, pelestarian dan pengembangan warisan budaya #Adanya kecenderungan peningkatan kekerasan terhadap perempuan dan anak #Gap pembangunan manusia dari sisi keseimbangan gender masih cukup jauh tertinggal jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur		menghadapi pilkada serentak 2024	Indeks Kesalahan Sosial (IKS)	64,5		Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Angka potensi konflik SARA di masyarakat	2	988,88	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
						Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang dibina	80	139,86	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
						Program Peningkatan Ketentraman dan ketertiban Umum	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100	3.849,55	Satuan Polisi Pamong Praja
						Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	92	589,02	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis	Prioritas Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023	Indikator Sasaran	Target 2023	Program Prioritas Daerah RPJMD (Janji Politik)	Sinkronisasi Program PMDN 90	Indikator Kinerja Program	Target 2023	Pagu Indikatif RPJMD Tahun 2023 (dalam Juta)	Perangkat Daerah
			Indeks Pemberdayaan Gender	3	Perlindungan Perempuan, Anak, Difabel dan Kelompok Marginal	Program Perlindungan Perempuan	Presentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan	80	240,16	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
						Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase kelompok perempuan berdaya	25	45,91	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
						Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Penyelesaian kasus terhadap anak	80	276,16	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
# Masih rendahnya akses Pendidikan menengah sebagai kelanjutan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun # Masih adanya murid putus sekolah	Kapasitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berkarakter	Peningkatan SDM unggul dan berbudaya melalui pendidikan vocational dan pengembangan local tallent	Indeks Pendidikan	0.61	Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul	Program Pengelolaan Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini	95	215.551,08	Dinas Pendidikan
							Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan dasar	100		

Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis	Prioritas Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023	Indikator Sasaran	Target 2023	Program Prioritas Daerah RPJMD (Janji Politis)	Sinkronisasi Program PMDN 90	Indikator Kinerja Program	Target 2023	Pagu Indikatif RPJMD Tahun 2023 (dalam Juta)	Perangkat Daerah
#Masih belum optimalnya sarana prasarana pendidikan, khususnya pada jenjang menengah # Rendahnya indeks Kegemaran membaca Masyarakat # Rendahnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat							Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam Pendidikan kesetaraan	88,39		
							Pesentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum	50,24		
							Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum	28,56		
						Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata	1:41,46	141,27	Dinas Pendidikan
							Guru yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV	59,13		
						Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Perangkat kurikulum yang di kembangkan	100	600,39	Dinas Pendidikan

Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis	Prioritas Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023	Indikator Sasaran	Target 2023	Program Prioritas Daerah RPJMD (Janji Politik)	Sinkronisasi Program PMDN 90	Indikator Kinerja Program	Target 2023	Pagu Indikatif RPJMD Tahun 2023 (dalam Juta)	Perangkat Daerah						
<p>#Tingkat kecukupan gizi bagi balita masih belum merata</p> <p># Adanya kasus Balita Stunting di Masyarakat</p> <p># Belum optimalnya capaian KB aktif</p>		<p>Penguatan Ketahanan Kesehatan Masyarakat melalui pendekatan promotif preventif dan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan</p>	<p>Indeks Kesehatan</p>	<p>0.78</p>	<p>Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif</p>	<p>Program pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan</p>	<p>Persentase Cakupan Pembinaan Olahraga</p>	<p>10</p>	<p>13.715,71</p>	<p>Dinas Pemuda dan Olahraga</p>						
						<p>Program Pembinaan Perpustakaan</p>	<p>Indeks pembangunan literasi masyarakat</p>	<p>59</p>	<p>681,62</p>	<p>Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</p>						
								<p>Indeks tingkat kegemaran membaca masyarakat</p>			<p>59</p>					
												<p>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</p>	<p>Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita</p>	<p>21,1</p>	<p>2.847,93</p>	<p>Dinas Kesehatan</p>
													<p>Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan per 100.000 KH</p>	<p>94</p>		
													<p>Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH</p>	<p>5,06</p>		
													<p>Persentase capaian SPM Bidang Kesehatan</p>	<p>71,6</p>		
							<p>Persentase Penemuan dan Penanganan Kasus</p>	<p>100</p>								

Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis	Prioritas Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023	Indikator Sasaran	Target 2023	Program Prioritas Daerah RPJMD (Janji Politis)	Sinkronisasi Program PMDN 90	Indikator Kinerja Program	Target 2023	Pagu Indikatif RPJMD Tahun 2023 (dalam Juta)	Perangkat Daerah
						Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase Sarana Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Sarana Pengelolaan Makanan dan Minuman yang berijin	73	123,61	Dinas Kesehatan
# Rendahnya kemampuan untuk meningkatkan akses dan peluang pasar. # Rendahnya kemampuan dan akses terhadap sumber-sumber permodalan. # Rendahnya kualitas SDM pengelola koperasi. #semakin pulihnya iklim investasi di Kabupaten banyuwangi	Pemulihan Ekonomi Kabupaten Banyuwangi	Mempercepat transformasi digital sektor pertanian, pariwisata, dan UMKM	Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan (%)	3,26	Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase peningkatan produksi Tanaman pangan	0,50	11.953,03	Dinas Pertanian dan Pangan
							Persentase peningkatan produksi Tanaman perkebunan dan hortikultura	3,75		
							Rata-rata Persentase peningkatan produksi Peternakan	2		
						Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian mendukung tanaman pangan	100	5.781,39	Dinas Pertanian dan Pangan

Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis	Prioritas Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023	Indikator Sasaran	Target 2023	Program Prioritas Daerah RPJMD (Janji Politik)	Sinkronisasi Program PMDN 90	Indikator Kinerja Program	Target 2023	Pagu Indikatif RPJMD Tahun 2023 (dalam Juta)	Perangkat Daerah		
<p>#Terdapat penurunan persentase pemuda yang terlatih</p> <p># Belum optimalnya fasilitasi kegiatan kepemudaan</p> <p>#Menurunnya kelompok nelayan yang mendapat pembinaan</p> <p>Masih belum pulihnya sektor pariwisata akibat pandemi Covid-19</p> <p>#Aktivitas ekonomi pada sektor pertanian</p>							Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian mendukung tanaman perkebunan dan hortikultura	100				
							Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian mendukung peternakan	100				
							Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian mendukung kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	100				
						Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Usaha produk hewan yang bersertifikat PRA/NKV	9			1.928,31	Dinas Pertanian dan Pangan
							Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus	22,20				

Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis	Prioritas Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023	Indikator Sasaran	Target 2023	Program Prioritas Daerah RPJMD (Janji Politis)	Sinkronisasi Program PMDN 90	Indikator Kinerja Program	Target 2023	Pagu Indikatif RPJMD Tahun 2023 (dalam Juta)	Perangkat Daerah
<p>sudah mulai pulih</p> <p># Masih ada usaha produk hewan yaNg belum bersertifikat PRA/NKV</p> <p># Ancaman penyakit zoonosis (yg menular dari hewan ke manusia) seperti rabies, flu burung, brucellosis, antrax, dll akibat posisi Banyuwangi sebagai pintu masuk lalu lintas ternak dari luar pulau Jawa.</p>							penyakit hewan menular			
						Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Presentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT	100	197,04	Dinas Pertanian dan Pangan
						Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan bina kelompok petani	100	2.588,74	Dinas Pertanian dan Pangan

Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis	Prioritas Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023	Indikator Sasaran	Target 2023	Program Prioritas Daerah RPJMD (Janji Politik)	Sinkronisasi Program PMDN 90	Indikator Kinerja Program	Target 2023	Pagu Indikatif RPJMD Tahun 2023 (dalam Juta)	Perangkat Daerah
<p>#Aktivitas perdagangan besar sudah mulai pulih kembali</p> <p>#Aktivitas ekonomi pada sektor perindustrian sudah mulai pulih kembali</p> <p>#Belum optimalnya penyerapan tenaga kerja</p> <p># Masih kurangnya tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi</p>						Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase peningkatan Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	50	247,22	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
						Program Pengembangan UMKM	Persentase Usaha Mikro naik kelas	20	1.788,77	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
						Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana distribusi perdagangan yang mengalami peningkatan standar SNI	68,18	1.879,96	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
						Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase peningkatan SDM pengelola koperasi	3,91	394,97	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
						Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap nelayan kecil	22.324	2.754,73	Dinas Perikanan
						Program Pengelolaan	Produksi perikanan budidaya	31.133	1.691,68	Dinas Perikanan

Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis	Prioritas Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023	Indikator Sasaran	Target 2023	Program Prioritas Daerah RPJMD (Janji Politis)	Sinkronisasi Program PMDN 90	Indikator Kinerja Program	Target 2023	Pagu Indikatif RPJMD Tahun 2023 (dalam Juta)	Perangkat Daerah
						Perikanan Budidaya				
						Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase peningkatan produksi produk olahan hasil perikanan UMK	4,6	1.236,09	Dinas Perikanan
						Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Prosentase Penetapan dan Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal	7	38,85	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Indeks Daya Saing Pariwisata	3		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Lama kunjungan Wisata	2,3	4.657,59	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
						Program Pemasaran Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	1,15	1.836,48	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
							Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	5,2		

Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis	Prioritas Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023	Indikator Sasaran	Target 2023	Program Prioritas Daerah RPJMD (Janji Politik)	Sinkronisasi Program PMDN 90	Indikator Kinerja Program	Target 2023	Pagu Indikatif RPJMD Tahun 2023 (dalam Juta)	Perangkat Daerah
						Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase cakupan pengembangan ekonomi kreatif	29,41	1.996,11	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
						Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase cakupan pengembangan ekonomi kreatif	29,41	1.996,11	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,84	Pemulihan Ekonomi Akibat Covid-19 dan Pembukaan Lapangan Kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	1,02	370,83	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian
						Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	73,47	678,09	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian

Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis	Prioritas Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023	Indikator Sasaran	Target 2023	Program Prioritas Daerah RPJMD (Janji Politik)	Sinkronisasi Program PMDN 90	Indikator Kinerja Program	Target 2023	Pagu Indikatif RPJMD Tahun 2023 (dalam Juta)	Perangkat Daerah
						Program Pengembangan kapasitas daya Saing Kepemudaan	Persentase Pengembangan kapasitas daya Saing Kepemudaan	0,58	3.867,21	Dinas Pemuda dan Olahraga
						Program perencanaan dan pembangunan industri	Persentase pertumbuhan nilai produksi industri kecil menengah	1,26		
								Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	80	4.026,14
# Masih ada rumah tangga yang belum mendapatkan akses sanitasi yang layak # Belum semua rumah tangga mendapat akses terhadap air minum layak		Pembangunan infrastruktur terintegrasi penunjang kawasan ekonomi strategis guna membuka kesempatan kerja yang disertai	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	81,16	Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	92,5	33.014,32	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman
							Presentase ketersediaan LPJU pada jalan kabupaten	66		

Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis	Prioritas Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023	Indikator Sasaran	Target 2023	Program Prioritas Daerah RPJMD (Janji Politis)	Sinkronisasi Program PMDN 90	Indikator Kinerja Program	Target 2023	Pagu Indikatif RPJMD Tahun 2023 (dalam Juta)	Perangkat Daerah
<p>#Terdapat tren penurunan cakupan layanan sistem pengelolaan lumpur tinja #IKLH selama dua tahun terakhir menurun sangat signifikan</p> <p>#Sampah yang belum terkelola masih cukup banyak</p> <p>#mayoritas penanganan sampah rumah tangga masih dilakukan dengan cara dibakar</p> <p># Masih minimnya ketersediaan</p>		<p>peningkatan kualitas lingkungan hidup</p>				Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	78,45	106.573,74	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman
						Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kab/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	69		72.114,96
							Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan kab/Kota	63		
						Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	pemenuhan kebutuhan pokok air minum rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan dan perdesaan sehari-hari	89	7.416,57	Dinas Pekerjaan Umum Pengairan
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan	Kinerja lalu lintas Kabupaten/Kota	100	12.131,39	Dinas Perhubungan						

Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis	Prioritas Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023	Indikator Sasaran	Target 2023	Program Prioritas Daerah RPJMD (Janji Politik)	Sinkronisasi Program PMDN 90	Indikator Kinerja Program	Target 2023	Pagu Indikatif RPJMD Tahun 2023 (dalam Juta)	Perangkat Daerah				
sarana dan prasarana perhubungan #Masih cukup tingginya angka kecelakaan lalulintas, bahkan ada kecenderungan mengalami peningkatan						Angkutan Jalan (LLAJ)								
							Persentase layanan angkutan darat	100						
									Program Kawasan Pemukiman		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	33,33	1.412,68	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		71,19			Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup		Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	60,11	1.411,39	Dinas Lingkungan Hidup
											Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	86,67		
									Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)		Hasil Pengukuran Indeks kualitas Lahan	61,59	988,88	Dinas Lingkungan Hidup
									Program pengelolaan persampahan		Persentasae Pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	61,12	10.701,05	Dinas Lingkungan Hidup

Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis	Prioritas Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023	Indikator Sasaran	Target 2023	Program Prioritas Daerah RPJMD (Janji Politik)	Sinkronisasi Program PMDN 90	Indikator Kinerja Program	Target 2023	Pagu Indikatif RPJMD Tahun 2023 (dalam Juta)	Perangkat Daerah
			Indeks Resiko Bencana	68		Program Penanggulangan Bencana	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	100	4.389,90	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
							Persentase penanganan tanggap darurat bencana	100		
							Persentase penanganan pasca bencana	45		
						Program Pencegahan penanggulangan , penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	15	3.736,54	Dinas Pemadam Kebakaran
#Pelayanan KTP sudah normal kembali # Masih adanya Masyarakat yang enggan untuk melakukan Perekaman KTP-el dikarenakan Aksesibilitas Ketempat	Kualitas Layanan Publik dan Adaptasi Manajemen Pemerintahan.	Otomasi layanan publik dan manajemen pemerintahan ke desa	Indeks Reformasi Birokrasi	80	Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Program Pendaftaran Penduduk	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	100	406,15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
							Perekaman KTP-el	99,4		

Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis	Prioritas Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023	Indikator Sasaran	Target 2023	Program Prioritas Daerah RPJMD (Janji Politik)	Sinkronisasi Program PMDN 90	Indikator Kinerja Program	Target 2023	Pagu Indikatif RPJMD Tahun 2023 (dalam Juta)	Perangkat Daerah
Layanan Masih Jauh.										
# Adanya kebijakan nasional yang berdampak pada perubahan kebijakan daerah secara mendadak sehingga menyebabkan inkonsistensi perencanaan pembangunan di daerah #Kurang nya Kepatuhan Wajib Pajak Self Assesment Dalam Membayar Kewajiban Pajaknya						Program Pencatatan Sipil	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	94	543,88	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
							Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraianya dilaporkan	100		

Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis	Prioritas Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023	Indikator Sasaran	Target 2023	Program Prioritas Daerah RPJMD (Janji Politis)	Sinkronisasi Program PMDN 90	Indikator Kinerja Program	Target 2023	Pagu Indikatif RPJMD Tahun 2023 (dalam Juta)	Perangkat Daerah
<p>#Belum optimalnya hasil penelitian dan pengembangan digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah dan dalam penetapan suatu kebijakan</p> <p>#Belum maksimalnya OPD yang menggunakan data statistik sektoral</p>							Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	100		
						Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai dengan SOP	95,5	1.765,85	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
							Persentase dokumen APBD tepat waktu	100	280.921,13	Badan Pengelolaan

Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis	Prioritas Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023	Indikator Sasaran	Target 2023	Program Prioritas Daerah RPJMD (Janji Politis)	Sinkronisasi Program PMDN 90	Indikator Kinerja Program	Target 2023	Pagu Indikatif RPJMD Tahun 2023 (dalam Juta)	Perangkat Daerah
						Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase dokumen pengelolaan perbendaharaan daerah tepat waktu	100		Keuangan dan Aset Daerah
							Persentase Perangkat Daerah yang menyusun laporan tepat waktu	94		
			Nilai SAKIP	84,6		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase pertanggungjawaban keuangan Perangkat Daerah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100	1.924,78	Inspektorat
						Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Ketepatan waktu dalam tahapan pelaksanaan perencanaan (sesuai dengan Permendagri 86)	100	1.928,31	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
							Capaian Kinerja Perangkat Daerah	87		
						Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase realiasi penyediaan kebutuhan sarana dan prasara perkantoran	86	59.393,12	Sekretariat Daerah

Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis	Prioritas Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023	Indikator Sasaran	Target 2023	Program Prioritas Daerah RPJMD (Janji Politis)	Sinkronisasi Program PMDN 90	Indikator Kinerja Program	Target 2023	Pagu Indikatif RPJMD Tahun 2023 (dalam Juta)	Perangkat Daerah
							Persentase Perangkat Daerah dengan nilai Indeks RB baik (BB)	35		
							Persentase Perangkat Daerah dengan nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) diatas 80%	82		
							Persentase pelayanan kedinasan pimpinan dan pelayanan tamu tepat waktu	75		
							Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Sekretariat Daerah	90,5		
							Persentase Perangkat Daerah yang nilai AKIPnya bernilai baik (A)	82		
			Indeks Profesionalisme Aparatur	80,01		Program Kepegawaian Daerah	Persentase penempatan PNS sesuai dengan analisis jabatan	85	1.942,43	Badan Kepegawaian Daerah
							Persentase aparatur yang berkinerja baik	90		

Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis	Prioritas Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023	Indikator Sasaran	Target 2023	Program Prioritas Daerah RPJMD (Janji Politis)	Sinkronisasi Program PMDN 90	Indikator Kinerja Program	Target 2023	Pagu Indikatif RPJMD Tahun 2023 (dalam Juta)	Perangkat Daerah
			Indeks Inovasi Daerah (kategori)	Sangat inovatif		Program Aplikasi Informatika	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik Pemerintah Daerah	86	7.628,47	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
						Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100	7.550,35	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
						Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100	423,80	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
							Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100		

Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis	Prioritas Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023	Indikator Sasaran	Target 2023	Program Prioritas Daerah RPJMD (Janji Politis)	Sinkronisasi Program PMDN 90	Indikator Kinerja Program	Target 2023	Pagu Indikatif RPJMD Tahun 2023 (dalam Juta)	Perangkat Daerah
						Program Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemdes	80	1.871,80	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
							jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berkembang	50		

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan daerah dalam RKPD Tahun 2023 ini disesuaikan dengan kerangka pendanaan RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026 sesuai dengan tahun rencana, rencana kerja dan pendanaan RKPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022 sebagaimana tertuang dalam tabel berikut (sebagaimana terlampir) :



Kabupaten
Banyuwangi

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

6.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pada sub bab ini dipaparkan target capaian indikator kinerja utama Kabupaten Banyuwangi untuk tahun 2023. Target capaian yang digunakan sebagai acuan dalam RKPD tahun 2023 adalah target capaian indikator kinerja utama yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 - 2026. Berikut merupakan capaian kinerja pada kondisi awal beserta target capaian indikator kinerja utama tahun 2023.

Tabel 6.1 Target Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

No	Indikator Makro	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target	Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
			2023	
1	Pertumbuhan Ekonomi*(%)	-3.58	4,54	5,34
2	Persentase Penduduk Miskin*(%)	8.06	7,49	7,01
3	Indeks Pembangunan Manusia*	70.62	71.27	72.59
4	Indeks Kepuasan** Masyarakat	87.03	90,62	92,01
5	Gini Ratio***	0,32	0,31	0,30
6	Tingkat Pengangguran Terbuka***(%)	5.34	4,84	4,38

Keterangan:

* = IKU dan Indikator Makro

** = IKU

*** = Indikator Makro

6.2 Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Pada sub bab ini dipaparkan target capaian indikator kinerja daerah Kabupaten Banyuwangi untuk tahun 2023. Target capaian yang digunakan sebagai acuan dalam RKPD tahun 2023 adalah target capaian indikator kinerja daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021- 2026. Berikut

merupakan capaian kinerja tahun 2020 beserta target capaian indikator kinerja daerah tahun 2023.

Tabel 6.2 Target Capaian Indikator Kinerja Daerah Tahun 2023

NO.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Setiap Tahun 2023	
1	2	3	5	9
1	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT			
1.1	Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan (%)	-3.5	3,26	4,19
1.2	Tingkat inflasi (%)	1,74	3,0	3,0
1.3	Pendapatan Perkapita (Rp. Juta)	50,13	57,56	67,92
1.4	Pendidikan			
1.4.1	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	7,16	7,22	7,31
1.4.2	Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,8	13	13,3
1.5	Kesehatan			
1.5.1	Umur Harapan Hidup (tahun)	70,65	70,84	71,12
1.5.2	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	5.10	5.06	5.03
1.5.3	Angka kematian ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	79,7	94	91
2.	ASPEK PELAYANAN UMUM			
	Pelayanan Urusan Wajib			
2.1.	Terkait Pelayanan Dasar			
2.1.1.	Pendidikan			
2.1.1.1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini	86,33%	94.76%	100%
2.1.1.2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan	95,64%	100%	100%
2.1.1.3	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam Pendidikan kesetaraan	73.39%	88.39%	100%
2.1.2.	Kesehatan			
2.1.2.1	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	24,26%*	21.1%	18.1%
2.1.3.	Pekerjaan umum dan penataan ruang;			
2.1.3.1	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	n/a	81.16	85.9
2.1.3.2	Persentase ketersediaan air irigasi	88	90	93
2.1.3.3	Persentase ketersediaan air bersih	86	89	92
2.1.4.	Perumahan rakyat dan kawasan permukiman			
2.1.4.1	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	n/a	81,16	85,9
2.1.5	Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat			
2.1.5.1	Indeks Kepatuhan pada Peraturan Negara	n/a	83	86
2.1.5.2	Indeks Resiko Bencana	59	68	80
2.1.5.3	Indeks ketahanan & keselamatan kebakaran	n/a	92	97
2.1.5.4	Persentase cakupan pelayanan bencana kebakaran (wilayah manajemen kebakaran (WMK) / jumlah luas kabupaten x 100%)	n/a	62	65
2.1.6.	Sosial			
2.1.6.1	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	n/a	64.5	69
2.1.6.2	Indeks Kepedulian Sosial	33,2	33,4	33,7
2.1.6.3	Persentase Pelayanan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	36,7	37	40

NO.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun 2023	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
2.2.	Tidak Terkait Pelayanan Dasar			
2.2.1	Tenaga Kerja			
2.2.1.1	Tingkat Kesempatan Kerja	94,66	95,16	95,62
2.2.1.2	Persentase perlindungan tenaga kerja penerima upah pada perusahaan	49,76	53,33	56,9
2.2.2	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak			
2.2.2.1	Indeks Pemberdayaan Perempuan	n/a	3	3
2.2.2.2	Jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak	78	80	87
2.2.3	Pangan			
2.2.3.1	Angka konsumsi beras kabupaten Banyuwangi	n/a	92,59	89,84
2.2.3.2	Persentase Ketersediaan Bahan Pangan Pokok Unggulan	100	100	100
2.2.4	Pertanahan			
2.2.4.1	Persentase fasilitasi sengketa dan konflik pertanahan	100	100	100
2.2.5	Lingkungan hidup;			
2.2.5.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	68,66	71,19	71,32
2.2.5.2	Rasio sampah daerah yang tertangani	61	61,12	61,31
2.2.6	Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil			
2.2.6.1	Rata-rata Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	86,09	89	94
2.2.6.2	Persentase pengolahan data kependudukan yang sesuai dengan data konsolidasi kemendagri	91,54	94	97
2.2.7	Pemberdayaan masyarakat dan Desa			
2.2.7.1	Indeks Desa Membangun	0,8176	0,8205	0,8342
2.2.7.2	Indeks Kepuasan Masyarakat Desa	84,9	85	86,5
2.2.8	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana			
2.2.8.1.	Angka kelahiran total	2,07	2,07	2,07
2.2.9	Perhubungan			
2.2.9.1	Indeks Kepuasan Layanan Perhubungan	79,32	81,49	83,06
2.2.9.2	Rasio konektivitas kabupaten	76	77,23	79,46
2.2.10	Komunikasi dan informatika			
2.2.10.1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,22	3,34	3,41
2.2.11	Koperasi, usaha kecil, dan menengah;			
2.2.11.1	Persentase koperasi berkualitas	53,47	53,8	53,96
2.2.11.2	Persentase UKM terhadap UMKM	7,68	8,73	9,8
2.2.12	Penanaman modal			
2.2.12.1	Laju Pertumbuhan Investasi	7,42	7,54	7,6
2.2.12.2	Realisasi Investasi PMA dan PMDN	4,23	5,26	6,55
2.2.13	Kepemudaan dan olah raga			
2.2.13.1	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	n/a	0,016	0,017
2.2.13.2	Persentase atlet berprestasi	0	10	30
2.2.14	Statistik			
2.2.14.1	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100%	80%	80%
2.2.15	Persandian			
2.2.15.1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	100%	80%	80%
2.2.16	Kebudayaan			
2.2.16.1	Indeks Pembangunan Kebudayaan	n/a	57,8	61,18
2.2.17	Perpustakaan			

NO.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Setiap Tahun 2023	
2.2.17.1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	5,6	8,6	11
2.2.17.2	Persentase minat baca	56	59	62
2.2.18	Kearsipan			
2.2.18.1	Tingkat ketersediaan arsip (%)	59,52	61	64
	Pelayanan Urusan Pilihan			
2.3.1	Pertanian			
2.3.1.1	Pertumbuhan PDRB Kategori A (Pertanian, Kehutanan dan Perikanan)	-2,96	0,14	0,22
2.3.1.2	Rata-rata persentase peningkatan produksi pertanian unggulan	2,52	3	19,4
2.3.2	Kelautan dan perikanan			
2.3.2.1	Persentase peningkatan produksi perikanan	-39	3,58	23,46
2.3.2.2	Konsumsi ikan (kg/ kap/ th)	33,1	33,25	33,4
2.3.3	Pariwisata			
2.3.3.1	Indeks Daya Saing Pariwisata	n/a	3	3
2.3.4	Perdagangan			
2.3.4.1	Pertumbuhan PDRB Kategori G (Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor)	-6,63	6,4	7,24
2.3.4.2	Indeks harga konsumen makanan dan minuman	101,63	109,29	118,2
2.3.4.3	Persentase sarana distribusi perdagangan yang mengalami peningkatan standar SNI	11,22	68.18	95.45
2.3.5	Perindustrian			
2.3.5.1	Pertumbuhan PDRB Kategori C (Industri Pengolahan)	-0,38	5,64	7,1
2.3.5.2	Persentase peningkatan nilai penjualan (omset) IKM	-11,53	2,1	2,4
3	ASPEK DAYA SAING DAERAH			
3.1	Indeks Pengeluaran	0.76	0.77	0.79
3.2	Nilai SAKIP	83,1	84,6	86,1
3.3	Nilai komponen perencanaan kinerja pada SAKIP (Review SAKIP Inspektorat)	28,5	28,62	28,86
3.4	Indeks Reformasi Birokrasi	77	80	83
3.5	Persentase pengawasan yang efektif, efisien dan akuntabel sebagai upaya pencegahan terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah	100	85	100
3.6	Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	WTP
3.7	Penetapan APBD tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu
3.8	Indeks Profesionalitas ASN	75.91	80.01	83.89
3.9	Indeks Inovasi Daerah (kategori)	Sangat inovatif	Sangat inovatif	Sangat inovatif
3.10	Persentase keluhan/ pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	83,5	88	91
3.11	Indeks relasi antar manuasia	n/a	64.5	69
3.12	Indeks etika dan budi pekerti	n/a	64.5	69
3.13	Tingkat konflik SARA dan IPOLEKSOSBUDHANKAM	0	0	0

BAB VII

PENUTUP

Dengan tersusunya RKPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023 ini diharapkan semua pihak dapat mengetahui gambaran tentang rancangan kerangka ekonomi, prioritas pembangunan dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023, selain itu RKPD dipergunakan sebagai pedoman :

- a. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023;
- b. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan menentukan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023;
- c. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023;
- d. Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- e. Penyelarasan prioritas pembangunan dan sinergitas perencanaan pembangunan antar sektor, antar wilayah dan antar tingkat pemerintah.

RKPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023 ini, diharapkan mampu mewujudkan cita-cita pembangunan Kabupaten Banyuwangi yakni **“Akselerasi Pemulihan Ekonomi Inklusif Berbasis Digitalisasi, Infrastruktur Tematik, Harmoni dan Pengembangan SDM”**.

Dalam pelaksanaan tahun berjalan RKPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023, apabila terjadi adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan atau tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah serta rencana program dan kegiatan, maka akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk RKPD Perubahan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bupati/Walikota menyampaikan Peraturan Bupati/Walikota tentang RKPD Kabupaten/Kota kepada Gubernur melalui BAPPEDA Provinsi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Dokumen ini diharapkan dapat menjadi media komunikasi secara berkelanjutan antara semua pelaku pembangunan dan sebagai media evaluasi pelaksanaan pembangunan dan sebagai media evaluasi pelaksanaan program/kegiatan supaya tetap sesuai dengan rencana.

BUPATI BANYUWANGI,

IPUKE FIESTIANDANI AZWAR ANAS



Kabupaten
Banyuwangi



Kabupaten
Banyuwangi

Lampiran Bab 2 Tabel 2.2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan Kabupaten Banyuwangi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020					Target Program/Kegiatan RKPd tahun berjalan (tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun berjalan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Tingkat Realisasi (%)	K	Rp	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d tahun 2021	K	Rp			K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																		DINAS PENDIDIKAN			
01:01:02	Program Pengelolaan Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini	85		85		85		85		100		85						0,00			
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan dasar	100		100		100		100		100		100		1				0,01			
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam Pendidikan kesetaraan	73,39	315.691.883.703	73,39	2.650.410.338	73,39	318.302.798.462	73,39	304.594.038.526	95,69	73,39	315.691.883.703	73,39	2.650.410.338	0,01						
		Pesentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum	47,24		47,24		47,24		47,24		100		47,24		47,24					1,00		
		Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum	25,56		25,56		25,56		25,56		100		25,56		25,56					1,00		
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Cakupan Pendidikan Sekolah Dasar	100	173.687.519.513	100	1.591.003.316	100	162.345.113.039	100	157.864.732.094	100	97,24	100	173.687.519.513	100	1.591.003.316	1,00	0,01				
1.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah ruang kelas baru yang bertambah	24	2.026.703.333	0	-	268	1.306.165.670	268	877.766.510	100	67,20	24	2.026.703.333	0	-	0,00	0,00				
1.01.02.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah perpustakaan sekolah yang telah dibangun	13	2.814.077.500	0	-	593	1.719.999.060	593	1.716.372.000	100	99,79	13	2.814.077.500	0	-	0,00	0,00				
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang telah dibangun	46	3.369.769.080	0	-	6.819	3.748.531.260	6.819	3.587.784.480	100	95,71	46	3.369.769.080	0	-	0,00	0,00				
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah ruang kelas sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat	204	12.437.653.900	0	-	22.566	33.998.181.900	22.021	31.439.887.942	97,58	92,48	204	12.437.653.900	0	-	0,00	0,00				
1.01.02.2.01.09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah ruang guru sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat	3	367.680.000	0	1.562.000	3.906	7.684.453.580	3.906	7.662.060.400	100	99,71	3	367.680.000	0	1.562.000	0,00	0,00				
1.01.02.2.01.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah perpustakaan sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat	8	787.226.500	0	-	3.005	4.281.938.160	3.005	4.260.830.910	100	99,51	8	787.226.500	0	-	0,00	0,00				
1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat	21	1.060.872.300	0	1.562.000	1.636	2.765.471.680	1.604	1.885.750.472	98,04	68,19	21	1.060.872.300	0	1.562.000	0,00	0,00				
1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah mebel sekolah yang tersedia	1188	1.156.518.000	0	-	493	124.608.000	74	72.556.000	15,01	58,23	1188	1.156.518.000	0	-	0,00	0,00				
1.01.02.2.01.16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah perlengkapan sekolah yang tersedia	44	438.750.000	0	-	1.000	449.625.000	1.000	446.806.250	100	99,37	44	438.750.000	0	-	0,00	0,00				
1.01.02.2.01.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah perlengkapan siswa yang tersedia	265	199.571.500	0	-	1.462	699.886.000	1.462	640.634.511	100	91,53	265	199.571.500	0	-	0,00	0,00				
1.01.02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah alat praktik dan peraga siswa yang tersedia	187	19.671.750.000	0	-	92	124.960.000	0	-	0	0,00	187	19.671.750.000	0	-	0,00	0,00				
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah siswa yang mengikuti ajang kompetisi/lomba akademik dan non akademik	7195	1.184.393.800	375	51.875.000	8.574	949.993.210	6.567	826.979.850	76,59	87,05	2675	1.184.393.800	375	51.875.000	0,14	0,04				
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah satuan pendidikan yang menyelenggarakan proses belajar dan ujian	1576	176.228.000	0	-	200	99.999.880	200	99.732.250	100	99,73	1576	176.228.000	0	-	0,00	0,00				
1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapatkan fasilitasi kenaikan pangkat/golongan, pemberian promosi, peningkatan kompetensi dan kualifikasi	4585	2.059.219.000	665	197.727.800	2.025	934.015.380	2.025	903.913.080	100	96,78	4585	2.059.219.000	665	197.727.800	0,15	0,10				
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah sekolah menengah dasar yang dilaksanakan pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah	4460	3.231.900.900	1060	1.282.156.016	12	5.462.542.019	12	5.223.828.378	100	95,63	4460	3.231.900.900	1060	1.282.156.016	0,24	0,40				
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah sekolah menengah dasar yang dilaksanakan pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah	952	121.802.832.700	0	-	769	97.494.742.800	769	97.720.011.121	100	100,23	952	121.802.832.700	0	-	0,00	0,00				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020						Target Program/Kegiatan RKPD tahun berjalan (tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun berjalan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d tahun 2021	K	Rp	K		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.01.02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah tenaga pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam pengelolaan dana BOS sekolah dasar	760	252.970.500	760	56.120.500	825	499.999.440	825	499.817.940	100	99,96	760	252.970.500	760	56.120.500	1,00	0,22		
1.01.02.2.01.31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah ruang laboratorium sekolah dasar yang telah dibangun	3	649.402.500	0	-	0	-	0	-	0	0,00	3	649.402.500	0	-	0,00	0,00		
1.01.02.2.02.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Cakupan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100	69.323.382.190	0	235.041.600	100	64.384.333.435	100	61.160.418.508	100	94,99	100	69.323.382.190	0	235.041.600	0,00	0,00		
1.01.02.2.02.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah ruang kelas baru yang bertambah	10	1.418.090.490	0	2.025.500	535	2.214.944.510	345	1.453.490.172	0	0,00	10	1.418.090.490	0	2.025.500	0,00	0,00		
1.01.02.2.02.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah perpustakaan sekolah yang telah dibangun	2	416.467.500	0	2.025.500	0	-	0	-	0	0,00	2	416.467.500	0	2.025.500	0,00	0,00		
1.01.02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium	Jumlah ruang laboratorium yang telah dibangun	3	935.228.000	0	-	0	-	0	-	0	0,00	3	935.228.000	0	-	0,00	0,00		
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang telah dibangun	23	3.143.381.600	0	1.562.000	3441	2.236.356.180	3441	2.030.326.310	100	90,79	23	3.143.381.600	0	1.562.000	0,00	0,00		
1.01.02.2.02.13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah gedung sekolah yang direhabilitasi sedang/berat	2	150.629.500	0	-	276	389.592.000	276	388.477.010	100	99,71	2	150.629.500	0	-	0,00	0,00		
1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah ruang kelas sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat	44	2.942.541.500	0	4.051.000	3510,2	8.161.638.820	3510,2	7.313.594.368	100	89,61	44	2.942.541.500	0	4.051.000	0,00	0,00		
1.01.02.2.02.15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah ruang guru sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat	2	200.974.000	0	-	540	729.378.660	540	602.372.600	100	82,59	2	200.974.000	0	-	0,00	0,00		
1.01.02.2.02.17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah perpustakaan sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat	2	265.215.000	0	-	153	441.754.690	153	407.898.800	100	92,34	2	265.215.000	0	-	0,00	0,00		
1.01.02.2.02.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah laboratorium yang telah direhabilitasi sedang/berat	3	465.513.000	0	4.051.000	630	1.544.939.500	630	1.149.603.514	100	74,41	3	465.513.000	0	4.051.000	0,00	0,01		
1.01.02.2.02.19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah ruang serba guna/aula yang telah direhabilitasi sedang/berat	1	199.875.500	0	2.025.500	0	-	0	-	0	0,00	1	199.875.500	0	2.025.500	0,00	0,01		
1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat	2	304.491.500	0	-	1636	2.765.471.680	1604	1.885.750.472	98,04	68,19	2	304.491.500	0	-	0,00	0,00		
1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah mebel sekolah yang tersedia	81	311.074.500	0	-	493	124.608.000	74	72.556.000	15,01	58,23	81	311.074.500	0	-	0,00	0,00		
1.01.02.2.02.27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah perlengkapan sekolah yang tersedia	4	40.500.000	0	-	0	-	0	-	0	0,00	4	40.500.000	0	-	0,00	0,00		
1.01.02.2.02.28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah perlengkapan siswa yang tersedia	265	199.571.500	0	-	1000	449.625.000	1000	446.806.250	100	99,37	265	199.571.500	0	-	0,00	0,00		
1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa	Jumlah alat praktik dan peraga siswa yang tersedia	57	1.837.287.300	0	-	86	100.000.000	86	99.726.000	100	99,73	57	1.837.287.300	0	-	0,00	0,00		
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah peserta didik yang mengikuti proses belajar dan ujian	5000	85.000.000	0	-	200	99.999.880	200	99.732.250	100	99,73	5000	85.000.000	0	-	0,00	0,00		
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah siswa yang mengikuti ajang kompetisi/lomba akademik dan non akademik	8615	1.467.499.600	0	63.493.900	7475	674.988.495	5468	567.706.950	73,15	84,11	8615	1.467.499.600	0	63.493.900	0,00	0,04		
1.01.02.2.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang tersedia pada satuan pendidikan sekolah menengah pertama	85	84.999.800	0	-	81	164.999.710	79	138.748.250	97,53	84,09	85	84.999.800	0	-	0,00	0,00		
1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapatkan fasilitas kenaikan pangkat/golongan, pemberian promosi, peningkatan kompetensi dan kualifikasi	3577	1.855.000.000	515	126.407.800	3990	2.051.429.580	3865	1.969.950.195	96,87	96,03	3577	1.855.000.000	515	126.407.800	0,14	0,07		
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah sekolah menengah pertama yang dilaksanakan pembinaan	745	471.890.000	0	-	623	1.276.110.140	623	1.254.977.050	100	98,34	745	471.890.000	0	-	0,00	0,00		
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	281	52.381.122.500	0	-	73	40.637.148.000	73	40.957.463.726	100	100,79	281	52.381.122.500	0	-	0,00	0,00		
1.01.02.2.02.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah tenaga yang meningkatkan kapasitasnya dalam pengelolaan dana BOS sekolah menengah pertama	73	147.029.400	73	29.399.400	200	321.348.590	200	321.238.590	100	99,97	73	147.029.400	73	29.399.400	1,00	0,20		
1.01.02.2.03.	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Cakupan Pendidikan Anak Usia Dini	100	38.099.780.300	0	3.956.272	100	41.565.572.560	100	37.774.507.182	100	90,88	100	38.099.780.300	0	3.956.272	0,00	0,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020						Target Program/Kegiatan RPKD tahun berjalan (tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun berjalan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp	K	Rp	Target RKPD Tahun 2021		Realisasi RKPD Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)		K	Rp	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Realisasi Target s/d tahun 2021			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13
1.01.02.2.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD yang telah dibangun	40	2.710.736.500	0	-	0	-	0	-	0	0,00	40	2.710.736.500	0	-	0,00	0,00		
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah sarana, prasarana dan utilitas PAUD yang telah dibangun	7	374.500.000	0	-	0	-	0	-	0	0,00	7	374.500.000	0	-	0,00	0,00		
1.01.02.2.03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah ruang kelas sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat	23	1.901.935.500	0	-	4	634.999.370	0	-	0	0,00	23	1.901.935.500	0	-	0,00	0,00		
1.01.02.2.03.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah sarana, prasarana dan utilitas PAUD yang telah direhabilitasi sedang/berat	3	217.987.000	0	-	0	-	0	-	0	0,00	3	217.987.000	0	-	0,00	0,00		
1.01.02.2.03.09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang tersedia	1	15.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0,00	1	15.000.000	0	-	0,00	0,00		
1.01.02.2.03.10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah perlengkapan siswa yang tersedia	279	199.903.500	0	-	1250	299.982.100	1250	298.753.125	100	99,59	279	199.903.500	0	-	0,00	0,00		
1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah alat praktik dan peraga siswa yang tersedia	19	475.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0,00	19	475.000.000	0	-	0,00	0,00		
1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah peserta didik PAUD yang mengikuti proses belajar	2500	99.999.800	0	-	950	335.999.645	950	335.916.520	100	99,98	2500	99.999.800	0	-	0,00	0,00		
1.01.02.2.03.14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang siap dievaluasi dan melaksanakan rekomendasi	250	150.000.000	0	-	800	385.999.050	800	385.932.500	100	99,98	250	150.000.000	0	-	0,00	0,00		
1.01.02.2.03.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang tersedia pada PAUD	2461	500.000.000	0	-	2100	8.310.998.730	2100	8.289.415.730	100	99,74	2461	500.000.000	0	-	0,00	0,00		
1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapatkan fasilitas kenaikan pangkat/golongan, pemberian promosi, peningkatan kompetensi dan kualifikasi	2617	1.050.000.000	0	-	3945	1.789.196.812	3945	1.774.300.001	100	99,17	2617	1.050.000.000	0	-	0,00	0,00		
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang dilaksanakan pembinaan kelembagaan dan manajemen	1023	525.335.000	0	-	1402	853.597.163	1402	847.589.616	100	99,30	1023	525.335.000	0	-	0,00	0,00		
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang mengelola dana BOP	1002	29.713.120.000	2	3.956.272	1037	28.804.800.000	1998	25.692.600.000	192,67	89,20	1002	29.713.120.000	2	3.956.272	0,00	0,00		
1.01.02.2.03.19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah tenaga yang meningkatkan kapasitasnya dalam pengelolaan dana BOP PAUD	100	150.000.000	0	-	1350	149.999.690	1350	149.999.690	100	100,00	100	150.000.000	0	-	0,00	0,00		
1.01.02.2.03.20	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah mebel sekolah yang dipelihara	20	16.263.000	0	-	0	-	0	-	0	0,00	20	16.263.000	0	-	0,00	0,00		
1.01.02.2.04.	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Cakupan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	100	34.581.201.700	0	820.409.150	100	50.007.779.428	100	47.794.380.742	100	95,57	100	34.581.201.700	0	820.409.150	0,00	0,02		
1.01.02.2.04.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah gedung/ruang kelas/ruang guru non formal/kesetaraan yang telah dibangun	11	1.200.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0,00	11	1.200.000.000	0	-	0,00	0,00		
1.01.02.2.04.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah non formal/kesetaraan yang telah dibangun	9	420.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0,00	9	420.000.000	0	-	0,00	0,00		
1.01.02.2.04.07	Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah mebel pendidikan non formal/kesetaraan yang dilaksanakan pemeliharaan	2	55.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0,00	2	55.000.000	0	-	0,00	0,00		
1.01.02.2.04.10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah peserta didik non formal/kesetaraan yang menerima biaya personil peserta didik	12186	13.411.571.500	0	-	24924	19.315.783.300	24552	17.730.713.547	98,51	91,79	12186	13.411.571.500	0	-	0,00	0,00		
1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah peserta didik yang mengikuti proses belajar	34500	699.999.900	0	-	974	7.158.483.540	2353	7.091.502.820	241,58	99,06	34500	699.999.900	0	-	0,00	0,00		
1.01.02.2.04.13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah satuan pendidikan non formal/kesetaraan siap dievaluasi dan melaksanakan rekomendasi	506	799.999.900	375	180.324.000	1737	2.058.085.740	1737	2.017.473.600	100	98,03	506	799.999.900	375	180.324.000	0,74	0,23		
1.01.02.2.04.15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapatkan fasilitas kenaikan pangkat/golongan, pemberian promosi, peningkatan kompetensi dan kualifikasi	1150	1.860.301.200	0	640.085.150	3276	2.926.124.820	3476	2.898.438.850	106,11	99,05	1150	1.860.301.200	0	640.085.150	0,00	0,34		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020						Target Program/Kegiatan RPKD tahun berjalan (tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun berjalan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Tingkat Realisasi (%)	K	Rp	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Realisasi Target s/d tahun 2021		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah sekolah non formal/kesetaraan yang dilaksanakan pembinaan kelembagaan dan manajemen	541	6.299.999.500	0	-	5448	8.892.702.228	5448	8.429.352.125	100	94,79	541	6.299.999.500	0	-	0,00	0,00		
1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah sekolah non formal/kesetaraan yang mengelola dana BOP	35	8.884.330.000	0	-	44	9.478.100.000	44	9.448.400.000	100	99,69	35	8.884.330.000	0	-	0,00	0,00		
1.01.02.2.04.18	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah tenaga yang meningkatkan kapasitasnya dalam pengelolaan dana BOP sekolah non formal/kesetaraan	35	149.999.900	0	-	53	178.499.800	53	178.499.800	100	100,00	35	149.999.900	0	-	0,00	0,00		
1.01.02.2.04.22	Penyelenggaraan Ujian Bagi Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah satuan pendidikan yang menyelenggarakan ujian	100	799.999.800	0	-	0	-	0	-	0	0,00	100	799.999.800	0	-	0,00	0,00		
01:01:03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Perangkat kurikulum yang di kembangkan	100	366.669.200	-	100	64.988.000	100	61.598.240	100	94,78	100	366.669.200	0	-	0,00	0,00			
1.01.03.2.01.	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Cakupan Penetapan Kurikulum muatan lokal Pendidikan Dasar	70	199.929.200	-	70	64.988.000	70	61.598.240	100	94,78		199.929.200	0	-	0,00	0,00			
1.01.03.2.01.03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah buku teks pelajaran muatan lokal pendidikan dasar yang tersedia	800	199.929.200	0	-	500	64.988.000	500	61.598.240	100	94,78	800	199.929.200	0	-	0,00	0,00		
1.01.03.2.02.	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Cakupan Penetapan Kurikulum muatan lokal Pendidikan endidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Formal	70	166.740.000	-	0	-	0	-	0	0,00		166.740.000	0	-	0,00	0,00			
1.01.03.2.02.03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah buku teks pelajaran muatan lokal pendidikan dasar yang tersedia	800	166.740.000	0	-	-	-	-	-	0,00	800	166.740.000	0	-	0,00	0,00			
01:01:04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata	1:44,26	99.980.500	1:44,26	-	1:44,26	49.984.640	1:44,26	49.984.640	100	100,00	1:44,26	99.980.500	1:44,26	-	1,00	0,00		
		Guru yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV	58,63		58,63		58,63		100		58,63		58,63		1,00					
1.01.04.2.01.	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Cakupan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	80	99.980.500	80	-	80	49.984.640	80	49.984.640	100	100,00	80	99.980.500	80	-	1,00	0,00		
1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah dokumen hasil perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan non formal/kesetaraan	2	49.990.250	0	-	0	-	0	-	0	0,00	2	49.990.250	0	-	0,00	0,00		
1.01.04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah laporan hasil pelaksanaan penataan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan non formal/kesetaraan	2	49.990.250	0	-	500	49.984.640	500	49.984.640	100	100,00	2	49.990.250	0	-	0,00	0,00		
01:01:05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan yang dibina	100	100.000.000	100	-	100	49.998.560	100	17.918.560	100	35,84	100	100.000.000	100	-	1,00	0,00		
		Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi	807		807		807		807											
		Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	97,43		97,43		97,43		97,43											
		Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	79,7		79,7		79,7		79,7											
		Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi	30		30		30		30											
1.01.05.2.01.	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Cakupan Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakat	80	50.000.000	0	-	0	0	0	0	0,00	80	50.000.000	0	-	0,00	0,00			
1.01.05.2.01.01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah dokumen hasil penilaian kelayakan usul perizinan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat	4	50.000.000	-	-	0	0	0	0	0,00	4	50.000.000	0	-	0,00	0,00			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020						Target Program/Kegiatan RKPd tahun berjalan (tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun berjalan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp	K	Rp	Target RKPd Tahun 2021		Realisasi RKPd Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)		K	Rp	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Realisasi Target s/d tahun 2021			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13
1.01.05.2.02.	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Cakupan Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat	80	50.000.000	80	-	80	49.998.560	80	17.918.560	100	35,84	80	50.000.000	80	-	1,00	0,00		
1.01.05.2.02.01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah dokumen hasil penilaian kelayakan usul perizinan PAUD dan pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat	4	50.000.000	0	-	200	49.998.560	200	17.918.560	100	35,84	4	50.000.000	0	-	0,00	0,00		
01:01:06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase bahasa dan sastra yang dikembangkan	100	150.000.000	100	-	0	0	0	0	0	0,00	100	150.000.000	100	-	1,00	0,00		
1.01.06.2.01.	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah	80	150.000.000	80	-	0	0	0	0	0	0,00	80	150.000.000	80	-	1,00	0,00		
1.01.02.2.01.01	Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kamus bahasa daerah yang disusun	1	50.000.000	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	1	50.000.000	0	-	0,00	0,00		
1.01.02.2.01.03	Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah publikasi kebahasaan dan kesastraan daerah kewenangan kabupaten/kota	1	50.000.000	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	1	50.000.000	0	-	0,00	0,00		
1.01.02.2.01.06	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah siswa mengapresiasi bahasa dan sastra daerah kewenangan kabupaten/kota	20	50.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0,00	20	50.000.000	0	-	0,00	0,00		
01:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	93,5	502.885.324.104	93,5	94.502.488.894	93,5	706.544.499.177	93,5	685.301.870.327	100	96,99	93,5	502.185.324.104	93,5	94.502.488.894	1,00	0,19		
1.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	80	599.998.800	0	103.382.900	80	702.873.210	80	564.895.140	100	80,37	80	599.998.800	0	103.382.900	0,00	0,17		
1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	1	49.999.800	1	8.239.800	1	74.983.320	1	42.718.320	100	56,97	1	49.999.800	1	8.239.800	1,00	0,16		
1.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1	19.999.900	1	19.999.900	0	-	0	-	0	0,00	1	19.999.900	1	19.999.900	1,00	1,00		
1.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	19.999.900	0	-	0	-	0	-	0	0,00	1	19.999.900	0	-	0,00	0,00		
1.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1	19.999.900	1	19.999.900	0	-	0	-	0	0,00	1	19.999.900	1	19.999.900	1,00	1,00		
1.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1	19.999.900	0	-	0	-	0	-	0	0,00	1	19.999.900	0	-	0,00	0,00		
1.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	324.999.600	7	43.291.800	8	627.889.890	8	522.176.820	100	83,16	10	324.999.600	7	43.291.800	0,70	0,13		
1.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1	144.999.800	1	11.851.500	0	-	0	-	0	0,00	1	144.999.800	1	11.851.500	1,00	0,08		
1.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	90	433.965.066.084	0	85.680.474.255	90	642.893.605.023	90	629.969.317.616	100	97,99	90	433.965.066.084	0	85.680.474.255	0,00	0,20		
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	6000	433.565.066.284	5544	85.631.767.455	12	642.647.779.023	12	629.765.717.946	100	98,00	6000	433.565.066.284	5544	85.631.767.455	0,92	0,20		
1.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	249.999.900	0	-	123	53.658.860	123	53.630.480	100	99,95	1	249.999.900	0	-	0,00	0,00		
1.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	8	149.999.900	2	48.706.800	186	192.167.140	186	149.969.190	100	78,04	8	149.999.900	2	48.706.800	0,25	0,32		
1.01.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Barang milik daerah pada Perangkat Daerah	80	74.999.900	0	71.667.900	80	263.529.220	80	263.452.990	100	99,97	80	74.999.900	0	71.667.900	0,00	0,96		
1.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	1	74.999.900	1	71.667.900	4	263.529.220	4	263.452.990	100	99,97	1	74.999.900	1	71.667.900	1,00	0,96		
1.01.01.2.04.	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	80	49.971.000	0	24.946.000	80	74.996.590	80	74.977.450	100	99,97	80	49.971.000	0	24.946.000	0,00	0,50		
1.01.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah	1	49.971.000	1	24.946.000	85	74.996.590	85	74.977.450	100	99,97	1	49.971.000	1	24.946.000	1,00	0,50		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020						Target Program/Kegiatan RKPd tahun berjalan (tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun berjalan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp	K	Rp	Target RKPd Tahun 2021		Realisasi RKPd Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)		K	Rp	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Realisasi Target s/d tahun 2021			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13
1.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	80	1.059.535.320	-	-	80	1.831.486.570	80	1.313.863.590	100	71,74	80	1.059.535.320	0	-	0,00	0,00		
1.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	1	59.535.320	0	-		331.690.600		330.149.840	0,00	99,54	1	59.535.320	0	-	0,00	0,00		
1.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	500	1.000.000.000	0	-	500	1.499.795.970	662	983.713.750	132,4	65,59	1	1.000.000.000	0	-	0,00	0,00		
1.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	90	977.523.100	0	-	152.476.400	90	1.320.086.636	90	1.140.014.570	100	86,36	90	977.523.100	0	-	152.476.400	0,00	0,16
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1	54.976.500	2	-	21.976.500	12	49.974.628	12	49.943.740	100	99,94	1	54.976.500	2	-	21.976.500	2,00	0,40
1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2	249.995.500	1	-	23.518.900	60	777.341.858	60	775.037.560	100	99,70	2	249.995.500	1	-	23.518.900	0,50	0,09
1.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1	39.999.600	9	-	39.056.600	23	39.998.420	23	39.998.420	100	100,00	1	39.999.600	9	-	39.056.600	9,00	0,98
1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1	99.999.000	8	-	3.600.000	12	178.026.800	12	153.779.770	100	86,38	1	99.999.000	8	-	3.600.000	8,00	0,04
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	1	83.600.000	7	-	35.924.400	12	49.999.730	9	49.780.280	75	99,56	1	83.600.000	7	-	35.924.400	7,00	0,43
1.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12	19.977.500	6	-	9.750.000	30	24.750.000	30	24.750.000	100	100,00	12	19.977.500	6	-	9.750.000	0,50	0,49
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	24	428.975.000	3	-	18.650.000	12	199.995.200	9	46.724.800	75	23,36	24	428.975.000	3	-	18.650.000	0,13	0,04
1.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80	99.314.900	0	-	-	80	149.498.388	80	99.418.000	100	66,50	80	99.314.900	0	-	-	0,00	0,00
1.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	16	49.314.900	0	-	-	70	99.498.388	70	99.418.000	100	99,92	16	49.314.900	0	-	-	0,00	0,00
1.01.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan	5	50.000.000	0	-	-	2	50.000.000	0	-	0	0,00	5	50.000.000	0	-	-	0,00	0,00
1.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90	65.230.200.000	-	-	8.469.541.439	90	58.493.420.040	90	51.096.389.868	100	87,35	90	65.230.200.000	0	-	8.469.541.439	0,00	0,13
1.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12	20.000.000	6	-	10.000.000	1.500	15.000.000	1.500	15.000.000	100	100,00	12	20.000.000	6	-	10.000.000	0,50	0,50
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	160.000.000	3	-	39.141.439	12	162.020.040	12	125.839.868	100	77,67	12	160.000.000	3	-	39.141.439	0,25	0,24
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	72	65.050.200.000	7	-	8.420.400.000	12	58.316.400.000	12	50.955.550.000	100	87,38	72	65.050.200.000	7	-	8.420.400.000	0,10	0,13
1.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80	828.715.000	0	-	-	80	815.003.500	80	779.541.103	100	95,65	90	128.715.000	0	-	-	0,00	0,00
1.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1	36.100.000	0	-	-	2	39.460.000	2	35.168.103	100	89,12	1	36.100.000	0	-	-	0,00	0,00
1.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	25	20.950.000	0	-	-	25	23.832.500	22	3.076.000	88	12,91	25	20.950.000	0	-	-	0,00	0,00
1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	15	71.665.000	0	-	-	38	39.864.000	37	32.450.000	97,37	81,40	15	71.665.000	0	-	-	0,00	0,00
1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4	700.000.000	0	-	-	4	711.847.000	4	708.847.000	100	99,58	0	-	0	-	-	0,00	0,00
1.02	URUSAN PEMERINTAH DINAS KESEHATAN																			DINAS KESEHATAN
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang Tepat Waktu	95,00	104.787.932.980	28	-	26.194.846.709	85	#####	85	#####	100,00	95,24	85	138.330.560.247	28	-	26.194.846.709	0,33	0,19
1.02.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10	10.478.793.298	0	-	-	2	391.315.000,00	2	378.643.900,00	100,00	96,76	10	1.159.257.182	0	-	-	0,00	0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020						Target Program/Kegiatan RKPD tahun berjalan (tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun berjalan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp	K	Rp	Target RKPD Tahun 2021		Realisasi RKPD Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)		K	Rp	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Realisasi Target s/d tahun 2021			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	5	5.000.000.000	0	0	3	59.153.080,00	3	46.825.080,00	100,00	79,16	5	134.623.100	0	0	0,00	0,00		
1.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	5,00	5.478.793.298	0	0	9	332.161.920,00	9	331.818.820,00	100,00	99,90	5	1.024.634.082	0	0	0,00	0,00		
1.02.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang Disusun	123,00	15.718.189.947	0	23.658.564.386	2	#####	2	#####	100,00	97,13	123	115.499.358.045	0	23.658.564.386	0,00	0,20		
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	70	15.700.189.947	0	23.528.516.386	12	#####	12	99.316.129.680,00	100,00	97,12	70	114.983.136.845	0	23.528.516.386	0,00	0,20		
1.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan yang disusun	29	18.000.000	0	130.048.000	2	99.999.900,00	2	99.999.600,00	100,00	100,00	29	516.221.200	0	130.048.000	0,00	0,25		
1.02.01.2.03	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Persentase pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100	5.239.396.649	0	30.148.000	1	100.000.000,00	1	92.500.000,00	100,00	92,50	100	188.265.000	0	30.148.000	0,00	0,16		
1.02.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilaksanakan	3	5.239.396.649	0	30.148.000	2	100.000.000,00	2	92.500.000,00	100,00	92,50	2	188.265.000	0	30.148.000	0,00	0,16		
1.02.01.2.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	5.239.396.649	0	14.244.000	1	50.000.000,00	1	35.980.000,00	100,00	71,96	100	75.000.000	0	14.244.000	0,00	0,19		
1.02.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah kegiatan pendataan dan pengolahan Administrasi Kepegawaian	3	5.239.396.649	0	14.244.000	2	50.000.000,00	2	35.980.000,00	100,00	71,96	3	75.000.000	0	14.244.000	0,00	0,19		
1.02.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Jumlah Waktu Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12	10.478.793.298	0	82.264.000	6	950.897.540,00	6	802.984.482,00	100,00	84,44	12	1.624.999.620	0	82.264.000	0,00	0,05		
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	15	1.500.000.000	0	0	13	49.999.620,00	13	49.918.000,00	100,00	99,84	15	149.999.620	0	0	0,00	0,00		
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	17	1.500.000.000	0	0	12	105.995.670,00	42	105.489.670,00	350,00	99,52	17	275.000.000	0	0	0,00	0,00		
1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	15	1.500.000.000	0	32.764.000	14	99.990.880,00	26	99.199.100,00	185,71	99,21	15	150.000.000	0	32.764.000	0,00	0,22		
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4	1.000.000.000	0	-	3	199.999.000,00	3	193.680.500,00	100,00	96,84	4	450.000.000	0	0	0,00	0,00		
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	6	1.000.000.000	0	-	4	124.986.070,00	5	122.817.090,00	125,00	98,26	6	200.000.000	0	0	0,00	0,00		
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	51	3.978.793.298	0	49.500.000	50	369.926.300,00	50	231.880.122,00	100,00	62,68	51	400.000.000	0	49.500.000	0,00	0,12		
1.02.01.2.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	15.718.189.947	0	49.595.000	1	100.000.000,00	1	197.692.000,00	100,00	197,69	100	100.000.000	0	49.595.000	0,00	0,50		
1.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	17	7.718.189.947	0	0	0	0	0	0	0	0	17	50.000.000	0	0	0,00	0,00		
1.02.01.2.07.07	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang diadakan	15	8.000.000.000	0	49.595.000	0	0	0	0	0	0	15	50.000.000	0	49.595.000	0,00	0,99		
1.02.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang disediakan	3	10.478.793.298	0	2.237.946.323	3	#####	3	#####	100,00	83,38	3	16.496.656.000	0	2.237.946.323	0,00	0,14		
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah waktu penyediaan perangko, materai dan benda pos lainnya	12	2.000.000.000	0	0	1.666	9.996.000,00	1.666	9.996.000,00	100,00	100,00	12	9.996.000	0	0	0,00	0,00		
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	3.500.000.000	0	120.046.323	12	542.599.246,00	12	477.322.303,00	100,00	87,97	12	639.510.000	0	120.046.323	0,00	0,19		
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu yang disediakan untuk Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	4.978.793.298	0	2.117.900.000	665	15.750.550.000,00	665	13.106.050.000,00	100,00	83,21	12	15.847.150.000	0	2.117.900.000	0,00	0,13		
1.02.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	10.478.793.298	0	122.085.000	4	560.855.000,00	4	550.788.925,00	100,00	98,21	4	3.187.024.400	0	122.085.000	0,00	0,04		
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	17	2.978.793.298	0	0	4	99.875.000,00	4	94.976.925,00	100,00	95,10	17	469.430.400	0	0	0,00	0,00		
1.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	10	2.000.000.000	0	0	50	50.000.000,00	50	46.400.000,00	100,00	92,80	10	100.000.000	0	0	0,00	0,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020						Target Program/Kegiatan RPKD tahun berjalan (tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun berjalan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Tingkat Realisasi (%)	K	Rp	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d tahun 2021	K	Rp	K			Rp
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10	2.500.000.000	0	122.085.000	7	80.980.000,00	7	80.325.000,00	100,00	99,19	10	467.594.000	0	122.085.000	0,00	0,26			
1.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara/direhabilitasi	5	3.000.000.000	0	0	2	330.000.000,00	2	329.087.000,00	100,00	99,72	5	2.150.000.000	0	0	0,00	0,00			
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	18,1	2.900.218.909	2	36.137.063	23	#####	20,10	#####	87	58	22,1	42.119.769.635	2	36.137.063	0,09	0,00			
		Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan per 100.000 KH	91		20										96		20		0,21		
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH	5,03		25										5,07		25		4,93		
		Persentase capaian SPM Bidang Kesehatan	76,4		3										70		3		0,04		
		Persentase Penemuan dan Penanganan Kasus	100		2										100		2		0,02		
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Kesehatan yang memenuhi standar	29,79	620.646.846	0	7.199.900	10	#####	10,00	#####	100	93	12,77	38.970.711.045	0	7.199.900	0,00	0,00			
1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dibangun	1	50.000.000	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	1	1.839.739.016	0	0	0,00	0,00			
1.02.02.2.01.06	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dikembangkan	10	50.000.000	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	8	1.826.055.000	0	0	0,00	0,00			
1.02.02.2.01.07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan lainnya yang dikembangkan	10	50.000.000	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	4	457.380.000	0	0	0,00	0,00			
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang direhab	15	50.000.000	0	7.199.900	10	4.569.718.809,00	9	4.152.696.143,28	90	91	29	8.172.666.252	0	7.199.900	0,00	0,00			
1.02.02.2.01.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah faskes lainnya yang direhab	90	50.000.000	0	0	13	1.216.256.044,00	13	1.206.349.500,00	100	99	30	7.781.272.750	0	0	0,00	0,00			
1.02.02.2.01.11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas yang dilakukan rehab/pemeliharaan	10	50.000.000	0	0	1	1.200.000.000,00	1	1.194.945.000,00	100	100	1	25.990.875	0	0	0,00	0,00			
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diadakan	71	50.000.000	0	0	8	3.692.000.000,00	8	3.415.203.000,00	100	93	60	7.394.085.802	0	0	0,00	0,00			
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diadakan	63	50.000.000	0	0	15	1.037.069.940,00	15	1.032.740.500,00	100	100	18	2.251.993.000	0	0	0,00	0,00			
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah jenis Obat/vaksin yang diadakan	120	50.000.000	0	0	130	4.419.485.127,00	131	3.819.514.238,00	101	86	40	4.084.103.681	0	0	0,00	0,00			
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah jenis Bahan Habis Pakai yang diadakan	60	50.000.000	0	0	65	815.525.788,00	65	679.105.862,00	100	83	50	3.938.851.469	0	0	0,00	0,00			
1.02.02.2.01.19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dipelihara	70	50.000.000	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	16	798.573.200	0	0	0,00	0,00			
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alkes/Alat penunjang medik Fasyankes yang dipelihara	35	50.000.000	0	0	7	235.609.000,00	7	187.899.080,00	100	80	7	400.000.000	0	0	0,00	0,00			
1.02.02.2.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah frekwensi Pendistribusian Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	60	20.646.846	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	12	203.720.000	0	0	0,00	0,00			
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil sesuai standar	100	89.616.764	0	6.088.250	31	#####	30,00	#####	97	53,39	100	2.337.336.040	0	6.088.250	0,00	0,00			
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan ibu bersalin sesuai standar	100	89.616.764	0	0							100	735.191.800	0	0	0,00	0,00			
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	100	89.616.764	0	0							100	278.714.100	0	0	0,00	0,00			
		Cakupan pelayanan balita sesuai standar	100	89.616.764	0	2.156.100							100	571.351.600	0	2.156.100	0,00	0,00			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020						Target Program/Kegiatan RKPd tahun berjalan (tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun berjalan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
			K	Rp	K	Rp	Target RKPd Tahun 2021		Realisasi RKPd Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)		K	Rp	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Realisasi Target s/d tahun 2021				
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anak usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	89.616.764	0	0							100	1.673.021.000	0	0	0,00	0,00			
		Persentase orang usia 15-59 mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	89.616.764	0	0								100	284.525.000	0	0	0,00	0,00		
		Persentase orang usia 60 ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	89.616.764	0	10.386.800								100	982.383.750	0	10.386.800	0,00	0,01		
		Persentase penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	89.616.764	0	0								100	701.678.700	0	0	0,00	0,00		
		Persentase penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	89.616.764	0	0								100	479.175.700	0	0	0,00	0,00		
		Persentase penderita ODGJ Berat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	89.616.764	0	0								100	176.489.200	0	0	0,00	0,00		
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100	89.616.764	0	0								100	834.836.600	0	0	0,00	0,00		
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100	89.616.764	0	0								100	659.845.500	0	0	0,00	0,00		
		Cakupan Kasus Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan	100	89.616.764	0	2.180.997.851								100	124.910.969.237	0	2.180.997.851	0,00	0,02		
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan ibu hamil yang dikelola	25	89.616.764	0	6.088.250	3	1.839.681.160,00	3	261.282.940,00	100	14,20	5	2.337.336.040	0	6.088.250	0,00	0,00			
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan ibu bersalin yang dikelola	25	89.616.764	0	0	2	2.970.307.350,00	2	2.366.731.456,00	100	79,68	5	735.191.800	0	0	0,00	0,00			
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan bayi baru lahir yang dikelola	16	89.616.764	0	0	2	109.156.080,00	2	29.000.450,00	100	26,57	4	278.714.100	0	0	0,00	0,00			
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan balita yang dikelola	16	89.616.764	0	2.156.100	2	409.134.280,00	2	89.201.730,00	100	21,80	4	571.351.600	0	2.156.100	0,00	0,00			
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar yang dikelola	16	89.616.764	0	0	2	756.031.240,00	1	317.812.040,00	50	42,04	4	1.673.021.000	0	0	0,00	0,00			
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	12	89.616.764	0	0	4	1.560.716.890,00	4	1.476.027.909,00	100	94,57	2	284.525.000	0	0	0,00	0,00			
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan pada usia lanjut yang dikelola	16	89.616.764	0	10.386.800	3	638.235.930,00	3	220.127.450,00	100	34,49	4	982.383.750	0	10.386.800	0,00	0,01			
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan penderita hipertensi yang dikelola	25	89.616.764	0	0	4	754.412.200,00	4	225.700.810,00	100	29,92	6	701.678.700	0	0	0,00	0,00			
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus yang dikelola	12	89.616.764	0	0	4	1.043.404.280,00	4	654.215.150,00	100	62,70	2	479.175.700	0	0	0,00	0,00			
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat yang dikelola	25	89.616.764	0	0	2	869.831.140,00	2	182.790.290,00	100	21,01	6	176.489.200	0	0	0,00	0,00			
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis yang dikelola	25	89.616.764	0	0	2	1.903.112.150,00	2	1.835.925.000,00	100	96,47	5	834.836.600	0	0	0,00	0,00			
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV yang dikelola	25	89.616.764	0	0	3	1.908.978.784,00	3	603.873.690,00	100	31,63	5	659.845.500	0	0	0,00	0,00			
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB yang dikelola	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB yang dikelola	25	5.500.000	0	154.400.000	3	10.415.253.270,00	3	3.461.229.380,00	100	33,23	5	9.014.081.450	0	154.400.000	0,00	0,02			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020						Target Program/Kegiatan RKPD tahun berjalan (tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun berjalan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp	K	Rp	Target RKPD Tahun 2021		Realisasi RKPD Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)		K	Rp	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Realisasi Target s/d tahun 2021			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana yang dikelola	25	5.500.000	0	0	5	806.957.903,00	5	528.970.120,00	100	65,55	5	459.192.800	0	0	0,00	0,00		
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat yang dikelola	25	4.500.000	0	19.968.000	3	5.370.652.720,00	3	1.957.649.580,00	100	36,45	5	3.696.233.530	0	19.968.000	0,00	0,01		
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga yang dikelola	15	4.500.000	0	0	2	915.628.800,00	2	217.016.450,00	100	23,70	3	1.146.425.300	0	0	0,00	0,00		
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan lingkungan yang dikelola	20	4.500.000	0	0	3	2.193.140.300,00	3	559.431.270,00	100	25,51	4	2.214.153.940	0	0	0,00	0,00		
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah kegiatan pelayanan promosi kesehatan yang dikelola	20	4.500.000	0	0	4	2.000.708.160,00	4	817.974.610,00	100	40,88	4	2.879.903.300	0	0	0,00	0,00		
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan tradisional, akupuntur, asuhan mandiri dan tradisional lainnya yang dikelola	25	4.250.000	0	0	4	39.999.680,00	1	5.465.680,00	25	13,66	5	49.999.700	0	0	0,00	0,00		
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan surveilans kesehatan yang dikelola	25	4.250.000	0	0	4	1.149.848.873,00	4	800.179.097,00	100	69,59	5	569.177.830	0	0	0,00	0,00		
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA yang dikelola	12	4.250.000	0	0	2	19.667.500,00	2	9.650.000,00	100	49,07	2	770.531.950	0	0	0,00	0,00		
1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah kegiatan upaya kesehatan khusus yang dikelola	15	4.250.000	0	0	5	210.857.070,00	5	136.528.070,00	100	64,75	5	374.999.600	0	0	0,00	0,00		
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan	15	4.250.000	0	0	3	3.458.122.670,00	2	1.369.058.660,00	67	39,59	5	6.789.864.940	0	0	0,00	0,00		
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah masyarakat yang mendapatkan jaminan dan pelayanan kesehatan	6.700	5.000.000	0	1.956.362.480	5	86.587.944.047,00	5	47.442.303.568,00	100	54,79	6.700	30.398.235.803	0	1.956.362.480	0,00	0,06		
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah kegiatan kabupaten/kota sehat yang diselenggarakan	25	4.250.000	0	0	2	100.000.000,00	2	95.760.800,00	100	95,76	5	180.000.000	0	0	0,00	0,00		
1.02.02.2.02.30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah kegiatan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	10	4.250.000	0	0	0	0	0	0	0,00	1	4.824.765.000	0	0	0,00	0,00			
1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah kegiatan pelayanan operasional Rumah Sakit	10	5.000.000	0	0	1	64.800.000,00	1	54.000.000,00	100	83,33	1	32.400.000	0	0	0,00	0,00		
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan pelayanan operasional puskesmas	20	5.000.000	0	0	4	10.594.226.565,00	4	8.309.873.728,00	100	78,44	4	59.538.029.750	0	0	0,00	0,00		
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah kegiatan operasional pelayanan fasyankes lainnya	25	5.000.000	0	50.267.371	4	1.055.596.959,00	4	674.603.904,00	100	63,91	5	1.139.097.944	0	50.267.371	0,00	0,04		
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan akreditasi fasilitas kesehatan di kabupaten/kota yang dilaksanakan	20	4.250.000	0	0	6	1.237.220.970,00	0	0,00	0	0,00	4	223.560.000	0	0	0,00	0,00		
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah kegiatan kewaspadaan dini dan respon wabah yang dilaksanakan	25	4.250.000	0	0	5	870.295.320,00	5	616.767.750,00	100	70,87	6	538.119.600	0	0	0,00	0,00		
1.02.02.2.02.38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	25	2.366.764	0	0	4	1.045.155.622,00	3	971.206.190,40	75	92,92	5	72.196.800	0	0	0,00	0,00		
1.02.02.2.04	PENERBITAN IZIN RUMAH SAKIT KELAS C, D DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Fasilitas kesehatan memiliki Ijin Operasional yang berlaku	100	1.114.554.127	0	22.848.913	2	2.268.085.830,00	2	398.232.729,00	100	17,56	100	811.722.550	0	22.848.913	0,00	0,03		
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan mutu pelayanan faskes yang ditingkatkan	25	514.554.127	0	0	4	1.833.086.830,00	3	67.907.980,00	75	3,70	5	275.736.800	0	0	0,00	0,00		
1.02.02.2.04.04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah kegiatan perumusan dan pelaksanaan pelayanan fasilitas rujukan yang disiapkan	25	600.000.000	0	22.848.913	6	434.999.000,00	5	330.324.749,00	83	75,94	5	535.985.750	0	22.848.913	0,00	0,04		
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	42	89.913.510,86	6	0	12	6.042.483.151,00	15	5.995.959.540,00	128,58	99,23	24	635.000.000	6	0	24,55	0,00		
1.02.03.2.01	PEMBERIAN IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN DIWILAYAH KABUPATEN/KOTA	Jml tenaga kesehatan yang memiliki Surat Ijin Praktik	4.994	45.500.510,86	0	0	1	35.000.000,00	1	30.859.950,00	100,00	88,17	4.354	55.000.000	0	0	0,00	0,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020						Target Program/Kegiatan RKPd tahun berjalan (tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun berjalan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp	K	Rp	Target RKPd Tahun 2021		Realisasi RKPd Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)		K	Rp	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Realisasi Target s/d tahun 2021			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13
1.02.03.2.01.02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan yang dilaksanakan	15	45.500.510,86	0	0	4	35.000.000,00	4	30.859.950,00	100,00	88,17	3	55.000.000	0	0	0,00	0,00		
1.02.03.2.02	PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN UNTUK UKP DAN UKM DIWILAYAH KABUPATEN/KOTA	Jml tenaga kesehatan yang ditingkatkan kopetensi tehnisnya	120	44.413.000,00	0	0	2	6.007.483.151,00	2	5.965.099.590,00	100,00	99,29	30	580.000.000	0	0	0,00	0,00		
1.02.03.2.02.01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah kegiatan Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dilaksanakan	25	20.413.000,00	0	0	5	65.000.000,00	5	3.995.197.826,00	100,00	6.146,46	6,00	130.000.000	0	0	0,00	0,00		
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	20	24.000.000,00	0	143.653.000	64	5.942.483.151,00	64	1.969.901.764,00	100,00	33,15	4,00	450.000.000	0	143.653.000	0,00	31,92		
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Sarana Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Sarana Pengelolaan Makanan dan Minuman yang berijin	77	125.878.915,21	0	0	12	150.000.000,00	15	109.659.500,00	128,58	73,11	71,67	255.000.000	0	0	0,00	0,00		
1.02.04.2.01	PEMBERIAN IZIN APOTEK, TOKO OBAT, TOKO ALAT KESEHATAN DAN OPTIKAL, USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL (UMOT)	Persentase Sarana Kefarmasian yang Berijin	100	50.878.915,21	0	0	1	50.000.000,00	1	38.730.000,00	100,00	77,46	100,00	50.000.000	0	0	0,00	0,00		
1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah kegiatan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT) yang dikendalikan	12	50.878.915,21	0	0	3	50.000.000,00	3	38.730.000,00	100,00	77,46	2	50.000.000	0	0	0,00	0,00		
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase PIRT yang Bersertifikat	68	37.500.000,00	0	0	1	50.000.000,00	1	45.021.000,00	100,00	90,04	60	125.000.000	0	0	0,00	0,00		
1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah PIRT yang diterbitkan	2.500	37.500.000,00	0	0	3	50.000.000,00	3	45.021.000,00	100,00	90,04	500	125.000.000	0	0	0,00	0,00		
1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase Tempat Pengelolaan Makanan dan Depot Air Minum yang Berijin	63	37.500.000,00	0	0	1	50.000.000,00	1	25.908.500,00	100,00	51,82	55	80.000.000	0	0	0,00	0,00		
1.02.04.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah kegiatan pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) dan DAM yang dikelola	15	37.500.000,00	0	0	2	50.000.000,00	1	25.908.500,00	50,00	51,82	3	80.000.000	0	0	0,00	0,00		
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Desa Siaga aktif	25	#####	0	0	100	4.781.257.267,00	100	729.385.870,00	100,00	15,26	23	1.809.040.195	0	0	0,00	0,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020						Target Program/Kegiatan RPKD tahun berjalan (tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun berjalan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Tingkat Realisasi (%)	K	Rp	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d tahun 2021	K	Rp	K		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kecamatan yang menerapkan kebijakan germas	100	#####	0	0	1	631.427.960,00	1	282.430.200,00	100,00	44,73	60	100.000.000	0	0	0,00	0,00		
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah kegiatan Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	20	71.000.577.836,69	0	0	3	428.443.130,00	3	282.430.200,00	100,00	65,92	4,00	100.000.000	0	0	0,00	0,00		
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase UKBM aktif yang dibina	88	#####	0	0	1	1.440.613.157,00	1	446.755.670,00	100,00	31,01	63	1.709.040.195	0	0	0,00	0,00		
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dilaksanakan	20	70.091.000.000,00	0	0	3	1.440.613.157,00	3	446.755.670,00	100,00	31,01	4	1.709.040.195	0	0	0,00	0,00		
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																		DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	95	167.295.714.366	0	0	93,5	30.312.618.285	76	24.786.631.607	81,77	81,77	93,5	29.983.407.326	0	0	0,00	0,00		
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun	420	1.010.131.448	0	0	70	215.676.700	70	215.004.600	99,69	99,69	70	181.039.800	0	0	0,00	0,00		
1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah yang disusun	390	0	27,5624	55.565.800	65	165.676.750	65	165.464.020	99,74	99,87	65	131.039.800	28	55.565.800	42,40	42,40		
1.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisari Realisasi Kinerja SKPD yang dikordinasikan dan disusun	30	0	1,37744	13.774.400	5	49.999.950	5	49.540.580	100,00	99,08	5	50.000.000	1	13.774.400	27,55	27,55		
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang Disusun	90	102.071.191.264	0	0	18	17.816.987.118	13	12.730.129.609	71,45	71,45	13	18.293.607.314	0	0	0,00	0,00		
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	72	0	0	2.793.906.154	12	17.741.987.118	12	12.657.531.809	100,00	71,34	12	18.218.607.314	0	2.793.906.154	0,00	15,34		
1.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	24	0	0	19.034.500	4	75.000.000	4	72.597.800	100,00	96,80	4	75.000.000	0	19.034.500	0,00	25,38		
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah	92	2.800.601.462	0	0	90	399.989.040	90	399.416.000	100,00	99,86	100	501.935.000	0	0	0,00	0,00		
1.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		3000	0	0	0	500	399.989.040	500	399.416.000	100,00	99,86	500	501.935.000	0	0	0,00	0,00		
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Waktu Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	60	10.950.218.921	0	0	12	1.965.331.374	12	1.796.682.848	100,00	91,42	12	1.962.542.050	0	0	0,00	0,00		
1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan yang disediakan	0	0	0	48.388.000	11	139.019.650	11	138.340.770	100,00	99,51	11	99.945.000	0	48.388.000	0,00	48,41		
1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	0	0	0	0	60	936.376.630	60	918.568.400	100,00	98,10	60	613.031.800	0	0	0,00	0,00		
1.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	0	0	0	49.932.000	27	99.996.215	27	96.044.685	100,00	96,05	27	99.949.000	0	49.932.000	0,00	49,96		
1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah waktu bahan logistik kantor yang disediakan	0	0	0	7.476.000	12	239.969.750	12	181.466.400	100,00	75,62	12	299.962.500	0	7.476.000	0,00	2,49		
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	0	0	0	49.817.800	3	134.984.959	3	123.463.450	100,00	91,46	3	134.702.500	0	49.817.800	0,00	36,98		
1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	0	0	0	1.520.000	1	14.998.170	1	9.740.000	100,00	64,94	1	15.000.000	0	1.520.000	0,00	10,13		
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu pelaksanaan rapat di dalam daerah maupun luar daerah	0	0	0	17.172.684	12	399.986.000	12	329.059.143	100,00	82,27	12	699.951.250	0	17.172.684	0,00	2,45		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020						Target Program/Kegiatan RKPd tahun berjalan (tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun berjalan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Tingkat Realisasi (%)	K	Rp	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d tahun 2021	K	Rp	K		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah yang diadakan tepat waktu	15	807.420.875	0	0	3	499.799.980	3	474.678.900	94,97	94,97	3	144.709.200	0	0	0,00	0,00		
1.03.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan	0	0	0	44.750.000	6	350.000.000	6	325.062.500	100,00	92,88	6	45.000.000	0	44.750.000	0,00	99,44		
1.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	0	0	0	49.590.000	30	49.823.180	30	49.801.400	100,00	99,96	30	49.709.200	0	49.590.000	0,00	99,76		
1.03.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang diadakan	0	0	0	0	1	99.976.800	1	99.815.000	100,00	99,84	1	50.000.000	0	0	0,00	0,00		
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	20	45.034.835.202	0	0	4	7.665.096.073	4	7.427.387.650	100,00	96,90	100	8.071.323.362	0	0	0,00	0,00		
1.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah waktu penyediaan perangkat, materi dan benda pos lainnya	0	0	0	600.000	12	9.000.000	12	4.800.000	100,00	53,33	12	8.999.200	0	600.000	0,00	6,67		
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0	0	0	62.508.259	12	369.996.073	12	230.593.150	100,00	62,32	12	352.524.162	0	62.508.259	0,00	17,73		
1.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	0	0	0	0	4	117.000.000	4	111.994.500	100,00	95,72	4	85.000.000	0	0	0,00	0,00		
1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu yang disediakan untuk Jasa Pelayanan Umum Kantor	0	0	0	1.212.150.000	12	7.169.100.000	12	7.080.000.000	100,00	98,76	12	7.624.800.000	0	1.212.150.000	0,00	15,90		
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	20	4.621.315.193	0	0	4	1.749.738.000	4	1.743.332.000	100,00	99,63	100	828.250.600	0	0	0,00	0,00		
1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah waktu yang disediakan untuk Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0	0	0	12	149.900.000	12	147.502.000	100,00	98,40	12	128.755.600	0	0	0,00	0,00		
1.03.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah waktu yang disediakan untuk Mebel yang dipelihara	0	0	0	99.255.000	12	149.838.000	12	148.442.000	100,00	99,07	12	99.495.000	0	99.255.000	0,00	99,76		
1.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung yang dipelihara	0	0	0	0	10	1.250.000.000	10	1.247.607.000	100,00	99,81	10	600.000.000	0	0	0,00	0,00		
1.03.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah paket pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	0	0	0	0	1	200.000.000	1	199.781.000	100,00	99,89	0	0	0	0	0,00	0,00		
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	93	255.687.827.690	0	0	88	206.705.687.133	88	205.686.435.070	99,51	99,51	65	136.832.687.388	0	0	0,00	0,00		
		Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota																		
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Wilayah Sungai yang dikelola dalam satu daerah kabupaten	16	98.762.250.226	0	0	16	62.537.448.010	16	62.082.342.110	99,19	99,27	17	52.853.138.270	0	0	0,00	0,00		
1.03.02.2.01.04	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	0	0	0	0	17	1.651.275.860	17	1.647.030.670	100,00	99,74	17	244.336.000	0	0	0,00	0,00		
1.03.02.2.01.06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang di bangun	0	0	0	0	5	999.999.300	5	996.850.300	100,00	99,69	0	0	0	0	0,00	0,00		
1.03.02.2.01.07	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang dibangun	0	0	0	0	4	699.999.440	4	698.782.440	100,00	99,83	0	0	0	0	0,00	0,00		
1.03.02.2.01.08	Pembangunan Unit Air Baku	Panjang Unit Air Baku yang Dibangun	0	0	0	0	10	3.264.997.900	10	3.024.488.620	100,00	92,63	10	5.140.000.000	0	0	0,00	0,00		
1.03.02.2.01.09	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang dibangun	0	0	0	0	8.400	17.179.988.240	8.400	17.116.202.160	100,00	99,63	8.400	14.668.000.000	0	0	0,00	0,00		
1.03.02.2.01.11	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah pintu air/bendung pengendali banjir yang dibangun	0	0	0	0	1	60.000.000	1	59.859.000	100,00	99,77	0	0	0	0	0,00	0,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020						Target Program/Kegiatan RKPd tahun berjalan (tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun berjalan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp	K	Rp	Target RKPd Tahun 2021		Realisasi RKPd Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)		K	Rp	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Realisasi Target s/d tahun 2021			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13
1.03.02.2.01.17	Pembangunan Breakwater	Panjang Breakwater yang dibangun	0	0	0	0	30	599.999.860	30	598.479.580	100,00	99,75	0	0	0	0	0,00	0,00		
1.03.02.2.01.18	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang di bangun	0	0	0	0	100	1.399.999.160	100	1.395.752.020	100,00	99,70	100	1.800.000.000	0	0	0,00	0,00		
1.03.02.2.01.23	Rehabilitasi Unit Air Baku	Jumlah Unit Air Baku yang direhab	0	0	0	0	3	199.999.860	3	199.711.860	100,00	99,86	0	0	0	0	0,00	0,00		
1.03.02.2.01.24	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang direhab	0	0	0	0	2.700	7.519.995.100	2.700	7.495.460.840	100,00	99,67	2.700	992.615.070	0	0	0,00	0,00		
1.03.02.2.01.26	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah pintu air/bendung pengendali banjir yang direhab	0	0	0	0	30	1.760.955.000	30	1.757.655.000	100,00	99,81	30	8.133.000.000	0	0	0,00	0,00		
1.03.02.2.01.46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang sungai yang dinormalisasi/restorasi	0	0	0	0	74.000	12.665.993.000	74.000	12.630.067.060	100,00	99,72	7.400	12.800.000.000	0	0	0,00	0,00		
1.03.02.2.01.47	Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	Jumlah Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air yang dibangun	0	0	0	44.880.000	15	11.657.924.100	15	11.621.596.630	100,00	99,69	15	7.083.235.400	0	44.880.000	0,00	0,63		
1.03.02.2.01.49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang dioperasikan dan dipelihara	0	0	0	0	4	999.999.440	4	997.010.300	100,00	99,70	0	0	0	0	0,00	0,00		
1.03.02.2.01.62	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	0	0	0	0	120	140.959.860	120	132.591.370	100,00	94,06	120	115.004.300	0	0	0,00	0,00		
1.03.02.2.01.63	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	0	124.968.800	5	1.735.361.890	5	1.710.804.260	100,00	98,58	300	1.876.947.500	0	124.968.800	0,00	6,66		
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah daerah irigasi yang dikelola dan dikembangkan dalam satu daerah Kabupaten	387	156.925.577.464	0	0	387	144.168.239.123	387	143.604.092.960	100,00	99,61	390	83.979.549.118	0	0	0,00	0,00		
1.03.02.2.02.02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang dibangun	0	0	0	0	3.400	54.746.932.106	3.400	54.556.222.440	100,00	99,65	34.000	32.592.000.000	0	0	0,00	0,00		
1.03.02.2.02.03	Pembangunan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang dibangun	0	0	0	0	5	574.999.300	5	572.770.300	100,00	99,61			0	0	0,00	0,00		
1.03.02.2.02.08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang ditingkatkan	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	7.400	7.077.089.000	0	0	0,00	0,00		
1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang direhab	0	0	0	0	4.700	77.143.370.572	4.700	76.903.513.260	100,00	99,69	47.000	40.921.250.000	0	0	0,00	0,00		
1.03.02.2.02.15	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang direhab	0	0	0	0	10	1.419.998.600	10	1.414.418.460	100,00	99,61			0	0	0,00	0,00		
1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah Daerah Irigasi Permukaan yang di operasi dan di pelihara	0	0	0	1.060.376.100	387	7.258.195.365	387	7.166.176.460	100,00	98,73	390	3.389.210.118	0	1.060.376.100	0,00	31,29		
1.03.02.2.02.22	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang dioperasi dan dipelihara	0	0	0	0	13	2.799.998.180	13	2.791.650.040	100,00	99,70	0	0	0	0	0,00	0,00		
1.03.02.2.02.28	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi		0	0	0	0	20	224.745.000	20	199.342.000	100,00	88,70	0	0	0	0	0,00	0,00		
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase pemenuhan kebutuhan pokok air minum rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan dan perdesaan sehari-hari	92	54.098.802.719	0	0	87	27.885.442.167	84	25.381.936.820	96,70	91,02	100	20.321.333.200	0	0	0,00	0,00		
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	490	54.098.802.719	0	0	460	27.885.442.167	450	25.381.936.820	97,83	91,02	474.000	11.355.140.600	0	0	0,00	0,00		
1.03.03.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	0	0	0	0	5	700.000.000	5	698.809.000	100,00	99,83	0	0	0	0	0,00	0,00		
1.03.03.2.01.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Panjang jaringan perpipaan di Kawasan Perdesaan yang dibangun	0	0	0	0	47.000	13.446.399.060	47.000	12.070.776.900	100,00	89,77	47.000	2.900.000.000	0	0	0,00	0,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020						Target Program/Kegiatan RKPd tahun berjalan (tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun berjalan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Tingkat Realisasi (%)	K	Rp	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d tahun 2021	K	Rp	K		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.03.03.2.01.06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Panjang jaringan perpipaan di Kawasan Perdesaan yang ditingkatkan	0	0	0	0	85.000	13.645.918.107	85.000	12.525.003.620	100,00	91,79	85.000	5.821.250.000	0	0	0,00	0,00		
1.03.03.2.01.14	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	Jumlah bimtek SDM dan lembaga pengelola SPAM yang di laksanakan	0	0	0	0	1	93.125.000	1	87.347.300	100,00	93,80	1	244.942.600	0	0	0,00	0,00		
1.03.03.2.01.19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Panjang jaringan perpipaan di Kawasan Perdesaan yang diperluas	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	35.000	2.388.948.000	0	0	0,00	0,00		
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																		DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (%)	95	69.642.900.000	0	8.121.282.178	90	#####	94	#####	104	92,80	94	42.294.712.425	0,00	8.121.282.178	0,00	0,19		
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah (%)	100	499.000.000	0	56.019.500	100	509.018.930,00	100	333.712.670,00	100	65,56	100	950.000.000	0,00	56.019.500	0,00	0,06		
1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah yang disusun (Dokumen)	1	225.000.000	0	30.227.500	1	149.988.180,00	1	97.124.050,00	100	64,75	1	150.000.000	0	30.227.500	0,00	0,20		
1.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan evaluasi capaian kinerja dan ikhtisar realialisasi kinerja perangkat daerah (Dokumen)	4	274.000.000	0	25.792.000	4	359.030.750	4	236.588.620	100	65,90	4	800.000.000	0	25.792.000	0,00	0,03		
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah (%)	100	18.285.000.000	0	2.196.035.778	1	11.160.053.468	100	8.981.057.978	10000	80,48	100	12.642.192.625	0	2.196.035.778	0,00	0,17		
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN (OB)	109	17.600.000.000	0	2.089.475.778	12	10.652.253.698	109	8.564.314.288	908	80,40	109	12.021.392.625	0	2.089.475.778	0,00	0,17		
1.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan yang disusun (Laporan)	1	685.000.000	0	106.560.000	1	507.799.770	1	416.743.690	100	82,07	1	620.800.000	0	106.560.000	0,00	0,17		
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah (%)	100	280.000.000	0	34.419.300	0	0	0	0	0	0	100	360.000.000	0	34.419.300	0,00	0,10		
1.03.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang disusun (Dokumen)	5	140.000.000	0	20.179.300	0	0	0	0	0	0	5	185.000.000	0	20.179.300	0,00	0,11		
1.03.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai (Aktivitas)	24	140.000.000	0	14.240.000	0	0	0	0	0	0	24	175.000.000	0	14.240.000	0,00	0,08		
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi umum perangkat daerah (%)	100	3.969.400.000	0	280.476.800	6	3.342.014.510	100	3.742.848.475	1667	111,99	100	1.946.319.800	0	280.476.800	0,00	0,14		
1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (Jenis)	15	300.000.000	0	49.992.900	100	199.999.030	15	199.999.030	15	100,00	15	200.000.000	0	49.992.900	0,00	0,25		
1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Unit)	1500	1.325.400.000	100	49.999.400	47	1.576.552.450	1500	2.349.416.465	3191	149,02	1500	200.000.000	100	49.999.400	0,07	0,25		
1.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan (Jenis)	30	450.000.000	0	49.994.900	4654	299.998.490	4254	297.386.650	91	99,13	30	200.000.000	0	49.994.900	0,00	0,25		
1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan (Kotak)	1900	825.000.000	200	80.490.000	12	549.994.800	1900	512139000	15833	93,12	1900	580.849.800	200	80.490.000	0,11	0,14		
		Jumlah BBM yang disediakan (Liter)	53000		7922	0	0	0	53000	0	0	0	53000		7922	0	0,15			
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (Lembar)	180000	225.000.000	200	49.999.600	186910	149.999.740	180250	149.999.740	96	100,00	180000	200.000.000	200	49.999.600	0,00	0,25		
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah aktifitas rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang disediakan (Aktivitas)	80	844.000.000	0	0	300	565.470.000	80	233.907.590	27	41,37	80	565.470.000	0	0	0,00	0,00		
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (%)	100	375.000.000	0	18.969.500	20	249.821.217	100	166.196.660	500	66,53	100	200.000.000	0	18.969.500	0,00	0,09		
1.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan (Unit)	15	75.000.000	0	0	20	49.883.957	28	49.883.400	140	100,00	15	50.000.000	0	0	0,00	0,00		
1.03.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Pengadaan Aset Tak Berwujud (Aplikasi)	3	300.000.000	0	18.969.500	1	199.937.260	1	116.313.260	100	58,17	3	150.000.000	0	18.969.500	0,00	0,13		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020						Target Program/Kegiatan RKPd tahun berjalan (tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun berjalan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp	K	Rp	Target RKPd Tahun 2021		Realisasi RKPd Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)		K	Rp	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Realisasi Target s/d tahun 2021			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	42.984.500.000	0	5.445.257.300	12	27.787.349.427	100	26.761.213.517	833	96,31	100	24.346.200.000	0	5.445.257.300	0,00	0,22		
1.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah perangko, materai dan benda pos lainnya yang disediakan (Buah)	300	4.500.000	300	3.000.000	500	3.000.000	300	3.000.000	60	100,00	300	3.000.000	300	3.000.000	1,00	1,00		
1.03.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (Tagihan)	48	37.260.000.000	8	4.819.257.300	12	23.984.999.427	48	23.033.113.517	400	96,03	48	20.400.000.000	8	4.819.257.300	0,17	0,24		
1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum perkantoran yang disediakan (OB)	190	5.720.000.000	0	623.000.000	12	3.799.350.000	190	3.725.100.000	1583	98,05	190	3.943.200.000	0	623.000.000	0,00	0,16		
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	3.250.000.000	0	90.104.000	76	1.513.426.047	67	1.367.167.500	88	90,34	100	1.850.000.000	0	90.104.000	0,00	0,05		
1.03.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara (Unit)	70	45.000.000	0	0	66	29.997.000	66	28.017.000	100	93,40	70	50.000.000	0	0	0,00	0,00		
1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	105	2.925.000.000	0	90.104.000	10	1.483.429.047	90	1.339.150.500	900	90,27	105	1.600.000.000	0	90.104.000	0,00	0,06		
1.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	1	280.000.000	0	0		0	0	0			1	200.000.000	0	0	0,00	0,00		
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Presentase Rekomendasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) (%)	75	20.697.500.000	0	205.288.900	100	16.217.727.267	75	15.914.764.866	75	98,13	75	16.901.735.000	0	205.288.900	0,00	0,01		
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Presentase Capaian Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian PBG dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (%)	75	20.697.500.000	0	205.288.900	100	16.217.727.267	75	15.914.764.866	75	98,13	75	16.901.735.000	0	205.288.900	0,00	0,01		
1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah PBG, SLF, dan SBKBG yang dikeluarkan (Rekomendasi)	1000	187.500.000	0	0	1500	149.999.893	1274	53.255.893	85	35,50	1000	400.000.000	0	0	0,00	0,00		
1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan gedung yg di bangun, di rehab, di neovasi, di pelihara dan di rawat (Unit)	75	20.060.000.000	0	183.150.000	50	15.767.727.833	116	15.660.624.340	232	99,32	75	16.151.735.000	0	183.150.000	0,00	0,01		
		Panjang trotoar yang dibangun (Km)	2						0				2				0,00			
		Panjang trotoar yang direhab (Km)	4						0				4				0,00			
1.03.08.2.01.04	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan bantuan teknis yang diberikan (Aktivitas)	25	150.000.000	0	9.993.000	10	99.999.691	157	99.880.350	1570	99,88	25	150.000.000	0	9.993.000	0,00	0,07		
1.03.08.2.01.05	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan yg di monitoring dan di evaluasi (Aktivitas)	30	300.000.000	0	12.145.900	48	199.999.850	37	101.004.283	77	50,50	30	200.000.000	0	12.145.900	0,00	0,06		
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (%)	10	20.940.000.000	0	291.429.600	70	15.750.629.590	6	15.612.736.430	9	99,12	6	10.064.166.416	0	291.429.600	0,00	0,03		
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Drainase Berfungsi Baik (Km)	11	20.940.000.000	0	291.429.600	12	15.750.629.590	80	15.612.736.430	669	99,12	11	10.064.166.416	0	291.429.600	0,00	0,03		
1.03.06.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Drainase yang dibangun (Km)	10	19.300.000.000	0	14.507.621.310	5	14.543.608.340	12	14.507.621.310	249	99,75	10	8.812.269.241	0	14.507.621.310	0,00	1,65		
1.03.06.2.01.07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Drainase yang direhab (Km)	1	1.640.000.000	0	45.417.600	7	1.207.021.250	68	1.105.115.120	969	91,56	1	1.251.897.175	0	45.417.600	0,00	0,04		
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota (%)	85	181.095.000.000	0	236.020.700	72	129.656.766.489	74	131.650.467.990	103	101,54	77	115.834.484.157	0	236.020.700	0,00	0,00		
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Presentase Capaian Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota (%)	100	181.095.000.000	0	236.020.700	72	129.656.766.489	100	131.650.467.990	139	101,54	100	115.834.484.157	0	236.020.700	0,00	0,00		
1.03.10.2.01.03	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah dokumen leger yang dikelola (Dokumen)	4	750.000.000	0	0	4	600.000.000	5	502380480	125	83,73	4	3.450.000.000	0	0	0,00	0,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020						Target Program/Kegiatan RPKD tahun berjalan (tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun berjalan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp	K	Rp	Target RPKD Tahun 2021		Realisasi RPKD Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)		K	Rp	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Realisasi Target s/d tahun 2021			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13
1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang dibangun (Km)	6	95.000.000.000	0	0	6	61.770.022.770	75	61.615.171.289	1258	99,75	6	64.283.248.256	0	0	0,00	0,00		
1.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan yang direhab (Km)	50	58.000.000.000	0	203.198.800	60	45.900.573.229	59	45.388.419.141	98	98,88	50	32.778.248.820	0	203.198.800	0,00	0,01		
1.03.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan yang dibangun (Unit)	25	12.700.000.000	0	0	340	10.702.030.920	47	11.349.574.700	14	106,05	25	7.351.615.281	0	0	0,00	0,00		
1.03.10.2.01.18	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah jembatan yang direhab (Unit)	10	1.145.000.000	0	6.328.300	15	8.540.913.870	5	761.936.300	33	8,92	10	571.371.800	0	6.328.300	0,00	0,01		
1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan yang rutin dipelihara (Km)	340	12.000.000.000	0	26.493.600	10	768.225.700	520	10.661.889.080	5200	1.387,86	340	6.600.000.000	0	26.493.600	0,00	0,00		
1.03.10.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah jembatan yang rutin pelihara (Unit)	50	1.500.000.000	0	0	20	1.375.000.000	74	1.371.097.000	370	99,72	50	800.000.000	0	0	0,00	0,00		
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga operator/teknis/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi (%)	70	585.000.000	0	56.516.700	70	389.999.780	70	260.216.770	100	66,72	53	400.000.000	0	56.516.700	0,00	0,14		
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan (Orang)	60	585.000.000	0	56.516.700	90	389.999.780	90	260.216.770	100	66,72	60	400.000.000	0	56.516.700	0,00	0,14		
1.03.11.2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan (Orang)	60	585.000.000	0	56.516.700	90	389.999.780	90	260.216.770	100	66,72	60	400.000.000	0	56.516.700	0,00	0,14		
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase wilayah yang telah tersusun rencana tata ruang (%)	100	2.510.000.000	0	68.185.400	70	1.761.689.920	71	1.493.600.434	101	84,78	71	2.950.000.000	0	68.185.400	0,00	0,02		
		Persentase wilayah yang telah ditetapkan rencana tata ruangnya (%)	54		0				21				21		0		0,00			
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah yang disusun rencana tata ruang (Wilayah)	2	2.510.000.000	0	68.185.400	70	1.761.689.920	1	1.493.600.434	1	84,78	1	2.950.000.000	0	68.185.400	0,00	0,02		
		Jumlah wilayah yang dilaksanakan penetapan rencana tata ruang (Wilayah)	2		0				2				2		0		0,00			
1.03.12.2.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana tata ruang yang disusun (Dokumen)	2	2.510.000.000	0	68.185.400	70	1.761.689.920	1	1.493.600.434	1	84,78	1	2.950.000.000	0	68.185.400	0,00	0,02		
		Jumlah dokumen rencana tata ruang yang diajukan proses penetapan (Dokumen)	2		0				2				2		0		0,00			
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan (%)	20	38.213.000.000	0	313.633.650	100	28.718.307.180	17	28.267.359.960	17	98,43	18	13.276.936.917	0	313.633.650	0,00	0,02		
		Presentase ketersediaan LPJU pada jalan kabupaten (%)	75		0				60				71		0	-	0,00			
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Capaian Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota (%)	100	38.213.000.000	0	313.633.650	100	28.718.307.180	60	28.267.359.960	60	98,43	100	13.276.936.917	0	313.633.650	0,00	0,02		
1.03.09.2.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah unit bangunan dan lingkungan yang di tata (Unit)	50	26.160.000.000	0	73.436.200	50	19.870.360.000	70	19.700.006.000	140	99,14	50	8.436.936.917	0	73.436.200	0,00	0,01		
		jumlah LPJU yang dipasang (Titik)	10		0	0			0				10		0	0	0,00			
1.03.09.2.01.04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah unit bangunan dan lingkungan yang di pelihara (Unit)	50	11.960.000.000	0	166.761.250	50	8.785.947.180	60	8.506.630.960	120	96,82	50	4.740.000.000	0	166.761.250	0,00	0,04		
		jumlah LPJU yang direhab (Titik)	7500		0	0			0				7500		0	0	0,00			
1.03.09.2.01.05	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat (Aktivitas)	3	93.000.000	0	73.436.200	5	62.000.000	10	60.723.000	200	97,94	3	100.000.000	0	73.436.200	0,00	0,73		
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Presesntase Jalan Lingkungan dalam kondisi baik (%)	76	86.910.000.000	0	1.537.364.100	100	60.064.703.263	74	59.189.404.240	74	98,54	67	60.318.428.599	0	1.537.364.100	0,00	0,03		
1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Infrastruktur Permukiman berfungsi baik (Km)	31	86.910.000.000	0	1.537.364.100	25	60.064.703.263	59	59.189.404.240	236	98,54	31	60.318.428.599	0	1.537.364.100	0,00	0,03		
		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang diperbaiki diluar Kawasan Kumuh (Unit)	400		0	0			0				400		0	0	0,00			
1.03.07.2.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jalan Paving yang terbangun (Km)	25	84.150.000.000	0	651.954.700	25	57.904.703.263	50	57.315.938.240	200	98,98	25	23.551.211.795	0	651.954.700	0,00	0,03		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020						Target Program/Kegiatan RKPd tahun berjalan (tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun berjalan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp	K	Rp	Target RKPd Tahun 2021		Realisasi RKPd Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)		K	Rp	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Realisasi Target s/d tahun 2021			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13
		Panjang Drainase Lingkungan yang terbangun (Km)	3		0		3		5		200		3		0		0,00			
1.03.07.2.01.02	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jalan Paving yang terpelihara (Km)	2	2.760.000.000	0	885.409.400	2	2.160.000.000	2	1.873.466.000	133	86,73	2	36.767.216.804	0	885.409.400	0,00	0,02		
		Panjang Drainase Lingkungan yang terpelihara (Km)	2		0		2		2		133		2		0		0,00			
		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang diperbaiki diluar Kawas Kumuh (Unit)	400		0				0				400		0		0,00			
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak (%)	5	412.500.000	0	0	1	275.000.000	1	271.561.000	100	98,75	5	50.000.000	0	0	0,00	0,00		
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Sanitasi dalam kondisi baik (Unit)	5	412.500.000	0	0	1	275.000.000	1	271.561.000	100	98,75	5	50.000.000	0	0	0,00	0,00		
1.03.05.2.01.03	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Jumlah IPAL yang terbangun (Unit)	2	412.500.000	0	0	1	275.000.000	1	271.561.000	100	98,75	2	50.000.000	0	0	0,00	0,00		
		Jumlah IPAL yang terpelihara (Unit)	2		0	0			0				2		0	0	0,00			
		Jumlah MCK yang terbangun (Unit)	1		0	0			0				1		0	0	0,00			
01:04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																			DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Presentase perumahan yang mendapatkan ijin (%)	100	760.000.010	0	0	100	2.157.283.680	50	1.549.089.190	50	71,81	100	925.000.000	0	0	0,00	0,00		
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana yang ditangani (Unit)	20	600.000.000	0	0	20	549.999.330	10	127.143.440	50	23,12	20	400.000.000	0	0	0,00	0,00		
1.04.02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah yang direhabilitasi (Unit)	10	300.000.000	0	0	5	349.999.890	5	124.393.440	100	35,54	10	200.000.000	0	0	0,00	0,00		
1.04.02.2.03.04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah yang dibangun (Unit)	10	300.000.000	0	0	5	199.999.440	5	2.750.000	100	1,38	10	200.000.000	0	0	0,00	0,00		
1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah ijin/rekomendasi siteplan perumahan yang diterbitkan (Lokasi)	10	160.000.010	0	0	10	1.607.284.350	15	1.421.945.750	150	88,47	10	525.000.000	0	0	0,00	0,00		
1.04.02.2.06.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah ijin/rekomendasi siteplan perumahan yang diterbitkan (Lokasi)	10	160.000.010	0	0	10	1.607.284.350	15	1.421.945.750	150	88,47	10	525.000.000	0	0	0,00	0,00		
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani (%)	58	1.705.000.000	0	0	5	949.997.960	25	908.411.420	500	95,62	25	1.800.000.000	0	0	0,00	0,00		
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah sarana dan prasarana dikawasan kumuh yang dibangun dalam kondisi baik (Lokasi)	5	1.050.000.000	0	0	5	699.999.310	5	661.681.420	100	94,53	5	1.225.000.000	0	0	0,00	0,00		
1.04.03.2.02.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah sarana dan prasarana dikawasan kumuh yang dibangun (Lokasi)	5	1.050.000.000	0	0	5	699.999.310	5	661.681.420	100	94,53	5	1.225.000.000	0	0	0,00	0,00		
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah database kawasan kumuh yang disusun (Dokumen)	1	655.000.000	0	0	1	249.998.650	5	246.730.000	500	98,69	1	575.000.000	0	0	0,00	0,00		
		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang diperbaiki (Unit)	200		0	0			0				200		0	0	0,00			
1.04.03.2.03.01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah database kawasan kumuh yang disusun (Dokumen)	1	375.000.000	0	0	1	249.998.650	5	246.730.000	500	98,69	1	375.000.000	0	0	0,00	0,00		
1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang diperbaiki (Unit)	200	280.000.000	0	0			0	0			200	200.000.000	0	0	0,00	0,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020						Target Program/Kegiatan RKPd tahun berjalan (tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun berjalan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Tingkat Realisasi (%)	K	Rp	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d tahun 2021	K	Rp	K		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Presentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (%)	5	1.050.000.000	0	0	4	794.280.030	3	776.548.960	72	97,77	4	575.000.000	0	0	0,00	0,00		
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Presentase Capaian Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan (%)	100	1.050.000.000	0	0	80	794.280.030	67	776.548.960	83	97,77	100	575.000.000	0	0	0,00	0,00		
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah prasarana dan sarana perumahan yang dibangun (Unit)	4	600.000.000	0	0	4	400.000.000	4	396.293.000	100	99,07	4	400.000.000	0	0	0,00	0,00		
		Jumlah database PSU yang disusun (Dokumen)	1		0		1		1		100		1		0	0	0,00			
1.04.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi yang dilaksanakan (Aktivitas)	2	450.000.000	0	0	2	394.280.030	1	380.255.960	50	96,44	2	175.000.000	0	0	0,00	0,00		
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																		SATUAN POLISI PP	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan aparatur	95,00	16.310.424.056	12,63	2.051.568.410	90,00	16.330.424.056	90,00	14.558.010.686	100,00	89,15	95,00	16.243.230.006	12,63	2.051.568.410	13,30	12,63		
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	prosentase jumlah dokumen yang di butuhkan	95,00	100.000.000			16,00	90.000.000	16,00	89.992.000	100,00	99,99	95,00	80.000.000			0,00	0,00		
1.05.01.2.01.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Tersedianya dokumen dokumen rencana kerja Sat. Pol PP	95,00	25.000.000			8,00	50.000.000	8,00	49.994.000	100,00	99,99	95,00	20.000.000			0,00	0,00		
1.05.01.2.01.05	Koordinasi dan penyusunan DPA SKPD	Tersedianya dokumen dokumen rencana kerja Sat. Pol PP	95,00	25.000.000									95,00	20.000.000			0,00	0,00		
1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya dokumen DPPA / DPA kerja Sat. Pol PP	95,00	25.000.000			8,00	40.000.000	8,00	39.998.000	100,00	100,00	95,00	20.000.000			0,00	0,00		
1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen dokumen rencana kerja Sat. Pol PP	95,00	25.000.000									95,00	20.000.000			0,00	0,00		
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	95,00	7.789.032.782	14,89	1.087.365.351	100,00	7.819.032.782	100,00	6.266.820.800	100,00	80,15	95,00	7.300.437.860	14,89	1.087.365.351	15,68	14,89		
1.05.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Dokumen penyediaan gaji dan ASN	95,00	7.739.032.782	15,06	1.087.365.351	12,00	7.739.032.782	16,00	6.186.859.200	133,33	79,94	95,00	7.220.437.860	15,06	1.087.365.351	15,85	15,06		
1.05.01.2.02.03	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD		95,00	50.000.000									95,00	40.000.000			0,00	0,00		
1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Kordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir	95,00	50.000.000			6,00	80.000.000	6,00	79.961.600	100,00	99,95	95,00	40.000.000			0,00	0,00		
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	95,00	466.014.650			90,00	466.014.650	25,00	60.771.200	27,78	13,04	95,00	608.759.600			0,00	0,00		
1.05.01.2.05.02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	jumlah pakaian dinas beserta atribut	95,00	386.038.400			344,00	386.038.400	0,00	-	0,00	0,00	95,00	518.760.000			0,00	0,00		
1.05.01.2.05.04	Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Jumlah sistem informasi yang ada	95,00	79.976.250			6,00	79.976.250	4,00	60.771.200	66,67	75,99	95,00	89.999.600			0,00	0,00		
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	95,00	2.023.457.280	0,60	14.293.000	90,00	2.023.457.280	90,00	1.849.356.733	100,00	91,40	95,00	2.371.370.900	0,60	14.293.000	0,63	0,60		
1.05.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlahkomponen instalasi listrik yang di sediakan	95,00	9.999.500			100,00	9.999.500	99,00	9.999.500	99,00	100,00	95,00	10.000.000			0,00	0,00		
1.05.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang di disediakan	95,00	102.406.250			12,00	102.406.250	12,00	102.393.400	100,00	99,99	95,00	247.150.800			0,00	0,00		
1.05.01.2.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	95,00	28.671.380			12,00	28.671.380	12,00	28.208.339	100,00	98,39	95,00	10.000.000			0,00	0,00		
1.05.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	jumlah bahan logistik kantor yang di sediakan	95,00	1.343.879.800			12,00	1.343.879.800	12,00	1.343.809.800	100,00	99,99	95,00	1.369.992.900			0,00	0,00		
1.05.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan	Jumlah barang cetakan yang di sediakan	95,00	39.983.100			100,00	39.983.100	99,00	39.983.100	99,00	100,00	95,00	14.999.800			0,00	0,00		
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi	95,00	498.517.250	1,99	14.293.000	100,00	498.517.250	100,00	324.962.594	100,00	65,19	95,00	719.227.400	1,99	14.293.000	2,09	1,99		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020						Target Program/Kegiatan RPKD tahun berjalan (tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun berjalan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Realisasi Target s/d tahun 2021			
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang di Penuhi	95,00	837.854.300									95,00	837.854.300			0,00	0,00		
1.05.01.2.07.01	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaran dinas yang di sediakan	95,00	216.700.000									95,00	216.700.000			0,00	0,00		
1.05.01.2.07.02	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan operasional yang di sediakan	95,00	346.500.000									95,00	346.500.000			0,00	0,00		
1.05.01.2.07.05	Pengadaan mebel	Jumlah mebel yang di sediakan	95,00	24.963.400									95,00	24.963.400			0,00	0,00		
1.05.01.2.07.06	Pengadaan peralatan mesin	Jumlah peralatan mesin yang di sediakan	95,00	19.990.900									95,00	19.990.900			0,00	0,00		
1.05.01.2.07.09	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor yang disediakan	95,00	200.000.000									95,00	200.000.000			0,00	0,00		
1.05.01.2.07.10	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana prasarana gedung yang di sediakan	95,00	29.700.000									95,00	29.700.000			0,00	0,00		
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	95,00	5.474.468.544	16,69	891.656.059	100,00	5.474.468.544	100,00	5.446.643.253	100,00	99,49	95,00	5.341.998.646	16,69	891.656.059	17,57	16,69		
1.05.01.2.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya materai	95,00	7.500.000			12,00	7.500.000	12,00	4.500.000	100,00	60,00	95,00	8.000.000			0,00	0,00		
1.05.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	95,00	125.999.015	19,00	21.656.059	12,00	125.999.015	12,00	105.763.294	100,00	83,94	95,00	113.998.646	19,00	21.656.059	20,00	19,00		
1.05.01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah jasa pelayanan umum yang disediakan	95,00	5.340.969.529	16,67	870.000.000	12,00	5.340.969.529	12,00	5.336.379.959	100,00	99,91	95,00	5.220.000.000	16,67	870.000.000	17,54	16,67		
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase barang milik daerah yang terpelihara	95,00	457.450.800	10,77	58.254.000	90,00	457.450.800	90,00	440.351.000	100,00	96,26	95,00	540.663.000	10,77	58.254.000	11,34	10,77		
1.05.01.2.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah pajak kendaraan yang di bayarkan	95,00	9.800.000			12,00	9.800.000	2,00	2.262.000	16,67	23,08	95,00	10.000.000			0,00	0,00		
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan peralatan mesin lainnya	Jumlah unit yang dipelihara	95,00	304.543.000	29,62	58.254.000	12,00	304.543.000	12,00	302.693.000	100,00	99,39	95,00	196.663.000	29,62	58.254.000	31,18	29,62		
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor yang di rehabilitasi	95,00	99.822.800			1,00	99.822.800	1,00	92.111.000	100,00	92,27	95,00	324.000.000			0,00	0,00		
1.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana yang di pelihara	95,00	43.285.000			12,00	43.285.000	12,00	43.285.000	100,00	100,00	95,00	10.000.000			0,00	0,00		
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Pelanggaran Perda yang Tertangani	95,00	1.958.834.655			100,00	1.958.834.655	100,00	1.949.844.400	100,00	99,54	95,00	2.291.802.750			0,00	0,00		
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani	95,00	1.632.124.855			5,00	1.632.124.855	5,00	1.629.134.600	100,00	99,82	95,00	1.591.803.200			0,00	0,00		
1.05.02.2.01.01	Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawasan	Jumlah aktifitas pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	95,00	900.000.000			12,00	900.000.000	12,00	900.000.000	100,00	100,00	95,00	700.000.000			0,00	0,00		
1.05.02.2.01.03	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota	Jumlah aktifitas koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	95,00	46.330.000			5,00	46.330.000	5,00	46.330.000	100,00	100,00	95,00	200.000.000			0,00	0,00		
1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Aktifitas Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	95,00	423.989.655			12,00	423.989.655	27,00	422.449.400	225,00	99,64	95,00	399.999.500			0,00	0,00		
1.05.02.2.01.05	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	95,00	261.805.200			350,00	261.805.200	350,00	260.355.200	100,00	99,45	95,00	211.803.700			0,00	0,00		
1.05.02.2.01.06	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah aktifitas Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	95,00	80.000.000									95,00	80.000.000			0,00	0,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020						Target Program/Kegiatan RKPD tahun berjalan (tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun berjalan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Tingkat Realisasi (%)	K	Rp	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d tahun 2021	K	Rp	K		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Menurunnya prosentase pelanggaran perda yang terjadi	95,00	326.709.800			52,00	326.709.800	24,00	320.709.800	46,15	98,16	95,00	699.999.550			0,00	0,00		
1.05.02.2.02.01	Sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati/wali kota	Jumlah aktifitas sosialisasi penegakan peraturan daerah	95,00				5,00	-	0,00	-	0,00		95,00	99.999.650			0,00	0,00		
1.05.02.2.02.02	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati/wali kota	Jumlah patroli yang dilaksanakan	95,00										95,00	199.999.900			0,00	0,00		
1.05.02.2.02.03	Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati/wali kota	Jumlah aktifitas penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati	95,00	326.709.800			5,00	326.709.800	5,00	320.709.800	100,00	98,16	95,00	400.000.000			0,00	0,00		
1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Kota		95,00	100.000.000			0,00						95,00	100.000.000			0,00	0,00		
1.05.02.2.03.01	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	95,00	100.000.000									95,00	100.000.000			0,00	0,00		
1 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
10502010	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	95	4.009.066.295	45,50	1.400.340.619	95	4.739.149.257	95	3.705.289.505	100	78,1847	92,5	5.139.597.237	45,50	1.400.340.619	0,49	0,27		
10502012.0 10	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang disusun	14	30.000.000	3,00	15.084.500	14	49.999.890	14	49.533.050	100	99,0663	14	40.000.000	3,00	15.084.500	0,21	0,38		
10502012.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	14	30.000.000	3	15.084.500	14	49.999.890	14	49.533.050	100	99,0663	14	40.000.000	3,00	15.084.500	0,21	0,38		
10502012.0 20	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	90	2.840.495.050	26,79	739.253.574	90	2.840.495.050	90	1.880.462.913	100	66,2019	75	2.912.249.635	26,79	739.253.574	0,36	0,25		
10502012.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12	2.790.495.160	3	733.105.574	12	2.790.495.160	12	1.830.929.863	100	65,6131	12	2.872.249.635	3,00	733.105.574	0,25	0,26		
10502012.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen akuntansi/pelaporan	14	49.999.890	4	6.148.000	14	49.999.890	14	49.533.050	100	99,0663	14	40.000.000	4,00	6.148.000	0,29	0,15		
10502012.0 50	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	90	100.000.000	45,00	117.655.500	0	-	0	-	0	0	45	117.856.000	45,00	117.655.500	1,00	1,00		
10502012.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut	45	100.000.000	45	117.655.500	0	-	0	-	0	0	45	117.856.000	45,00	117.655.500	1,00	1,00		
10502012.0 60	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan administrasi perkantoran yang tercukupi	22	525.562.616	40,00	233.868.150	22	884.601.360	22	844.634.779	100	95,482	85	833.899.500	40,00	233.868.150	0,47	0,28		
10502012.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen penyediaan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	13	19.999.540	7	6.437.400	13	19.999.540	13	19.999.540	100	100	17	20.000.000	7,00	6.437.400	0,41	0,32		
10502012.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	48	105.386.230	19	122.003.400	48	205.386.230	48	205.090.830	100	99,8562	61	199.999.800	19,00	122.003.400	0,31	0,61		
10502012.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	22	34.998.700	10	6.437.400	22	34.998.700	22	34.998.700	100	100	24	14.999.900	10,00	6.437.400	0,42	0,43		
10502012.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	12	54.921.900	3	60.127.050	12	224.921.900	12	215.274.550	100	95,7108	12	290.399.900	3,00	60.127.050	0,25	0,21		
10502012.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	68.059	35.010.326	14126	9.123.600	68.059	68.399.070	68060	66.682.160	100,00	97,4899	56.400	46.499.900	#####	9.123.600	0,25	0,20		
10502012.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1.764	61.997.920	455	2.006.000	1.764	11.997.920	1133	11.791.200	64,23	98,277	1.785	12.000.000	455,00	2.006.000	0,25	0,17		
10502012.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggarakannya rapat koordinasi dan konsultasi	12	213.248.000	3	27.733.300	12	318.898.000	12	290.797.799	100	91,1883	12	250.000.000	3,00	27.733.300	0,25	0,11		
10502012.0 70	Pengadaan Barang Miliik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang yang diadakan	21	160.000.000	29,00	121.862.000	21	49.876.061	21	43.813.550	100	87,8448	43	124.993.100	29,00	121.862.000	0,67	0,97		
10502012.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang disediakan	10	100.000.000	27	99.565.000	10	19.928.561	10	19.118.550	100	95,9354	24	99.993.200	27,00	99.565.000	1,13	1,00		
10502012.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang disediakan	10	60.000.000	2	22.297.000	10	29.947.500	10	24.695.000	100	82,461	19	24.999.900	2,00	22.297.000	0,11	0,89		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020						Target Program/Kegiatan RKPd tahun berjalan (tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun berjalan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp	K	Rp	Target RKPd Tahun 2021		Realisasi RKPd Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)		K	Rp	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Realisasi Target s/d tahun 2021			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13
10502012.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa yang dibayarkan	12	229.808.629	3,00	91.577.595	12	479.248.936	12	472.622.963	100	98,6174	12	525.599.002	3,00	91.577.595	0,25	0,17		
10502012.0801	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah perangko, materai dan benda pos lainnya yang disediakan	950	6.099.000	950	4.000.000	950	6.099.000	950	6.050.000	100	99,1966	700	7.000.000	950,00	4.000.000	1,36	0,57		
10502012.0802	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	14.999.936	3	20.677.595	12	94.999.936	12	88.422.963	100	93,0769	12	94.999.002	3,00	20.677.595	0,25	0,22		
10502012.0804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	240	208.709.693	60	66.900.000	204	378.150.000	204	378.150.000	100	100	240	423.600.000	60,00	66.900.000	0,25	0,16		
10502012.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32	123.200.000	7,00	81.039.300	32	434.927.960	32	414.222.250	100	95,2393	32	585.000.000	7,00	81.039.300	0,22	0,14		
10502012.0902	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	18	19.976.630	3	59.501.100	18	119.976.630	18	109.650.000	100	91,3928	18	150.000.000	3,00	59.501.100	0,17	0,40		
10502012.0906	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	30	24.961.200	4	2.640.000	30	24.961.200	22	17.248.000	73,33	69,0992	30	25.000.000	4,00	2.640.000	0,13	0,11		
10502012.0909	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara/ direhabilitasi	1	58.264.280	1	15.900.000	1	269.992.240	2	269.166.000	200	99,694	1	400.000.000	1,00	15.900.000	1,00	0,04		
10502012.0910	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah taman kantor yang dipelihara rutin/berkala	1	19.997.890	1	2.998.200	1	19.997.890	4	18.158.250	400	90,8008	1	10.000.000	1,00	2.998.200	1,00	0,30		
		Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	100		25,00		90		90		100		100		25,00		0,25			
1050203	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	100	4.470.499.760	25,00	245.098.300	100	2.884.970.846	100	2.783.712.756	100	96,4902	100	1.556.965.400	25,00	245.098.300	0,25	0,16		
		Persentase penanganan pasca bencana	80		20,00		80		80		100		30		20,00		0,67			
10502032.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1	420.000.000	1	96.115.150	1	81.227.640	1	64.995.250	1	80,0162	2	254.999.800	1,00	96.115.150	0,50	0,38		
10502032.0101	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	- Jumlah penyusunan dokumen KRB - Jumlah dokumen kajian kebutuhan pasca bencana	2 11	420.000.000	0 2	96.115.150	12	81.227.640	12	64.995.250	100	80,0162	2 11	254.999.800	0 2	96.115.150	#VALUE! 0,38			
10502032.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Respon cepat darurat bencana	85	3.605.499.760	26,58	87.443.500	85	2.573.748.006	85	2.497.547.565	85	97,0393	75	1.161.985.600	26,58	87.443.500	0,35	0,08		
10502032.0202	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pelatihan	45	329.997.030	0	-	100	129.997.030	99	123.746.165	99	95,1915	45	50.000.000	0,00	-	0,00	0,00		
10502032.0204	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	18	316.858.400	18	49.786.000	0	-	0	-	0	0	18	49.957.800	18,00	49.786.000	1,00	1,00		
10502032.0203	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	- Jumlah peralatan penanggulangan bencana - Jumlah petugas operasional pusdalops	30 264	531.990.960	0 66	1.098.000	12	431.990.960	12	426.308.500	100	98,6846	30 264	232.643.100	0 66	1.098.000	#VALUE! 0,00			
10502032.0206	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	- Jumlah dokumen tentang data potensi bencana dan kejadian bencana - Terbentuknya relawan PB yang tanggap, tangkas dan tangguh	12 300	366.639.630	3 75	6.440.000	192	266.639.630	192	224.341.360	100	84,1365	12 300	101.205.400	3 75	6.440.000	#VALUE! 0,06			
10502032.0207	Penanganan Pascabencana Kabupaten/ Kota	Jumlah lokasi yang dibangun	4	1.714.815.150	0	25.930.000	12	1.599.921.796	12	1.595.356.650	100	99,7147	4	650.000.000	0,00	25.930.000	0,00	0,04		
10502032.0208	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah pemantauan tim reaksi cepat	12	345.198.590	3	4.189.500	120	145.198.590	120	127.794.890	100	88,0139	12	78.179.300	3,00	4.189.500	0,25	0,05		
10502032.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	12	250.000.000	0,00	-	12	69.996.630	12	68.368.850	100	97,6745	12	69.980.000	0,00	-	0,00	0,00		
10502032.0304	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	- Jumlah logistik kebutuhan dasar tanggap darurat bencana - Jumlah pemulihan/penanganan dampak bencana	150 50	250.000.000	0 0	-	150	69.996.630	148	68.368.850	150	97,6745	150 50	69.980.000	0 0	-	#VALUE! 0,00			
10502032.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1	195.000.000	1	61.539.650	1	159.998.570	1	152.801.091	1	95,5015	1	70.000.000	1,00	61.539.650	1,00	0,88		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020						Target Program/Kegiatan RKPd tahun berjalan (tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun berjalan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d tahun 2021	K	Rp	K		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13
10502032.04.02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	- Jumlah Destana di Kawasan Rawan Bencana (KRB) - Jumlah Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) yang terbentuk - Jumlah sekolah aman bencana yang terbentuk	1	195.000.000	1	61.539.650	85	159.998.570	85	152.801.091	100	95,5015	1	70.000.000	1	61.539.650	#VALUE!	0,88		
5.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																		DINAS PEMADAM KEBAKARAN	
5.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	93	30.197.500.000	93,57	474.685.811	0	0	0	0	0	0	93	40.000.000	93,57	474.685.811	101,16	1186,71		
5.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	prosentase jumlah dokumen yang di butuhkan	93	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4	20.000.000	0	0	0,00	0,00		
5.04.01.2.01.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Tersusunnya dokumen Perencanaan	4,00	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,00	20.000.000	0	0	0,00	0,00		
5.04.01.2.01.06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja	4,00	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	2.312.802.005	0	0	0,00	0,00		
5.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	100	17.800.000.000	12,5	384.722.015	0	0	0	0	0	0	12	2.272.802.005	12,5	384.722.015	104,17	16,93		
5.04.01.2.2.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang disediakan	12	17.500.000.000	3	384.722.015	0	0	0	0	0	0	4	40.000.000	3	384.722.015	75,00	961,81		
5.04.01.2.2.05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun	4	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	92,5	73.097.000	0	0	0,00	0,00		
5.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	92,5	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	43	73.097.000	0	0	0,00	0,00		
5.04.01.2.05.02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Terpenuhinya Pakaian Dinas Beserta Atributnya	43	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	92,5	980.980.750	0	0	0,00	0,00		
5.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	92,5	6.940.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12	9.999.200	0	0	0,00	0,00		
5.04.01.2.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	12	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12	19.999.700	0	0	0,00	0,00		
5.04.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	12	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12	206.399.100	0	0	0,00	0,00		
5.04.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	1.150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12	30.000.000	0	0	0,00	0,00		
5.04.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan Pengadaan	Tersedianya barang cetakan dan Pengadaan	12	250.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12	14.596.500	0	0	0,00	0,00		
5.04.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terpenuhinya Kebutuhan Tamu	12	90.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12	299.988.500	0	0	0,00	0,00		
5.04.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Tersedianya Anggaran Perjalanan Dinas	12	2.500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12	399.997.750	0	0	0,00	0,00		
5.04.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	12	2.750.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	92,5	315.668.800	0	0	0,00	0,00		
5.04.01	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang di Penuhi	92,5	1.785.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12	69.751.900	0	0	0,00	0,00		
5.04.01	Pengadaan peralatan mesin lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	12	380.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12	66.200.000	0	0	0,00	0,00		
5.04.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Lainnya	12	365.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12	49.994.100	0	0	0,00	0,00		
5.04.01	Pengadaan mebel	Terpenuhinya Mebel Kantor	12	350.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12	69.751.900	0	0	0,00	0,00		
5.04.01	Pengadaan peralatan mesin	Jumlah peralatan mesin yang di sediakan	12	370.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12	59.970.900	0	0	0,00	0,00		
5.04.01	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	tersedianya Aset tetap lainnya	12	320.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	92,5	321.871.950	0	0	0,00	0,00		
5.04.01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	92,5	1.712.500.000	13,89	42.623.796	0	0	0	0	0	0	12	275.000.000	13,89	42.623.796	115,74	15,50		
5.04.01	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah jasa pelayanan umum yang disediakan	12	1.375.000.000	2	40.000.000	0	0	0	0	0	0	12	7.500.000	2	40.000.000	16,67	533,33		
5.04.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya kebutuhan surat menyurat	12	37.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12	39.371.950	0	0	0,00	0,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020						Target Program/Kegiatan RKPd tahun berjalan (tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun berjalan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp	K	Rp	Target RKPd Tahun 2021		Realisasi RKPd Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)		K	Rp	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Realisasi Target s/d tahun 2021			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13
5.04.01	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terspenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	300.000.000	3	2.623.796	0	0	0	0	0	0	92,5	201.938.600	3	2.623.796	3,24	1,30		
5.04.01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase barang milik daerah yang terpelihara	92,5	1.160.000.000	8,33	47.340.000	0	0	0	0	0	0	12	5.000.000	8,33	47.340.000	69,44	946,80		
5.04.01	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	12	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12	174.938.600	0	0	0,00	0,00		
5.04.01	Pemeliharaan peralatan mesin lainnya	Jumlah unit yang dipelihara	12	950.000.000	3	47.340.000	0	0	0	0	0	0	12	22.000.000	3	47.340.000	25,00	215,18		
5.04.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terbayarnya Pajak Kendaraan	12	160.000.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00		
5.04.2.01	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Waktu tanggap (Respon Time)	100	13.450.000.000	0	0	12	1.283.911.000,00	12,00	1.090.160.600,00	100,00	84,91	100	2.297.662.800	0	0	0,00	0,00		
5.04.2.01	Pencegahan , Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	100	11.850.000.000	0	0	15	1.108.910.000,00	15	956.588.000,00	100,00	86,26	100	2.097.662.800	0	0	0,00	0,00		
5.04.2.01.03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Waktu tanggap (Respon Time) penanganan Kebakaran	15	650.000.000	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	15	89.804.500	0	0	0,00	0,00		
5.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terkendalnya Terjadinya Kebakaran dalam Daerah	100	850.000.000	0	0	15	50.000.000,00	15	49.088.000,00	100,00	98,18	100	149.999.800	0	0	0,00	0,00		
5.04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terkendalnya Kebakaran Dalam Daerah	100	350.000.000	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100	58.254.900	0	0	0,00	0,00		
5.04.2.01.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung diri	Tercukupinya Sarana dan Prasarana Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	100	10.000.000.000	0	0	1	1.058.910.000,00	1,00	907.500.000,00	100,00	85,70	100	1.799.603.600	0	0	0,00	0,00		
5.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Terdatanya Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran	100	750.000.000	0	0	25	125.001.000,00	25	124.841.000	100,00	99,87	100	100.000.000	0	0	0,00	0,00		
5.04.2.02.01	Pendataan Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran	Terdatanya Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran	12	750.000.000	0	0	25	125.001.000,00	25	124.841.000	100,00	99,87	12	100.000.000	0	0	0,00	0,00		
5.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat dalam Penanggulangan Kebakaran	10	850.000.000	0	0	100	50.000.000,00	100	50.000.000	100,00	100,00	10	100.000.000	0	0	0,00	0,00		
5.04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat dalam Penanggulangan Kebakaran	9	350.000.000	0	0	25	50.000.000,00	25	50.000.000	100,00	100,00	9	50.000.000	0	0	0,00	0,00		
5.04.2.04.02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Terbentuknya Relawan Pemadam Kebakaran	2	500.000.000	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	50.000.000	0	0	0,00	0,00		
1.06.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	95	44.276.337.111	36,20	1.712.446.195	87	8.757.670.399	93	6.277.739.103	106,32	71,68	92,5	9.945.001.627	36,20	1.712.446.195	0,39	0,17		
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	500.000.000	36,67	43.928.000	12	119.999.800	12	119.555.800	100,00	99,63	100	100.000.000	36,67	43.928.000	0,37	0,44		
1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	30	250.000.000	2	21.960.000	12	50.000.000	6	49.752.000	50	99,50	6	50.000.000	2	21.960.000	0,33	0,44		
1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi laporan capaian kinerja perangkat daerah yang disusun	50	250.000.000	8	21.968.000	47	69.999.800	47	69.803.800	100,00	99,72	20	50.000.000	8	21.968.000	0,40	0,44		
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	100	30.165.317.365	32,50	891.464.274	59	5.664.919.873	59	3.358.992.290	100,00	59,29	100	6.432.208.381	32,50	891.464.274	0,33	0,14		
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	60	29.965.317.365	3	875.632.274	25	5.624.919.973	60.000	38.833.000	240000	0,69	12	6.392.208.381	3	875.632.274	0,25	0,14		
1.06.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan yang disusun	25	200.000.000	2	15.832.000	60.000	39.999.900	25	3.320.159.290	0,04	8300,42	5	40.000.000	2	15.832.000	0,40	0,40		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020						Target Program/Kegiatan RKPd tahun berjalan (tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun berjalan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp	K	Rp	Target RKPd Tahun 2021		Realisasi RKPd Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)		K	Rp	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Realisasi Target s/d tahun 2021			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi umum perangkat daerah	100	5.584.989.050	38,45	412.331.840	0	1.050.720.030	0	1.030.171.906	0	98,04	100	1.350.701.750	38,45	412.331.840	0,38	0,31		
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	125	555.000.000	13	40.000.000	36	111.000.000	36	110.761.900	100,00	99,79	25	80.000.000	13	40.000.000	0,52	0,50		
1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	230	874.996.650	35	181.026.400	609	265.413.130	609	252.627.700	100,00	95,18	45	223.452.200	35	181.026.400	0,78	0,81		
1.06.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	150	374.999.400	13	20.000.000	12	74.999.900	12	74.999.900	100	100,00	33	40.000.000	13	20.000.000	0,39	0,50		
1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah waktu penyediaan bahan logistik	60	1.749.999.800	3	81.887.500	12	349.999.800	12	349.821.500	100	99,95	12	626.366.950	3	81.887.500	0,25	0,13		
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan	30	250.000.000	3	48.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	100	100	6	130.000.000	3	48.000.000	0,50	0,37		
1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	6.380	29.997.200	0	0	-	5.997.200	0	1.715.500	0	28,61	1276	5.997.600	0	0	0,00	0,00		
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Waktu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	60	1.749.996.000	3	41.417.940	5	193.310.000	5	190.245.406	100	98,41	12	244.885.000	3	41.417.940	0,25	0,17		
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	5.176.118.696	50	172.557.581	120	1.027.118.696	120	894.943.313	100,00	87,13	100	1.062.112.496	50	172.557.581	0,50	0,16		
1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah perangko, materai dan benda pos lainnya yang disediakan	3.330	19.996.000	399	3.990.000	13	3.996.000	13	3.990.000	100,00	99,85	399	3.990.000	399	3.990.000	1,00	1,00		
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	60	980.122.696	3	29.067.581	12	180.122.696	0	97.753.313	0	54,27	12	197.122.496	3	29.067.581	0,25	0,15		
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	60	4.176.000.000	3	139.500.000		843.000.000	0	793.200.000	0	94,09	12	861.000.000	3	139.500.000	0,25	0,16		
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100	2.849.912.000	23,39	192.164.500	100	894.912.000	1	874.075.794	1	97,67	100	999.979.000	23,39	192.164.500	0,23	0,19		
1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah waktu penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60	999.998.000	3	49.879.500	120	199.998.000	60	180.242.800	50	90,12	12	250.000.000	3	49.879.500	0,25	0,20		
1.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	650	599.914.000	37	42.608.000	1	129.914.000	1	129.913.000	100	100	147	149.979.000	37	42.608.000	0,25	0,28		
1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara / direhabilitasi	25	1.250.000.000	1	99.677.000	2	565.000.000,00	2	563.919.994	100	99,81	5	600.000.000	1	99.677.000	0,20	0,17		
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Prosentase PSKS yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	87	3.800.954.500	0	7.449.100	87	753.354.400	82	715.783.100	94,54	95,01	82	760.924.950	0	7.449.100	0,00	0,01		
1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengumpulan sumbangan dalam daerah	100	93.499.800	0	1.400.000	5	13.499.800	5	9.089.800	100	67,33	100	13.499.600	0	1.400.000	0,00	0,10		
1.06.02.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah peserta penyebarluasan informasi UGB dan PUB	125	93.499.800	0	1.400.000	5	13.499.800	5	9.089.800	100	67,33	25	13.499.600	0	1.400.000	0,00	0,10		
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten	100	3.707.454.700	0	6.049.100	10	739.854.600	10	706.693.300	100	95,52	100	747.425.350	0	6.049.100	0,00	0,01		
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengurus IPSM Kabupaten dan anggota PSM	1.120	2.720.000.000	0	173.100		552.399.900	10	169.693.300	0	30,72	236	559.973.100	0	173.100	0,00	0,00		
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah anggota TKSK yang mendapat kesejahteraan	125	987.454.700	0	5.876.000	5	187.454.700,00		537.000.000	0	286,47	25	187.452.250	0	5.876.000	0,00	0,03		
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang Tertangani	40	7.114.650.200	1,33	101.632.700	0	893.326.070	37	758.668.833	0	84,93	36,7	1.162.859.250	1,33	101.632.700	0,04	0,09		
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Cakupan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial	100	6.314.850.200	15	86.446.700	0	713.527.670	0	579.770.433	0	81,25	100	865.461.100	15	86.446.700	0,15	0,10		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020						Target Program/Kegiatan RKPd tahun berjalan (tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun berjalan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp	K	Rp	Target RKPd Tahun 2021		Realisasi RKPd Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)		K	Rp	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Realisasi Target s/d tahun 2021			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah waktu fasilitasi permakanan rehabilitasi sosial	60	1.983.218.700	3	49.151.200	8	383.218.700	8	356.095.800	100	92,92	12	297.462.400	3	49.151.200	0,25	0,17		
1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah waktu fasilitasi sandang rehabilitasi sosial	60	470.557.500	3	32.195.500		70.557.500,00		135.116.133	0	191,50	12	69.999.500	3	32.195.500	0,25	0,46		
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah alat bantu	50	2.000.000.000	0	0		39.839.070		20.107.200	0	50,47	10	30.000.000	0	0	0,00	0,00		
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta bimbingan bagi PPKS	155	1.000.000.000	0	0		60.969.600,00		68.451.300	0	112,27	35	367.999.400	0	0	0,00	0,00		
1.06.04.2.01.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah waktu Monev PPKS	60	861.074.000	3	5.100.000		158.942.800			0	0,00	12	99.999.800	3	5.100.000	0,25	0,05		
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Program HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Cakupan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial	100	799.800.000	0,09	15.186.000	12	179.798.400	12	178.898.400	100,00	99,50	100	297.398.150	0,09	15.186.000	0,00	0,05		
1.06.04.2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah ODGJ Yang Ditangani	400	175.000.000	18	10.836.000	-	74.998.400,00	0	74.898.400	0	99,87	100	24.999.750	18	10.836.000	0,18	0,43		
1.06.04.2.02.14	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Tim Penanganan Disabilitas	150	624.800.000	0	4.350.000		104.800.000		104.000.000	0	99,24	32	272.398.400	0	4.350.000	0,00	0,02		
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase penduduk miskin yang mendapatkan perlindungan sosial	12	4.273.162.000	0,00	101.065.600	-	733.162.000	12	722.504.000	0	98,55	11,8	717.211.400	0,00	101.065.600	0,00	0,14		
1.06.05.2.02	Pengelolaan Daftar Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah	100	4.273.162.000	0	101.065.600	20	733.162.000	20	722.504.000	100	98,55	100	717.211.400	0	101.065.600	0,00	0,14		
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah petugas verifikasi dan validasi penerima jaminan kesehatan dan SPM dari Pemerintah	1.220	499.773.800	0	4.817.400	-	99.773.800	0	21.367.600	0	21,42	244	99.772.400	0	4.817.400	0,00	0,05		
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah pendamping dan operator yang mendapat fasilitas (PKH)	990	3.650.145.600	193	94.500.000	-	610.145.600	0	604.110.600	0	99,01	193	594.190.800	193	94.500.000	1,00	0,16		
1.06.05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah waktu	60	123.242.600	3	1.748.200	-	23.242.600,00	0	97.025.800	0	417,45	12	23.248.200	3	1.748.200	0,25	0,08		
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Penanganan Bencana	96	2.330.575.000	25	87.144.500	100	525.388.400	90	428.713.800	90,00	81,60	0,9	477.902.900	25	87.144.500	27,78	0,18		
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Cakupan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial	100	297.236.000	20	26.497.300	10	138.243.100	10	56.907.500	100	41,16	100	78.971.300	20	26.497.300	0,20	0,34		
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	Jumlah waktu penyediaan makanan	100	97.236.000	3	17.432.600	-	74.191.600	0	12.336.000	0	16,63	12	39.124.000	3	17.432.600	0,25	0,45		
1.06.06.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah waktu penyediaan sandang	220	50.000.000	3	5.361.100	12	6.560.000,00	0	6.560.000	0	100	12	11.043.700	3	5.361.100	0,25	0,49		
1.06.06.2.01.04	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Jumlah orang terlantar yang dipulangkan ke daerah asal	600	150.000.000	16	3.703.600		57.491.500,00		38.011.500	0	66,12	150	28.803.600	16	3.703.600	0,11	0,13		
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana	100	2.033.339.000	100	60.647.200		387.145.300		371.806.300	0	96,04	100	398.931.600	100	60.647.200	1,00	0,15		
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah anggota TAGANA yang mendapat kesejahteraan	275	2.033.339.000	56	60.647.200		387.145.300,00		371.806.300	0	96,04	56	398.931.600	56	60.647.200	1,00	0,15		
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase TMP yang dikelola	100	820.000.000	0	0	93,2	175.000.000	100	174.396.000	107,30	99,65	100	200.000.000	0	0	0,00	0,00		
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Cakupan pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota	100	820.000.000	0	0	400	175.000.000	400	174.396.000	100	99,65	100	200.000.000	0	0	0,00	0,00		
1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	9	820.000.000	0	0	224	175.000.000,00	0	174.396.000	0,00	99,65	2	200.000.000	0	0	0,00	0,00		
02:07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA																		Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian	
02:07:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	7.653.819.052	82,5	943.133.909	82,50	5.980.636.229,00	83	5.170.298.007	100,00	86,45	82,5	5.627.704.011	82,5	943.133.909	100,00	16,76		
2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	10	100.000.000	3	24.202.000	10,00	59.919.420,00	10	57.204.200	100,00	95,47	12	78.085.800	3	24.202.000	25,00	30,99		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020						Target Program/Kegiatan RKPD tahun berjalan (tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun berjalan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Realisasi Target s/d tahun 2021			
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2.07.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang tepat waktu yang disusun	5	50.000.000	4	14.376.000	5,00	29.919.660,00	5	29.915.600	100,00	99,99	6	43.087.800	4	14.376.000	66,67	33,36		
2.07.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	4	50.000.000	6	9.826.000	4,00	29.999.760,00	4	27.288.600	100,00	90,96	6	34.998.000	6	9.826.000	100,00	28,08		
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan	12	4.611.450.419	3	661.918.856	12	3.595.980.419	12	2.947.906.876	100,00	81,98	12	3.706.902.160	3	661.918.856	25,00	17,86		
2.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang disediakan	372	4.561.450.419	93	654.592.856	372	3.561.450.419	372	2.914.668.876	100,00	81,84	372	3.671.920.160	93	654.592.856	25,00	17,83		
2.07.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan yang disusun	15	50.000.000	6	7.326.000	16	34.530.000	16	33.238.000	100,00	96,26	15	34.982.000	6	7.326.000	40,00	20,94		
2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian	600	800.000.000	0	0	600	729.686.060	600	723.589.200	100,00	99,16	150	200.000.000	0	0	0,00	0,00		
2.07.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta sosialisasi	600	800.000.000	0	0	600	729.686.060	600	723.589.200	100,00	99,16	150	200.000.000	0	0	0,00	0,00		
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum	12	770.168.633	3	76.279.576	12	463.701.910	12	388.283.237	100,00	83,74	12	353.888.700	3	76.279.576	25,00	21,55		
2.07.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	196	30.000.000	120	7.407.100	196	14.996.740	235	14.983.000	119,90	99,91	240	14.989.400	120	7.407.100	50,00	49,42		
2.07.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	19	100.000.000	419	24.650.200	19	79.999.010	723	79.541.700	3.805,26	99,43	893	49.980.100	419	24.650.200	46,92	49,32		
2.07.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	430	30.000.000	215	4.972.100	430	12.466.560	424	12.418.750	98,60	99,62	313	9.985.900	215	4.972.100	68,69	49,79		
2.07.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah waktu bahan logistik kantor yang disediakan	12	80.000.000	2	9.867.500	12	81.050.000	12	80.878.500	100,00	99,79	12	59.997.000	2	9.867.500	16,67	16,45		
2.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	23095	20.000.000	1517	4.903.000	23095	9.999.800	23095	9.994.800	100,00	99,95	3035	9.993.500	1517	4.903.000	49,98	49,06		
2.07.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan yang disediakan	1507	20.000.000	438	1.499.400	1507	8.995.800	1740	8.246.150	115,46	91,67	1763	8.991.300	438	1.499.400	24,84	16,68		
2.07.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Waktu rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12	490.168.633	3	22.980.276	12	256.194.000	12	182.220.337	100,00	71,13	12	199.951.500	3	22.980.276	25,00	11,49		
2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2	0	0	0	2	9.900.000	2	9.860.000	100,00	99,60	2	0	0	0	0,00	0,00		
2.07.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeleur yang diadakan	2	0	0	0	2	9.900.000	2	9.860.000	100,00	99,60	2	0	0	0	0,00	0,00		
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12	1.104.200.000	3	161.678.627	12	1.027.590.000	12	966.184.494	100,00	94,02	12	1.040.197.651	3	161.678.627	25,00	15,54		
2.07.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah waktu penyediaan jasa surat menyurat	12	5.000.000	100	1.000.000	12	990.000	12	990.000	100,00	100,00	100	1.000.000	100	1.000.000	100,00	100,00		
2.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	13	150.000.000	3	21.778.627	12	90.000.000	12	96.944.494	100,00	107,72	12	89.997.651	3	21.778.627	25,00	24,20		
2.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga perkantoran	396	949.200.000	141	138.900.000	387	936.600.000	387	868.250.000	100,00	92,70	564	949.200.000	141	138.900.000	25,00	14,63		
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan barang milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan daerah	69	268.000.000	60	19.054.850	69	93.858.420	69	77.270.000	100,00	82,33	135	248.629.700	60	19.054.850	44,44	7,66		
2.07.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	10	85.000.000	54	15.068.850	10	42.447.640	10	36.208.400	100,00	85,30	109	38.630.700	54	15.068.850	49,54	39,01		
2.07.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	29	50.000.000	6	3.986.000	30	23.083.780	30	12.915.000	100,00	55,95	25	9.999.000	6	3.986.000	24,00	39,86		
2.07.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap yang dipelihara	29	45.000.000	0	0	29	8.777.000	29	8.643.000	100,00	98,47	0	0	0	0				
2.07.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan yang dipelihara	1	88.000.000	0	0	1	19.550.000	1	19.503.600	100,00	99,76	1	200.000.000	0	0	0,00	0,00		
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase rekomendasi kebijakan ketenagakerjaan pada RTK Kabupaten yang dilaksanakan	75	200.000.000	0	0	75	100.000.000	75	99.660.000	100,00	99,66	75	100.000.000	0	0	0,00	0,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020						Target Program/Kegiatan RKPd tahun berjalan (tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun berjalan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp	K	Rp	Target RKPd Tahun 2021		Realisasi RKPd Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)		K	Rp	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Realisasi Target s/d tahun 2021			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13
2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah dokumen rencana tenaga kerja makro yang disusun	1	200.000.000	0	0	1	100.000.000	1	99.660.000	100,00	99,66	1	91.733.000	0	0	0,00	0,00		
2.07.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah dokumen rencana tenaga kerja makro yang disusun	1	200.000.000	0	0	1	100.000.000	1	99.660.000	100,00	99,66	1	91.733.000	0	0	0,00	0,00		
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi	1,32	557.215.864	0	0	60	1.589.530.770	1	1.565.324.140	0,93	98,48	60	2.126.974.500	0	0	0,00	0,00		
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Cakupan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	0	0	160	494.646.100	1750	1.568.551.150	1750	1.544.607.020	100,00	98,47	810	2.107.940.900	160	494.646.100	19,75	23,47		
2.07.03.2.01.01	Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Jumlah peserta pelatihan keterampilan	0	0	160	494.646.100	1750	1.568.551.150	1750	1.544.607.020	100,00	98,47	810	2.107.940.900	160	494.646.100	19,75	23,47		
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Cakupan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	43	557.215.864	50	19.033.600	30	20.979.620	30	20.717.120	100,00	98,75	50	19.033.600	50	19.033.600	100,00	100,00		
2.07.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina	43	557.215.864	50	19.033.600	30	20.979.620	30	20.717.120	100,00	98,75	50	19.033.600	50	19.033.600	100,00	100,00		
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	80,43	450.000.000	60	-	80,43	64.998.090	78	52.658.390	97,15	81,02	80,43	81.574.000	60	-	74,60	0,00		
		Persentase permasalahan PMI yang terselesaikan	70	258.909.009	0	0	70	107.834.990	100	99.894.990	142,86	92,64	70	107.834.990	0	0	0,00	0,00		
		Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota	82,2	1.018.909.009																
2.07.04.2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	2500	450.000.000	0	0	2.500	64.998.090	1452	52.658.390	58,08	81,02	2.500	81.574.000	0	0	0,00	0,00		
2.07.04.2.01.01	Pelayanan antar Kerja (Pengembangan Aplikasi AK-1)	Jumlah aplikasi yang dikembangkan	75	120.000.000	0	0							1	15.000.000	0	0	0,00	0,00		
2.07.04.2.01.01	Pelayanan antar Kerja (Pembinaan Bursa Kerja Khusus (BKK))	Jumlah peserta pembinaan	2500	175.000.000	0	0							40	16.452.800	0	0	0,00	0,00		
2.07.04.2.01.01	Pelayanan antar Kerja (Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan serta Penempatan Transmigrasi untuk Memenuhi Kebutuhan SDM)	Jumlah aplikasi yang dikembangkan	60	155.000.000	0	0							10	50.121.200	0	0	0,00	0,00		
2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	95	258.909.009	0	0	307	107.834.990	282	99.894.990	91,86	92,64	307	107.834.990	0	0	0,00	0,00		
2.07.04.2.04.01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah Penyelesaian Permasalahan TKI Pra dan Purna Penempatan (PMI)	95	258.909.009	0	0	307	107834990	282	99.894.990	91,86	92,64	307	107.834.990	0	0	0,00	0,00		
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perselisihan hubungan industrial yang terselesaikan	90	209.000.000	62,5	-	90	179.799.140	95	126.949.140	105,22	70,61	90	121.639.500	62,5	-	69,44	0,00		
		Persentase kepesertaan pekerja penerima upah pada perusahaan dalam BPJS ketenagakerjaan	40	25.000.000	59,33	0	40	219.019.680	59	210.775.930	148,33	96,24	40	17.609.500	59,33	0	148,33	0,00		
		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah, dan terdaftar BPJS Ketenagakerjaan)	80	686.171.535																
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	30	234.000.000	3	9.272.700	30	398.818.820	29	337.725.070	96,67	84,68	30	139.249.000	3	9.272.700	10,00	6,66		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020						Target Program/Kegiatan RPKD tahun berjalan (tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun berjalan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d tahun 2021	K	Rp	K		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Sosialisasi Undang Undang Cipta Kerja dan Peraturan Perusahaan)	Jumlah peserta sosialisasi	45	25.000.000	0	0	40	99.799.900	18	53.999.900	45,00	54,11	100	51.997.400	0	0	0,00	0,00		
2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial)	Jumlah laporan perselisihan hubungan industrial yang terselesaikan dan pelaksanaan mayday	45	200.000.000	3	9.272.700							40	166.487.100	3	9.272.700	7,50	5,57		
2.07.05.2.02.03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi (Sosialisasi Upah Minimum Kabupaten bagi Perusahaan dan Pekerja/ Buruh)	Jumlah peserta sosialisasi	25	25.000.000	0	0	6	219.019.680	6	210.775.930	100,00	96,24	25	17.609.500	0	0	0,00	0,00		
2.07.05.2.02.03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi (Fasilitasi Peningkatan UMK Menuju Kebutuhan Hidup Layak)	Jumlah aktifitas penentuan UMK	8	250.000.000	0	0							4	119.262.000	0	0	0,00	0,00		
2.07.05.2.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aktifitas pemberdayaan SDM LKS Tripartit	4	184.000.000	0	0	4	79.999.240	4	72.949.240	100,00	91,19	4	69.642.100	0	0	0,00	0,00		
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																		DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Desa/Kel yang memahami PPRG	90	4.299.999.800	0,00	168.355.700	-	663.333.700	25	578.962.000	0	87,28	25	1.149.999.900	0,00	168.355.700	0,00	0,15		
2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	100	2.300.000.000	0,00	0	-	263.333.900	0	250.803.700	0	95,24	100	399.999.900	0,00	0	0,00	0,00		
2.08.02.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta sosialisasi PUG	1.500	2.300.000.000	0	0	-	263.333.900	0	250.803.700	0	95,24	450	399.999.900	0	0	0,00	0,00		
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	100	1.999.999.800	38,89	168.355.700	-	399.999.800	0	328.158.300	0	82,04	100	750.000.000	38,89	168.355.700	0,39	0,22		
2.08.02.2.03.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pelatihan pemberdayaan perempuan	15	1.999.999.800	7	168.355.700	-	399.999.800	0	328.158.300	0	82,04	18	750.000.000	7	168.355.700	0,39	0,22		
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Presentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan	87	1.649.999.900	100	80.723.642	-	415.059.990	77	363.916.125	0	87,68	77	329.972.475	100	80.723.642	1,30	0,24		
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100	150.000.000	100	29.219.417	-	84.310.000	0	82.410.000	0	97,75	100	29.972.700	100	29.219.417	1,00	0,97		
2.08.03.2.01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pelatihan pada kelompok tani perempuan	125	150.000.000	50	29.219.417	85	30.000.000		28.100.000	0,00	93,67	50	29.972.700	50	29.219.417	1,00	0,97		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020						Target Program/Kegiatan RKPd tahun berjalan (tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun berjalan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
			K	Rp	K	Rp	Target RKPd Tahun 2021		Realisasi RKPd Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)		K	Rp	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Realisasi Target s/d tahun 2021				
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp			K
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13	
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah	100	1.499.999.900	100	51.504.225	4	330.749.990	4	281.506.125	100	85,11	100	299.999.775	100	51.504.225	1,00	0,17			
2.08.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kasus yang ditangani	300	1.499.999.900	4	51.504.225	2	330.749.990	2	281.506.125	100	85,11	60	299.999.775	4	51.504.225	0,07	0,17			
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase kelompok perempuan berdaya	50	324.999.900	100	79.844.700	-	104.999.900	98	103.499.800	0	98,57	20	99.975.700	100	79.844.700	5,00	0,80			
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (kg) dan hak anak tingkat daerah	100	324.999.900	100	79.844.700	-	104.999.900	0	103.499.800	0	98,57	100	99.975.700	100	79.844.700	1,00	0,80			
2.08.04.2.01.02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah jenis pelatihan	10	324.999.900	2	79.844.700	-	104.999.900	0	103.499.800	0	98,57	2	99.975.700	2	79.844.700	1,00	0,80			
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase jumlah forum anak yang telah terbentuk	60	449.999.900	0	81.424.200	25	139.999.900	20	131.095.900	80	93,64	20	144.989.400	0	81.424.200	0,00	0,56			
2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha kewenangan Kabupaten/Kota	100	199.999.900	0	0	-	39.999.900	0	35.235.900	0	88,09	100	49.990.200	0	0	0,00	0,00			
2.08.03.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta	375	199.999.900	0	0	75	39.999.900	75	35.235.900	100	88,09	75	49.990.200	0	0	0,00	0,00			
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota	100	250.000.000	100	81.424.200		100.000.000		95.860.000	0	95,86	100	94.999.200	100	81.424.200	1,00	0,86			
2.08.03.2.02.02	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Forum Anak Desa yang dibentuk	350	250.000.000	70	81.424.200		50.000.000,00		47.380.000	0	94,76	70	94.999.200	70	81.424.200	1,00	0,86			
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Prosentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak	87	955.040.000	0	0	-	191.008.000	4	8.350.000	0	4,37	0	0	0	0	0,00	0,00			
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		1	955.040.000	0	0	-	191.008.000	0	8.350.000	0	4,37	0	0	0	0	0,00	0,00			
2.08.07.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kasus yang ditangani	300	955.040.000	0	0		191.008.000	0	8.350.000	0	4,37	0	0	0	0	0,00	0,00			
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN																		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN		
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Skor PPH Ketersediaan	96,00	3.286.799.967				95,00	320.000.000	95,00	318.484.400	100,00	99,53	95,20	100.000.000			0,00	0,00		
2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Dalam Mendukung Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Wewenang Kabupaten	5,00	3.286.799.967				1,00	320.000.000	1,00	318.484.400	100,00	99,53	1,00	100.000.000			0,00	0,00		
2.09.02.2.01.02	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah aktivitas dalam mendukung penyediaan infrastruktur lantai jemur	1,00	100.000.000				1,00	120.000.000	1,00	119.023.500	100,00	99,19	1,00	100.000.000			0,00	0,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020						Target Program/Kegiatan RKPd tahun berjalan (tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun berjalan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp	K	Rp	Target RKPd Tahun 2021		Realisasi RKPd Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)		K	Rp	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Realisasi Target s/d tahun 2021			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor PPH Konsumsi	90,75	3.353.273.112	0,00	51.200.000	90,50	953.893.250	90,50	788.000.700	100,00	82,61	90,55	1.233.499.600	0,00	51.200.000	0,00	4,15		
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Kegiatan Dalam Mendukung Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	15,00	474.702.261	0,00	51.200.000	1,00	439.946.410	1,00	365.572.100	100,00	83,09	1,00	349.500.000	0,00	51.200.000	0,00	14,65		
2.09.03.2.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah aktivitas dalam mendukung penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal	2,00	349.500.000	0,00	51.200.000	2,00	439.946.410	2,00	365.572.100	100,00	83,09	2,00	349.500.000	0,00	51.200.000	0,00	14,65		
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Dalam Mendukung Pelaksanaan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	5,00	600.000.000									1,00	60.000.000			0,00	0,00		
2.09.03.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah aktivitas dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan kabupaten / kota	2,00	60.000.000									2,00	60.000.000			0,00	0,00		
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Kegiatan Dalam Mendukung Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi	5,00	2.278.570.851			1,00	513.946.840	1,00	422.428.600	100,00	82,19	1,00	823.999.600			0,00	0,00		
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah aktivitas dalam mendukung pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	2,00	823.999.600			15,00	513.946.840	15,00	422.428.600	100,00	82,19	2,00	823.999.600			0,00	0,00		
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase daerah rentan rawan pangan	10,00	649.390.831	0,00	43.350.000	2,00	279.933.040	2,00	245.656.400	100,00	87,76	14,00	400.000.000	0,00	43.350.000	0,00	10,84		
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Dalam Mendukung Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten	5,00	649.390.831	0,00	43.350.000	1,00	119.980.400	1,00	106.894.000	100,00	89,09	1,00	400.000.000	0,00	43.350.000	0,00	10,84		
2.09.04.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah aktivitas dalam mendukung kegiatan penanganan kerawanan pangan kabupaten	2,00	400.000.000	0,00	43.350.000	1,00	119.980.400	1,00	106.894.000	100,00	89,09	2,00	400.000.000	0,00	43.350.000	0,00	10,84		
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	100,00	355.329.726	100,00	32.925.000	80,00	29.992.570	80,00	24.743.700	100,00	82,50	100,00	75.000.000	100,00	32.925.000	100,00	43,90		
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Dalam Mendukung Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten	5,00	355.329.726	100,00	32.925.000	1,00	29.992.570	1,00	24.743.700	100,00	82,50	1,00	75.000.000	100,00	32.925.000	#####	43,90		
2.09.05.2.01.01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aktivitas dalam mendukung penguatan kelembagaan keamanan pangan segar daerah kabupaten/kota	1,00	75.000.000	1,00	32.925.000	1,00	29.992.570	1,00	24.743.700	100,00	82,50	1,00	75.000.000	1,00	32.925.000	100,00	43,90		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN																		Sekretariat Daerah	
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN		100	12.150.000.000	13	15.208.200		275.404.000		5.612.000		0,02	100	12.150.000.000	13	15.208.200	12,50	0,13		
2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		100	12.150.000.000	13	15.208.200		275.404.000		5.612.000		0,02	100	12.150.000.000	13	15.208.200	12,50	0,13		
2.10.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti	Jumlah fasilitasi dan pengadaan tanah	60	60.750.000.000	0	0							12	12.150.000.000	0	0	0,00	0,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020						Target Program/Kegiatan RPKD tahun berjalan (tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun berjalan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp	K	Rp	Target RPKD Tahun 2021		Realisasi RPKD Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Realisasi Target s/d tahun 2021					
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah	Jumlah laporan fasilitasi konflik dan pelaksanaan pengadaan tanah	20		1	15.208.200							4		1	15.208.200	1,00	0,00		
211	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2110101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah yang tepat waktu		12.220.939.939		1.675.143.142		12.220.939.939		9.667.172.044	0,73			12.322.122.222		1.675.143.142	0,00	0,14		
		Persentase perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang tepat waktu															0,00	0,00		
21101012.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	508	49.998.510	0	-	508	49.998.510	371	23.199.400	0,73	0,464	508	50.000.000	0	-	0,00	0,00		
21101012.0101	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	500	25.000.000	0	-	500	25.000.000	230	12.430.300	0,46	0,50	5	25.000.000	0	-	0,00	0,00		
21101012.0106	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8	24.998.510	0	-	8	24.998.510	5	17.743.500	0,63	0,71	4	25.000.000	0	-	0,00	0,00		
21101012.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17	10.792.792.953	17	1.576.870.588	17	10.792.792.953	17	8.544.559.337	1,00	0,79	17	11.120.160.634	17	1.576.870.588	1,00	0,14		
21101012.0201	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN yang tersedia	12	10.762.793.173	3 bulan	1.573.730.088	12	10.762.793.173	12	19.255.059.193	1	1,79	12	11.110.160.634	3	1.573.730.088	0,25	0,14		
21101012.0207	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5	29.999.780	1 dok	3.140.500	5	29.999.780	5	27.419.800	1	0,914	5	10.000.000	1	3.140.500	0,20	0,31		
21101012.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jenis Layanan Administrasi yang dilaksanakan tepat waktu		571.215.620		41.381.510		571.215.620		426.294.705		0,75		589.986.800		41.381.510	0,00	0,07		
21101012.0601	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	376	19.999.760	12 jenis	5.433.500	376	19.999.760	376	18.181.600	1	0,91	21	19.999.700	12	5.433.500	0,57	0,27		
21101012.0602	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3	99.999.570		-	3	99.999.570	3	90.422.700	1	0,90	30	100.000.000		-	0,00	0,00		
21101012.0603	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	489	19.999.980	8 jenis	5.722.600	489	19.999.980	489	18.181.800	1	0,91	34	20.000.000	8	5.722.600	0,24	0,29		
21101012.0604	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2	199.993.750	1 jenis	6.244.000	2	199.993.750	8	119.802.000	4	0,60	6	199.988.000	1	6.244.000	0,17	0,03		
21101012.0605	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	37874	29.999.860	1 jenis	9.877.500	37874	29.999.860	37.874	27.272.600	1	0,91	6	29.999.700	1	9.877.500	0,17	0,33		
21101012.0606	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah eksemplar Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	976	16.998.200	243 eks	795.000	976	16.998.200	976	11.856.000	1	0,70	977	19.999.400	243	795.000	0,25	0,04		
21101012.0609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	882	184.224.500	60 OH	13.308.910	882	184.224.500	882	140.578.005	1	0,76	360	200.000.000	60	13.308.910	0,17	0,07		
21101012.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis Jasa Penunjang Urusan PD yang tersedia	99	389.945.588		56.891.044	99	389.945.588	99	281.061.702	1	0,72		361.994.788		56.891.044	0,00	0,16		
21101012.0801	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	4.998.000	3 bulan	250.000	12	4.998.000	12	677.500	1	0,14	12	4.995.000	3	250.000	0,25	0,05		
21101012.0802	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	224.999.788	3 bulan	35.191.044	12	224.999.788	12	155.484.202	1	0,69	12	224.999.788	3	35.191.044	0,25	0,16		
21101012.0803	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3	4.947.800	0	-	3	4.947.800	-	-	-	-	0	-	0	-	0,00	0,00		
21101012.0804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	72	155.000.000	18 OB	21.450.000	72	155.000.000	72	124.900.000	1	0,80581	72	132.000.000	18	21.450.000	0,25	0,16		
21101012.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis barang milik daerah penunjang urusan PD yang terpelihara	7	416.987.268	-	-	7	416.987.268	7	392.056.900	1	0,94		199.980.000	0	-	0,00	0,00		
21101012.092	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2	199.640.400	0	-	2	199.640.400	8	179.449.500	4	0,90	68	149.980.000	0	-	0,00	0,00		
21101012.096	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4	49.976.300	0	-	4	49.976.300	8	45.392.400	2	0,91	137	50.000.000	0	-	0,00	0,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020						Target Program/Kegiatan RKPd tahun berjalan (tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun berjalan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp	K	Rp	Target RKPd Tahun 2021		Realisasi RKPd Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)		K	Rp	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Realisasi Target s/d tahun 2021			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13
21101012.0911	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	167.370.568	0	-	1	167.370.568	1	167.215.000	1	1,00	0	-	0	-	0,00	0,00		
2110102	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase lingkup perencanaan bidang lingkungan hidup		104.999.999				104.999.999		99.344.000		0,95	0	199.997.000			0,00	0,00		
21101022.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPPLH yang disusun	1	4.999.999	0	-	1	4.999.999	100	-	100	0	0	-	0	-	0,00	0,00		
21101022.0101	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	1	4.999.999	0	-	1	4.999.999	0	-	0	0	0	-	0	-	0,00	0,00		
21101022.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Stratgis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen KLHS yang disusun	3	100.000.000	0	-	3	100.000.000	100	99.344.000	33,33	0,99	0	199.997.000	0	-	0,00	0,00		
21101022.0201	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	3	100.000.000	0	-	3	100.000.000	3	99.344.000	1	0,99	2	199.997.000	0	-	0,00	0,00		
2110103	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase peningkatan sarana prasarana dan aktivitas penanggulangan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup		1.652.955.460	0	-		1.652.955.460		1.149.390.270		0,70	0	3.139.998.100	0	-	0,00	0,00		
21101032.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	capaian indeks kualitas lingkungan	6	1.549.956.090	1	37.967.200	6	1.549.956.090	6	1.046.390.900	1	0,68	6	2.924.999.100	1	37.967.200	0,17	0,01		
21101032.0101	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	2	1.000.000.000	0	-	2	1.000.000.000	1	435.666.200	0,5	0,44	1	500.000.000	0	-	0,00	0,00		
21101032.0103	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jenis Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	4	549.956.090	1	37.967.200	4	549.956.090	4	610.724.700	1	1,11	4	2.424.999.100	1	37.967.200	0,25	0,02		
21101032.02	Penanggulangan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jenis informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup	4	102.999.370	1	8.089.600	4	102.999.370	100	102.999.370	25	1	0	214.999.000	1	8.089.600	0,00	0,04		
21101032.0201	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	4	102.999.370	1	8.089.600	4	102.999.370	4	99.422.900	1	0,97	2	214.999.000	1	8.089.600	0,50	0,04		
2110104	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan		103.996.400		1.871.700		103.996.400		89.708.800	0,00	0,86	0	170.000.000	0	1.871.700	0,00	0,01		
21101042.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase keanekaragaman hayati	1	103.996.400		1.871.700	1	103.996.400	1	89.708.800	1	0,86	1	170.000.000		1.871.700	0,00	0,01		
21101042.0105	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Jenis Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	1	103.996.400	1	1.871.700	1	103.996.400	1	89.708.800	1	0,86	1	170.000.000	1	1.871.700	1,00	0,01		
2110105	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH	Persentase kegiatan/usaha yang melakukan pengelolaan limbah B3		1.999.690	0	-		1.999.690		-		0	0	25.000.000	0	-	0,00	0,00		
21101052.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase penyimpan limbah B3 memenuhi persyaratan	2	1.999.690	0	-	2	1.999.690	0	-	0	0	2	25.000.000	0	-	0,00	0,00		
21101052.0102	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	2	1.999.690	0	-	2	1.999.690	0	-	0	0	1	25.000.000	0	-	0,00	0,00		
2110106	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase izin lingkungan dan IPPLH		778.062.070	0	5.998.800		778.062.070		311.377.600		0,40	0	349.995.300	0	5.998.800	0,00	0,02		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020						Target Program/Kegiatan RKPd tahun berjalan (tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun berjalan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp	K	Rp	Target RKPd Tahun 2021		Realisasi RKPd Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)		K	Rp	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Realisasi Target s/d tahun 2021			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13
21101062.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketaatan izin lingkungan dan IPPLH	5	778.062.070	1	5.998.800	5	778.062.070	5	311.377.600	1	0,40	5	349.995.300	1	5.998.800	0,20	0,02		
21101062.0103	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	5	778.062.070	1	5.998.800	5	778.062.070	2	311.377.600	0,4	0,40	3	349.995.300	1	5.998.800	0,33	0,02		
2110108	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN	Persentase masyarakat peduli lingkungan hidup		157.991.920		675.000		157.991.920		114.416.420		0,72	0	75.000.000	0	675.000	0,00	0,01		
21101082.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kepedulian dan pemahaman pokmas terhadap LH	2	157.991.920	1	675.000	2	157.991.920	2	114.416.420	1	0,72	2	75.000.000	1	675.000	0,50	0,01		
21101082.0101	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jenis Peningkatan Kapasitas SDM, Penyuluhan dan Kampanye Bidang Lingkungan Hidup	1	107.992.930	1	675.000	1	107.992.930	1	81.909.200	1	0,76	1	25.000.000	1	675.000	1,00	0,03		
21101082.0103	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jenis Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	1	49.998.990	0		1	49.998.990	1	32.507.220	1	0,65	1	50.000.000		-	0,00	0,00		
2110109	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase penghargaan terhadap pelaku pelestari lingkungan hidup		20.505.210		11.597.900		20.505.210		19.166.100		0,93	2	65.000.000	2	11.597.900	1,00	0,18		
21101092.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jenis penghargaan terhadap pelaku pelestari lingkungan hidup	1	20.505.210	1	11.597.900	1	20.505.210	100	19.166.100	100	0,93	2	65.000.000	2	11.597.900	1,00	0,18		
21101082.0101	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1	20.505.210	2	11.597.900	1	20.505.210	1	19.166.100	1	0,93	2	65.000.000	2	11.597.900	1,00	0,18		
2110111	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengelolaan sampah di wilayah Kota/Kabupaten		12.666.938.357		1.288.017.185		12.666.938.357		11.165.058.220		0,88		12.404.228.340	0,88	1.288.017.185	1,00	0,10		
21101112.01	Pengelolaan Sampah	Volume sampah yang ditangani	20	12.666.938.357	11	1.288.017.185	20	12.666.938.357	20	11.165.058.220	1	0,88	20	12.404.228.340	11	1.288.017.185	0,55	0,10		
21101112.0101	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	1	50.000.000	0	-	1	50.000.000	1	49.900.000	1	1,00	2	35.000.000	0	-	0,00	0,00		
21101112.0104	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	2	70.004.880	1	5.118.500	2	70.004.880	2	67.513.800	1	0,964	300	473.999.000	1	5.118.500	0,00	0,01		
21101112.0105	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jenis Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	14	9.605.872.197	10	1.282.898.685	14	9.605.872.197	14	9.306.183.320	1	0,969	15	9.177.499.640	10	1.282.898.685	0,67	0,14		
21101112.027	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jenis Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	3	2.941.061.280	0	0	3	2.941.061.280	3	1.741.461.100	1	0,592	7	2.717.729.700	0	-	0,00	0,00		
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	93,50	33.881.928.680	44,36	881.716.415	90	7.381.636.675,00	90	7.381.636.675,00	1,00	1	92,50	5.524.518.724	44,36	881.716.415	0,48	0,16		
2.12.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	60.851.890	42	27.852.400	87,50	991.342.227,00	9	991.342.227,00	0,10	1	100	82.424.700	42	27.852.400	0,42	0,34		
2.12.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	45	35.729.500	3	14.619.700	4	980.041.817,00	4	980.041.817,00	1,00	1	9	34.722.500	3	14.619.700	0,33	0,42		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020						Target Program/Kegiatan RPKD tahun berjalan (tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun berjalan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Tingkat Realisasi (%)	K	Rp	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d tahun 2021	K	Rp	K		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2.12.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi Asistensi Ke Dirjen Dukcapil	20	7.000.000	0	-	-	-	5	11.300.410,00	0,00	0	0	-	0	-	0,00	0,00		
2.12.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Penyajian data dan penyusunan pelaporan penyelenggaraan kependudukan yang dilaksanakan	10	12.122.390	1	13.232.700	5	11.300.410,00			0,00	0	2	47.702.200	1	13.232.700	0,50	0,28		
2.12.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pembangunan Zona Integritas yang disusun	5		0	-	-	-			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
		Pembentukan tim lintas sektor terkait Pencapaian target nasional yang dilaksanakan	5	6.000.000	0	-	-	-			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
2.12.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	100	24.360.578.687	30,36	853.864.015	100	830.383.200	14	3.961.839.139,00	0,14	5	100	5.442.094.024	30,36	853.864.015	0,30	0,16		
2.12.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Penyediaan gaji dan dokumen akuntansi yang dilaksanakan	70	24.338.578.687	5	838.687.765	40	39.993.400	6	3.918.318.239,00	0,15	98	14	5.402.096.524	5	838.687.765	0,36	0,16		
2.12.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan akuntansi yang dilaksanakan	40	22.000.000	2	15.176.250	75	49.999.800	8	43.520.900,00	0,11	1	8	39.997.500	2	15.176.250	0,25	0,38		
2.12.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	798.000.000	22,88	135.504.721	6	675.881.510	6	604.764.151,00	1,00	1	100	830.383.200	22,88	135.504.721	0,23	0,16		
2.12.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang disediakan	200	50.000.000	17	21.916.900	22	39.995.890	22	39.085.250,00	1,00	1	40	39.993.400	17	21.916.900	0,43	0,55		
2.12.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Disediakan	375		35		1.50		65	47.088.700,00	0,00	1	75		35		0,47	0,35		
		Jumlah pengadaan peralatan Ktp-el / penunjang pelayanan Administrasi Kependudukan	750	150.000.000	0	17.476.000	0	49.999.950			0,00	0	150	49.999.800	0	17.476.000	0,00			
2.12.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	250	50.000.000	17	15.482.500	58	164.876.690	40	120.421.600,00	0,69	1	50	89.999.900	17	15.482.500	0,34	0,17		
2.12.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan	10.000	75.000.000	439		1.7560				0,00	1	1.378		439		0,32	0,12		
		jumlah pengadaan BBM yang disediakan	43.000		1.885		0	10.925			0,00	0	7.205		1.885		0,26			
2.12.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	18.000	40.000.000	5.020	9.697.000	15.000	19.999.980	15.000	18.496.500,00	1,00	1	17.000	30.000.000	5.020	9.697.000	0,30	0,32		
2.12.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12.500	12.500.000	128	631.000	840	6.552.000	1.968	4.145.500,00	2,34	1	757	5.406.600	128	631.000	0,17	0,12		
2.12.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman tamu yang diadakan	5.000	15.000.000	0	-					0,00	0	1.000	4.987.500	0	0	0,00	0,00		
		Jumlah Plakat yang disediakan	250		0						0,00	0	50		0		0,00			
2.12.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	625	340.500.000	30	57.011.571	93	271.559.000	81	257.384.351,00	0,87	1	125	499.996.000	30	57.011.571	0,24	0,11		
2.12.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Peralatan Arsip yang disediakan	2.500	15.000.000	0	0					0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
2.12.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Software yang di diadakan	4	50.000.000	0	0					0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
2.12.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	50.000.000	100	8.513.000	1,00	274.383.799,00	36	31.470.000,00	36,00	0	100	9.953.500	100	8.513.000	1,00	0,86		
2.12.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	125	20.000.000	25	3.690.000	0	0			0,00	0	25	4.961.700	25	3.690.000	1,00	0,74		
2.12.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	175	22.000.000	35	4.823.000	1,00	274.383.799,00	36	31.470.000,00	36,00	0	35	4.991.800	35	4.823.000	1,00	0,97		
2.12.01.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Software yang diadakan	1	8.000.000	0	0	0	0			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
2.12.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	8.485.350.000	25	259.427.759	3,00	1.697.815.421,00	3	1.488.916.488,00	1,00	1	100	1.689.369.766	25	259.427.759	0,25	0,15		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020						Target Program/Kegiatan RPKD tahun berjalan (tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun berjalan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp	K	Rp	Target RPKD Tahun 2021		Realisasi RPKD Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)		K	Rp	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Realisasi Target s/d tahun 2021			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13
2.12.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	32.000	1.354.424.125	3	23.613.500	52,00	315.747.000,00	52.342	221.300.600,00	1.006,58	1	12	303.750.000	3	23.613.500	0,25	0,08		
2.12.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	171.111.875	3	44.814.259	4,00	217.168.421,00	4	198.415.888,00	1,00	1	12	246.719.766	3	44.814.259	0,25	0,18		
2.12.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3.480	6.959.814.000	3	191.000.000	58,00	1.164.900.000,00	58	1.069.200.000,00	1,00	1	12	1.138.900.000	3	191.000.000	0,25	0,17		
2.12.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	127.148.103	46,25	38.336.800	4,00	312.337.500,00	3	303.304.670,00	0,75	1	100	238.151.683	46,25	38.336.800	0,46	0,16		
2.12.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5	28.417.300	1	8.937.800	3,00	20.403.600,00	1	18.711.900,00	0,33	1	1	22.118.500	1	8.937.800	1,00	0,40		
2.12.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10	54.334.000	1	9.955.000	2,00	43.526.400,00	2	39.777.400,00	1,00	1	4	39.921.700	1	9.955.000	0,25	0,25		
2.12.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	250	20.000.000	30	19.444.000	57,00	48.407.500,00	26	45.864.400,00	0,46	1	50	39.992.000	30	19.444.000	0,60	0,49		
2.12.01.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	4	10.000.000	0	0					0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
2.12.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	14.396.803	0	0	1,00	200.000.000,00	1	198.950.969,80	1,00	1	0	0	0	0	0,00	0,00		
2.12.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	0	0	0					0,00	0	1	136.119.483	0	0	0,00	0,00		
2.12.01.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Perekaman KTP-el Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	100	2.139.269.174	98,67	61.055.800,00	96,00	4.454.321.470,00	98,04	3.818.237.225,00	1,02	1	99,2	3.423.797.700	98,67	61.055.800,00	0,99	0,02		
2.12.01.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan KIA Persentase Kepemilikan KK	60	2.139.269.174	59,00	61.055.800	300,00	4.454.321.470,00	3	3.818.237.225,00	0,01	1	40	3.423.797.700	59,00	61.055.800	1,48	0,02		
2.12.01.02.2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	20	150.000.000	0	0					0,00	0	0	0	0	0	0,00			
2.12.01.02.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah KIA yang terbitkan Jumlah KK yang diterbitkan Jumlah KTP-el yang di terbitkan	750.000	1.904.269.174	7.891	0	252,00	4.242.804.290,00	282.000	3.620.358.560,00	1.119,05	1	84.050	3.268.598.000	7.891	0	0,09	0,00		
2.12.01.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah jemput bola dan penyelesaian masalah yang dilaksanakan Jumlah Jenis Pelayanan Pendaftaran penduduk yang di tingkatan	250	60.000.000	7	5.132.200	75,00	31.520.000,00		31.520.000,00	0,00	1	50	5.199.700	7	5.132.200	0,14	0,99		
2.12.01.02.2.01.05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah SKPWN yang di terbitkan	79.780	25.000.000	3.197	55.923.600	12,765	179.997.180,00	12.765	166.358.665,00	1,00	1	12.791	150.000.000	3.197	55.923.600	0,25	0,37		
2.12.01.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	90	2.295.195.244	94,68	37958700	80,00	479.988.860,00			0,00	0	92	443.439.400	94,68	37958700	1,03	0,09		
		Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraianya dilaporkan	100		100						0,00	0	100		100		1,00			
		Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	100		100				85,00	461.324.153,00	0,00	0	100		100		1,00			
2.12.01.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	92	1.035.195.244	94,68	37958700	2,00	461.195.840,00	2,00	446.691.253,00	1,00	1	92	443.439.400	94,68	37958700	1,03	0,09		
		Persentase Kepemilikan Akta Kematian	92		96,49						0,00	0	92		96,49		1,05			
		Persentase Kepemilikan Akta Perceraian	92		100						0,00	0	92		100		1,09			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020						Target Program/Kegiatan RPKD tahun berjalan (tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun berjalan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp	K	Rp	Target RPKD Tahun 2021		Realisasi RPKD Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)		K	Rp	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Realisasi Target s/d tahun 2021			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13
		Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan	92		100							0,00	0	92		100		1,09		
2.12.01.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Akta Kelahiran yang diterbitkan	173.087	800.000.000	0	0	43.860	249.999.640,00	122	244.417.063,00	0,00	1	39.178	149.998.200	0	0	0,00	0,00		
		Jumlah Akta Kematian yang diterbitkan	68.256		0						0,00	0	15.048	0	0	0,00				
		Jumlah Akta Perkawinan yang diterbitkan	1.980		0						0,00	0	380	0	0	0,00				
		Jumlah Akta Perceraian yang diterbitkan	880		0						0,00	0	168	0	0	0,00				
2.12.01.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah jenis Pelayanan Pencatatan Sipil yang di tingkatan	10	55.000.000	0	37958700	101,00	211.196.200,00			0,00	0	2	149.999.200	0	37958700	0,00	0,25		
		Jumlah Pelayanan Keliling yang dilaksanakan	500		25				75	202.274.190,00	0,00	0	100	25	25	0,25				
2.12.01.03.2.01.05	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Pengadaan Dokumen Kependudukan terkait Pencatatan Sipil yang dilaksanakan	170	180.195.244	0	0	0	0			0,00	0	2	143.442.000	0	0	0,00	0,00		
2.12.01.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Bimbingan teknis Administrasi Peristiwa Penting	100	630.000.000	0	0	25,00	18.793.020,00	25	14.632.900,00	1,00	1	0	0	0	0,00	0,00			
2.12.01.03.2.02.08	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Sosialisasi Pencatatan Sipil yang di adakan	20	425.000.000	0	0	0	0			0,00	0	0	0	0	0,00	0,00			
2.12.01.03.2.02.10	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil yang dilaksanakan	100	205.000.000	0	0	25,00	18.793.020,00	25	14.632.900,00	1,00	1	0	0	0	0,00	0,00			
2.12.01.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Sosialisasi dan Komunikasi Pencatatan Sipil	100	630.000.000	0	0	0	0			0,00	0	0	0	0	0,00	0,00			
2.12.01.03.2.03.04	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Bimtek yang dilaksanakan	5	630.000.000	0	0	0	0			0,00	0	0	0	0	0,00	0,00			
2.12.01.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pemanfaatan data kependudukan	65	2.499.451.225	40	17.669.750,00					0,00	0	70	446.522.240	40	17.669.750,00	0,57	0,04		
		Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 Tahun	100		100				183	693.499.950,00	0,00	0	100	100	100	1,00				
2.12.01.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase Penyajian Data Kependudukan	100	625.000.000	62,50	17.669.750			2	30.513.300,00	0,00	0	100	118.748.800	62,50	17.669.750	0,62	0,15		
2.12.01.04.2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah data kependudukan yang di olah dan disajikan	#####	473.000.000	547.166	2.847.800			#####	17.236.100,00	0,00	0	#####	103.750.000	547.166	2.847.800	0,25	0,03		
2.12.01.04.2.01.02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah kerjasama yang dilaksanakan	35	152.000.000	2	14.821.950			6	13.277.200,00	0,00	0	2	14.998.800	2	14.821.950	1,00	0,99		
2.12.01.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase data dan informasi kependudukan yang dimanfaatkan oleh pengguna	85	625.000.000	0	0					0,00	0	85	327.773.440	0	0	0,00	0,00		
		Persentase pemanfaatan data kependudukan berdasarkan Perjanjian kerja	60		0				5	371.635.200,00	0,00	0	60	0	0	0,00				
2.12.01.04.2.03.01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	jumlah monitoring evaluasi yang dilaksanakan	125	75.000.000	0	0			25	10.000.000,00	0,00	0	2	7.200.000	0	0	0,00	0,00		
2.12.01.04.2.03.03	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan	10	205.000.000	0	0			2	65.088.800,00	0,00	0	0	105.605.940	0	0	0,00	0,00		
2.12.01.04.2.03.04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Pemanfaatan Data yang dilaksanakan	10	150.000.000	0	0			2	84.794.000,00	0,00	0	0	149.998.500	0	0	0,00	0,00		
2.12.01.04.2.03.06	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Jumlah perjanjian kerjasama yang	4	75.000.000	0	0					0,00	0	0	0	0	0,00	0,00			
2.12.01.04.2.03.07	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Publikasi Video, radio dan cetak banner yang dilaksanakan	29	120.000.000	0	0			2	211.752.400,00	0,00	0	0	64.969.000	0	0	0,00	0,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020						Target Program/Kegiatan RPKD tahun berjalan (tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun berjalan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp	K	Rp	Target RPKD Tahun 2021		Realisasi RPKD Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)		K	Rp	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Realisasi Target s/d tahun 2021			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13
2.12.01.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kependudukan	100	1.249.451.225	12,50	45.825.000			4	291.351.450,00	0,00	0	100	374.912.500	12,50	45.825.000	0,12	0,12		
2.12.01.04.2.03.01	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Pembinaan dan pengawasan pengelolaan Informasi Adminitras Kependudukan yang dilaksanakan	20	957.500.000	7.100	45.825.000			4	291.351.450,00	0,00	0	28.402	294.912.700	7.100	45.825.000	0,25	0,16		
2.12.01.04.2.03.03	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	jumlah bimtek yang dilaksanakan	14	291.951.225	0	-					0,00	0	3	79.999.800	0	0	0,00	0,00		
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	93,5	24.615.163.680	41,82	874.761.888	100	4.617.250.000	95	4.031.400.000	95	87,3117	93,5	4.428.498.175	41,82	874.761.888	44,72	19,75		
2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat daerah	100	445.000.000	42,86	9.885.700	85	92.570.000	82	91.563.000	96,47	98,9122	100	88.640.000	42,86	9.885.700	42,86	11,15		
2.13.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan evaluasi dan capaian kinerja perangkat daerah yang disusun	40	445.000.000	3	9.885.700	12	92.570.000	12	91.563.000	100	98,91	7	88.640.000	3	9.885.700	42,86	11,15		
2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat daerah	100	19.605.128.680	22,22	663.614.299	12	3.466.541.000	12	3.049.068.000	100	87,9571	100	3.564.568.851	22,22	663.614.299	22,22	18,62		
2.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah fasilitasi pembayaran gaji dan tunjangan ASN	135	19.605.128.680	6	663.614.299	14	3.456.541.000	14	3.039.779.000	100	87,94	27	3.564.568.851	6	663.614.299	22,22	18,62		
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat daerah	100	2.466.285.000	37	126.066.300	12	524.427.000	12	437.272.000	100	83,3809	100	375.531.100	37	126.066.300	37,00	33,57		
2.13.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	50	50.000.000	10	9.989.000	8	9.998.000	8	9.089.000	100	90,9082	10	9.989.000	10	9.989.000	100,00	100,00		
2.13.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan/perlengkapan kantor yang disediakan	25	500.000.000	2	32.000.000	14	141.954.000	14	137.150.000	100	96,6158	2	32.000.000	2	32.000.000	100,00	100,00		
		Jumlah ATK yang disediakan	4.250	132.500.000	417	18.407.500	882	33.999.000	822	30.908.000	93,20	90,9086	850	26.151.100	417	18.407.500	49,06	70,39		
2.13.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumahtangga yang disediakan	3.000	75.000.000	600	14.999.900	569	29.997.000	569	27.270.000	100	90,9091	600	14.999.900	600	14.999.900	100,00	100,00		
2.13.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah BBM yang disediakan	24.000	300.000.000	869	10.872.000	6665	59.985.000	6476	58.284.000	97,16	97,1643	4798	59.985.000	869	10.872.000	18,11	18,12		
2.13.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	25	90.000.000	0	0	2500	19.999.000	2500	18.179.000	100	90,8995	5	17.430.100	0	0	0,00	0,00		
2.13.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	3.675	24.990.000	180	600.000	730	4.998.000	730	3.600.000	100	72,0288	735	4.998.000	180	600.000	24,49	12,00		
2.13.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Souvenir tamu yang disediakan	50	31.295.000	0	0	49	15.005.000	49	13.641.000	100	90,9097	10	6.259.000	0	0	0,00	0,00		
		Jumlah makanan dan minuman tamu yang disediakan	1.000	35.000.000	0	0	10	350.000	10	350.000	100	100	179	3.725.000	0	0	0,00	0,00		
2.13.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	350	1.000.000.000	9	39.197.900	12	168.982.000	12	102.001.000	100	60,3621	50	184.459.000	9	39.197.900	18,00	21,25		
		Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan	6.500	227.500.000	0	0	2561	39.160.000	2345	36.800.000	91,57	93,9734	1159	15.535.000	0	0	0,00	0,00		
2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	1.589.000.000	45	49.030.789	92,5	276.998.000		209.945.000	0	75,793	100	317.798.624	45	49.030.789	45,00	15,43		
2.13.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang disediakan	750	7.500.000	0	0	300	3.000.000	240	2.400.000	80	80	150	1.500.000	0	0	0,00	0,00		
2.13.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60	575.000.000	3	21.230.789	12	114.998.000	12	72.545.000	100	63,0837	12	114.998.624	3	21.230.789	25,00	18,46		
2.13.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga jasa pelayanan umum kantor yang terbayar per bulan	8	1.006.500.000	8	27.800.000	32	159.000.000	32	135.000.000	100	84,9057	8	201.300.000	8	27.800.000	100,00	13,81		
2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	100	509.750.000	62	26.164.800	100	256.714.000	100	243.552.000	100	94,8729	100	81.959.600	62	26.164.800	62,00	31,92		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020						Target Program/Kegiatan RKPd tahun berjalan (tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun berjalan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Tingkat Realisasi (%)	K	Rp	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Realisasi Target s/d tahun 2021			
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
2.13.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara	1	194.750.000	1	2.684.800	1	41.110.000	1	39.761.000	100	96,7186	1	19.999.600	1	2.684.800	100,00	13,42			
2.13.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional/lapangan yang dipelihara	10	100.000.000	0	0	10	35.450.000	10	29.267.000	100	82,5585	10	20.000.000	0	0	0,00	0,00			
2.13.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	130	90.000.000	12	8.480.000	44	30.154.000	42	29.900.000	95,45	99,1577	25	16.960.000	12	8.480.000	48,00	50,00			
2.13.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	10	125.000.000	10	15.000.000	1	150.000.000	1	144.624.000	100	96,416	10	25.000.000	10	15.000.000	100,00	60,00			
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase kelembagaan desa yang ditata sesuai standar	90	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50	100.000.000	0	0	0,00	0,00			
2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Cakupan Penyelenggaraan Penataan Desa	90	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	85	100.000.000	0	0	0,00	0,00			
2.13.02.2.01.02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Dokumen norma standar, prosedur dan kriteria (NSPK) Pemerintahan Desa yang disusun	5	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.000.000	0	0	0,00	0,00			
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Jumlah Desa yang Melaksanakan Kerjasama Desa	189	550.000.000	0	7.472.300		339.916.000					0	0	71	0	7.472.300	0,00	0,00		
		Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang berkembang	75																		
2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Cakupan Fasilitasi kerja sama antar desa	90	550.000.000	0	7.472.300		339.916.000	0	0	0	0	85	0	0	7.472.300	0,00	0,00			
2.13.03.2.01.01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Laporan monitoring, evaluasi dan rekomendasi perkembangan Bumdes Bersama	5	250.000.000	0	7.472.300	2	169.958.000	0	0	0	0	1	34.334.000	0	7.472.300	0,00	21,76			
2.13.03.2.01.03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Laporan monitoring, evaluasi dan rekomendasi perkembangan Bumdes Bersama di Kawasan Perdesaan	5	300.000.000	0	0	2	169.958.000	0	0	0	0	1	56.290.000	0	0	0,00	0,00			
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Jumlah aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola Pemdes	95	26.676.481.790	2	31.723.200	0	1.626.424.000	84,9	1.294.124.000	0	79,5687	75	5.043.680.358	2	31.723.200	2,67	0,63			
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	85	26.676.481.790	2	31.723.200	0	1.626.424.000	59	1.294.124.000	0	79,5687	80	5.043.680.358	2	31.723.200	2,50	0,63			
2.13.04.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa dengan layanan Smart kampung yang baik	189	1.000.000.000	0	0	3	15.981.000		14.516.000	0	90,8329	50	200.046.900	0	0	0,00	0,00			
		Persentase aparatur pemerintahan desa yang memahami aturan perundang-undangan desa	90	250.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	75	49.472.200	0	0	0,00	0,00			
		Jumlah updating sistem tata kelola pemerintahan desa	10	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2	100.000.000	0	0	0,00	0,00			
		Jumlah fasilitasi pembayaran BPJS Kesehatan Aparatur Desa dan BPJS ketenagakerjaan BPD	120	17.776.481.790	0	0	0	0	0	0	0	0	24	3.555.296.358	0	0	0,00	0,00			
2.13.04.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah fasilitasi pelaksanaan musrenbang desa	125	450.000.000	0	0	25	93.535.000	30	33.286.000	120	35,59	25	84.999.800	0	0	0,00	0,00			
2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Laporan Monev dan rekomendasi Pengelolaan DD/ADD	5	400.000.000	0	0	1	204.840.000	1	61.139.000	100	29,85	1	75.560.200	0	0	0,00	0,00			
2.13.04.2.01.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase aparatur pemerintah desa yang paham tentang tata kelola keuangan desa	90	750.000.000	0	0	378	1.076.393.000	378	1.066.940.000	100	99,12	75	48.043.800	0	0	0,00	0,00			
		Persentase Aparatur Pemerintahan Desa dan BPD yang memahami tata kelola penyelenggaraan Pemerintahan Desa	90	1.200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	75	399.392.500	0	0	0,00	0,00			
		Persentase Aparatur Pemerintahan Desa yang memahami tata kelola Aset Desa	90	600.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	75	56.855.800	0	0	0,00	0,00			
		Laporan Evaluasi Kinerja Pemerintahan Desa dan BPD	10	600.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2	100.607.500	0	0	0,00	0,00			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020						Target Program/Kegiatan RKPd tahun berjalan (tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun berjalan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp	K	Rp	Target RKPd Tahun 2021		Realisasi RKPd Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)		K	Rp	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Realisasi Target s/d tahun 2021			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13
2.13.04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Bumdesa dengan manajemen pengelolaan yang baik	15	750.000.000	0	0	100	185.676.000	76	100.743.000	76	54,2574	3	150.000.000	0	0	0,00	0,00		
		Persentase pengurus Bumdesa yang paham tata kelola Bumdesa/Bumdesma yang baik	85	750.000.000	20	31.723.200	0	0	0	0	0	0	60	118.405.300	20	31.723.200	33,33	26,79		
2.13.04.2.01.09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa yang dilaksanakan	100	1.250.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12	25.000.000	0	0	0,00	0,00		
2.13.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Persentase Desa/Kelurahan yang memperbarui Profil Desanya	100	400.000.000	0	0		49.999.000	20	17.500.000	0	35,0007	75	80.000.000	0	0	0,00	0,00		
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	85	4.305.509.500	5	37.610.200	0,81	1.022.794.000	81	876.849.000	10000	85,7308	65	861.580.700	5	37.610.200	7,69	4,37		
		Jumlah Peningkatan Desa yang Lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	9	0	0	0	0	0	0	0	0	85,7308	5	0	0	0	0,00	0,00		
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	85	4.305.509.500	5	37.610.200	0	1.022.794.000	101	876.849.000	0	73,9575	85	861.580.700	5	37.610.200	5,88	4,37		
2.13.05.2.01.01	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang terfasilitasi penataan kelembagaannya	300	703.039.500	0	0	70	294.999.000	70	218.174.000	100	73,9575	50	140.607.900	0	0	0,00	0,00		
2.13.05.2.01.02	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Kader Pembangunan Manusia yang memahami tugas dan fungsinya dengan baik	90	295.342.500	0	0	567	374.999.000	568	366.617.000	100,176	97,7648	80	59.068.500	0	0	0,00	0,00		
		Persentase Kader posyandu yang memahami tugas dan fungsinya dengan baik	90	240.045.000	0	0					0,00	0	75	48.009.000	0	0	0,00	0,00		
2.13.05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Video potensi ekonomi Bumdesa yang tersusun	189	477.873.000	0	0	50	87.797.000	50	64.776.000	100	#REF!	75	95.574.600	0	0	0,00	0,00		
		Persentase operator yang memahami aplikasi kanggo riko	95	397.125.000	0	5.476.000					0,00	0	80	79.425.000	0	5.476.000	0,00	6,89		
2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Fasilitasi dan pembinaan PKK yang dilaksanakan	125	632.351.000	5	5.785.700	50	264.999.000	50	227.282.000	100	85,7671	25	126.470.200	5	5.785.700	20,00	4,57		
		Persentase kader dasawisma yang mendapatkan peningkatan kapasitas	95	836.998.500	0	0	0	0	0	0	0	0	35	167.399.700	0	0	0,00	0,00		
		Persentase kader PKK yang mendapatkan peningkatan kapasitas	95	542.735.000	20	26.348.500	0	0	0	0	0	0	70	108.547.000	20	26.348.500	28,57	24,27		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020						Target Program/Kegiatan RKPd tahun berjalan (tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun berjalan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp	K	Rp	Target RKPd Tahun 2021		Realisasi RKPd Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)		K	Rp	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Realisasi Target s/d tahun 2021			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13
		Jumlah Pelaksana terbaik 10 program Pokok PKK	15	180.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3	36.478.800	0	0	0,00	0,00		
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA										0,00	0			0	0	0,00	0,00		
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Laju Pertumbuhan Penduduk	0,32	897.909.800	0	11.748.740	93,2	24.329.800	46	24.207.900	49,36	99,50	32	373.395.000	0	11.748.740	0,00	0,03		
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah	100	897.909.800	100	11.748.740	26	24.329.800	26	24.207.900	100,00	99,50	100	373.395.000	100	11.748.740	1,00	0,03		
2.14.02.2.02.02	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah buku grand design	125	124.329.800	0	0	60	24.329.800,00	0	24.207.900	0,00	99,50	1	180.000.000	0	0	0,00	0,00		
2.14.02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah form pendataan yang dicetak	42.396	331.980.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10599	82.995.000	0	0	0,00	0,00		
2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah balai penyuluh KB di Kecamatan yang terfasilitasi	92	441.600.000	23	11.748.740	0	0	0	0	0	0	23	110.400.000	23	11.748.740	1,00	0,11		
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA	Persentase Capaian KB Aktif	73	37.767.811.400	66,20	76.864.842	64	7.188.298.942	70	3.682.367.304	109,38	51,23	70	5.029.614.500	66,20	76.864.842	0,95	0,02		
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Cakupan pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal	100	12.055.300.000	37,50	52.111.442	-	1.721.064.917	0	1.094.802.404	0	63,61	100	1.521.493.000	37,50	52.111.442	0,38	0,03		
2.14.03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah peserta	125	25.000.000	25	3.375.000	-	1.468.319.017,00	0	0	0	0	25	4.375.000	25	3.375.000	1,00	0,77		
2.14.03.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah informasi media cetak Program KKBPK	125	125.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25	24.980.100	0	0	0,00	0,00		
2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah informasi media elektronik program KKBPK	125	350.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25	70.639.500	0	0	0,00	0,00		
2.14.03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah waktu pelaksanaan Rakorcam dan Rakordes percepatan penurunan stunting	60	1.950.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12	390.000.000	0	0	0,00	0,00		
2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Balai Penyuluhan KB yang terfasilitasi	123	7.341.600.000	23	43.036.442	0	0	0	995.596.604	0	0	23	931.498.600	23	43.036.442	1,00	0,05		
2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah sosialisasi program KKBPK pada kelompok tribina	40	2.263.700.000	2	5.700.000	1.000	81.823.900	0	81.823.900	0,00	100	8	99.999.800	2	5.700.000	0,25	0,06		
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Cakupan pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB)	100	5.208.000.000	0	0	242	1.041.600.000	242	1.041.600.000	100,00	100	100	1.041.600.000	0	0	0,00	0,00		
2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader PPKBD dan Sub PPKBD	2.170	5.208.000.000	0	0	12	1.041.600.000	0	1.041.600.000	0,00	100	434	1.041.600.000	0	0	0,00	0,00		
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah kabupaten/kota	100	14.166.511.400	20,83	24.753.400	5	3.158.034.025	100	1.214.589.900	2000	38,46	100	1.897.276.500	20,83	24.753.400	0,21	0,01		
2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah faskes yang terfasilitasi	125	613.015.000	69	12.343.400	55	160.003.000	0	79.656.000	0,00	49,78	69	31.043.800	69	12.343.400	1,00	0,40		
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah faskes yang melayani	414	10.154.500.000	0	0	0	2.030.990.000,00	0	908.783.400	0,00	44,75	69	1.569.132.700	0	0	0,00	0,00		
2.14.03.2.03.04	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Kasus Kegagalan KB dan Komplikasi	21	50.000.000	0	0	7	10.000.000	1	2.500.000	14,29	25	4	10.000.000	0	0	0,00	0,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020						Target Program/Kegiatan RKPd tahun berjalan (tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun berjalan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp	K	Rp	Target RKPd Tahun 2021		Realisasi RKPd Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)		K	Rp	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Realisasi Target s/d tahun 2021			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13
2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah pembinaan pelayanan KB dan faskes	20	187.000.000	1	9.935.000			0	0	0,00	0	4	24.000.000	1	9.935.000	0,25	0,41		
2.14.03.2.03.09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah bangunan balai penyuluh KB	25	3.037.000.000	0	0	48	199.240.825,00	0	199.240.000	0,00	100,00	1	213.100.000	0	0	0,00	0,00		
2.14.03.2.03.13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah sosialisasi kesertaan KB pria	40	124.996.400	0	2.475.000	150	24.996.400	0	24.410.500	0,00	97,66	3	50.000.000	0	2.475.000	0,00	0,05		
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Cakupan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	100	6.338.000.000	0	0		1.267.600.000		331.375.000	0,00	26,14	100	569.245.000	0	0	0,00	0,00		
2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah sosialisasi program KKBPK	125	6.338.000.000	0	0		1.267.600.000,00		331.375.000	0,00	26,14	25	569.245.000	0	0	0,00	0,00		
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA	Presentase Kelompok Tribina	90	3.551.855.000	67,10	0	77	959.400.000	85	557.747.000	110,39	58,13	84,5	7.640.529.500	67,10	0	0,79	0,00		
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal	100	3.551.855.000	0	0	60	959.400.000	60	557.747.000	100,00	58,13	100	7.640.529.500	0	0	0,00	0,00		
2.14.04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kelompok	21	264.855.000	0	0		302.000.000		302.000.000	0	100	21	264.855.000	0	0	0,00	0,00		
2.14.02.2.02.04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana / Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah pembinaan pada kelompok tribina	90	250.000.000	0	0	60	50.000.000	60	44.247.000	100	88,49	3	68.994.500	0	0	0,00	0,00		
2.14.02.2.02.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah pendamping keluarga stunting	19.740	3.037.000.000	0	0		607.400.000		211.500.000	0	34,82	3948	7.306.680.000	0	0	0,00	0,00		
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																		DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	95,00	2.096.462.899	23,25	1.922.101.877	92,50	#####	95,78	10.473.728.754	103,55	89,40	92,50	14.171.101.710	23,25	1.922.101.877	25,13	13,56		
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			28,57	0							100	29.987.700	28,57	0	28,57	0,00		
2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Yang Disusun			1	0							3	14.987.900	1	0	33,33	0,00		
2.15.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi Kegiatan dan Dokumen yang disusun			1	0							4	14.999.800	1	0	25,00	0,00		
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	100	0	25	1.449.746.918	100	8.383.670.731	100	6.779.757.930	100,00	80,87	100	10.645.386.747	25	1.449.746.918	25,00	13,62		
2.15.01.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	12	0	3	1.449.746.918	12	8.383.670.731	12	6.779.757.930	100,00	80,87	12	10.645.386.747	3	1.449.746.918	25,00	13,62		
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			0	0	100	160.907.600	100,00	159.585.000	100,00	99,18		0	0					
2.15.01.2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				0	0	2	160.907.600	2	159.585.000	100,00	99,18		0	0					
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi umum perangkat daerah			25	89.019.660	100	1.088.541.180	100	952.448.748	100,00	87,50	100	1.074.185.150	25	89.019.660	25,16	8,29		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020						Target Program/Kegiatan RPKD tahun berjalan (tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun berjalan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
			K	Rp	K	Rp	Target RKPD Tahun 2021		Realisasi RKPD Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)		K	Rp	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Realisasi Target s/d tahun 2021				
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp			K
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13	
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			0	0							3	14.989.200	0	0	0,00	0,00			
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan			0	0	1.492	209.276.400	1492	166.715.100	100,00	79,66	33	225.743.900	0	0	0,00	0,00			
2.15.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan			0	0	1	49.999.300	1	47.720.700	100,00	95,44	28	49.997.100	0	0	0,00	0,00			
2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik BBM dan Mamin Rapat yang disediakan			3	55.778.460	12	361.381.500	12	334.684.000	100,00	92,61	12	379.550.700	3	55.778.460	25,00	14,70			
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya bahan cetak dan penggandaan yang disediakan			6	3.509.000	8	66.397.200	8	37.151.200	100,00	55,95	9	78.977.100	6	3.509.000	66,67	4,44			
2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan bacaan dan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan perundangan yang disediakan			150	320.000	12	9.996.900	12	1.920.000	100,00	19,21	547	4.993.600	150	320.000	27,42	6,41			
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya dana dalam rapat konsultasi dan koordinasi SKPD			3	29.412.200	12	391.489.880	12	364.257.748	100,00	93,04	12	319.933.550	3	29.412.200	25,00	9,19			
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			9	0			94,81	1.479.267.825			100	48.797.000	9	0	9,30	0,00			
2.15.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel Kantor yang diadakan			0	0							39	24.453.000	0	0	0,00	0,00			
2.15.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan			4	0							4	24.344.000	4	0	100,00	0,00			
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	2.096.462.899	50	368.892.099	100	1.662.539.604	94,81	1.479.267.825	94,81	88,98	100	2.097.989.113	50	368.892.099	50,00	17,58			
2.15.01.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terselenggaranya jumlah jasa pelayanan surat menyurat yang disediakan	12	3.462.899	12	4.990.000	499	4.990.000	12	4.990.000	2,40	100,00	12	4.990.000	12	4.990.000	100,00	100,00			
2.15.01.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jumlah Dana untuk Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	800.000.000	3	151.902.099	12	303.499.604	12	252.977.825	100,00	83,35	12	799.999.113	3	151.902.099	25,00	18,99			
2.15.01.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	Tersedianya jumlah dana untuk jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	1.293.000.000	3	212.000.000	876	1.354.050.000	12	1.221.300.000	1,37	90,20	12	1.293.000.000	3	212.000.000	25,00	16,40			
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				25	14.443.200	100	580.211.800	84,09	338.402.700	84,09	58,32		274.756.000	25	14.443.200		5,26			
2.15.01.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya jumlah dana untuk jumlah jasa pemeliharaan perijinan kendaraan operasional dinas			3	953.200	36	69.000.000	12	39.412.700	33,33	57,12	12	50.000.000	3	953.200	25,00	1,91			
2.15.01.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jumlah jasa pemeliharaan kendaraan dinas / operasional			3	12.615.000	27	173.010.000	12	85.949.000	44,44	49,68	12	124.800.000	3	12.615.000	25,00	10,11			
2.15.01.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya jumlah dana untuk pemeliharaan dan mesin lainnya yang dipelihara			15	875.000	155	153.645.800	120	29.330.000	77,42	19,09	60	49.956.000	15	875.000	25,00	1,75			
2.15.01.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Kantor Gedung Yang dipelihara			0	0	2	184.556.000	2	183.711.000	100,00	99,54	1	50.000.000	0	0	0,00	0,00			
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Kinerja lalu lintas Kabupaten/Kota	100,00	12.354.120.000	40	1.414.919.500	50,27	11.484.549.765	40,29	10.303.340.065	80,15	89,71	100,00	11.362.030.000	40	1.414.919.500	40,29	12,45			
		Persentase layanan angkutan darat	100,00		78		0		75		78,24	104,32	75,00		78		0	104,32			
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan kabupaten/Kota	Cakupan Penyediaan Perlengkapan Jalan Kabupaten/Kota			0	0	2.560.000	100	359.777.545	100,00	312.342.565	100,00	86,82	100	1.289.776.100	0	2.560.000	0,00	0,20		
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan kabupaten/Kota	Jumlah perlengkapan jalan yang disediakan	5		0	0	0	12	359.777.545	12	312.342.565	100,00	86,82	5	690.275.200	0	0	0,00	0,00		
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jenis Peralatan yang dipelihara	4		0	0	2.560.000							4	599.500.900	0	2.560.000	0,00	0,43		
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Cakupan Pengelolaan Terminal Penumpang tipe C	100		0									100	400.000.000			0,00	0,00		
2.15.02.2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal Yang dipelihara	2		0									2	400.000.000			0,00	0,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020						Target Program/Kegiatan RKPd tahun berjalan (tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun berjalan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp	K	Rp	Target RKPd Tahun 2021		Realisasi RKPd Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)		K	Rp	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Realisasi Target s/d tahun 2021			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Cakupan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100	184.900	0	0	100	351.600.000	100,00	348.086.750	100,00	99,00	100,00	519.992.500	0	0	0,00	0,00		
2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kebutuhan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	10.727	184.900	0	0	10.000	250.000.000	10000	250.000.000	100,00	100,00	10.727	294.992.500	0	0	0,00	0,00		
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara	10	0	0	0	2	101.600.000	2	98.086.750	100,00	96,54	10	225.000.000	0	0	0,00	0,00		
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan	100	0	23	1.346.794.500	100	3.556.603.110	60,31	3.263.471.600	60,31	91,76	83,05	7.507.410.400	23	1.346.794.500	27,79	17,94		
2.15.02.2.06.02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Dalam rangka Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah sarana dan prasarana yng dipelihara	1	0	0	0	5184	3.550.183.110	3126	3.257.051.600	60,30	91,74	1	50.000.000	0	0	0,00	0,00		
2.15.02.2.06.04	Pengawasan Dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan pengawasan dan pengendalian efektivitas kebijakan untuk jalan Kabupaten.Kota	1	0	3	1.346.794.500	1	6.420.000	1	6.420.000	100,00	100,00	12	7.457.410.400	3	1.346.794.500	25,00	18,06		
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase dokumen Andalalin yang disetujui	100	100.000.000	0	0	100	100.000.000	50,00	49.610.000	50,00	49,61	100	100.000.000	0	0	0,00	0,00		
2.15.02.2.07.1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Jumlah Dokumen kebijakan tata kelola andalalin yang ditetapkan	1	100.000.000	0	0	2	100.000.000	1	49.610.000	50,00	49,61	1	100.000.000	0	0	0,00	0,00		
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Kapasitor dan Inspektor LLAJ	100	8.730.000	30	37.752.200	100	88.618.000	100,00	79.438.000	100,00	89,64	86,33	244.975.600	30	37.752.200	34,75	15,41		
2.15.02.2.08.4	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan yang dilakukan	10	8.730.000	3	37.752.200	6	88.618.000	6	79.438.000	100,00	89,64	10	244.975.600	3	37.752.200	30,00	15,41		
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengguna jasa angkutan penumpang umum dibidang transportasi darat	100	0	100	27.812.800	100	1.465.565.000	100,00	1.254.892.400	100,00	85,63	93,67	1.299.875.400	100	27.812.800	106,76	2,14		
2.15.02.2.09.1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jenis angkutan umum yang diadakan	3	0	3	27.812.800	3	1.465.565.000	3	1.254.892.400	100,00	85,63	3	1.299.875.400	3	27.812.800	100,00	2,14		
2.15.03	Program Pelayaran	Persentase layanan angkutan penyeberangan	100	129.480.000									100	75.000.000			0,00	0,00		
2.15.03.2.10	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal yang ditetapkan	100	129.480.000									100	75.000.000			0,00	0,00		
2.15.03.2.10.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah dokumen yang disusun	1	129.480.000									1	75.000.000			0,00	0,00		
2.15.04	Program Pengelolaan Penerbangan	Persentase fasilitasi pendirian tempat tinggal landas dan pendaratan helikopter	25	86.320.000									25	24.998.800			0,00	0,00		
2.15.04.2.01	Penyelenggaraan Kebandarudaraan	Persentase dokumen Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter yang diterbitkan	100	86.320.000									25	24.998.800			0,00	0,00		
2.15.04.2.01.01	Fasilitasi Izin Pendirian Halipad	Jumlah kegiatan yang terlayani	1	86.320.000									2	24.998.800			0,00	0,00		
2.15.05	Program Pengelolaan Perkeretaapian	Persentase layanan angkutan Perkeretaapian	25	14.390.000									100	24.998.600			0,00	0,00		
2.15.05.2.01	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Persentase Sosialisasi Kebijakan Perkeretaapian	100	14.390.000									100	24.998.600			0,00	0,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020						Target Program/Kegiatan RKPd tahun berjalan (tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun berjalan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp	K	Rp	Target RKPd Tahun 2021		Realisasi RKPd Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)		K	Rp	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Realisasi Target s/d tahun 2021			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13
2.15.05.2.01.02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian (Sosialisasi Keselamatan Perlintasan Sebidang)	Jumlah lintasan sebidang yang terjaga	1	14.390.000									5	24.998.600			0,00	0,00		
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN PERSANDIAN	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	80,46	9.742.993.825	17,70	1.573.943.136	92,50	8.873.434.828	100,20	8.291.454.774	108,32	93,44	80,08	8.891.444.048	17,70	1.573.943.136	22,10	17,70		
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	14,00	90.000.000			100,00	65.000.000	100,00	38.903.430	100,00	59,85	8,00	65.000.000			0,00	0,00		
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	6,00	40.000.000			4,00	30.000.000	4,00	20.047.820	100,00	66,83	4,00	30.000.000			0,00	0,00		
2.16.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja yang dikordinasikan	8,00	50.000.000			4,00	35.000.000	4,00	18.855.610	100,00	53,87	4,00	35.000.000			0,00	0,00		
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang Disusun	26,00	3.815.186.822	3,00	869.027.842	100,00	3.649.268.009	100,67	3.411.018.606	100,67	93,47	12,00	3.667.277.229	3,00	869.027.842	25,00	23,70		
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang disediakan	12,00	3.710.187.022	3,00	858.792.042	12,00	3.599.729.639	12,00	3.372.415.426	100,00	93,69	12,00	3.599.729.639	3,00	858.792.042	25,00	23,86		
2.16.01.2.02.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang dikordinasikan dan disusun	13,00	19.999.800	1,00	615.800	2,00	19.547.590	2,08	10.664.400	103,95	54,56	2,00	19.547.590	1,00	615.800	50,00	3,15		
2.16.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Bulanan/Triwulan/Semesteran yang dikordinasikan dan disusun	13,00	85.000.000	2,00	9.620.000	3,00	29.990.780	3,15	27.938.780	105,16	93,16	4,00	48.000.000	2,00	9.620.000	50,00	20,04		
2.16.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan tepat waktu	2,00	466.201.100																
2.16.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitasnya	59,00	266.201.100																
2.16.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi yang dilaksanakan	2,00	200.000.000																
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi yang dilaksanakan tepat waktu	8,00	1.023.984.850	2,00	199.150.342	100,00	919.942.796	100,00	785.256.110	100,00	85,36	8,00	919.942.796	2,00	199.150.342	25,00	21,65		
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan yang disediakan	6,00	46.988.300	6,00	19.983.300	6,00	38.185.676	6,00	38.185.676	100,00	100,00	6,00	38.185.676	6,00	19.983.300	100,00	52,33		
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	25,00	45.873.500			43,00	111.917.300	43,00	110.512.280	100,00	98,74	43,00	111.917.300			0,00	0,00		
2.16.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	25,00	64.164.200	25,00	64.164.200	30,00	105.792.665	30,00	101.634.665	100,00	96,07	30,00	105.792.665	25,00	64.164.200	83,33	60,65		
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Logistik Kantor yang disediakan	5,00	334.399.050	5,00	38.217.000	12,00	263.431.300	12,00	229.118.010	100,00	86,97	12,00	263.431.300	5,00	38.217.000	41,67	14,51		
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2,00	13.633.100	2,00	2.271.500	#####	14.996.575	#####	14.996.575	100,00	100,00	#####	14.996.575	2,00	2.271.500	0,01	15,15		
2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	2,00	7.470.600	2,00	1.627.700	348,00	6.494.400	347,21	6.049.900	99,77	93,16	384,00	6.494.400	2,00	1.627.700	0,52	25,06		
2.16.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi	3,00	22.547.900	3,00	2.044.100	15,00	26.717.680	15,00	26.717.410	100,00	100,00	12,00	26.717.680	3,00	2.044.100	25,00	7,65		
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	12,00	488.908.200	3,00	70.842.542	12,00	352.407.200	12,00	258.041.594	100,00	73,22	12,00	352.407.200	3,00	70.842.542	25,00	20,10		
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah yang diadakan tepat waktu	8,00	730.446.920	1,00	54.867.200	100,00	853.398.600	100,96	837.811.500	100,96	98,17	4,00	853.398.600	0,00	54.867.200	0,00	6,43		
2.16.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	5,00	155.522.320									10,00	200.000.000			0,00	0,00		
2.16.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	3,00	68.723.600		48.666.200	1,00	53.398.600	1,38	46.798.600	137,92	87,64	7,00	53.398.600		48.666.200	0,00	91,14		
2.16.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	1,00	200.000.000	-	-	10,00	200.000.000	10,00	198.073.200	100,00	99,04	3,00	450.000.000			0,00	0,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020						Target Program/Kegiatan RKPd tahun berjalan (tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun berjalan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Tingkat Realisasi (%)	K	Rp	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Realisasi Target s/d tahun 2021				
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10				11	12	13	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2.16.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	1,00	100.000.000		-	1,00	450.000.000	0,77	444.369.700	76,53	98,75	1,00	150.000.000			0,00	0,00				
2.16.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	1,00	206.201.000	1,00	6.201.000	3,00	150.000.000	3,00	148.570.000	100,00	99,05										
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang disediakan	3,00	2.718.136.133	3,00	437.093.652	100,00	2.425.491.523	100,00	2.294.698.928	100,00	94,61	3,00	2.425.491.523	3,00	437.093.652	100,00	18,02				
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat yang disediakan	1,00	5.000.000	1,00	5.000.000	12,00	3.999.600	12,00	3.990.000	100,00	99,76	12,00	3.999.600	1,00	5.000.000	8,33	125,01				
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12,00	464.536.133	3,00	89.793.652	12,00	433.691.923	12,00	360.058.928	100,00	83,02	12,00	433.691.923	3,00	89.793.652	25,00	20,70				
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12,00	2.248.600.000	3,00	342.300.000	660,00	1.987.800.000	660,00	1.930.650.000	100,00	97,12	660,00	1.987.800.000	3,00	342.300.000	0,45	17,22				
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah yang dipelihara	6,00	899.038.000	6,00	13.804.100	100,00	960.333.900	99,54	923.766.200	99,54	96,19	6,00	960.333.900	6,00	13.804.100	100,00	1,44				
2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	12,00	15.755.000	3,00	2.200.100	1,00	2.500.000	1,00	1.170.300	100,00	46,81	15,00	110.975.000	3,00	2.200.100	20,00	1,98				
2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	12,00	149.835.000	3,00	5.159.000	15,00	110.975.000	15,00	83.564.700	100,00	75,30	17,00	4.950.000	3,00	5.159.000	17,65	104,22				
2.16.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	12,00	5.700.000			17,00	4.950.000	17,00	4.950.000	100,00	100,00	42,00	29.988.900			0,00	0,00				
2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	12,00	33.985.000	3,00	6.445.000	42,00	29.988.900	42,05	29.988.900	100,13	100,00			3,00	6.445.000						
2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1,00	300.000.000			2,00	729.920.000	1,58	722.092.300	79,20	98,93	2,00	729.920.000			0,00	0,00				
2.16.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2,00	200.000.000			2,00	82.000.000	2,00	82.000.000	100,00	100,00		2.500.000								
2.16.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2,00	193.763.000									1,00	82.000.000			0,00	0,00				
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase infrastruktur IT yang berfungsi baik	100,00	10.139.136.385	8,09	670.868.344	95,00	8.292.528.738	99,99	37.399.358.094	105,25	451,00	100,00	8.292.528.738	8,09	670.868.344	8,09	8,09				
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi Pemerintah Daerah Yang Tersebarluaskan	300,00	10.139.136.385		670.868.344	100,00	8.292.528.738	99,99	37.399.358.094	99,99	451,00	0,00	8.292.528.738	0,00	670.868.344	0,00	8,09				
2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media sosial yang dikelola	10,00	560.900.000	10,00	47.900.000	100,00	189.925.000	100,00	187.584.800	100,00	98,77	50,00	82.090.000	10,00	47.900.000	0,00	58,35				
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah dukungan layanan publikasi yang terlaksana	15,00	940.311.000	3,00	125.225.449	3,00	505.070.000	3,00	466.293.494	100,00	92,32	10,00	206.871.000	3,00	125.225.449	30,00	60,53				
		Jumlah kelompok yang mengikuti Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	10,00										325,00	505.070.000								
		Jumlah Majalah Internal yang terbit	2765,00																			
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah publikasi pembangunan daerah bidang ekonomi yang tersebarluaskan	20,00	6.875.326.600	5,00	251.400.000	325,00	6.123.296.500	325,00	5.404.153.750	100,00	88,26	2268,00	189.925.000	5,00	251.400.000	0,22	132,37				
		Jumlah publikasi pembangunan daerah bidang kesejahteraan rakyat yang tersebarluaskan	20,00		5,00										5,00							
		Jumlah publikasi pembangunan daerah bidang potensi sumber daya yang tersebarluaskan	20,00		5,00										5,00							
		Jumlah publikasi pembangunan daerah bidang seni budaya dan pariwisata yang tersebarluaskan	20,00		5,00										5,00							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020						Target Program/Kegiatan RKPd tahun berjalan (tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun berjalan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d tahun 2021	K	Rp		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Jumlah publikasi pembangunan daerah bidang tata kelola pemerintahan yang tersebarluaskan	20,00		5,00										5,00					
		Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPIID)	20,00		5,00										5,00					
2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	Jumlah kerjasama yang dicapai	10,00	485.232.500	3,00	13.860.000	325,00	797.271.890	325,00	698.848.121	100,00	87,65								
2.16.02.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah kegiatan sumber daya yang terselenggara	3,00	157.484.400			2,00	144.450.000	1,55	117.557.600	77,74	81,38	2,00	144.450.000		-	0,00	0,00		
2.16.02.2.01.13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah ketersediaan alat studio	27,00	1.119.881.885	26,00	232.482.895	37,00	243.554.348	37,00	241.720.750	100,00	99,25	37,00	243.554.348	26,00	232.482.895	70,27	95,45		
		Jumlah pemeliharaan papan baliho yang dilaksanakan	10,00										325,00	6.123.296.500	0,00		0,00	0,00		
		Jumlah perawatan videotron yang dilaksanakan	2,00										325,00	797.271.890	0,00		0,00	0,00		
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Aplikasi IT yang Mendukung City Branding dan Layanan Publik yang Berfungsi Baik	1,00	12.216.133.800	45,00	47.150.000	100,00	10.548.706.465	99,72	10.000.638.493	99,72	94,80	100,00	10.548.706.465	45,00	47.150.000	45,00	0,45		
2.16.03.2.01	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lungkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		1,00	3.668.383.000																
2.16.03.2.01.01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Sentralisasi pendaftaran dan perpanjangan domain di Pemerintahan Kabupaten/Kota	1,00	100.000.000																
2.16.03.2.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	terselenggaranya penatalaksanaan dan pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	1,00	50.000.000																
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	terselenggara dan terpeliharanya Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1,00	3.518.383.000																
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			8.547.750.800		47.150.000	100,00	10.548.706.465	99,72	10.000.638.493	99,72	94,80	0,00	10.548.706.465		47.150.000		0,45		
2.16.03.2.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2,00	200.000.000									1,00	2.724.402.000			0,00	0,00		
2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah pengelolaan dan pemeliharaan data center yang dikelola/diperlihara	12,00	2.649.962.000			1,00	2.724.402.000	0,97	2.651.004.800	97,31	97,31	8,00	240.000.000			0,00	0,00		
2.16.03.2.02.04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Terselenggaranya Sistem Komunikasi dan Informasi Pemerintah Daerah	1,00	169.930.000	1,00	27.610.000							12,00	40.000.000		27.610.000	0,00	69,03		
2.16.03.2.02.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Sistem Keamanan Informasi yang dikelola	1,00	800.000.000									4,00	1.625.000.000			0,00	0,00		
2.16.03.2.02.06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah pemeliharaan dan pengembangan aplikasi yang dipelihara/dikembangkan	5,00	250.000.000									12,00	5.799.396.465			0,00	0,00		
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah pemeliharaan dan pengembangan aplikasi yang dipelihara/dikembangkan	3,00	250.000.000			1,00	240.000.000	1,00	239.910.000	99,96	99,96	12,00	119.908.000			0,00	0,00		
		Terpeliharanya sarana infrastruktur Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	1,00																	
2.16.03.2.02.08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Fasilitas Operasional Banyuwangi Respon 112 yang diselenggarakan	12,00	72.860.000			12,00	40.000.000	12,00	40.000.000	100,00	100,00								
2.16.03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah pemeliharaan dan pengembangan aplikasi yang dipelihara/dikembangkan	2,00	3.200.000.000			1,00	1.625.000.000	0,99	1.601.221.453	98,54	98,54								
		Terselenggaranya pemeliharaan Infrastruktur Jaringan TIK	1,00																	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020						Target Program/Kegiatan RKPd tahun berjalan (tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun berjalan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp	K	Rp	Target RKPd Tahun 2021		Realisasi RKPd Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)		K	Rp	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Realisasi Target s/d tahun 2021			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13
2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah yang diselenggarakan	3,00	449.998.800			12,00	5.799.396.465	12,00	5.349.635.590	100,00	92,24								
2.16.03.2.02.12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	terlaksananya Monev TIK dan smart city di pemerintahan daerah	12,00	505.000.000		19.540.000	12,00	119.908.000	0,99	118.866.650	8,26	99,13			19.540.000					
	Urusan Koperasi dan Usaha Mikro																			DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
21703	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	435,27	250.000.000	0	-	435,27	99.971.000	435,27	79.293.000	1	0,79316	84,82	50.000.000	0	-	0,00	0,00		
217032.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang dimonitor dan dievaluasi	4480	250.000.000	0	-	4480	99.971.000	4480	79.293.000	1	0,79316	896	50.000.000	0	-	0,00	0,00		
217032.0101	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang diawasi	4480	250.000.000	0	-	896	99.971.000	896	79.293.000	1	0,79316	896	50.000.000	0	-	0,00	0,00		
21704	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usk Koperasi	Persentase KSP/USP Sehat	220,27	250.000.000	0	9.590.000	220,27	99.991.000	220,27	89.411.000	1	0,89419	39,65	50.000.000	0	9.590.000	0,00	0,19		
217042.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KSP/USP yang dinilai kesehatannya	600	250.000.000	0	9.590.000	600	99.991.000	600	89.411.000	1	0,89419	120	50.000.000	0	9.590.000	0,00	0,19		
217042.0101	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya	600	250.000.000	0	9.590.000	600	99.991.000	100	89.411.000	0,17	0,89419	120	50.000.000	0	9.590.000	0,00	0,19		
21705	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase Pemahaman Perkoperasian	23,57	2.050.000.000	0	10.800.000	23,57	525.169.000	23,57	477.000.000	1	0,90828	2,87	404.200.000	0	10.800.000	0,00	0,03		
217052.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang dilatih Perkoperasian	625	2.050.000.000	0	10.800.000	625	525.169.000	625	477.000.000	1	0,90828	125	404.200.000	0	10.800.000	0,00	0,03		
217052.0101	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah orang yang dilatih	625	2.050.000.000	0	10.800.000	218	525.169.000	218	477.000.000	1	0,90828	125	404.200.000	0	10.800.000	0,00	0,03		
21706	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase peningkatan volume usaha koperasi	83	250.000.000	0	-	83	99.995.000	83	84.566.920	1	0,84571	16,2	50.000.000	0	-	0,00	0,00		
217062.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang diberdayakan	500	250.000.000	0	-	500	99.995.000	500	84.566.920	1	0,84571	100	50.000.000	0	-	0,00	0,00		
217062.0101	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang difasilitasi pemberdayaan	500	250.000.000	0	-	100	99.995.000	100	84.566.920	1	0,84571	100	50.000.000	0	-	0,00	0,00		
21707	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	300	10.600.000.000	0	-	300	849.104.850	300	690.523.874	1	0,81324	40	2.300.637.400	0	-	0,00	0,00		
217072.01	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Usaha Mikro yang diberdayakan	1300	10.600.000.000	0	-	1300	849.104.850	1300	690.523.874	1	0,81324	50	2.300.637.400	0	-	0,00	0,00		
217072.0101	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang didata	200000	2.500.000.000	0	-	100	634.193.450	100	489.403.684	1	0,77169	200000	500.000.000	0	-	0,00	0,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020						Target Program/Kegiatan RKPd tahun berjalan (tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun berjalan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Tingkat Realisasi (%)	K	Rp	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Realisasi Target s/d tahun 2021		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
217072.0103	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah orang yang difasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro	1000	600.000.000	0	-	200	119.912.400	200	106.120.400	1	0,88498	200	119.912.400	0	-	0,00	0,00		
217072.0104	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah orang yang mengikuti pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha	300	7.500.000.000	0	-	50	94.999.000	50	94.999.790	1	1,00001	60	1.680.725.000	0	-	0,00	0,00		
21708	Program Pengembangan UMKM	Persentase usaha mikro naik kelas	160	37.500.000.000	3,75	1.204.442.400	160	634.193.450	160	489.403.684	1	0,77169	15	7.486.143.000	3,75	1.204.442.400	0,25	0,16		
217082.01	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi pengembangan usaha	32500	37.500.000.000	1625	1.204.442.400	32500	634.193.450	32500	489.403.684	1	0,77169	6500	7.486.143.000	1625	1.204.442.400	0,25	0,16		
217082.0101	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi promosi	32500	37.500.000.000	1625	1.204.442.400	210	634.193.450	210	489.403.684	1	0,77169	6500	7.486.143.000	1625	1.204.442.400	0,25	0,16		
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL																		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.18.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	9500%	9.532.000.000	0	850.031.743	95,00	7.194.342.163,00	79,64%	5.422.925.197	0,84	75,38	1	7.511.689.599	0	850.031.743	0,12	0,11		
2.18.1.02.01.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun	6	80.000.000	0	0	10,00	69.999.820,00	6	69.923.040	60,00	99,89	6	69.999.900	0	0	0,00	0,00		
2.18.1.02.01.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah yang disusun	2	40.000.000	0	0	4,00	34.999.910,00	4	34.998.370	100,00	100,00	4	34.999.900	0	0	0,00	0,00		
2.18.1.02.01.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen evaluasi capaian kinerja dan ikhtisar realialisasi kinerja perangkat daerah	4	40.000.000	0	0	6	34.999.910	2	34.924.670	33,33	99,79	3	35.000.000	0	0	0,00	0,00		
2.18.1.02.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang Disusun	12	3.640.000.000	3	609.081.065	12	3.267.542.793	12	2.686.554.455	100,00	82,22	12	3.384.248.799	3	609.081.065	0,25	0,18		
2.18.1.02.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12	3.600.000.000	3	604.017.065	12	3.232.542.883	12	2.651.596.085	100,00	82,03	12	3.349.249.099	3	604.017.065	0,25	0,18		
2.18.1.02.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan yang dikoordinasikan / disusun	12	40.000.000	3	5.064.000	12	34.999.910	12	34.958.370	100,00	99,88	12	34.999.700	3	5.064.000	0,25	0,14		
2.18.1.02.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Waktu Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12	2.462.000.000	3	42.739.050	12	2.100.919.500	12	1.922.573.159	100,00	91,51	12	2.119.791.000	3	42.739.050	0,25	0,02		
2.18.1.02.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah lokasi kebutuhan komponen listrik	5	1.400.000.000	0	0	4	175.267.890	4	159.371.885	100,00	90,93	4	99.998.800	0	0	0,00	0,00		
2.18.1.02.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	60	100.000.000	0	0	51	149.999.520	51	149.448.850	100,00	99,63	51	149.999.300	0	0	0,00	0,00		
2.18.1.02.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	35	200.000.000	0	0	26	395.994.630	26	389.330.590	100,00	98,32	26	349.938.200	0	0	0,00	0,00		
2.18.1.02.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah waktu bahan logistik kantor yang disediakan	12	400.000.000	3	24.120.000	12	989.691.000	12	907.700.000	100,00	91,72	12	1.259.987.000	3	24.120.000	0,25	0,02		
2.18.1.02.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	132.000	100.000.000	0	0	139.000	149.999.960	139.000	149.874.560	100,00	99,92	139.000	99.969.200	0	0	0,00	0,00		
2.18.1.02.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3	12.000.000	3	900.000	3	9.996.900	3	6.600.000	100,00	66,02	3	9.996.000	3	900.000	1,00	0,09		
2.18.1.02.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu pelaksanaan rapat di dalam daerah maupun luar daerah	12	250.000.000	3	17.719.050	12	229.969.600	12	160.247.274	100,00	69,68	12	149.902.500	3	17.719.050	0,25	0,12		
2.18.1.02.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4	1.300.000.000	-	0	4	499.582.800	0	495.543.600	0,00	99,19	4	1.529.358.210	0	0	0,00	0,00		
2.18.1.02.07.5	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel yang diadakan	20	200.000.000	-	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1	49.306.400	0	0	0,00	0,00		
2.18.1.02.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah komputer, laptop dan printer yang diadakan	4	300.000.000	-	0	13	199.964.600	13	196.818.600	100,00	98,43	13	199.698.410	0	0	0,00	0,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020						Target Program/Kegiatan RPKD tahun berjalan (tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun berjalan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Tingkat Realisasi (%)	K	Rp	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Realisasi Target s/d tahun 2021				
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2.18.1.02.07.9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan gedung yang diadakan	2	500.000.000	-	0	1	200.000.000	1	199.505.000	100,00	99,75	1	1.200.207.400	0	0	0,00	0,00		
2.18.1.02.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah AC yang diadakan	4	300.000.000	-	0	4	99.618.200	4	99.220.000	100,00	99,60	4	129.452.400	0	0	0,00	0,00		
2.18.1.02.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	#####	1.050.000.000	0	197.242.628	3	769.435.020	#####	643.041.183	66,67	83,57	3	898.199.800	0	197.242.628	0,00	0,22		
2.18.1.02.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah waktu penyediaan perangkat, materai dan benda pos lainnya	12	50.000.000	3	0	12	40.000.000	12	31.456.800	100,00	78,64	12	40.000.000	3	0	0,25	0,00		
2.18.1.02.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	400.000.000	3	115.542.628	12	251.235.020	12	142.134.383	100,00	56,57	12	349.999.800	3	115.542.628	0,25	0,33		
2.18.1.02.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum perkantoran yang disediakan	420	600.000.000	74	81.700.000	100	478.200.000	9800%	469.450.000	98,00	98,17	288	508.200.000	74	81.700.000	0,26	0,16		
2.18.1.02.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	1.000.000.000	0	969.000	3	486.862.230	1	447.204.390	33,33	91,85	3	1.039.450.100	0	969.000	0,00	0,00		
2.18.1.02.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah waktu pemeliharaan kendaraan dinas dan komputer	12	200.000.000	3	969.000	12	154.250.230	12	137.378.590	100,00	89,06	12	149.964.100	3	969.000	0,25	0,01		
2.18.1.02.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung yang dipelihara	2	500.000.000	0	0	1	200.000.000	1	188.553.800	100,00	94,28	1	689.500.000	0	0	0,00	0,00		
2.18.1.02.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah paket pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	4	300.000.000	0	0	4	132.612.000	4	121.272.000	100,00	91,45	4	199.986.000	0	0	0,00	0,00		
2.18.2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Prosentase Penetapan dan Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal	7%	100.000.000	0	0	3,5	150.000.000	3,45	149.425.965	98,57	99,62	3,5	49.999.800	0	0	0,00	0,00		
2.18.2.02.02	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase potensi investasi Kabupaten yang terpetakan	92%	100.000.000	0	0	1	150.000.000	1	149.425.965	100,00	99,62	1	49.999.800	0	0	0,00	0,00		
2.18.2.02.02.5	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	2 Dokumen	100.000.000	0	0	1	150.000.000	1	149.425.965	100,00	99,62	1	49.999.800	0	0	0,00	0,00		
2.18.3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Minat Investasi	6%	100.000.000	0	0	50	54.498.350	49,74%	54.220.320	0,99	99,49	50%	89.999.400	0	0	0,00	0,00		
2.18.3.02.01	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Potensi Investasi yang Dipromosikan	92%	100.000.000	0	0	2	54.498.350	#####	54.220.320	100,00	99,49	2	89.999.400	0	0	0,00	0,00		
2.18.3.02.01.2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota yang dilaksanakan	2 Kegiatan	100.000.000	0	0	2	54.498.350	2	54.220.320	100,00	99,49	2	89.999.400	0	0	0,00	0,00		
2.18.4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai dengan SOP	96%	900.000.000	0	0	95	853.456.851	77,10%	692.616.685	0,81	81,15	95%	800.357.161	0	0	0,00	0,00		
2.18.4.02.01	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan sesuai dengan SOP	3.900 Dokumen	900.000.000	0	0	6.250	853.456.851	1.770	692.616.685	28,32	81,15	6.250	800.357.161	0	0	0,00	0,00		
2.18.4.02.01.1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Jenis Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	90 Jenis	900.000.000	0	0	12	853.456.851	12	692.616.685	100,00	81,15	12	800.357.161	0	0	0,00	0,00		
2.18.5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha/ Penanam Modal terhadap Penyampaian LKPM	80%	600.000.000	0	0	95	372.456.930	46,45%	182.095.000	0,49	48,89	9500%	383.913.800	0	0	0,00	0,00		
2.18.5.2.01	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku Usaha yang telah Dipantau, Dibimbing dan Diawasi	80%	600.000.000	0	0	12	372.456.930	6 Bulan	182.095.000	#VALUE!	48,89	12	383.913.800	0	0	0,00	0,00		
2.18.5.2.01.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah PMDN dan UKM yang di survey	700 unit	200.000.000	0	0	216	50.817.790	9	2.120.000	4,17	4,17	0%	0	0	0	0,00	0,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020						Target Program/Kegiatan RKPd tahun berjalan (tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun berjalan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp	K	Rp	Target RKPd Tahun 2021		Realisasi RKPd Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)		K	Rp	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Realisasi Target s/d tahun 2021			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13
2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	978.598.600			100	978.598.600		825.395.970	0	84,3447	100	1.053.374.527	0	0	0,00	0,00		
2.19.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	0	15	6.000.000	12	0	3	0	25	0	12	9.990.000	15	6.000.000	1,25	0,60		
2.19.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	299.998.600	15		12	299.998.600		198.945.970	0	66,3156	12	349.998.527	15	0	1,25	0,00		
2.19.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Dipelihara	4	30.000.000	0	0	4	30.000.000	4	30.000.000	100	100	5	24.986.000	0	0	0,00	0,00		
2.19.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Jasa Perkantoran Kantor	408	648.600.000	0	0	34	648.600.000	408	596.450.000	1200	91,9596	408	668.400.000	0	0	0,00	0,00		
2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	99.322.200	0	0	100	99.322.200		9.787.089.538	0	9853,88	100	99.443.900	0	0	0,00	0,00		
2.19.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	4	49.988.200	0	0	4	49.988.200	4	44.161.100	100	88,343	4	49.951.900	0	0	0,00	0,00		
2.19.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan / Perlengkapan Kantor yang dipelihara	5	49.334.000	5	509.200.800	5	49.334.000	0	9.742.928.438	0	19748,9	5	29.992.000	5	509.200.800	1,00	16,98		
2.19.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Taman Kantor yg dibangun	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	19.500.000	1	0	1,00	0,00		
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pengembangan kapasitas daya Saing Kepemudaan	0,5	4.639.594.264	0	0	0,5	4.639.594.264	0,67	4.512.877.354	133,67	97,27	1	4.418.500.000	0	0	0,00	0,00		
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah pemuda yang diberdayakan dan dikembangkan	2.000	0	2.000	459.866.800	2.000	4.639.594.264	0	4.512.877.354	0	97,27	2.000	3.096.500.000	2.000	459.866.800	1,00	0,15		
2.19.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pelatihan	869	2.728.799.799	1.019	3.176.266.599	750	2.728.799.799	869	2.721.339.899	115,87	99,73	640	2.071.500.000	1.019	3.176.266.599	1,59	1,53		
2.19.02.2.01.05	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah berita acara koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	1	199.999.810	1	199.999.810	1	199.999.810	100	199.999.810	10000	100	1	75.000.000	1	199.999.810	1,00	2,67		
2.19.02.2.01.08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kepemimpinan, Kepeloporan, dan Kesukarelawanan	1.280	860.794.750	1.280	860.794.750	1.530	860.794.750	1.000	851.919.690	65,36	98,97	300	400.000.000	1.280	860.794.750	4,27	2,15		
2.19.02.2.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah pasukan pengibar bendera yang lulus seleksi dan pelatihan	75	849.999.905	145	862.399.905	75	849.999.905	72	739.617.955	96	87,014	75	550.000.000	145	862.399.905	1,93	1,57		
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang Dibina	20	0	20	0	0	0	20	0	0	0	20	1.322.000.000	20	0	1,00	0,00		
2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas kepemudaan	25	0	25	0	0	0	25	0	0	0	25	1.322.000.000	25	0	1,00	0,00		
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan pembinaan Olahraga	10	5.743.497.855	0	0	10	5.943.497.855	9	3.714.824.820	90	62,50	10	8.337.479.520	0	0	0,00	0,00		
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana olahraga memenuhi standart	80	0	80	0	80	1.039.655.620	100	1.034.975.665	125	99,55	80	259.994.420	80	0	1,00	0,00		
2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dipelihara	3	1.039.655.620	9	1.065.848.920	3	1.039.655.620	3	1.034.975.665	100	99,55	6	259.994.420	9	1.065.848.920	1,50	4,10		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020						Target Program/Kegiatan RKPd tahun berjalan (tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun berjalan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp	K	Rp	Target RKPd Tahun 2021		Realisasi RKPd Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)		K	Rp	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Realisasi Target s/d tahun 2021			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah event OR prestasi tingkat daerah yang diselenggarakan	4	0	4	199.497.200	4	649.998.285	0	592.487.605	0	91,15	4	1.399.497.500	4	199.497.200	1,00	0,14		
2.19.03.2.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah atlet yang mengikuti kejuaraan	400	649.998.285	400	649.998.285	400	649.998.285	2.450	592.487.605	612,5	91,15	2.670	499.497.600	400	649.998.285	0,15	1,30		
2.19.03.2.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	899.999.900	0	0	0,00	0,00		
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Presentase Atlet yang berprestasi di tingkat Provinsi	10	0	10	143.584.400	10	499.924.700	0	197.000.000	0	39,41	10	249.999.800	10	143.584.400	1,00	0,57		
2.19.03.2.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah atlet pemula yang dibina dan dikembangkan	250	299.924.700	250	443.509.100	250	299.924.700	16	197.000.000	6,4	65,68	150	249.999.800	250	443.509.100	1,67	1,77		
2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah organisasi olahraga yang dibina	33	0	33	0	33	2.000.000.000	0	1.500.000.000	0	75	33	4.379.000.000	33	0	1,00	0,00		
2.19.03.2.04.03	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota Dengan Lembaga Terkait	Jumlah perjanjian kerjasama organisasi keolahragaan kabupaten dengan lembaga terkait	33	2.000.000.000	33	2.000.000.000	33	2.000.000.000	33	1.500.000.000	100	75	22	4.379.000.000	33	2.000.000.000	1,50	0,46		
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah event OR Rekreasi yang diselenggarakan	5	0	5	147.100.000	5	1.753.919.250	0	390.361.550	0	22,26	5	2.048.987.800	5	147.100.000	1,00	0,07		
2.19.03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah peserta Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	1.700	1.753.919.250	1.700	1.753.919.250	1.700	1.753.919.250	1.700	1.141.884.550	100	65,10	1.700	1.973.987.800	1.700	1.753.919.250	1,00	0,89		
2.19.03.2.05.05	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	75.000.000	0	0	0,00	0,00		
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Presentase anggota pramuka yang terfasilitasi kegiatannya	0	0	0	0	90	349.999.860	100	249.999.860	111,11	71,43	0	350.000.000	0	0	0,00	0,00		
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah lembaga kepramukaan yang dibina		349.999.860	0	349.999.860		349.999.860	0	249.999.860	0,00	71,43	0	350.000.000	0	349.999.860	0,00	1,00		
2.19.04.2.01.05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah peserta penyelenggaraan kepramukaan tingkat daerah	25	99.999.860	25	99.999.860	25	99.999.860	25	99.999.860	100	100	25	100.000.000	25	99.999.860	1,00	1,00		
2.19.04.2.01.08	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah lembaga kepramukaan yang dibina	25	250.000.000	25	250.000.000	25	250.000.000	0	150.000.000	0	60	25	250.000.000	25	250.000.000	1,00	1,00		
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK																			DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN PERSANDIAN
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Data Informasi dan Statistik Daerah yang Tersusun dengan Baik	100,00	1.404.243.200	100,00	92.180.128	100,00	808.088.690	98,07	768.163.030	98,07	95,06	100,00	808.088.690	100,00	92.180.128	100,00	11,41		
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		100,00	1.404.243.200	100,00	92.180.128	100,00	808.088.690	98,07	768.163.030	98,07	95,06	100,00	808.088.690	100,00	92.180.128	100,00	11,41		
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah dokumen Indeks Pembangunan Masyarakat yang tersusun	1,00	259.996.700	1,00	9.996.700	1,00	399.999.440	0,92	366.557.840	91,64	91,64	1,00	399.999.440	1,00	9.996.700	100,00	2,50		
		Jumlah dokumen Indikator Hasil Pembangunan Daerah yang tersusun	1,00		1,00								1,00		1,00					
2.20.02.2.01.02	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Terselenggaranya Fasilitas Peningkatan Mutu Statistik Daerah yg dilaksanakan	1,00	709.954.000	1,00	52.013.828	1,00	176.151.260	0,99	173.907.200	98,73	98,73	1,00	176.151.260	1,00	52.013.828	100,00	29,53		
2.20.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Terselenggaranya Penyusunan Standart Data dan Meta Data Sektoral Kab. Banyuwangi yg dilaksanakan	1,00	37.998.900			1,00	11.939.400	1,00	11.939.400	100,00	100,00	1,00	11.939.400			0,00	0,00		
2.20.02.2.01.04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Aplikasi yang dikembangkan	2,00	396.293.600	2,00	30.169.600	1,00	219.998.590	0,98	215.758.590	98,07	98,07	2,00	219.998.590	2,00	30.169.600	100,00	13,71		
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN																			DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN PERSANDIAN
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Pengamanan Informasi Daerah yang Terselenggara Baik	100,00	1.036.956.100	100,00	51.467.373	100,00	991.811.540	99,36	974.751.975	99,36	98,28	100,00	991.811.540	5,19	51.467.373	5,19	5,19		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020						Target Program/Kegiatan RPKD tahun berjalan (tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun berjalan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Tingkat Realisasi (%)	K	Rp	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Realisasi Target s/d tahun 2021		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		100,00	834.991.100	100,00	51.467.373	100,00	669.837.100	98,72	661.876.026	98,72	98,81	0,00	669.837.100	100,00	51.467.373	0,00	7,68		
2.21.02.2.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pengadaan, Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan Sandi yg dilaksanakan	1,00	672.999.800	1,00	44.471.573	1,00	264.754.000	0,98	260.197.426	98,28	98,28	1,00	264.754.000	1,00	44.471.573	100,00	16,80		
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Terselenggaranya Pelaksanaan Keamanan Informasi Kabupaten Banyuwangi yg dilaksanakan	1,00	106.995.800	1,00	6.995.800	1,00	405.083.100	0,99	401.678.600	99,16	99,16								
2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Layanan Keamanan C-SIRT di Kabupaten Banyuwangi yg dilaksanakan	1,00	54.995.500									1,00	405.083.100			0,00	0,00		
2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota		100,00	201.965.000			100,00	321.974.440	100,01	312.875.949	100,01	97,17	0,00	321.974.440			0,00	0,00		
2.21.02.2.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Fasilitas Pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik yang dilaksanakan	1,00	201.965.000			244,00	321.974.440	244,02	312.875.949	100,01	97,17	244,00	321.974.440			0,00	0,00		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	95	21.930.620.000	22	1.437.704.355	93	9.278.524.414	98	8.027.894.031	106	87	94	7.358.628.943	22	1.437.704.355	23,54	6,56		
2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	454.210.282	25	18.267.900	100	129.984.400	33	115.390.410	33	89	100	74.398.500	25	18.267.900	25,00	4,02		
2.22.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	454.210.282	0	18.267.900	40	129.984.400	13	115.390.410	33	89	1	74.398.500	0	18.267.900	5,00	4,02		
2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	100	27.283.284.037	25	944.098.127	100	3.753.601.655	25	2.769.851.618	25	74	100	4.468.933.193	25	944.098.127	25,00	3,46		
2.22.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	60	27.283.284.037	3	944.098.127	12	3.753.601.655	3	2.769.851.618	25	74	12	4.468.933.193	3	944.098.127	5,00	3,46		
2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi umum perangkat daerah	100	3.357.639.857	30	185.656.904	100	956.443.260	96	875.418.303	96	92	100	549.972.950	30	185.656.904	29,50	5,53		
2.22.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4255	152.589.648	213	6.249.400	9	64.991.160	3	63.665.070	33	98	851	24.993.800	213	6.249.400	5,00	4,10		
2.22.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	95	305.236.074	20	12.409.100	19	316.894.266	5	246.615.530	26	78	85	49.996.900	20	12.409.100	4,80	4,07		
2.22.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan (UMBUL-UMBUL)	135	152.868.651	85	25.039.500	27	36.225.200	27	36.225.200	100	100	85	25.039.500	85	25.039.500	20,00	16,38		
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Belanja Perabot)	425	205.342.596	30	6.995.500	20	28.325.330	5	28.258.300	25	100	85	33.634.600	30	6.995.500	7,00	3,41		
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Belanja Alat Kebersihan)		130.180.268	0	13.632.900	1	35.440.900	1	30.744.370	100	87		21.323.200	0	13.632.900	0,00	10,47		
2.22.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan bahan logistik kantor (BBM)	60	507.028.555	3	14.332.000	12	89.265.000	3	89.254.500	25	100	12	83.050.000	3	14.332.000	5,00	2,83		
		Penyediaan bahan logistik kantor (MAMIN)	35000	408.728.814	2400	16.625.000	7000	110.687.500	3567	110.677.500	51	100	10000	66.948.750	2400	16.625.000	4,80	4,07		
2.22.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	15	152.626.279	1	6.247.600	3	17.644.750	1	17.644.750	33	100	5	24.999.800	1	6.247.600	4,00	4,09		
2.22.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	395	122.080.022	0	0	79	19.980.840	1	20.129.700	1	101	9	19.996.400	0	0	0,00	0,00		
2.22.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Koordinasi dan konsultasi ke luar daera	5	1.220.958.949	20	84.125.904	1	216.858.314	1	216.192.893	100	100	48	199.990.000	20	84.125.904	8,40	6,89		
2.22.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100	1.984.157.500	0	0	100	588.617.694	95	536.050.000	95	91	100	325.000.000	0	0	0,00	0,00		
2.22.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	35	152.627.500	0	0	7	199.046.694	7	198.000.000	100	99	1	25.000.000	0	0	0,00	0,00		
2.22.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Belanja Modal Pengadaan Aset Tetap Lainnya (Sound System)	25	1.526.275.000	0	0	5	89.901.000	5	89.600.000	100	100	10	250.000.000	0	0	0,00	0,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020						Target Program/Kegiatan RKPd tahun berjalan (tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun berjalan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp	K	Rp	Target RKPd Tahun 2021		Realisasi RKPd Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)		K	Rp	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Realisasi Target s/d tahun 2021			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13
2.22.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Belanja Modal Pengadaan Aset Tak Terwujud (Pemeliharaan/Pengembangan Software/Aplikasi	15	305.255.000	0	0	3	200.000.000	1	149.050.000	33	75	1	50.000.000	0	0	0,00	0,00		
2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Tersedianya jasa surat menyurat	100	11.418.978.429	55	289.681.424	100	1.753.168.800	94	1.608.061.450	94	92	100	1.870.399.900	55	289.681.424	54,67	2,54		
2.22.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1640	12.210.200	25	1.000.000	328	1.999.800	162	1.990.000	49	100	50	2.000.000	25	1.000.000	10,00	8,19		
2.22.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	60	2.747.294.389	3	63.181.424	12	299.919.000	3	213.321.450	25	71	20	449.999.900	3	63.181.424	2,80	2,30		
2.22.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100	426.895.454	0	0	100	1.066.652.240	100	1.052.240.950	100	99	100	69.924.400	0	0	0,00	0,00		
2.22.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	5	121.950.594	0	0	5	29.991.380	3	26.572.700	60	89	1	19.975.200	0	0	0,00	0,00		
2.22.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas operasional yang disediakan	10	121.944.488	0	0	5	29.962.460	3	22.813.100	60	76	2	19.974.200	0	0	0,00	0,00		
2.22.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya (Service AC dan Komputer) yang dipelihara	5	183.000.373	0	0	9	54.969.600	3	54.969.600	33	100	1	29.975.000	0	0	0,00	0,00		
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase budaya lokal (ritus dan adat istiadat) yang dikembangkan menjadi atraksi	88	2.890.910.000	0	0	15	1.889.145.700	3	1.873.295.700	20	99	65	580.000.000	0	0	0,00	0,00		
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kab.Kota	Cakupan Pelestarian Kesenian Tradisional yang masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kab.Kota	100	3.540.958.000	0	0	100	1.889.145.700	60	1.873.295.700	60	99	100	580.000.000	0	0	0,00	0,00		
2.22.02.2.02.02	Perlindungan, Pengembangan Pemanfaatan Obyek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Hibah yang diberikan kepada lembaga, masyarakat dan sanggar seni	125	3.540.958.000	0	0	5	1.889.145.700	3	1.873.295.700	60	99	25	580.000.000	0	0	0,00	0,00		
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan	1	8.567.700.000	1	230.078.000							1	879.398.100	1	230.078.000	89,09	2,69		
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yg Masy. Pelakunya dalam Daerah	Cakupan Pembinaan Kesenian yg Masy. Pelakunya dalam Daerah	100	5.368.813.340	26	230.078.000							100	879.398.100	26	230.078.000	26,00	4,29		
2.22.03.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Penyelenggaraan Aktualisasi	125	5.368.813.340	7	230.078.000							25	879.398.100	7	230.078.000	5,20	4,29		
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Terlestarikannya cagar budaya	30	366.360.000	0	0	15	149.998.000	14	148.694.300	93	99	21	138.600.000	0	0	0,00	0,00		
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kab.Kota	Cakupan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kab.Kota	100	846.166.860	0	0	100	149.998.000	100	148.694.300	100	99	100	138.600.000	0	0	0,00	0,00		
2.22.05.2.02.01	Perlindungan Cagar Budaya	Jumlah tim cagar budaya	300	274.729.500	0	0							60	45.000.000	0	0	0,00	0,00		
2.22.05.2.02.02	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Juru pelihara situs	1560	571.437.360	0	0	25	149.998.000	25	148.694.300	100	99	312	93.600.000	0	0	0,00	0,00		
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum (DAK) (% kunjungan museum)	77	2.860.910.000	476	20.433.500	100	685.000.000	14	681.053.800	14	99	10	699.998.900	476	20.433.500	615,91	0,71		
2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Cakupan Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	100	2.860.910.000	10	20.433.500	100	685.000.000	100	681.053.800	100	99	100	699.998.900	10	20.433.500	10,00	0,71		
2.22.06.2.01.01	Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu	Jumlah pengelolaan museum dan taman budaya di daerah	50	2.860.910.000	1	20.433.500	1	685.000.000	1	681.053.800	100	99	10	699.998.900	1	20.433.500	2,00	0,71		
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN																		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020						Target Program/Kegiatan RKPd tahun berjalan (tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun berjalan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp	K	Rp	Target RKPd Tahun 2021		Realisasi RKPd Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)		K	Rp	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Realisasi Target s/d tahun 2021			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13
2.23.02.2.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Perpustakaan yang mengembangkan layanan otomasi dan digitalisasi	50,00	30.000.000	10,00	495.700	50,00	29.999.790	20,00	29.993.690	40,00	99,98	50,00	29.495.700	10,00	495.700	20,00	1,68		
2.23.02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Pengembangan Minat dan Budaya Baca	10,00	75.000.000	3,00	22.020.100	10,00	74.997.990	6,00	89.150.390	60,00	118,87	10,00	82.976.100	3,00	22.020.100	30,00	26,54		
2.23.02.2.01.03	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi kekhasan daerah yang dimiliki dan dikembangkan	25,00	25.000.000			25,00	24.996.490	0,00	24.558.790	0,00	98,25	25,00	9.999.500	0,00	459.500	0,00	4,60		
2.23.02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah perpustakaan pada satuan Pendidikan Dasar yang dibina sesuai standar Nasional Perpustakaan	200,00	30.000.000			200,00	29.999.860	100,00	15.114.860	50,00	50,38	200,00	24.999.200			0,00	0,00		
2.23.02.2.01.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan dan pustakawan yang meningkatkan kapasitasnya melalui bimbingan teknis dan pelatihan	50,00	30.790.740			50,00	30.790.540												
2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah koleksi bahan pustaka yang dikelola dan dikembangkan	200,00	45.000.000	50,00	4.811.500	200,00	144.999.810	250,00	139.624.810	125,00	96,29	200,00	142.998.600	50,00	4.811.500	25,00	3,36		
2.23.02.2.01.10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data/informasi yang valid dan akuntabel	4,00	20.000.000			4,00	19.998.280	0,00	19.998.280	0,00	100,00	4,00							
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah pengunjung perpustakaan	100,00	129.000.000	100,00	11.558.200	100,00	68.676.570	100,00	68.676.570	100,00	100,00	100,00	227.624.100	100,00	11.558.200	100,00	5,08		
2.23.02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah sosialisasi budaya baca dan literasi yang dilakukan	400,00	89.000.000	100,00	11.558.200	400,00	68.676.570	260,00	68.676.570	65,00	100,00	400,00	227.624.100	100,00	11.558.200	25,00	5,08		
2.23.02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah perpustakaan Desa/Kelurahan yang dikembangkan berbasis inklusi sosial	4,00	40.000.000																
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang di lestarikan	80,00	60.000.000			80,00	59.997.440	80,00	42.271.040	100,00	70,45	0,80	46.287.400			0,00	0,00		
2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang di lestarikan	80,00	60.000.000			80,00	59.997.440	0,00	42.271.040	0,00	70,45	0,80	46.287.400			0,00	0,00		
2.23.03.2.01.01	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang berperan serta dalam pemeliharaan naskah kuno	4,00	40.000.000			4,00	39.997.650	0,00	27.971.250	0,00	69,93	4,00	26.289.400			0,00	0,00		
2.23.03.2.01.02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah naskah kuno yang dialihmediakan	2,00	20.000.000	0,00	19.998.000	2,00	19.999.790	0,00	14.299.790	0,00	71,50	2,00	19.998.000	0,00	19.998.000	0,00	100,00		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																		DINAS PERIKANAN	
3.25.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	100	24.252.241,000	27,06	859.396,539	100	5.504.164.321	100	4.683.424.874	100	85,089	100	6.669.893	27,06	859.396,539	0,27	0,13		
3.25.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, dokumen anggaran, laporan kinerja dan informasi data perikanan sesuai kebutuhan	100	950.000,000	25	25.154,900	100	281.015.450	100	265.216.450	100	94,378	100	220.615	25	25.154,900	0,25	0,11		
3.25.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	13	300.000,000	1	10.267,000	3	151.501.600	3	135.702.600	100	89,572	3	40.000	1	10.267,000	0,33	0,26		
3.25.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	100	50.000,000	30	817,800	0	-	0	-	0	-	100	20.000	30	817,800	0,30	0,04		
3.25.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	100	50.000,000	37	5.133,400	0	-	0	-	0	-	100	15.000	37	5.133,400	0,37	0,34		
3.25.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	100	50.000,000	0	-	0	-	0	-	0	-	100	15.000	0	-	0,00	0,00		
3.25.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	40	200.000,000	3	4.371,500	8	129.513.850	8	129.513.850	100	100,000	8	40.000	3	4.371,500	0,38	0,11		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020						Target Program/Kegiatan RPKD tahun berjalan (tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun berjalan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
			K	Rp	K	Rp	Target RKPd Tahun 2021		Realisasi RKPd Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)		K	Rp	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Realisasi Target s/d tahun 2021					
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10				11	12	13	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3.25.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah media/ sarana penyampaian data dan informasi perikanan yang tersedia	3	300.000,000	3	4.565,200	0	-	0	-	0	-	3	90.615	3	4.565,200	1,00	0,05				
		Jumlah dokumen pelaporan data dan informasi perikanan yang disusun	25		0		0		0		0		5		0		0,00					
		Jumlah aplikasi data dan informasi perikanan yang dibuat	2		0		0		0		0		0		0		0,00					
3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	100	18.032.241,000	23,077	625.267,656	100	3.431.235.083	100	2.689.195.682	100	78,374	100	4.053.805	23,077	625.267,656	0,23	0,15				
3.25.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen penyediaan gaji dan tunjangan ASN	135	17.932.241,000	6	621.006,656	308	3.403.151.083	308	2.661.487.682	100	78,207	26	4.018.805	6	621.006,656	0,23	0,15				
3.25.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan	5	100.000,000	1	4.261,000	1	28.084.000	1	27.708.000	100	98,661	1	35.000	1	4.261,000	1,00	0,12				
3.25.01.2.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tersedia sesuai kebutuhan	100	100.000,000	0	100.000,000	100	-	0	-	0	-	100	200.000	0	100.000,000	0,00	0,50				
3.25.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	150	100.000,000	0	-	0	-	0	-	0	-	300	200.000	0	-	0,00	0,00				
3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	100	1.567.000,000	83,512	90.595,350	100	627.770.400	100	593.883.780	100	94,602	100	480.541	83,512	90.595,350	0,84	0,19				
3.25.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	11	30.000,000	18	4.961,500	11	13.069.000	11	13.069.000	100	100,000	22	18.000	18	4.961,500	0,82	0,28				
3.25.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah macam alat tulis kantor yang disediakan sesuai kebutuhan	40	70.000,000	28	37.772,200	40	340.281.600	40	337.085.600	100	99,061	30	57.616	28	37.772,200	0,93	0,66				
		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	13		3		13		13		100		8		3		0,38					
3.25.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	50	30.000,000	41	6.576,100	19	20.380.500	19	20.014.500	100	98,204	46	29.269	41	6.576,100	0,89	0,22				
3.25.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah BBM yang disediakan	25970	300.000,000	1267	10.676,350	25970	63.333.000	25970	63.127.700	100	99,676	7090	84.140	1267	10.676,350	0,18	0,13				
		jumlah jenis makanan dan minuman yang disediakan	10		8		10		10		100		8		8		1,00					
3.25.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	30	50.000,000	18	7.061,400	12	34.406.000	12	34.406.000	100	100,000	21	31.600	18	7.061,400	0,86	0,22				
3.25.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3652	12.500,000	186	-	0	-	0	-	0	-	730	3.600	186	-	0,25	0,00				
3.25.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman	20	43.000,000	16	3.817,800	0	-	0	-	0	-	16	14.669	16	3.817,800	1,00	0,26				
		Jumlah sovenir tamu yang disediakan	30		0		0		0		0		0		0		0,00					
3.25.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan	10000	1.031.500,000	219	19.730,000	12	156.300.300	12	126.180.980	100	80,730	1788	241.647	219	19.730,000	0,12	0,08				
3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100	85.000,000	16,667	5.830,000	100	215.500.000	100	214.300.000	100	99,443	100	244.330	16,667	5.830,000	0,17	0,02				
3.25.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	20	20.000,000	-	-	0	-	0	-	0	-										
3.25.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	20.000,000	0	-	-	-	0	-	0	-	3	38.500	0	-	0,00	0,00				
3.25.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang diadakan	2	20.000,000	0	-	1	200.000.000	1	199.000.000	100	99,500			0	-	0,00	0,00				
3.25.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang diadakan	5	25.000,000	1	5.830,000	2	15.500.000	2	15.300.000	100	98,710	3	205.830	1	5.830,000	0,33	0,03				
3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	3.092.000,000	25	113.267,283	100	591.142.388	100	571.080.517	100	96,606	100	623.440	25	113.267,283	0,25	0,18				
3.25.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, dan listrik	12	500.000,000	3	28.867,283	12	101.242.388	12	98.730.517	100	97,519	12	105.040	3	28.867,283	0,25	0,27				
3.25.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum perkantoran yang disediakan	1500	2.592.000,000	75	84.400,000	324	489.900.000	324	472.350.000	100	96,418	300	518.400	75	84.400,000	0,25	0,16				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020						Target Program/Kegiatan RKPd tahun berjalan (tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun berjalan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Tingkat Realisasi (%)	K	Rp	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d tahun 2021	K	Rp	K		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13
3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	100	426.000,000	16,187	24.436,250	100	357.501.000	100	349.748.445	100	-	100	847.162	16,187	24.436,250	0,16	0,03		
3.25.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional /lapangan yang dipelihara	30	250.000,000	10	12.813,250	30	78.130.000	30	72.167.445	100	92,368	30	67.280	10	12.813,250	0,33	0,19		
3.25.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	30	6.000,000	30	5.453,000	30		30		100		113	20.040	30	5.453,000	0,27	0,27		
3.25.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan kerja yang dipelihara	20	50.000,000	8	6.170,000	20	12.694.000	20	12.694.000	100	100,000	38	18.154	8	6.170,000	0,21	0,34		
		Jumlah unit perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	10		0		10		10		100			0			0,00			
3.25.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	50.000,000	0	-	1	257.000.000	1	255.210.000	100	99,304	1	96.688	0	-	0,00	0,00		
3.25.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara	1	50.000,000	0	-	12	5.077.000	12	5.077.000	100	100,000	3	645.000	0	-	0,00	0,00		
3.25.01.2.09.11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1	20.000,000	0	-	1	4.600.000	1	4.600.000	100	100,000		-	0	-	0,00	0,00		
3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap Nelayan Kecil	24394	11.742.913,000	7110,1	243.850,000	24394	3.264.063.420	24394	1.973.733.716	100	60,469	21674	2.815.854	7110,1	243.850,000	0,33	0,09		
3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah	Jumlah lokasi pengelolaan perikanan PUD yang dikembangkan	3	5.670.824,000	1	58.161,000	3	911.744.500	3	911.208.150	100	99,941	3	292.161	1	58.161,000	0,33	0,20		
		Jumlah Perdes tentang Pengelolaan Perikanan di PUD	5		0		5		5		100		2	0			0,00	0,00		
3.25.03.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah dokumen kajian potensi SDI di PUD	2	350.000,000	0	-	2	30.000.000	2	30.000.000	100	100,000	1	20.000	0	-	0,00	0,00		
		Jumlah dokumen data dan statistik perikanan tangkap	60		0		60		60		100		12	0			0,00	0,00		
3.25.03.2.01.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	panjang jalan produksi perikanan PUD yang dibangun	6000	4.020.824,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	50.000	0	-	0,00	0,00		
		panjang dermaga yang dibangun	6000		0		0		0		0		0	0	0		0,00	0,00		
		Jumlah titik pemasangan instalasi listrik di pelabuhan perikanan PUD	240		0		0		0		0		0	0	0		0,00	0,00		
		Jumlah unit intalasi air bersih yang dibangun	2		0		0		0		0		0	0	0		0,00	0,00		
		Jumlah unit fasilitas umum di PPI PUD yang dibangun	12		0		0		0		0		0	0	0		0,00	0,00		
		Jumlah unit bangunan penunjang yang dibangun	24		0		0		0		0		0	0	0		0,00	0,00		
		Jumlah unit TPI di PPI PUD yang dibangun	2		0		0		0		0		0	0	0		0,00	0,00		
		Jumlah dokumen perencanaan pengembangan kawasan perikanan PUD	1		0		0		0		0		1	0	0		0,00	0,00		
3.25.03.2.01.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah lokasi restocking	5	1.300.000,000	2	58.161,000	5	881.744.500	5	881.208.150	100	99,939	5	222.161	2	58.161,000	0,40	0,26		
		Jumlah peserta pembinaan pengelolaan PUD	150		120		150		150		100		120	120	120		1,00			
		Jumlah anggota pokmaswas PUD yang memiliki sertifikat TOT konservasi	50		0		50		50		100		0	0	0		0,00			
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase jumlah KUB yang meningkat kelasnya	95	4.746.787,000	95	177.649,200	95	1.679.818.920	95	392.394.188	100	23,359	60	2.043.693	0	177.649,200	0,00	0,09		
													100				0,00			
													300				0,00			
													50				0,00			
3.25.03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah kedai nelayan yang difasilitasi	20	2.596.787,000	0	62.487,700	20	1.285.880.100	20	1.260.218	100	0,098	4	1.558.693	0	62.487,700	0,00	0,04		
		Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan sarana penangkapan ikan	60		0		60		60		100		8		0		0,00			
		Jumlah nelayan yang mendapatkan bantuan alat keselamatan kerja	250		0		250		250		100		35		0		0,00			
		Jumlah nelayan yang mendapat pelatihan pembuatan perahu / alat tangkap	125		0		125		125		100		35		0		0,00			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020						Target Program/Kegiatan RKPd tahun berjalan (tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun berjalan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
			K	Rp	K	Rp	Target RKPd Tahun 2021		Realisasi RKPd Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)		K	Rp	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Realisasi Target s/d tahun 2021				
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp			K
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10				11	12	13
		Jumlah nelayan milenial yang mendapat pelatihan selama	40		0		40		40		100		0		0		0,00				
3.25.03.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah kelembagaan nelayan yang difasilitasi pendampingan	330	850.000,000	30	51.361,500	330	80.427.690	330	77.622.900	100	96,513	65	225.000	30	51.361,500	0,46	0,23			
		Jumlah kelompok nelayan yang teridentifikasi dan dikukuhkan	190		10		190		190		100		35		10		0,29				
		Jumlah nelayan milenial yang memiliki sertifikat TOT pemasaran	150		0		150		150		100		30		0		0,00				
		Jumlah nelayan milenial yang memiliki sertifikat TOT kelembagaan	150		0		150		150		100		30		0		0,00				
3.25.03.2.02.03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah nelayan yang difasilitasi kartu identitas pelaku usaha perikanan	2500	1.300.000,000	225	63.800,000	2750	313.511.130	2750	313.511.070	100	100,000	500	260.000	225	63.800,000	0,45	0,25			
		Jumlah nelayan yang difasilitasi asuransi / jaminan sosial	5000		1000		200		200		100		2500		1000		0,40				
		Jumlah nelayan yang difasilitasi SEHAT nelayan	1250		0		2		2		100		250		0		0,00				
		Jumlah nelayan yang difasilitasi akses teknologi dan informasi	110		5		40		40		100		20		5		0,25				
3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah PAD dari retribusi TPI (Rp. Juta)	1382,4	1.325.302,000	1,9483	8.039,800	1382,4	672.500.000	1382,4	670.131.378	100	99,648	226	480.000	1,9483	8.039,800	0,01	0,02			
3.25.03.2.03.01	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah dokumen Peraturan Pengelolaan & Penyelenggaraan TPI yang ditetapkan	1	20.000,000	0	-	0	50.000.000	-	49.894.500	0	99,789	0	-	0	-	0,00	0,00			
		Jumlah Naskah Akademik tentang Peraturan Penyelenggaraan TPI yang tersedia	0		0		1		1		100		0		0		0,00				
3.25.03.2.03.02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah TPI yang dipelihara	5	1.305.302,000	0	8.039,800	5	622.500.000	5	620.236.878	100	99,636	1	480.000	0	8.039,800	0,00	0,02			
		Jumlah TPI yang operasional	5		5		5		5		100		5		5		1,00				
		Jumlah macam sarpras TPI yang ditingkatkan	15		5		15		15		100		6		5		0,83				
3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	35021	7.926.594,000	4744	142.477,100	35021	2.116.174.550	35021	1.855.762.950	100	87,694	29744	3.066.991	4744	142.477,100	0,16	0,05			
3.25.04.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pelaku usaha perikanan budidaya yang memiliki izin usaha	26	145.000,000	0	7.908,600	26	30.000.000	26	26.110.000	100	87,033	7	30.000	0	7.908,600	0,00	0,26			
3.25.04.01.02	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak	Jumlah Rekomendasi Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) Budidaya yang diterbitkan	198	145.000,000	2	7.908,600	198	30.000.000	198	26.110.000	100	87,033	33	30.000	2	7.908,600	0,06	0,26			
		Jumlah TDPIK yang diterbitkan	700		0		700		700		100		100		0		0,00				
3.25.04.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah lokasi demplot mina padi yang terbentuk dan dikembangkan	5	4.113.254,000	5	3.850,000	5	932.975.050	5	926.745.100	100	99,332	1	1.968.714	0	3.850,000	0,00	0,00			
		Jumlah lokasi percontohan tambak milenial yang terbentuk dan dikembangkan	4		4		4		4		100		1		0		0,00				
		Jumlah lokasi pengembangan karamba sungai	6		6		6		6		100		0		0		0,00				
		Jumlah lokasi barkanli yang dibentuk dikembangkan	4		4		4		4		100		0		0		0,00				
		Jumlah lokasi kampung ikan yang dikembangkan	3		3		3		3		100		1		0		0,00				
		Persentase jumlah Pokdakan yang meningkat kelasnya	95		95		95		95		100		75		63		0,00				
3.25.04.02.01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok penerima bantuan sarpras budidaya ikan sistem mina padi	5	2.243.254,000	0	-	0	-	0	-	0	-	1	842.129	0	-	0,00	0,00			
		Jumlah kelompok penerima bantuan sarpras budidaya tambak milenial	5		0		0		0		0		1		0		0,00				
		Jumlah kelompok penerima bantuan sarpras budidaya karamba	6		0		0		0		0		0		0		0,00				
		Jumlah kelompok usaha pembenihan rakyat yang difasilitasi sarpras pembenihan	16		0		0		0		0		3		0		0,00				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020						Target Program/Kegiatan RKPd tahun berjalan (tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun berjalan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp	K	Rp	Target RKPd Tahun 2021		Realisasi RKPd Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)		K	Rp	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Realisasi Target s/d tahun 2021			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13
3.25.04.02.02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelembagaan pembudidaya yang difasilitasi pendampingan	250	470.000,000	3	3.850,000	40	38.275.800	40	37.675.500	100	98,432	50	25.000	3	3.850,000	0,06	0,15		
3.25.04.02.03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah pembudidaya yang difasilitasi kartu identitas pelaku usaha perikanan Jumlah pembudidaya yang difasilitasi SEHAT	500	450.000,000	0	-	100	33.133.600	100	31.603.600	100	95,382	100	511.810	0	-	0,00	0,00		
3.25.04.02.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pembudidaya Yang Memahami Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB) Jumlah pembudidaya yang mendapatkan pendampingan	1350	950.000,000	0	-	1350	861.565.650	1350	857.466.000	100	99,524	230	589.775	0	-	0,00	0,00		
3.25.04.03	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pelaku usaha perikanan budidaya skala kecil yang memiliki TDPIK	25	95.000,000	25	8.580,200	25	-	25	-	100	-	5	20.500	0	8.580,200	0,00	0,42		
3.25.04.03.02	Pelayanan penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya an Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ kota	Jumlah dokumen TDPIK yang diterbitkan	440	95.000,000	50	8.580,200		-		-	0	-	80	20.500	50	8.580,200	0,63	0,42		
3.25.04.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah produksi benih ikan air tawar di kabupaten Jumlah produksi benih BBI	40	3.573.340,000	3	122.138,300	40	1.153.199.500	40	902.907.850	100	78,296	35,298	1.047.777	3	122.138,300	0,08	0,12		
3.25.04.04.01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ kota	Jumlah dokumen data dan statistik perikanan budidaya yang tersedia	60	250.000,000	3	7.196,500	12	43.773.500	12	43.743.500	100	99,931	12	20.000	3	7.196,500	0,25	0,36		
3.25.04.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ kota	luas kolam yang direhab (m2) luas kolam yang dibangun (m2) Jumlah unit kolam filter air yang dibangun Panjang saluran yang direhab panjang instalasi air yang direhab panjang instalasi air yang dibangun Panjang jalan produksi yang direhab Jumlah unit bio security yang dibangun Jumlah unit IPAL yang dibangun	12000 1500 1 1200 450 200 1000 3 4	1.900.000,000	0 0 0 0 0 0 0 0 0	44.569,600	12000 1500 1 1200 450 200 1000 3 4	976.966.000	12000 1500 1 1200 450 200 1000 3 4	727.004.350	100 100 100 100 100 100 100 100 100	74,414	0 500 0 0 150 0 0 3 2	782.777	0 0 0 0 0 0 0 0 0	44.569,600	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,06		
3.25.04.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ kota	jumlah paket calon induk yang tersedia jumlah macam bahan operasional budidaya yang tersedia jumlah macam peralatan operasional produksi budidaya yang tersedia	4 15 10	904.659,000	0 0 0	580,400	4 15 10	132.460.000	4 15 10	132.160.000	100 100 100	99,774	0 3 5	115.000	0 0 0	580,400	0,00 0,00 0,00	0,01		
3.25.04.04.04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah uji sampel hama penyakit ikan yang dilakukan Jumlah lokasi budidaya tambak yang dimonev dalam rangka pengelolaan kesehatan ikan Jumlah macam alat uji kesehatan lingkungan budidaya yang tersedia	60 25 6	450.000,000	3 0 0	69.791,800	0 0 0	- - -	0 0 0	- - -	0 0 0	- - -	18 12 5	110.000	3 0 0	69.791,800	0,17 0,00 0,00	0,63		
3.25.04.04.07	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan pembudidayaan ikan yang tersedia	1	68.681,000		-		-	0	-	0	-	1	20.000		-	0,00	0,00		
3.25.06	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase peningkatan produksi produk olahan hasil perikanan UMK	5	5.325.637,000	5	76.974,400	5	343.570.830	5	334.179.000	100	97,266	5	1.410.884	0	76.974,400	0,00	0,05		
3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Persentase tanda daftar usaha (TDU) hasil perikanan bagi pelaku usaha perikanan yang diterbitkan	50	450.000,000	50	98,000	50	-	50	-	100	-	25	20.000	0	98,000	0,00	0,00		
3.25.06.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data dan informasi usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang tersedia	5	450.000,000	0	98,000	0	-	0	-	0	-	1	20.000	0	98,000	0,00	0,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020						Target Program/Kegiatan RKPD tahun berjalan (tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun berjalan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp	K	Rp	Target RKPD Tahun 2021		Realisasi RKPD Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)		K	Rp	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Realisasi Target s/d tahun 2021			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13
2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2.24.03.2.03.03	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran				0,00									14.999.800						
2.24.03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media					78.418.500								79.993.500		78.418.500		98,03		
2.24.03.2.04.01	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan				0,00	78.418.500								79.993.500	0,00	78.418.500		98,03		
2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP													9.999.999						
2.24.04.2.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang bersifat													9.999.999						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA																			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Length of stay (lama kunjungan wisata)	3	19.433.810.000	1	25.450.100	2	5.462.208.930	1	5.240.934.806	64	96	2	1.263.293.200	1	25.450.100	39,62	0,13		
3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Cakupan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	100	651.781.087	33	25.450.100	100	2.578.607.068	100	2.465.990.356	100	96	100	106.760.100	33	25.450.100	33,33	3,90		
3.26.02.2.01.04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Monitoring dan Evaluasi	30	651.781.087	2	25.450.100	6	97.990.400	6	93.920.400	100	96	6	106.760.100	2	25.450.100	6,67	3,90		
3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Cakupan pengelolaan kawasan strategis pariwisata	100	6.408.969.142	0	0							100	1.049.773.000	0	0	0,00	0,00		
3.26.02.2.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab./Kota	Jumlah peningkatan SDM pelaku pariwisata	30	6.408.969.142	0	0							6	1.049.773.000	0	0	0,00	0,00		
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	6	7.476.350.000	20	183.953.800	10	2.038.282.400	34	1.995.245.100	341	98	1	799.977.300	20	183.953.800	326,55	2,46		
		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	34		67								5		67		198,03	2,46		
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Cakupan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten	100	4.883.941.414	17	183.953.800	100	2.038.282.400	100	1.995.245.100	100	98	100	799.977.300	17	183.953.800	17,38	3,77		
3.26.03.2.01.01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya baik dalam dan Luar Negeri	Jumlah pembuatan bahan promosi	25		1	183.953.800	6	1.791.289.000	6	1.754.426.700		98	5		1	183.953.800	4,00	4,30		
		Jumlah pemasangan media promosi (baliho)	500	4.273.474.760	23								100	699.984.400	23		4,60			
		Jumlah promosi pemasaran di medsos	1800		86								360		86		4,78			
		Jumlah strategi pemasaran di media cetak dan elektronik	25		1								5		1		4,00			
3.26.03.2.01.04	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata baik dalam dan luar negeri Pariwisata Kab/Kota	Jumlah penerimaan tamu-tamu promosi dan pariwisata	100	610.466.654	0	0	5	246.993.400	5	240.818.400		97	20	99.992.900	0	0	0,00	0,00		
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pelaku pariwisata dan ekraf yang bersertifikat kompetensi	7	7.452.350.000	2	20.637.700	4	989.451.000	4	943.190.800	109	95	3	484.849.200	2	20.637.700	24,29	0,28		
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Cakupan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	100	7.452.350.000	4	20.637.700	100	989.451.000	239	943.190.800	239	95	100	484.849.200	4	20.637.700	4,00	0,28		
3.26.05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumberdaya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekraf	250	7.452.350.000	2	20.637.700	4	517.351.600	4	509.280.600	100	98	50	484.849.200	2	20.637.700	0,80	0,28		
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase cakupan pengembangan ekonomi kreatif	47	8.066.630.000	6	0							24	0	6	0	12,33	0,00		
3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah kegiatan pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	5	0	0	0							1	0	0	0	0,00			
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																			DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020						Target Program/Kegiatan RKPd tahun berjalan (tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun berjalan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp	K	Rp	Target RKPd Tahun 2021		Realisasi RKPd Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)		K	Rp	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Realisasi Target s/d tahun 2021			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan produksi Tanaman Perkebunan dan Hortikultura	3,75	11.953.034.473	1,00	4.127.812.800	100,00	23.306.341.415	100,00	21.060.298.311	100,00	90,36	3,70	11.370.294.400	1,00	4.127.812.800	27,03	36,30		
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan dalam Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	15,00	32.499.744.767	1,00	4.127.812.800	3,00	23.306.341.415	3,00	21.060.298.311	100,00	90,36	3,00	11.370.294.400	1,00	4.127.812.800	33,33	36,30		
3.27.02.2.02.01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Sertifikat Tanaman Perkebunan dan Hortikultura yang dikeluarkan	22,00	1.098.377.600	0,00	48.950.000	3,00	300.649.190	3,00	280.184.300	100,00	93,19	22,00	1.098.377.600	0,00	48.950.000	0,00	4,46		
3.27.02.2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah aktivitas dalam mendukung Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	19,00	4.121.297.000	0,00	70.222.300	17,00	19.439.829.130	17,00	17.408.921.411	100,00	89,55	19,00	4.121.297.000	0,00	70.222.300	0,00	1,70		
3.27.02.2.02.03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah aktivitas dalam mendukung Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	44,00	6.150.619.800	33,00	4.008.640.500	17,00	2.515.863.095	17,00	2.331.019.200	100,00	92,65	44,00	6.150.619.800	33,00	4.008.640.500	75,00	65,17		
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian mendukung Tanaman Pangan	100,00	5.781.390.880	1,50	6.073.662.200	100,00	19.756.507.968	100,00	19.039.132.150	100,00	96,37	100,00	20.261.972.300	1,50	6.073.662.200	1,50	29,98		
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Aktivitas Koordinasi & Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian	5,00	1.288.904.891	3,00	6.073.662.200	1,00	2.036.690.228	1,00	2.029.768.150	100,00	99,66	5,00	10.755.745.900	3,00	6.073.662.200	60,00	56,47		
3.27.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Kegiatan dalam mendukung pengembangan prasarana pertanian	39,00	10.755.745.900	24,00	6.073.662.200	7,00	2.036.690.228	7,00	2.029.768.150	100,00	99,66	39,00	10.755.745.900	24,00	6.073.662.200	61,54	56,47		
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian Mendukung Tanaman Pangan	168,00	20.139.138.929			45,00	17.719.817.740	45,00	17.009.364.000	100,00	95,99	54,00	9.506.226.400			0,00	0,00		
3.27.03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Volume Jaringan Irigasi Tersier	1886,00	4.362.515.500			3,00	7.595.000.000	3,00	6.965.223.000	100,00	91,71	1886,00	4.362.515.500			0,00	0,00		
3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Panjang Jalan Usaha Tani	5758,00	2.623.750.000			1674/755	3.310.000.000	1674/755	3.295.545.000	100,00	99,56	5758,00	2.623.750.000			0,00	0,00		
3.27.03.2.02.08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh Pertanian di Kecamatan yang difasilitasi	11,00	2.519.960.900			13,00	2.154.817.740	13,00	2.114.900.300	100,00	98,15	11,00	2.519.960.900			0,00	0,00		
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Usaha Produk Hewan Yang Bersertifikat PRA/NKV Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	9,00 22,20	3.668.100.923 4.668.492.084	0,50 1,00	47.467.000 258.590.975	4,00 1,00	3.009.395.960	4,00 1,00	2.939.546.625	100,00 100,00	97,68	8,00 22,40	804.999.310 3.955.095.170	0,50 1,00	47.467.000 258.590.975	6,25 4,46	5,90 6,54		
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/Kota	10,00	2.427.615.884			2,00	899.996.834	2,00	871.435.780	100,00	96,83	6,00	3.189.743.870			0,00	0,00		
3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Unit Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	5,00	3.189.743.870			30640/9000	899.996.834	30640/9000	871.435.780	100,00	96,83	5,00	3.189.743.870			0,00	0,00		
3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	5,00	2.240.876.200	1,00	258.590.975	1,00	709.947.486	1,00	687.924.425	100,00	96,90	2,00	765.351.300	1,00	258.590.975	50,00	33,79		
3.27.04.2.03.01	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	jumlah lab yang difasilitasi	1,00	18.833.400			2000/3	99.991.650	2000/3	98.447.710	100,00	98,46	1,00	18.833.400			0,00	0,00		
3.27.04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	jumlah hewan yang dilayani	#####	746.517.900	#####	258.590.975	1200,00	609.955.836	1200,00	589.476.715	100,00	96,64	#####	746.517.900	#####	258.590.975	30,81	34,64		
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah aktivitas Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	50,00	1.907.412.480	1,00	3.527.000	7,00	1.119.453.960	7,00	1.101.040.740	100,00	98,36	8,00	609.999.310	1,00	3.527.000	12,50	0,58		
3.27.04.2.04.01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah unit usaha hewan dan produk hewan yang difasilitasi	5,00	599.999.510			141,00	873.446.210	141,00	855.748.270	100,00	97,97	5,00	599.999.510			0,00	0,00		
3.27.04.2.04.04	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian produk asal hewan di Laboratorium Kesmavet	180,00	9.999.800	50,00	3.527.000	1,00	29.999.590	1,00	29.828.900	100,00	99,43	180,00	9.999.800	50,00	3.527.000	27,78	35,27		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020						Target Program/Kegiatan RPKD tahun berjalan (tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun berjalan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
			K	Rp	K	Rp	Target RPKD Tahun 2021		Realisasi RPKD Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)		K	Rp	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Realisasi Target s/d tahun 2021				
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13	
3.27.04.2.05	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Jumlah Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	5,00	1.760.688.443	1,00	43.940.000	1,00	279.997.680	1,00	279.145.680	100,00	99,70	5,00	195.000.000	1,00	43.940.000	20,00	22,53			
3.27.04.2.05.01	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Jumlah Ternak Yang Mendapat Pendampingan Penerapan Kesejahteraan Hewan	2000,00	195.000.000	400,00	43.940.000	900,00	250.000.000	900,00	249.500.000	100,00	99,80	2000,00	195.000.000	400,00	43.940.000	20,00	22,53			
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Presentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT	100,00	1.555.692.878	0,00	38.647.500	100,00	243.599.620	100,00	224.541.800	100,00	92,18	100,00	942.933.000	0,00	38.647.500	0,00	4,10			
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	5,00	1.555.692.878	0,00	38.647.500	25,00	243.599.620	25,00	224.541.800	100,00	92,18	5,00	942.933.000	0,00	38.647.500	0,00	4,10			
3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah kegiatan dalam mendukung pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota	25,00	942.933.000	0,00	38.647.500	3/1316	243.599.620	3/1316	224.541.800	100,00	92,18	25,00	942.933.000	0,00	38.647.500	0,00	4,10			
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan bina kelompok petani	100,00	2.588.735.195	11,11	165.061.200	100,00	2.769.499.740	100,00	2.386.216.925	100,00	86,16	9,00	9.477.476.600	11,11	165.061.200	123,46	1,74			
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kegiatan Penyuluhan Yang Dilaksanakan	114,00	13.193.645.081	11,11	165.061.200	18,00	2.769.499.740	18,00	2.386.216.925	100,00	86,16	18,00	9.477.476.600	11,11	165.061.200	61,73	1,74			
3.27.07.2.01.01	Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah aktivitas peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa yang dilaksanakan	20,00	141.998.000			40,00	255.000.000	40,00	228.714.600	100,00	89,69	20,00	141.998.000				0,00	0,00		
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelompok tani yang ditingkatkan kompetensinya	256,00	8.785.478.700	0,00	9.528.200	44,00	2.364.499.910	44,00	2.017.630.950	100,00	85,33	256,00	8.785.478.700	0,00	9.528.200	0,00	0,11			
3.27.07.2.01.05	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	jumlah aktifitas penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian yang dilaksanakan	6,00	549.999.900	2,00	155.533.000	5,00	149.999.830	5,00	139.871.375	100,00	93,25	6,00	549.999.900	2,00	155.533.000	33,33	28,28			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN																			Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian	
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase rekomendasi kebijakan industri kecil menengah pada RPI Kabupaten yang dilaksanakan	50	575.222.239	0	0	50	39.999.720	50	39.999.720	100,00	100,00	50	100.000.000	0	0	0,00	0,00			
		Persentase peningkatan nilai penjualan (omset) IKM	2,5	2.075.000.000	0	19.633.000	2,5	298.048.660	3	158.981.480	112,80	53,34	2,50	64.114.300	0	19.633.000	0,00	30,62			
		Rasio ketimpangan pendapatan IKM wilayah kecamatan	17	1.269.050.000	0	8.000.000	16,75	168.495.500	17	208.984.000	99,82	124,03	16,75	615.525.250	0	8.000.000	0,00	1,30			
		Persentase cakupan pengembangan sentra industri	75	1.080.000.000	0	0	75	108.995.790	50	199.025.970	66,67	182,60	75	507.221.200	0	0	0,00	0,00			
		Persentase peningkatan sertifikasi standarisasi dan HKI	50	600.000.000	0	0	50	9.999.930	51	9.999.930	102,00	100,00	50	10.000.000	0	0	0,00	0,00			
		Persentase pertumbuhan nilai produksi industri kecil Menengah	1,38	6.049.772.239																	
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Cakupan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	5829	5.599.272.239	20210	487.779.200	1082	755.539.600	857	713.785.780	79,21	94,47	20.346	1.296.860.750	20210	487.779.200	99,33	37,61			
3.31.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri	1	575.222.239	0	0	1	39.999.720	1	39.999.720	100,00	100,00	1	100.000.000	0	0	0,00	0,00			
3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Penguatan Teknologi Informasi bagi IKM (Desa Paspan Kec. Glagah dan Desa Pesucen Kec. Kalipuro))	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan kemampuan dan keterampilan	650	550.050.000	5	8.000.000							40	46.889.000	5	8.000.000	12,50	17,06			
3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Gebyar Batik Khas Banyuwangi)	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan kemampuan dan keterampilan	350	350.000.000	0	0							60	544.442.250	0	0	0,00	0,00			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020						Target Program/Kegiatan RPKD tahun berjalan (tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun berjalan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp	K	Rp	Target RPKD Tahun 2021		Realisasi RPKD Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)		K	Rp	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Realisasi Target s/d tahun 2021			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13
3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Pelatihan Keterampilan Produksi Olahahan Tahu Tempe)	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan kemampuan dan keterampilan	358	369.000.000	10	13.125.000							20	24.194.000	10	13.125.000	50,00	54,25		
3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Pelatihan Keterampilan Produksi Olahahan Jamur)	Jumlah IKM yang menerima fasilitas pengembangan teknologi	700	584.000.000	0	0							20	24.091.000	0	0	0,00	0,00		
3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Pelatihan Keterampilan Produksi Gula Semut)	Jumlah IKM yang menerima fasilitas pengembangan teknologi	680	540.000.000	20	19.633.000							20	19.633.000	20	19.633.000	100,00	100,00		
3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Peningkatan Kualitas dan Diversifikasi Produk IKM Keripik (Desa Bulusari Kec. Kalipuro))	Jumlah IKM yang menerima fasilitas pengembangan teknologi	1500	951.000.000	10	6.000.000							20	20.390.300	10	6.000.000	50,00	29,43		
3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sarana Prasarana Industri (pelatihan kemasan)	Jumlah IKM yang menerima fasilitas pengembangan sentra industri	650	580.000.000	15	30.000.000	225	74.149.830	225	55.549.830	100,00	74,92	15	30.000.000	15	30.000.000	100,00	100,00		
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah IKM yang menerima fasilitas pengembangan sentra industri	250	500.000.000	150	403.721.200	100	164.845.960	100	143.476.140	100,00	87,04	150	477.221.200	150	403.721.200	100,00	84,60		
3.31.02.2.01.06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah IKM yang dievaluasi	690	600.000.000	20.000	7.300.000	25	9.999.930	25	9.999.930	100,00	100,00	20.000	10.000.000	20.000	7.300.000	100,00	73,00		
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase ketersediaan informasi industri dalam Sistem Informasi Industri Nasional	0,5	159.204.533	0	0	50	43.149.800	64	43.142.980	128,00	99,98	50	86.000.000	0	0	0,00	0,00		
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUL, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	100	100.000.000	40	83900000	100	43.149.800	100	43.142.980	100,00	99,98	40	86.000.000	40	83900000	100,00	97,56		
3.31.04.2.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan kemampuan dan keterampilan	100	100.000.000	40	83.900.000	100	43.149.800	100	43.142.980	100,00	99,98	40	86.000.000	40	83.900.000	100,00	97,56		
	URUSAN SEKRETARIAT DAERAH																		Sekretariat Daerah	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		80	63.242.728.600	27	20.246.587		37.357.992.404		32.174.598.638		0,86	80	63.242.728.600	27	20.246.587	27,49	0,03		
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan		100	1.005.000.000	31	0		2.972.750.504		2.574.076.655		0,87	100	1.005.000.000	31	0	31,25	0,00		
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah dokumen evaluasi kinerja kecamatan	5	1.000.000.000	0	0							1	200.000.000	0	0	0,00			
		Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja kelurahan	140	0	7								28		7		7,00			
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah dokumen penetapan dan penegasan batas	5	2.775.000.000	0	0							1	555.000.000	0	0	0,00			
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah dokumen LPPD yang tersusun	5	1.250.000.000	1	0							1	250.000.000	1	0	1,00			
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah		100	200.000.000	45	0		265.714.000		169.323.000		0,64	100	200.000.000	45	0	45,30	0,00		
4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah dokumen kerjasama dalam negeri	195	500.000.000	7	0							39	100.000.000	7	0	7,00			
		Jumlah fasilitas kerjasama dalam negeri	195		7	0							39		7	0	7,00			
4.01.02.2.04.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan kerjasama	5	500.000.000	1	0							1	100.000.000	1	0	1,00			
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		100	60.687.729.400	0	0		32.503.368.000		27.957.794.500		0,86	100	60.687.729.400	0	0	0,00	0,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020					Target Program/Kegiatan RKPd tahun berjalan (tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun berjalan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
			K	Rp	K	Rp	Target RKPd Tahun 2021		Realisasi RKPd Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)		K	Rp	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Realisasi Target s/d tahun 2021			
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Kajian Hibah Organisasi Keagamaan dan Kesejahteraan Rakyat	4250	300.438.647.000	0	0							850	60.087.729.400	0	0	0,00			
		Jumlah Kegiatan Hari Besar Keagamaan	25		0								5		0		0,00			
		Jumlah Kegiatan Pembinaan Bina Mental Spiritual	20		0								4		0		0,00			
		Jumlah Kegiatan Event Keagamaan, Pendidikan, dan Kebudayaan	25		0								5		0		0,00			
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat	20	2.625.000.000	0	0							4	525.000.000	0	0	0,00			
4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Monev Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat	30	375.000.000	0	0							6	75.000.000	0	-	0,00			
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		100	1.349.999.200	33	20.246.587		1.616.159.900		1.473.404.483		0,91	100	1.349.999.200	33	20.246.587	33,42	1,50		
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah produk hukum daerah yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintah daerah	3000	1.250.000.000	46	20.246.587							600	250.000.000	46	20.246.587	46,00			
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah perkara masyarakat miskin yang ditangani	105	3.499.997.500	18	0							21	699.999.500	18	-	18,00			
		Jumlah perkara yang ditangani	30		3								6		3		3,00			
		Jumlah peserta peningkatan kesadaran hukum	750		0								150		0		0,00			
		Jumlah peserta teleconference/sosialisasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan	1000		0								200		0		0,00			
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah himpunan perbup, keputusan bupati dan lembaran daerah yang terdokumentasi	1750	1.999.998.500	200	0							350	399.999.700	200	-	200,00			
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		80	8.529.159.150	11	136.075.800		4.219.270.870		1.580.769.478		0,37	80	8.529.159.150	11	136.075.800	10,94	1,60		
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		100	1.153.905.500	19	32.851.100		1.016.810.590		593.233.618		0,58	100	1.153.905.500	19	32.851.100	18,75	2,85		
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Laporan Kinerja Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	10	745.499.500	0	7.721.500							2	149.099.900	0	7.721.500	0,00			
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan Hasil Koordinasi Peningkatan Pelayanan Angkutan	10	3.524.028.000	0	5.319.600							2	704.805.600	0	5.319.600	0,00			
		Laporan Hasil Pantauan Perkembangan Inflasi Daerah	10		1								2		1		1,00			
		Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai	10		0								2		0		0,00			
		Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai	10		1								2		1		1,00			
		Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Peredaran Pupul Bersubsidi	10		0								2		0		0,00			
4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Laporan Kinerja Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Dukungan Pengembangan Usaha Mikro	10	1.250.000.000	1	14.430.000							2	250.000.000	1	14.430.000	1,00			
4.01.03.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Laporan Perkembangan Pendirian dan Pengembangan PT. BPR Svariah	10	250.000.000	0	5.380.000							2	50.000.000	0	5.380.000	0,00			
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam		100	6.094.586.200	0	9.180.700		2.040.002.840		172.202.600		0,08	100	6.094.586.200	0	9.180.700	0,00	0,15		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020					Target Program/Kegiatan RPKD tahun berjalan (tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun berjalan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
			K	Rp	K	Rp	Target RPKD Tahun 2021		Realisasi RPKD Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Realisasi Target s/d tahun 2021					
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah dokumen hasil koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan, perdagangan, perindustrian, KUKM, Penanaman modal, Tenaga Kerja	10	30.472.931.000	0	9.180.700							2	6.094.586.200	0	9.180.700	0,00			
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		100	99.999.900	0	6.171.000		128.254.000		76.720.000		0,60	100	99.999.900	0	6.171.000	0,00	6,17		
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan Realisasi APBD Kabupaten Banyuwangi	10	499.999.500	0	6.171.000							2	99.999.900	0	6.171.000	0,00			
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		100	1.180.667.550	25	87.873.000		1.034.203.440		738.613.260		0,71	100	1.180.667.550	25	87.873.000	25,00	7,44		
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah laporan pengadaan barang dan jasa	60	3.903.357.000	3	-							12	780.671.400	3	0	3,00			
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah laporan proses pengadaan barang dan jasa yang terfasilitasi	60	1.000.000.000	3	67.883.100							12	200.000.000	3	67.883.100	3,00			
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah laporan pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa	60	999.980.750	3	19.989.900							12	199.996.150	3	19.989.900	3,00			
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		85	67.381.811.162	21	7.367.463.273		72.675.765.632		66.800.490.038		0,92	85	67.381.811.162	21	7.367.463.273	19,74	10,93		
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100	150.000.000	23	13.324.400		130.000.000		98.988.200		0,76	100	150.000.000	23	13.324.400	22,50	8,88		
4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan	25	375.000.000	1	13.324.400							5	75.000.000	1	13.324.400	1,00			
4.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20	375.000.000	1	-							4	75.000.000	1	0	1,00			
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100	25.086.767.370	50	4.046.469.066		22.916.071.021		19.942.121.306		0,87	100	25.086.767.370	50	4.046.469.066	49,51	16,13		
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemenuhan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	60	121.933.836.850	3	3.948.897.166							12	24.386.767.370	3	3.948.897.166	3,00			
4.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	20	500.000.000	4	97.571.900							4	100.000.000	4	97.571.900	4,00			
4.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan	85	3.000.000.000	4	0							17	600.000.000	4	0	4,00			
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100	426.752.900	0	0							100	426.752.900	0	0	0,00	0,00		
4.01.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah ID PNS pemkab yang dicetak	5000	250.000.000	0	0							1000	50.000.000	0	0	0,00			
4.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	9875	1.883.764.500	0	0							1975	376.752.900	0	0	0,00			
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	1.464.832.750	16	164.329.042							100	1.464.832.750	16	164.329.042	15,56	11,22		
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	2250	7.324.163.750	70	164.329.042							450	1.464.832.750	70	164.329.042	70,00			
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		85	800.000.000	25	186.849.249							85	800.000.000	25	186.849.249	25,00	23,36		
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pemenuhan pembayaran gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	60	1.000.000.000	3	36.849.249							12	200.000.000	3	36.849.249	3,00			
4.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pemenuhan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	60	3.000.000.000	3	150.000.000							12	600.000.000	3	150.000.000	3,00			
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi		100	1.200.000.000	25	87.368.847		1.829.107.200		1.579.418.268		0,86	100	1.200.000.000	25	87.368.847	24,96	7,28		
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah SKPD yang tepat fungsi dan tepat dan tepat ukuran	280	1.314.000.000	0	37.164.816							56	262.800.000	0	37.164.816	0,00			
4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah SKPD yang mempunyai Standar pelayanan	280	1.500.000.000	0	-							56	300.000.000	0	0	0,00			
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah aplikasi e-kinerja yang dikembangkan	5	2.186.000.000	1	27.564.000							1	437.200.000	1	27.564.000	1,00			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020						Target Program/Kegiatan RKPd tahun berjalan (tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun berjalan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
			Target RKPd Tahun 2021		Realisasi RKPd Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Realisasi Target s/d tahun 2021										
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13	
		Jumlah Dokumen Road Map reformasi birokrasi yang disusun	5		0								1		0		0,00				
		Jumlah SKPD yang melaksanakan program Reformasi dengan baik (menjadi sampel Penilaian reformasi birokrasi)	75		0								15		0		0,00				
		Jumlah SKPD yang mempunyai kelompok budaya	50		0								10		0		0,00				
4.01.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen hasil Monev kinerja pelayanan publik	5	1.000.000.000	1	22.640.031							1	200.000.000	1	22.640.031	1,00				
		Jumlah SKPD yang mempunyai Standar Pelayanan	285		0								57		0		0,00				
		Rata-Rata Jumlah pengaduan publik yang masuk dalam 1 bulan	1500		74								300		74		74,00				
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		100	4.749.988.000	26	359.242.995	6.700.752.250		6.516.676.341		0,97	100	4.749.988.000	26	359.242.995	0,00	7,56				
4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Dialog/Audiensi dengan Tokoh-tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan	875	7.500.000.000	22	23.988.700							175	1.500.000.000	22	23.988.700	0,00				
4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	rakor muspida	375	9.999.945.000	30	46.024.000							75	1.999.989.000	30	46.024.000	0,00				
4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah dokumentasi tugas-tugas Bupati dan Wakil Bupati	20	6.249.995.000	1	289.230.295							4	1.249.999.000	1	289.230.295	0,00				
4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100	700.000.000	8	30.039.900	731.288.900		551.958.623		0,75	100	700.000.000	8	30.039.900	8,33	4,29				
4.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen pelaporan analisa dan distribusi barang , dokumen pelaporan daftar kebutuhan barang sekretariat daerah	100	500.000.000	0	9.800.000							20	100.000.000	0	9.800.000	0,00				
4.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen pelaporan analisa kebutuhan dan distribusi barang sekretariat daerah	75	500.000.000	0	0							15	100.000.000	0	0	0,00				
4.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah barang yang terpasang	60	2.500.000.000	3	20.239.900							12	500.000.000	3	20.239.900	3,00				
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100	199.680.000	0	0	2.542.898.315		2.021.623.905		0,80	100	199.680.000	0	0	0,00	0,00				
4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	2000	998.400.000	0	0							400	199.680.000	0	0	0,00				
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	9.312.535.200	22	831.848.200	11.701.565.952		11.515.949.094		0,98	100	9.312.535.200	22	831.848.200	21,94	8,93				
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah jenis komponen instalasi listrik yang tersedia	380	999.998.000	76	197.370.600							76	199.999.600	76	197.370.600	76,00				
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	305	8.949.328.500	7	300.969.500							61	1.789.865.700	7	300.969.500	7,00				
4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	285	2.304.678.500	17	55.311.300							57	460.935.700	17	55.311.300	17,00				
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (BBM)	60	32.009.825.500	2	249.002.900							12	6.401.965.100	2	249.002.900	2,00				
		jumlah jenis makanan dan minuman yang disediakan	130		6								26		6		6,00				
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan barang cetakan	30	749.996.000	0	0							6	149.999.200	0	0	0,00				
		Penyediaan penggandaan (fotokopi)	30000		0	0							6000		0	0	0,00				
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	20	374.991.000	1	0							4	74.998.200	1	0	1,00				
4.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	jumlah bahan/material sanitary	75	1.123.858.500	2	29.193.900							15	224.771.700	2	29.193.900	2,00				
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah jenis makanan dan minuman yang disediakan	5	50.000.000	0	0							1	10.000.000	0	0	0,00				
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	4.041.757.000	0	0	7.522.644.810		6.853.760.785		0,91	100	4.041.757.000	0	0	0,00	0,00				
4.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	10	17.494.739.000	0	0							2	3.498.947.800	0	0	0,00				
4.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang disediakan	10	778.955.000	0	0							2	155.791.000	0	0	0,00				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020					Target Program/Kegiatan RKPd tahun berjalan (tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun berjalan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Tingkat Realisasi (%)	K	Rp	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Realisasi Target s/d tahun 2021				
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
4.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang disediakan	15	1.935.091.000	0	0					3	387.018.200	0	0	0,00					
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	9.682.969.155	55	1.449.810.824		7.605.129.457		7.085.801.858	0,93	100	9.682.969.155	55	1.449.810.824	54,59	14,97			
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	20	499.999.000	1	0					4	99.999.800	1	0	1,00					
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	60	7.988.398.775	3	339.542.524					12	1.597.679.755	3	339.542.524	3,00					
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah jenis jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	90	16.500.000.000	7	619.015.300					18	3.300.000.000	7	619.015.300	7,00					
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah jasa kebersihan dan administrasi perkantoran yang tersedia	4140	23.426.448.000	2478	491.253.000					828	4.685.289.600	2478	491.253.000	2478,00					
		jumlah aktifitas layanan kedinasan Sekretaris Daerah	60		3						12		3		3,00					
		jumlah aktivitas kegiatan korsik	375		0						75		0		0,00					
		jumlah jenis barang dan jasa KDH/WKDH yang diadakan	145		2						29		2		2,00					
		jumlah waktu terfasilitasinya staf ahli bupati	60		2						12		2		2,00					
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	6.909.410.987	4	69.552.500		7.438.512.127		7.352.212.400	0,99	100	6.909.410.987	4	69.552.500	4,29	1,01			
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas oprasional yang dipelihara	155	10.499.950.000	2	53.652.500					31	2.099.990.000	2	53.652.500	2,00					
4.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	jumlah mebeleur yang dipelihara	500	500.000.000	0	0					100	100.000.000	0	0	0,00					
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah jenis perlengkapan kantor yang dipelihara	20	1.249.605.000	0	0					4	249.921.000	0	0	0,00					
		jumlah peralatan kerja yang di perbaiki	25		0	0					5		0	0	0,00					
4.01.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah jenis perlengkapan kantor yang dipelihara	15	1.037.500.000	0	0					3	207.500.000	0	0	0,00					
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor yang dipelihara	70	19.499.999.935	1	15.900.000					14	3.899.999.987	1	15.900.000	1,00					
		jumlah ruang terbuka hijau (RTH) yang ditata	10		0						2		0		0,00					
		jumlah ruang terbuka hijau yang dipelihara	5		0						1		0		0,00					
4.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah jenis perlengkapan rumah jabatan / dinas yang dipelihara	60	1.760.000.000	3	0					12	352.000.000	3	0	3,00					
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		100	349.985.200	8	0		1.274.977.200		1.014.624.658	0,80	100	349.985.200	8	0	8,33	0,00			
4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah jenis pakaian dinas beserta perlengkapannya yang disediakan	45	999.926.000	0	0					9	199.985.200	0	0	0,00					
		Jumlah pakaian khusus hari tertentu KDH / WKDH yang disediakan	85		0						17		0		0,00					
4.01.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Waktu medical check up kepala daerah dan wakil kepala daerah	20	750.000.000	1	0					4	150.000.000	1	0	1,00					
4.01.01.2.12	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		100	2.307.132.600	17	128.628.250		2.282.818.400		2.267.354.600	0,99	100	2.307.132.600	17	128.628.250	16,67	5,58			
4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	60	8.669.375.000	3	94.832.000					12	1.733.875.000	3	94.832.000	3,00					
4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	60	1.616.288.000	1	12.484.250					12	323.257.600	1	12.484.250	1,00					
4.01.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	60	1.250.000.000	2	21.312.000					12	250.000.000	2	21.312.000	2,00					
4.02	SEKRETARIAT DPRD																		Sekretariat DPRD	
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	472	201.253.291.075	10,11	8.364.616.519	0	42.710.018.699	0	40.000.255.443	0	0	93,5	42.998.600.878	10,11	8.364.616.519	0,11	0,19		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020						Target Program/Kegiatan RPKD tahun berjalan (tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun berjalan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp	K	Rp	Target RKPd Tahun 2021		Realisasi RKPd Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)		K	Rp	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Realisasi Target s/d tahun 2021			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah pimpinan dan anggota DPRD yang ikut Bimtek	1.000	29.487.098.410	50	890.951.700	0	5.152.200.600	0	4.556.908.531	0	0	200	6.110.680.600	50	890.951.700	0,25	0,15		
4.02.02.2.04.02	Bimbingan teknis DPRD	Jumlah fasilitasi bimtek DPRD	1.000	11.419.183.910	50	579.357.700	200	2.083.136.000	192	1.617.148.631	96	77,63	200	2.397.800.000	50	579.357.700	0,25	0,24		
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan dokumentasi dewan	Jumlah publikasi dan dokumentasi	432.780	11.500.000.000	2564	248.730.000	86.556	1.991.481.500	103605	1.988.972.500	119,70	99,87	98.344	2.299.999.500	2.564	248.730.000	0,03	0,11		
4.02.02.2.04.04	Penyediaan kelompok pakar dan tim ahli	Jumlah pakar dan tim ahli	1.000	1.527.500.000	0	0	1.000	269.909.500	188	164.909.500	18,8	61,10	531	269.999.900	0	0	0,00	0,00		
4.02.02.2.04.05	Penyediaan tenaga ahli fraksi	Jumlahh tenaga ahli fraksi	420	1.489.607.500	21	49.000.000	84	297.909.200	90	294.000.000	107,14	98,69	84	297.921.300	21	49.000.000	0,25	0,16		
4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan hubungan masyarakat dan Aksi masyarakat	Jumlah fasilitasi hubungan masyarakat	188.000	2.802.772.000	0	0	39.831	501.374.400	24789	483.487.900	62,24	96,43	41.632	660.553.200	0	0	0,00	0,00		
4.02.02.2.04.07	Penyusunan program kerja DPRD	Jumlah program kerja DPRD yang disusun	5	748.035.000	1	13.864.000	1	8.390.000	1	8.390.000	100	100,00	1	184.406.700	1	13.864.000	1,00	0,08		
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan aspirasi rakyat	Cakupan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	500	17.848.051.336	50	1.435.793.800	0	5.052.394.300	0	4.967.646.200	0	0	100	3.005.887.600	50	1.435.793.800	0,50	0,48		
4.02.02.2.05.01	Kunjungan kerja dalam daerah	Jumlah laporan kunker dalam daerah	2.550	1.479.990.500	0	0	510	61.445.000	22	44.900.000	4,31	73,07	24	36.689.400	0	0	0,00	0,00		
4.02.02.2.05.02	Penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD	Jumlah pokok-pokok pikiran yang disusun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan reses	Jumlah peserta reses	75.000	16.368.060.836	7840	1.435.793.800	10.000	4.990.949.300	19900	4.922.746.200	199	98,63	22.500	2.969.198.200	7.840	1.435.793.800	0,35	0,48		
4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah laporan Pengawasan kode etik yang difasilitasi	50	4.140.353.000	2	89.343.000	0	71.330.000	0	106.710.000	0	0	10	353.643.800	2	89.343.000	0,20	0,25		
4.02.02.2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah fasilitasi pengawasan Kode Etik DPRD	50	4.140.353.000	2	89.343.000	10	71.330.000	3	106.710.000	30	149,60	10	353.643.800	2	89.343.000	0,20	0,25		
4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Jumlah fasilitasi bahan komunikasi dan publikasi	5	745.300.000	0	3.700.000	0	77.273.800	0	72.765.800	0	0	1	99.999.800	0	3.700.000	0,00	0,04		
4.02.02.2.07.02	Penyusunan bahan komunikasi dan publikasi	jumlah aplikasi yang dikembangkan	5	745.300.000	0	3.700.000	1	77.273.800	3	72.765.800	300	94,17	1	99.999.800	0	3.700.000	0,00	0,04		
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah dokumen fasilitasi tugas DPRD	330	13.544.760.268	12	8.364.616.519	0	2.544.476.400	0	1.914.806.203	0	0	59	4.432.235.800	12	8.364.616.519	0,20	1,89		
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	Jumlah fasilitasi koordinasi dan konsultasi pelaks tugas DPRD	175	8.600.000.000	9	534.289.587	30	2.002.914.000	30	1.473.050.755	100	73,55	35	2.996.286.000	9	534.289.587	0,26	0,18		
4.02.02.2.08.02	Penyusunan laporan kinerja DPRD	Jumlah laporan kinerja DPRD yang disusun	500	250.000.000	0	0	100	33.774.500	0	6.368.000	0	18,85	100	50.000.000	0	0	0,00	0,00		
4.02.02.2.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan tugas Badan Musyawarah	Jumlah laporan Kegiatan Banmus	100	3.129.150.000	3	215.980.000	32	458.775.900	50	409.384.400	156,25	89,23	18	1.086.035.800	3	215.980.000	0,17	0,20		
4.02.02.2.08.04	Fasilitasi tugas Pimpinan DPRD	Jumlah undangan yang dihadiri	50	1.565.610.268	0	0	10	49.012.000	13	26.003.048	130	53,05	6	299.914.000	0	0	0,00	0,00		
	URUSAN PERENCANAAN																		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAG	
50101	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	94	35.794.278.930	24	1.451.079.645	93	8.290.520.924	93	7.376.922.915	100	89	94	8.835.617.238	24	1.451.079.645	25,67	16,42		
50101201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	65	980.582.000	8	66.677.100	100	434.601.923	100	427.111.523	100	98	9	196.116.400	8	66.677.100	88,89	34,00		
5010120101	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	30	695.114.000	1	9.583.500	6	210.217.413	6	205.080.213	100	98	2	139.022.800	1	9.583.500	50,00	6,89		
5010120106	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen evaluasi dan laporan capaian kinerja, website yang dipelihara, sdm yang ditingkatkan kapasitasnya	35	285.468.000	7	57.093.600	7	224.384.510	7	222.031.310	100	99	7	57.093.600	7	57.093.600	100,00	100,00		
50101202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	100	28.812.414.765	25	1.102.185.910	100	5.762.482.953	64	5.058.916.035	64	88	100	5.989.998.332	25	1.102.185.910	25,00	18,40		
5010120201	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen penyediaan gaji dan ASN	70	28.812.414.765	3	1.102.185.910	14	5.762.482.953	9	5.058.916.035	64	88	14	5.989.998.332	3	1.102.185.910	21,43	18,40		
50101205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat	100	230.000.000	0	0	100	125.429.930	0	120.439.930	0	96	100	61.726.400	0	0	0,00	0,00		
5010120509	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitasnya	225	230.000.000	0	0	45	125.429.930	0	120.439.930	0	96	41	61.726.400	0	0	0,00	0,00		
50101206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat	100	2.850.445.065	25	181.111.200	100	1.234.520.155	73	1.171.218.648	73	95	100	1.728.928.300	25	181.111.200	25,00	10,48		
5010120601	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	2000	100.000.000	16	22.973.600	785	39.999.981	785	39.999.861	100	100	18	39.999.800	16	22.973.600	88,89	57,43		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020						Target Program/Kegiatan RPKD tahun berjalan (tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun berjalan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp	K	Rp	Target RPKD Tahun 2021		Realisasi RPKD Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)		K	Rp	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Realisasi Target s/d tahun 2021			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13
5010120602	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	50	50.000.000	4	22.397.700	32	104.977.710	32	104.177.710	100	99	29	239.999.800	4	22.397.700	13,79	9,33		
5010120603	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	3115	100.000.000	8	26.229.000	1515	109.999.140	1515	100.662.230	100	92	20	69.998.900	8	26.229.000	40,00	37,47		
5010120604	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik yang disediakan	50080	560.000.000	0	0	10016	160.000.000	10016	157.075.000	100	98	12	161.997.000	0	0	0,00	0,00		
5010120605	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	42500	75.000.000	7000	16.558.500	17274	49.999.910	14239	49.963.220	82	100	17288	35.000.000	7000	16.558.500	40,49	47,31		
5010120606	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	15970	75.059.000	400	2.463.300	3194	15.011.800	1840	15.011.800	58	100	2943	15.009.300	400	2.463.300	13,59	16,41		
5010120608	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terfasilitasinya kunjungan tamu	4400	125.000.000	3	21.967.000	880	66.265.250	457	55.307.000	52	83	12	74.935.000	3	21.967.000	25,00	29,31		
5010120609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi	7500	1.765.386.065	3	68.522.100	2078	688.266.364	1079	649.021.827	52	94	12	1.091.988.500	3	68.522.100	25,00	6,27		
50101207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	100	99.837.100			100	0	0	0				0						
5010120709	Pengadaan Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor atau bangunan lainnya	1	99.837.100					0	0			0	0						
50101208	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	100	2.646.000.000	25	88.941.435	100	553.549.643	87	420.477.209	87	76	100	578.898.106	25	88.941.435	25,00	15,36		
5010120801	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Tersedianya materai	2500	25.000.000	250	2.500.000	500	5.000.000	500	5.000.000	100	100	500	5.000.000	250	2.500.000	50,00	50,00		
5010120802	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60	650.000.000	3	37.541.435	12	149.099.643	9	123.427.209	75	83	12	157.498.106	3	37.541.435	25,00	23,84		
5010120804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum yang disediakan	1140	1.971.000.000	60	48.900.000	228	399.450.000	135	292.050.000	59	73	240	416.400.000	60	48.900.000	25,00	11,74		
50101209	Peeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	100	175.000.000	25	12.164.000	100	179.936.320	64	178.759.570	64	99	100	279.949.700	25	12.164.000	25,00	4,35		
5010120901	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara dan pajak kendaraan yang dibayarkan	18	50.000.000	2	7.164.000	6	44.991.550	2	43.814.800	33	97	8	44.999.700	2	7.164.000	25,00	15,92		
5010120906	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	150	50.000.000		0	170	84.945.300	110	84.945.300	65	100	110	39.950.000		0	0,00	0,00		
5010120911	Pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara/direhabilitasi	10	75.000.000	0	5.000.000	5	49.999.470	3	49.999.470	60	100	1	195.000.000	0	5.000.000	0,00	2,56		
50102	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Ketepatan dalam Tahapan Pelaksanaan Perencanaan	100	11.176.414.957	25	206.496.200	90	2.120.907.060	90	2.099.273.682	100	99	100	1.961.414.800	25	206.496.200	25,00	10,53		
50102201	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Aktiivitas dan dokumen perencanaan dan pendanaan	65	8.176.414.957	3	196.915.200	100	1.716.258.450	62	1.695.560.922	62	99	8	1.670.000.000	3	196.915.200	37,50	11,79		
5010220103	Pelaksanaan konsultasi publik	Jumlah Aktiivitas pelaksanaan konsultasi publik	10	324.997.400	1	51.000.000	2	56.799.980	2	56.799.980	100	100	1	75.000.000	1	51.000.000	100,00	68,00		
5010220104	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Aktiivitas pelaksanaan forum SKPD/lintas SKPD	10	814.998.900	0	0	2	104.671.280	2	104.671.280	100	100	1	95.000.000	0	0	0,00	0,00		
5010220105	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Aktiivitas pelaksanaan musrenbang Kabupaten/Kota	10	1.284.998.650	0	0	2	220.528.380	2	220.528.280	100	100	1	210.000.000	0	0	0,00	0,00		
5010220106	Penyiapan bahan koordinasi musrenbang kecamatan	Jumlah Dokumen bahan Musrenbang Kecamatan	5	519.999.050	1	134.991.200	1	102.804.610	1	102.804.610	100	100	1	135.000.000	1	134.991.200	100,00	99,99		
5010220107	Koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen perencanaan pembangunan daerah	30	5.231.420.957	1	10.924.000	6	1.231.454.200	3	1.210.756.772	50	98	4	1.155.000.000	1	10.924.000	25,00	0,95		
50102203	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Monev Perangkat Daerah	88	3.000.000.000	0	9.581.000	100	404.648.610	84	403.712.760	84	100	15	291.414.800	0	9.581.000	0,00	3,29		
5010220301	Koordinasi pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Banyuwangi	Jumlah dokumen hasil Koordinasi pengendalian perencanaan pelaksanaan pembangunan daeah	60	119.976.750	0	9.581.000	12	6.531.250	12	6.531.250	100	100	12	99.975.000	0	9.581.000	0,00	9,58		
5010220303	Monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah	Dokumen monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah	28	2.880.023.250	0	0	7	398.117.360	4	397.181.510	57	100	3	191.439.800	0	0	0,00	0,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020						Target Program/Kegiatan RKPd tahun berjalan (tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun berjalan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
			K	Rp	K	Rp	Target RKPd Tahun 2021		Realisasi RKPd Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)		K	Rp	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Realisasi Target s/d tahun 2021				
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp			K
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10				11	12	13
50103	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rata rata nilai komponen perencanaan kinerja perangkat daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	28	14.060.075.183	14	486.709.501	80	4.935.089.860	80	4.779.479.355	100	97	29	6.023.473.200	14	486.709.501	49,12	8,08			
50103201	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah aktivitas dan dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan pemerintahan dan pembangunan manusia	183	4.459.075.183	8	85.450.501	100	1.450.363.310	54	1.387.028.191	54	96	80	1.675.164.300	8	85.450.501	10,00	5,10			
5010320101	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan	10	875.000.000	0	11.274.900	2	461.352.190	0	461.078.600	0	100	3	599.137.500	0	11.274.900	0,00	1,88			
5010320104	Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan	Jumlah aktivitas Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan	60	499.982.050	0	10.428.301	12	41.260.340	3	32.759.700	25	79	36	173.523.500	0	10.428.301	0,00	6,01			
5010320105	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia	5	374.982.850	0	8.010.600	1	73.363.070	0	70.818.350	0	97	5	617.404.100	0	8.010.600	0,00	1,30			
5010320108	Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia	Jumlah Aktivitas Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia	108	2.709.110.283	8	55.736.700	24	874.387.710	18	822.371.541	75	94	36	285.099.200	8	55.736.700	22,22	19,55			
50103202	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah aktivitas dan dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan pemerintahan dan pembangunan manusia	609	4.426.000.000	6	368.713.600	100	2.109.735.880	65	2.019.725.494	65	96	122	2.479.898.400	6	368.713.600	4,92	14,87			
5010320201	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian	5	1.250.000.000	0	3.196.800	3	563.717.310	3	563.717.310	100	100	1	79.676.800	0	3.196.800	0,00	4,01			
5010320204	Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian	Jumlah Aktivitas Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian	486	1.149.993.960	6	153.587.700	36	572.457.470	36	564.957.470	100	99	60	1.135.677.500	6	153.587.700	10,00	13,52			
5010320205	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA (RPJPD,RPJMD dan RKPd)	Jumlah Dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA	10	1.074.996.600	0	3.196.800	2	188.569.320	1	106.058.934	50	56	1	79.676.800	0	3.196.800	0,00	4,01			
5010320208	Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang SDA	Jumlah Aktivitas Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang SDA	108	951.009.440		208.732.300	48	784.991.780	36	784.991.780	75	100	60	1.184.867.300		208.732.300	0,00	17,62			
50103203	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Jumlah aktivitas dan dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan wilayah	33	5.175.000.000	0	32.545.400	100	1.374.990.670	44	1.372.725.670	44	100	33	1.868.410.500	0	32.545.400	0,00	1,74			
5010320301	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur	9	1.449.997.400	0	26.122.300	4	753.925.990	2	752.260.990	50	100	7	1.216.823.900	0	26.122.300	0,00	2,15			
5010320304	Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur	Jumlah Aktivitas Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur	5	750.000.000	0								12	199.500.000	0		0,00	0,00			
5010320305	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang wilayah (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang wilayah	14	2.225.002.600	0	6.423.100	5	621.064.680	2	620.464.680	40	100	2	252.586.600	0	6.423.100	0,00	2,54			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020						Target Program/Kegiatan RKPd tahun berjalan (tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun berjalan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp	K	Rp	Target RKPd Tahun 2021		Realisasi RKPd Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)		K	Rp	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Realisasi Target s/d tahun 2021			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13
5010320308	Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan	Jumlah Aktivitas Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan	5	750.000.000	0	0							12	199.500.000	0	0	0,00	0,00		
05:02	KEUANGAN																		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
05:02:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	95,00	47.580.500.000	93,50	1.786.641.358	92,50	10.785.207.133	92,50	9.644.731.683	100,00	89,43	93,50	10.550.459.558	93,50	1.786.641.358	100,00	16,93		
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	2,00	820.000.000	2,00	22.533.300	100,00	153.679.560	100,00	143.503.360	100,00	93,38	2,00	113.936.500	2,00	22.533.300	100,00	19,78		
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	35,00	410.000.000	1,00	12.558.600	7,00	76.839.780	7,00	71.711.680	100,00	93,33	7,00	56.031.000	1,00	12.558.600	14,29	22,41		
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	35,00	410.000.000	4,00	9.974.700	7,00	76.839.780	7,00	71.791.680	100,00	93,43	7,00	57.905.500	4,00	9.974.700	57,14	17,23		
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	3,00	28.410.000.000	3,00	968.143.958	100,00	5.517.728.564	100,00	4.721.063.994	100,00	85,56	3,00	5.758.235.337	3,00	968.143.958	100,00	16,81		
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang disediakan	2450,00	27.500.000.000	114,00	919.663.858	490,00	5.345.378.734	490,00	4.563.470.164	100,00	85,37	490,00	5.552.418.737	114,00	919.663.858	23,27	16,56		
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang disusun	10,00	280.000.000	5,00	39.524.100	5,00	51.175.110	5,00	46.011.110	100,00	89,91	5,00	60.882.100	5,00	39.524.100	100,00	64,92		
5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD yang disusun	780,00	630.000.000	26,00	8.956.000	216,00	121.174.720	216,00	111.582.720	100,00	92,08	156,00	144.934.500	26,00	8.956.000	16,67	6,18		
5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	2,00	245.000.000			100,00	45.248.800	100,00	43.796.800	100,00	96,79	2,00	63.636.800			0,00	0,00		
5.02.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun	10,00	85.000.000			2,00	14.998.830	2,00	14.998.830	100,00	100,00	2,00	14.998.800			0,00	0,00		
5.02.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	5,00	160.000.000			1,00	30.249.970	1,00	28.797.970	100,00	95,20	1,00	48.638.000			0,00	0,00		
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100,00	950.000.000			100,00	122.135.345	100,00	122.135.235	100,00	100,00	100,00	277.742.500			0,00	0,00		
5.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta bimtek	375,00	950.000.000			73,00	122.135.345	73,00	122.135.235	100,00	100,00	75,00	277.742.500			0,00	0,00		
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi umum perangkat daerah	8,00	6.285.500.000	8,00	251.319.400	100,00	1.879.456.836	100,00	1.717.933.776	100,00	91,41	8,00	1.941.955.700	8,00	251.319.400	100,00	12,94		
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1175,00	395.000.000	236,00	49.999.800	446,00	234.950.496	446,00	234.950.496	100,00	100,00	445,00	199.995.300	236,00	49.999.800	53,03	25,00		
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	140,00	1.000.000.000	916,00	49.999.200	3666,00	249.985.640	3666,00	249.977.890	100,00	100,00	28,00	199.993.400	916,00	49.999.200	3271,43	25,00		
5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	5965,00	300.000.000	542,00	54.384.800	#####	213.322.120	#####	213.322.120	100,00	100,00	1193,00	199.992.100	542,00	54.384.800	45,43	27,19		
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	60,00	1.010.000.000	3,00	41.974.800	12,00	298.680.400	12,00	293.177.000	100,00	98,16	12,00	295.022.800	3,00	41.974.800	25,00	14,23		
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	#####	605.000.000	#####	53.640.800	#####	166.492.920	#####	166.464.320	100,00	99,98	#####	149.995.800	#####	53.640.800	28,05	35,76		
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	#####	80.500.000	771,00	1.320.000	3075,00	15.463.000	3075,00	15.228.000	100,00	98,48	3075,00	15.422.400	771,00	1.320.000	25,07	8,56		
5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	150,00	395.000.000			30,00	51.142.260	30,00	41.792.260	100,00	81,72	30,00	70.918.900			0,00	0,00		
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan	500,00	2.500.000.000			100,00	649.420.000	100,00	503.021.690	100,00	77,46	100,00	810.615.000			0,00	0,00		
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	4,00	2.440.000.000	4,00	334.568.900	100,00	834.530.978	100,00	826.692.980	100,00	99,06	4,00	458.949.800	4,00	334.568.900	100,00	72,90		
5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeleur yang diadakan	50,00	280.000.000	31,00	80.421.000	60,00	249.682.598	60,00	248.678.100	100,00	99,60	10,00	199.801.900	31,00	80.421.000	310,00	40,25		
5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	60,00	390.000.000	16,00	195.000.000	26,00	305.271.240	26,00	304.743.240	100,00	99,83	12,00	200.000.000	16,00	195.000.000	133,33	97,50		
5.02.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dibangun	5,00	1.060.000.000			1,00	150.000.000	1,00	148.705.000	100,00	99,14								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020						Target Program/Kegiatan RPKD tahun berjalan (tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun berjalan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp	K	Rp	Target RPKD Tahun 2021		Realisasi RPKD Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)		K	Rp	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Realisasi Target s/d tahun 2021			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13
5.02.01.2.07.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung yang diadakan	60,00	710.000.000	6,00	59.147.900	7,00	129.577.140	7,00	124.566.640	100,00	96,13	12,00	59.147.900	6,00	59.147.900	50,00	100,00		
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	3,00	4.815.000.000	3,00	125.800.000	100,00	1.013.053.550	100,07	992.316.843	100,07	97,95	3,00	1.091.999.921	3,00	125.800.000	100,00	11,52		
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah perangko, materai dan benda pos lainnya yang disediakan	#####	75.000.000			2500,00	15.000.000	2500,00	15.000.000	100,00	100,00	2500,00	15.000.000			0,00	0,00		
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	180,00	1.250.000.000			36,00	295.003.550	36,00	274.366.843	100,00	93,00	36,00	299.999.921			0,00	0,00		
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa jasa pelayanan umum yang disediakan	1980,00	3.490.000.000	99,00	125.800.000	396,00	703.050.000	398,00	702.950.000	100,51	99,99	396,00	777.000.000	99,00	125.800.000	25,00	16,19		
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	6,00	3.615.000.000	6,00	84.275.800	100,00	1.219.373.500	100,00	1.077.288.695	100,00	88,35	6,00	844.003.000	6,00	84.275.800	100,00	9,99		
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara - Jumlah surat kendaraan dinas yang diperpanjang	60,00	240.000.000	75,00	55.095.800	12,00	236.181.000	12,00	221.366.200	100,00	93,73	12,00	209.710.000	75,00	55.095.800	625,00	26,27		
5.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeleur yang dipelihara	50,00	175.000.000			79,00	37.339.500	79,00	37.339.500	100,00	100,00	10,00	37.500.000			0,00	0,00		
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1060,00	450.000.000	39,00	20.030.000	105,00	89.943.000	105,00	89.765.000	100,00	99,80	212,00	122.993.000	39,00	20.030.000	18,40	16,29		
5.02.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	5,00	75.000.000			1,00	15.000.000	1,00	15.000.000	100,00	100,00	1,00	20.000.000			0,00	0,00		
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	25,00	1.000.000.000			1,00	640.310.000	1,00	613.901.995	100,00	95,88	5,00	405.000.000			0,00	0,00		
5.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	10,00	500.000.000	0,00	9.150.000	1,00	200.600.000	1,00	99.916.000	100,00	49,81	2,00	48.800.000	0,00	9.150.000	0,00	18,75		
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase dokumen APBD tepat waktu	100,00	#####			97,00	466.756.008.607	103,09	453.745.147.935	106,28	97,21	1,00	438.769.896.415			0,00	0,00		
		Persentase dokumen pengelolaan perbendaharaan daerah tepat waktu	100,00				100,00		100,00		100,00		1,00				0,00			
		Persentase Perangkat Daerah yang menyusun laporan keuangan tepat waktu	97,00				97,00		103,09		106,28		0,93				0,00			
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Cakupan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	10,00	14.903.000.000	10,00	571.830.100	100,00	3.813.705.320	100,00	3.641.068.310	100,00	95,47	10,00	3.842.683.800	10,00	571.830.100	100,00	14,88		
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah KUA dan PPAS yang disusun	10,00	645.000.000			2,00	141.083.780	2,00	137.470.310	100,00	97,44	2,00	254.692.300			0,00	0,00		
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah perubahan KUA dan perubahan PPAS yang disusun	10,00	620.000.000			2,00	139.234.460	2,00	132.644.320	100,00	95,27	2,00	243.342.500			0,00	0,00		
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA SKPD yang disusun dan diverifikasi	290,00	470.000.000	0,00	10.789.500	#####	101.452.450	#####	100.262.690	100,00	98,83	58,00	97.486.100	0,00	10.789.500	0,00	11,07		
5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA SKPD yang disusun dan diverifikasi	290,00	470.000.000	0,00	13.065.500	#####	100.727.550	#####	100.713.030	100,00	99,99	58,00	98.136.100	0,00	13.065.500	0,00	13,31		
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA SKPD yang disusun dan diverifikasi	290,00	470.000.000	29,00	31.097.300	#####	171.153.070	#####	170.976.960	100,00	99,90	58,00	97.279.200	29,00	31.097.300	50,00	31,97		
5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA SKPD yang disusun dan diverifikasi	290,00	505.000.000			#####	109.404.130	#####	68.494.030	100,00	62,61	58,00	113.523.400			0,00	0,00		
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen Perda tentang APBD dan Perbup tentang penjabaran APBD yang disusun	85,00	6.850.000.000	2,00	489.489.000	6,00	1.836.881.660	6,00	1.775.467.820	100,00	96,66	17,00	1.695.573.100	2,00	489.489.000	11,76	28,87		
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Perda tentang Perubahan APBD dan Prbup tentang Penjabaran Perubahan APBD yang disusun	55,00	3.070.000.000			6,00	754.896.460	6,00	729.337.290	100,00	96,61	11,00	753.957.600			0,00	0,00		
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah dokumen regulasi serta kebijakan bidang anggaran yang disusun	5,00	428.000.000	1,00	27.388.800	1,00	179.570.050	1,00	179.424.410	100,00	99,92	1,00	133.808.100	1,00	27.388.800	100,00	20,47		
5.02.02.2.01.13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pembinaan	1500,00	1.375.000.000			200,00	279.301.710	200,00	246.277.450	100,00	88,18	300,00	354.885.400			0,00	0,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020						Target Program/Kegiatan RKPd tahun berjalan (tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun berjalan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp	K	Rp	Target RKPd Tahun 2021		Realisasi RKPd Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)		K	Rp	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Realisasi Target s/d tahun 2021			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Cakupan koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah	8,00	5.351.500.000	7,00	172.606.300	100,00	1.386.335.825	100,00	1.164.077.750	100,00	83,97	8,00	1.451.564.850	7,00	172.606.300	87,50	11,89		
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Penerbitan SP2D	#####	779.000.000	710,00	66.248.500	#####	300.002.900	#####	269.982.800	100,00	89,99	#####	337.166.600	710,00	66.248.500	0,00	19,65		
5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Anggaran Kas dan SPD	4060,00	775.000.000	100,00	12.286.100	220,00	29.990.400	220,00	27.237.200	100,00	90,82	812,00	31.159.000	100,00	12.286.100	12,32	39,43		
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	25,00	402.500.000	2,00	16.050.000	5,00	183.500.140	5,00	132.427.400	100,00	72,17	5,00	183.500.100	2,00	16.050.000	40,00	8,75		
5.02.02.2.02.06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	15,00	570.000.000									3,00	99.998.950			0,00	0,00		
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah dan Laporan Aliran Kas dan Laporan Rekapitulasi Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	8955,00	480.000.000	275,00	56.056.900	1791,00	291.395.655	1791,00	256.958.050	100,00	88,18	1791,00	294.290.600	275,00	56.056.900	15,35	19,05		
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah BA Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas dan BA Rekonsiliasi Pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	70,00	425.000.000	4,00	21.964.800	32,00	104.950.500	32,00	91.170.000	100,00	86,87	14,00	104.950.500	4,00	21.964.800	28,57	20,93		
5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Perbup tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kab. Banyuwangi	5,00	550.000.000			1,00	99.999.850	1,00	97.063.500	100,00	97,06	1,00	99.938.500			0,00	0,00		
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pembinaan dan sosialisasi	290,00	1.370.000.000			58,00	376.496.380	58,00	289.238.800	100,00	76,82	58,00	300.560.600			0,00	0,00		
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Cakupan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	12,00	7.787.500.000	12,00	358.166.232	100,00	2.782.971.725	100,00	2.594.302.994	100,00	93,22	12,00	2.408.657.600	12,00	358.166.232	100,00	14,87		
5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah dokumen Berita Acara Rekonsiliasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas dengan Kuasa BUD	60,00	295.000.000	3,00	19.969.700	12,00	132.579.280	12,00	127.859.760	100,00	96,44	12,00	85.898.800	3,00	19.969.700	25,00	23,25		
5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah dokumen Berita Acara Rekonsiliasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban dengan SKPD	3480,00	545.000.000	174,00	19.969.700	696,00	354.239.845	696,00	344.649.277	100,00	97,29	696,00	342.714.800	174,00	19.969.700	25,00	5,83		
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	3770,00	545.000.000	174,00	42.459.300	754,00	294.753.500	754,00	282.317.760	100,00	95,78	754,00	222.579.600	174,00	42.459.300	23,08	19,08		
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Banyuwangi	5,00	545.000.000	1,00	142.106.432	1,00	342.232.690	1,00	333.506.606	100,00	97,45	1,00	253.919.500	1,00	142.106.432	100,00	55,97		
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten	20,00	2.065.000.000			2,00	444.283.000	2,00	441.511.000	100,00	99,38	4,00	479.094.000			0,00	0,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020						Target Program/Kegiatan RPKD tahun berjalan (tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun berjalan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
							Target RKPd Tahun 2021		Realisasi RKPd Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Realisasi Target s/d tahun 2021			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13
5.02.02.2.03.06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen atas tanggapan/tindak lanjut terhadap LHP BPK atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun	5,00	322.500.000	0,00	92.307.600	1,00	255.142.580	1,00	186.774.580	100,00	73,20	1,00	219.914.500	0,00	92.307.600	0,00	41,97		
5.02.02.2.03.07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Kerugian Daerah yang sudah dipulihkan	50,00	420.000.000	1,00	25.044.400	10,00	183.909.855	10,00	161.328.395	100,00	87,72	10,00	152.422.500	1,00	25.044.400	10,00	16,43		
5.02.02.2.03.08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun	5,00	295.000.000			1,00	94.147.245	1,00	90.975.355	100,00	96,63	1,00	38.999.700			0,00	0,00		
5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen peraturan yang diterbitkan atau dilakukan perubahan	5,00	295.000.000			1,00	139.950.030	1,00	137.294.590	100,00	98,10	1,00	66.999.800			0,00	0,00		
5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah sistem/prosedur akuntansi dan aplikasi tentang pengelolaan keuangan daerah yang dikembangkan atau dilakukan pemeliharaan	5,00	295.000.000			1,00	75.800.250	1,00	75.789.030	100,00	99,99	1,00	78.000.000			0,00	0,00		
5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah kabupaten yang dilaksanakan	1160,00	1.745.000.000			232,00	410.283.310	232,00	360.187.861	100,00	87,79	232,00	368.114.400			0,00	0,00		
5.02.02.2.03.12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan/sosialisasi/bimbingan teknis tentang pengelolaan keuangan BLUD	40,00	420.000.000	0,00	16.309.100	8,00	55.650.140	8,00	52.108.780	100,00	93,64	8,00	100.000.000	0,00	16.309.100	0,00	16,31		
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Belanja Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	3,00	#####	3,00	111.428.004.225	100,00	458.708.334.627	100,00	446.285.337.771	100,00	97,29	3,00	430.978.015.165	3,00	111.428.004.225	100,00	25,85		
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	belanja bantuan keuangan kepada desa	5,00	1.820.544.871.500	1,00	111.428.004.225	1,00	394.094.931.150	1,00	392.794.921.283	100,00	99,67	1,00	390.784.035.750	1,00	111.428.004.225	100,00	28,51		
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Penyediaan Belanja Bantuan Sosial Tidak Terencana dan Belanja Tidak Terduga	5,00	50.000.000			1,00	40.000.000.000	1,00	29.019.869.108	100,00	72,55	1,00	20.000.000.000			0,00	0,00		
5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	transfer bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa dan pemerintah provinsi	5,00	144.557.387.075			1,00	24.613.403.477	1,00	24.470.547.380	100,00	99,42	1,00	20.193.979.415			0,00	0,00		
5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	1,00	250.000.000			1,00	64.661.110	100,00	60.361.110	#####	93,35	1,00	88.975.000			0,00	0,00		
5.02.02.2.05.02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan yang dilakukan pemeliharaan/Updating	1,00	250.000.000			1,00	64.661.110	1,00	60.361.110	100,00	93,35	1,00	88.975.000			0,00	0,00		
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) tepat waktu	96,36	9.118.391.960	0,95	246.308.600	95,00	5.544.445.630	99,00	3.925.048.400	104,21	70,79	91,00	4.027.352.100	95,00	246.308.600	104,40	6,12		
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	12,00	9.118.391.960	177,00	246.308.600	11,00	5.544.445.630	99,11	3.925.048.400	901,03	70,79	4693,00	4.027.352.100	177,00	246.308.600	3,77	6,12		
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah dokumen standart harga yang disusun	16,00	1.000.000.000	2,00	79.999.600	2,00	317.954.720	2,00	210.570.130	100,00	66,23	2,00	177.999.600	2,00	79.999.600	100,00	44,94		
5.02.03.2.01.02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah yang disusun	1,00	115.050.000	2,00	45.801.000	2,00	156.908.860	2,00	131.565.640	100,00	83,85	2,00	115.049.000	2,00	45.801.000	100,00	39,81		
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	10,00	750.000.000			2,00	103.466.450	2,00	90.708.860	100,00	87,67	2,00	103.466.100			0,00	0,00		
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1,00	102.000.000			2,00	171.922.570	2,00	116.876.870	100,00	67,98								
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah laporan inventarisasi barang milik daerah	1,00	281.651.910	0,00	7.948.000	1,00	281.642.060	1,00	143.750.060	100,00	51,04	1,00	383.628.900	0,00	7.948.000	0,00	2,07		
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yg mempunyai bukti kepemilikan	75,00	3.000.000.000	5,00	86.612.000	2132,00	3.165.399.900	2107,00	2.102.575.790	98,83	66,42	3960,00	1.799.999.800	5,00	86.612.000	0,13	4,81		
5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah laporan penilaian barang milik daerah	20,00	1.000.000.000			4,00	110.443.700	4,00	108.919.800	100,00	98,62	4,00	109.043.700			0,00	0,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020						Target Program/Kegiatan RPKD tahun berjalan (tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun berjalan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Tingkat Realisasi (%)	K	Rp	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Realisasi Target s/d tahun 2021		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	5,00	1.000.000.000	1,00	7.812.000	1,00	631.648.520	1,00	577.333.320	100,00	91,40	1,00	160.408.200	1,00	7.812.000	100,00	4,87		
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	5,00	1.000.000.000	0,00	7.848.000	12,00	315.375.970	12,00	242.600.350	100,00	76,92	1,00	240.014.700	0,00	7.848.000	0,00	3,27		
5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah aktivitas rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1,00	169.690.050	165,00	10.288.000	660,00	169.689.090	660,00	143.764.770	100,00	84,72	660,00	192.139.000	165,00	10.288.000	25,00	5,35		
5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah	10,00	500.000.000			1,00	119.993.790	1,00	56.382.810	100,00	46,99	1,00	119.993.600			0,00	0,00		
5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah	Jumlah Peserta Pembinaan	290,00	200.000.000									58,00	625.609.500			0,00	0,00		
	URUSAN KEUANGAN																		BADAN PENDAPATAN DAERAH	
05:02:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		93,36	13.580.740.994	93,36	1.634.391.971	93,36	8.493.761.273	93,36	7.701.853.928	100	90,68	93,36	13.580.740.994	93,36	1.634.391.971	93,36	0,12		
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2	255.931.600	2	48.231.600	2	264.847.570	2	264.831.570	100	99,99	2	255.931.600	2	48.231.600	2,00	0,19		
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	2	92.063.900	0	18.203.900	2	82.255.750	2	82.239.750	100	99,98	2	92.063.900	0	18.203.900	0,00	0,20		
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang dilaporkan	12	163.867.700	3	30.027.700	12	182.591.820	12	182.591.820	100	100,00	12	163.867.700	3	30.027.700	0,25	0,18		
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2	10.734.837.487	2	1.153.638.909	2	5.577.873.655	2	4.964.985.000	100	89,01	2	10.734.837.487	2	1.153.638.909	2,00	0,11		
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen penyediaan gaji dan tunjangan ASN	1	10.635.940.887	1	1.135.282.309	1	5.525.610.925	1	4.912.762.270	100	88,91	1	10.635.940.887	1	1.135.282.309	1,00	0,11		
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan yang disusun	2	98.896.600	0	18.356.600	2	52.262.730	2	52.222.730	100	99,92	2	98.896.600	0	18.356.600	0,00	0,19		
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		7	687.717.650	7	143.310.971	7	769.470.780	7	707.426.528	100	91,94	7	687.717.650	7	143.310.971	7,00	0,21		
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen penyediaan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1398	52.695.800	349	13.656.700	1216	52.695.940	1216	52.691.000	100	99,99	1398	52.695.800	349	13.656.700	0,25	0,26		
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	3018	40.845.800	754	11.477.900	2624	197.540.530	2624	195.532.540	100	98,98	3018	40.845.800	754	11.477.900	0,25	0,28		
		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6		1		5		5		100		6		1		0,17			
5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	2440	38.999.200	610	13.604.900	2212	52.996.460	2212	52.991.850	100	99,99	2440	38.999.200	610	13.604.900	0,25	0,35		
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah waktu makanan dan minuman yang disediakan	12	199.990.000	3	35.481.000	12	152.486.000	12	152.451.000	100	99,98	12	199.990.000	3	35.481.000	0,25	0,18		
		Jumlah waktu penyediaan logistik kantor yang disediakan	12		3		12		12		100		12		3		0,25			
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	119025	39.999.600	29756	28.999.800	103500	50.999.850	103500	50.995.200	100	99,99	119025	39.999.600	29756	28.999.800	0,25	0,73		
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	8050	30.198.400	2012	1.500.000	7000	62.783.500	7827	9.770.000	111,81	15,56	8050	30.198.400	2012	1.500.000	0,25	0,05		
		Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan Jumlah Fasilitas media	5134		1283		4464		2591		58,04		5134		1283		0,25			
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Waktu Terselenggarakannya rapat koordinasi dan konsultasi	12	284.988.850	3	38.590.671	12	199.968.500	12	192.994.938	100	96,51	12	284.988.850	3	38.590.671	0,25	0,14		
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		0	-	0	-	100	29.877.430	100	29.877.430	0	100,00	0	-	0	-	0,00	0,00		
5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang disediakan	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00		
5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang disediakan	0	-	0	-	4	9.939.930	4	9.939.930	100	100,00	0	-	0	-	0,00	0,00		
5.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor atau bangunan lainnya	0	-	0	-	4	19.937.500	4	19.937.500	100	100,00	0	-	0	-	0,00	0,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020						Target Program/Kegiatan RKPD tahun berjalan (tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun berjalan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d tahun 2021	K	Rp		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3	1.620.789.257	3	248.385.491	3	1.444.023.438	3	1.332.433.500	100	92,27	3	1.620.789.257	3	248.385.491	3,00	0,15		
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah perangko, materai dan benda pos lainnya yang disediakan	1725	8.990.000	431	2.250.000	1500	8.993.600	1500	8.990.000	100	99,96	1725	8.990.000	431	2.250.000	0,25	0,25		
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	36	301.999.257	9	54.135.491	36	299.979.838	36	252.293.500	100	84,10	36	301.999.257	9	54.135.491	0,25	0,18		
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	624	1.309.800.000	156	192.000.000	624	1.135.050.000	624	1.071.150.000	100	94,37	624	1.309.800.000	156	192.000.000	0,25	0,15		
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		5	281.465.000	4	40.825.000	5	407.668.400	5	402.299.900	100	98,68	5	281.465.000	4	40.825.000	5,00	0,15		
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jasa pemeliharaan, biayapemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	32	50.000.000	8	9.200.000	28	78.038.400	28	73.137.900	100	93,72	32	50.000.000	8	9.200.000	0,25	0,18		
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	67	30.000.000	16	7.500.000	58	30.000.000	58	30.000.000	100	100,00	67	30.000.000	16	7.500.000	0,24	0,25		
5.02.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud		0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-	0	-	0,00	0,00		
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Yang Dipelihara	2	166.565.000	0	11.625.000	1	249.940.000	1	249.472.000	100	99,81	2	166.565.000	0	11.625.000	0,00	0,07		
		Jumlah Gedung Kantor Yang Direhabilitasi	1		0		2		2		100		1		0		0,00			
		Jumlah Taman Kantor Yang Dipelihara	1		0		1		1		100		1		0		0,00			
		Jumlah Taman Kantor Yang Direhabilitasi	1		0		1		1		100		1		0		0,00			
5.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara	74	34.900.000	18	12.500.000	64	49.690.000	64	49.690.000	100	100,00	74	34.900.000	18	12.500.000	0,24	0,36		
05:02:04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		90	3.711.046.100	18,64	628.798.000	90	4.908.798.870	90	4.608.883.680	100	93,89	90	3.711.046.100	90	628.798.000	90,00	0,17		
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah		11	3.711.046.100	11	628.798.000	11	4.908.798.870	11	4.608.883.680	11	93,89	11	3.711.046.100	11	628.798.000	11,00	0,17		
5.02.04.2.01.01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Target Pendapatan Pajak Daerah	1	193.665.200	1	25.499.400	400	952.179.650	50	946.535.310	12,5	99,41	1	193.665.200	1	25.499.400	1,00	0,13		
		Jumlah Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi PBB dan BPHTB	2		0		1		2		200		2		0		0,00			
		Jumlah Aktifitas Pengelolaan Pajak Daerah	1		1		10		10		100		1		1		1,00			
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Penyusunan perumusan peraturan perundang-undangan	2	130.594.800	0	4.068.000	2	22.569.470	2	22.569.470	100	100,00	2	130.594.800	0	4.068.000	0,00	0,03		
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak yang dapat melakukan SPTPD Online	460	852.492.000	115	157.882.400	400	952.179.650	50	946.535.310	12,5	99,41	460	852.492.000	115	157.882.400	0,25	0,19		
		Jumlah Kegiatan Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah	12		0		1		2		200		12		0		0,00			
		Jumlah Kegiatan Sosialisasi Pajak Daerah	1		1		10		10		100		1		1		1,00			
		Jumlah Monitoring dan Evaluasi Penerimaan Pendapatan Daerah	12		3		12		12		100		12		3		0,25			
		Terlaksananya pendistribusian SPPT PBB-P2	100		100		100		200		200		100		100		1,00			
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah SPTPD Sejenis Objek Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, ABT dan Parkir	40250	542.113.100	9500	101.055.200	35000	342.899.500	35000	328.073.500	100	95,68	40250	542.113.100	9500	101.055.200	0,24	0,19		
		Jumlah Wajib Pajak Terdata Memiliki NPWPD	9775		1750		8500		8500		100		9775		1750		0,18			
		Jumlah Objek Pajak PBB-P2 dan BPHTB yang telah didaftarkan, dimutakhirkan, dan dipetakan	1035000		200115		900000		900000		100		1035000		200115		0,19			
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Fitur/Modul Aplikasi	1	1.158.078.500	0	179.747.000	1	1.658.145.515	1	1.591.170.955	100	95,96	1	1.158.078.500	0	179.747.000	0,00	0,16		
		Jumlah SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKDN, dan SKPDLB	46000		120200		40000		40000		100		46000		120200		2,61			
		Jumlah Pemutahiran Data Obyek dan Wajib Pajak NJOP, penyusunan ZNT, daftar harga jual, DBKB dan Peta Blok	12		1		12		12		100		12		1		0,08			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020						Target Program/Kegiatan RPKD tahun berjalan (tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun berjalan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp	K	Rp	Target RPKD Tahun 2021		Realisasi RPKD Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)		K	Rp	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Realisasi Target s/d tahun 2021			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13
		Jumlah Laporan PBB yang disusun	12		1		12		12		100		12		1		0,08			
		Jumlah SPPT PBB P2 yang dicetak	1035000		0		900000		900000		100		1035000		0		0,00			
		Jumlah Validasi SSPD BPHTB	13800		60		12000		12000		100		13800		60		0,00			
		Jumlah Dokumen BPHTB Terverifikasi	21850		2600		19000		19000		100		21850		2600		0,12			
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Obyek Pajak PBB-P3 Yang Telah Dilakukan Penilaian Baik Massal Maupun Individu	28750	24.706.100	7050	11.532.100	25000	49.997.480	25000	49.953.480	100	99,91	28750	24.706.100	7050	11.532.100	0,25	0,47		
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah berkas Pelayanan PBB-P2 dan BPHTB Yang Telah Diterima Di Loket Pelayanan dan Diselesaikan	50600	19.197.900	2671	14.538.700	44000	49.999.200	44000	49.983.200	100	99,97	50600	19.197.900	2671	14.538.700	0,05	0,76		
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN dan SKPDLB	46000	272.685.600	9500	45.789.800	40000	374.360.350	40000	345.266.400	100	92,23	46000	272.685.600	9500	45.789.800	0,21	0,17		
		Jumlah berkas pengajuan verifikasi SSPD BPHTB yang telah diverifikasi	21850		2600		19000		19000		100		21850		2600		0,12			
		Jumlah Laporan BPHTB yang disusun	12		1		12		12		100		12		1		0,08			
		Jumlah Laporan Realisasi dan Piutang Pajak Daerah	24		0		24		24		100		24		0		0,00			
		Jumlah Laporan Realisasi dan Piutang Pajak Daerah yang disusun per wajib pajak per bulan	6		0		6		6		100		6		0		0,00			
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Penagihan Pajak Daerah	12	30.013.100	0	920.000	12	58.698.910	12	56.266.910	100	95,86	12	30.013.100	0	920.000	0,00	0,03		
5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	29	90.000.000	0	12.456.000	25	59.665.405	25	56.425.405	100	94,57	29	90.000.000	0	12.456.000	0,00	0,14		
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Penertiban Pajak Daerah	5	397.499.800	0	75.309.400	4	388.103.740	4	216.103.740	100	55,68	5	397.499.800	0	75.309.400	0,00	0,19		
		Jumlah Wajib Pajak yang diperiksa	12		0		10		10		100		12		0		0,00			
5.03	URUSAN KEPEGAWAIAN																			Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang tepat waktu	95	163.685.000.000	0	1.248.206.404	95,00	#####	95	41.440.662.632	1,00	64,31	1	1.248.206.404	1	1.248.206.404	1,00	1,00		
5.03.01.02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi kinerja yang disusun	40	500.000.000	1	18.007.500	8	73.952.000	8	90.000.000	1,00	121,70	1	18.007.500	1	18.007.500	1,00	1,00		
5.03.01.02.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	20	250.000.000	1	7.024.000	4	40.000.000	4	45.000.000	1,00	112,50	1	7.024.000	1	7.024.000	1,00	1,00		
5.03.01.02.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang disusun	20	250.000.000	0	10.983.500	4	33.952.000	4	45.000.000	1,00	132,54	0	10.983.500	0	10.983.500	0,00	1,00		
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan perangkat Daerah yang disusun	80	147.250.000.000	4	1.085.925.620	16	61.002.116.208	16	38.270.880.035	1,00	62,74	4	1.085.925.620	4	1.085.925.620	1,00	1,00		
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen pembayaran Gaji dan tunjangan ASN	60	147.000.000.000	3	1.079.173.620	12	60.962.116.208,00	12	38.225.880.035	1,00	62,70	3	1.079.173.620	3	1.079.173.620	1,00	1,00		
5.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Triwulan yang disusun	20	250.000.000	1	6.752.000	4	40.000.000	4	45.000.000	1,00	112,50	1	6.752.000	1	6.752.000	1,00	1,00		
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan administrasi umum yang disediakan	28000	8.410.000.000	0	84.019.700	6.500	1.041.901.600	6500	1.367.890.000	1,00	131,29		84.019.700	0	84.019.700	0,00	1,00		
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	7500	500.000.000	0	0	100	109.269.600	2291	100.000.000	22,91	91,52	0	0	0	0	0,00	0,00		
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1500	1.000.000.000	0	0	300	179.364.000	70	247.892.300	0,23	138,21	0	0	0	0	0,00	0,00		
5.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	6000	500.000.000	0	326.000	1.800	135.183.000	2894	139.277.000	1,61	103,03	0	326.000	0	326.000	0,00	1,00		
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	60	700.000.000	3	12.330.500	12	149.992.000	12	143.985.700	1,00	96,00	3	12.330.500	3	12.330.500	1,00	1,00		
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	20000	400.000.000	0	0	5.000	96.000.000	6300	83.990.000	1,26	87,49	0	0	0	0	0,00	0,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020						Target Program/Kegiatan RKPd tahun berjalan (tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun berjalan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp	K	Rp	Target RKPd Tahun 2021		Realisasi RKPd Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)		K	Rp	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Realisasi Target s/d tahun 2021			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	jumlah Dokumen penilaian prestasi kerja pegawai	60	600.000.000	0	0	12	579.410.400	12	791.043.000	1,00	136,53	3	50.679.200	0	0	0,00	0,00		
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	jumlah Dokumen penilaian prestasi kerja pegawai	20	1.200.000.000	0	6.672.000	4	254.086.600,00	4	263.596.500	1,00	103,74	0	0	0	6.672.000	0,00	0,00		
5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah PNS yang mendapatkan penghargaan	2600	650.000.000	1	39.307.200	520	132.778.900	520	114.119.000	1,00	85,95	0	6.672.000	1	39.307.200	0,00	5,89		
5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah dokumen pembinaan pegawai yang disusun	20	500.000.000	2	4.700.000	4	101.733.900	4	313.327.500	1,00	307,99	1	39.307.200	2	4.700.000	2,00	0,12		
5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS yang diselesaikan	60	28.873.848.000	0	234.712.300	15	90.811.000	15	100.000.000	1,00	110,12	2	4.700.000	0	234.712.300	0,00	49,94		
5.04	URUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																		Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase peningkatan kualitas SDM Aparatur	85	19.873.848.000	0	0	80	2.358.786.400	80	5.770.014.800	1,00	244,62	0	234.712.300	0	0	0,00	0,00		
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang lulus diklat teknis tugas dan fungsi	600	19.873.848.000	0	0	40	163.092.500	40	1.324.923.200	1,00	812,38	0	0	0	0	0,00	0,00		
5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang lulus diklat teknis tugas dan fungsi	600	9.000.000.000	80	234.712.300	40	163.092.500	260	1.324.923.200	6,50	812,38	0	0	80	234.712.300	0,00	0,00		
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah ASN yang lulus diklat fungsional	2000	9.000.000.000	80	234.712.300	134	2.195.693.900	134	4.445.091.600	1,00	202,45	80	234.712.300	80	234.712.300	1,00	1,00		
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang lulus diklat fungsional	2000	9.000.000.000	80	234.712.300	134	2.195.693.900	682	4.445.091.600	5,09	202,45	80	234.712.300	80	234.712.300	1,00	1,00		
505	URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAG	
50502	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil kelitbangan yang terpilih sebagai bahan perencanaan pembangunan	80	7.727.257.266	20	45.693.700	80	2.284.743.430	80	2.272.816.830	100	99	80	1.390.460.900	20	45.693.700	25,00	3,29		
50502201	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah aktivitas dan dokumen hasil penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	13	1.280.741.160	2	14.898.900	100	308.396.520	67	308.396.520	67	100	2	264.898.900	2	14.898.900	100,00	5,62		
5050220102	Fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan umum	Jumlah Dokumen fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan umum	13	1.280.741.160	0	14.898.900	3	308.396.520	2	308.396.520	67	100	2	264.898.900	0	14.898.900	0,00	5,62		
50502202	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah aktivitas dan dokumen hasil penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan	22	2.742.340.440	4	0	100	776.362.210	60	764.461.610	60	98	4	150.648.200	4	0	100,00	0,00		
5050220201	Penelitian dan pengembangan bidang aspek-aspek sosial	Jumlah Dokumen hasil penelitian dan pengembangan bidang aspek-aspek sosial	13	1.692.398.740			3	399.961.970	2	388.882.970	67	97								
5050220205	Penelitian dan pengembangan pariwisata	jumlah Dokumen hasil penelitian dan pengembangan pariwisata	9	1.049.941.700	0	0	2	376.400.240	1	375.578.640	50	100	2	150.648.200	0	0	0,00	0,00		
50502203	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Pembangunan	Jumlah aktivitas dan dokumen hasil penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	22	1.999.756.400	4	9.682.500	100	990.000.000	40	989.974.000	40	100	4	431.970.700	4	9.682.500	100,00	2,24		
5050220301	Penelitian dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah	Jumlah Dokumen hasil penelitian dan pengembangan bidang aPenelitian dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah	13	699.999.200	0	8.259.200	3	150.000.000	0	150.000.000	0	100	2	124.975.200	0	8.259.200	0,00	6,61		
5050220304	Penelitian dan pengembangan pertanian, perkebunan dan pangan	Jumlah Dokumen hasil penelitian dan pengembangan Penelitian dan pengembangan pertanian, perkebunan dan pangan	9	1.299.757.200	0	1.423.300	2	840.000.000	2	839.974.000	100	100	2	306.995.500	0	1.423.300	0,00	0,46		
50502204	Pengembangan inovasi dan teknologi	Jumlah aktivitas dan dokumen hasil penelitian dan pengembangan inovasi dan teknologi	78	1.704.419.266	11	21.112.300	100	209.984.700	81,25	209.984.700	81	100	11	542.943.100	11	21.112.300	100,00	3,89		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020						Target Program/Kegiatan RKPd tahun berjalan (tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun berjalan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp	K	Rp	Target RKPd Tahun 2021		Realisasi RKPd Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)		K	Rp	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Realisasi Target s/d tahun 2021			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13
5050220401	Penelitian, pengembangan dan perekayasa di Bidang Teknologi dan inovasi	jumlah Dokumen hasil Penelitian, pengembangan dan perekayasa di Bidang Teknologi dan inovasi	18	1.301.617.870	0	3.986.600	4	208.445.800	4	208.445.800	100	100	10	307.986.600	0	3.986.600	0,00	1,29		
5050220404	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelembagaan	Jumlah Aktivitas Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelembagaan	60	402.801.396	0	17.125.700	12	1.538.900	9	1.538.900	75	100	1	234.956.500	0	17.125.700	0,00	7,29		
6.01	INSPEKTORAT DAERAH																		Inspektorat	
6.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah yang Tepat Waktu	100	376.505.000.000	20,90	2.192.538.997	12	12.032.571.950	12	9.226.836.623	1,00	0,77	100	10.491.015.510	20,90	2.192.538.997	20,90	20,90		
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	200.000.000	11,75	19.439.300	10	206.634.100	10	183.878.100	1,00	0,89	100	82.719.300	11,75	19.439.300	11,75	23,50		
6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat Daerah	25	100.000.000	2	9.978.000	12	106.634.100	12	98.546.690	1,00	0,92	5	41.338.000	2	9.978.000	40,00	24,14		
6.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen laporan ikhtisar hasil pengawasan	25	100.000.000	2	9.461.300	12	100.000.000	12	85.331.410	1,00	0,85	5	41.381.300	2	9.461.300	40,00	22,86		
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase pelayanan kepada masyarakat dalam pencairan SP2D	100	360.650.000.000	11,37	1.888.290.465	15	7.396.063.117	15	6.696.580.236	1,00	0,91	100	8.303.080.809	11,37	1.888.290.465	11,37	22,74		
6.01.01.2.02.01	penyediaan gaji dan tunjangan ASN	jumlah gaji ASN yang terbayar	60	360.000.000.000	3	1.865.921.065	12	7.346.063.117	12	49.711.730	1,00	0,01	60	8.177.083.409	3	1.865.921.065	5,00	22,82		
6.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan	25	650.000.000	2	22.369.400	12	50.000.000	3	6.646.868.506	0,25	132,94	5	125.997.400	2	22.369.400	40,00	17,75		
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	100	1.500.000.000	0	0	10	1.766.999.050	10	427.208.717	1,00	0,24	100	299.989.300	0	0	0,00	0,00		
6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah bimtek yang di laksanakan	500	1.500.000.000	0	0	10	1.766.999.050	10	427.208.717	1,00	0,24	100	299.989.300	0	0	0,00	0,00		
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi umum perangkat daerah	100	3.755.000.000	5,03	231.828.297	12	1.515.270.600	12	934.774.412	1,00	0,62	100	658.961.100	5,03	231.828.297	5,03	35,18		
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30	255.000.000	0	0	15	25.000.000	15	24.999.480	1,00	1,00	5	49.984.900	0	0	0,00	0,00		
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang di sediakan	50	900.000.000	3	68.769.000	10	294.097.870	3	293.547.870	0,30	1,00	10	144.999.000	3	68.769.000	30,00	47,43		
6.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	60	250.000.000	10	49.997.500	12	35.200.000	12	34.999.085	1,00	0,99	10	49.997.800	10	49.997.500	100,00	100,00		
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah logistik kantor yang tersedia	60.000	1.500.000.000	200	39.157.800	4	348.562.100	4	246.402.200	1,00	0,71	20.000	248.992.000	200	39.157.800	1,00	15,73		
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5	250.000.000	1	48.547.800	3	199.916.380	3	199.658.800	1,00	1,00	1	49.999.800	1	48.547.800	100,00	97,10		
6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	120	100.000.000	3	2.000.000	12	12.496.500	12	11.640.000	1,00	0,93	25	14.999.100	3	2.000.000	12,00	13,33		
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi yang di ikuti	60	500.000.000	3	23.356.197	25	599.997.750	25	123.526.977	1,00	0,21	12	99.988.500	3	23.356.197	25,00	23,36		
6.01.01.2.07	pengadaan barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah mebel yang di adakan	50	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6	99.616.000	0	0	0,00	0,00		
6.01.01.2.07.05	pengadaan mebel	jumlah mebel yang di adakan	50	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6	99.616.000	0	0	0,00	0,00		
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di sediakan	100	2.100.000.000	5,08	52.980.935	12	337.149.425	12	265.830.058	1,00	0,79	100	347.397.415	5,08	52.980.935	5,08	15,25		
6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah Jasa Surat Menyurat	60	100.000.000	3	3.500.000	12	10.000.000	12	2.700.000	1,00	0,27	12	14.998.000	3	3.500.000	25,00	23,34		
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60	1.000.000.000	3	27.480.935	12	155.999.425	12	97.230.058	1,00	0,62	12	155.999.415	3	27.480.935	25,00	17,62		
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	60	1.000.000.000	3	22.000.000	12	171.150.000	12	165.900.000	1,00	0,97	12	176.400.000	3	22.000.000	25,00	12,47		
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	cakupan pemeliharaan barang milik daerah	100	8.300.000.000	0	0	12	810.455.658	12	718.565.100	1,00	0,89	100	798.867.586	0	0	0,00	0,00		
6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang di pelihara	250	800.000.000	0	0	12	224.550.000	12	135.733.100	1,00	0,60	50	149.989.000	0	0	0,00	0,00		
6.01.01.2.09.09	pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	jumlah gedung yang di pelihara	1	2.500.000.000	0	0	12	435.905.658	12	434.695.000	1,00	1,00	1	349.248.000	0	0	0,00	0,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020						Target Program/Kegiatan RPKD tahun berjalan (tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun berjalan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Tingkat Realisasi (%)	K	Rp	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d tahun 2021	K	Rp	K		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	55,00	149.242.500	11,00	29.848.500	85	199.984.055	65,00	199.984.055,00	76,47	100,00	11	29.848.500	11,00	29.848.500	100,00	100,00		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00	899.745.480	49,01	60.999.546	100	147.782.896	71,45	139.660.015	71,45	94,50	100,00	179.949.096	49,01	60.999.546	49,01	33,90		
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah perangk, materai dan benda pos lainnya yang disediakan	1.000,00	10.000.000	200,00	2.000.000	318	2.098.800,00	154,00	2.098.400,00	48,43	99,98	200	2.000.000	200,00	2.000.000	100,00	100,00		
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan	120,00	189.995.480	12,00	18.999.546	12	37.999.096,00	9,00	29.876.615,00	75,00	78,62	24	37.999.096	12,00	18.999.546	50,00	50,00		
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah, desktop komputer, tv, tenda, dan soundstsem yang disediakan	1.050,00	99.750.000	-	-	320	19.185.000,00	300,00	19.185.000,00	93,75	100,00	210	19.950.000	-	-	0,00	0,00		
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah jasa administrasi kantor dan jasa kebersihan kantor yang disediakan	360,00	600.000.000	36,00	40.000.000	12	88.500.000,00	10,00	88.500.000,00	83,33	100,00	72,00	120.000.000	36,00	40.000.000	50,00	33,33		
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00	347.468.000	7,14	39.325.200	100	105.144.550,00	100,00	45.372.563,00	100,00	43,15	100,00	69.493.600	7,14	39.325.200	7,14	56,59		
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	5,00	49.978.000	1,00	9.995.600	3	17.147.900,00	3,00	15.808.100,00	100,00	92,19	1	9.995.600	1,00	9.995.600	100,00	100,00		
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	jumlah mebler yang dipelihara	125,00	99.980.000	-	-	2	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	19.996.000	-	-	0,00	0,00		
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya yg dipelihara	5,00	147.600.000	1,00	28.929.600	1	47.996.650,00	1,00	29.564.463,00	100,00	61,60	1	29.520.000	1,00	28.929.600	100,00	98,00		
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	5,00	49.910.000	-	400.000	1,00	9.982.000,00	1,00	8.083.800,00	100,00	80,98	1,00	9.982.000	-	400.000	0,00	4,01		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik	85,00	1.546.239.000	75,00	188.343.800	80,00	309.247.800,00	80,00	268.323.020,00	100,00	86,77	80,00	309.247.800	75,00	188.343.800	93,75	60,90		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100,00	1.296.250.000	50,00	138.346.000	#####	259.250.000,00	100,00	233.325.000,00	100,00	90,00	100	259.250.000	50,00	138.346.000	50,00	53,36		
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah fasilitasi permakanan warga miskin	#####	1.296.250.000	#####	138.346.000	#####	259.250.000,00	#####	233.325.000,00	100,00	90,00	6.936	259.250.000	#####	138.346.000	50,00	53,36		
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	100,00	249.989.000	6,00		#####	49.997.800,00	100,00	40.998.020,00	100,00	82,00	100	49.997.800	6,00		6,00	0,00		
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	5,00	249.989.000	#####	49.997.800	1,00	49.997.800,00	1,00	40.998.020,00	100,00	82,00	1,00	49.997.800	#####	49.997.800	#####	100,00		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan	30,00	74.981.500	1,00	49.997.800	25,00	14.996.300,00	25,00	13.496.670,00	100,00	90,00	25,00	14.996.300	1,00	49.997.800	4,00	333,40		
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	100,00	74.981.500	-	8.670.000	20,00	14.996.300,00	20,00	13.496.670,00	100,00	90,00	100	14.996.300	-	8.670.000	0,00	57,81		
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	15,00	74.981.500	66,67	8.670.000	3,00	14.996.300,00	3,00	13.496.670,00	100,00	90,00	3,00	14.996.300	66,67	8.670.000	2222,22	57,81		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan	2,00	59.977.000	2,00	8.670.000	0,40	11.995.400,00	0,40	10.995.860,00	100,00	91,67	2,00	11.995.400	2,00	8.670.000	100,00	72,28		
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Cakupan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	100,00	59.977.000	-	9.387.400	20,00	11.995.400,00	20,00	10.995.860,00	100,00	91,67	100,00	11.995.400	-	9.387.400	0,00	78,26		
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Oenerapan dan Penegakan Perauran Daerah	15,00	59.977.000	66,67	9.387.400	3,00	11.995.400,00	3,00	10.995.860,00	100,00	91,67	3,00	11.995.400	66,67	9.387.400	2222,22	78,26		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020						Target Program/Kegiatan RPKD tahun berjalan (tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun berjalan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp	K	Rp	Target RKPd Tahun 2021		Realisasi RKPd Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)		K	Rp	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Realisasi Target s/d tahun 2021			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase laporan keuangan desa yang selesai tepat waktu	90,00	50.119.000	2,00	9.387.400	18,00	10.023.800,00	18,00	9.021.420,00	100,00	90,00	90,00	10.023.800	2,00	9.387.400	2,22	93,65		
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100,00	50.119.000	66,67	9.773.800	20,00	10.023.800,00	20,00	9.021.420,00	100,00	90,00	100,00	10.023.800	66,67	9.773.800	66,67	97,51		
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Fasilitasi Pengelolan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	15,00	50.119.000	66,67	9.773.800	3,00	10.023.800,00	3,00	9.021.420,00	100,00	90,00	3,00	10.023.800	66,67	9.773.800	2222,22	97,51		
	Pemerintahan Umum													2,00	9.773.800				KECAMATAN BANYUWANGI	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	95,00	103.428.104.920	54,03	6.328.024.374	85,00	#####	85,00	18.099.918.361,00	100,00	87,50	85,00	20.685.620.984	54,03	6.328.024.374	63,56	30,59		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	100,00	74.264.372.880	50,00	4.851.247.996	#####	#####	100,00	12.996.265.254,00	100,00	87,50	100,00	14.852.874.576	50,00	4.851.247.996	50,00	32,66		
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen penyediaan gaji dan tunjangan ASN	60,00	74.264.372.880	6,00	4.851.247.996	12,00	#####	12,00	12.996.265.254,00	100,00	87,50	12,00	14.852.874.576	6,00	4.851.247.996	50,00	32,66		
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi umum perangkat daerah	100,00	9.105.712.000	51,03	749.129.300	#####	#####	100,00	1.602.605.312,00	100,00	88,00	100,00	1.821.142.400	51,03	749.129.300	51,03	41,14		
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor	50,00	577.375.000	7,00	65.357.000	10,00	115.475.000,00	10,00	101.618.000,00	100,00	88,00	10,00	115.475.000	7,00	65.357.000	70,00	56,60		
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	250,00	3.625.218.000	35,00	453.336.800	50,00	725.043.600,00	50,00	638.038.368,00	100,00	88,00	50,00	725.043.600	35,00	453.336.800	70,00	62,53		
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	100,00	619.914.000	12,00	70.689.600	20,00	123.982.800,00	20,00	109.104.864,00	100,00	88,00	20,00	123.982.800	12,00	70.689.600	60,00	57,02		
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	60,00	1.082.115.000	6,00	37.558.000	12,00	216.423.000,00	12,00	190.452.240,00	100,00	88,00	12,00	216.423.000	6,00	37.558.000	50,00	17,35		
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	75,00	639.045.000	8,00	66.292.900	15,00	127.809.000,00	15,00	112.471.920,00	100,00	88,00	15,00	127.809.000	8,00	66.292.900	53,33	51,87		
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	#####	63.920.000	500,00	5.000.000	#####	12.784.000,00	#####	11.249.920,00	100,00	88,00	#####	12.784.000	500,00	5.000.000	50,00	39,11		
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat dan konsultasi SKPD yang dilaksanakan	50,00	2.498.125.000	2,00	50.895.000	10,00	499.625.000,00	10,00	439.670.000,00	100,00	88,00	10,00	499.625.000	2,00	50.895.000	20,00	10,19		
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100,00	4.898.898.000	27,78	60.700.000	#####	979.779.600,00	100,00	832.812.660,00	100,00	85,00	100,00	979.779.600	27,78	60.700.000	27,78	6,20		
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang disediakan	5,00	2.075.429.500	-	16.700.000	1,00	415.085.900,00	1,00	352.823.015,00	100,00	85,00	1,00	415.085.900	-	16.700.000	0,00	4,02		
7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	35,00	2.370.904.000	-	-	7,00	474.180.800,00	7,00	403.053.680,00	100,00	85,00	7,00	474.180.800	-	-	0,00	0,00		
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan	50,00	452.564.500	5,00	44.000.000	10,00	90.512.900,00	10,00	76.935.965,00	100,00	85,00	10,00	90.512.900	5,00	44.000.000	50,00	48,61		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00	9.148.822.070	86,30	592.561.478	#####	#####	100,00	1.555.299.751,90	100,00	85,00	100,00	1.829.764.414	86,30	592.561.478	86,30	32,38		
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah perangko, materai dan benda pos lainnya yang disediakan	#####	107.750.000	550,00	19.650.000	#####	21.550.000,00	600,00	18.317.500,00	100,00	85,00	600,00	21.550.000	550,00	19.650.000	91,67	91,18		
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	60,00	1.784.072.070	6,00	102.511.478	12,00	356.814.414,00	12,00	303.292.251,90	100,00	85,00	12,00	356.814.414	6,00	102.511.478	50,00	28,73		
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	370,00	7.257.000.000	36,00	470.400.000	74,00	#####	74,00	1.233.690.000,00	100,00	85,00	74,00	1.451.400.000	36,00	470.400.000	48,65	32,41		
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00	6.010.299.970	10,20	74.385.600	#####	#####	100,00	1.021.750.994,90	100,00	85,00	100,00	1.202.059.994	10,20	74.385.600	10,20	6,19		
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	60,00	182.520.000	-	-	12,00	36.504.000,00	12,00	31.028.400,00	100,00	85,00	12,00	36.504.000	-	-	0,00	0,00		
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	50,00	149.290.000	3,00	7.950.000	10,00	29.858.000,00	10,00	25.379.300,00	100,00	85,00	10,00	29.858.000	3,00	7.950.000	30,00	26,63		
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50,00	103.630.000	-	-	10,00	20.726.000,00	10,00	17.617.100,00	100,00	85,00	10,00	20.726.000	-	-	0,00	0,00		
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor yang disediakan	10,00	4.685.226.880	1,00	59.458.600	2,00	937.045.376,00	2,00	796.488.569,60	100,00	85,00	2,00	937.045.376	1,00	59.458.600	50,00	6,35		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020						Target Program/Kegiatan RPKD tahun berjalan (tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun berjalan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp	K	Rp	Target RPKD Tahun 2021		Realisasi RPKD Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)		K	Rp	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Realisasi Target s/d tahun 2021			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	75,00	889.633.090	1,00	6.977.000	15,00	177.926.618,00	15,00	151.237.625,30	100,00	85,00	15,00	177.926.618	1,00	6.977.000	6,67	3,92		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik	85,00	3.390.504.000	75,00	118.196.100	80,00	678.100.800,00	80,00	576.385.680,00	100,00	85,00	80,00	678.100.800	75,00	118.196.100	93,75	17,43		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100,00	3.227.954.500	50,00	85.800.000	#####	645.590.900,00	100,00	548.752.265,00	100,00	85,00	100,00	645.590.900	50,00	85.800.000	50,00	13,29		
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan	20,00	3.227.954.500	2,00	85.800.000	4,00	645.590.900,00	4,00	548.752.265,00	100,00	85,00	4,00	645.590.900	2,00	85.800.000	50,00	13,29		
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	100,00	162.549.500	#####	32.396.100	#####	32.509.900,00	100,00	27.633.415,00	100,00	85,00	100,00	32.509.900	#####	32.396.100	100,00	99,65		
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan yang disediakan	5,00	162.549.500	1,00	32.396.100	1,00	32.509.900,00	1,00	27.633.415,00	100,00	85,00	1,00	32.509.900	1,00	32.396.100	100,00	99,65		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan	30,00	11.324.811.250	24,17	338.956.200	25,00	#####	25,00	1.925.217.912,50	100,00	85,00	25,00	2.264.962.250	24,17	338.956.200	96,67	14,97		
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	100,00	7.799.543.000	40,00	207.798.800	#####	#####	100,00	1.325.922.310,00	100,00	85,00	100,00	1.559.908.600	40,00	207.798.800	40,00	13,32		
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	25,00	7.799.543.000	2,00	207.798.800	5,00	#####	5,00	1.325.922.310,00	100,00	85,00	5,00	1.559.908.600	2,00	207.798.800	40,00	13,32		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan pemberdayaan kelurahan	100,00	3.525.268.250	8,33	131.157.400	#####	705.053.650,00	100,00	599.295.602,50	100,00	85,00	1,00	705.053.650	8,33	131.157.400	833,33	18,60		
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan yang disediakan	5,00	694.558.500	1,00	131.157.400	1,00	138.911.700,00	1,00	118.074.945,00	100,00	85,00	1,00	138.911.700	1,00	131.157.400	100,00	94,42		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan yang disediakan	5,00	1.710.868.250	-	-	1,00	342.173.650,00	1,00	290.847.602,50	100,00	85,00	1,00	342.173.650	-	-	0,00	0,00		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang disediakan	50,00	1.119.841.500	-	-	10,00	223.968.300,00	10,00	190.373.055,00	100,00	85,00	10,00	223.968.300	-	-	0,00	0,00		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan	2,00	567.000.000	-	38.800.000	2,00	113.400.000,00	2,00	96.390.000,00	100,00	85,00	2,00	113.400.000	-	38.800.000	0,00	34,22		
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Cakupan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	100,00	567.000.000	40,00	38.800.000	#####	113.400.000,00	100,00	96.390.000,00	100,00	85,00	1,00	113.400.000	40,00	38.800.000	4000,00	34,22		
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah fasilitasi penegakan Perda dan Perbup di Kecamatan	50,00	567.000.000	4,00	38.800.000	10,00	113.400.000,00	10,00	96.390.000,00	100,00	85,00	10,00	113.400.000	4,00	38.800.000	40,00	34,22		
	URUSAN KECAMATAN						-	-											KECAMATAN BLIMBINGSARI	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	95,00	12.115.068.130	38,26	827.187.430	92,50	#####	92,50	2.120.136.922,75	100,00	87,50	85	2.423.013.626	38,26	827.187.430	45,02	34,14		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	100	9.706.090.170	50,00	639.064.334	#####	#####	100,00	1.698.565.779,75	100,00	87,50	100	1.941.218.034	50,00	639.064.334	50,00	32,92		
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah penyediaan gaji dan tunjangan asn yang diadakan	120	9.706.090.170	12,00	639.064.334	24,00	#####	24,00	1.698.565.779,75	100,00	87,50	24	1.941.218.034	12,00	639.064.334	50,00	32,92		
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi umum perangkat daerah	100	1.413.608.500	53,26	141.171.500	#####	282.721.700,00	100,00	248.795.096,00	100,00	88,00	100	282.721.700	53,26	141.171.500	53,26	49,93		
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan yang diadakan	120	54.786.000	-	-	24,00	10.957.200,00	24,00	9.642.336,00	100,00	88,00	24	10.957.200	-	-	0,00	0,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020						Target Program/Kegiatan RKPd tahun berjalan (tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun berjalan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp	K	Rp	Target RKPd Tahun 2021		Realisasi RKPd Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)		K	Rp	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Realisasi Target s/d tahun 2021			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan kantor yang disediakan	60	334.379.000	6,00	35.190.900	12,00	66.875.800,00	12,00	58.850.704,00	100,00	88,00	12	66.875.800	6,00	35.190.900	50,00	52,62		
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah logistik kantor yang disediakan	5	59.288.000	1,00	11.857.600	1,00	11.857.600,00	1,00	10.434.688,00	100,00	88,00	1	11.857.600	1,00	11.857.600	100,00	100,00		
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang di sediakan	7.500	458.218.500	#####	54.413.000	#####	91.643.700,00	#####	80.646.456,00	100,00	88,00	1500	91.643.700	#####	54.413.000	66,67	59,37		
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	5	128.637.000	1,00	21.790.000	1,00	25.727.400,00	1,00	22.640.112,00	100,00	88,00	1	25.727.400	1,00	21.790.000	100,00	84,70		
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	3.445	378.300.000	178,00	17.920.000	#####	75.660.000,00	689,00	66.580.800,00	100,00	88,00	689	75.660.000	178,00	17.920.000	25,83	23,68		
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100	222.853.500	-	-	#####	44.570.700,00	100,00	39.222.216,00	100,00	88,00	100	44.570.700	-	-	0,00	0,00		
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	jumlah mebel yang di sediakan	50	222.853.500	-	-	10,00	44.570.700,00	10,00	37.885.095,00	100,00	85,00	10	44.570.700	-	-	0,00	0,00		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	772.515.960	49,80	46.951.596	#####	154.503.192,00	100,00	131.327.713,20	100,00	85,00	100	154.503.192	49,80	46.951.596	49,80	30,39		
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah matrai yang di sediakan	4.980	45.000.000	498,00	4.500.000	#####	9.000.000,00	996,00	7.650.000,00	100,00	85,00	996	9.000.000	498,00	4.500.000	50,00	50,00		
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang di sediakan	60	121.515.960	6,00	12.151.596	12,00	24.303.192,00	12,00	20.657.713,20	100,00	85,00	12	24.303.192	6,00	12.151.596	50,00	50,00		
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah distop.komputer.laptop.printer yang di sediakan	30	606.000.000	1,00	30.300.000	6,00	121.200.000,00	6,00	103.020.000,00	100,00	85,00	6	121.200.000	1,00	30.300.000	16,67	25,00		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik	85,00	1.898.701.000	-	221.097.000	80,00	379.740.200,00	80,00	322.779.170,00	100,00	85,00	80	379.740.200	-	221.097.000	0,00	58,22		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100	1.898.701.000	#####	221.097.000	#####	379.740.200,00	100,00	322.779.170,00	100,00	85,00	100	379.740.200	#####	221.097.000	200,00	58,22		
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah keluarga miskin yang terlayani	5	1.898.701.000	2,00	221.097.000	1,00	379.740.200,00	1,00	322.779.170,00	100,00	85,00	1	379.740.200	2,00	221.097.000	200,00	58,22		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan	2,00	12.286.000	-	-	2,00	2.457.200,00	2,00	2.088.620,00	100,00	85,00	2	2.457.200	-	-	0,00	0,00		
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Cakupan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	100	12.286.000	-	-	#####	2.457.200,00	100,00	2.088.620,00	100,00	85,00	100	2.457.200	-	-	0,00	0,00		
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah penegakan perda dan perbup yang dilaksanakan	60	12.286.000	-	-	12,00	2.457.200,00	12,00	2.088.620,00	100,00	85,00	12	2.457.200	-	-	0,00	0,00		
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase laporan keuangan desa yang selesai tepat waktu	90,00	63.704.500	-	-	90,00	12.740.900,00	90,00	10.829.765,00	100,00	85,00	90	12.740.900	-	-	0,00	0,00		
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	63.704.500	-	-	#####	12.740.900,00	100,00	10.829.765,00	100,00	85,00	100	12.740.900	-	-	0,00	0,00		
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlahfasilitasi pengelolaan keuangan desa dilaksanakan	60	63.704.500	-	-	12,00	12.740.900,00	12,00	10.829.765,00	100,00	85,00	12	12.740.900	-	-	0,00	0,00		
	URUSAN KECAMATAN																		KECAMATAN CLURING	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	95,00	13.620.887.080	42,52	1.104.993.723	92,50	#####	92,50	2.315.550.803,60	100,00	85,00	93,50	2.724.177.416	42,52	1.104.993.723	45,48	40,56		
7.01.01.2.02	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	11.586.120.830	50,00	925.927.502	#####	#####	100,00	1.969.640.541,10	100,00	85,00	100	2.317.224.166	50,00	925.927.502	50,00	39,96		
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen gaji ASN yang disediakan	120	11.586.120.830	12,00	925.927.502	24,00	#####	24,00	1.969.640.541,10	100,00	85,00	24	2.317.224.166	12,00	925.927.502	50,00	39,96		
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	936.965.000	44,91	88.108.960	#####	187.393.000,00	100,00	159.284.050,00	100,00	85,00	100	187.393.000	44,91	88.108.960	44,91	47,02		
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	580	24.986.500	116,00	4.998.400	#####	4.997.300,00	116,00	4.247.705,00	100,00	85,00	116	4.997.300	116,00	4.998.400	100,00	100,02		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020					Target Program/Kegiatan RKPd tahun berjalan (tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun berjalan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Tingkat Realisasi (%)	K	Rp	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021				Tingkat Capaian Realisasi Target s/d tahun 2021
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	4.310	195.000.000	858,00	54.100.000	#####	39.000.000,00	862,00	33.150.000,00	100,00	85,00	862	39.000.000	858,00	54.100.000	99,54	138,72		
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	1.000	32.498.000	200,00	6.394.960	#####	6.499.600,00	200,00	5.524.660,00	100,00	85,00	200	6.499.600	200,00	6.394.960	100,00	98,39		
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor	8.500	220.000.000	700,00	20.000.000	#####	44.000.000,00	#####	37.400.000,00	100,00	85,00	1.700	44.000.000	700,00	20.000.000	41,18	45,45		
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah barang cetakan dan pengadaan	5.000	74.999.000	-	-	#####	14.999.800,00	#####	12.749.830,00	100,00	85,00	1.000	14.999.800	-	-	0,00	0,00		
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitasi Kunjungan Tamu	725	24.976.500	73,00	2.615.600	#####	4.995.300,00	145,00	4.246.005,00	100,00	85,00	145	4.995.300	73,00	2.615.600	50,34	52,36		
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2. Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1.560	364.505.000	-	-	#####	72.901.000,00	312,00	61.965.850,00	100,00	85,00	312	72.901.000	-	-	0,00	0,00		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	950.998.880	75,17	90.957.261	#####	190.199.776,00	100,00	161.669.809,60	100,00	85,00	100	190.199.776	75,17	90.957.261	75,17	47,82		
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah perangko, materai dan benda pos lainnya yang disediakan	2.500	25.000.000	400,00	4.000.000	#####	5.000.000,00	500,00	4.250.000,00	100,00	85,00	500	5.000.000	400,00	4.000.000	80,00	80,00		
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60	214.998.880	6,00	15.857.261	12,00	42.999.776,00	12,00	36.549.809,60	100,00	85,00	12	42.999.776	6,00	15.857.261	50,00	36,88		
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	420	711.000.000	42,00	71.100.000	84,00	142.200.000,00	84,00	120.870.000,00	100,00	85,00	84	142.200.000	42,00	71.100.000	50,00	50,00		
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	146.802.370	-	-	#####	29.360.474,00	100,00	24.956.402,90	100,00	85,00	100	29.360.474	-	-	0,00	0,00		
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	5	49.987.000	-	-	1,00	9.997.400,00	1,00	8.497.790,00	100,00	85,00	1	9.997.400	-	-	0,00	0,00		
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	105	96.815.370	-	-	21,00	19.363.074,00	21,00	16.458.612,90	100,00	85,00	21	19.363.074	-	-	0,00	0,00		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik	85	2.444.310.000	80,00	79.516.400	80,00	488.862.000,00	80,00	415.532.700,00	100,00	85,00	80	488.862.000	80,00	79.516.400	100,00	16,27		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	2.369.310.000	16,67	64.516.400	#####	473.862.000,00	100,00	402.782.700,00	100,00	85,00	100	473.862.000	16,67	64.516.400	16,67	13,62		
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	30	2.369.310.000	1,00	64.516.400	6,00	473.862.000,00	6,00	402.782.700,00	100,00	85,00	6	473.862.000	1,00	64.516.400	16,67	13,62		
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	75.000.000	#####	15.000.000	#####	15.000.000,00	100,00	12.750.000,00	100,00	85,00	100	15.000.000	#####	15.000.000	100,00	100,00		
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	5	75.000.000	1,00	15.000.000	1,00	15.000.000,00	1,00	12.750.000,00	100,00	85,00	1	15.000.000	1,00	15.000.000	100,00	100,00		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan	30	99.994.500	-	7.204.100	25,00	19.998.900,00	25,00	16.999.065,00	100,00	85,00	25	19.998.900	-	7.204.100	0,00	36,02		
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	99.994.500	-	7.204.100	#####	19.998.900,00	100,00	16.999.065,00	100,00	85,00	100	19.998.900	-	7.204.100	0,00	36,02		
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	15	99.994.500	-	7.204.100	3,00	19.998.900,00	3,00	16.999.065,00	100,00	85,00	3	19.998.900	-	7.204.100	0,00	36,02		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENRAMAN DAN KETERIBAN UMUM	Jumlah pelanggaran perda dan perbub di kecamatan	2	15.000.000	-	2.000.000	2,00	3.000.000,00	2,00	2.550.000,00	100,00	85,00	2	3.000.000	-	2.000.000	0,00	66,67		
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Cakupan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100	15.000.000	#####	2.000.000	#####	3.000.000,00	100,00	2.550.000,00	100,00	85,00	100	3.000.000	#####	2.000.000	100,00	66,67		
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah pelaksanaan penertiban dan pemeliharaan keamanan di kecamatan	5	15.000.000	1,00	2.000.000	1,00	3.000.000,00	1,00	2.550.000,00	100,00	85,00	1	3.000.000	1,00	2.000.000	100,00	66,67		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020						Target Program/Kegiatan RPKD tahun berjalan (tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun berjalan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Tingkat Realisasi (%)	K	Rp	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Realisasi Target s/d tahun 2021		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase laporan keuangan desa uang selesai tepat waktu	90	64.999.500	90,00	12.999.900	90,00	12.999.900,00	90,00	11.049.915,00	100,00	85,00	90	12.999.900	90,00	12.999.900	100,00	100,00		
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	64.999.500	#####	12.999.900	#####	12.999.900,00	100,00	11.049.915,00	100,00	85,00	100	12.999.900	#####	12.999.900	100,00	100,00		
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	5	64.999.500	1,00	12.999.900	1,00	12.999.900,00	1,00	11.049.915,00	100,00	85,00	1	12.999.900	1,00	12.999.900	100,00	100,00		
	URUSAN KECAMATAN						-	-											KECAMATAN GAMBIRAN	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	95,00	10.372.400.895	36,94	691.749.141	92,50	#####	92,50	1.763.308.152,15	100,00	85,00	85	2.074.480.179	36,94	691.749.141	43,46	33,35		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	100	8.376.133.955	50,00	593.781.976	#####	#####	100,00	1.423.942.772,35	100,00	85,00	100	1.675.226.791	50,00	593.781.976	50,00	35,44		
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Gaji ASN yang disediakan	120	8.376.133.955	12,00	593.781.976	24,00	#####	24,00	1.423.942.772,35	100,00	85,00	24	1.675.226.791	12,00	593.781.976	50,00	35,44		
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi umum perangkat daerah	100	945.572.000	46,71	61.482.900	#####	189.114.400,00	100,00	160.747.240,00	100,00	85,00	100	189.114.400	46,71	61.482.900	46,71	32,51		
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik yang di adakan	600	54.105.500	120,00	10.821.100	#####	10.821.100,00	120,00	9.197.935,00	100,00	85,00	120	10.821.100	120,00	10.821.100	100,00	100,00		
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	20	259.997.000	2,00	18.026.200	4,00	51.999.400,00	4,00	44.199.490,00	100,00	85,00	4	51.999.400	2,00	18.026.200	50,00	34,67		
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1.500	89.999.000	100,00	5.219.600	#####	17.999.800,00	300,00	15.299.830,00	100,00	85,00	300	17.999.800	100,00	5.219.600	33,33	29,00		
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Natura dan Pakan Natura yang disediakan	17.500	149.977.500	#####	11.340.000	#####	29.995.500,00	#####	25.496.175,00	100,00	85,00	3500	29.995.500	#####	11.340.000	28,57	37,81		
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	67.500	94.993.000	#####	10.656.000	#####	18.998.600,00	#####	16.148.810,00	100,00	85,00	13500	18.998.600	#####	10.656.000	51,85	56,09		
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat - rapat Koordinasi / konsultasi keluar Daerah	1.000	296.500.000	10,00	5.420.000	#####	59.300.000,00	200,00	50.405.000,00	100,00	85,00	200	59.300.000	10,00	5.420.000	5,00	9,14		
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100	158.526.500	-	-	#####	31.705.300,00	100,00	26.949.505,00	100,00	85,00	100	31.705.300	-	-	0,00	0,00		
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	30	58.833.500	-	-	#####	11.766.700,00	100,00	10.001.695,00	100,00	85,00	6	11.766.700	-	-	0,00	0,00		
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang di sediakan	15	99.693.000	-	-	3,00	19.938.600,00	3,00	16.947.810,00	100,00	85,00	3	19.938.600	-	-	0,00	0,00		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	624.996.240	88,00	36.484.265	#####	124.999.248,00	100,00	106.249.360,80	100,00	85,00	100	124.999.248	88,00	36.484.265	88,00	29,19		
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Maerai yang di sediakan	1.200	9.000.000	240,00	1.800.000	#####	1.800.000,00	240,00	1.530.000,00	100,00	85,00	240	1.800.000	240,00	1.800.000	100,00	100,00		
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik yang disediakan	60	108.996.240	6,00	8.284.265	12,00	21.799.248,00	12,00	18.529.360,80	100,00	85,00	12	21.799.248	6,00	8.284.265	50,00	38,00		
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	60	30.000.000	-	-	12,00	6.000.000,00	12,00	5.100.000,00	100,00	85,00	12	6.000.000	-	-	0,00	0,00		
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Perkantoran yang disediakan	180	477.000.000	18,00	26.400.000	36,00	95.400.000,00	36,00	81.090.000,00	100,00	85,00	36	95.400.000	18,00	26.400.000	50,00	27,67		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100	267.172.200	-	-	#####	53.434.440,00	100,00	45.419.274,00	100,00	85,00	100	53.434.440	-	-	0,00	0,00		
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang di pelihara	5	74.834.000	-	-	#####	14.966.800,00	100,00	12.721.780,00	100,00	85,00	1	14.966.800	-	-	0,00	0,00		
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	jumlah mebler yang dipelihara	50	29.900.000	-	-	10,00	5.980.000,00	10,00	5.083.000,00	100,00	85,00	10	5.980.000	-	-	0,00	0,00		
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	5	124.998.200	-	-	#####	24.999.640,00	100,00	21.249.694,00	100,00	85,00	1	24.999.640	-	-	0,00	0,00		
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan Prasarana kantor yang di pelihara	50	37.440.000	-	-	10,00	7.488.000,00	10,00	6.364.800,00	100,00	85,00	10	7.488.000	-	-	0,00	0,00		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik	85,00	1.519.584.500	66,67	68.529.200	80,00	303.916.900,00	80,00	258.329.365,00	100,00	85,00	80	303.916.900	66,67	68.529.200	83,33	22,55		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020						Target Program/Kegiatan RKPd tahun berjalan (tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun berjalan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d tahun 2021	K	Rp	K			Rp
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100	1.444.584.500	33,33	53.529.200	#####	288.916.900,00	100,00	245.579.365,00	100,00	85,00	100	288.916.900	33,33	53.529.200	33,33	18,53			
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	jumlah peningkatan efektivitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat kecamatan	15	1.444.584.500	1,00	53.529.200	3,00	288.916.900,00	3,00	245.579.365,00	100,00	85,00	3	288.916.900	1,00	53.529.200	33,33	18,53			
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	100	75.000.000	#####	15.000.000	#####	15.000.000,00	100,00	12.750.000,00	100,00	85,00	100	15.000.000	#####	15.000.000	100,00	100,00			
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	5	75.000.000	1,00	15.000.000	1,00	15.000.000,00	1,00	12.750.000,00	100,00	85,00	1	15.000.000	1,00	15.000.000	100,00	100,00			
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan	30,00	75.355.000	33,33	3.976.600	25,00	15.071.000,00	25,00	12.810.350,00	100,00	85,00	25	15.071.000	33,33	3.976.600	133,33	26,39			
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	100	75.355.000	33,33	3.976.600	#####	15.071.000,00	100,00	12.810.350,00	100,00	85,00	100	15.071.000	33,33	3.976.600	33,33	26,39			
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektiditas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	15	75.355.000	1,00	3.976.600	#####	15.071.000,00	100,00	12.810.350,00	100,00	85,00	3	15.071.000	1,00	3.976.600	33,33	26,39			
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan	2,00	42.139.000	-	-	2,00	8.427.800,00	2,00	7.163.630,00	100,00	85,00	2	8.427.800	-	-	0,00	0,00			
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Cakupan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	100	42.139.000	-	-	#####	8.427.800,00	100,00	7.163.630,00	100,00	85,00	100	8.427.800	-	-	0,00	0,00			
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Oenerapan dan Penegakan Perauran Daerah	5	42.139.000	-	-	1,00	8.427.800,00	1,00	7.163.630,00	100,00	85,00	1	8.427.800	-	-	0,00	0,00			
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase laporan keuangan desa yang selesai tepat waktu	90,00	57.139.000	-	-	90,00	11.427.800,00	90,00	9.713.630,00	100,00	85,00	90	11.427.800	-	-	0,00	0,00			
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	57.139.000	-	-	#####	11.427.800,00	100,00	9.713.630,00	100,00	85,00	100	11.427.800	-	-	0,00	0,00			
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Fasilitasi Pengelollan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5	57.139.000	-	-	1,00	11.427.800,00	1,00	9.713.630,00	100,00	85,00	1	11.427.800	-	-	0,00	0,00			
URUSAN KECAMATAN																				KECAMATAN GENTENG	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	95,00	11.940.455.650	44,87	1.373.083.063	93,00	#####	93,00	2.029.877.460,50	100,00	85,00	85	2.388.091.130	44,87	1.373.083.063	52,79	57,50			
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	100	9.454.593.650	61,54	1.197.788.889	#####	#####	100,00	1.607.280.920,50	100,00	85,00	100	1.890.918.730	61,54	1.197.788.889	61,54	63,34			
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen penyediaan gaji dan tunjangan ASN	130	9.454.593.650	16,00	1.197.788.889	26,00	#####	26,00	1.607.280.920,50	100,00	85,00	26	1.890.918.730	16,00	1.197.788.889	61,54	63,34			
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi umum perangkat daerah	100	1.190.869.500	23,70	88.416.700	#####	238.173.900,00	100,00	202.447.815,00	100,00	85,00	100	238.173.900	23,70	88.416.700	23,70	37,12			
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat-alat Listrik yang disediakan	415	50.000.000	83,00	10.000.000	83,00	10.000.000,00	83,00	8.500.000,00	100,00	85,00	83	10.000.000	83,00	10.000.000	100,00	100,00			
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	9.750	382.125.000	950,00	43.416.800	#####	76.425.000,00	#####	64.961.250,00	100,00	85,00	1950	76.425.000	950,00	43.416.800	48,72	56,81			
		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5	-	1,00		1,00		1,00		100,00		1	1,00	1,00		100,00				
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	4.625	74.999.500	925,00	14.999.900	#####	14.999.900,00	925,00	12.749.915,00	100,00	85,00	925	14.999.900	925,00	14.999.900	100,00	100,00			
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik yang disediakan	4.625	49.995.000	-	-	#####	9.999.000,00	925,00	8.499.150,00	100,00	85,00	925	9.999.000	-	-	0,00	0,00			
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	6.250	100.000.000	#####	20.000.000	#####	20.000.000,00	#####	17.000.000,00	100,00	85,00	1250	20.000.000	#####	20.000.000	100,00	100,00			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020					Target Program/Kegiatan RKPd tahun berjalan (tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun berjalan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Tingkat Realisasi (%)	K	Rp	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d tahun 2021	K	Rp			K
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	2.750		550,00		#####		550,00		100,00		550		550,00		100,00			
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	46.250	533.750.000	-	-	#####	106.750.000,00	#####	90.737.500,00	100,00	85,00	9250	106.750.000	-	-	0,00	0,00		
		Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang disediakan	4.625		-		#####		925,00		100,00		925		-		0,00			
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	1.270.000.000	94,26	86.877.474	100	254.000.000,00	100,00	215.900.000,00	100,00	85,00	100	254.000.000	94,26	86.877.474	94,26	34,20		
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah perangko materai dan benda pos lainnya yang disediakan	4.625	25.000.000	925,00	5.000.000	#####	5.000.000,00	925,00	4.250.000,00	100,00	85,00	925	5.000.000	925,00	5.000.000	100,00	100,00		
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan telepon listrik dan air	60	390.000.000	6,00	24.877.474	12,00	78.000.000,00	12,00	66.300.000,00	100,00	85,00	12	78.000.000	6,00	24.877.474	50,00	31,89		
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	540	855.000.000	54,00	57.000.000	#####	171.000.000,00	108,00	145.350.000,00	100,00	85,00	108	171.000.000	54,00	57.000.000	50,00	33,33		
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100	24.992.500	-	-	100	4.998.500,00	100,00	4.248.725,00	100,00	85,00	100	4.998.500	-	-	0,00	0,00		
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	20	24.992.500	-	-	4,00	4.998.500,00	4,00	4.248.725,00	100,00	85,00	4	4.998.500	-	-	0,00	0,00		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik	85,00	1.859.420.000	58,69	161.556.800	80,00	371.884.000,00	80,00	316.101.400,00	100,00	85,00	80	371.884.000	58,69	161.556.800	73,37	43,44		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100	1.809.420.000	17,39	151.556.800	100	361.884.000,00	100,00	307.601.400,00	100,00	85,00	100	361.884.000	17,39	151.556.800	17,39	41,88		
7.01.02.2.01.01	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah fasilitasi permukiman warga miskin	54.750	1.809.420.000	#####	151.556.800	#####	361.884.000,00	#####	307.601.400,00	100,00	85,00	10950	361.884.000	#####	151.556.800	17,35	41,88		
		Jumlah sosialisasi pembinaan khusus	60		6,00		12,00		12,00		100,00		12		6,00		50,00			
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	100	50.000.000	#####	10.000.000	100	10.000.000,00	100,00	8.500.000,00	100,00	85,00	100	10.000.000	#####	10.000.000	100,00	100,00		
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	5	50.000.000	1,00	10.000.000	1,00	10.000.000,00	1,00	8.500.000,00	100,00	85,00	1	10.000.000	1,00	10.000.000	100,00	100,00		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan	30,00	50.000.000	-	-	25,00	10.000.000,00	25,00	8.500.000,00	100,00	85,00	25	10.000.000	-	-	0,00	0,00		
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	100	50.000.000	-	-	100	10.000.000,00	100,00	8.500.000,00	100,00	85,00	100	10.000.000	-	-	0,00	0,00		
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	60	50.000.000	-	-	12,00	10.000.000,00	12,00	8.500.000,00	100,00	85,00	12	10.000.000	-	-	0,00	0,00		
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase laporan keuangan desa yang selesai tepat waktu	90,00	40.000.000	90,00	8.000.000	90,00	8.000.000,00	90,00	6.800.000,00	100,00	85,00	90	8.000.000	90,00	8.000.000	100,00	100,00		
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	40.000.000	#####	8.000.000	100	8.000.000,00	100,00	6.800.000,00	100,00	85,00	100	8.000.000	#####	8.000.000	100,00	100,00		
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	15	40.000.000	3,00	8.000.000	3,00	8.000.000,00	3,00	6.800.000,00	100,00	85,00	3	8.000.000	3,00	8.000.000	100,00	100,00		
							-	-												KECAMATAN GIRI
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	95,00	37.516.023.860	17,49	1.781.672.342	92,50	#####	92,50	6.077.595.865,32	100,00	81,00	85	7.503.204.772	17,49	1.781.672.342	20,57	23,75		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	100	22.232.967.980	50,00	1.578.220.886	100	#####	100,00	3.601.740.812,76	100,00	81,00	100	4.446.593.596	50,00	1.578.220.886	50,00	35,49		
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah gaji dan tunjangan ASN yang disediakan	120	22.232.967.980	12,00	1.578.220.886	24,00	#####	24,00	3.601.740.812,76	100,00	81,00	24	4.446.593.596	12,00	1.578.220.886	50,00	35,49		
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi umum perangkat daerah	100	2.199.909.550	6,09	72.542.900	100	439.981.910,00	100,00	356.385.347,10	100,00	81,00	100	439.981.910	6,09	72.542.900	6,09	16,49		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020						Target Program/Kegiatan RPKD tahun berjalan (tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun berjalan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp	K	Rp	Target RKPd Tahun 2021		Realisasi RKPd Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)		K	Rp	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Realisasi Target s/d tahun 2021			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik yang diadakan Kantor	1.740	299.794.500	148,00	14.226.200	#####	59.958.900,00	348,00	48.566.709,00	100,00	81,00	348	59.958.900	148,00	14.226.200	42,53	23,73		
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor yang diadakan	6.525	675.687.000	5,00	3.132.700	#####	135.137.400,00	#####	109.461.294,00	100,00	81,00	1305	135.137.400	5,00	3.132.700	0,38	2,32		
		Jumlah Peralatan dan Perlengkap.Kantor yang diadakan	25		1,00	-	5,00		5,00	0,00	100,00		5	1,00	-	20,00				
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah tangga yang diadakan	1.725	169.859.550	-	-	#####	33.971.910,00	345,00	27.517.247,10	100,00	81,00	345	33.971.910	-	-	0,00	0,00		
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Natura dan Pakan-Natura yang diadakan	1.290	307.440.000	58,00	1.899.000	#####	61.488.000,00	258,00	49.805.280,00	100,00	81,00	258	61.488.000	58,00	1.899.000	22,48	3,09		
		Jumlah Peny.BBM yang diadakan	17.500		50,00	-	#####		#####	0,00	100,00		3500	50,00	-	1,43				
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang diadakan	88.830	224.978.500	-	-	#####	44.995.700,00	#####	36.446.517,00	100,00	81,00	17766	44.995.700	-	-	0,00	0,00		
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah surat kabar yang diadakan yang diadakan	3.675	39.950.000	-	-	#####	7.990.000,00	735,00	6.471.900,00	100,00	81,00	735	7.990.000	-	-	0,00	0,00		
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah perjalanan dinas luar dan dalam yang diadakan	195	482.200.000	39,00	53.285.000	39,00	96.440.000,00	39,00	78.116.400,00	100,00	81,00	39	96.440.000	39,00	53.285.000	100,00	55,25		
		Jumlah makanan dan minuman yang diadakan	10.000		#####	-	#####		#####	0,00	100,00		2000	#####	-	65,00				
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	1.570.000.000	-	-	100	314.000.000,00	100,00	254.340.000,00	100,00	81,00	#####	314.000.000	-	-	0,00	0,00		
7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	5	1.570.000.000	-	-	1,00	314.000.000,00	1,00	254.340.000,00	100,00	81,00	1	314.000.000	-	-	0,00	0,00		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	1.950.950.030	31,34	130.908.556	100	390.190.006,00	100,00	316.053.904,86	100,00	81,00	100	390.190.006	31,34	130.908.556	31,34	33,55		
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan materai yang diadakan	1.650	35.000.000	90,00	3.000.000	#####	7.000.000,00	330,00	5.670.000,00	100,00	81,00	330	7.000.000	90,00	3.000.000	27,27	42,86		
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang diadakan	60	547.950.030	6,00	36.708.556	12,00	109.590.006,00	12,00	88.767.904,86	100,00	81,00	12	109.590.006	6,00	36.708.556	50,00	33,50		
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum yang diadakan	300	1.368.000.000	30,00	91.200.000	60,00	273.600.000,00	60,00	221.616.000,00	100,00	81,00	60	273.600.000	30,00	91.200.000	50,00	33,33		
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100	9.562.196.300	-	-	100	#####	100,00	1.549.075.800,60	100,00	81,00	100	1.912.439.260	-	-	0,00	0,00		
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25	91.085.500	-	-	5,00	18.217.100,00	5,00	14.755.851,00	100,00	81,00	5	18.217.100	-	-	0,00	0,00		
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5	7.424.138.300	-	-	1,00	#####	1,00	1.202.710.404,60	100,00	81,00	1	1.484.827.660	-	-	0,00	0,00		
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5	2.046.972.500	-	-	1,00	409.394.500,00	1,00	331.609.545,00	100,00	81,00	1	409.394.500	-	-	0,00	0,00		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik	85,00	2.079.125.500	58,33	73.822.500	80,00	415.825.100,00	80,00	374.242.590,00	100,00	90,00	80	415.825.100	58,33	73.822.500	72,92	17,75		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100	1.954.138.000	16,67	48.825.000	100	390.827.600,00	100,00	351.744.840,00	100,00	90,00	100	390.827.600	16,67	48.825.000	16,67	12,49		
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	30	1.954.138.000	1,00	48.825.000	6,00	390.827.600,00	6,00	351.744.840,00	100,00	90,00	6	390.827.600	1,00	48.825.000	16,67	12,49		
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	100	124.987.500	#####	24.997.500	100	24.997.500,00	100,00	22.497.750,00	100,00	90,00	100	24.997.500	#####	24.997.500	100,00	100,00		
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	5	124.987.500	1,00	24.997.500	1,00	24.997.500,00	1,00	22.497.750,00	100,00	90,00	1	24.997.500	1,00	24.997.500	100,00	100,00		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan	30,00	2.105.915.800	-	14.499.700	25,00	421.183.160,00	25,00	379.064.844,00	100,00	90,00	25	421.183.160	-	14.499.700	0,00	3,44		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020						Target Program/Kegiatan RPKD tahun berjalan (tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun berjalan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp	K	Rp	Target RPKD Tahun 2021		Realisasi RPKD Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)		K	Rp	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Realisasi Target s/d tahun 2021			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	100	1.369.916.000	-	7.000.000	100	273.983.200,00	100,00	246.584.880,00	100,00	90,00	100	273.983.200	-	7.000.000	0,00	2,55		
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5	1.369.916.000	-	7.000.000	1,00	273.983.200,00	1,00	246.584.880,00	100,00	90,00	1	273.983.200	-	7.000.000	0,00	2,55		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan pemberdayaan kelurahan	100	735.999.800	-	7.499.700	100	147.199.960,00	100,00	132.479.964,00	100,00	90,00	100	147.199.960	-	7.499.700	0,00	5,09		
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5	149.996.000	-	7.499.700	1,00	29.999.200,00	1,00	26.999.280,00	100,00	90,00	1	29.999.200	-	7.499.700	0,00	25,00		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah keterlibatan masyarakat	5	366.290.300	-	-	1,00	73.258.060,00	1,00	65.932.254,00	100,00	90,00	1	73.258.060	-	-	0,00	0,00		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah keterlibatan masyarakat	5	219.713.500	-	-	1,00	43.942.700,00	1,00	39.548.430,00	100,00	90,00	1	43.942.700	-	-	0,00	0,00		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan	2,00	99.987.000	-	4.095.000	2,00	19.997.400,00	2,00	17.997.660,00	100,00	90,00	2	19.997.400	-	4.095.000	0,00	20,48		
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Cakupan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	100	99.987.000	-	4.095.000	100	19.997.400,00	100,00	17.997.660,00	100,00	90,00	100	19.997.400	-	4.095.000	0,00	20,48		
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Pelaksanaan Penertiban dan Pemeliharaan Keamanan di Kecamatan	10	99.987.000	-	4.095.000	2,00	19.997.400,00	2,00	17.997.660,00	100,00	90,00	2	19.997.400	-	4.095.000	0,00	20,48		
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase laporan keuangan desa yang selesai tepat waktu	90,00	59.993.500	#####	5.250.000	90,00	11.998.700,00	90,00	10.798.830,00	100,00	90,00	90	11.998.700	#####	5.250.000	111,11	43,75		
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	59.993.500	#####	5.250.000	100	11.998.700,00	100,00	10.798.830,00	100,00	90,00	100	11.998.700	#####	5.250.000	100,00	43,75		
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5	59.993.500	1,00	5.250.000	1,00	11.998.700,00	1,00	10.798.830,00	100,00	90,00	1	11.998.700	1,00	5.250.000	100,00	43,75		
URUSAN KECAMATAN							-	-											KECAMATAN GLAGAH	
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	95,00	19.760.036.150	73,91	1.787.462.482	92,50	#####	92,50	2.884.965.277,90	100,00	73,00	85,00	3.952.007.230	73,91	1.787.462.482	86,96	45,23		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	100	15.386.129.370	50,00	1.616.656.782	100	#####	100,00	2.246.374.888,02	100,00	73,00	100	3.077.225.874	50,00	1.616.656.782	50,00	52,54		
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen penyediaan gaji dan tunjangan ASN	120	15.386.129.370	12,00	1.616.656.782	24,00	#####	24,00	2.246.374.888,02	100,00	73,00	24	3.077.225.874	12,00	1.616.656.782	50,00	52,54		
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi umum perangkat daerah	100	1.894.772.750	95,65	116.440.700	100	378.954.550,00	100,00	276.636.821,50	100,00	73,00	100	378.954.550	95,65	116.440.700	95,65	30,73		
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	250	149.931.000	50,00	29.986.200	50,00	29.986.200,00	50,00	21.889.926,00	100,00	73,00	50	29.986.200	50,00	29.986.200	100,00	100,00		
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5	994.979.500	-	29.223.700	1,00	198.995.900,00	1,00	145.267.007,00	100,00	73,00	1	198.995.900	-	29.223.700	0,00	14,69		
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	75	124.964.500	15,00	24.992.900	15,00	24.992.900,00	15,00	18.244.817,00	100,00	73,00	15	24.992.900	15,00	24.992.900	100,00	100,00		
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	5	124.933.750	-	4.954.100	1,00	24.986.750,00	1,00	18.240.327,50	100,00	73,00	1	24.986.750	-	4.954.100	0,00	19,83		
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5	149.999.000	1,00	19.933.800	1,00	29.999.800,00	1,00	21.899.854,00	100,00	73,00	1	29.999.800	1,00	19.933.800	100,00	66,45		
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	5	349.965.000	-	7.350.000	1,00	69.993.000,00	1,00	51.094.890,00	100,00	73,00	1	69.993.000	-	7.350.000	0,00	10,50		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	1.069.004.030	25,00	18.700.000	100	213.800.806,00	100,00	156.074.588,38	100,00	73,00	100	213.800.806	25,00	18.700.000	25,00	8,75		
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah perangko, materai dan benda pos lainnya yang disediakan	5	20.000.000	1,00	4.000.000	1,00	4.000.000,00	1,00	2.920.000,00	100,00	73,00	1	4.000.000	1,00	4.000.000	100,00	100,00		
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	5	178.004.030	-	14.700.000	1,00	35.600.806,00	1,00	25.988.588,38	100,00	73,00	1	35.600.806	-	14.700.000	0,00	41,29		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020						Target Program/Kegiatan RKPd tahun berjalan (tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun berjalan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Tingkat Realisasi (%)	K	Rp	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d tahun 2021	K	Rp	K		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5	175.000.000	-	-	1,00	35.000.000,00	1,00	25.550.000,00	100,00	73,00	1	35.000.000	-	-	0,00	0,00		
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	5	696.000.000	-	14.700.000	1,00	139.200.000,00	1,00	101.616.000,00	100,00	73,00	1	139.200.000	-	14.700.000	0,00	10,56		
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100	1.410.130.000	50,00	35.665.000	100	282.026.000,00	100,00	205.878.980,00	100,00	73,00	100	282.026.000	50,00	35.665.000	50,00	12,65		
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan ,pajak dan perizinan kendaraan dinas yang disediakan	5	84.875.000	1,00	10.775.000	1,00	16.975.000,00	1,00	12.391.750,00	100,00	73,00	1	16.975.000	1,00	10.775.000	100,00	63,48		
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah pemeliharaan mabeleur yang disediakan	5	74.825.000	-	-	1,00	14.965.000,00	1,00	10.924.450,00	100,00	73,00	1	14.965.000	-	-	0,00	0,00		
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan perlengkapan yang tersedia	5	124.450.000	1,00	24.890.000	1,00	24.890.000,00	1,00	18.169.700,00	100,00	73,00	1	24.890.000	1,00	24.890.000	100,00	100,00		
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung kantor yang disediakan	5	1.125.980.000	-	-	1,00	225.196.000,00	1,00	164.393.080,00	100,00	73,00	1	225.196.000	-	-	0,00	0,00		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik	85,00	3.221.398.500	66,67	116.457.400	80,00	644.279.700,00	80,00	534.752.151,00	100,00	83,00	80	644.279.700	66,67	116.457.400	83,33	18,08		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100	3.096.399.500	33,33	91.457.600	100	619.279.900,00	100,00	514.002.317,00	100,00	83,00	100	619.279.900	33,33	91.457.600	33,33	14,77		
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektif kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan Peningkatan Efektif kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	30	3.096.399.500	2,00	91.457.600	6,00	619.279.900,00	6,00	514.002.317,00	100,00	83,00	6	619.279.900	2,00	91.457.600	33,33	14,77		
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	100	124.999.000	#####	24.999.800	100	24.999.800,00	100,00	20.749.834,00	100,00	83,00	100	24.999.800	#####	24.999.800	100,00	100,00		
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	5	124.999.000	1,00	24.999.800	1,00	24.999.800,00	1,00	20.749.834,00	100,00	83,00	1	24.999.800	1,00	24.999.800	100,00	100,00		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan	30,00	2.032.793.500	16,67	23.611.300	25,00	406.558.700,00	25,00	337.443.721,00	100,00	83,00	25	406.558.700	16,67	23.611.300	66,67	5,81		
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	100	1.317.943.500	33,33	23.611.300	100	263.588.700,00	100,00	218.778.621,00	100,00	83,00	100	263.588.700	33,33	23.611.300	33,33	8,96		
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektif kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kec.	10	1.247.944.500	-	9.611.500	2,00	249.588.900,00	2,00	207.158.787,00	100,00	83,00	2	249.588.900	-	9.611.500	0,00	3,85		
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan	5	69.999.000	1,00	13.999.800	1,00	13.999.800,00	1,00	11.619.834,00	100,00	83,00	1	13.999.800	1,00	13.999.800	100,00	100,00		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan pemberdayaan kelurahan	100	714.850.000	-	-	100	142.970.000,00	100,00	118.665.100,00	100,00	83,00	100	142.970.000	-	-	0,00	0,00		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	5	714.850.000	-	-	1,00	142.970.000,00	1,00	118.665.100,00	100,00	83,00	1	142.970.000	-	-	0,00	0,00		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan	2	49.992.500	-	-	2,00	9.998.500,00	2,00	8.298.755,00	100,00	83,00	2	9.998.500	-	-	0,00	0,00		
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Cakupan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	100	49.992.500	-	-	100	9.998.500,00	100,00	8.298.755,00	100,00	83,00	100	9.998.500	-	-	0,00	0,00		
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah pelaksanaan penertiban dan pemeliharaan keamanan di kec.	5	49.992.500	-	-	1,00	9.998.500,00	1,00	8.298.755,00	100,00	83,00	1	9.998.500	-	-	0,00	0,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020						Target Program/Kegiatan RKPd tahun berjalan (tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun berjalan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d tahun 2021	K	Rp	K		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase laporan keuangan desa yang selesai tepat waktu	90,00	64.973.500	-	-	90,00	12.994.700,00	90,00	10.785.601,00	100,00	83,00	90	12.994.700	-	-	0,00	0,00		
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	64.973.500	-	-	100	12.994.700,00	100,00	10.785.601,00	100,00	83,00	100	12.994.700	-	-	0,00	0,00		
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	5	64.973.500	-	-	1,00	12.994.700,00	1,00	10.785.601,00	100,00	83,00	1	12.994.700	-	-	0,00	0,00		
	URUSAN KECAMATAN						-	-											KECAMATAN GLENMORE	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	95,00	9.081.706.335	51,14	589.973.225	92,50	#####	92,50	1.362.255.950,25	100,00	75,00	85	1.816.341.267	51,14	589.973.225	60,17	32,48		
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	99.999.000	50,00	19.999.800	100	19.999.800,00	100,00	14.999.850,00	100,00	75,00	100	19.999.800	50,00	19.999.800	50,00	100,00		
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penyediaan gaji dan tunjangan ASN	120	99.999.000	12,00	19.999.800	24,00	19.999.800,00	24,00	14.999.850,00	100,00	75,00	24	19.999.800	12,00	19.999.800	50,00	100,00		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	100	6.624.695.730	50,00	440.847.926	100	#####	100,00	993.704.359,50	100,00	75,00	100	1.324.939.146	50,00	440.847.926	50,00	33,27		
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dana yang dibayarkan	60	6.624.695.730	6,00	440.847.926	12,00	#####	12,00	993.704.359,50	100,00	75,00	12	1.324.939.146	6,00	440.847.926	50,00	33,27		
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi umum perangkat daerah	100	700.436.000	45,83	64.141.900	100	140.087.200,00	100,00	105.065.400,00	100,00	75,00	100	140.087.200	45,83	64.141.900	45,83	45,79		
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah dana yang disediakan	60	56.594.000	12,00	11.318.800	12,00	11.318.800,00	12,00	8.489.100,00	100,00	75,00	12	11.318.800	12,00	11.318.800	100,00	100,00		
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan kantor yang disediakan	60	207.482.000	3,00	32.850.400	12,00	41.496.400,00	12,00	31.122.300,00	100,00	75,00	12	41.496.400	3,00	32.850.400	25,00	79,16		
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah barang yang diadakan	60	59.123.500	12,00	11.824.700	12,00	11.824.700,00	12,00	8.868.525,00	100,00	75,00	12	11.824.700	12,00	11.824.700	100,00	100,00		
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik kantor yang disediakan	60	67.050.000	3,00	3.348.000	12,00	13.410.000,00	12,00	10.057.500,00	100,00	75,00	12	13.410.000	3,00	3.348.000	25,00	24,97		
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang yang diadakan	60	74.386.500	-	-	12,00	14.877.300,00	12,00	11.157.975,00	100,00	75,00	12	14.877.300	-	-	0,00	0,00		
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah dana yang disediakan	60	235.800.000	3,00	4.800.000	12,00	47.160.000,00	12,00	35.370.000,00	100,00	75,00	12	47.160.000	3,00	4.800.000	25,00	10,18		
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100	167.512.000	50,00	27.458.200	100	33.502.400,00	100,00	25.126.800,00	100,00	75,00	100	33.502.400	50,00	27.458.200	50,00	81,96		
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	tersedia mebel	60	30.221.000	-	-	12,00	6.044.200,00	12,00	4.533.150,00	100,00	75,00	12	6.044.200	-	-	0,00	0,00		
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	tersedianya dana	60	137.291.000	12,00	27.458.200	12,00	27.458.200,00	12,00	20.593.650,00	100,00	75,00	12	27.458.200	12,00	27.458.200	100,00	100,00		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	985.288.100	21,43	32.532.599	100	197.057.620,00	100,00	147.793.215,00	100,00	75,00	100	197.057.620	21,43	32.532.599	21,43	16,51		
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah materai yang dibutuhkan	5	30.000.000	-	1.500.000	1,00	6.000.000,00	1,00	4.500.000,00	100,00	75,00	1	6.000.000	-	1.500.000	0,00	25,00		
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah dana yang dibayarkan	5	88.288.100	-	2.132.599	1,00	17.657.620,00	1,00	13.243.215,00	100,00	75,00	1	17.657.620	-	2.132.599	0,00	12,08		
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah dana yang disediakan	60	867.000.000	3,00	28.900.000	12,00	173.400.000,00	12,00	130.050.000,00	100,00	75,00	12	173.400.000	3,00	28.900.000	25,00	16,67		
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100	503.775.505	6,25	4.992.800	100	100.755.101,00	100,00	75.566.325,75	100,00	75,00	100	100.755.101	6,25	4.992.800	6,25	4,96		
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jasa pemeliharaan yang dilaksanakan	60	75.735.500	3,00	4.992.800	12,00	15.147.100,00	12,00	11.360.325,00	100,00	75,00	12	15.147.100	3,00	4.992.800	25,00	32,96		
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	tersedianya dana pemeliharaan	60	3.135.000	-	-	12,00	627.000,00	12,00	470.250,00	100,00	75,00	12	627.000	-	-	0,00	0,00		
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah dana yang disediakan	60	250.000.000	-	-	12,00	50.000.000,00	12,00	37.500.000,00	100,00	75,00	12	50.000.000	-	-	0,00	0,00		
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	tersedianya dana	60	174.905.005	-	-	12,00	34.981.001,00	12,00	26.235.750,75	100,00	75,00	12	34.981.001	-	-	0,00	0,00		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik	85,00	1.877.330.000	80,00	68.458.000	80,00	375.466.000,00	80,00	319.146.100,00	100,00	85,00	80	375.466.000	80,00	68.458.000	100,00	18,23		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020						Target Program/Kegiatan RKPd tahun berjalan (tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun berjalan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp	K	Rp	Target RKPd Tahun 2021		Realisasi RKPd Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)		K	Rp	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Realisasi Target s/d tahun 2021			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100	1.698.345.000	40,00	33.500.000	100	339.669.000,00	100,00	288.718.650,00	100,00	85,00	100	339.669.000	40,00	33.500.000	40,00	9,86		
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang disediakan	25	1.698.345.000	2,00	33.500.000	5,00	339.669.000,00	5,00	288.718.650,00	100,00	85,00	5	339.669.000	2,00	33.500.000	40,00	9,86		
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	100	178.985.000	#####	34.958.000	100	35.797.000,00	100,00	30.427.450,00	100,00	85,00	100	35.797.000	#####	34.958.000	100,00	97,66		
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan yang disediakan	5	178.985.000	1,00	34.958.000	1,00	35.797.000,00	1,00	30.427.450,00	100,00	85,00	1	35.797.000	1,00	34.958.000	100,00	97,66		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan	30,00	54.989.500	-	10.997.900	25,00	10.997.900,00	25,00	9.348.215,00	100,00	85,00	25	10.997.900	-	10.997.900	0,00	100,00		
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	100	54.989.500	-	10.997.900	100	10.997.900,00	100,00	9.348.215,00	100,00	85,00	100	10.997.900	-	10.997.900	0,00	100,00		
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang disediakan	30	54.989.500	-	10.997.900	6,00	10.997.900,00	6,00	9.348.215,00	100,00	85,00	6	10.997.900	-	10.997.900	0,00	100,00		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan	2,00	8.500.000	-	-	2,00	1.700.000,00	2,00	1.445.000,00	100,00	85,00	2	1.700.000	-	-	0,00	0,00		
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Cakupan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	100	8.500.000	-	-	100	1.700.000,00	100,00	1.445.000,00	100,00	85,00	100	1.700.000	-	-	0,00	0,00		
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	5	8.500.000	-	-	1,00	1.700.000,00	1,00	1.445.000,00	100,00	85,00	1	1.700.000	-	-	0,00	0,00		
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase laporan keuangan desa yang selesai tepat waktu	90,00	62.122.000	-	-	90,00	12.424.400,00	90,00	10.560.740,00	100,00	85,00	90	12.424.400	-	-	0,00	0,00		
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	62.122.000	-	-	100	12.424.400,00	100,00	10.560.740,00	100,00	85,00	100	12.424.400	-	-	0,00	0,00		
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa yang disediakan	5	62.122.000	-	-	1,00	12.424.400,00	1,00	10.560.740,00	100,00	85,00	1	12.424.400	-	-	0,00	0,00		
URUSAN KECAMATAN							-	-											KECAMATAN KABAT	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	95,00	13.164.959.250	74,09	918.112.088	92,50	#####	92,50	2.035.302.700,05	100,00	77,30	93,50	2.632.991.850	74,09	918.112.088	79,24	34,87		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	100	11.185.257.690	50,00	672.483.510	100	#####	100,00	1.729.240.838,87	100,00	77,30	100	2.237.051.538	50,00	672.483.510	50,00	30,06		
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji ASN yang diadakan	120	11.185.257.690	12,00	672.483.510	24,00	#####	24,00	1.729.240.838,87	100,00	77,30	24	2.237.051.538	12,00	672.483.510	50,00	30,06		
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi umum perangkat daerah	100	786.058.000	#####	137.834.400	100	157.211.600,00	100,00	121.524.566,80	100,00	77,30	100	157.211.600	#####	137.834.400	100,00	87,67		
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	5	49.950.500	1,00	9.990.100	1,00	9.990.100,00	1,00	7.722.347,30	100,00	77,30	1	9.990.100	1,00	9.990.100	100,00	100,00		
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5	225.000.000	1,00	45.000.000	1,00	45.000.000,00	1,00	34.785.000,00	100,00	77,30	1	45.000.000	1,00	45.000.000	100,00	100,00		
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	5	64.972.000	1,00	12.994.400	1,00	12.994.400,00	1,00	10.044.671,20	100,00	77,30	1	12.994.400	1,00	12.994.400	100,00	100,00		
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	5	176.465.000	1,00	15.969.000	1,00	35.293.000,00	1,00	27.281.489,00	100,00	77,30	1	35.293.000	1,00	15.969.000	100,00	45,25		
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	5	49.958.500	1,00	9.991.700	1,00	9.991.700,00	1,00	7.723.584,10	100,00	77,30	1	9.991.700	1,00	9.991.700	100,00	100,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020						Target Program/Kegiatan RKPd tahun berjalan (tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun berjalan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp	K	Rp	Target RKPd Tahun 2021		Realisasi RKPd Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)		K	Rp	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Realisasi Target s/d tahun 2021			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	500	19.992.000	100,00	3.945.200	#####	3.998.400,00	100,00	3.090.763,20	100,00	77,30	100	3.998.400	100,00	3.945.200	100,00	98,67		
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	5	199.720.000	1,00	39.944.000	1,00	39.944.000,00	1,00	30.876.712,00	100,00	77,30	1	39.944.000	1,00	39.944.000	100,00	100,00		
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100	124.782.300	33,33	19.964.000	100	24.956.460,00	100,00	19.291.343,58	100,00	77,30	100	24.956.460	33,33	19.964.000	33,33	80,00		
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang disediakan	5	99.820.000	1,00	19.964.000	1,00	19.964.000,00	1,00	15.432.172,00	100,00	77,30	1	19.964.000	1,00	19.964.000	100,00	100,00		
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diadakan	10	24.962.300	-	-	2,00	4.992.460,00	2,00	3.859.171,58	100,00	77,30	2	4.992.460	-	-	0,00	0,00		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	739.854.260	60,64	46.970.378	100	147.970.852,00	100,00	114.381.468,60	100,00	77,30	100	147.970.852	60,64	46.970.378	60,64	31,74		
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah perangko, materai dan benda pos lainnya yang disediakan	1.355	15.000.000	271,00	3.000.000	#####	3.000.000,00	271,00	2.319.000,00	100,00	77,30	271	3.000.000	271,00	3.000.000	100,00	100,00		
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	60	194.993.260	6,00	11.970.378	12,00	38.998.652,00	12,00	30.145.958,00	100,00	77,30	12	38.998.652	6,00	11.970.378	50,00	30,69		
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	695	49.861.000	-	-	#####	9.972.200,00	139,00	7.708.510,60	100,00	77,30	139	9.972.200	-	-	0,00	0,00		
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa perkantoran yang disediakan	240	480.000.000	8,00	32.000.000	48,00	96.000.000,00	48,00	74.208.000,00	100,00	77,30	48	96.000.000	8,00	32.000.000	16,67	33,33		
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100	329.007.000	47,83	40.859.800	100	65.801.400,00	100,00	50.864.482,20	100,00	77,30	100	65.801.400	47,83	40.859.800	47,83	62,10		
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	50	49.686.500	10,00	9.937.300	10,00	9.937.300,00	10,00	7.681.532,90	100,00	77,30	10	9.937.300	10,00	9.937.300	100,00	100,00		
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah pemeliharaan mabeleur yang disediakan	5	49.983.000	-	-	1,00	9.996.600,00	1,00	7.727.371,80	100,00	77,30	1	9.996.600	-	-	0,00	0,00		
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50	49.975.000	-	-	10,00	9.995.000,00	10,00	7.726.135,00	100,00	77,30	10	9.995.000	-	-	0,00	0,00		
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Direhabilitasi sedang/berat	5	154.612.500	1,00	30.922.500	1,00	30.922.500,00	1,00	23.903.092,50	100,00	77,30	1	30.922.500	1,00	30.922.500	100,00	100,00		
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang dipelihara	5	24.750.000	-	-	1,00	4.950.000,00	1,00	3.826.350,00	100,00	77,30	1	4.950.000	-	-	0,00	0,00		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik	85,00	1.505.999.000	66,67	129.998.600	80,00	301.199.800,00	80,00	256.019.830,00	100,00	85,00	80	301.199.800	66,67	129.998.600	83,33	43,16		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100	1.430.999.500	33,33	114.998.700	100	286.199.900,00	100,00	243.269.915,00	100,00	85,00	100	286.199.900	33,33	114.998.700	33,33	40,18		
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	30	1.430.999.500	2,00	114.998.700	6,00	286.199.900,00	6,00	243.269.915,00	100,00	85,00	6	286.199.900	2,00	114.998.700	33,33	40,18		
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	100	74.999.500	#####	14.999.900	100	14.999.900,00	100,00	12.749.915,00	100,00	85,00	100	14.999.900	#####	14.999.900	100,00	100,00		
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	5	74.999.500	1,00	14.999.900	1,00	14.999.900,00	1,00	12.749.915,00	100,00	85,00	1	14.999.900	1,00	14.999.900	100,00	100,00		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan	30,00	75.000.000	-	15.000.000	25,00	15.000.000,00	25,00	14.250.000,00	100,00	95,00	25	15.000.000	-	15.000.000	0,00	100,00		
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	100	75.000.000	#####	15.000.000	100	15.000.000,00	100,00	14.250.000,00	100,00	95,00	100	15.000.000	#####	15.000.000	100,00	100,00		
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	15	75.000.000	3,00	15.000.000	3,00	15.000.000,00	3,00	14.250.000,00	100,00	95,00	3	15.000.000	3,00	15.000.000	100,00	100,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020						Target Program/Kegiatan RKPd tahun berjalan (tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun berjalan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp	K	Rp	Target RKPd Tahun 2021		Realisasi RKPd Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)		K	Rp	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Realisasi Target s/d tahun 2021			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan	2,00	50.356.500	-	-	2,00	10.071.300,00	2,00	8.560.605,00	100,00	85,00	2	10.071.300	-	-	0,00	0,00		
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Cakupan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	100	50.356.500	-	-	100	10.071.300,00	100,00	8.560.605,00	100,00	85,00	100	10.071.300	-	-	0,00	0,00		
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Pelaksanaan Penertiban dan Pemeliharaan Keamanan di Kecamatan	5	50.356.500	-	-	1,00	10.071.300,00	1,00	8.560.605,00	100,00	85,00	1	10.071.300	-	-	0,00	0,00		
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase laporan keuangan desa yang selesai tepat waktu	90,00	65.000.000	-	-	90,00	13.000.000,00	90,00	10.790.000,00	100,00	83,00	90	13.000.000	-	-	0,00	0,00		
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	65.000.000	-	-	100	13.000.000,00	100,00	10.790.000,00	100,00	83,00	100	13.000.000	-	-	0,00	0,00		
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5	65.000.000	-	-	1,00	13.000.000,00	1,00	10.790.000,00	100,00	83,00	1	13.000.000	-	-	0,00	0,00		
	URUSAN KECAMATAN						-	-												KECAMATAN KALIBARU
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	95,00	11.014.536.400	77,98	854.782.915	92,50	#####	92,50	1.707.253.142,00	100,00	77,50	85	2.202.907.280	77,98	854.782.915	91,74	38,80		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	100	8.853.827.615	50,00	700.193.651	100	#####	100,00	1.372.343.280,33	100,00	77,50	100	1.770.765.523	50,00	700.193.651	50,00	39,54		
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dana yang dibayarkan	60	8.853.827.615	6,00	700.193.651	12,00	#####	12,00	1.372.343.280,33	100,00	77,50	12	1.770.765.523	6,00	700.193.651	50,00	39,54		
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi umum perangkat daerah	100	870.550.500	91,11	39.691.780	100	174.110.100,00	100,00	134.935.327,50	100,00	77,50	100	174.110.100	91,11	39.691.780	91,11	22,80		
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang dipakai	100	74.932.000	20,00	14.986.400	20,00	14.986.400,00	20,00	11.614.460,00	100,00	77,50	20	14.986.400	20,00	14.986.400	100,00	100,00		
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan kantor yang disediakan	60	170.979.500	3,00	4.151.700	12,00	34.195.900,00	12,00	26.501.822,50	100,00	77,50	12	34.195.900	3,00	4.151.700	25,00	12,14		
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik kantor yang disediakan	5	149.935.000	-	5.093.680	1,00	29.987.000,00	1,00	23.239.925,00	100,00	77,50	1	29.987.000	-	5.093.680	0,00	16,99		
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	5	74.999.000	-	2.560.000	1,00	14.999.800,00	1,00	11.624.845,00	100,00	77,50	1	14.999.800	-	2.560.000	0,00	17,07		
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang disediakan	5	399.705.000	-	12.900.000	1,00	79.941.000,00	1,00	61.954.275,00	100,00	77,50	1	79.941.000	-	12.900.000	0,00	16,14		
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100	149.818.500	#####	29.963.700	100	29.963.700,00	100,00	23.221.867,50	100,00	77,50	100	29.963.700	#####	29.963.700	100,00	100,00		
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah barang yang diadakan	20	149.818.500	4,00	29.963.700	4,00	29.963.700,00	4,00	23.221.867,50	100,00	77,50	4	29.963.700	4,00	29.963.700	100,00	100,00		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	826.546.090	94,64	84.933.784	100	165.309.218,00	100,00	128.114.643,95	100,00	77,50	100	165.309.218	94,64	84.933.784	94,64	51,38		
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah materai yang dibutuhkan	1.000	7.500.000	200,00	1.500.000	#####	1.500.000,00	200,00	1.162.500,00	100,00	77,50	200	1.500.000	200,00	1.500.000	100,00	100,00		
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah jasa komunikasi, sda dan listrik	60	102.546.090	6,00	10.233.784	12,00	20.509.218,00	12,00	15.894.643,95	100,00	77,50	12	20.509.218	6,00	10.233.784	50,00	49,90		
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah dana yang dibayarkan	60	716.500.000	6,00	73.200.000	12,00	143.300.000,00	12,00	111.057.500,00	100,00	77,50	12	143.300.000	6,00	73.200.000	50,00	51,08		
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100	313.793.695	-	-	100	62.758.739,00	100,00	48.638.022,73	100,00	77,50	100	62.758.739	-	-	0,00	0,00		
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah dana yang dibayarkan	45	99.909.000	-	-	9,00	19.981.800,00	9,00	15.485.895,00	100,00	77,50	9	19.981.800	-	-	0,00	0,00		
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya	5	149.974.695	-	-	1,00	29.994.939,00	1,00	23.246.077,73	100,00	77,50	1	29.994.939	-	-	0,00	0,00		
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan sarana gedung kantor dan bangunan lainnya	5	63.910.000	-	-	1,00	12.782.000,00	1,00	9.906.050,00	100,00	77,50	1	12.782.000	-	-	0,00	0,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020						Target Program/Kegiatan RKPd tahun berjalan (tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun berjalan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Tingkat Realisasi (%)	K	Rp	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Realisasi Target s/d tahun 2021		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik	85,00	1.918.019.500	50,00	70.965.500	80,00	383.603.900,00	80,00	320.309.256,50	100,00	83,50	80	383.603.900	50,00	70.965.500	62,50	18,50		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100	1.868.019.500	-	60.965.500	100	373.603.900,00	100,00	311.959.256,50	100,00	83,50	100	373.603.900	-	60.965.500	0,00	16,32		
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah keluarga miskin yang terlayani	5	1.868.019.500	-	60.965.500	1,00	373.603.900,00	1,00	311.959.256,50	100,00	83,50	1	373.603.900	-	60.965.500	0,00	16,32		
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	100	50.000.000	#####	10.000.000	100	10.000.000,00	100,00	8.350.000,00	100,00	83,50	100	10.000.000	#####	10.000.000	100,00	100,00		
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah perencanaan pembangunan yang dilaksanakan	5	50.000.000	1,00	10.000.000	1,00	10.000.000,00	1,00	8.350.000,00	100,00	83,50	1	10.000.000	1,00	10.000.000	100,00	100,00		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan	30,00	140.478.500	-	7.312.700	25,00	28.095.700,00	25,00	23.459.909,50	100,00	83,50	25	28.095.700	-	7.312.700	0,00	26,03		
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	100	140.478.500	25,00	7.312.700	100	28.095.700,00	100,00	23.459.909,50	100,00	83,50	100	28.095.700	25,00	7.312.700	25,00	26,03		
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan	60	140.478.500	3,00	7.312.700	12,00	28.095.700,00	12,00	23.459.909,50	100,00	83,50	12	28.095.700	3,00	7.312.700	25,00	26,03		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan	2,00	71.796.250	-	2.224.400	2,00	14.359.250,00	2,00	11.989.973,75	100,00	83,50	2	14.359.250	-	2.224.400	0,00	15,49		
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Cakupan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	100	71.796.250	25,00	2.224.400	100	14.359.250,00	100,00	11.989.973,75	100,00	83,50	100	14.359.250	25,00	2.224.400	25,00	15,49		
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah penegakan perda dan perbup yang dilaksanakan	60	71.796.250	3,00	2.224.400	12,00	14.359.250,00	12,00	11.989.973,75	100,00	83,50	12	14.359.250	3,00	2.224.400	25,00	15,49		
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase laporan keuangan desa yang selesai tepat waktu	90,00	36.065.500	25,00	2.511.100	90,00	7.213.100,00	90,00	6.022.938,50	100,00	83,50	90	7.213.100	25,00	2.511.100	27,78	34,81		
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	36.065.500	25,00	2.511.100	100	7.213.100,00	100,00	6.022.938,50	100,00	83,50	100	7.213.100	25,00	2.511.100	25,00	34,81		
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah fasilitasi pengelolaan keuangan desa dilaksanakan	60	36.065.500	3,00	2.511.100	12,00	7.213.100,00	12,00	6.022.938,50	100,00	83,50	12	7.213.100	3,00	2.511.100	25,00	34,81		
	URUSAN KECAMATAN						-	-												KECAMATAN KALIPURO
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	95,00	38.242.606.665	54,88	1.959.083.356	92,50	#####	92,50	6.424.757.919,72	100,00	84,00	85	7.648.521.333	54,88	1.959.083.356	64,56	25,61		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	100	22.607.470.825	50,00	1.690.841.546	100	#####	100,00	3.798.055.098,60	100,00	84,00	100	4.521.494.165	50,00	1.690.841.546	50,00	37,40		
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen penyediaan gaji dan tunjangan ASN	120	22.607.470.825	12	1.690.841.546	24,00	#####	24,00	3.798.055.098,60	100,00	84,00	24	4.521.494.165	12	1.690.841.546	50,00	37,40		
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi umum perangkat daerah	100	2.333.160.450	96,35	105.271.300	100	466.632.090,00	100,00	391.970.955,60	100,00	84,00	100	466.632.090	96,35	105.271.300	96,35	22,56		
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	250	317.345.650	20	29.810.200	50,00	63.469.130,00	50,00	53.314.069,20	100,00	84,00	50	63.469.130	20	29.810.200	40,00	46,97		
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5	699.932.450	-	31.185.200	1,00	139.986.490,00	1,00	117.588.651,60	100,00	84,00	1	139.986.490	-	31.185.200	0,00	22,28		
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	75	118.600.250	10	18.406.900	15,00	23.720.050,00	15,00	19.924.842,00	100,00	84,00	15	23.720.050	10	18.406.900	66,67	77,60		
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	5	257.400.000	-	5.751.000	1,00	51.480.000,00	1,00	43.243.200,00	100,00	84,00	1	51.480.000	-	5.751.000	0,00	11,17		
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5	127.477.100	-	5.722.000	1,00	25.495.420,00	1,00	21.416.152,80	100,00	84,00	1	25.495.420	-	5.722.000	0,00	22,44		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020						Target Program/Kegiatan RKPd tahun berjalan (tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun berjalan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp	K	Rp	Target RKPd Tahun 2021		Realisasi RKPd Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)		K	Rp	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Realisasi Target s/d tahun 2021			
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	5.000	49.980.000	1.000	9.996.000	#####	9.996.000,00	#####	8.396.640,00	100,00	84,00	1.000	9.996.000	1.000	9.996.000	100,00	100,00		
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	5	762.425.000	-	4.400.000	1,00	152.485.000,00	1,00	128.087.400,00	100,00	84,00	1	152.485.000	-	4.400.000	0,00	2,89		
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100	5.091.749.500	-	-	100	#####	100,00	855.413.916,00	100,00	84,00	100	1.018.349.900	-	-	0,00	0,00		
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang disediakan	5	1.243.682.000	-	-	1,00	248.736.400,00	1,00	208.938.576,00	100,00	84,00	1	248.736.400	-	-	0,00	0,00		
7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	35	1.749.894.500	-	-	7,00	349.978.900,00	7,00	293.982.276,00	100,00	84,00	7	349.978.900	-	-	0,00	0,00		
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan	50	2.098.173.000	-	-	10,00	419.634.600,00	10,00	352.493.064,00	100,00	84,00	10	419.634.600	-	-	0,00	0,00		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	2.438.969.560	33,33	162.970.510	100	487.793.912,00	100,00	409.746.886,08	100,00	84,00	100	487.793.912	33,33	162.970.510	33,33	33,41		
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah perangko, materai dan benda pos lainnya yang disediakan	5	35.000.000	1	3.500.000	1,00	7.000.000,00	1,00	5.880.000,00	100,00	84,00	1	7.000.000	1	3.500.000	100,00	50,00		
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	5	477.969.560	-	31.070.510	1,00	95.593.912,00	1,00	80.298.886,08	100,00	84,00	1	95.593.912	-	31.070.510	0,00	32,50		
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	5	1.926.000.000	-	128.400.000	1,00	385.200.000,00	1,00	323.568.000,00	100,00	84,00	1	385.200.000	-	128.400.000	0,00	33,33		
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100	5.771.256.330	-	-	100	#####	100,00	969.571.063,44	100,00	84,00	100	1.154.251.266	-	-	0,00	0,00		
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan ,pajak dan perizinan kendaraan dinas yang disediakan	5	124.990.500	-	-	1,00	24.998.100,00	1,00	20.998.404,00	100,00	84,00	1	24.998.100	-	-	0,00	0,00		
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung kantor yang disediakan	5	3.164.079.830	-	-	1,00	632.815.966,00	1,00	531.565.411,44	100,00	84,00	1	632.815.966	-	-	0,00	0,00		
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah alat kantor yang dipelihara	30	2.482.186.000	-	-	6,00	496.437.200,00	6,00	417.007.248,00	100,00	84,00	6	496.437.200	-	-	0,00	0,00		
		Jumlah bahan bangunan yang diadakan	180	-	-	-	36,00	-	36,00	-	-	100,00	36	-	-	-	0,00	-		
		Jumlah taman yang dipelihara	5	-	-	-	1,00	-	1,00	-	-	100,00	1	-	-	-	0,00	-		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik	85,00	2.575.855.000	58,33	60.050.000	80,00	515.171.000,00	80,00	473.957.320,00	100,00	92,00	80	515.171.000	58,33	60.050.000	72,92	11,66		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100	2.450.855.000	16,67	36.250.000	100	490.171.000,00	100,00	450.957.320,00	100,00	92,00	100	490.171.000	16,67	36.250.000	16,67	7,40		
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektif kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatanPeningkatan Efektif kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	30	2.450.855.000	1	36.250.000	6,00	490.171.000,00	6,00	450.957.320,00	100,00	92,00	6	490.171.000	1	36.250.000	16,67	7,40		
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	100	125.000.000	#####	23.800.000	100	25.000.000,00	100,00	23.000.000,00	100,00	92,00	100	25.000.000	#####	23.800.000	100,00	95,20		
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	5	125.000.000	1	23.800.000	1,00	25.000.000,00	1,00	23.000.000,00	100,00	92,00	1	25.000.000	1	23.800.000	100,00	95,20		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan	30,00	3.811.299.550	10,71	22.339.000	25,00	762.259.910,00	25,00	701.279.117,20	100,00	92,00	25	762.259.910	10,71	22.339.000	42,86	2,93		
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	100	650.074.000	-	7.095.000	100	130.014.800,00	100,00	119.613.616,00	100,00	92,00	100	130.014.800	-	7.095.000	0,00	5,46		
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektif kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kec.	10	650.074.000	-	7.095.000	2,00	130.014.800,00	2,00	119.613.616,00	100,00	92,00	2	130.014.800	-	7.095.000	0,00	5,46		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan pemberdayaan kelurahan	100	3.161.225.550	21,43	15.244.000	100	632.245.110,00	100,00	581.665.501,20	100,00	92,00	100	632.245.110	21,43	15.244.000	21,43	2,41		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020						Target Program/Kegiatan RKPd tahun berjalan (tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun berjalan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp	K	Rp	Target RKPd Tahun 2021		Realisasi RKPd Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)		K	Rp	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Realisasi Target s/d tahun 2021			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembanguan	5	99.975.450	-	-	1,00	19.995.090,00	1,00	18.395.482,80	100,00	92,00	1	19.995.090	-	-	0,00	0,00		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dibangun	5	59.911.000	-	-	1,00	11.982.200,00	1,00	11.023.624,00	100,00	92,00	1	11.982.200	-	-	0,00	0,00		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Aktivitas Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	60	3.001.339.100	3	15.244.000	12,00	600.267.820,00	12,00	552.246.394,40	100,00	92,00	12	600.267.820	3	15.244.000	25,00	2,54		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan	2,00	60.000.000	-	-	2,00	12.000.000,00	2,00	11.040.000,00	100,00	92,00	2	12.000.000	-	-	0,00	0,00		
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Cakupan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	100	60.000.000	-	-	100	12.000.000,00	100,00	11.040.000,00	100,00	92,00	100	12.000.000	-	-	0,00	0,00		
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah pelaksanaan penertiban dan pemeliharaan keamanan di kec.	5	60.000.000	-	-	1,00	12.000.000,00	1,00	11.040.000,00	100,00	92,00	1	12.000.000	-	-	0,00	0,00		
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase laporan keuangan desa yang selesai tepat waktu	90,00	64.999.500	-	4.564.900	90,00	12.999.900,00	90,00	11.959.908,00	100,00	92,00	90	12.999.900	-	4.564.900	0,00	35,11		
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	64.999.500	-	4.564.900	100	12.999.900,00	100,00	11.959.908,00	100,00	92,00	100	12.999.900	-	4.564.900	0,00	35,11		
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	5	64.999.500	-	4.564.900	1,00	12.999.900,00	1,00	11.959.908,00	100,00	92,00	1	12.999.900	-	4.564.900	0,00	35,11		
	URUSAN KECAMATAN						-	-												KECAMATAN LICIN
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	95,00	12.626.989.820	52,22	854.763.138	92,50	#####	92,50	1.818.286.534,08	100,00	72,00	93,50	2.525.397.964	52,22	854.763.138	55,85	33,85		
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	99.994.000	#####	19.102.300	100	19.998.800,00	100,00	14.399.136,00	100,00	72,00	100	19.998.800	#####	19.102.300	100,00	95,52		
7.01.01.2.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Diadakan	5	99.994.000	1,00	19.102.300	1,00	19.998.800,00	1,00	14.399.136,00	100,00	72,00	1	19.998.800	1,00	19.102.300	100,00	95,52		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Laporan Keuangan yang Disediakan	100	10.742.997.960	33,33	670.882.004	100	#####	100,00	1.546.991.706,24	100,00	72,00	100	2.148.599.592	33,33	670.882.004	33,33	31,22		
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen gaji ASN yang disediakan	120	10.742.997.960	8,00	670.882.004	24,00	#####	24,00	1.546.991.706,24	100,00	72,00	24	2.148.599.592	8,00	670.882.004	33,33	31,22		
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Sub Kegiatan Pada Kegiatan Yang Dilaksanakan	100	911.005.500	62,19	113.717.600	100	182.201.100,00	100,00	131.184.792,00	100,00	72,00	100	182.201.100	62,19	113.717.600	62,19	62,41		
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan	2.975	89.997.000	-	-	#####	17.999.400,00	595,00	12.959.568,00	100,00	72,00	595	17.999.400	-	-	0,00	0,00		
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	7.385	454.008.500	757,00	73.555.600	#####	90.801.700,00	#####	65.377.224,00	100,00	72,00	1.477	90.801.700	757,00	73.555.600	51,25	81,01		
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	850	39.997.000	170,00	7.999.400	#####	7.999.400,00	170,00	5.759.568,00	100,00	72,00	170	7.999.400	170,00	7.999.400	100,00	100,00		
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan bakar yang disediakan;	11.385	102.465.000	#####	10.260.000	#####	20.493.000,00	#####	14.754.960,00	100,00	72,00	2.277	20.493.000	#####	10.260.000	50,07	50,07		
		Jumlah Natura dan pakan natura yang disediakan	15	20.488.000	2,00	4.097.600	3,00	4.097.600,00	3,00	2.950.272,00	100,00	72,00	3	4.097.600	2,00	4.097.600	66,67	100,00		
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	25.250	75.000.000	#####	14.830.000	#####	15.000.000,00	#####	10.800.000,00	100,00	72,00	5.050	15.000.000	#####	14.830.000	81,39	98,87		
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah aktifitas rapat rapat koordinasi dan konsultasi SKPD disediakan; Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	855	71.300.000	-	-	#####	14.260.000,00	171,00	10.267.200,00	100,00	72,00	171	14.260.000	-	-	0,00	0,00		
		Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	1.650	57.750.000	85,00	2.975.000	#####	11.550.000,00	330,00	8.316.000,00	100,00	72,00	330	11.550.000	85,00	2.975.000	25,76	25,76		
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Sub Kegiatan pada Kegiatan Yang Dilaksanakan	100	72.028.000	33,33	5.280.000	100	14.405.600,00	100,00	10.372.032,00	100,00	72,00	100	14.405.600	33,33	5.280.000	33,33	36,65		
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang disediakan	15	72.028.000	1,00	5.280.000	3,00	14.405.600,00	3,00	10.372.032,00	100,00	72,00	3	14.405.600	1,00	5.280.000	33,33	36,65		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020						Target Program/Kegiatan RPKD tahun berjalan (tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun berjalan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
							Target RPKD Tahun 2021		Realisasi RPKD Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Realisasi Target s/d tahun 2021			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Sub Kegiatan pada Kegiatan Yang Dilaksanakan	100	676.994.360	84,49	45.781.234	100	135.398.872,00	100,00	97.487.187,84	100,00	72,00	100	135.398.872	84,49	45.781.234	84,49	33,81		
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materi dan benda pos lainnya yang disediakan	1.500	15.000.000	300,00	3.000.000	#####	3.000.000,00	300,00	2.160.000,00	100,00	72,00	300	3.000.000	300,00	3.000.000	100,00	100,00		
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	60	116.994.360	6,00	8.781.234	12,00	23.398.872,00	12,00	16.847.187,84	100,00	72,00	12	23.398.872	6,00	8.781.234	50,00	37,53		
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa sewa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10	35.000.000	-	-	2,00	7.000.000,00	2,00	5.040.000,00	100,00	72,00	2	7.000.000	-	-	0,00	0,00		
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa perkantoran yang disediakan	300	510.000.000	10,00	34.000.000	60,00	102.000.000,00	60,00	73.440.000,00	100,00	72,00	60	102.000.000	10,00	34.000.000	16,67	33,33		
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Sub Kegiatan Pada Kegiatan Yang Dilaksanakan	100	123.970.000	-	-	100	24.794.000,00	100,00	17.851.680,00	100,00	72,00	100	24.794.000	-	-	0,00	0,00		
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	20	73.975.000	-	-	4,00	14.795.000,00	4,00	10.652.400,00	100,00	72,00	4	14.795.000	-	-	0,00	0,00		
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah taman yang dipelihara	5	49.995.000	-	-	1,00	9.999.000,00	1,00	7.199.280,00	100,00	72,00	1	9.999.000	-	-	0,00	0,00		
7.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik	85	1.672.140.500	66,22	82.577.800	80,00	334.428.100,00	80,00	295.968.868,50	100,00	88,50	80	334.428.100	66,22	82.577.800	82,77	24,69		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan	100	1.580.136.500	32,43	64.177.000	100	316.027.300,00	100,00	279.684.160,50	100,00	88,50	100	316.027.300	32,43	64.177.000	32,43	20,31		
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Fasilitas Perumahan Warga Miskin	60	442.241.000	6,00	30.016.400	12,00	88.448.200,00	12,00	78.276.657,00	100,00	88,50	12	88.448.200	6,00	30.016.400	50,00	33,94		
		Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Kecamatan Sehat	60	14.111.000	3,00	822.200	12,00	2.822.200,00	12,00	2.497.647,00	100,00	88,50	12	2.822.200	3,00	822.200	25,00	29,13		
		Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional	5	250.929.500	-	-	1,00	50.185.900,00	1,00	44.414.521,50	100,00	88,50	1	50.185.900	-	-	0,00	0,00		
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah sosialisasi pembinaan Khusus	60	872.855.000	3,00	33.338.400	12,00	174.571.000,00	12,00	154.495.335,00	100,00	88,50	12	174.571.000	3,00	33.338.400	25,00	19,10		
		Cakupan dokumen rancangan RPKD hasil Musrenbang Kecamatan	100	92.004.000	#####	18.400.800	100	18.400.800,00	100,00	16.284.708,00	100,00	88,50	100	18.400.800	#####	18.400.800	100,00	100,00		
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	5	92.004.000	1,00	18.400.800	1,00	18.400.800,00	1,00	16.284.708,00	100,00	88,50	1	18.400.800	1,00	18.400.800	100,00	100,00		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Pembangunan	30	70.640.000	12,50	5.677.200	25,00	14.128.000,00	25,00	12.503.280,00	100,00	88,50	25	14.128.000	12,50	5.677.200	50,00	40,18		
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	70.640.000	12,50	5.677.200	100	14.128.000,00	100,00	12.503.280,00	100,00	88,50	100	14.128.000	12,50	5.677.200	12,50	40,18		
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Optimalisasi dan Pengembangan Potensi Lokal	60	18.599.500	-	-	12,00	3.719.900,00	12,00	3.292.111,50	100,00	88,50	12	3.719.900	-	-	0,00	0,00		
		Jumlah Peningkatan Pemberdayaan PKK	60	52.040.500	3,00	5.677.200	12,00	10.408.100,00	12,00	9.211.168,50	100,00	88,50	12	10.408.100	3,00	5.677.200	25,00	54,55		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan	2	24.998.500	-	1.050.000	2,00	4.999.700,00	2,00	4.424.734,50	100,00	88,50	2	4.999.700	-	1.050.000	0,00	21,00		
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Cakupan Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100	24.998.500	-	1.050.000	100	4.999.700,00	100,00	4.424.734,50	100,00	88,50	100	4.999.700	-	1.050.000	0,00	21,00		
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Pelaksanaan Penertiban dan Pemeliharaan Keamanan di Kecamatan	5	24.998.500	-	1.050.000	1,00	4.999.700,00	1,00	4.424.734,50	100,00	88,50	1	4.999.700	-	1.050.000	0,00	21,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020						Target Program/Kegiatan RKPD tahun berjalan (tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun berjalan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Tingkat Realisasi (%)	K	Rp	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Realisasi Target s/d tahun 2021		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase laporan keuangan desa yang selesai tepat waktu	90	37.497.000	90,00	6.499.400	90,00	7.499.400,00	90,00	6.636.969,00	100,00	88,50	90	7.499.400	90,00	6.499.400	100,00	86,67		
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan pelaksanaan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	37.497.000	#####	6.499.400	100	7.499.400,00	100,00	6.636.969,00	100,00	88,50	100	7.499.400	#####	6.499.400	100,00	86,67		
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5	37.497.000	1,00	6.499.400	1,00	7.499.400,00	1,00	6.636.969,00	100,00	88,50	1	7.499.400	1,00	6.499.400	100,00	86,67		
	URUSAN KECAMATAN																			KECAMATAN MUNCAR
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	95,00	15.854.507.260	67,35	881.036.132	92,50	#####	92,50	2.441.594.118,04	100,00	77,00	93,5	3.170.901.452	67,35	881.036.132	72,03	27,79		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	10.636.122.955	50	668.882.316	100	#####	100,00	1.637.962.935,07	100,00	77,00	100	2.127.224.591	50	668.882.316	50,00	31,44		
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen gaji ASN yang disediakan	120	10.636.122.955	12	668.882.316	24,00	#####	24,00	1.637.962.935,07	100,00	77,00	24	2.127.224.591	12	668.882.316	50,00	31,44		
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	1.322.018.000	45	139.184.500	100	264.403.600,00	100,00	203.590.772,00	100,00	77,00	100	264.403.600	45	139.184.500	44,76	52,64		
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1.885	53.699.500	377	10.739.900	#####	10.739.900,00	377,00	8.269.723,00	100,00	77,00	377	10.739.900	377	10.739.900	100,00	100,00		
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1. Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	9.505	245.907.000	1904	48.622.700	#####	49.181.400,00	#####	37.869.678,00	100,00	77,00	1901	49.181.400	1904	48.622.700	100,16	98,86		
		2. Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	20	200.916.000	4	39.740.000	4,00	40.183.200,00	4,00	30.941.064,00	100,00	77,00	4	40.183.200	4	39.740.000	100,00	98,90		
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	2.820	113.281.000	516	22.804.500	#####	22.656.200,00	564,00	17.445.274,00	100,00	77,00	564	22.656.200	516	22.804.500	91,49	100,65		
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor	18.200	163.800.000	855	7.708.000	#####	32.760.000,00	#####	25.225.200,00	100,00	77,00	3640	32.760.000	855	7.708.000	23,49	23,53		
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah barang cetakan dan pengadaan	22.365	95.509.500	2298	9.569.400	#####	19.101.900,00	#####	14.708.463,00	100,00	77,00	4473	19.101.900	2298	9.569.400	51,37	50,10		
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1. Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan	10.475	233.975.000	0	-	#####	46.795.000,00	#####	36.032.150,00	100,00	77,00	2095	46.795.000	0	-	0,00	0,00		
		2. Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1.245	214.930.000	0	-	#####	42.986.000,00	249,00	33.099.220,00	100,00	77,00	249	42.986.000	0	-	0,00	0,00		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	830.999.305	83	61.889.316	100	166.199.861,00	100,00	127.973.892,97	100,00	77,00	100	166.199.861	83	61.889.316	83,33	37,24		
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah peranko, materai dan benda pos lainnya yang disediakan	1.200	12.000.000	240	2.400.000	#####	2.400.000,00	240,00	1.848.000,00	100,00	77,00	240	2.400.000	240	2.400.000	100,00	100,00		
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60	242.999.305	6	21.089.316	12,00	48.599.861,00	12,00	37.421.892,97	100,00	77,00	12	48.599.861	6	21.089.316	50,00	43,39		
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	360	576.000.000	24	38.400.000	72,00	115.200.000,00	72,00	88.704.000,00	100,00	77,00	72	115.200.000	24	38.400.000	33,33	33,33		
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	3.065.367.000	91	11.080.000	100	613.073.400,00	100,00	472.066.518,00	100,00	77,00	100	613.073.400	91	11.080.000	91,30	1,81		
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	5	19.637.000	1	2.980.000	1,00	3.927.400,00	1,00	3.024.098,00	100,00	77,00	1	3.927.400	1	2.980.000	100,00	75,88		
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	5	2.000.000.000	0	-	1,00	400.000.000,00	1,00	308.000.000,00	100,00	77,00	1	400.000.000	0	-	0,00	0,00		
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	105	1.045.730.000	20	8.100.000	21,00	209.146.000,00	21,00	161.042.420,00	100,00	77,00	21	209.146.000	20	8.100.000	95,24	3,87		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kondisi sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik	85,00	2.439.350.000	83	193.423.200	80,00	487.870.000,00	80,00	429.325.600,00	100,00	88,00	80	487.870.000	83	193.423.200	104,17	39,65		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	2.343.540.000	67	175.695.200	100	468.708.000,00	100,00	412.463.040,00	100,00	88,00	6	468.708.000	67	175.695.200	1111,11	37,49		
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	30	2.343.540.000	4	175.695.200	6,00	468.708.000,00	6,00	412.463.040,00	100,00	88,00	6	468.708.000	4	175.695.200	66,67	37,49		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020						Target Program/Kegiatan RPKD tahun berjalan (tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun berjalan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d tahun 2021	K	Rp	K		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	95.810.000	100	17.728.000	100	19.162.000,00	100,00	16.862.560,00	100,00	88,00	1	19.162.000	100	17.728.000	#####	92,52		
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	5	95.810.000	1	17.728.000	1,00	19.162.000,00	1,00	16.862.560,00	100,00	88,00	1	19.162.000	1	17.728.000	100,00	92,52		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan	30,00	74.988.500	0,00	4.917.700	25,00	14.997.700,00	25,00	13.197.976,00	100,00	88,00	25	14.997.700	0,00	4.917.700	0,00	32,79		
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	74.988.500	33	4.917.700	100	14.997.700,00	100,00	13.197.976,00	100,00	88,00	3	14.997.700	33	4.917.700	1092,99	32,79		
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	15	74.988.500	1	4.917.700	3,00	14.997.700,00	3,00	13.197.976,00	100,00	88,00	3	14.997.700	1	4.917.700	32,79	32,79		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENRAMAN DAN KETERIBAN UMUM	Jumlah pelanggaran perda dan perbub di kecamatan	2,00	19.010.000	0	-	2,00	3.802.000,00	2,00	3.345.760,00	100,00	88,00	2	3.802.000	0	-	0,00	0,00		
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Cakupan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100	19.010.000	0	-	100	3.802.000,00	100,00	3.345.760,00	100,00	88,00	1	3.802.000	0	-	0,00	0,00		
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah pelaksanaan penertiban dan pemeliharaan keamanan di kecamatan	10	19.010.000	0	-	2,00	3.802.000,00	2,00	3.345.760,00	100,00	88,00	2	3.802.000	0	-	0,00	0,00		
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase laporan keuangan desa uang selesai tepat waktu	90,00	41.500.000	0	-	90,00	8.300.000,00	90,00	7.304.000,00	100,00	88,00	90	8.300.000	0	-	0,00	0,00		
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	41.500.000	0	-	100	8.300.000,00	100,00	7.304.000,00	100,00	88,00	1	8.300.000	0	-	0,00	0,00		
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	5	41.500.000	0	-	1,00	8.300.000,00	1,00	7.304.000,00	100,00	88,00	1	8.300.000	0	-	0,00	0,00		
	URUSAN KECAMATAN						-	-											KECAMATAN PESANGGARAN	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	95	11.237.317.520	46,88	633.500.422	92,50	#####	92,50	1.685.597.628,00	100,00	75,00	85	2.247.463.504	46,88	633.500.422	55,16	28,19		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	100	9.613.623.560	50,00	534.205.218	100	#####	100,00	1.442.043.534,00	100,00	75,00	100	1.922.724.712	50,00	534.205.218	50,00	27,78		
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan keuangan yang disediakan	120	9.613.623.560	12,00	534.205.218	24,00	#####	24,00	1.442.043.534,00	100,00	75,00	24	1.922.724.712	12,00	534.205.218	50,00	27,78		
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi umum perangkat daerah	100	393.968.000	42,95	25.409.800	100	78.793.600,00	100,00	59.095.200,00	100,00	75,00	100	78.793.600	42,95	25.409.800	42,95	32,25		
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat listrik yang disediakan	5.000	50.000.000	600,00	6.328.600	#####	10.000.000,00	#####	7.500.000,00	100,00	75,00	1.000	10.000.000	600,00	6.328.600	60,00	63,29		
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya yang disediakan	5	49.993.000	1,00	9.031.200	1,00	9.998.600,00	1,00	7.498.950,00	100,00	75,00	1	9.998.600	1,00	9.031.200	100,00	90,32		
		Jumlah alat/bahan untuk kegiatan kantor-perabot kantor yang disediakan	5		1,00		1,00		1,00		100,00		1		1,00		100,00			
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan bakar dan pelumas yang disediakan	11.500	50.040.000	400,00	5.022.000	#####	10.008.000,00	#####	7.506.000,00	100,00	75,00	2.300	10.008.000	400,00	5.022.000	17,39	50,18		
		Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan	15.000		#####		#####		#####		100,00		3.000		#####		33,33			
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	50.000	50.000.000	#####	5.028.000	#####	10.000.000,00	#####	7.500.000,00	100,00	75,00	10.000	10.000.000	#####	5.028.000	50,00	50,28		
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	5	193.935.000	-	-	1,00	38.787.000,00	1,00	29.090.250,00	100,00	75,00	1	38.787.000	-	-	0,00	0,00		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	944.997.960	54,59	68.772.504	100	188.999.592,00	100,00	141.749.694,00	100,00	75,00	100	188.999.592	54,59	68.772.504	54,59	36,39		
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah benda pos (materai) yang disediakan	5.500	20.000.000	600,00	2.040.000	#####	4.000.000,00	#####	3.000.000,00	100,00	75,00	1.100	4.000.000	600,00	2.040.000	54,55	51,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020						Target Program/Kegiatan RKPd tahun berjalan (tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun berjalan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp	K	Rp	Target RKPd Tahun 2021		Realisasi RKPd Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)		K	Rp	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Realisasi Target s/d tahun 2021			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	180	129.997.960	18,00	11.732.504	36,00	25.999.592,00	36,00	19.499.694,00	100,00	75,00	36	25.999.592	18,00	11.732.504	50,00	45,13		
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga perkantoran (THL)	420	795.000.000	48,00	55.000.000	84,00	159.000.000,00	84,00	119.250.000,00	100,00	75,00	84	159.000.000	48,00	55.000.000	57,14	34,59		
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100	284.728.000	40,00	5.112.900	100	56.945.600,00	100,00	42.709.200,00	100,00	75,00	100	56.945.600	40,00	5.112.900	40,00	8,98		
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	45	59.761.000	4,00	5.112.900	9,00	11.952.200,00	9,00	8.964.150,00	100,00	75,00	9	11.952.200	4,00	5.112.900	44,44	42,78		
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	5	224.967.000	-	-	1,00	44.993.400,00	1,00	33.745.050,00	100,00	75,00	1	44.993.400	-	-	0,00	0,00		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik	85	2.015.556.500	33,33	84.592.150	80,00	403.111.300,00	80,00	302.333.475,00	100,00	75,00	80	403.111.300	33,33	84.592.150	41,67	20,98		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100	2.015.556.500	33,33	84.592.150	100	403.111.300,00	100,00	302.333.475,00	100,00	75,00	100	403.111.300	33,33	84.592.150	33,33	20,98		
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah peningkatan efektivitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	30	2.015.556.500	2,00	84.592.150	6,00	403.111.300,00	6,00	302.333.475,00	100,00	75,00	6	403.111.300	2,00	84.592.150	33,33	20,98		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan	30	164.506.500	-	2.972.300	25,00	32.901.300,00	25,00	24.675.975,00	100,00	75,00	25	32.901.300	-	2.972.300	0,00	9,03		
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	100	164.506.500	25,00	2.972.300	100	32.901.300,00	100,00	24.675.975,00	100,00	75,00	100	32.901.300	25,00	2.972.300	25,00	9,03		
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	60	164.506.500	3,00	2.972.300	12,00	32.901.300,00	12,00	24.675.975,00	100,00	75,00	12	32.901.300	3,00	2.972.300	25,00	9,03		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan	2	49.995.500	-	3.000.100	2,00	9.999.100,00	2,00	7.499.325,00	100,00	75,00	2	9.999.100	-	3.000.100	0,00	30,00		
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Cakupan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	100	49.995.500	50,00	3.000.100	100	9.999.100,00	100,00	7.499.325,00	100,00	75,00	100	9.999.100	50,00	3.000.100	50,00	30,00		
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah pelaksanaan penertiban dan pemeliharaan keamanan di kecamatan	20	49.995.500	2,00	3.000.100	4,00	9.999.100,00	4,00	7.499.325,00	100,00	75,00	4	9.999.100	2,00	3.000.100	50,00	30,00		
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase laporan keuangan desa yang selesai tepat waktu	90	64.995.500	33,33	2.775.600	90,00	12.999.100,00	90,00	9.749.325,00	100,00	75,00	90	12.999.100	33,33	2.775.600	37,04	21,35		
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	64.995.500	33,33	2.775.600	100	12.999.100,00	100,00	9.749.325,00	100,00	75,00	100	12.999.100	33,33	2.775.600	33,33	21,35		
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	15	64.995.500	1,00	2.775.600	3,00	12.999.100,00	3,00	9.749.325,00	100,00	75,00	3	12.999.100	1,00	2.775.600	33,33	21,35		
	URUSAN KECAMATAN						-	-											KECAMATAN PURWOHARJO	
70101	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	95,00	10.552.928.785	78,10	1.158.881.218	92,50	#####	92,50	1.815.103.751,02	100,00	86,00	93,50	2.110.585.757	78,10	1.158.881.218	83,53	54,91		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	100	8.660.616.650	50,00	876.054.184	100	#####	100,00	1.489.626.063,80	100,00	86,00	100	1.732.123.330	50,00	876.054.184	50,00	50,58		
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Gaji ASN yang disediakan	60	8.660.616.650	6,00	876.054.184	12,00	#####	12,00	1.489.626.063,80	100,00	86,00	12	1.732.123.330	6,00	876.054.184	50,00	50,58		
701012.07	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	508.842.000	60,25	67.002.400	100	101.768.400,00	100,00	87.520.824,00	100,00	86,00	100	101.768.400	60,25	67.002.400	60,25	65,84		
701012.0701	Sub. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1.000	75.306.000	200,00	15.061.200	#####	15.061.200,00	200,00	12.952.632,00	100,00	86,00	200	15.061.200	200,00	15.061.200	100,00	100,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020						Target Program/Kegiatan RKPd tahun berjalan (tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun berjalan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Tingkat Realisasi (%)	K	Rp	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Realisasi Target s/d tahun 2021		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
701012.0702	Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	35	134.611.000	7,00	26.922.200	7,00	26.922.200,00	7,00	23.153.092,00	100,00	86,00	7	26.922.200	7,00	26.922.200	100,00	100,00		
701012.0703	Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan rumah tangga yang disediakan	875	50.000.000	175,00	10.000.000	#####	10.000.000,00	175,00	8.600.000,00	100,00	86,00	175	10.000.000	175,00	10.000.000	100,00	100,00		
701012.0704	Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan Logistik Kantor yang disediakan	200	79.665.000	10,00	4.005.000	40,00	15.933.000,00	40,00	13.702.380,00	100,00	86,00	40	15.933.000	10,00	4.005.000	25,00	25,14		
701012.0705	Sub. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5.000	50.000.000	500,00	5.000.000	#####	10.000.000,00	#####	8.600.000,00	100,00	86,00	1.000	10.000.000	500,00	5.000.000	50,00	50,00		
701012.0706	Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	875	119.260.000	25,00	6.014.000	#####	23.852.000,00	175,00	20.512.720,00	100,00	86,00	100	23.852.000	25,00	6.014.000	25,00	25,21		
701012.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	1.213.925.000	85,14	85.799.634	100	242.785.000,00	100,00	208.795.100,00	100,00	86,00	100	242.785.000	85,14	85.799.634	85,14	35,34		
701012.0801	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah perangko, materai dan benda pos lainnya yang disediakan	1.500	10.000.000	300,00	2.000.000	#####	2.000.000,00	300,00	1.720.000,00	100,00	86,00	300	2.000.000	300,00	2.000.000	100,00	100,00		
701012.0802	Sub. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	120	50.000.000	12,00	11.999.634	24,00	10.000.000,00	24,00	8.600.000,00	100,00	86,00	24	37.385.000	12,00	11.999.634	50,00	32,10		
701012.0803	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	60	30.000.000	12,00	6.000.000	12,00	6.000.000,00	12,00	5.160.000,00	100,00	86,00	12	6.000.000	12,00	6.000.000	100,00	100,00		
701012.0804	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Perkantoran yang disediakan	540	987.000.000	54,00	65.800.000	#####	197.400.000,00	108,00	169.764.000,00	100,00	86,00	108	197.400.000	54,00	65.800.000	50,00	33,33		
701012.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	169.545.000	91,43	130.025.000	100	33.909.000,00	100,00	29.161.740,00	100,00	86,00	100	33.909.000	91,43	130.025.000	91,43	383,45		
701012.0901	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang di Pelihara	60	59.795.000	-	-	12,00	11.959.000,00	12,00	10.284.740,00	100,00	86,00	12	11.959.000	-	-	0,00	0,00		
701012.0902	Sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	60	24.750.000	12,00	4.950.000	12,00	4.950.000,00	12,00	4.257.000,00	100,00	86,00	12	4.950.000	12,00	4.950.000	100,00	100,00		
701012.0903	Sub. Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	50	85.000.000	10,00	17.000.000	10,00	17.000.000,00	10,00	14.620.000,00	100,00	86,00	10	17.000.000	10,00	17.000.000	100,00	100,00		
701012.09	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	270.187.500	100,00	54.037.500	20,00	54.037.500,00	20,00	46.472.250,00	100,00	86,00	100	54.037.500	100,00	54.037.500	100,00	100,00		
701012.0901	Sub. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	30	270.187.500	6,00	54.037.500	6,00	54.037.500,00	6,00	46.472.250,00	100,00	86,00	6	54.037.500	6,00	54.037.500	100,00	100,00		
70102	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik	85	1.496.003.000	80,00	299.200.600	80,00	299.200.600,00	80,00	257.312.516,00	100,00	86,00	80	299.200.600	80,00	299.200.600	100,00	100,00		
701022.01	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dalam kondisi baik	100	1.396.003.000	#####	279.200.600	100	279.200.600,00	100,00	240.112.516,00	100,00	86,00	100	279.200.600	#####	279.200.600	100,00	100,00		
701022.0101	Sub. Kegiatan Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	30	1.396.003.000	6,00	279.200.600	6,00	279.200.600,00	6,00	240.112.516,00	100,00	86,00	6	279.200.600	6,00	279.200.600	100,00	100,00		
701022.02	Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Cakupan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	100.000.000	#####	20.000.000	100	20.000.000,00	100,00	17.200.000,00	100,00	86,00	100	20.000.000	#####	20.000.000	100,00	100,00		
701022.0201	Sub. Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah fasilitasi pelaksanaan musrenbang RKPd di Kecamatan	5	100.000.000	1,00	20.000.000	1,00	20.000.000,00	1,00	17.200.000,00	100,00	86,00	1	20.000.000	1,00	20.000.000	100,00	100,00		
70103	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam kegiatan pembangunan	30	74.998.000	-	4.999.600	25,00	14.999.600,00	25,00	12.899.656,00	100,00	86,00	25	14.999.600	-	4.999.600	0,00	33,33		
70103	Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	74.998.000	33,33	4.999.600	100	14.999.600,00	100,00	12.899.656,00	100,00	86,00	100	14.999.600	33,33	4.999.600	33,33	33,33		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020						Target Program/Kegiatan RKPd tahun berjalan (tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun berjalan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp	K	Rp	Target RKPd Tahun 2021		Realisasi RKPd Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)		K	Rp	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Realisasi Target s/d tahun 2021			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13
70103	Sub. Kegiatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan desa	15	74.998.000	1,00	4.999.600	3,00	14.999.600,00	3,00	12.899.656,00	100,00	86,00	3	14.999.600	1,00	4.999.600	33,33	33,33		
70104	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan	2	42.910.000	-	-	2,00	8.582.000,00	2,00	7.380.520,00	100,00	86,00	2	8.582.000	-	-	0,00	0,00		
701042.02	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Cakupan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100	42.910.000	-	-	100	8.582.000,00	100,00	7.380.520,00	100,00	86,00	1	8.582.000	-	-	0,00	0,00		
701042.0201	Sub. Kegiatan Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugasdan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah pelaksanaan penertiban dan pemeliharaan keamanan di Kecamatan	20	50.000.000	-	-	4,00	10.000.000,00	4,00	8.600.000,00	100,00	86,00	4	8.582.000	-	-	0,00	0,00		
70106	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Keuangan Desa yang selesai tepat waktu	90	50.000.000	-	-	90,00	10.000.000,00	90,00	8.600.000,00	100,00	86,00	90	10.000.000	-	-	0,00	0,00		
701062.01	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	50.000.000	-	-	100	10.000.000,00	100,00	8.600.000,00	100,00	86,00	100	10.000.000	-	-	0,00	0,00		
701062.0101	Sub. Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5	50.000.000	-	-	1,00	10.000.000,00	1,00	8.600.000,00	100,00	86,00	1	10.000.000	-	-	0,00	0,00		
	URUSAN KECAMATAN																		KECAMATAN ROGOJAMPI	
7010801	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	95,00	1.446.796.130	38,36	500.217.807	92,50	289.359.226,00	92,50	218.176.856,40	100,00	75,40	80,00	289.359.226	38,36	500.217.807	47,95	172,87		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	100	13.014.157.450	50,00	789.033.810	100,00	#####	100,00	1.962.534.943,46	100,00	75,40	100	2.602.831.490	50,00	789.033.810	50,00	30,31		
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen penyediaan gaji dan tunjangan ASN	120	13.014.157.450	12,00	789.033.810	24,00	#####	24,00	1.962.534.943,46	100,00	75,40	24	2.602.831.490	12,00	789.033.810	50,00	30,31		
7010801206	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	607.798.500	66,67	78.210.500	100,00	121.559.700,00	100,00	91.656.013,80	100,00	75,40	100	121.559.700	66,67	78.210.500	66,67	64,34		
7010801206.01	Sub. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	5	74.960.500	1	14.992.100	1,00	14.992.100,00	1,00	11.304.043,40	100,00	75,40	1	14.992.100	1	14.992.100	100,00	100,00		
7010801206.02	Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5	152.603.500	1	30.520.700	1,00	30.520.700,00	1,00	23.012.607,80	100,00	75,40	1	30.520.700	1	30.520.700	100,00	100,00		
7010801206.03	Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan rumah tangga yang disediakan	5	82.947.500	1	16.589.500	1,00	16.589.500,00	1,00	12.508.483,00	100,00	75,40	1	16.589.500	1	16.589.500	100,00	100,00		
7010801206.04	Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan Logistik Kantor yang disediakan	5	59.990.500	-	2.061.000	1,00	11.998.100,00	1,00	9.046.567,40	100,00	75,40	1	11.998.100	-	2.061.000	0,00	17,18		
7010801206.05	Sub. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5	87.306.500	1	8.697.200	1,00	17.461.300,00	1,00	13.165.820,20	100,00	75,40	1	17.461.300	1	8.697.200	100,00	49,81		
7010801206.09	Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	5	149.990.000	-	5.350.000	1,00	29.998.000,00	1,00	22.618.492,00	100,00	75,40	1	29.998.000	-	5.350.000	0,00	17,83		
7010801208	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	516.948.825	45,12	22.192.002	100,00	103.389.765,00	100,00	77.955.882,81	100,00	75,40	100,00	103.389.765	45,12	22.192.002	45,12	21,46		
7010801208.01	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah perangko, materai dan benda pos lainnya yang disediakan	1.185	14.950.000	119	1.500.000	#####	2.990.000,00	237,00	2.254.460,00	100,00	75,40	237	2.990.000	119	1.500.000	50,21	50,17		
7010801208.02	Sub. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	60	124.998.825	3	4.992.002	12,00	24.999.765,00	12,00	18.849.822,81	100,00	75,40	12	24.999.765	3	4.992.002	25,00	19,97		
7010801208.04	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Perkantoran yang disediakan	240	377.000.000	12	15.700.000	48,00	75.400.000,00	48,00	56.851.600,00	100,00	75,40	48	75.400.000	12	15.700.000	25,00	20,82		
7010801209	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	322.048.805	16,67	5.298.400	100,00	64.409.761,00	100,00	48.564.959,79	100,00	75,40	100,00	64.409.761	16,67	5.298.400	16,67	8,23		
7010801209.02	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	50	38.992.000	2	5.298.400	10,00	7.798.400,00	10,00	5.879.993,60	100,00	75,40	10	7.798.400	2	5.298.400	20,00	67,94		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020						Target Program/Kegiatan RKPd tahun berjalan (tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun berjalan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Tingkat Realisasi (%)	K	Rp	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Realisasi Target s/d tahun 2021		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
7010801209.09	Sub. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang di rehabilitasi sedang berat	5	124.720.305	-	-	1,00	24.944.061,00	1,00	18.807.821,99	100,00	75,40	1	24.944.061	-	-	0,00	0,00		
7010801209.10	Sub. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Gedung Kantor yang dipelihara	5	158.336.500	-	-	1,00	31.667.300,00	1,00	23.877.144,20	100,00	75,40	1	31.667.300	-	-	0,00	0,00		
7010802	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik	85,00	1.876.674.000	66,67	119.373.800	80,00	375.334.800,00	80,00	283.002.439,20	100,00	75,40	80,00	375.334.800	66,67	119.373.800	83,33	31,80		
7010802201	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dalam kondisi baik	100,00	1.776.677.000	33,33	99.374.400	100,00	355.335.400,00	100,00	267.922.891,60	100,00	75,40	100,00	355.335.400	33,33	99.374.400	33,33	27,97		
7010802201.02	Sub. Kegiatan Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	30	1.776.677.000	2	99.374.400	6,00	355.335.400,00	6,00	267.922.891,60	100,00	75,40	6	355.335.400	2	99.374.400	33,33	27,97		
7010802202	Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Cakupan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100,00	99.997.000	100	19.999.400	100,00	19.999.400,00	100,00	15.079.547,60	100,00	75,40	100,00	19.999.400	100	19.999.400	100,00	100,00		
7010802202.01	Sub. Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah fasilitasi pelaksanaan musrenbang RKPd di Kecamatan	5	99.997.000	1	19.999.400	1,00	19.999.400,00	1,00	15.079.547,60	100,00	75,40	1	19.999.400	1	19.999.400	100,00	100,00		
7010803	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam kegiatan pembangunan	30,00	122.905.000	33,33	7.828.000	25,00	24.581.000,00	25,00	18.534.074,00	100,00	75,40	25,00	24.581.000	33,33	7.828.000	133,33	31,85		
7010803201	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100,00	122.905.000	33,33	7.828.000	100,00	24.581.000,00	100,00	18.534.074,00	100,00	75,40	100,00	24.581.000	33,33	7.828.000	33,33	31,85		
7010803.03	Sub. Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat tang terlaksana di Kecamatan	15	122.905.000	1	7.828.000	3,00	24.581.000,00	3,00	18.534.074,00	100,00	75,40	3	24.581.000	1	7.828.000	33,33	31,85		
7010804	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan	2	75.000.000	-	3.813.600	2,00	15.000.000,00	2,00	11.310.000,00	100,00	75,40	2	15.000.000	-	3.813.600	0,00	25,42		
7010804202	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Cakupan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100,00	75.000.000	-	3.813.600	100,00	15.000.000,00	100,00	11.310.000,00	100,00	75,40	100,00	15.000.000	-	3.813.600	0,00	25,42		
7010804202.1	Sub. Kegiatan Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan Perda dan Perbup	5	75.000.000	-	3.813.600	1,00	15.000.000,00	1,00	11.310.000,00	100,00	75,40	1	15.000.000	-	3.813.600	0,00	25,42		
7010806	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Keuangan Desa yang selesai tepat waktu	90,00	50.100.000	-	3.380.000	90,00	10.020.000,00	90,00	7.555.080,00	100,00	75,40	90,00	10.020.000	-	3.380.000	0,00	33,73		
7010806201	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100,00	50.100.000	-	3.380.000	100,00	10.020.000,00	100,00	7.555.080,00	100,00	75,40	100,00	10.020.000	-	3.380.000	0,00	33,73		
7010806201.3	Sub. Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah pelaksanaan fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	5	50.100.000	-	3.380.000	1,00	10.020.000,00	1,00	7.555.080,00	100,00	75,40	1	10.020.000	-	3.380.000	0,00	33,73		
URUSAN KECAMATAN																				
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	95,00	10.916.785.030	68,46	827.642.172	92,50	#####	92,50	1.877.687.025,16	100,00	86,00	85	2.183.357.006	68,46	827.642.172	80,54	37,91	KECAMATAN SEMPU	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	100	8.839.754.660	50,00	650.377.722	100	#####	100,00	1.520.437.801,52	100,00	86,00	100	1.767.950.932	50,00	650.377.722	50,00	36,79		
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen penyediaan gaji dan tunjangan ASN	120	8.839.754.660	12,00	650.377.722	24,00	#####	24,00	1.520.437.801,52	100,00	86,00	24	1.767.950.932	12,00	650.377.722	50,00	36,79		
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi umum perangkat daerah	100	768.922.500	86,36	100.265.500	100	153.784.500,00	100,00	132.254.670,00	100,00	86,00	100	153.784.500	86,36	100.265.500	86,36	65,20		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020						Target Program/Kegiatan RPKD tahun berjalan (tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun berjalan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp	K	Rp	Target RPKD Tahun 2021		Realisasi RPKD Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)		K	Rp	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Realisasi Target s/d tahun 2021			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	30	14.716.500	6,00	2.943.300	6,00	2.943.300,00	6,00	2.531.238,00	100,00	86,00	6	2.943.300	6,00	2.943.300	100,00	100,00		
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	30	379.005.000	4,00	58.725.000	6,00	75.801.000,00	6,00	65.188.860,00	100,00	86,00	6	75.801.000	4,00	58.725.000	66,67	77,47		
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan yang disediakan	30	91.932.500	6,00	18.386.500	6,00	18.386.500,00	6,00	15.812.390,00	100,00	86,00	6	18.386.500	6,00	18.386.500	100,00	100,00		
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	10	28.305.000	2,00	5.661.000	2,00	5.661.000,00	2,00	4.868.460,00	100,00	86,00	2	5.661.000	2,00	5.661.000	100,00	100,00		
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	5	49.998.500	1,00	9.999.700	1,00	9.999.700,00	1,00	8.599.742,00	100,00	86,00	1	9.999.700	1,00	9.999.700	100,00	100,00		
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	5	204.965.000	-	4.550.000	1,00	40.993.000,00	1,00	35.253.980,00	100,00	86,00	1	40.993.000	-	4.550.000	0,00	11,10		
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100	256.800.000	90,91	11.000.000	100	51.360.000,00	100,00	44.169.600,00	100,00	86,00	100	51.360.000	90,91	11.000.000	90,91	21,42		
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang disediakan	100	55.000.000	20,00	11.000.000	20,00	11.000.000,00	20,00	9.460.000,00	100,00	86,00	20	11.000.000	20,00	11.000.000	100,00	100,00		
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung yang disediakan	10	201.800.000	-	-	2,00	40.360.000,00	2,00	34.709.600,00	100,00	86,00	2	40.360.000	-	-	0,00	0,00		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	853.995.260	52,21	65.998.950	100	170.799.052,00	100,00	146.887.184,72	100,00	86,00	100	170.799.052	52,21	65.998.950	52,21	38,64		
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah perangko, materai dan benda pos lainnya yang disediakan	5	25.025.000	1,00	5.005.000	1,00	5.005.000,00	1,00	4.304.300,00	100,00	86,00	1	5.005.000	1,00	5.005.000	100,00	100,00		
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik lainnya yang disediakan	60	128.999.510	6,00	8.599.800	12,00	25.799.902,00	12,00	22.187.915,72	100,00	86,00	12	25.799.902	6,00	8.599.800	50,00	33,33		
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	20	42.970.750	4,00	8.594.150	4,00	8.594.150,00	4,00	7.390.969,00	100,00	86,00	4	8.594.150	4,00	8.594.150	100,00	100,00		
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	480	657.000.000	48,00	43.800.000	96,00	131.400.000,00	96,00	113.004.000,00	100,00	86,00	96	131.400.000	48,00	43.800.000	50,00	33,33		
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100	197.312.610	-	-	100	39.462.522,00	100,00	33.937.768,92	100,00	86,00	100	39.462.522	-	-	0,00	0,00		
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan yang disediakan	10	172.342.610	-	-	2,00	34.468.522,00	2,00	29.642.928,92	100,00	86,00	2	34.468.522	-	-	0,00	0,00		
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	5	24.970.000	-	-	1,00	4.994.000,00	1,00	4.294.840,00	100,00	86,00	1	4.994.000	-	-	0,00	0,00		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik	85,00	1.825.866.500	80,00	120.652.600	80,00	365.173.300,00	80,00	314.049.038,00	100,00	86,00	80	365.173.300	80,00	120.652.600	100,00	33,04		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100	1.725.867.000	40,00	100.687.600	100	345.173.400,00	100,00	296.849.124,00	100,00	86,00	100	345.173.400	40,00	100.687.600	40,00	29,17		
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang disediakan	25	1.725.867.000	2,00	100.687.600	5,00	345.173.400,00	5,00	296.849.124,00	100,00	86,00	5	345.173.400	2,00	100.687.600	40,00	29,17		
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	100	99.999.500	#####	19.965.000	100	19.999.900,00	100,00	17.199.914,00	100,00	86,00	100	19.999.900	#####	19.965.000	100,00	99,83		
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan yang disediakan	5	99.999.500	1,00	19.965.000	1,00	19.999.900,00	1,00	17.199.914,00	100,00	86,00	1	19.999.900	1,00	19.965.000	100,00	99,83		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan	30,00	103.368.000	-	-	25,00	20.673.600,00	25,00	17.779.296,00	100,00	86,00	25	20.673.600	-	-	0,00	0,00		
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	100	103.368.000	-	-	100	20.673.600,00	100,00	17.779.296,00	100,00	86,00	100	20.673.600	-	-	0,00	0,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020						Target Program/Kegiatan RKPd tahun berjalan (tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun berjalan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Tingkat Realisasi (%)	K	Rp	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Realisasi Target s/d tahun 2021		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang disediakan	30	103.368.000	-	-	6,00	20.673.600,00	6,00	17.779.296,00	100,00	86,00	6	20.673.600	-	-	0,00	0,00		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan	2,00	35.102.000	-	-	2,00	7.020.400,00	2,00	6.037.544,00	100,00	86,00	2	7.020.400	-	-	0,00	0,00		
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Cakupan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	100	35.102.000	-	-	100	7.020.400,00	100,00	6.037.544,00	100,00	86,00	100	7.020.400	-	-	0,00	0,00		
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	5	35.102.000	-	-	1,00	7.020.400,00	1,00	6.037.544,00	100,00	86,00	1	7.020.400	-	-	0,00	0,00		
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase laporan keuangan desa yang selesai tepat waktu	90,00	95.750.000	-	3.500.000	90,00	19.150.000,00	90,00	16.469.000,00	100,00	86,00	90	19.150.000	-	3.500.000	0,00	18,28		
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	95.750.000	-	3.500.000	100	19.150.000,00	100,00	16.469.000,00	100,00	86,00	100	19.150.000	-	3.500.000	0,00	18,28		
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa yang disediakan	5	95.750.000	-	3.500.000	1,00	19.150.000,00	1,00	16.469.000,00	100,00	86,00	1	19.150.000	-	3.500.000	0,00	18,28		
	URUSAN KECAMATAN																			KECAMATAN SILIRAGUNG
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	95	9.743.101.550	49,46	669.873.724	92,50	#####	92,50	1.422.492.826,30	100,00	73,00	85	1.898.025.310	49,46	669.873.724	58,19	35,29		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	100	7.680.607.430	50,00	458.760.118	100	#####	100,00	1.121.368.684,78	100,00	73,00	100	1.536.121.486	50,00	458.760.118	50,00	29,86		
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Penyediaan gaji dan tunjangan	60	7.680.607.430	6,00	458.760.118	12,00	#####	12,00	1.121.368.684,78	100,00	73,00	12	1.536.121.486	6,00	458.760.118	50,00	29,86		
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi umum perangkat daerah	100	1.065.528.500	60,00	148.676.400	100	213.105.700,00	100,00	155.567.161,00	100,00	73,00	100	162.510.700	60,00	148.676.400	60,00	91,49		
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik / penernagan bangunan kantor	5	74.973.000	1,00	14.994.600	1,00	14.994.600,00	1,00	10.946.058,00	100,00	73,00	1	14.994.600	1,00	14.994.600	100,00	100,00		
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Sub kegiatan yang dilaksanakan	10	169.503.500	2,00	33.017.300	2,00	33.900.700,00	2,00	24.747.511,00	100,00	73,00	2	33.900.700	2,00	33.017.300	100,00	97,39		
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	5	124.992.500	1,00	12.670.100	1,00	24.998.500,00	1,00	18.248.905,00	100,00	73,00	1	24.998.500	1,00	12.670.100	100,00	50,68		
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	5	90.109.500	1,00	18.021.900	1,00	18.021.900,00	1,00	13.155.987,00	100,00	73,00	1	18.021.900	1,00	18.021.900	100,00	100,00		
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5	100.000.000	1,00	9.722.500	1,00	20.000.000,00	1,00	14.600.000,00	100,00	73,00	1	20.000.000	1,00	9.722.500	100,00	48,61		
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan	60	252.975.000	6,00	30.750.000	12,00	50.595.000,00	12,00	36.934.350,00	100,00	73,00	12	50.595.000	6,00	30.750.000	50,00	60,78		
		jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang disediakan	60	252.975.000	6,00	29.500.000	12,00	50.595.000,00	12,00	36.934.350,00	100,00	73,00	12	50.595.000	6,00	29.500.000	50,00	58,31		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	789.998.120	87,84	62.437.206	100	157.999.624,00	100,00	115.339.725,52	100,00	73,00	100	157.999.624	87,84	62.437.206	87,84	39,52		
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah peranko, materai dan benda pos lainnya yang disediakan	5	20.000.000	1,00	2.000.000	1,00	4.000.000,00	1,00	2.920.000,00	100,00	73,00	1	4.000.000	1,00	2.000.000	100,00	50,00		
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan	60	174.998.120	3,00	7.437.206	12,00	34.999.624,00	12,00	25.549.725,52	100,00	73,00	12	34.999.624	3,00	7.437.206	25,00	21,25		
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah, desktop komputer, tv, tenda, dan soundsysem yang disediakan	5	100.000.000	1,00	20.000.000	1,00	20.000.000,00	1,00	14.600.000,00	100,00	73,00	1	20.000.000	1,00	20.000.000	100,00	100,00		
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah jasa administrasi kantor dan jasa kebersihan kantor yang disediakan	300	495.000.000	60,00	33.000.000	60,00	99.000.000,00	60,00	72.270.000,00	100,00	73,00	60	99.000.000	60,00	33.000.000	100,00	33,33		
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100	206.967.500	-	-	100	41.393.500,00	100,00	30.217.255,00	100,00	73,00	100	41.393.500	-	-	0,00	0,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020						Target Program/Kegiatan RPKD tahun berjalan (tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun berjalan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d tahun 2021	K	Rp	K		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	5	59.937.500	-	-	1,00	11.987.500,00	1,00	8.750.875,00	100,00	73,00	1	11.987.500	-	-	0,00	0,00		
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	5	54.780.000	-	-	1,00	10.956.000,00	1,00	7.997.880,00	100,00	73,00	1	10.956.000	-	-	0,00	0,00		
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya yg dipelihara	5	92.250.000	-	-	1,00	18.450.000,00	1,00	13.468.500,00	100,00	73,00	1	18.450.000	-	-	0,00	0,00		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik	85	1.209.410.000	66,67	69.896.020	80,00	241.882.000,00	80,00	176.573.860,00	100,00	73,00	80	254.255.700	66,67	69.896.020	83,33	27,49		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100	1.209.410.000	33,33	57.522.320	100	241.882.000,00	100,00	176.573.860,00	100,00	73,00	100	241.882.000	33,33	57.522.320	33,33	23,78		
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	jumlah peningkatan efektivitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat kecamatan	15	1.209.410.000	1,00	57.522.320	3,00	241.882.000,00	3,00	176.573.860,00	100,00	73,00	3	241.882.000	1,00	57.522.320	33,33	23,78		
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	100	61.868.500	#####	12.373.700	100	12.373.700,00	100,00	9.032.801,00	100,00	73,00	100	12.373.700	#####	12.373.700	100,00	100,00		
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	5	61.868.500	1,00	12.373.700	1,00	12.373.700,00	1,00	9.032.801,00	100,00	73,00	1	12.373.700	1,00	12.373.700	100,00	100,00		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan	30	88.283.000	-	-	25,00	17.656.600,00	25,00	12.889.318,00	100,00	73,00	25	17.657.755	-	-	0,00	0,00		
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	100	88.283.000	-	-	100	17.656.600,00	100,00	12.889.318,00	100,00	73,00	100	17.657.755	-	-	0,00	0,00		
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	15	88.283.000	-	-	3,00	17.656.600,00	3,00	12.889.318,00	100,00	73,00	3	17.656.600	-	-	0,00	0,00		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan	2	70.238.500	-	8.497.700	2,00	14.047.700,00	2,00	10.254.821,00	100,00	73,00	2	14.047.700	-	8.497.700	0,00	60,49		
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Cakupan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	100	70.238.500	#####	8.497.700	100	14.047.700,00	100,00	10.254.821,00	100,00	73,00	100	14.047.700	#####	8.497.700	100,00	60,49		
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Oenerapan dan Penegakan Perauran Daerah	5	70.238.500	1,00	8.497.700	1,00	14.047.700,00	1,00	10.254.821,00	100,00	73,00	1	14.047.700	1,00	8.497.700	100,00	60,49		
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase laporan keuangan desa yang selesai tepat waktu	90	50.102.000	-	-	90,00	10.020.400,00	90,00	7.314.892,00	100,00	73,00	90	10.020.400	-	-	0,00	0,00		
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	50.102.000	-	-	100	10.020.400,00	100,00	7.314.892,00	100,00	73,00	100	10.020.400	-	-	0,00	0,00		
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Fasilitasi Pengelollan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5	50.102.000	-	-	1,00	10.020.400,00	1,00	7.314.892,00	100,00	73,00	1	10.020.400	-	-	0,00	0,00		
	URUSAN KECAMATAN																		KECAMATAN SINGOJURUH	
70101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	95,00	12.153.252.565	57,82	769.538.716	92,50	#####	92,50	1.895.907.400,14	100,00	78,00	93,50	2.430.650.513	57,82	769.538.716	61,84	31,66		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	100	9.571.496.890	50,00	650.356.332	100	#####	100,00	1.493.153.514,84	100,00	78,00	100,00	1.914.299.378	50,00	650.356.332	50,00	33,97		
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen gaji ASN	60	9.571.496.890	6,00	650.356.332	12,00	#####	12,00	1.493.153.514,84	100,00	78,00	12,00	1.914.299.378	6,00	650.356.332	50,00	33,97		
701012.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	697.028.000	82,25	71.925.600	100	139.405.600,00	100,00	108.736.368,00	100,00	78,00	100	139.405.600	82,25	71.925.600	82,25	51,59		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020						Target Program/Kegiatan RPKD tahun berjalan (tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun berjalan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp	K	Rp	Target RPKD Tahun 2021		Realisasi RPKD Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)		K	Rp	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Realisasi Target s/d tahun 2021			
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
701012.0601	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen instalasi Listrik / penerangan Banguann Kantor yang disediakan	830	74.093.000	166,00	14.818.600	#####	14.818.600,00	166,00	11.558.508,00	100,00	78,00	166	14.818.600	166,00	14.818.600	100,00	100,00		
701012.0602	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	632	70.000.000	632,00	20.654.600	#####	14.000.000,00	126,40	10.920.000,00	100,00	78,00	632	20.654.600	632,00	20.654.600	100,00	100,00		
701012.0603	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	390	14.000.000	390,00	14.999.400	78,00	2.800.000,00	78,00	2.184.000,00	100,00	78,00	390	14.999.400	390,00	14.999.400	100,00	100,00		
701012.0604	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	2.400	47.600.000	100,00	3.500.000	#####	9.520.000,00	480,00	7.425.600,00	100,00	78,00	2.400	40.980.000	100,00	3.500.000	4,17	8,54		
701012.0605	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	10.062	22.209.113	#####	17.953.000	#####	4.441.822,60	#####	3.464.621,63	100,00	78,00	10.062	17.953.000	#####	17.953.000	100,00	100,00		
701012.0606	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	150	41.000.000	-	-	30,00	8.200.000,00	30,00	6.396.000,00	100,00	78,00	150	30.000.000	-	-	0,00	0,00		
701012.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	650.647.000	-	-	100	130.129.400,00	100,00	101.500.932,00	100,00	78,00	100	130.129.400	-	-	0,00	0,00		
701012.07	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	75	650.647.000	-	-	15,00	130.129.400,00	15,00	101.500.932,00	100,00	78,00	15	130.129.400	-	-	0,00	0,00		
701012.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	644.240.000	80,88	47.256.784	100	128.848.000,00	100,00	100.501.440,00	100,00	78,00	100	128.848.000	80,88	47.256.784	80,88	36,68		
701012.0801	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang disediakan	1.500	15.000.000	300,00	3.000.000	#####	3.000.000,00	300,00	2.340.000,00	100,00	78,00	300	3.000.000	300,00	3.000.000	100,00	100,00		
701012.0802	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	120	69.240.000	6,00	6.456.784	24,00	13.848.000,00	24,00	10.801.440,00	100,00	78,00	24	13.848.000	6,00	6.456.784	25,00	46,63		
701012.0804	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Perkantoran yang disediakan	420	560.000.000	24,00	37.800.000	84,00	112.000.000,00	84,00	87.360.000,00	100,00	78,00	84	112.000.000	24,00	37.800.000	28,57	33,75		
701012.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	589.840.675	-	-	100	117.968.135,00	100,00	92.015.145,30	100,00	78,00	100	117.968.135	-	-	0,00	0,00		
701012.0902	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	80	74.926.500	-	-	16,00	14.985.300,00	16,00	11.688.534,00	100,00	78,00	16	14.985.300	-	-	0,00	0,00		
701012.0905	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeleur yang dipelihara	140	40.460.000	-	-	28,00	8.092.000,00	28,00	6.311.760,00	100,00	78,00	28	8.092.000	-	-	0,00	0,00		
701012.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60	24.600.000	-	-	12,00	4.920.000,00	12,00	3.837.600,00	100,00	78,00	12	4.920.000	-	-	0,00	0,00		
701012.0909	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara/direhabilitasi	5	374.995.425	-	-	1,00	74.999.085,00	1,00	58.499.286,30	100,00	78,00	1	74.999.085	-	-	0,00	0,00		
701012.0910	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang dipelihara/direhabilitasi	5	74.858.750	-	-	1,00	14.971.750,00	1,00	11.677.965,00	100,00	78,00	1	14.971.750	-	-	0,00	0,00		
70102	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Sarana prasarana kecamatan dalam kondisi baik	85,00	1.733.755.000	25,00	68.302.600	80,00	346.751.000,00	80,00	270.465.780,00	100,00	78,00	80	346.751.000	25,00	68.302.600	31,25	19,70		
701022.01	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	1.733.755.000	25,00	68.302.600	100	346.751.000,00	100,00	270.465.780,00	100,00	78,00	100	346.751.000	25,00	68.302.600	25,00	19,70		
701022.0102	Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Fasilitas pelaksanaan perpustakaan keliling di Kecamatan, Peringatan Hari Besar Nasional, Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan, Permakanan Warga Miskin, Penyelenggaraan Kecamatan Sehat, kecamatan lavak anak	60	1.733.755.000	3,00	68.302.600	12,00	346.751.000,00	12,00	270.465.780,00	100,00	78,00	12	346.751.000	3,00	68.302.600	25,00	19,70		
70103	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Pembangunan	30,00	240.801.000	-	15.000.000	6,00	48.160.200,00	6,00	37.564.956,00	100,00	78,00	25	48.160.200	-	15.000.000	0,00	31,15		
701032.01	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	240.801.000	#####	15.000.000	100	48.160.200,00	100,00	37.564.956,00	100,00	78,00	100	48.160.200	#####	15.000.000	100,00	31,15		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020						Target Program/Kegiatan RKPDP tahun berjalan (tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun berjalan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Tingkat Realisasi (%)	K	Rp	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d tahun 2021	K		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
701032.01	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah fasilitasi pelaksanaan musrenbang RKPDP di Kecamatan	5	75.000.000	1,00	15.000.000	1,00	15.000.000,00	1,00	11.700.000,00	100,00	78,00	1	15.000.000	1,00	15.000.000	100,00	100,00		
701032.0103	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Fasilitasi Peningkatan Pemberdayaan PKK	60	165.801.000	-	-	12,00	33.160.200,00	12,00	25.864.956,00	100,00	78,00	12	33.160.200	-	-	0,00	0,00		
70104	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan	2,00	47.429.500	-	-	2,00	9.485.900,00	2,00	7.399.002,00	100,00	78,00	2	9.485.900	-	-	0,00	0,00		
701042.02	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Cakupan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100	47.429.500	-	-	100	9.485.900,00	100,00	7.399.002,00	100,00	78,00	100	9.485.900	-	-	0,00	0,00		
701042.0201	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah fasilitasi penegakan Perda dan Perbup di Kecamatan	55	47.429.500	-	-	11,00	9.485.900,00	11,00	7.399.002,00	100,00	78,00	11	9.485.900	-	-	0,00	0,00		
70106	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Laporan Keuangan Desa yang Selesai Tepat Waktu	90,00	50.000.000	27,27	2.164.500	90,00	10.000.000,00	90,00	7.800.000,00	100,00	78,00	90	10.000.000	27,27	2.164.500	30,30	21,65		
701062.01	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	50.000.000	27,27	2.164.500	100	10.000.000,00	100,00	7.800.000,00	100,00	78,00	100	10.000.000	27,27	2.164.500	27,27	21,65		
701062.0103	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan keuangan desa	55	50.000.000	3,00	2.164.500	11,00	10.000.000,00	11,00	7.800.000,00	100,00	78,00	11	10.000.000	3,00	2.164.500	27,27	21,65		
	URUSAN KECAMATAN						-	-											KECAMATAN SONGGON	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	95	12.664.218.710	57,85	835.224.998	92,50	#####	92,50	1.866.705.837,85	100,00	73,70	85	2.532.843.742	57,85	835.224.998	68,06	32,98		
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	50.000.000	#####	10.000.000	100	10.000.000,00	100,00	7.370.000,00	100,00	73,70	100	10.000.000	#####	10.000.000	100,00	100,00		
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah rencana pembangunan daerah yang disusun	5	50.000.000	1,00	10.000.000	1,00	10.000.000,00	1,00	7.370.000,00	100,00	73,70	1	10.000.000	1,00	10.000.000	100,00	100,00		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	100	10.874.876.100	53,85	671.333.738	100	#####	100,00	1.602.956.737,14	100,00	73,70	100	2.174.975.220	53,85	671.333.738	53,85	30,87		
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen gaji ASN	130	10.874.876.100	14,00	671.333.738	26,00	#####	26,00	1.602.956.737,14	100,00	73,70	26	2.174.975.220	14,00	671.333.738	53,85	30,87		
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi umum perangkat daerah	100	759.017.500	#####	101.869.700	100	151.803.500,00	100,00	111.879.179,50	100,00	73,70	100	151.803.500	#####	101.869.700	101,72	67,11		
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	60	74.812.000	12,00	14.962.400	12,00	14.962.400,00	12,00	11.027.288,80	100,00	73,70	12	14.962.400	12,00	14.962.400	100,00	100,00		
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	150	208.699.500	20,00	40.912.100	30,00	41.739.900,00	30,00	30.762.306,30	100,00	73,70	30	41.739.900	20,00	40.912.100	66,67	98,02		
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	1.295	61.600.000	259,00	12.320.000	#####	12.320.000,00	259,00	9.079.840,00	100,00	73,70	259	12.320.000	259,00	12.320.000	100,00	100,00		
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	5.430	212.460.000	#####	13.730.000	#####	42.492.000,00	#####	31.316.604,00	100,00	73,70	1.086	42.492.000	#####	13.730.000	147,33	32,31		
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	92.405	99.726.000	#####	19.945.200	#####	19.945.200,00	#####	14.699.612,40	100,00	73,70	18.481	19.945.200	#####	19.945.200	100,00	100,00		
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah aktifitas rapat koordinasi dan konsultasi yang disediakan	800	101.720.000	-	-	#####	20.344.000,00	160,00	14.993.528,00	100,00	73,70	160	20.344.000	-	-	0,00	0,00		
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100	113.657.400	-	-	100	22.731.480,00	100,00	16.753.100,76	100,00	73,70	100	22.731.480	-	-	0,00	0,00		
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeleur yang diadakan	15	13.750.000	-	-	3,00	2.750.000,00	3,00	2.026.750,00	100,00	73,70	3	2.750.000	-	-	0,00	0,00		
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diadakan	10	99.907.400	-	-	2,00	19.981.480,00	2,00	14.726.350,76	100,00	73,70	2	19.981.480	-	-	0,00	0,00		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	516.973.600	91,53	52.021.560	100	103.394.720,00	100,00	76.201.908,64	100,00	73,70	100	103.394.720	91,53	52.021.560	91,53	50,31		
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat	2.000	13.500.000	400,00	2.700.000	#####	2.700.000,00	400,00	1.989.900,00	100,00	73,70	400	2.700.000	400,00	2.700.000	100,00	100,00		
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	180	88.476.600	18,00	8.322.160	36,00	17.695.320,00	36,00	13.041.450,84	100,00	73,70	36	17.695.320	18,00	8.322.160	50,00	47,03		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020						Target Program/Kegiatan RKPd tahun berjalan (tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun berjalan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp	K	Rp	Target RKPd Tahun 2021		Realisasi RKPd Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)		K	Rp	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Realisasi Target s/d tahun 2021			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	60	99.997.000	12,00	19.999.400	12,00	19.999.400,00	12,00	14.739.557,80	100,00	73,70	12	19.999.400	12,00	19.999.400	100,00	100,00		
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	240	315.000.000	24,00	21.000.000	48,00	63.000.000,00	48,00	46.431.000,00	100,00	73,70	48	63.000.000	24,00	21.000.000	50,00	33,33		
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100	349.694.110	-	-	100	69.938.822,00	100,00	51.544.911,81	100,00	73,70	100	69.938.822	-	-	0,00	0,00		
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang dipelihara	25	49.950.000	-	-	5,00	9.990.000,00	5,00	7.362.630,00	100,00	73,70	5	9.990.000	-	-	0,00	0,00		
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	5	199.836.710	-	-	1,00	39.967.342,00	1,00	29.455.931,05	100,00	73,70	1	39.967.342	-	-	0,00	0,00		
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang dipelihara	100	99.907.400	-	-	20,00	19.981.480,00	20,00	14.726.350,76	100,00	73,70	20	19.981.480	-	-	0,00	0,00		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik	85	1.896.492.500	75,00	152.563.000	80,00	379.298.500,00	80,00	279.542.994,50	100,00	73,70	80	379.298.500	75,00	152.563.000	93,75	40,22		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100	1.696.506.000	50,00	142.563.200	100	339.301.200,00	100,00	250.064.984,40	100,00	73,70	100	339.301.200	50,00	142.563.200	50,00	42,02		
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Aktivitas Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	60	1.696.506.000	6,00	142.563.200	12,00	339.301.200,00	12,00	250.064.984,40	100,00	73,70	12	339.301.200	6,00	142.563.200	50,00	42,02		
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	100	199.986.500	#####	9.999.800	100	39.997.300,00	100,00	29.478.010,10	100,00	73,70	100	39.997.300	#####	9.999.800	100,00	25,00		
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah fasilitasi pelaksanaan musrenbang RKPd di Kecamatan	5	199.986.500	1,00	9.999.800	1,00	39.997.300,00	1,00	29.478.010,10	100,00	73,70	1	39.997.300	1,00	9.999.800	100,00	25,00		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan	30	99.047.500	8,33	3.232.000	25,00	19.809.500,00	25,00	14.599.601,50	100,00	73,70	25	19.809.500	8,33	3.232.000	33,33	16,32		
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	100	99.047.500	8,33	3.232.000	100	19.809.500,00	100,00	14.599.601,50	100,00	73,70	100	19.809.500	8,33	3.232.000	8,33	16,32		
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Aktivitas Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	60	99.047.500	1,00	3.232.000	12,00	19.809.500,00	12,00	14.599.601,50	100,00	73,70	12	19.809.500	1,00	3.232.000	8,33	16,32		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan	2	49.998.500	-	1.191.400	2,00	9.999.700,00	2,00	7.369.778,90	100,00	73,70	2	9.999.700	-	1.191.400	0,00	11,91		
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Cakupan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	100	49.998.500	-	1.191.400	100	9.999.700,00	100,00	7.369.778,90	100,00	73,70	100	9.999.700	-	1.191.400	0,00	11,91		
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Aktivitas Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	5	49.998.500	-	1.191.400	1,00	9.999.700,00	1,00	7.369.778,90	100,00	73,70	1	9.999.700	-	1.191.400	0,00	11,91		
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase laporan keuangan desa yang selesai tepat waktu	90	208.180.000	-	3.518.000	90,00	41.636.000,00	90,00	30.685.732,00	100,00	73,70	90	41.636.000	-	3.518.000	0,00	8,45		
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	208.180.000	-	3.518.000	100	41.636.000,00	100,00	30.685.732,00	100,00	73,70	100	41.636.000	-	3.518.000	0,00	8,45		
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan keuangan desa	5	208.180.000	-	3.518.000	1,00	41.636.000,00	1,00	30.685.732,00	100,00	73,70	1	41.636.000	-	3.518.000	0,00	8,45		
	URUSAN KECAMATAN																		KECAMATAN SRONO	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020						Target Program/Kegiatan RKPd tahun berjalan (tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun berjalan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp	K	Rp	Target RKPd Tahun 2021		Realisasi RKPd Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Realisasi Target s/d tahun 2021					
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	95	12.546.201.425	54,47	915.177.818	92,50	#####	92,50	2.107.761.839,40	100,00	84,00	93,50	2.509.240.285	54,47	915.177.818	58,26	36,47		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	10.697.476.690	50,00	689.177.422	100	#####	100,00	1.797.176.083,92	100,00	84,00	100	2.139.495.338	50,00	689.177.422	50,00	32,21		
7.01.01.2.02.01	Peyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Kecamatan Srono)	Jumlah laporan keuangan yang disediakan	120	10.697.476.690	12,00	689.177.422	24,00	#####	24,00	1.797.176.083,92	100,00	84,00	24	2.139.495.338	12,00	689.177.422	50,00	32,21		
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	898.376.750	37,21	135.515.350	100	179.675.350,00	100,00	150.927.294,00	100,00	84,00	100	179.675.350	37,21	135.515.350	37,21	75,42		
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor (Kecamatan Srono)	Jumlah komponen linstasi listrik yang disediakan	30	94.488.000	6,00	18.897.600	6,00	18.897.600,00	6,00	15.873.984,00	100,00	84,00	6	18.897.600	6,00	18.897.600	100,00	100,00		
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kecamatan Srono)	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	15	199.972.000	3,00	39.994.400	3,00	39.994.400,00	3,00	33.595.296,00	100,00	84,00	3	39.994.400	3,00	39.994.400	100,00	100,00		
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Pealatan Rumah Tangga (Kecamatan Srono)	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	60	124.972.000	12,00	24.994.400	12,00	24.994.400,00	12,00	20.995.296,00	100,00	84,00	12	24.994.400	12,00	24.994.400	100,00	100,00		
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kecamatan Srono)	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	1.430	49.896.000	286,00	9.979.200	#####	9.979.200,00	286,00	8.382.528,00	100,00	84,00	286	9.979.200	286,00	9.979.200	100,00	100,00		
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Kecamatan Srono)	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	10	49.998.750	2,00	9.999.750	2,00	9.999.750,00	2,00	8.399.790,00	100,00	84,00	2	9.999.750	2,00	9.999.750	100,00	100,00		
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kecamatan Srono)	Jumlah makanan dan minuman rapat	11.690	379.050.000	676,00	31.650.000	#####	75.810.000,00	#####	63.680.400,00	100,00	84,00	2338	75.810.000	676,00	31.650.000	28,91	41,75		
		Jumlah belanja perjalanan dinas dalam negeri	750		40,00		#####	-	150,00	0,00	100,00	0,00	150		40,00		26,67	0,00		
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	95.073.000	#####	19.014.600	100	19.014.600,00	100,00	15.972.264,00	100,00	84,00	100	19.014.600	#####	19.014.600	100,00	100,00		
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel (Kecamatan Srono)	Jumlah sub kegiatan	1.250	95.073.000	250,00	19.014.600	#####	19.014.600,00	250,00	15.972.264,00	100,00	84,00	250	19.014.600	250,00	19.014.600	100,00	100,00		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	580.597.485	30,77	51.472.146	100	116.119.497,00	100,00	97.540.377,48	100,00	84,00	100	116.119.497	30,77	51.472.146	30,77	44,33		
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa surat Menyurat (Kecamatan Srono)	Belanja materai	15	30.000.000	3,00	6.000.000	3,00	6.000.000,00	3,00	5.040.000,00	100,00	84,00	3	6.000.000	3,00	6.000.000	100,00	100,00		
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kecamatan Srono)	Belanja tagihan	10	74.709.485	-	2.673.846	2,00	14.941.897,00	2,00	12.551.193,48	100,00	84,00	2	14.941.897	-	2.673.846	0,00	17,89		
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kecamatan Srono)	Belanja sewa alat rumah tangga	30	124.888.000	-	-	6,00	24.977.600,00	6,00	20.981.184,00	100,00	84,00	6	24.977.600	-	-	0,00	0,00		
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kecamatan Srono)	Belanja jasa kantor	10	351.000.000	1,00	22.800.000	2,00	70.200.000,00	2,00	58.968.000,00	100,00	84,00	2	70.200.000	1,00	22.800.000	50,00	32,48		
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	274.677.500	6,25	19.998.300	100	54.935.500,00	100,00	46.145.820,00	100,00	84,00	100	54.935.500	6,25	19.998.300	6,25	36,40		
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Kecamatan Srono)	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	25	74.936.000	-	-	5,00	14.987.200,00	5,00	12.589.248,00	100,00	84,00	5	14.987.200	-	-	0,00	0,00		
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kecamatan Srono)	Jumlah peralatan mesin kantor yang dipelihara	50	99.750.000	-	-	10,00	19.950.000,00	10,00	16.758.000,00	100,00	84,00	10	19.950.000	-	-	0,00	0,00		
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Kecamatan Srono)	Jumlah taman kantor yang dipelihara	5	99.991.500	1,00	19.998.300	1,00	19.998.300,00	1,00	16.798.572,00	100,00	84,00	1	19.998.300	1,00	19.998.300	100,00	100,00		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentasi kondisi sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik	85	3.013.609.750	51,11	122.682.550	80,00	602.721.950,00	80,00	506.286.438,00	100,00	84,00	80	602.721.950	51,11	122.682.550	63,89	20,35		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	2.963.610.000	20,00	112.682.600	100	592.722.000,00	100,00	497.886.480,00	100,00	84,00	100	592.722.000	20,00	112.682.600	20,00	19,01		
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kecamatan Srono)	Jumlah peningkatan eektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	25	2.963.610.000	1,00	112.682.600	5,00	592.722.000,00	5,00	497.886.480,00	100,00	84,00	5	592.722.000	1,00	112.682.600	20,00	19,01		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020						Target Program/Kegiatan RKPd tahun berjalan (tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun berjalan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d tahun 2021	K	Rp	K		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13
7.01.01.2.02	Peyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Cakupan Peyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	49.999.750	#####	9.999.950	100	9.999.950,00	100,00	8.399.958,00	100,00	84,00	100	9.999.950	#####	9.999.950	100,00	100,00		
7.01.03.2.01.03	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Kecamatan Srono)	Jumlah perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat	20	49.999.750	4,00	9.999.950	4,00	9.999.950,00	4,00	8.399.958,00	100,00	84,00	4	9.999.950	4,00	9.999.950	100,00	100,00		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan	30	105.358.250	-	5.250.350	25,00	21.071.650,00	25,00	17.700.186,00	100,00	84,00	25	21.071.650	-	5.250.350	0,00	24,92		
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	105.358.250	50,00	5.250.350	100	21.071.650,00	100,00	17.700.186,00	100,00	84,00	100	21.071.650	50,00	5.250.350	50,00	24,92		
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Srono)	Jumlah Aktivitas Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Srono)	10	105.358.250	1,00	5.250.350	2,00	21.071.650,00	2,00	17.700.186,00	100,00	84,00	2	21.071.650	1,00	5.250.350	50,00	24,92		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah pelanggaran Perdan dan	2	49.990.500	-	2.620.300	2,00	9.998.100,00	2,00	8.398.404,00	100,00	84,00	2	9.998.100	-	2.620.300	0,00	26,21		
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Cakupan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100	49.990.500	#####	2.620.300	100	9.998.100,00	100,00	8.398.404,00	100,00	84,00	100	9.998.100	#####	2.620.300	100,00	26,21		
7.01.01.04.2.02.01	Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang - undangan dan / Atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kecamatan Srono)	Jumlah pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan	5	49.990.500	1,00	2.620.300	1,00	9.998.100,00	1,00	8.398.404,00	100,00	84,00	1	9.998.100	1,00	2.620.300	100,00	26,21		
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase laporan keuangan desa yang selesai tepat waktu	90	64.999.750	33,33	3.562.950	90,00	12.999.950,00	90,00	10.919.958,00	100,00	84,00	90	12.999.950	33,33	3.562.950	37,04	27,41		
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	64.999.750	33,33	3.562.950	100	12.999.950,00	100,00	10.919.958,00	100,00	84,00	100	12.999.950	33,33	3.562.950	33,33	27,41		
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Kecamatan Srono)	Jumlah belanja fasilitas, rekomendasi dan koordinasi pembinaan / pengawasan	15	64.999.750	1,00	3.562.950	3,00	12.999.950,00	3,00	10.919.958,00	100,00	84,00	3	12.999.950	1,00	3.562.950	33,33	27,41		
URUSAN KECAMATAN																			KECAMATAN TEGALDLIMO	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	95	12.021.169.550	59,90	712.869.070	92,50	#####	92,50	1.803.175.432,50	100,00	75,00	85	2.404.233.910	59,90	712.869.070	70,48	29,65		
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	34.970.500	-	-	100	6.994.100,00	100,00	5.245.575,00	100,00	75,00	100	6.994.100	-	-	0,00	0,00		
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	34.970.500	-	-	1,00	6.994.100,00	1,00	5.245.575,00	100,00	75,00	1	6.994.100	-	-	0,00	0,00		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	100	9.676.610.245	50,00	513.592.490	100	#####	100,00	1.451.491.536,75	100,00	75,00	100	1.935.322.049	50,00	513.592.490	50,00	26,54		
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan keuangan yang disediakan	120	9.676.610.245	12	513.592.490	24,00	#####	24,00	1.451.491.536,75	100,00	75,00	24	1.935.322.049	12	513.592.490	50,00	26,54		
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi umum perangkat daerah	100	948.760.000	87,51	91.993.500	100	189.752.000,00	100,00	142.314.000,00	100,00	75,00	100	189.752.000	87,51	91.993.500	87,51	48,48		
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	40	74.862.000	8	14.972.400	8,00	14.972.400,00	8,00	11.229.300,00	100,00	75,00	8	14.972.400	8	14.972.400	100,00	100,00		
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	20	126.505.000	4	23.004.300	4,00	25.301.000,00	4,00	18.975.750,00	100,00	75,00	4	25.301.000	4	23.004.300	100,00	90,92		
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	1095	74.876.500	219	14.975.300	#####	14.975.300,00	219,00	11.231.475,00	100,00	75,00	219	14.975.300	219	14.975.300	100,00	100,00		
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bahan bakar	7500	328.659.000	600	9.250.000	#####	65.731.800,00	#####	49.298.850,00	100,00	75,00	1.500	65.731.800	600	9.250.000	40,00	14,07		
		Jumlah atk	795		100		#####	-	159,00	0,00	100,00	0,00	159		100		62,89	0,00		
		Jumlah mamin	12000		200		#####	-	#####	0,00	100,00	0,00	2.400		200		8,33	0,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020						Target Program/Kegiatan RKPD tahun berjalan (tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun berjalan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
							Target RKPd Tahun 2021		Realisasi RKPd Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Realisasi Target s/d tahun 2021			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetak dan penggandaan yang di sediaka	111615	148.957.500	22.323	29.791.500	#####	29.791.500,00	#####	22.343.625,00	100,00	75,00	22.323	29.791.500	22.323	29.791.500	100,00	100,00		
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	950	194.900.000	-	-	#####	38.980.000,00	190,00	29.235.000,00	100,00	75,00	190	38.980.000	-	-	0,00	0,00		
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100	122.925.000	#####	24.585.000	100	24.585.000,00	100,00	18.438.750,00	100,00	75,00	100	24.585.000	#####	24.585.000	100,00	100,00		
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan / gedung kantor	25	122.925.000	5	24.585.000	5,00	24.585.000,00	5,00	18.438.750,00	100,00	75,00	5	24.585.000	5	24.585.000	100,00	100,00		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	926.653.805	87,88	69.548.180	100	185.330.761,00	100,00	138.998.070,75	100,00	75,00	100	185.330.761	87,88	69.548.180	87,88	37,53		
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah perangko, materai dan benda pos lainnya yang disediakan	3000	30.000.000	600	6.000.000	#####	6.000.000,00	600,00	4.500.000,00	100,00	75,00	600	6.000.000	600	6.000.000	100,00	100,00		
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	180	150.653.805	18	7.148.180	36,00	30.130.761,00	36,00	22.598.070,75	100,00	75,00	36	30.130.761	18	7.148.180	50,00	23,72		
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor tersedia	30	50.000.000	6	10.000.000	6,00	10.000.000,00	6,00	7.500.000,00	100,00	75,00	6	10.000.000	6	10.000.000	100,00	100,00		
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Administrasi Kantor dan Jasa Kebersihan Kantor yang disediakan	420	696.000.000	14	46.400.000	84,00	139.200.000,00	84,00	104.400.000,00	100,00	75,00	84	139.200.000	14	46.400.000	16,67	33,33		
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100	311.250.000	34,04	13.149.900	100	62.250.000,00	100,00	46.687.500,00	100,00	75,00	100	62.250.000	34,04	13.149.900	34,04	21,12		
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	65	99.902.500	8	13.149.900	13,00	19.980.500,00	13,00	14.985.375,00	100,00	75,00	13	19.980.500	8	13.149.900	61,54	65,81		
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	10	111.472.500	-	-	2,00	22.294.500,00	2,00	16.720.875,00	100,00	75,00	2	22.294.500	-	-	0,00	0,00		
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah rehab taman / sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	10	99.875.000	-	-	2,00	19.975.000,00	2,00	14.981.250,00	100,00	75,00	2	19.975.000	-	-	0,00	0,00		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik	85	2.443.499.000	62,50	113.253.000	80,00	488.699.800,00	80,00	366.524.850,00	100,00	75,00	80	488.699.800	62,50	113.253.000	78,13	23,17		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100	2.318.566.000	25,00	88.266.400	100	463.713.200,00	100,00	347.784.900,00	100,00	75,00	100	463.713.200	25,00	88.266.400	25,00	19,03		
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	jumlah monitoring dan evaluasi kegiatan pemerintahan kecamatan	60	2.318.566.000	3	88.266.400	12,00	463.713.200,00	12,00	347.784.900,00	100,00	75,00	12	463.713.200	3	88.266.400	25,00	19,03		
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	100	124.933.000	#####	24.986.600	100	24.986.600,00	100,00	18.739.950,00	100,00	75,00	100	24.986.600	#####	24.986.600	100,00	100,00		
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah atk cetak pengandaan dan mamin yang disediakan	60	124.933.000	12	24.986.600	12,00	24.986.600,00	12,00	18.739.950,00	100,00	75,00	12	24.986.600	12	24.986.600	100,00	100,00		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan	30	73.744.500	25,00	1.750.000	25,00	14.748.900,00	25,00	11.061.675,00	100,00	75,00	25	14.748.900	25,00	1.750.000	100,00	11,87		
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	100	73.744.500	25,00	1.750.000	100	14.748.900,00	100,00	11.061.675,00	100,00	75,00	100	14.748.900	25,00	1.750.000	25,00	11,87		
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah atk cetak pengandaan dan mamin yang disediakan	60	73.744.500	3	1.750.000	12,00	14.748.900,00	12,00	11.061.675,00	100,00	75,00	12	14.748.900	3	1.750.000	25,00	11,87		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan	2	34.856.000	-	-	2,00	6.971.200,00	2,00	5.228.400,00	100,00	75,00	2	6.971.200	-	-	0,00	0,00		
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Cakupan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	100	34.856.000	-	-	100	6.971.200,00	100,00	5.228.400,00	100,00	75,00	100	6.971.200	-	-	0,00	0,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020					Target Program/Kegiatan RPKD tahun berjalan (tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun berjalan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Realisasi Target s/d tahun 2021				
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah atk cetak pengandaan dan mamin yang disediakan	60	34.856.000	-	-	12,00	6.971.200,00	12,00	5.228.400,00	100,00	75,00	12	6.971.200	-	-	0,00	0,00		
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase laporan keuangan desa yang selesai tepat waktu	90	50.088.500	-	-	90,00	10.017.700,00	90,00	7.513.275,00	100,00	75,00	90	10.017.700	-	-	0,00	0,00		
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	50.088.500	-	-	100	10.017.700,00	100,00	7.513.275,00	100,00	75,00	100	10.017.700	-	-	0,00	0,00		
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah atk cetak pengandaan dan mamin yang disediakan	60	50.088.500	-	-	12,00	10.017.700,00	12,00	7.513.275,00	100,00	75,00	12	10.017.700	-	-	0,00	0,00		
	URUSAN KECAMATAN																			KECAMATAN TEGALSARI
70121 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	95,00	10.131.506.360	55,81	522.175.382	92,50	#####	92,50	1.621.041.017,60	100,00	80,00	93,50	2.026.301.272	55,81	522.175.382	59,69	25,77		
70121 01 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	7.541.441.665	50,00	372.902.982	100	#####	100,00	1.206.630.666,40	100,00	80,00	100	1.508.288.333	50,00	372.902.982	50,00	24,72		
70121 01 02 5 1 0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen gaji ASN yang disediakan	130	7.541.441.665	13,00	372.902.982	26,00	#####	26,00	1.206.630.666,40	100,00	80,00	26	1.508.288.333	13,00	372.902.982	50,00	24,72		
70121 01 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	907.912.000	77,99	112.372.400	100	181.582.400,00	100,00	145.265.920,00	100,00	80,00	100	181.582.400	77,99	112.372.400	77,99	61,89		
70121 01 06 5 1 0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	835	49.980.500	167,00	9.996.100	#####	9.996.100,00	167,00	7.996.880,00	100,00	80,00	167	9.996.100	167,00	9.996.100	100,00	100,00		
70121 01 06 5 1 0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1. Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	2.275	129.355.000	455,00	25.871.000	#####	25.871.000,00	455,00	20.696.800,00	100,00	80,00	455	25.871.000	455,00	25.871.000	100,00	100,00		
70121 01 06 5 1 0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	925	49.978.000	185,00	9.995.600	#####	9.995.600,00	185,00	7.996.480,00	100,00	80,00	185	9.995.600	185,00	9.995.600	100,00	100,00		
70121 01 06 5 1 0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1. Jumlah Bahan bakar dan pelumas yang disediakan	9.000	81.000.000	200,00	1.800.000	#####	16.200.000,00	#####	12.960.000,00	100,00	80,00	1.800	16.200.000	200,00	1.800.000	11,11	11,11		
		2. Jumlah Makanan dan minuman rapat yang disediakan	6.100	152.500.000	-	-	#####	30.500.000,00	#####	24.400.000,00	100,00	80,00	1.220	30.500.000	-	-	0,00	0,00		
70121 01 06 5 1 0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	45.975	75.000.000	#####	15.000.000	#####	15.000.000,00	#####	12.000.000,00	100,00	80,00	9.195	15.000.000	#####	15.000.000	100,00	100,00		
70121 01 06 5 1 0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1. Jumlah perjalanan dinas SKPD yang difasilitasi	750	120.000.000	75,00	5.600.000	#####	24.000.000,00	150,00	19.200.000,00	100,00	80,00	150	24.000.000	75,00	5.600.000	50,00	23,33		
70121 01 06 5 1 0		2. Jumlah fasilitasi koodinasi dan konsultasi ke luar daerah	30	29.550.000	-	-	6,00	5.910.000,00	6,00	4.728.000,00	100,00	80,00	6	5.910.000	-	-	0,00	0,00		
70121 01 06 5 2 0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1. Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar	5	23.188.000	-	4.637.600	1,00	4.637.600,00	1,00	3.710.080,00	100,00	80,00	1	4.637.600	-	4.637.600	0,00	100,00		
70121 01 06 5 2 0		2. Belanja modal personal komputer	5	147.860.500	1,00	29.572.100	1,00	29.572.100,00	1,00	23.657.680,00	100,00	80,00	1	29.572.100	1,00	29.572.100	100,00	100,00		
70121 01 06 5 2 0		3. Belanja modal peralatan personal komputer	15	49.500.000	3,00	9.900.000	3,00	9.900.000,00	3,00	7.920.000,00	100,00	80,00	3	9.900.000	3,00	9.900.000	100,00	100,00		
70121 01 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	703.999.405	95,25	36.900.000	100	140.799.881,00	100,00	112.639.904,80	100,00	80,00	100	140.799.881	95,25	36.900.000	95,25	26,21		
70121 01 08 5 1 0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah peranko, materai dan benda pos lainnya yang disediakan	4.000	40.000.000	800,00	8.000.000	#####	8.000.000,00	800,00	6.400.000,00	100,00	80,00	800	8.000.000	800,00	8.000.000	100,00	100,00		
70121 01 08 5 1 0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60	93.999.405	6,00	9.900.000	12,00	18.799.881,00	12,00	15.039.904,80	100,00	80,00	12	18.799.881	6,00	9.900.000	50,00	52,66		
70121 01 08 5 1 0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	360	570.000.000	36,00	19.000.000	72,00	114.000.000,00	72,00	91.200.000,00	100,00	80,00	72	114.000.000	36,00	19.000.000	50,00	16,67		
70121 01 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	978.153.290	-	-	100	195.630.658,00	100,00	156.504.526,40	100,00	80,00	100	195.630.658	-	-	0,00	0,00		
70121 01 09 5 1 0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	5	49.634.000	-	-	1,00	9.926.800,00	1,00	7.941.440,00	100,00	80,00	1	9.926.800	-	-	0,00	0,00		
70121 01 09 5 1 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	5	928.519.290	-	-	1,00	185.703.858,00	1,00	148.563.086,40	100,00	80,00	1	185.703.858	-	-	0,00	0,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020						Target Program/Kegiatan RKPd tahun berjalan (tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun berjalan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4		5		6			7			8		9		10		11		12	13
70121 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kondisi sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik	85,00	1.400.650.000	7,50	39.050.000	80,00	280.130.000,00	80,00	224.104.000,00	100,00	80,00	80	280.130.000	7,50	39.050.000	9,38	13,94				
70121 02 01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	1.250.650.000	15,00	39.050.000	100	250.130.000,00	100,00	200.104.000,00	100,00	80,00	100	250.130.000	15,00	39.050.000	15,00	15,61				
70121 02 01 5 1 0	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	500	1.250.650.000	15,00	39.050.000	#####	250.130.000,00	100,00	200.104.000,00	100,00	80,00	100	250.130.000	15,00	39.050.000	15,00	15,61				
70121 02 02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	150.000.000	-	-	100	30.000.000,00	100,00	24.000.000,00	100,00	80,00	100	30.000.000	-	-	0,00	0,00				
70121 02 02 5 1 0	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	500	150.000.000	-	-	#####	30.000.000,00	100,00	24.000.000,00	100,00	80,00	100	30.000.000	-	-	0,00	0,00				
70121 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan	30,00	149.997.500	-	-	25,00	29.999.500,00	25,00	23.999.600,00	100,00	80,00	25	29.999.500	-	-	0,00	0,00				
70121 03 01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	149.997.500	-	-	100	29.999.500,00	100,00	23.999.600,00	100,00	80,00	100	29.999.500	-	-	0,00	0,00				
70121 03 01 5 1 0	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1. Jumlah peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa 2. Jumlah peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	500	50.000.000	-	-	#####	10.000.000,00	100,00	8.000.000,00	100,00	80,00	100	10.000.000	-	-	0,00	0,00				
			60	99.997.500	-	-	12,00	19.999.500,00	12,00	15.999.600,00	100,00	80,00	12	19.999.500	-	-	0,00	0,00				
70121 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase laporan keuangan desa selesai tepat waktu	90,00	54.999.500	-	-	90,00	10.999.900,00	90,00	8.799.920,00	100,00	80,00	90	10.999.900	-	-	0,00	0,00				
70121 06 01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	54.999.500	-	-	100	10.999.900,00	100,00	8.799.920,00	100,00	80,00	100	10.999.900	-	-	0,00	0,00				
70121 06 01 5 1 0	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	5	54.999.500	-	-	1,00	10.999.900,00	1,00	8.799.920,00	100,00	80,00	1	10.999.900	-	-	0,00	0,00				
	URUSAN KECAMATAN						-	-												KECAMATAN WONGSOREJO		
70101	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	93,50	12.432.802.145	65,57	946.654.198	92,50	#####	92,50	1.864.920.321,75	100,00	75,00	93,50	2.514.563.929	65,57	946.654.198	70,13	37,65				
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	100	10.632.939.145	50,00	751.011.090	100	#####	100,00	1.594.940.871,75	100,00	75,00	100	2.126.587.829	50,00	751.011.090	50,00	35,32				
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen penyediaan gaji dan tunjangan ASN	70	10.632.939.145	7	751.011.090	14,00	#####	14,00	1.594.940.871,75	100,00	75,00	14	2.126.587.829	7	751.011.090	50,00	35,32				
701012.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi umum perangkat daerah	100	824.867.500	45,25	119.202.800	100	164.973.500,00	100,00	123.730.125,00	100,00	75,00	100	192.977.000	45,25	119.202.800	45,25	61,77				
701012.0601	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik	1.400	99.951.000	280	19.990.200	#####	19.990.200,00	280,00	14.992.650,00	100,00	75,00	280	19.990.200	280	19.990.200	100,00	100,00				
701012.0602	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	2.250	250.000.000	450	50.000.000	#####	50.000.000,00	450,00	37.500.000,00	100,00	75,00	450	50.000.000	450	50.000.000	100,00	100,00				
701012.0603	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1.450	99.996.000	290	19.999.200	#####	19.999.200,00	290,00	14.999.400,00	100,00	75,00	290	19.999.200	290	19.999.200	100,00	100,00				
701012.0604	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan bakar dan pelumas yang disediakan	5.555	124.955.500	200	3.060.000	#####	24.991.100,00	#####	18.743.325,00	100,00	75,00	1.111	24.991.100	200	3.060.000	18,00	12,24				
701012.0605	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	5.000	124.982.500	600	16.678.400	#####	24.996.500,00	#####	18.747.375,00	100,00	75,00	1.000	24.996.500	600	16.678.400	60,00	66,72				
701012.0609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Makanan dan minuman yang disediakan	4.000	124.982.500	100	9.475.000	#####	24.996.500,00	800,00	18.747.375,00	100,00	75,00	800	53.000.000	100	9.475.000	12,50	17,88				
		Jumlah rapat-rapat koordinsi dan konsultasi keluar daerah	1.560		-		#####	-	312,00	0,00	100,00	0,00	312		-		0,00	0,00				
701012.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	900.000.000	88	70.056.208	100	180.000.000,00	100,00	135.000.000,00	100,00	75,00	100	180.000.000	88	70.056.208	88,33	38,92				
701012.0801	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah benda pos yang disediakan	1.500	30.000.000	300	6.000.000	#####	6.000.000,00	300,00	4.500.000,00	100,00	75,00	300	6.000.000	300	6.000.000	100,00	100,00				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020						Target Program/Kegiatan RKPD tahun berjalan (tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun berjalan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
							Target RKPD Tahun 2021		Realisasi RKPD Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Realisasi Target s/d tahun 2021			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
701012.0802	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	60	180.000.000	6	18.056.208	12,00	36.000.000,00	12,00	27.000.000,00	100,00	75,00	12	36.000.000	6	18.056.208	50,00	50,16		
701012.0804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa tenaga administrasi yang	240	690.000.000	12	46.000.000	48,00	138.000.000,00	48,00	103.500.000,00	100,00	75,00	48	138.000.000	12	46.000.000	25,00	33,33		
701012.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100	74.995.500	50	6.384.100	100	14.999.100,00	100,00	11.249.325,00	100,00	75,00	100	14.999.100	50	6.384.100	50,00	42,56		
701012.0902	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	20	74.995.500	2	6.384.100	4,00	14.999.100,00	4,00	11.249.325,00	100,00	75,00	4	14.999.100	2	6.384.100	50,00	42,56		
70102	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik	85	2.163.663.000	64,50	83.548.400	80,00	432.732.600,00	80,00	363.495.384,00	100,00	84,00	80	432.732.600	64,50	83.548.400	80,62	19,31		
701022.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100	2.113.663.000	29	73.548.400	100	422.732.600,00	100,00	355.095.384,00	100,00	84,00	100	422.732.600	29	73.548.400	29,00	17,40		
701022.0102	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Aktivitas Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	60	2.113.663.000	3	73.548.400	12,00	422.732.600,00	12,00	355.095.384,00	100,00	84,00	12	422.732.600	3	73.548.400	29,00	17,40		
701022.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	100	50.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000,00	100,00	8.400.000,00	100,00	84,00	100	10.000.000	100	10.000.000	100,00	100,00		
701022.0201	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah dokumen perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan yang disediakan	5	50.000.000	1	10.000.000	1,00	10.000.000,00	1,00	8.400.000,00	100,00	84,00	1	10.000.000	1	10.000.000	100,00	100,00		
70103	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan	30	105.359.000	25,00	7.620.800	25,00	21.071.800,00	25,00	18.964.620,00	100,00	90,00	25	21.071.800	25,00	7.620.800	100,00	36,17		
701032.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	100	105.359.000	25	7.620.800	100	21.071.800,00	100,00	18.964.620,00	100,00	90,00	100	21.071.800	25	7.620.800	25,00	36,17		
701032.0103	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah aktivitas peningkatan pemberdayaan PKK yang disediakan	60	105.359.000	3	7.620.800	12,00	21.071.800,00	12,00	18.964.620,00	100,00	90,00	12	21.071.800	3	7.620.800	25,00	36,17		
70104	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan	2	35.119.500	-	-	2,00	7.023.900,00	2,00	5.324.116,20	100,00	75,80	2	7.023.900	-	-	0,00	0,00		
701042.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Cakupan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	100	35.119.500	-	-	100	7.023.900,00	100,00	5.324.116,20	100,00	75,80	100	7.023.900	-	-	0,00	0,00		
701042.0201	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan kepala daerah yang disediakan	5	35.119.500	-	-	1,00	7.023.900,00	1,00	5.324.116,20	100,00	75,80	1	7.023.900	-	-	0,00	0,00		
70106	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Keuangan Desa yang selesai tepat waktu	90	36.071.500	-	-	90,00	7.214.300,00	90,00	6.348.584,00	100,00	88,00	90	7.214.300	-	-	0,00	0,00		
701062.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	36.071.500	-	-	100	7.214.300,00	100,00	6.348.584,00	100,00	88,00	100	7.214.300	-	-	0,00	0,00		
701062.0103	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pemberdayaan aset desa yang disediakan	5	36.071.500	-	-	1,00	7.214.300,00	1,00	6.348.584,00	100,00	88,00	1	7.214.300	-	-	0,00	0,00		
	URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	94.4	17.837.897.873	24	731.943.000	90	4.160.023.000	90	4.186.036.000	100	100,625	93.5	3.788.108.000	24	731.943.000	6,19	0,19		
8.01.01.201	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	250.000.000	15	11.429.000	40	49.999.000	40	49.999.000	100	100	20	14.999.000	15	11.429.000	0,75	0,76		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020						Target Program/Kegiatan RKPd tahun berjalan (tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun berjalan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp	K	Rp	Target RKPd Tahun 2021		Realisasi RKPd Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)		K	Rp	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Realisasi Target s/d tahun 2021			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13
8.01.01.201.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	250.000.000	15	11.429.000			40	49.999.000			20	14.999.000	15	11.429.000	0,75	0,76		
8.01.01.202	Administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	105	11.977.759.110	3	541.160.000	12	3.092.690.000	12	3.092.690.000	100	100	12	3.193.947.000	3	541.160.000	0,25	0,17		
8.01.01.202.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN per bulan	105	11.977.759.110	63	541.160.000			110	3.092.690.000			105	3.193.947.000	63	541.160.000	0,60	0,17		
8.01.01.206	Administrasi umum perangkat daerah	jumlah dokumen	60	3.560.138.763	3	128.063.200	8	520.057.000	8	596.208.000	100	114,643	12	346.952.000	3	128.063.200	0,25	0,37		
8.01.01.206.01	Penyediaan bahan logistik kantor	Jenis bahan logistik yang disediakan	12	685.138.763	3	11.308.000			12	74.613.000			12	53.991.000	3	11.308.000	0,25	0,21		
8.01.01.206.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	20	1.000.000.000	20	26.356.000			18	244.390.000			20	70.799.000	20	26.356.000	1,00	0,37		
8.01.01.206.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	22	350.000.000	22	8.131.000			23	54.002.000			22	14.997.000	22	8.131.000	1,00	0,54		
8.01.01.206.04	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis barang cetakan dan penggandaan	6	150.000.000	3	4.565.000			6	36.766.000			6	14.999.000	3	4.565.000	0,50	0,30		
8.01.01.206.05	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bahan bacaan yang disediakan	1	25.000.000	1	707.200			24	3.998.000			1	2.998.000	1	707.200	1,00	0,24		
8.01.01.206.06	Fasilitas kunjungan tamu	Jumlah bulan kunjungan	60	500.000.000	3	14.693.000			12	22.245.000			12	33.190.000	3	14.693.000	0,25	0,44		
8.01.01.206.08	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis komponen listrik yang disediakan	4	100.000.000	4	5.992.000			4	9.944.000			4	5.992.000	4	5.992.000	1,00	1,00		
8.01.01.206.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Waktu rapat koordinasi dan konsultasi	60	750.000.000	3	56.311.000			12	150.250.000			12	149.986.000	3	56.311.000	0,25	0,38		
8.01.01.208	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah dokumen	60	1.300.000.000	3	45.302.000	25	248.332.000	25	224.842.000	100	90,5409	12	231.200.000	3	45.302.000	0,25	0,20		
8.01.01.208.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60	200.000.000	3	11.687.000			12	32.093.000			12	35.820.000	3	11.687.000	0,25	0,33		
8.01.01.208.03	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah jasa pelayanan umum	540	975.000.000	24	28.400.000			12	160.650.000			108	170.400.000	24	28.400.000	0,22	0,17		
8.01.01.208.04	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	95	125.000.000	5	5.215.000			18	32.099.000			19	24.980.000	5	5.215.000	0,26	0,21		
8.01.01.209	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	jumlah dokumen	10	24.986.000	1	5.985.000	2	248.945.000	2	24.986.000	100	10,0368	2	24.985.000	1	5.985.000	0,50	0,24		
8.01.01.209.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan yang dipelihara dan pajak kendaraan	2	24.986.000	2	5.985.000			2	24.986.000			2	24.986.000	2	5.985.000	1,00	0,24		
8.01.02	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Potensi angka konflik suku, agama, ras dan antargolongan di masyarakat	10	4.391.264.080	1	115.038.000	8	1.293.785.000	1	1.293.785.000	12,5	100	2	450.000.000	1	115.038.000	0,50	0,26		
8.01.02.201	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase pelajar, mahasiswa dan tokoh agama/masyarakat yang mengikuti sosialisasi penguatan keberagaman dan kebhinekaan	5.7	4.391.264.080	0	115.038.000	8	1.293.785.000	7	1.293.785.000	87,5	100	1,12	450.000.000	0	115.038.000	0,00	0,26		
8.01.02.201.01	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah pelajar, mahasiswa, tokoh agama/masyarakat yang mengikuti sosialisasi penguatan keberagaman dan kebhinekaan	16750	4.391.264.080	350	115.038.000			-	1.293.785.000			3300	450.000.000	350	115.038.000	0,11	0,26		
8.01.03	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase masyarakat yang menggunakan hak politiknya	331	8.593.891.025	0	-	6	2.789.162.000	67	2.789.162.000	1116,67	100	65	3.852.342.000	0	-	0,00	0,00		
8.01.03.201	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fungsi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik	Persentase masyarakat yang memiliki hak pilih aktif yang mengikuti sosialisasi pendidikan politik	145	8.593.891.025	0	-	6	2.789.162.000	6	2.789.162.000	100	100	20	3.566.842.000	0	-	0,00	0,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020						Target Program/Kegiatan RKPd tahun berjalan (tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun berjalan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
							Target RKPd Tahun 2021		Realisasi RKPd Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Realisasi Target s/d tahun 2021			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13
8.01.03.201.03	Pelaksanaan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	Jumlah laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, eika politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik	65	6.743.891.025	0	-			0	2.309.981.000			13	3.482.342.000	0	-	0,00	0,00		
8.01.03.201.04	Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	Jumlah masyarakat yang memiliki hak pilih aktif yang mengikuti sosialisasi pendidikan politik	1755000	1.850.000.000	0	-			0	479.181.000			260000	370.000	0	-	0,00	0,00		
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase organisasi kemasyarakatan yang dibina	410	659.479.777	0	-	2	497.759.000	0	497.759	0	0,1	70	745.000	0	-	0,00	0,00		
8.01.04.201	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengasan organisasi kemasyarakatan	Persentase jumlah anggota organisasi kemasyarakatan yang dibina	110	659.479.777	0	-	2	497.759.000	2	497.759.000	100	100	20	745.000.000	0	-	0,00	0,00		
8.01.04.201.03	Pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	Jumlah anggota organisasi kemasyarakatan yang dibina	1890	659.479.777	0	-			0	497.759.000			300	745.000.000	0	-	0,00	0,00		
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	Angka potensi gangguan sosial, ekonomi dan budaya di masyarakat	60	354.405.158	3	-	2	165.869.000	12	165.869.000	600	100	12	270.000.000	3	-	0,25	0,00		
8.01.05.201	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Persentase pelajar, mahasiswa, tokoh agama/masyarakat dan ASN yang mengikuti kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	12	354.405.158	0	-	2	165.869.000	2	165.869.000	100	100	2	270.000.000	0	-	0,00	0,00		
8.01.05.201.04	Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring, valuasi, dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	20	250.000.000	0	-			4	49.399.000			4	50.000.000	0	-	0,00	0,00		
8.01.05.201.05	Pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	Jumlah pelajar, mahasiswa, tokoh agama/masyarakat dan ASN yang mengikuti kegiatan pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	5000	104.000.000	0	-				116.470.000			600	220.000.000	0	-	0,00	0,00		
8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Angka potensi gangguan ideologi, politik, pertahanan dan keamanan	60	6.338.863.049	3	134.400	6	2.058.300.000	12	2.058.300.000	200	100	12	775.000.000	3	-	0,25	0,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020						Target Program/Kegiatan RKPd tahun berjalan (tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun berjalan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Target RKPd Tahun 2021		Realisasi RKPd Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Realisasi Target s/d tahun 2021									
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13
8.01.06.201	Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	Jumlah laporan kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	60	6.338.863.049	3	134.400	6	2.058.300.000	12	2.058.300.000	200	100	12	775.000.000	3	134.400	0,25	0,00		
8.01.06.201.04	Pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang	Jumlah pelajar, mahasiswa, tokoh agama/masyarakat dan ASN yang mengikuti kegiatan pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah	25000	2.500.000.000	0	-			0	1.489.027			4600	480.000.000	0	-	0,00	0,00		
8.01.06.201.05	Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelije, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah	60	3.838.863.049	3	134.400			12	569.273			12	295.000	3	134.400	0,25	0,46		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN												695,707,159,184		0	
1	01	01					94 %	656,661,688,676						94 %	0		
1	01	01	2.01				80 %	50,000,000						80 %	0		
1	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 Dokumen	25,000,000	Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Sobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul	Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi	1 Dokumen	0	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		15 Laporan	25,000,000	Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Sobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul	Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi	15 Laporan	0	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	%	90 %	591,167,418,636						90 %	0	
1	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		5000 Orang/bulan	591,157,418,636	Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Sobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-TPG PNSD DAK Non Fisik- Tamsil Guru PNSD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul	Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi	5000 Orang/bulan	0	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		1 Laporan	10,000,000	Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Sobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul	Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi	1 Laporan	0	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	90 %	160,000,000						90 %	0	
1	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	5,000,000	Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Sobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul	Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi	1 Paket	0	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 Paket	5,000,000	Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Sobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul	Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi	1 Paket	0	Dinas Pendidikan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	50,000,000	Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Sobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul	Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi	1 Paket	0	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	100,000,000	Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Sobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul	Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi	12 Laporan	0	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	90 %	65,217,220,040						90 %	0	
1.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	5,000,000	Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Sobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul	Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi	12 Laporan	0	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	162,020,040	Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Sobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul	Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi	12 Laporan	0	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				72 Laporan	65,050,200,000	Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Sobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul	Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi	72 Laporan	0	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	80 %	67,050,000						80 %	0	
1.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	36,100,000	Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Sobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul	Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi	1 Unit	0	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				25 Unit	20,950,000	Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Sobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul	Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi	25 Unit	0	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	10,000,000	Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Sobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul	Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi	15 Unit	0	Dinas Pendidikan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum Pesentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan dasar	% % %		% % %	28,56 % 50,24 % 100 %	39,045,470,508					28,56 % 50,24 % 100 %	0		
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Cakupan Pendidikan Sekolah Dasar	%		%	100 %	13,912,215,700					100 %	0		
1 01 02 2.01 02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				0 Ruang	783,660,000	Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Banyuwangi	0 Ruang	0	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.01 05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	72,789,000	Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Banyuwangi	1 Ruang	0	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.01 06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				25 Unit	1,262,286,700	Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Banyuwangi	25 Unit	0	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.01 08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat				75 Ruang	9,180,089,000	Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Banyuwangi	75 Ruang	0	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.01 09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	72,789,000	Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Banyuwangi	1 Ruang	0	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.01 11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				4 Ruang	220,317,000	Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Banyuwangi	4 Ruang	0	Dinas Pendidikan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi				10 Unit	504,630,000	Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Banyuwangi	10 Unit	0	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				32 Paket	710,655,000	Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Banyuwangi	32 Paket	0	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				43 Paket	1,105,000,000	Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Banyuwangi	43 Paket	0	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Cakupan pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama	%		%	100 %	3,501,678,500						100 %	0	
1.01.02.2.02.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				1 Ruang	2,204,920,000	Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Banyuwangi	1 Ruang	0	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	150,000,000	Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Banyuwangi	1 Ruang	0	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				2 Unit	484,181,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Banyuwangi	2 Unit	0	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				6 Ruang	413,121,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Banyuwangi	6 Ruang	0	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				0 Paket	93,456,000	Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Banyuwangi	0 Paket	0	Dinas Pendidikan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				3 Paket	156,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Banyuwangi	3 Paket	0	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)						3,595,983,300							0	
1.01.02.2.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun				0 Unit	915,520,000	Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif		0 Unit	0	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				1 Unit	595,735,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul		1 Unit	0	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Unit	1,509,065,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul		2 Unit	0	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.03.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Unit	138,640,000	Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif		0 Unit	0	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.03.07	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia				4 Paket	61,352,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul		4 Paket	0	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia				5 Paket	375,670,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul		5 Paket	0	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Cakupan pengelolaan pendidikan nonformal/kesetaraan	%		%	100 %	18,035,593,008						100 %	0	
1.01.02.2.04.10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				3000 Peserta Didik	12,912,000,000	Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul	Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan di Kabupaten Banyuwangi	3000 Peserta Didik	0	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.04.11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia				0 Paket	125,000,000	Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif	Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan di Kabupaten Banyuwangi	0 Paket	0	Dinas Pendidikan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				300 Satuan Pendidikan	4,200,000,000	Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Sobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul	Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan di Kabupaten Banyuwangi	300 Satuan Pendidikan	0	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.04.22	Penyelenggaraan Ujian bagi Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Ujian				55 Satuan Pendidikan	798,593,008	Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Sobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul	Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan di Kabupaten Banyuwangi	55 Satuan Pendidikan	0	Dinas Pendidikan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						75,000,000							0	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan dasar	% % %		% % %	28,56 % 50,24 % 100 %	75,000,000							0	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Cakupan Pendidikan Sekolah Dasar	%		%	100 %	75,000,000							0	
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				30 Satuan Pendidikan	75,000,000	Kab. Banyuwangi, Bangorejo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar di Kecamatan Bangorejo	30 Satuan Pendidikan	0	Dinas Pendidikan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						75,000,000							0	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						75,000,000							0	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						75,000,000							0	
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				32 Satuan Pendidikan	75,000,000	Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul		32 Satuan Pendidikan	0	Dinas Pendidikan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						75,000,000							0	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						75,000,000							0	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						75,000,000							0	
1 01 02 2.01 28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				24 Satuan Pendidikan	75,000,000	Kab. Banyuwangi, Blimbingsari, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul		24 Satuan Pendidikan	0	Dinas Pendidikan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						75,000,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						75,000,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						75,000,000							0	
1 01 02 2.01 28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				40 Satuan Pendidikan	75,000,000	Kab. Banyuwangi, Cluring, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul		40 Satuan Pendidikan	0	Dinas Pendidikan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						75,000,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						75,000,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						75,000,000							0	
1 01 02 2.01 28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				31 Satuan Pendidikan	75,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul		31 Satuan Pendidikan	0	Dinas Pendidikan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						75,000,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						75,000,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						75,000,000							0	
1 01 02 2.01 28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				32 Satuan Pendidikan	75,000,000	Kab. Banyuwangi, Genteng, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul		32 Satuan Pendidikan	0	Dinas Pendidikan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						75,000,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						75,000,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						75,000,000							0	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				13 Satuan Pendidikan	75,000,000	Kab. Banyuwangi, Giri, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul		13 Satuan Pendidikan	0	Dinas Pendidikan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				19 Satuan Pendidikan	75,000,000	Kab. Banyuwangi, Glagah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul		19 Satuan Pendidikan	0	Dinas Pendidikan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				44 Satuan Pendidikan	75,000,000	Kab. Banyuwangi, Glenmore, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul		44 Satuan Pendidikan	0	Dinas Pendidikan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				34 Satuan Pendidikan	75,000,000	Kab. Banyuwangi, Kabat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul		34 Satuan Pendidikan	0	Dinas Pendidikan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				31 Satuan Pendidikan	75,000,000	Kab. Banyuwangi, Kalibaru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul		31 Satuan Pendidikan	0	Dinas Pendidikan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				27 Satuan Pendidikan	75,000,000	Kab. Banyuwangi, Kalipuro, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul		27 Satuan Pendidikan	0	Dinas Pendidikan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				23 Satuan Pendidikan	75,000,000	Kab. Banyuwangi, Licin, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul		23 Satuan Pendidikan	0	Dinas Pendidikan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				42 Satuan Pendidikan	75,000,000	Kab. Banyuwangi, Muncar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul		42 Satuan Pendidikan	0	Dinas Pendidikan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				34 Satuan Pendidikan	75,000,000	Kab. Banyuwangi, Pesanggaran, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul		34 Satuan Pendidikan	0	Dinas Pendidikan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				27 Satuan Pendidikan	75,000,000	Kab. Banyuwangi, Purwoharjo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul		27 Satuan Pendidikan	0	Dinas Pendidikan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				27 Satuan Pendidikan	75,000,000	Kab. Banyuwangi, Rogojampi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul		27 Satuan Pendidikan	0	Dinas Pendidikan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				32 Satuan Pendidikan	75,000,000	Kab. Banyuwangi, Sempu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul		32 Satuan Pendidikan	0	Dinas Pendidikan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				28 Satuan Pendidikan	75,000,000	Kab. Banyuwangi, Siliragung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul		28 Satuan Pendidikan	0	Dinas Pendidikan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				28 Satuan Pendidikan	75,000,000	Kab. Banyuwangi, Singojuruh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul		28 Satuan Pendidikan	0	Dinas Pendidikan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				28 Satuan Pendidikan	75,000,000	Kab. Banyuwangi, Songgon, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul		28 Satuan Pendidikan	0	Dinas Pendidikan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				43 Satuan Pendidikan	75,000,000	Kab. Banyuwangi, Srono, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul		43 Satuan Pendidikan	0	Dinas Pendidikan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 2.01 28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				34 Satuan Pendidikan	75,000,000	Kab. Banyuwangi, Tegaldlimo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul		34 Satuan Pendidikan	0	Dinas Pendidikan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1 01 02 2.01 28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				22 Satuan Pendidikan	75,000,000	Kab. Banyuwangi, Tegalsari, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul		22 Satuan Pendidikan	0	Dinas Pendidikan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1 01 02 2.01 28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				35 Satuan Pendidikan	75,000,000	Kab. Banyuwangi, Wongsorejo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul		35 Satuan Pendidikan	0	Dinas Pendidikan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN														
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
1 02 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
1 02 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen 5 Dokumen	25,000,000	Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Singonegaran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif	Dinas Kesehatan	0 Dokumen 5 Dokumen	100,000,000	Dinas Kesehatan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	25,000,000	Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Singonegaran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif	Dinas Kesehatan	5 Laporan	100,000,000	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang Disusun	dok		dok	123 dok	114,992,637,949						123 dok	115,100,000,000	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1734 Orang/bulan	114,982,637,949	Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif	Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jaringannya	1734 Orang/bulan	115,000,000,000	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				29 Laporan	10,000,000	Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Singonegaran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif	Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jaringannya	29 Laporan	100,000,000	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Waktu Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	bln		bln	12 bln	160,000,000						12 bln	700,000,000	
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5,000,000	Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Singonegaran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif	Dinas Kesehatan	1 Paket	50,000,000	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	5,000,000	Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Singonegaran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif	Dinas Kesehatan	1 Paket	50,000,000	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	50,000,000	Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Singonegaran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif	Dinas Kesehatan	3 Paket	200,000,000	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	100,000,000	Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif	Dinas Kesehatan	12 Laporan	400,000,000	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang disediakan	jenis		jenis	3 jenis	16,394,649,646						3 jenis	16,660,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	5,000,000	Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Singonegaran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif	Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jaringannya	12 Laporan	10,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	542,599,246	Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Singonegaran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif	Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jaringannya	12 Laporan	600,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	15,847,050,400	Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif	Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jaringannya	12 Laporan	16,050,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	dok		dok	3 dok	479,430,400						3 dok	519,430,400	
1 02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				17 Unit	469,430,400	Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Singonegaran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif	Dinas Kesehatan	17 Unit	469,430,400	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif	Dinas Kesehatan	15 Unit	50,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						73,105,038,212							80,830,070,100	
1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						378,588,000							378,588,000	
1 02 02 2.01 10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya				12 Unit	221,988,000				7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif		12 Unit	221,988,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.01 11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan				1 Unit	156,600,000				7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif		1 Unit	156,600,000	Dinas Kesehatan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Kasus Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan	%		%	100 %	72,426,450,212						100 %	79,951,482,100	
		Cakupan pelayanan balita sesuai standar	%		%	100 %							100 %		
		Persentase anak usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%		%	100 %							100 %		
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	%		%	100 %							100 %		
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan ibu bersalin sesuai standar	%		%	100 %							100 %		
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil sesuai standar	%		%	100 %							100 %		
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%		%	100 %							100 %		
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%		%	100 %							100 %		
		Persentase orang usia 15-59 mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%		%	100 %							100 %		
		Persentase orang usia 60 ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%		%	100 %							100 %		
		Persentase penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%		%	100 %							100 %		
		Persentase penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%		%	100 %							100 %		
		Persentase penderita ODGJ Berat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%		%	100 %							100 %		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				22950 Orang	1,000,725,000					7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif 7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif	Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jaringannya	22950 Orang	1,000,725,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				81080 Orang	34,921,600					7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif	Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jaringannya	81080 Orang	34,921,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				833375 Orang	42,631,800					7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif	Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jaringannya	833375 Orang	42,631,800	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				27098 Orang	1,354,353,100					7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif	Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jaringannya	27098 Orang	1,354,353,100	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				29224 Orang	51,300,000					7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif	Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jaringannya	29224 Orang	51,300,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				12 Dokumen	205,875,000					7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif	Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jaringannya	12 Dokumen	205,875,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	1,146,710,000					7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif	Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jaringannya	12 Dokumen	1,146,710,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	1,114,965,600					7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif	Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jaringannya	12 Dokumen	1,114,965,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				24 Dokumen	19,379,768,924	Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pajak Rokok-Pembayaran Iuran JKN			7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif	Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jaringannya	24 Dokumen	25,000,000,000	Dinas Kesehatan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				46 Dokumen	48,095,199,188	Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif	Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jaringannya	46 Dokumen	50,000,000,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas kesehatan memiliki Ijin Operasional yang berlaku	%		%	100 %	300,000,000						100 %	500,000,000	
1.02.02.2.04.04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan				12 Dokumen	300,000,000	Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif	Dinas Kesehatan	12 Dokumen	500,000,000	Dinas Kesehatan
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	%		%	28,89 %	404,445,000						28,89 %	450,000,000	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kesehatan yang ditingkatkan kopetensi teknisnya	org		org	60 org	404,445,000						60 org	450,000,000	
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				32 Orang	404,445,000	Kab. Banyuwangi, Pesanggaran, Pesanggaran Kab. Banyuwangi, Purwoharjo, Sumbersari Kab. Banyuwangi, Purwoharjo, Purwoharjo Kab. Banyuwangi, Tegaldlimo, Wringinpitu Kab. Banyuwangi, Tegaldlimo, Purwoagung Kab. Banyuwangi, Tegaldlimo, Kalipait Kab. Banyuwangi, Cluring, Benculuk	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif	Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jaringannya	32 Orang	450,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
										Kab. Banyuwangi, Cluring, Sraten					
										Kab. Banyuwangi, Kalibaru, Kalibarakulon					
										Kab. Banyuwangi, Kalibaru, Kebonrejo					
										Kab. Banyuwangi, Singojuruh, Padang					
										Kab. Banyuwangi, Singojuruh, Kemiri					
										Kab. Banyuwangi, Rogojampi, Pengatigan					
										Kab. Banyuwangi, Kabat, Bareng					
										Kab. Banyuwangi, Kabat, Labanasem					
										Kab. Banyuwangi, Kabat, Pakistaji					
										Kab. Banyuwangi, Kabat, Tambong					
										Kab. Banyuwangi, Kabat, Kalirejo					
										Kab. Banyuwangi, Glagah, Rejosari					
										Kab. Banyuwangi, Glagah, Oleh Sari					
										Kab. Banyuwangi, Glagah, Tamansuruh					
										Kab. Banyuwangi, Glagah, Kenjo					
										Kab.					

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023																
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
										Banyuwangi, Glagah, Kampunganyar Kab. Banyuwangi, Wongsorejo, Sidowangi Kab. Banyuwangi, Songgon, Songgon Kab. Banyuwangi, Songgon, Balak Kab. Banyuwangi, Songgon, Parangharjo Kab. Banyuwangi, Siliragung, Kesilir Kab. Banyuwangi, Tegalsari, Karangmulyo Kab. Banyuwangi, Tegalsari, Tegalrejo Kab. Banyuwangi, Licin, Licin Kab. Banyuwangi, Licin, Segobang						
1	02	05							1,071,392,300						1,071,392,300	
1	02	05	2.03						1,071,392,300						1,071,392,300	
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			12 Dokumen	1,071,392,300		7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif		12 Dokumen	1,071,392,300	Dinas Kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													66,250,000,000	72,000,000,000

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%		%	94 %	66,250,000,000						94 %	72,000,000,000	
1 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang Disusun	dok		dok	123 dok	1,440,000,000						123 dok	2,000,000,000	
1 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	1,440,000,000	Kab. Banyuwangi, Genteng, Gentengwetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif	RSUD Genteng	20 Orang/bulan	2,000,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	keg		keg	4 keg	64,810,000,000						4 keg	70,000,000,000	
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	64,810,000,000	Kab. Banyuwangi, Genteng, Gentengwetan	Pendapatan dari BLUD			RSUD Genteng	1 Unit Kerja	70,000,000,000	Dinas Kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						200,000,000							300,000,000	
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						200,000,000							300,000,000	
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						200,000,000							300,000,000	
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	200,000,000	Kab. Banyuwangi, Wongsorejo, Bajulmati	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif		12 Dokumen	300,000,000	Dinas Kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						200,000,000							300,000,000	
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						200,000,000							300,000,000	
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						200,000,000							300,000,000	
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	200,000,000	Kab. Banyuwangi, Wongsorejo, Wongsorejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif		12 Dokumen	300,000,000	Dinas Kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						200,000,000							500,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						200,000,000						500,000,000		
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						200,000,000						500,000,000		
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	200,000,000	Kab. Banyuwangi, Kalipuro, Kelir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif		12 Dokumen	500,000,000	Dinas Kesehatan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						200,000,000						500,000,000		
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						200,000,000						500,000,000		
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						200,000,000						500,000,000		
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	200,000,000	Kab. Banyuwangi, Kalipuro, Klatak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif		12 Dokumen	500,000,000	Dinas Kesehatan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						200,000,000						500,000,000		
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						200,000,000						500,000,000		
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						200,000,000						500,000,000		
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	200,000,000	Kab. Banyuwangi, Giri, Mojopanggung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif		12 Dokumen	500,000,000	Dinas Kesehatan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						200,000,000						500,000,000		
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						200,000,000						500,000,000		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						200,000,000						500,000,000		
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	200,000,000	Kab. Banyuwangi, Glagah, Paspan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif	12 Dokumen	500,000,000	Dinas Kesehatan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						200,000,000							500,000,000	
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						200,000,000						500,000,000		
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						200,000,000						500,000,000		
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	200,000,000	Kab. Banyuwangi, Licin, Licin	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif	12 Dokumen	500,000,000	Dinas Kesehatan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						200,000,000							500,000,000	
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						200,000,000						500,000,000		
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						200,000,000						500,000,000		
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	200,000,000	Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Sobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif	12 Dokumen	500,000,000	Dinas Kesehatan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						200,000,000							500,000,000	
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						200,000,000						500,000,000		
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						200,000,000						500,000,000		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	200,000,000	Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Singotrunan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif		12 Dokumen	500,000,000	Dinas Kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						200,000,000							500,000,000	
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						200,000,000							500,000,000	
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						200,000,000							500,000,000	
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				12 Dokumen	200,000,000	Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Kertosari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif		12 Dokumen	500,000,000	Dinas Kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						200,000,000							500,000,000	
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						200,000,000							500,000,000	
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						200,000,000							500,000,000	
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	200,000,000	Kab. Banyuwangi, Kabat, Kabat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif		12 Dokumen	500,000,000	Dinas Kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						200,000,000							500,000,000	
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						200,000,000							500,000,000	
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						200,000,000							500,000,000	
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	200,000,000	Kab. Banyuwangi, Blimbingsari, Badean	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif		12 Dokumen	500,000,000	Dinas Kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					200,000,000							500,000,000		
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					200,000,000							500,000,000		
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					200,000,000							500,000,000		
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	200,000,000	Kab. Banyuwangi, Rogojampi, Gitik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif	12 Dokumen	500,000,000	Dinas Kesehatan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					200,000,000							500,000,000		
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					200,000,000							500,000,000		
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					200,000,000							500,000,000		
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	200,000,000	Kab. Banyuwangi, Rogojampi, Gladag	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif	12 Dokumen	500,000,000	Dinas Kesehatan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					200,000,000							500,000,000		
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					200,000,000							500,000,000		
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					200,000,000							500,000,000		
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas						200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif		500,000,000	Dinas Kesehatan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					200,000,000							500,000,000		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						200,000,000						500,000,000		
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						200,000,000						500,000,000		
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	200,000,000	Kab. Banyuwangi, Songgon, Songgon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif		12 Dokumen	500,000,000	Dinas Kesehatan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						200,000,000						500,000,000		
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						200,000,000						500,000,000		
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						200,000,000						500,000,000		
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	200,000,000	Kab. Banyuwangi, Srono, Kebaman	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif		12 Dokumen	500,000,000	Dinas Kesehatan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						200,000,000						500,000,000		
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						200,000,000						500,000,000		
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						200,000,000						500,000,000		
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	200,000,000	Kab. Banyuwangi, Srono, Wonosobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif		12 Dokumen	500,000,000	Dinas Kesehatan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						200,000,000						500,000,000		
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						200,000,000						500,000,000		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						200,000,000						500,000,000		
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	200,000,000	Kab. Banyuwangi, Muncar, Kedungrejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif		12 Dokumen	500,000,000	Dinas Kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						200,000,000							500,000,000	
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						200,000,000							500,000,000	
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						200,000,000							500,000,000	
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	200,000,000	Kab. Banyuwangi, Muncar, Sumberberas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif		12 Dokumen	500,000,000	Dinas Kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						200,000,000							500,000,000	
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						200,000,000							500,000,000	
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						200,000,000							500,000,000	
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	200,000,000	Kab. Banyuwangi, Muncar, Tapanrejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif		12 Dokumen	500,000,000	Dinas Kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						219,780,000							525,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan per 100.000 KH Persentase capaian SPM Bidang Kesehatan Persentase Penemuan dan Penanganan Kasus Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Angka Angka % % %		Angka Angka % % %	5,06 Angka 94 Angka 71,6 % 100 % 21,5 %	219,780,000						5,06 Angka 94 Angka 71,6 % 100 % 21,5 %	525,000,000	
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Kasus Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan Cakupan pelayanan balita sesuai standar Persentase anak usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan ibu bersalin sesuai standar Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase orang usia 15-59 mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persentase orang usia 60 ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persentase penderita	% %		% % % % % % % % % % % % % % % % % % % %	100 % 100 %	219,780,000					100 % 100 %	525,000,000		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023																
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
		Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase penderita ODGJ Berat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar														
1	02 02 2.02 08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			500 Orang	19,780,000	Kab. Banyuwangi, Muncar, Tembokrejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif	Dinas Kesehatan	500 Orang	25,000,000	Dinas Kesehatan	
1	02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			12 Dokumen	200,000,000	Kab. Banyuwangi, Muncar, Tembokrejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif	Dinas Kesehatan	12 Dokumen	500,000,000	Dinas Kesehatan	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						200,000,000							500,000,000	
1	02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT														
1	02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
1	02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			12 Dokumen	200,000,000	Kab. Banyuwangi, Tegaldlimo, Tegaldlimo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif		12 Dokumen	500,000,000	Dinas Kesehatan	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						200,000,000							500,000,000	
1	02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT														
1	02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	200,000,000	Kab. Banyuwangi, Tegaldlimo, Kedungwungu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif	12 Dokumen	500,000,000	Dinas Kesehatan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						200,000,000							500,000,000	
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						200,000,000						500,000,000		
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						200,000,000						500,000,000		
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	200,000,000	Kab. Banyuwangi, Purwoharjo, Purwoharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif	12 Dokumen	500,000,000	Dinas Kesehatan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						200,000,000							500,000,000	
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						200,000,000						500,000,000		
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						200,000,000						500,000,000		
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	200,000,000	Kab. Banyuwangi, Purwoharjo, Grajagan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif	12 Dokumen	500,000,000	Dinas Kesehatan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						200,000,000							500,000,000	
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						200,000,000						500,000,000		
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						200,000,000						500,000,000		
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	200,000,000	Kab. Banyuwangi, Cluring, Benculuk	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif	12 Dokumen	500,000,000	Dinas Kesehatan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	02						200,000,000							500,000,000	
1	02	02					200,000,000							500,000,000	
1	02	02	2.02				200,000,000							500,000,000	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	200,000,000	Kab. Banyuwangi, Cluring, Tampo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif	12 Dokumen	500,000,000	Dinas Kesehatan
1															
1	02						200,000,000							500,000,000	
1	02	02					200,000,000							500,000,000	
1	02	02	2.02				200,000,000							500,000,000	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	200,000,000	Kab. Banyuwangi, Gambiran, Jajag	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif	12 Dokumen	500,000,000	Dinas Kesehatan
1															
1	02						200,000,000							500,000,000	
1	02	02					200,000,000							500,000,000	
1	02	02	2.02				200,000,000							500,000,000	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	200,000,000	Kab. Banyuwangi, Gambiran, Yosomulyo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif	12 Dokumen	500,000,000	Dinas Kesehatan
1															
1	02						200,000,000							500,000,000	
1	02	02					200,000,000							500,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						200,000,000						500,000,000		
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	200,000,000	Kab. Banyuwangi, Tegalsari, Tegalsari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif	12 Dokumen	500,000,000	Dinas Kesehatan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						200,000,000							500,000,000	
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						200,000,000						500,000,000		
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						200,000,000						500,000,000		
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	200,000,000	Kab. Banyuwangi, Genteng, Gentengkulon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif	12 Dokumen	500,000,000	Dinas Kesehatan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						200,000,000							500,000,000	
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						200,000,000						500,000,000		
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						200,000,000						500,000,000		
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	200,000,000	Kab. Banyuwangi, Genteng, Kembiritan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif	12 Dokumen	500,000,000	Dinas Kesehatan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						200,000,000							500,000,000	
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						200,000,000						500,000,000		
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						200,000,000						500,000,000		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	200,000,000	Kab. Banyuwangi, Sempu, Sempu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif	12 Dokumen	500,000,000	Dinas Kesehatan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						200,000,000							500,000,000	
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						200,000,000						500,000,000		
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						200,000,000						500,000,000		
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	200,000,000	Kab. Banyuwangi, Sempu, Karang Sari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif	12 Dokumen	500,000,000	Dinas Kesehatan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						200,000,000							500,000,000	
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						200,000,000						500,000,000		
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						200,000,000						500,000,000		
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	200,000,000	Kab. Banyuwangi, Sempu, Gendoh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif	12 Dokumen	500,000,000	Dinas Kesehatan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						200,000,000							500,000,000	
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						200,000,000						500,000,000		
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						200,000,000						500,000,000		
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	200,000,000	Kab. Banyuwangi, Glenmore, Sepanjang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif	12 Dokumen	500,000,000	Dinas Kesehatan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	02						200,000,000							500,000,000	
1	02	02					200,000,000							500,000,000	
1	02	02	2.02				200,000,000							500,000,000	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	200,000,000	Kab. Banyuwangi, Glenmore, Tulungrejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif	12 Dokumen	500,000,000	Dinas Kesehatan
1															
1	02						200,000,000							500,000,000	
1	02	02					200,000,000							500,000,000	
1	02	02	2.02				200,000,000							500,000,000	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	200,000,000	Kab. Banyuwangi, Kalibaru, Kalibarakulon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif	12 Dokumen	500,000,000	Dinas Kesehatan
1															
1	02						200,000,000							500,000,000	
1	02	02					200,000,000							500,000,000	
1	02	02	2.02				200,000,000							500,000,000	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	200,000,000	Kab. Banyuwangi, Bangorejo, Kebondalem	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif	12 Dokumen	500,000,000	Dinas Kesehatan
1															
1	02						200,000,000							500,000,000	
1	02	02					200,000,000							500,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						200,000,000						500,000,000		
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	200,000,000	Kab. Banyuwangi, Bangorejo, Sambirejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif	12 Dokumen	500,000,000	Dinas Kesehatan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						200,000,000							500,000,000	
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						200,000,000						500,000,000		
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						200,000,000						500,000,000		
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	200,000,000	Kab. Banyuwangi, Pesanggaran, Pesanggaran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif	12 Dokumen	500,000,000	Dinas Kesehatan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						200,000,000							500,000,000	
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						200,000,000						500,000,000		
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						200,000,000						500,000,000		
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	200,000,000	Kab. Banyuwangi, Pesanggaran, Sumberagung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif	12 Dokumen	500,000,000	Dinas Kesehatan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						200,000,000							500,000,000	
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						200,000,000						500,000,000		
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						200,000,000						500,000,000		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	200,000,000	Kab. Banyuwangi, Siliragung, Siliragung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif		12 Dokumen	500,000,000	Dinas Kesehatan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							300,000,000							500,000,000	
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						300,000,000							500,000,000		
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						300,000,000							500,000,000		
1 02 02 2.02 34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				12 Dokumen	300,000,000	Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Singonegaran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif		12 Dokumen	500,000,000	Dinas Kesehatan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							200,000,000							500,000,000	
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						200,000,000							500,000,000		
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						200,000,000							500,000,000		
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	200,000,000	Kab. Banyuwangi, Srono, Parijatah Kulon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif		12 Dokumen	500,000,000	Dinas Kesehatan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							115,600,000,000							126,837,350,000	
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%		%	94 %	115,600,000,000						94 %	126,837,350,000		
1 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang Disusun	dok		dok	123 dok	3,585,000,000						123 dok	3,620,850,000		
1 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				1 Tahun	3,585,000,000		Pendapatan dari BLUD		7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif	RSUD Blambangan	1 Tahun	3,620,850,000	Dinas Kesehatan	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	keg		keg	4 keg	112,015,000,000						4 keg	123,216,500,000	
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah Waktu Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				0 Unit Kerja 12 Bulan	112,015,000,000		Pendapatan dari BLUD		7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif	RSUD Blambangan	0 Unit Kerja 12 Bulan	123,216,500,000	Dinas Kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						200,000,000							350,000,000	
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan per 100.000 KH Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Angka Angka %		Angka Angka %	5,06 Angka 94 Angka 21,5 %	200,000,000						5,06 Angka 94 Angka 21,5 %	350,000,000	
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Kasus Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan	%		%	100 %	200,000,000						100 %	350,000,000	
1 02 02 2.02 34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				12 Dokumen	200,000,000	Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Singonegaran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif		12 Dokumen	350,000,000	Dinas Kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						61,098,951,747							26,566,965,556	
1 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%		%	93,5 %	26,566,965,556						93,5 %	26,566,965,556	
1 03 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	%		%	100 %	50,000,000						100 %	50,000,000	
1 03 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				65 Dokumen	25,000,000	Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Banyuwangi	65 Dokumen	25,000,000	Dinas Pekerjaan Umum Pengairan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	25,000,000	Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Banyuwangi	5 Laporan	25,000,000	Dinas Pekerjaan Umum Pengairan	
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	%		%	100 %	18,228,413,883					100 %	18,228,413,883		
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1806 Orang/bulan	18,218,413,883	Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan	Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Banyuwangi	1806 Orang/bulan	18,218,413,883	Dinas Pekerjaan Umum Pengairan	
1.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	10,000,000	Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Banyuwangi	4 Laporan	10,000,000	Dinas Pekerjaan Umum Pengairan	
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi umum perangkat daerah	%		%	100 %	160,000,000					100 %	160,000,000		
1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	5,000,000	Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan	Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Banyuwangi	2 Paket	5,000,000	Dinas Pekerjaan Umum Pengairan	
1.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	5,000,000	Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan	Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Banyuwangi	2 Paket	5,000,000	Dinas Pekerjaan Umum Pengairan	
1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	50,000,000	Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan	Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Banyuwangi	12 Paket	50,000,000	Dinas Pekerjaan Umum Pengairan	
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15 Laporan	100,000,000	Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan	Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Banyuwangi	15 Laporan	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum Pengairan	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	7,999,796,073						100 %	7,999,796,073	
1 03 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	5,000,000	Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan	Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Banyuwangi	4 Laporan	5,000,000	Dinas Pekerjaan Umum Pengairan
1 03 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	369,996,073	Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan	Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Banyuwangi	12 Laporan	369,996,073	Dinas Pekerjaan Umum Pengairan
1 03 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	7,624,800,000	Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan	Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Banyuwangi	12 Laporan	7,624,800,000	Dinas Pekerjaan Umum Pengairan
1 03 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	%		%	100 %	128,755,600						100 %	128,755,600	
1 03 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				57 Unit	128,755,600	Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan	Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Banyuwangi	57 Unit	128,755,600	Dinas Pekerjaan Umum Pengairan
1 03 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)						30,436,795,409							0	
1 03 02 2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						10,546,767,853							0	
1 03 02 2.01 08	Pembangunan Unit Air Baku	Panjang Unit Air Baku yang Dibangun				0 KM	1,225,784,832		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan		0 KM		Dinas Pekerjaan Umum Pengairan
1 03 02 2.01 09	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun				0 KM	7,820,983,021		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan		0 KM		Dinas Pekerjaan Umum Pengairan
1 03 02 2.01 47	Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	Jumlah Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air yang Dibangun				0 Unit	1,500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan		0 Unit		Dinas Pekerjaan Umum Pengairan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 02 2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						19,890,027,556						0		
1 03 02 2.02 02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun				0 KM	16,815,316,039		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan	0 KM	0	Dinas Pekerjaan Umum Pengairan	
1 03 02 2.02 14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				0 KM	1,974,711,517		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan	0 KM	0	Dinas Pekerjaan Umum Pengairan	
1 03 02 2.02 21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				0 KM	1,100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan	0 KM	0	Dinas Pekerjaan Umum Pengairan	
1 03 03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM						4,095,190,782						0		
1 03 03 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota						4,095,190,782						0		
1 03 03 2.01 04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat				0 SR	2,697,840,036		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan	0 SR	0	Dinas Pekerjaan Umum Pengairan	
1 03 03 2.01 06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Panjang SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan				0 0 M	1,397,350,746		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan	0 0 M	0	Dinas Pekerjaan Umum Pengairan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						286,674,157,240						40,184,376,364		
1 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%		%	94 %	40,184,376,364					94 %	40,184,376,364		
1 03 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	%		%	100 %	50,000,000					100 %	50,000,000		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	25,000,000	Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Kabupaten Banyuwangi	1 Dokumen	25,000,000	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman
1.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	25,000,000	Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Kabupaten Banyuwangi	4 Laporan	25,000,000	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	%		%	100 %	12,031,176,937						100 %	12,031,176,937	
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				109 Orang/bulan	12,021,176,937	Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Kabupaten Banyuwangi	109 Orang/bulan	12,021,176,937	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman
1.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	10,000,000	Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Kabupaten Banyuwangi	1 Laporan	10,000,000	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi umum perangkat daerah	%		%	100 %	160,000,000						100 %	160,000,000	
1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				15 Paket	5,000,000	Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Kabupaten Banyuwangi	15 Paket	5,000,000	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman
1.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				30 Paket	5,000,000	Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Kabupaten Banyuwangi	30 Paket	5,000,000	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman
1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	50,000,000	Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Kabupaten Banyuwangi	2 Paket	50,000,000	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
																			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023		Pagu Indikatif	Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif
																														Nasional	Daerah		
1	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				80 Laporan	100,000,000	Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Kabupaten Banyuwangi	80 Laporan	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman														
1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	27,933,199,427						100 %	27,933,199,427															
1	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				300 Laporan	5,000,000	Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Kabupaten Banyuwangi	300 Laporan	5,000,000	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman														
1	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				48 Laporan	23,984,999,427	Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Kabupaten Banyuwangi	48 Laporan	23,984,999,427	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman														
1	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				190 Laporan	3,943,200,000	Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Kabupaten Banyuwangi	190 Laporan	3,943,200,000	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman														
1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	10,000,000						100 %	10,000,000															
1	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				105 Unit	10,000,000	Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Kabupaten Banyuwangi	105 Unit	10,000,000	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman														
1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE						13,673,013,807								0														
1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota						13,673,013,807								0														
1	03	06	2.01	05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun				0 M	11,368,599,251		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan		0 M	0	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman														

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 06 2.01 07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi				0 M	2,304,414,556		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan		0 M	0	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman
1 03 07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Presentase Jalan Lingkungan dalam kondisi baik	%		%	69,1 %	88,318,998,462						69,1 %	0	
1 03 07 2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota						88,318,998,462							0	
1 03 07 2.01 01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				50 Sistem Jaringan	87,318,998,462	Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan	Masyarakat Kabupaten Banyuwangi	50 Sistem Jaringan	0	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman
1 03 07 2.01 02	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dipelihara di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				1 Sistem Jaringan	1,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan	Masyarakat Kabupaten Banyuwangi	1 Sistem Jaringan	0	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman
1 03 08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Presentase Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	%		%	75,2 %	7,700,000,000						75,2 %	0	
1 03 08 2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Presentase Capaian Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian PBG dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	%		%	75 %	7,700,000,000						75 %	0	
1 03 08 2.01 02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota				10 Dokumen	7,700,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan		10 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman
1 03 09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA						10,839,936,401							0	
1 03 09 2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota						10,839,936,401							0	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 09 2.01 03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya				0 Kawasan	7,582,448,938		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan		0 Kawasan	0	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman
1 03 09 2.01 04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya				0 Kawasan	3,257,487,463		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan		0 Kawasan	0	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman
1 03 10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN						124,957,832,206							0	
1 03 10 2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota						124,957,832,206							0	
1 03 10 2.01 05	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun				0 KM	41,516,317,723		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan		0 KM	0	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman
1 03 10 2.01 09	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi				10 KM	69,349,261,260		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan		10 KM	0	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman
1 03 10 2.01 11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin				10 KM	6,599,999,999		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan		10 KM	0	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman
1 03 10 2.01 12	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun				0 M	5,677,132,988		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan		0 M	0	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman
1 03 10 2.01 18	Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi				0 M	1,015,120,236		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan		0 M	0	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman
1 03 10 2.01 19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin				10 M	800,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan		10 M	0	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
1 03 12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG						1,000,000,000							0		
1 03 12 2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota						1,000,000,000							0		
1 03 12 2.01 02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan		1 Dokumen		0	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman	
1 04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						200,000,000							0		
1 04 03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN						200,000,000							0		
1 04 03 2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha						200,000,000							0		
1 04 03 2.03 02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				10 Unit Rumah	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan		10 Unit Rumah		0	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						14,251,335,546							181,000,000		
1 05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%		%	94 %	13,851,335,546					94 %		181,000,000		
1 05 01 2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, panganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kegiatan		Kegiatan	16 Kegiatan	50,000,000					16 Kegiatan		54,000,000		
1 05 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Menjaga Stabilitas Sosial, Keagamaan dan Kerukunan Warga	Satpol PP Kabupaten Banyuwangi	8 Dokumen	27,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja	
1 05 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				8 Laporan	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Menjaga Stabilitas Sosial, Keagamaan dan Kerukunan Warga	Satpol PP Kabupaten Banyuwangi	8 Laporan	27,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja	
1 05 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	%		%	100 %	7,230,336,531					100 %		0		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah bulan pelayanan gaji dan tunjangan				12 bulan	7,220,336,531		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Menjaga Stabilitas Sosial, Keagamaan dan Kerukunan Warga	Satpol PP Kabupaten Banyuwangi	12 bulan	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				4 Laporan	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Menjaga Stabilitas Sosial, Keagamaan dan Kerukunan Warga	Satpol PP Kabupaten Banyuwangi	4 Laporan	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	prosentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	%		%	100 %	1,110,000,000						100 %	0	
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Menjaga Stabilitas Sosial, Keagamaan dan Kerukunan Warga	Satpol PP Kabupaten Banyuwangi	1 Paket	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Menjaga Stabilitas Sosial, Keagamaan dan Kerukunan Warga	Satpol PP Kabupaten Banyuwangi	1 Paket	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan pelayanan Logistik Kantor yang Disediakan				12 bulan	1,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Menjaga Stabilitas Sosial, Keagamaan dan Kerukunan Warga	Satpol PP Kabupaten Banyuwangi	12 bulan	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 bulan	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Menjaga Stabilitas Sosial, Keagamaan dan Kerukunan Warga	Satpol PP Kabupaten Banyuwangi	12 bulan	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%		%	100 %	5,350,999,015						100 %	127,000,000	
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 bulan	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Menjaga Stabilitas Sosial, Keagamaan dan Kerukunan Warga	Satpol PP Kabupaten Banyuwangi	12 bulan	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 bulan	125,999,015		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Menjaga Stabilitas Sosial, Keagamaan dan Kerukunan Warga	Satpol PP Kabupaten Banyuwangi	12 bulan	127,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor				258 orang	5,220,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Menjaga Stabilitas Sosial, Keagamaan dan Kerukunan Warga	Satpol PP Kabupaten Banyuwangi	258 orang	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase barang milik pemerintah daerah yang terpelihara	%		%	100 %	110,000,000						100 %	0	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
1 05 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit	110,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Menjaga Stabilitas Sosial, Keagamaan dan Kerukunan Warga	0	20 Unit	0	Satuan Polisi Pamong Praja	
1 05 02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%		%	100 %	400,000,000						100 %	0		
1 05 02 2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang tertangani	%		%	100 %	250,000,000						100 %	0		
1 05 02 2.01 01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah patroli pengawasan dan pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat				12 bulan	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Menjaga Stabilitas Sosial, Keagamaan dan Kerukunan Warga	SATPOL PP Kab.Banyuwangi	12 bulan	0	Satuan Polisi Pamong Praja	
1 05 02 2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Menurunnya tingkat prosentase pelanggaran peraturan daerah	%		%	5 %	150,000,000						5 %	0		
1 05 02 2.02 02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	jumlah patroli pengawasan dan pemantauan kepatuhan pelaksanaan peraturan daerah				12 bulan	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	SATPOL PP KAB. BANYUWANGI	12 bulan	0	Satuan Polisi Pamong Praja	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							5,029,518,722							4,691,518,722	
1 05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%		%	94 %	3,963,776,819						94 %	3,865,776,819		
1 05 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang disusun	Dokumen		Dokumen	14 Dokumen	10,000,000						14 Dokumen	10,000,000		
1 05 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				14 Laporan	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan	BPBD Kab. Banyuwangi	14 Laporan	10,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1 05 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah yang tepat waktu	%		%	80 %	2,884,211,049						80 %	2,887,211,049		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 05 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				21 Orang/bulan	2,872,211,049		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan	BPBD Kab. Banyuwangi	21 Orang/bulan	2,872,211,049	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	12,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan	BPBD Kab. Banyuwangi	14 Laporan	15,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						5,000,000							0	
1 05 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Dokumen 1 Paket	5,000,000				8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan		1 Dokumen 1 Paket	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan administrasi perkantoran yang tercukupi	Jenis		Jenis	90 Jenis	298,000,000						90 Jenis	285,000,000	
1 05 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan	BPBD Kab. Banyuwangi	3 Paket	5,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan	BPBD Kab. Banyuwangi	4 Paket	50,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan	BPBD Kab. Banyuwangi	3 Paket	5,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	125,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan	BPBD Kab. Banyuwangi	12 Paket	125,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan	BPBD Kab. Banyuwangi	1 Paket	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 05 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	3,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan	BPBD Kab. Banyuwangi	1 Dokumen	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan	BPBD Kab. Banyuwangi	12 Laporan	100,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						9,000,000							0	
1 05 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	2,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Unit	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	6,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan		2 Unit	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa yang dibayarkan	Bulan		Bulan	12 Bulan	523,599,936						12 Bulan	523,599,936	
1 05 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan	BPBD Kab. Banyuwangi	4 Laporan	5,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	94,999,936		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan	BPBD Kab. Banyuwangi	12 Laporan	94,999,936	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	423,600,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan	BPBD Kab. Banyuwangi	12 Laporan	423,600,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit		Unit	85 Unit	233,965,834						85 Unit	159,965,834	
1 05 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				18 Unit	149,965,834		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan	BPBD Kab. Banyuwangi	18 Unit	149,965,834	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan	BPBD Kab. Banyuwangi	30 Unit	10,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 05 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	70,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan	BPBD Kab. Banyuwangi	1 Unit	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	4,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan	BPBD Kab. Banyuwangi	1 Unit	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase penanganan pasca bencana Persentase penanganan tanggap darurat bencana Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	% % %		% % %	45 % 100 % 100 %	1,065,741,903						45 % 100 % 100 %	825,741,903	
1 05 03 2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen		Dokumen	20 Dokumen	60,000,000						20 Dokumen	0	
1 05 03 2.01 01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi				4 Dokumen	60,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan	Masyarakat	4 Dokumen	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03 2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Respon cepat darurat bencana	%		%	80 %	560,741,903						80 %	305,741,903	
1 05 03 2.02 01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi				1 Dokumen	60,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan	Masyarakat	1 Dokumen	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03 2.02 02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana				5 Orang	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan	Masyarakat	5 Orang	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03 2.02 03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota				12 Dokumen	230,741,903		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan	Masyarakat	12 Dokumen	230,741,903	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03 2.02 04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas				3 Unit	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan	Masyarakat	3 Unit	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 05 03 2.02 06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana				1 Kawasan	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan	Masyarakat	1 Kawasan	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03 2.02 08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya				23 Orang	75,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan	Masyarakat	23 Orang	75,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03 2.02 09	Penyusunan Rencana Kontinjensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi				1 Dokumen	60,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan	Masyarakat	1 Dokumen	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03 2.02 10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan				45 Orang	15,000,000				8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan	Masyarakat	45 Orang	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03 2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Aktifitas		Aktifitas	12 Aktifitas	20,000,000						12 Aktifitas	20,000,000	
1 05 03 2.03 04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				100 Orang	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan	Masyarakat	100 Orang	20,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03 2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Dokumen		Dokumen	10 Dokumen	425,000,000						10 Dokumen	500,000,000	
1 05 03 2.04 02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah				2 Dokumen	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan	desa, sekolah, lembaga, dan masyarakat	2 Dokumen	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03 2.04 06	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)				3 Dokumen	375,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan	desa, sekolah, lembaga, dan masyarakat	3 Dokumen	500,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						3,313,675,481							10,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						3,023,675,481						10,000,000		
1 05 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						50,000,000						0		
1 05 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Dokumen	0	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
1 05 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Laporan	0	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
1 05 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2,292,303,531						0		
1 05 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				31 Orang/bulan	2,272,303,531		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			31 Orang/bulan	0	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
1 05 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Laporan	0	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
1 05 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						330,000,000						10,000,000		
1 05 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Paket	0	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
1 05 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	60,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Paket	0	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
1 05 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Paket	0	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
1 05 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Paket	0	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
1 05 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Paket	10,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 05 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Laporan	0	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
1 05 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						319,371,950						0		
1 05 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Laporan	0	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
1 05 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	39,371,950		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12 Laporan	0	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
1 05 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	275,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12 Laporan	0	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
1 05 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						32,000,000						0		
1 05 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	22,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10 Unit	0	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
1 05 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10 Unit	0	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
1 05 04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN						290,000,000						0		
1 05 04 2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota						240,000,000						0		
1 05 04 2.01 01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya				2 Dokumen	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2 Dokumen	0	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 05 04 2.01 02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	140,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Laporan	0	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
1 05 04 2.01 03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran				1 Dokumen	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Dokumen	0	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
1 05 04 2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran						25,000,000						0		
1 05 04 2.02 01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran				1 Dokumen	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Dokumen	0	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
1 05 04 2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran						25,000,000						0		
1 05 04 2.04 01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya				1 Orang	15,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Orang	0	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
1 05 04 2.04 02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya				1 Desa/Kelurahan	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Desa/Kelurahan	0	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						10,207,474,090						9,724,756,212		
1 06 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%	%	94 %	8,097,552,156						94 %	9,004,756,212		
1 06 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	%	%	100 %	50,000,000						100 %	60,000,000		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 06 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Perlindungan Perempuan, Anak, Difabel dan Kelompok Marginal	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	6 Dokumen	30,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
1 06 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				10 Laporan	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Perlindungan Perempuan, Anak, Difabel dan Kelompok Marginal	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	10 Laporan	30,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
1 06 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	%		%	100 %	6,392,040,548						100 %	7,031,244,604	
1 06 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	6,392,040,548		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Perlindungan Perempuan, Anak, Difabel dan Kelompok Marginal	ASN Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	35 Orang/bulan	7,031,244,604	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
1 06 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi umum perangkat daerah	%		%	100 %	360,000,000						100 %	570,000,000	
1 06 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				20 Paket	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Perlindungan Perempuan, Anak, Difabel dan Kelompok Marginal	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	20 Paket	10,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
1 06 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				20 Paket	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Perlindungan Perempuan, Anak, Difabel dan Kelompok Marginal	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	20 Paket	10,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
1 06 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				25 Paket	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Perlindungan Perempuan, Anak, Difabel dan Kelompok Marginal	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	25 Paket	350,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
1 06 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Perlindungan Perempuan, Anak, Difabel dan Kelompok Marginal	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	50 Laporan	200,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
1 06 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	1,046,122,696						100 %	1,075,122,696	
1 06 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				100 Laporan	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Perlindungan Perempuan, Anak, Difabel dan Kelompok Marginal	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	100 Laporan	10,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				30 Laporan	180,122,696		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Perlindungan Perempuan, Anak, Difabel dan Kelompok Marginal	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	30 Laporan	200,122,696	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				48 Laporan	861,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Perlindungan Perempuan, Anak, Difabel dan Kelompok Marginal	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	48 Laporan	865,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	249,388,912						100 %	268,388,912	
1.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				8 Unit	249,388,912		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Perlindungan Perempuan, Anak, Difabel dan Kelompok Marginal	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	8 Unit	268,388,912	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Peningkatan kapasitas bagi PSKS	%		%	83 %	709,800,000						83 %	720,000,000	
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten	%		%	100 %	709,800,000						100 %	720,000,000	
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				236 Orang	559,800,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Perlindungan Perempuan, Anak, Difabel dan Kelompok Marginal	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	236 Orang	570,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Orang	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Perlindungan Perempuan, Anak, Difabel dan Kelompok Marginal	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	25 Orang	150,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang tertangani	%		%	37 %	463,620,630						37 %	0	
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Cakupan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial	%		%	100 %	438,620,880						100 %	0	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Orang	290,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Menjaga Stabilitas Sosial, Keagamaan dan Kerukunan Warga	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis	25 Orang	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	68,620,880		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Menjaga Stabilitas Sosial, Keagamaan dan Kerukunan Warga	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis	10 Orang	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Orang	80,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Menjaga Stabilitas Sosial, Keagamaan dan Kerukunan Warga	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis	25 Orang	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantii Sosial	Cakupan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar pantii sosial	%		%	100 %	24,999,750						100 %	0	
1.06.04.2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				15 Orang	24,999,750		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Menjaga Stabilitas Sosial, Keagamaan dan Kerukunan Warga	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis	15 Orang	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Pelayanan Perlindungan dan jaminan sosial	%		%	11,9 %	573,000,000						11,9 %	0	
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah	%		%	100 %	573,000,000						100 %	0	
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				35 Keluarga	573,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Menjaga Stabilitas Sosial, Keagamaan dan Kerukunan Warga	Masyarakat	35 Keluarga	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 06 06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%		%	92 %	363,501,304						92 %	0	
1 06 06 2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Cakupan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial	%		%	100 %	27,501,304						100 %	0	
1 06 06 2.01 04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	27,501,304		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Menjaga Stabilitas Sosial, Keagamaan dan Kerukunan Warga	Korban bencana dan masyarakat kelompok rentan	20 Orang	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
1 06 06 2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana	%		%	100 %	336,000,000						100 %	0	
1 06 06 2.02 02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				35 Orang	336,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Menjaga Stabilitas Sosial, Keagamaan dan Kerukunan Warga	Anggota TAGANA	35 Orang	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2 08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						562,000,000							0	
2 08 02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN						400,000,000							0	
2 08 02 2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota						100,000,000							0	
2 08 02 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Dokumen	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Perlindungan Perempuan, Anak, Difabel dan Kelompok Marginal		0 Dokumen	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 08 02 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	%		%	100 %	300,000,000						100 %	0	
2 08 02 2.03 03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia				5 Dokumen	300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Menjaga Stabilitas Sosial, Keagamaan dan Kerukunan Warga	Organisasi Masyarakat, Kelompok Masyarakat, dan Masyarakat	5 Dokumen	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
2 08 03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Presentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan	%		%	80 %	162,000,000						80 %	0	
2 08 03 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah	%		%	100 %	162,000,000						100 %	0	
2 08 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				25 Orang	162,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Menjaga Stabilitas Sosial, Keagamaan dan Kerukunan Warga	Perempuan korban kekerasan	25 Orang	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2 07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					5,888,990,539					2,042,830,700			
2 07 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%		%	85 %	4,993,990,539						85 %	1,292,830,700	
2 07 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	dokumen		dokumen	10 dokumen	50,000,000						10 dokumen	50,000,000	
2 07 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	25,000,000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian	10 Dokumen	25,000,000	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.07.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	25,000,000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pemulihan Ekonomi Akibat Covid-19 dan Pembukaan Lapangan Kerja	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian	12 Laporan	25,000,000	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan administrasi keuangan	dokumen		dokumen	12 dokumen	3,671,159,839						12 dokumen	0	
2.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				372 Orang/bulan	3,671,159,839		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Pemulihan Ekonomi Akibat Covid-19 dan Pembukaan Lapangan Kerja	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian	372 Orang/bulan	0	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi umum	dokumen		dokumen	12 dokumen	190,000,000						12 dokumen	160,000,000	
2.07.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5,000,000					Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian	1 Paket	5,000,000	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian
2.07.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Pemulihan Ekonomi Akibat Covid-19 dan Pembukaan Lapangan Kerja	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian	2 Paket	0	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian
2.07.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	5,000,000					Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian	1 Paket	5,000,000	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian
2.07.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	50,000,000					Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian	2 Paket	50,000,000	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian
2.07.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	100,000,000					Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian	12 Laporan	100,000,000	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	bulan		bulan	12 bulan	1,044,200,000						12 bulan	1,044,200,000	
2.07.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	5,000,000					Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian	12 Laporan	5,000,000	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	90,000,000					Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian	12 Laporan	90,000,000	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian
2.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	949,200,000					Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian	12 Laporan	949,200,000	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	unit/tahun		unit/tahun	30 unit/tahun	38,630,700						30 unit/tahun	38,630,700	
2.07.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				10 Unit	38,630,700					Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian	10 Unit	38,630,700	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%		%	1,02 %	125,000,000						1,02 %	100,000,000	
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Cakupan pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	orang		orang	100 orang	100,000,000						100 orang	100,000,000	
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				1750 Orang	100,000,000					Tenaga Kerja	1750 Orang	100,000,000	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Cakupan pelaksanaan pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta	lembaga		lembaga	45 lembaga	25,000,000						45 lembaga	0	
2.07.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina				45 Lembaga	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Pemulihan Ekonomi Akibat Covid-19 dan Pembukaan Lapangan Kerja	Lembaga Pelatihan Kerja	45 Lembaga	0	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%		%	73,47 %	450,000,000						73,47 %	400,000,000	
2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan antarkerja di daerah kabupaten/kota	orang		orang	3000 orang	150,000,000						3000 orang	150,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 07 04 2.01 02	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL				2500 Orang	150,000,000					Pencari Kerja, Pemberi Kerja	2500 Orang	150,000,000	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian
2 07 04 2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Cakupan pengelolaan informasi pasar kerja	informasi		informasi	1500 informasi	250,000,000						1500 informasi	250,000,000	
2 07 04 2.03 03	Job Fair/Bursa Kerja						250,000,000					Pencari Kerja, Pemberi Kerja		250,000,000	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian
2 07 04 2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan perlindungan PMI (Pra dan purna penempatan) di daerah kab/kota	orang		orang	75 orang	50,000,000						75 orang	0	
2 07 04 2.04 01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya				10 Orang	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2. Pemulihan Ekonomi Akibat Covid-19 dan Pembukaan Lapangan Kerja		CPMI, PMI dan Keluarga PMI	10 Orang	0	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian
2 07 05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%		%	85 %	320,000,000						85 %	250,000,000	
2 07 05 2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	aktivitas		aktivitas	12 aktivitas	150,000,000						12 aktivitas	150,000,000	
2 07 05 2.01 03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				12 Laporan	150,000,000					Perusahaan	12 Laporan	150,000,000	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian
2 07 05 2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	laporan		laporan	50 laporan	170,000,000						50 laporan	100,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif										
										Nasional	Daerah													
2	07	05	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah										40 Perkara	100,000,000	Buruh, Serikat Buruh, Pengusaha	40 Perkara	100,000,000	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian			
2	07	05	2.02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina										1 Lembaga	70,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2. Pemulihan Ekonomi Akibat Covid-19 dan Pembukaan Lapangan Kerja	Buruh, Serikat Buruh, Pengusaha	1 Lembaga	0	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																							
3	31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN															1,445,000,000					100,000,000		
3	31	02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			Persentase cakupan pengembangan sentra industri Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK Persentase pertumbuhan nilai produksi industri kecil menengah	% % %	% % %	75 % 80 % 1,26 %													75 % 80 % 1,26 %	0	
3	31	02	2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			Cakupan penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri kab/kota	ikm		ikm	120 ikm	1,345,000,000										120 ikm	0	
3	31	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri					1 Dokumen	100,000,000										1 Dokumen	0	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian
3	31	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri					12 Dokumen	1,045,000,000										12 Dokumen	0	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian
3	31	02	2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri					2 Dokumen	50,000,000										2 Dokumen	0	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian
3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat					4 Dokumen	100,000,000										4 Dokumen	0	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 31 02 2.01 06	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri				2 Dokumen	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Pemulihan Ekonomi Akibat Covid-19 dan Pembukaan Lapangan Kerja	IKM	2 Dokumen	0	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian
3 31 04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase informasi industri dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	%		%	0,50 %	100,000,000						0,50 %	100,000,000	
3 31 04 2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan penyediaan informasi industri untuk informasi industri untuk IUI, IPUL, UIKI, dan IPKI kewenangan kabupaten	aktivitas		aktivitas	52 aktivitas	100,000,000						52 aktivitas	100,000,000	
3 31 04 2.01 01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				1 Dokumen	100,000,000					IKM	1 Dokumen	100,000,000	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2 09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						723,357,344							400,000,000	
2 09 03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT						325,000,000							0	
2 09 03 2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi						325,000,000							0	
2 09 03 2.04 02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				0 Laporan	325,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata		0 Laporan	0	Dinas Pertanian dan Pangan
2 09 04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase daerah rentan rawan pangan	%		%	13 %	398,357,344						13 %	400,000,000	
2 09 04 2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Dalam Mendukung Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten	Aktivitas		Aktivitas	1 Aktivitas	398,357,344						1 Aktivitas	400,000,000	
2 09 04 2.02 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota				5 Laporan	398,357,344		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata	ASN dan NON ASN di Kabupaten Banyuwangi	5 Laporan	400,000,000	Dinas Pertanian dan Pangan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif					
										Nasional					Daerah			
3						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN												
3	27						49,339,540,390						30,238,000,000					
3	27	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%	%	90 %	29,404,515,390			90 %	30,138,000,000			
3	27	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun	dokumen	dokumen	5 dokumen	25,000,000			5 dokumen	30,000,000			
3	27	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			2 Laporan	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata	ASN dan NON ASN di Dinas Pertanian dan Pangan	2 Laporan	30,000,000	Dinas Pertanian dan Pangan
3	27	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan	dokumen	dokumen	2 dokumen	26,403,319,430				2 dokumen	27,000,000,000		
3	27	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			1920 Orang/bulan	26,403,319,430				ASN dan NON ASN di Dinas Pertanian dan Pangan	1920 Orang/bulan	27,000,000,000	Dinas Pertanian dan Pangan
3	27	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Aktivitas Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan	aktivitas	aktivitas	8 aktivitas	160,000,000					8 aktivitas	222,000,000	
3	27	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			40 Paket	5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata	ASN dan NON ASN di Dinas Pertanian dan Pangan	40 Paket	6,000,000	Dinas Pertanian dan Pangan
3	27	01	2.06	03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			40 Paket	5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata	ASN dan NON ASN di Dinas Pertanian dan Pangan	40 Paket	6,000,000	Dinas Pertanian dan Pangan
3	27	01	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			2 Paket	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata	ASN dan NON ASN di Dinas Pertanian dan Pangan	2 Paket	60,000,000	Dinas Pertanian dan Pangan
3	27	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			100 Laporan	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata	ASN dan NON ASN di Dinas Pertanian dan Pangan	100 Laporan	150,000,000	Dinas Pertanian dan Pangan
3	27	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	Kegiatan	Kegiatan	4 Kegiatan	2,766,390,960					4 Kegiatan	2,836,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 27 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				500 Laporan	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata	ASN dan NON ASN di Dinas Pertanian dan Pangan	500 Laporan	6,000,000	Dinas Pertanian dan Pangan
3 27 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	319,990,960		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata	ASN dan NON ASN di Dinas Pertanian dan Pangan	4 Laporan	330,000,000	Dinas Pertanian dan Pangan
3 27 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	2,441,400,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata	ASN dan NON ASN di Dinas Pertanian dan Pangan	4 Laporan	2,500,000,000	Dinas Pertanian dan Pangan
3 27 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dipelihara	Kegiatan		Kegiatan	5 Kegiatan	49,805,000						5 Kegiatan	50,000,000	
3 27 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	19,905,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata	ASN dan NON ASN di Dinas Pertanian dan Pangan	2 Unit	20,000,000	Dinas Pertanian dan Pangan
3 27 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	29,900,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata	ASN dan NON ASN di Dinas Pertanian dan Pangan	5 Unit	30,000,000	Dinas Pertanian dan Pangan
3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						1,575,000,000							0	
3 27 02 2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota						1,575,000,000							0	
3 27 02 2.02 01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian				0 VUB	425,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata		0 VUB	0	Dinas Pertanian dan Pangan
3 27 02 2.02 02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				0 Dokumen	160,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata		0 Dokumen	0	Dinas Pertanian dan Pangan
3 27 02 2.02 03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				0 Dokumen	990,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata		0 Dokumen	0	Dinas Pertanian dan Pangan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3	27	03					12,746,525,000							0	
3	27	03	2.01				11,975,575,000							0	
3	27	03	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	0 Laporan	11,975,575,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata		0 Laporan	0	Dinas Pertanian dan Pangan
3	27	03	2.02				770,950,000							0	
3	27	03	2.02	03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0 Unit	770,950,000			1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata		0 Unit	0	Dinas Pertanian dan Pangan
3	27	04					150,000,000							100,000,000	
3	27	04	2.01				100,000,000							100,000,000	
3	27	04	2.01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	1 Laporan	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata		1 Laporan	100,000,000	Dinas Pertanian dan Pangan
3	27	04	2.04				50,000,000							0	
3	27	04	2.04	01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	0 Laporan	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata		0 Laporan	0	Dinas Pertanian dan Pangan
3	27	05					1,330,000,000							0	
3	27	05	2.01				1,330,000,000							0	
3	27	05	2.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	0 Ha	1,330,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata		0 Ha	0	Dinas Pertanian dan Pangan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
3	27 07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					4,133,500,000							0		
3	27 07 2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian					4,133,500,000							0		
3	27 07 2.01 02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya			0 Unit	4,133,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata		0 Unit		0	Dinas Pertanian dan Pangan	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						22,266,967,191							0	
2	11 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%	%	100 %	11,841,967,191					100 %		0		
2	11 01 2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Dokumen	Dokumen	9 Dokumen	50,000,000					9 Dokumen		0		
2	11 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			5 Dokumen	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan	DLH Kab. Bwi.	5 Dokumen		0	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			6 Laporan	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan	DLH Kab. Bwi.	6 Laporan		0	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat daerah yang disusun	Dokumen	Dokumen	5 Dokumen	11,119,987,403					5 Dokumen		0		
2	11 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			100 Orang/bulan	11,109,987,403		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	DLH Kab.Bwi.	100 Orang/bulan		0	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			5 Laporan	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	DLH Kab.Bwi.	5 Laporan		0	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jenis layanan administrasi yang dilaksanakan tepat waktu	Jenis	Jenis	7 Jenis	160,000,000					7 Jenis		0		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan	DLH Kab Bwi	10 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Paket	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan	DLH Kab Bwi	10 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan	DLH Kab Bwi	2 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan	DLH Kab Bwi	100 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa penunjang urusa perangkat daerah	Jenis		Jenis	4 Jenis	361,999,788						4 Jenis	0	
2.11.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5000000 Laporan	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan	DLH Kab Bwi	5000000 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				15 Laporan	224,999,788		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan	DLH Kab Bwi	15 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				84 Laporan	132,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan	DLH Kab Bwi	84 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis barang milik daerah penunjang urusan perangkat daerah yang terpelihara	Jenis		Jenis	3 Jenis	149,980,000						3 Jenis	0	
2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				22 Unit	149,980,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan	DLH Kab Bwi	22 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase lingkup perencanaan bidang lingkungan hidup	%		%	40 %	200,000,000						40 %	0	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 11 02 2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Dokumen KLHS yang disusun	Dokumen		Dokumen	8 Dokumen	200,000,000						8 Dokumen	0	
2 11 02 2.02 01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan	DLH Kab.Bwi	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	Indeks Indeks		Indeks Indeks	60,11 Indeks 61.11 Indeks	200,000,000						60,11 Indeks 61.11 Indeks	0	
2 11 03 2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Capaian Indeks Kualitas Lingkungan	Skala		Skala	73.39 Skala	200,000,000						73.39 Skala	0	
2 11 03 2.01 03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan				1 Dokumen	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan	DLH Kab. Bwi	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Lahan Hasil Pengukuran Indeks kualitas Lahan	Indeks Indeks		Indeks Indeks	61.59 Indeks 61,59 Indeks	115,000,000						61.59 Indeks 61,59 Indeks	0	
2 11 04 2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase keanekaragaman hayati	Indeks		Indeks	61.59 Indeks	115,000,000						61.59 Indeks	0	
2 11 04 2.01 04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Ha	15,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan	DLH Kab Bwi	50 Ha	0	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 04 2.01 05	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Ha	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan	DLH Kab Bwi	50 Ha	0	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Jumlah limbah B3 yang dikelola	%		%	40 %	20,000,000						40 %	0	
2 11 05 2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	Persentase penyimpan limbah B3 memenuhi persyaratan	%		%	100 %	20,000,000						100 %	0	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.11.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3				1 Laporan	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan	DLH Kab Bwi	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	%		%	100 %	200,000,000						100 %	0	
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketaatan izin lingkungan IPPLH	%		%	100 %	200,000,000						100 %	0	
2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan	DLH Kab Bwi	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase pemberian penghargaan lingkungan hidup	%		%	40 %	30,000,000						40 %	0	
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jenis Penghargaan Terhadap Pelaku Pelestari Lingkungan Hidup	Jenis		Jenis	3 Jenis	30,000,000						3 Jenis	0	
2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				1 Entitas	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan	DLH Kab Bwi	1 Entitas	0	Dinas Lingkungan Hidup

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 11 11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentasae Pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota Persentase pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	% %		% %	61,12 % 61,12 %	9,660,000,000					61,12 % 61,12 %	0		
2 11 11 2.01	Pengelolaan Sampah	Volume sampah yang ditangani	m3/th		m3/th	86588.95 m3/th	9,660,000,000					86588.95 m3/th	0		
2 11 11 2.01 01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan				1 Dokumen	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan	DLH Kab Bwi	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 11 2.01 04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat				10 Kelompok	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan	DLH Kab Bwi	10 Kelompok	0	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 11 2.01 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada				10 Dokumen	9,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan	DLH Kab Bwi	10 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 11 2.01 07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				15 Unit	400,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan	DLH Kab Bwi	15 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2 12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						11,096,869,295							75,000,000	
2 12 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%		%	94 %	6,688,196,209						94 %	75,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%		%	100 %	50,000,000						100 %	75,000,000	
2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9 Dokumen	25,000,000	Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi	9 Dokumen	75,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	25,000,000	Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi	2 Laporan	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	5,055,087,588						100 %	0	
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				43 Orang/bulan	5,045,087,588	Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi	43 Orang/bulan	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				16 Laporan	10,000,000	Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi	16 Laporan	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat daerah	%		%	100 %	160,000,000						100 %	0	
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				18 Paket	5,000,000	Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi	18 Paket	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Paket	5,000,000	Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi	10 Paket	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	50,000,000	Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi	2 Paket		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				33 Laporan	100,000,000	Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi	33 Laporan		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	1,361,068,421						100 %		0
2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	5,000,000	Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi	12 Laporan		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	217,168,421	Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi	4 Laporan		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	1,138,900,000	Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi	2 Laporan		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	62,040,200						100 %		0
2.12.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	22,118,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi	1 Unit		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan kendaraan Operasional yang dilaksanakan				4 Unit	39,921,700	Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi	4 Unit		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
2	12	02				99,4 % 100 %	3,418,417,381						99,4 % 100 %	0					
2	12	02	2.01			45 % 92 % 99.4 %	3,418,417,381						45 % 92 % 99.4 %	0					
2	12	02	2.01	02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting				47862 Dokumen	3,268,417,381	Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Kabupaten Banyuwangi	47862 Dokumen	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	02	2.01	05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan				388841 Dokumen	150,000,000	Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Kabupaten Banyuwangi	388841 Dokumen	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	03					443,439,400									0			
2	12	03	2.01				443,439,400									0			
2	12	03	2.01	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting				47862 Dokumen	149,998,200	Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi		47862 Dokumen	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	03	2.01	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				4 Layanan	149,999,200	Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi		4 Layanan	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	03	2.01	05	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia				1 Paket	143,442,000	Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi		1 Paket	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	04					546,816,305									0			
2	12	04	2.03				252,395,812									0			

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
2.12.04.2.03.03	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				2 Laporan	103,861,746	Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi		2 Laporan	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.04.2.03.04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan				2 Dokumen	148,534,066	Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi		2 Dokumen	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						294,420,493							0		
2.12.04.2.04.01	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				4 Laporan	294,420,493	Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi		4 Laporan	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							15,604,058,179							17,037,464,035	
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%		%	94 %	4,024,339,445						94 %	4,486,773,429		
2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%		%	95 %	50,000,000						95 %	115,000,000		
2.13.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi	6 Dokumen	27,500,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2.13.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi	12 Laporan	87,500,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	93.5 %	3,456,541,221						93.5 %	3,802,195,343		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				27 Orang/bulan	3,456,541,221		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	27 Orang/bulan	3,802,195,343	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	%		%	87 %	160,000,000						87 %	176,000,000	
2.13.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi	8 Paket	5,500,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				15 Paket	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi	15 Paket	5,500,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi	2 Paket	55,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				75 Laporan	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi	75 Laporan	110,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	87 %	317,798,624						87 %	349,578,486	
2.13.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi	1 Laporan	1,650,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	114,998,624		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi	1 Laporan	126,498,486	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						201,300,000					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi		221,430,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 13 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeuan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	87 %	39,999,600						87 %	43,999,600	
2 13 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	19,999,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi	1 Unit	21,999,600	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi	8 Unit	22,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA						11,142,297,158							12,069,526,873	
2 13 04 2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa						11,142,297,158							12,069,526,873	
2 13 04 2.01 01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				1 Dokumen	3,472,297,158		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi		1 Dokumen	3,654,526,873	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 04 2.01 08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				0 Dokumen	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi		0 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 04 2.01 09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa				1 Laporan	7,650,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi		1 Laporan	8,415,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT						437,421,576							481,163,733	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 13 05 2.01	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota						437,421,576						481,163,733		
2 13 05 2.01 09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				1 Dokumen	437,421,576		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Percepatan Pengurangan Kemiskinan	1 Dokumen	481,163,733	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2 15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						19,517,655,872							0	
2 15 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%		%	94 %	10,358,112,972							94 %	0
2 15 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	%		%	100 %	28,152,637							100 %	0
2 15 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang disusun				1 Dokumen	13,741,248		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	0	1 Dokumen	0 Dinas Perhubungan	
2 15 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah koordinasi kegiatan dan dokumen yang disusun				1 Dokumen	14,411,389		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	0	1 Dokumen	0 Dinas Perhubungan	
2 15 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	%		%	100 %	8,393,670,731							100 %	0
2 15 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				72 Orang/bulan	8,383,670,731		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	0	72 Orang/bulan	0 Dinas Perhubungan	
2 15 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	0	1 Laporan	0 Dinas Perhubungan	
2 15 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi umum perangkat daerah	%		%	100 %	160,000,000							100 %	0

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				1 Jenis	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	0	1 Jenis	0	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan				28 Unit	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	0	28 Unit	0	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik BBM dan Mamin Rapat yang disediakan				12 Bulan	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	0	12 Bulan	0	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya dana dalam rapat konsultasi dan koordinasi SKPD				12 Bulan	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	0	12 Bulan	0	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	1,601,489,604						100 %	0	
2.15.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terselenggaranya jumlah jasa pelayanan surat menyurat yang disediakan				12 Bulan	4,990,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	0	12 Bulan	0	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jumlah dana untuk jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 Bulan	303,499,604		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	0	12 Bulan	0	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jumlah dana untuk jasa pelayanan umum kantor yang disediakan				12 Bulan	1,293,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	0	12 Bulan	0	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	174,800,000						100 %	0	
2.15.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	0	6 Unit	0	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit	124,800,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	0	20 Unit	0	Dinas Perhubungan
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kinerja lalu lintas Kabupaten/Kota Persentase layanan angkutan darat	% %		% %	100 % 100 %	9,139,542,900						100 % 100 %	0	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif							
															Nasional	Daerah										
2	15	02	2.02			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																	0			
2	15	02	2.02	02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Unit	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	0		1 Unit		0	Dinas Perhubungan				
2	15	02	2.02	04		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				1 Unit	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	0		1 Unit		0	Dinas Perhubungan				
2	15	02	2.05			Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		0		
2	15	02	2.05	04		Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				10.727 Dokumen	294,992,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	0		10.727 Dokumen		0	Dinas Perhubungan				
2	15	02	2.05	07		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				1 Unit	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	0		1 Unit		0	Dinas Perhubungan				
2	15	02	2.06			Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																			0	
2	15	02	2.06	04		Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				12 Laporan	7,344,550,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	0		12 Laporan		0	Dinas Perhubungan				
2	15	02	2.07			Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota																			0	
2	15	02	2.07	01		Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan				1 Dokumen	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi			1 Dokumen		0	Dinas Perhubungan				
2	15	02	2.08			Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan																			0	
2	15	02	2.08	04		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota				1 Laporan	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi			1 Laporan		0	Dinas Perhubungan				

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
2 15 02 2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						1,000,000,000							0		
2 15 02 2.09 01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Unit	1,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	0	1 Unit	0	Dinas Perhubungan	
2 15 05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Persentase layanan angkutan Perkretapiian	%		%	100 %	20,000,000						100 %	0		
2 15 05 2.01	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Persentase Sosialisasi Kebijakan Perkeretaapian	%		%	100 %	20,000,000						100 %	0		
2 15 05 2.01 02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian				1 Dokumen	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	0	1 Dokumen	0	Dinas Perhubungan	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2 16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						22,256,529,182							627,528,000		
2 16 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%		%	93 %	6,682,611,562							93 %	77,528,000	
2 16 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen		Dokumen	14 Dokumen	45,800,000							14 Dokumen	26,500,000	
2 16 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	22,900,000	Kab. Banyuwangi, Giri, Mojopanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	8 Dokumen	1,500,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
2 16 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				21 Laporan	22,900,000	Kab. Banyuwangi, Giri, Mojopanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	21 Laporan	25,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
2 16 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang Disusun	Dokumen		Dokumen	15 Dokumen	3,609,389,639							15 Dokumen	3,160,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				408 Orang/bulan	3,599,729,639	Kab. Banyuwangi, Giri, Mojopanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	408 Orang/bulan	0	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2.16.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	3,160,000				9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	1 Laporan	3,160,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2.16.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				36 Laporan	6,500,000	Kab. Banyuwangi, Giri, Mojopanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	36 Laporan	0	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						9,000,000							9,000,000	
2.16.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi		10 Orang	5,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2.16.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				20 Orang	4,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi		20 Orang	4,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi yang dilaksanakan tepat waktu	Layanan		Layanan	8 Layanan	158,868,000						8 Layanan	8,868,000	
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5,000,000	Kab. Banyuwangi, Giri, Mojopanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	1 Paket	0	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2.16.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	5,000,000	Kab. Banyuwangi, Giri, Mojopanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	1 Paket	0	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				24 Paket	40,000,000	Kab. Banyuwangi, Giri, Mojopanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	24 Paket	0	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1,980,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	1 Paket	1,980,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 16 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1,888,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	1 Dokumen	1,888,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2 16 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	1 Laporan	5,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2 16 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				350 Laporan	100,000,000	Kab. Banyuwangi, Giri, Mojopanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	350 Laporan	0	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2 16 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						5,000,000							5,000,000	
2 16 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi		5 Unit	5,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2 16 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang disediakan	Jenis		Jenis	3 Jenis	2,687,291,923						3 Jenis	0	
2 16 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	5,000,000	Kab. Banyuwangi, Giri, Mojopanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	1 Laporan	0	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2 16 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	433,691,923	Kab. Banyuwangi, Giri, Mojopanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	12 Laporan	0	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2 16 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	2,248,600,000	Kab. Banyuwangi, Giri, Mojopanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	12 Laporan	0	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2 16 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah yang dipelihara	Jenis		Jenis	6 Jenis	167,262,000						6 Jenis	25,000,000	
2 16 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	15,755,000	Kab. Banyuwangi, Giri, Mojopanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	1 Unit	0	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 Unit	116,507,000	Kab. Banyuwangi, Giri, Mojopanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	14 Unit	0	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2.16.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				5 Unit	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	5 Unit	5,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				80 Unit	10,000,000	Kab. Banyuwangi, Giri, Mojopanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	80 Unit	0	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	1 Unit	10,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2.16.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	1 Unit	10,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik Pemerintah Daerah	%		%	85,6 %	10,136,246,977						85,6 %	0	
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan yang disebarluaskan	Informasi		Informasi	330 Informas	10,136,246,977						330 Informas	0	
2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik				25 Dokumen	500,900,000	Kab. Banyuwangi, Giri, Mojopanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Banyuwangi	25 Dokumen	0	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik				20 Dokumen	7,638,920,977	Kab. Banyuwangi, Giri, Mojopanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Banyuwangi	20 Dokumen	0	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 16 02 2.01 06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik				75 Dokumen	82,455,000	Kab. Banyuwangi, Giri, Mojopanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Banyuwangi	75 Dokumen	0	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2 16 02 2.01 07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media				10 Layanan	460,370,000	Kab. Banyuwangi, Giri, Mojopanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Banyuwangi	10 Layanan	0	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2 16 02 2.01 10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya				50 Orang	233,101,000	Kab. Banyuwangi, Giri, Mojopanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Banyuwangi	50 Orang	0	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2 16 02 2.01 13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				15 Unit	1,220,500,000	Kab. Banyuwangi, Giri, Mojopanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Banyuwangi	15 Unit	0	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2 16 03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%		%	100 %	5,437,670,643						100 %	550,000,000	
2 16 03 2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Domain		Domain	5 Domain	3,167,740,643						5 Domain	0	
2 16 03 2.01 01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota				50 Domain	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	50 Domain	0	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2 16 03 2.01 02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	1 Dokumen	0	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2 16 03 2.01 03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah				4 Unit	3,017,740,643		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	4 Unit	0	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
2 16 03 2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah yang Dikelola	Kegiatan		Kegiatan	10 Kegiatan	2,269,930,000						10 Kegiatan	550,000,000		
2 16 03 2.02 01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	1 Dokumen		0	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2 16 03 2.02 03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola				1 Unit	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	1 Unit	200,000,000		Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2 16 03 2.02 04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah				1 Dokumen	169,930,000	Kab. Banyuwangi, Giri, Mojopanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	1 Dokumen		0	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2 16 03 2.02 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi				1 Dokumen	800,000,000	Kab. Banyuwangi, Giri, Mojopanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	1 Dokumen		0	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2 16 03 2.02 06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik				55 Perangkat Daerah	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	55 Perangkat Daerah		0	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2 16 03 2.02 07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan				4 Unit	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	4 Unit		0	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2 16 03 2.02 08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah				1 Layanan	300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	1 Layanan	300,000,000		Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2 16 03 2.02 09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City				1 Dokumen	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	1 Dokumen	50,000,000		Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2 16 03 2.02 10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah				2 Dokumen	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	2 Dokumen		0	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 16 03 2.02 12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE				3 Dokumen	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	3 Dokumen	0	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2 20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						540,000,000						1,140,000,000		
2 20 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	% %		% %	100 % 100 %	540,000,000						100 % 100 %	1,140,000,000	
2 20 02 2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Statistik Sektoral di Lingkup Daerah yang dikumpulkan, diolah dan dipublikasikan	Kegiatan		Kegiatan	4 Kegiatan	540,000,000						4 Kegiatan	1,140,000,000	
2 20 02 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral				2 Dokumen	365,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi	2 Dokumen	600,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2 20 02 2.01 02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi				5 Orang	85,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi	5 Orang	450,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2 20 02 2.01 03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun				1 Dokumen	60,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi	1 Dokumen	60,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2 20 02 2.01 04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS				10 Orang	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi	10 Orang	30,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2 21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						310,000,000						210,000,000		
2 21 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%		%	100 %	310,000,000						100 %	210,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 21 02 2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aktivitas pengamanan dan informasi elektronik	Aktivitas		Aktivitas	3 Aktivitas	260,000,000						3 Aktivitas	160,000,000	
2 21 02 2.01 02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	0	1 Laporan	100,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2 21 02 2.01 03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berkas Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berkas Elektronik dan Non Elektronik				0 Laporan	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan	0	0 Laporan	0	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2 21 02 2.01 04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi				53 Perangkat Daerah	60,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	0	53 Perangkat Daerah	60,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2 21 02 2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota						50,000,000							50,000,000	
2 21 02 2.02 01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi				53 Perangkat Daerah	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi		53 Perangkat Daerah	50,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2 17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						23,238,655,442							16,533,655,442	
2 17 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%		%	92 %	12,633,655,442						92 %	14,433,655,442	
2 17 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	%		%	100 %	50,000,000						100 %	50,000,000	
2 17 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	5 Dokumen	25,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
2 17 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	6 Laporan	25,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 17 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	%		%	100 %	7,658,432,415						100 %	7,658,432,415	
2 17 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				910 Orang/bulan	7,648,432,415		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	910 Orang/bulan	7,648,432,415	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
2 17 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	12 Laporan	10,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
2 17 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						855,000,000							2,655,000,000	
2 17 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata		1 Paket	5,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
2 17 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata		1 Paket	200,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
2 17 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata		1 Paket	200,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
2 17 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata		1 Paket	2,000,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
2 17 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata		1 Paket	50,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
2 17 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata		100 Laporan	200,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
2 17 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						200,000,000							200,000,000	
2 17 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				44 Unit	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata		44 Unit	200,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 17 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						3,453,799,927						3,453,799,927		
2 17 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata	1 Laporan	5,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	
2 17 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	449,999,927		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata	12 Laporan	449,999,927	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	
2 17 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	2,998,800,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata	12 Laporan	2,998,800,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	
2 17 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						416,423,100						416,423,100		
2 17 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				29 Unit	136,603,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata	29 Unit	136,603,100	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	
2 17 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				16 Unit	29,820,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata	16 Unit	29,820,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	
2 17 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata	1 Unit	200,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	
2 17 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				40 Unit	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata	40 Unit	50,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	
2 17 03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI						50,000,000						50,000,000		
2 17 03 2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota						50,000,000						50,000,000		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 17 03 2.01 01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota				868 Unit Usaha	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata	868 Unit Usaha	50,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	
2 17 04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI						50,000,000						50,000,000		
2 17 04 2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						50,000,000						50,000,000		
2 17 04 2.01 01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan				140 Unit Usaha	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata	140 Unit Usaha	50,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	
2 17 06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI						50,000,000						50,000,000		
2 17 06 2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota						50,000,000						50,000,000		
2 17 06 2.01 01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pemberdayaan				100 koperasi	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata	100 koperasi	50,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	
2 17 07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)						2,765,000,000						450,000,000		
2 17 07 2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan						2,765,000,000						450,000,000		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
2	17	07	2.01	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro				1 Dokumen	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata		1 Dokumen	200,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
2	17	07	2.01	02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Difasilitasi Kemitraan				100 usaha mikro	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata		100 usaha mikro	50,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
2	17	07	2.01	03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan				200 Unit Usaha	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata		200 Unit Usaha	200,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
2	17	07	2.01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				1 Unit Usaha	2,315,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Pemulihan Ekonomi Akibat Covid-19 dan Pembukaan Lapangan Kerja		1 Unit Usaha	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM						7,690,000,000							1,500,000,000	
2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil						7,690,000,000							1,500,000,000	
2	17	08	2.01	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi				200 Unit Usaha	7,690,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata		200 Unit Usaha	1,500,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						3,650,000,000							650,000,000	
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN						3,250,000,000							250,000,000	
3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan						3,200,000,000							200,000,000	
3	30	03	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				1 Unit	3,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Pemulihan Ekonomi Akibat Covid-19 dan Pembukaan Lapangan Kerja		1 Unit	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
3	30	03	2.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				22 Unit	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata		22 Unit	200,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya						50,000,000							50,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 30 03 2.02 01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan yang Dibina				21 pengelola	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata		21 pengelola	50,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
3 30 04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING						200,000,000							200,000,000	
3 30 04 2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota						50,000,000							50,000,000	
3 30 04 2.01 03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah aktivitas Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				1440 aktivitas	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata		1440 aktivitas	50,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
3 30 04 2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota						150,000,000							150,000,000	
3 30 04 2.02 02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				5475 Laporan	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata		5475 Laporan	100,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
3 30 04 2.02 03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				30 Laporan	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata		30 Laporan	50,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
3 30 06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN						200,000,000							200,000,000	
3 30 06 2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan						200,000,000							200,000,000	
3 30 06 2.01 01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				13000 Unit	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata		13000 Unit	200,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2 18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							6,485,977,903						7,765,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 18 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%		%	96 %	5,591,977,903						96 %	6,665,000,000	
2 18 01 2.01	Perencanaan, Penggabungan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen	50,000,000						6 Dokumen	60,000,000	
2 18 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi	2 Dokumen	30,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi	4 Laporan	30,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang Disusun	Laporan		Laporan	12 Laporan	3,257,542,883						12 Laporan	3,330,000,000	
2 18 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				12 Bulan	3,232,542,883		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi	12 Bulan	3,300,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi	14 Laporan	30,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Waktu Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	1,510,000,000						12 Bulan	2,065,000,000	
2 18 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi	5 Paket	30,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.18.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi	5 Paket	35,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang				12 Bulan	1,400,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi	12 Bulan	1,800,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Waktu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Bulan	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi	12 Bulan	200,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	764,435,020						3 Dokumen	910,000,000	
2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Bulan	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi	12 Bulan	10,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 Bulan	251,235,020		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi	12 Bulan	300,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				12 Bulan	508,200,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi	12 Bulan	600,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	10,000,000						3 Dokumen	300,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 18 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				4 Bulan	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi	4 Bulan	300,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Prosentase Penetapan dan Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal	%		%	7 %	50,000,000						7 %	100,000,000	
2 18 02 2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	50,000,000						2 Dokumen	100,000,000	
2 18 02 2.02 02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota				1 Dokumen	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi	1 Dokumen	100,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan minat investasi	%		%	4.5 %	50,000,000						4.5 %	100,000,000	
2 18 03 2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Bulan		Bulan	3 Bulan	50,000,000						3 Bulan	100,000,000	
2 18 03 2.01 02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				2 Dokumen	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi	2 Dokumen	100,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai dengan SOP	%		%	95,5 %	794,000,000						95,5 %	900,000,000	
2 18 04 2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Perizinan dan Non Perizinan yang Diterbitkan sesuai dengan SOP	Dokumen		Dokumen	6450 Dokumen	794,000,000						6450 Dokumen	900,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Waktu Penyediaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu				12 Bulan	794,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi	12 Bulan	900,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						10,856,368,956						1,000,000,000		
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%		%	94 %	4,150,531,393						94 %	0	
2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	%		%	100 %	50,000,000						100 %	0	
2.19.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul	Dinas Pemuda dan Olahraga	8 Dokumen	0	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul	Dinas Pemuda dan Olahraga	5 Laporan	0	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	2,907,180,893						100 %	0	
2.19.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Orang/bulan	2,907,180,893		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi	23 Orang/bulan	0	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	160,000,000						100 %	0	
2.19.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul	Dinas Pemuda dan Olahraga	1 Paket	0	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul	Dinas Pemuda dan Olahraga	1 Paket	0	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul	Dinas Pemuda dan Olahraga	1 Paket	0	Dinas Pemuda dan Olahraga

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 19 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul	Dinas Pemuda dan Olahraga	12 Laporan	0	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	973,398,600						100 %	0	
2 19 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul	Dinas Pemuda dan Olahraga	1 Laporan	0	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	299,998,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul	Dinas Pemuda dan Olahraga	12 Laporan	0	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	668,400,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul	Dinas Pemuda dan Olahraga	12 Laporan	0	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	59,951,900						100 %	0	
2 19 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	49,951,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul	Dinas Pemuda dan Olahraga	4 Unit	0	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul	Dinas Pemuda dan Olahraga	2 Unit	0	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pengembangan kapasitas daya Saing Kepemudaan	%		%	0.58 %	1,298,044,557						0.58 %	0	
2 19 02 2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah pemuda yang diberdayakan dan dikembangkan	Orang		Orang	2000 Orang	1,173,044,557						2000 Orang	0	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 19 02 2.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				2000 Orang	474,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul	Pemuda usia 16-30 tahun	2000 Orang	0	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 02 2.01 08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan				0 Orang	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul	Pemuda usia 16-30 tahun	0 Orang	0	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 02 2.01 09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan				73 Orang	499,044,557		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul	Pemuda usia 16-30 tahun	73 Orang	0	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 02 2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						125,000,000							0	
2 19 02 2.02 02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan				0 Dokumen	125,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul		0 Dokumen	0	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Cakupan Pembinaan Olahraga	%		%	10 %	5,157,793,006						10 %	1,000,000,000	
2 19 03 2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah event OR prestasi tingkat	even		even	4 even	497,793,006						4 even	0	
2 19 03 2.02 01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				4 Dokumen	497,793,006		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul	0	4 Dokumen	0	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 03 2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Presentase Atlet yang berprestasi di tingkat Provinsi	%		%	10 %	110,000,000						10 %	0	
2 19 03 2.03 03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan				250 Orang	110,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul	0	250 Orang	0	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 03 2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah organisasi olahraga yang dibina	Cabor		Cabor	33 Cabor	3,550,000,000						33 Cabor	0	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
2 19 03 2.04 03	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	3,550,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul	Organisasi keolahragaan	1 Dokumen	0	Dinas Pemuda dan Olahraga	
2 19 03 2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah event OR Rekreasi yang diselenggarakan	even		even	5 even	1,000,000,000						5 even	1,000,000,000		
2 19 03 2.05 01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi				5 Dokumen	1,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul	0	5 Dokumen	1,000,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga	
2 19 04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN						250,000,000							0		
2 19 04 2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan						250,000,000							0		
2 19 04 2.01 08	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan				25 Organisasi	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul		25 Organisasi	0	Dinas Pemuda dan Olahraga	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2 22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							7,049,868,055							0	
2 22 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						5,701,870,055							0		
2 22 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						25,000,000							0		
2 22 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata		1 Dokumen	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
2 22 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3,753,601,655							0		
2 22 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Orang/Bulan	3,753,601,655		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata 1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata		23 Orang/Bulan	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
2 22 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						160,000,000							0		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.22.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata	1 Paket	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
2.22.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata	1 Paket	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
2.22.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata	1 Paket	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
2.22.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				48 Laporan	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata	48 Laporan	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1,723,319,000						0		
2.22.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				50 laporan	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata	50 laporan	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
2.22.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				20 Laporan	299,919,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata	20 Laporan	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
2.22.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				74 Laporan	1,418,400,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata	74 Laporan	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						39,949,400						0		
2.22.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	19,975,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata	1 Unit	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
2.22.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	19,974,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata	2 Unit	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase budaya lokal (ritual adat dan tradisi) yang dikembangkan menjadi atraksi	%		%	70,58 %	330,000,000					70,58 %	0		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 22 02 2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	330,000,000						1 Kegiatan	0	
2 22 02 2.01 01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan				0 Objek	330,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata	0	0 Objek	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2 22 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	%		%	1,04 %	879,398,000						1,04 %	0	
2 22 03 2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pembinaan Kesenian	Kegiatan		Kegiatan	2 Kegiatan	879,398,000						2 Kegiatan	0	
2 22 03 2.01 03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Lembaga	879,398,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata	0	1 Lembaga	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2 22 05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Terlestarikannya Cagar Budaya	%		%	23,44 %	138,600,000						23,44 %	0	
2 22 05 2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan pengelolaan Cagar Budaya	Kegiatan		Kegiatan	2 Kegiatan	138,600,000						2 Kegiatan	0	
2 22 05 2.02 01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi				1 Objek	45,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata	0	1 Objek	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2 22 05 2.02 02	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan				312 Objek	93,600,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata	0	312 Objek	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3 26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						1,306,089,079							0	
3 26 02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA						231,000,000							0	
3 26 02 2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota						31,000,000							0	
3 26 02 2.02 06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				0 Laporan	31,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata		0 Laporan	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab										
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif											
										Nasional	Daerah														
3	26	02	2.03														0								
3	26	02	2.03	04	Pengadaan/Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara				0 Unit	200,000,000							0 Unit	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata					
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	% %			% %	5,2 % 1,15 %	799,089,079						5,2 % 1,15 %	0						
3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Pemasaran Pariwisata dalam dan luar negeri				Kegiatan								3 Kegiatan	0						
3	26	03	2.01	01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri					1 Dokumen	699,096,779						0	1 Dokumen	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata				
3	26	03	2.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri					1 Laporan	99,992,300						0	1 Laporan	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata				
3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pelaku pariwisata dan ekraf yang bersertifikat kompetensi	%			%	4 %	276,000,000						4 %	0						
3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				Kegiatan								5 Kegiatan	0						
3	26	05	2.01	06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif					1 Orang	276,000,000						0	1 Orang	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN									4,426,278,255										4,420,888,367	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 23 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						4,210,369,874						4,420,888,367		
2 23 01 2.01	Perencanaan, Penggabungan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						50,000,000						60,900,000		
2 23 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	25,000,000	Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Panganjuran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul	5 Dokumen	30,450,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2 23 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				15 Laporan	25,000,000	Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Panganjuran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul	15 Laporan	30,450,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2 23 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3,397,389,109						3,567,258,564		
2 23 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	3,397,389,109	Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Panganjuran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul	25 Orang/bulan	3,567,258,564	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2 23 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						160,000,000						162,750,000		
2 23 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				518 Unit	5,000,000	Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Panganjuran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul	518 Unit	5,250,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2 23 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan				903 buah	5,000,000	Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Panganjuran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul	903 buah	5,250,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2 23 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Bulan	50,000,000	Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Panganjuran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul	12 Bulan	52,500,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2 23 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				13 Aktivitas	100,000,000	Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Panganjuran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul	13 Aktivitas	99,750,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2 23 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						556,998,865						581,698,808		
2 23 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat				300 Buah	5,000,000	Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Panganjuran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul	300 Buah	2,100,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.23.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan				12 Bulan	179,998,865	Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Penganjuran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul		12 Bulan	188,998,808	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan				18 OB	372,000,000	Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Penganjuran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul		18 OB	390,600,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						45,981,900							48,280,995	
2.23.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara				9 Unit	45,981,900	Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Penganjuran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul		9 Unit	48,280,995	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indeks pembangunan literasi masyarakat Indeks tingkat kegemaran membaca masyarakat	Indeks Indeks		Indeks Indeks	59 Indeks 8,6 Indeks	175,000,000						59 Indeks 8,6 Indeks	0	
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Perpustakaan yang dibina	%		%	37.2 %	75,000,000						37.2 %	0	
2.23.02.2.01.03	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				0 Eksemplar	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul	0	0 Eksemplar	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				1 Perpustakaan	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul	0	1 Perpustakaan	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				1 Eksemplar	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul	0	1 Eksemplar	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Perpustakaan yang dibina	%		%	23.2 %	100,000,000						23.2 %	0	
2.23.02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan				1 Lokus	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul	0	1 Lokus	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 23 03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan	Jumlah		Jumlah	1 Jumlah	40,908,381					1 Jumlah	0		
2 23 03 2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Naskah Kuno Milik Daerah yang di lestarikan	Naskah		Naskah	1 Naskah	40,908,381					1 Naskah	0		
2 23 03 2.01 01	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno				1 Orang	25,908,381		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul	0	1 Orang	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 03 2.01 02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan				1 Eksemplar	15,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul	0	1 Eksemplar	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						15,000,000						16,500,000		
2 24 02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%		%	93 %	15,000,000						93 %	16,500,000	
2 24 02 2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Arsip yang di kelola	%		%	95 %	15,000,000						95 %	16,500,000	
2 24 02 2.01 02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Arsip Dinamis Yang Dipelihara Dan Disusutkan				300 Berkas	15,000,000	Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Panganjuran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul	0	300 Berkas	16,500,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3 25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						7,708,634,866						9,961,242,388		
3 25 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						4,310,073,471							4,761,242,388	
3 25 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						50,000,000							60,000,000	
3 25 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen 2 Dokumen	25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata		0 Dokumen 2 Dokumen	30,000,000	Dinas Perikanan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 25 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata	2 Laporan	30,000,000	Dinas Perikanan	
3 25 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3,413,151,083						3,520,000,000		
3 25 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				308 Orang/bulan	3,403,151,083		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata	308 Orang/bulan	3,500,000,000	Dinas Perikanan	
3 25 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata	1 Laporan	20,000,000	Dinas Perikanan	
3 25 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						160,000,000						460,000,000		
3 25 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata	1 Paket	20,000,000	Dinas Perikanan	
3 25 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata	1 Paket	20,000,000	Dinas Perikanan	
3 25 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata	3 Paket	120,000,000	Dinas Perikanan	
3 25 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata	50 Laporan	300,000,000	Dinas Perikanan	
3 25 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						619,642,388						641,242,388		
3 25 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	101,242,388		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata	12 Laporan	111,242,388	Dinas Perikanan	
3 25 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	518,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata	12 Laporan	530,000,000	Dinas Perikanan	
3 25 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						67,280,000						80,000,000		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
3	25 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			22 Unit	67,280,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata	22 Unit	80,000,000	Dinas Perikanan	
3	25 03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					1,310,000,000						2,550,000,000		
3	25 03 2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota					245,000,000						850,000,000		
3	25 03 2.01 01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia			4 Dokumen	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata	4 Dokumen	50,000,000	Dinas Perikanan	
3	25 03 2.01 02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia			1 Unit	40,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata	1 Unit	500,000,000	Dinas Perikanan	
3	25 03 2.01 03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia			10 Unit	195,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata	10 Unit	300,000,000	Dinas Perikanan	
3	25 03 2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota					965,000,000						1,300,000,000		
3	25 03 2.02 01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya			100 Orang	815,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata	100 Orang	1,000,000,000	Dinas Perikanan	
3	25 03 2.02 03	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha			20 Kelompok 4 Unit Usaha	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata	20 Kelompok 4 Unit Usaha	300,000,000	Dinas Perikanan	
3	25 03 2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)					100,000,000						400,000,000		
3	25 03 2.03 02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)			5 Layanan	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata	5 Layanan	400,000,000	Dinas Perikanan	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
3	25	04					1,888,561,395						2,150,000,000		
3	25	04	2.02				1,688,561,395						1,800,000,000		
3	25	04	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	20 Kelompok	469,885,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata		20 Kelompok	800,000,000	Dinas Perikanan	
3	25	04	2.02	03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	10 Kelompok 10 Kelompok	769,106,395	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata		10 Kelompok 10 Kelompok	500,000,000	Dinas Perikanan	
3	25	04	2.02	04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	20 Kelompok	449,570,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata		20 Kelompok	500,000,000	Dinas Perikanan	
3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan			200,000,000					350,000,000		
3	25	04	2.04	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata		2 Unit	200,000,000	Dinas Perikanan	
3	25	04	2.04	04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	12 Dokumen	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata		12 Dokumen	150,000,000	Dinas Perikanan	
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			200,000,000					500,000,000		
3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota			200,000,000					500,000,000		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 25 06 2.03 01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2 Ton	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata		2 Ton	500,000,000	Dinas Perikanan
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2 10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN														
2 10 05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase fasilitasi sengketa dan konflik pertanahan	%		%	100 %	2,725,000,000						100 %	2,500,000,000	
2 10 05 2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kabupaten	%		%	100 %	2,725,000,000						100 %	2,500,000,000	
2 10 05 2.01 01	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah				0 Dokumen	225,000,000				5. Menjaga Stabilitas Sosial, Keagamaan dan Kerukunan Warga	Masyarakat Banyuwangi	0 Dokumen		0 Sekretariat Daerah
2 10 05 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	2,500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Banyuwangi	1 Dokumen	2,500,000,000	Sekretariat Daerah
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4 01	SEKRETARIAT DAERAH														
4 01 02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						400,000,000							400,000,000	
4 01 02 2.01	Administrasi Tata Pemerintahan						300,000,000							300,000,000	
4 01 02 2.01 01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				4 Dokumen	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi		4 Dokumen	100,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 02 2.01 02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				4 Dokumen	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi		4 Dokumen	100,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 02 2.01 03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				4 Dokumen	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi		4 Dokumen	100,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 02 2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah						100,000,000							100,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 02 2.04 01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				4 Dokumen	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi		4 Dokumen	50,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 02 2.04 03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				4 Laporan	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi		4 Laporan	50,000,000	Sekretariat Daerah
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4 01	SEKRETARIAT DAERAH						12,861,999,657							8,729,390,000	
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realiasi penyediaan kebutuhan sarana dan prasara perkantoran	%		%	86 %	12,861,999,657						86 %	8,729,390,000	
4 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah Persentase pelaksanaan kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah	% %		% %	100 % 100 %	150,000,000						100 % 100 %	100,000,000	
4 01 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				4 Dokumen	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah	4 Dokumen	50,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah	4 Laporan	50,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah	1 Laporan	0	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						50,000,000							50,000,000	
4 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi		1 Paket	50,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi umum perangkat daerah Persentase pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum	% %		% %	100 % 100 %	1,385,000,000						100 % 100 %	535,000,000	
4 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah	0 Paket	100,000,000	Sekretariat Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah	1 Paket	100,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah	0 Paket	100,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	1,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah	0 Paket	100,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah	1 Paket	50,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				4 Dokumen	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah	4 Dokumen	50,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah	1 Paket	25,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah	4 Laporan	10,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						225,000,000							225,000,000	
4 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi		1 Unit	25,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi		5 Unit	100,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi		5 Unit	100,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang	% %		% %	100 % 100 %	5,119,891,857						100 % 100 %	4,269,400,000	
4 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah	0 Laporan	100,000,000	Sekretariat Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	1,350,491,857		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah	0 Laporan	1,500,000,000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	750,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah	1 Laporan	0	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	2,969,400,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah	1 Laporan	2,669,400,000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	% %		% %	100 % 100 %	3,274,990,000						100 % 100 %	3,299,990,000	
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit	2,099,990,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah	0 Unit	2,099,990,000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				5 Unit	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah	5 Unit	0	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah	5 Unit	150,000,000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah	1 Unit	50,000,000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	1,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah	4 Unit	1,000,000,000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah	1 Unit	0	Sekretariat Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Cakupan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah Persentase pelaksanaan kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional KDH/WKDH	% %		% %	100 % 100 %	349,985,200					100 % 100 %	0		
4 01 01 2.11 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				1 Paket	199,985,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kepala Daerah dan Wakil Daerah	1 Paket	0	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.11 03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				10 Orang	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kepala Daerah dan Wakil Daerah	10 Orang	0	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.12	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Cakupan fasilitasi kerumahtanggaan sekretariat daerah Persentase pelaksanaan kegiatan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	% %		% %	100 % 100 %	2,307,132,600						100 % 100 %	250,000,000	
4 01 01 2.12 01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	1,733,875,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah	12 Paket	0	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.12 02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	323,257,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah	12 Paket	0	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.12 03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				12 Paket	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah	12 Paket	250,000,000	Sekretariat Daerah
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4 01	SEKRETARIAT DAERAH						3,000,000,000							0	
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan kedinasan pimpinan dan pelayanan tamu tepat waktu	%		%	75 %	3,000,000,000						75 %	0	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
4 01 01 2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Cakupan pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan Persentase pelaksanaan kegiatan keprotokolan dan komunikasi pimpinan	% %		% %	100 % 100 %	3,000,000,000						100 % 100 %	0		
4 01 01 2.14 01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				1 Laporan	1,000,000,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Pimpinan dan Tamu Pemkab Banyuwangi	1 Laporan	0	Sekretariat Daerah	
4 01 01 2.14 02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				1 Laporan	1,000,000,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Pimpinan dan Tamu Pemkab Banyuwangi	1 Laporan	0	Sekretariat Daerah	
4 01 01 2.14 03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				1 Laporan	1,000,000,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Pimpinan dan Tamu Pemkab Banyuwangi	1 Laporan	0	Sekretariat Daerah	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
4 01	SEKRETARIAT DAERAH						43,495,000,000							25,000,000		
4 01 02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase penyelesaian pengajuan administrasi kesejahteraan rakyat yang tepat dan akurat	%		%	82 %	43,495,000,000							82 %	25,000,000	
4 01 02 2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Cakupan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat Persentase pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	% %		% %	100 % 100 %	43,495,000,000							100 % 100 %	25,000,000	
4 01 02 2.02 01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				1 Dokumen	42,945,000,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Kabupaten Banyuwangi	1 Dokumen	0	Sekretariat Daerah	
4 01 02 2.02 02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				1 Dokumen	525,000,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Kabupaten Banyuwangi	1 Dokumen	0	Sekretariat Daerah	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
4 01 02 2.02 03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				4 Dokumen	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Kabupaten Banyuwangi	4 Dokumen	25,000,000	Sekretariat Daerah	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
4 01	SEKRETARIAT DAERAH						400,000,000							500,000,000		
4 01 02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase bantuan hukum untuk masyarakat miskin yang difasilitasi	%		%	85 %	400,000,000							85 %	500,000,000	
4 01 02 2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Cakupan fasilitasi dan koordinasi hukum	%		%	100 %	400,000,000							100 %	500,000,000	
4 01 02 2.03 01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				1 Dokumen	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Miskin Kabupaten Banyuwangi	1 Dokumen	200,000,000	Sekretariat Daerah	
4 01 02 2.03 02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				1 Kasus	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Miskin Kabupaten Banyuwangi	1 Kasus	200,000,000	Sekretariat Daerah	
4 01 02 2.03 03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				4 Dokumen	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Miskin Kabupaten Banyuwangi	4 Dokumen	100,000,000	Sekretariat Daerah	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
4 01	SEKRETARIAT DAERAH						450,000,000							450,000,000		
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						450,000,000							450,000,000		
4 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						25,000,000							25,000,000		
4 01 01 2.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai						25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi			25,000,000	Sekretariat Daerah	
4 01 01 2.13	Penataan Organisasi						425,000,000							425,000,000		
4 01 01 2.13 01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				1 Dokumen	125,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi		1 Dokumen	125,000,000	Sekretariat Daerah	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 2.13 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				4 Laporan	75,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	4 Laporan	75,000,000	Sekretariat Daerah	
4 01 01 2.13 03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				4 Dokumen	75,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	4 Dokumen	75,000,000	Sekretariat Daerah	
4 01 01 2.13 04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				4 Dokumen	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	4 Dokumen	150,000,000	Sekretariat Daerah	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4 01	SEKRETARIAT DAERAH						475,000,000						275,000,000		
4 01 03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN						475,000,000						275,000,000		
4 01 03 2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian						425,000,000						225,000,000		
4 01 03 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				4 Dokumen	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	4 Dokumen	100,000,000	Sekretariat Daerah	
4 01 03 2.01 02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				4 Laporan	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	4 Laporan	0	Sekretariat Daerah	
4 01 03 2.01 03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				4 Dokumen	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	4 Dokumen	100,000,000	Sekretariat Daerah	
4 01 03 2.01 05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD				4 Dokumen	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	4 Dokumen	25,000,000	Sekretariat Daerah	
4 01 03 2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan						50,000,000						50,000,000		
4 01 03 2.02 02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				4 Laporan	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	4 Laporan	50,000,000	Sekretariat Daerah	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4 01	SEKRETARIAT DAERAH						26,281,313,391						26,492,382,321		
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Sekretariat Daerah	Nilai	Nilai	90,5 Nilai	26,281,313,391						90,5 Nilai	26,492,382,321	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah Persentase pelaksanaan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	% %		% %	100 % 100 %	50,000,000					100 % 100 %	200,000,000		
4 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah	4 Dokumen	100,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah	5 Laporan	100,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah Persentase pelaksanaan kegiatan Administrasi Keuangan	% %		% %	100 % 100 %	24,232,382,321						100 % 100 %	23,892,382,321	
4 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bulan	23,792,382,321		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah	0 Orang/bulan	23,792,382,321	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah	1 Laporan	100,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	340,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah	12 Laporan	0	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi umum perangkat daerah Persentase pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum	% %		% %	100 % 100 %	1,200,000,000						100 % 100 %	1,600,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	1,200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah	0 Laporan	1,600,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Cakupan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah Persentase pelaksanaan kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional KDH/WKDH	% %		% %	100 % 100 %	798,931,070						100 % 100 %	800,000,000	
4 01 01 2.11 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				0 Orang/Bulan	198,931,070		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0 Orang/Bulan	200,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.11 04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				0 Orang/Bulan	600,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0 Orang/Bulan	600,000,000	Sekretariat Daerah
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4 01	SEKRETARIAT DAERAH						750,000,000							250,000,000	
4 01 03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	% Penayangan SIRUP Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	% %		% %	55 % 75 %	750,000,000						55 % 75 %	250,000,000	
4 01 03 2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Cakupan pengelolaan pengadaan barang dan jasa Persentase pengelolaan pengadaan barang dan jasa	% %		% %	100 % 100 %	750,000,000						100 % 100 %	250,000,000	
4 01 03 2.03 01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				1 Dokumen	500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	SKPD Kabupaten Banyuwangi	1 Dokumen		0 Sekretariat Daerah
4 01 03 2.03 02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				4 Dokumen	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	SKPD Kabupaten Banyuwangi	4 Dokumen	150,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 03 2.03 03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				50 Orang	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	SKPD Kabupaten Banyuwangi	50 Orang	100,000,000	Sekretariat Daerah
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023

Table with columns: Kode, Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan, Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan, Target Akhir Periode RPJMD, Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021, Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022, Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan (Target 2023, Pagu Indikatif, Lokasi, Sumber Dana, Prioritas Nasional/ Daerah), Kelompok Sasaran, Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 (Target, Pagu Indikatif), and Perangkat Daerah Penanggung Jawab.

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 02 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				20 Orang	649,928,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat DPRD	20 Orang	0	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi umum perangkat daerah	%		%	100 %	2,400,350,700						100 %	547,985,900	
4 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	197,998,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat DPRD	4 Paket	197,998,500	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	461,449,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat DPRD	1 Paket	0	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	362,165,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat DPRD	1 Paket	0	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	349,987,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat DPRD	12 Paket	349,987,400	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	199,622,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat DPRD	1 Paket	0	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Laporan	335,361,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat DPRD	1 Laporan	0	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	493,766,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat DPRD	1 Laporan	0	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang ur.Pemda	%		%	100 %	469,209,100						100 %	0	
4 02 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	89,050,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat DPRD	10 Unit	0	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat DPRD	1 Unit	0	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	180,159,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat DPRD	1 Unit	0	Sekretariat DPRD

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	1,225,968,475					100 %	1,274,839,999		
4	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				21 Laporan	2,040,000			9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat DPRD	21 Laporan	2,040,000	Sekretariat DPRD	
4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	376,128,475			9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat DPRD	36 Laporan	499,999,999	Sekretariat DPRD	
4	02	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	75,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat DPRD	1 Laporan	0	Sekretariat DPRD	
4	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	772,800,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat DPRD	12 Laporan	772,800,000	Sekretariat DPRD	
4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang ur.Pemda	%		%	100 %	1,075,432,600					100 %	154,950,000		
4	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				243 Unit	154,950,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat DPRD	243 Unit	154,950,000	Sekretariat DPRD	
4	02	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				1 Unit	70,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat DPRD	1 Unit	0	Sekretariat DPRD	
4	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	299,979,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat DPRD	1 Unit	0	Sekretariat DPRD	
4	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	400,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat DPRD	1 Unit	0	Sekretariat DPRD	
4	02	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	150,503,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat DPRD	1 Unit	0	Sekretariat DPRD	
4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Cakupan layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	%		%	100 %	32,835,765,860					100 %	32,635,765,860		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 02 01 2.15 01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				700 Orang/Bulan	32,635,765,860		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat DPRD	700 Orang/Bulan	32,635,765,860	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.15 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				1 Paket	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat DPRD	1 Paket	0	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.16	Layanan Administrasi DPRD	Cakupan layanan administrasi DPRD	%		%	100 %	238,342,800						100 %	0	
4 02 01 2.16 02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD				1 Laporan	178,342,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat DPRD	1 Laporan	0	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.16 03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				1 Laporan	60,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat DPRD	1 Laporan	0	Sekretariat DPRD
4 02 02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Presentase aspirasi yang ditindaklanjuti Presentase raperda yang disahkan menjadi perda sesuai propemperda	% %		% %	88 % 81 %	27,895,821,394						88 % 81 %	13,525,530,905	
4 02 02 2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah raperda peraturan yang disahkan	Raperda		Raperda	10 Raperda	6,070,602,519						10 Raperda	6,057,272,619	
4 02 02 2.01 01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				8 Dokumen	1,274,695,119	Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat DPRD	8 Dokumen	1,374,695,119	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.01 02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				8 Dokumen	4,219,124,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat DPRD	8 Dokumen	4,319,124,400	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.01 03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				0 Dokumen	173,329,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sekretariat DPRD	0 Dokumen	0	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.01 04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				5 Dokumen	353,453,100				9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat DPRD	5 Dokumen	363,453,100	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.01 05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun				0 Dokumen	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat DPRD	0 Dokumen	0	Sekretariat DPRD

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 02 02 2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah raperda anggaran yang disahkan	Raperda		Raperda	3 Raperda	895,547,237						3 Raperda	1,233,338,886	
4 02 02 2.02 01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				9 Dokumen	205,274,055		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat DPRD	9 Dokumen	225,274,055	Sekretariat DPRD	
4 02 02 2.02 02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				9 Dokumen	283,744,081		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Sekretariat DPRD	9 Dokumen	293,744,081	Sekretariat DPRD	
4 02 02 2.02 03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				6 Dokumen	12,493,805	Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat DPRD	6 Dokumen	258,450,250	Sekretariat DPRD	
4 02 02 2.02 04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				6 Dokumen	83,870,405		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat DPRD	6 Dokumen	105,870,500	Sekretariat DPRD	
4 02 02 2.02 06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				9 Dokumen	310,164,891		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat DPRD	9 Dokumen	350,000,000	Sekretariat DPRD	
4 02 02 2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah laporan hasil pengawasan	Notulensi		Notulensi	124 Notulensi	7,174,403,962					124 Notulensi	0		
4 02 02 2.03 01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				1 Laporan	1,686,897,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat DPRD	1 Laporan	0	Sekretariat DPRD	
4 02 02 2.03 02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				1 Laporan	1,686,136,262			9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat DPRD	1 Laporan	0	Sekretariat DPRD	
4 02 02 2.03 03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				1 Laporan	1,686,897,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat DPRD	1 Laporan	0	Sekretariat DPRD	
4 02 02 2.03 04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				1 Laporan	1,686,897,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat DPRD	1 Laporan	0	Sekretariat DPRD	
4 02 02 2.03 08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				1 Dokumen	427,575,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	0	Sekretariat DPRD	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 02 02 2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Pimpinan & anggota DPRD yg ikut bimtek	OK		OK	200 OK	6,107,309,874						200 OK	2,965,721,200	
4 02 02 2.04 02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				250 Dokumen	2,396,817,883		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat DPRD	250 Dokumen	2,397,800,000	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.04 03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan				1 Dokumen	2,299,999,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	0	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.04 04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				531 Orang	268,880,820		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat DPRD	531 Orang	269,999,900	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.04 05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				96 Orang	296,651,771		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat DPRD	96 Orang	297,921,300	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.04 06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				1 Dokumen	660,553,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	0	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.04 07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				1 Dokumen	184,406,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	0	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah aspirasi masyarakat	aspirasi		aspirasi	1400 aspirasi	3,005,887,600						1400 aspirasi	2,969,198,200	
4 02 02 2.05 01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				1 Laporan	36,689,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat DPRD	1 Laporan	0	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.05 03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				150 Dokumen	2,969,198,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat DPRD	150 Dokumen	2,969,198,200	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah laporan pengawasan kode etik	laporan		laporan	10 laporan	403,643,800						10 laporan	0	
4 02 02 2.06 01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD				0 Dokumen	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sekretariat DPRD	0 Dokumen	0	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.06 02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD				1 Laporan	353,643,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat DPRD	1 Laporan	0	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Jumlah Aplikasi bahan komunikasi dan publikasi	Apilikasi		Apilikasi	1 Apilikasi	100,000,000						1 Apilikasi	0	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif								
										Nasional	Daerah											
4	02	02	2.07	02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun					1 Dokumen	100,000,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	0	Sekretariat DPRD		
4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah laporan tugas DPRD	Laporan			Laporan	136 Laporan	4,138,426,402							136 Laporan	300,000,000		
4	02	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD					1 Dokumen	2,702,476,602			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	0	Sekretariat DPRD		
4	02	02	2.08	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun					1 Laporan	50,000,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat DPRD	1 Laporan	0	Sekretariat DPRD		
4	02	02	2.08	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah					1 Dokumen	1,086,035,800			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	0	Sekretariat DPRD		
4	02	02	2.08	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD					10 Dokumen	299,914,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat DPRD	10 Dokumen	300,000,000	Sekretariat DPRD		
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
5	01				PERENCANAAN						13,267,982,296										8,218,099,304	
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%			%	94 %	7,837,982,296								94 %	7,788,099,304	
5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen			Dokumen	10 Dokumen	195,400,339								10 Dokumen	0	
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2 Dokumen	132,715,300			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Kabupaten Banyuwangi	2 Dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Website				0 Laporan 6 Laporan 1 Website	62,685,039		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Kabupaten Banyuwangi	0 Laporan 6 Laporan 1 Website	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	%		%	100 %	5,762,482,953						100 %	6,000,000,000	
5 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				41 Orang/bulan	5,762,482,953		PENDAPATAN TRANSFER		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Kabupaten Banyuwangi	41 Orang/bulan	6,000,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						42,000,000							0	
5 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				60 Orang	42,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi		60 Orang	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	%		%	100 %	1,133,200,000						100 %	1,133,200,000	
5 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Kabupaten Banyuwangi	1 Paket	30,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	65,350,000	Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Kabupaten Banyuwangi	1 Paket	65,350,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	70,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Kabupaten Banyuwangi	1 Paket	70,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	160,000,000	Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Kabupaten Banyuwangi	1 Paket	160,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	35,000,000	Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Kabupaten Banyuwangi	1 Paket	35,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				1 Dokumen	17,850,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Kabupaten Banyuwangi	1 Dokumen	17,850,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	80,000,000	Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Kabupaten Banyuwangi	1 Laporan	80,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 LS	675,000,000	Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Kabupaten Banyuwangi	1 LS	675,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	%		%	100 %	509,899,304						100 %	504,899,304	
5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				500 Laporan	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Kabupaten Banyuwangi	500 Laporan	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Bulan 12 Bulan	149,099,304	Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Kabupaten Banyuwangi	12 Bulan 12 Bulan	149,099,304	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum				240 OB	355,800,000	Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Kabupaten Banyuwangi	240 OB	355,800,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	%		%	100 %	194,999,700						100 %	150,000,000	
5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	44,999,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Kabupaten Banyuwangi	6 Unit	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	35,000,000	Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Kabupaten Banyuwangi	1 Unit	35,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	100,000,000	Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Kabupaten Banyuwangi	1 Unit	100,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 01 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	15,000,000	Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Kabupaten Banyuwangi	1 Unit	15,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%		%	87 %	1,680,000,000						87 %	430,000,000	
5 01 02 2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Aktivitas dan Dokumen perencanaan dan pendanaan	Dok&Akt		Dok&Akt	10 Dok&Akt	1,070,000,000						10 Dok&Akt	0	
5 01 02 2.01 03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				1 Berita Acara	60,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Kabupaten Banyuwangi	1 Berita Acara	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 02 2.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				1 Berita Acara	70,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Kabupaten Banyuwangi	1 Berita Acara	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 02 2.01 05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	130,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Kabupaten Banyuwangi	1 Berita Acara	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 02 2.01 06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan				625 Usulan	90,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Kabupaten Banyuwangi	625 Usulan	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 02 2.01 07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)				2 Dokumen	720,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Kabupaten Banyuwangi	2 Dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 02 2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						180,000,000							0	
5 01 02 2.02 01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				1 Dokumen	180,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi		1 Dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 02 2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Aktivitas dan Dokumen Monev Perangkat Daerah	Dok&Akt		Dok&Akt	14 Dok&Akt	430,000,000						14 Dok&Akt	430,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 01 02 2.03 01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				1 Laporan	180,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Kabupaten Banyuwangi	1 Laporan	180,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 02 2.03 03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				5 Laporan	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Kabupaten Banyuwangi	5 Laporan	250,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rata-rata nilai komponen perencanaan kinerja tahunan pada komponen perencanaan kinerja perangkat daerah lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan	Nilai		Nilai	27,9 Nilai	3,750,000,000						27,9 Nilai	0	
5 01 03 2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Aktivitas dan Dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan pemerintahan dan pembangunan manusia	Dok&Aktv		Dok&Aktv	14 Dok&Aktv	1,250,000,000						14 Dok&Aktv	0	
5 01 03 2.01 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	585,987,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Kabupaten Banyuwangi	3 Dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 03 2.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				1 Laporan	184,839,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Kabupaten Banyuwangi	1 Laporan	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 03 2.01 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	226,548,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Kabupaten Banyuwangi	1 Dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 03 2.01 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	252,625,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Kabupaten Banyuwangi	1 Laporan	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
5 01 03 2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen hasil kordinasi dan Sinkronisasi perencanaan pembangunan perekonomian dan SD	Dok&Akt		Dok&Akt	12 Dok&Akt	1,250,000,000					12 Dok&Akt	0		
5 01 03 2.02 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	75,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Kabupaten Banyuwangi	3 Dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 03 2.02 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				5 Laporan	550,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Kabupaten Banyuwangi	5 Laporan	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 03 2.02 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	75,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Kabupaten Banyuwangi	3 Dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 03 2.02 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA				5 Laporan	550,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Kabupaten Banyuwangi	5 Laporan	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 03 2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Aktivitas dan dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan	Dok&Akt		Dok&Akt	9 Dok&Akt	1,250,000,000						9 Dok&Akt	0	
5 01 03 2.03 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	857,375,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Kabupaten Banyuwangi	3 Dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 03 2.03 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	392,624,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Kabupaten Banyuwangi	3 Dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						770,000,000							820,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 05 02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kelitbangan yang terpilih sebagai bahan perencanaan pembangunan Persentase inovasi yang diterapkan	% %		% %	82 % 82 %	770,000,000					82 % 82 %	820,000,000		
5 05 02 2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah aktivitas dan dokumen hasil penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahabn dan pengkajian peraturan.	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	110,000,000					2 Dokumen	110,000,000		
5 05 02 2.01 02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum				1 Laporan	110,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	0	1 Laporan	110,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 05 02 2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan						110,000,000						110,000,000		
5 05 02 2.02 05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata				1 Dokumen	110,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi		1 Dokumen	110,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 05 02 2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan						110,000,000						110,000,000		
5 05 02 2.03 04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan				1 Dokumen	110,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi		1 Dokumen	110,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 05 02 2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi						440,000,000						490,000,000		
5 05 02 2.04 01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				4 Dokumen	220,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi		4 Dokumen	220,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 05 02 2.04 04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				1 Laporan	220,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi		1 Laporan	270,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5 02	KEUANGAN						459,949,341,899							457,449,341,899	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%		%	94 %	9,927,701,584						94 %	8,127,701,584	
5 02 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	sub kegiatan		sub kegiatan	2 sub kegiatan	114,000,000						2 sub kegiatan	50,000,000	
5 02 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	56,000,000	Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	BPKAD Kab Banyuwangi	7 Dokumen	25,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				7 Laporan	58,000,000	Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	BPKAD Kab Banyuwangi	7 Laporan	25,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	sub kegiatan		sub kegiatan	3 sub kegiatan	5,551,378,734						3 sub kegiatan	5,370,378,734	
5 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				460 Orang/bulan	5,345,378,734	Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	BPKAD Kab Banyuwangi	460 Orang/bulan	5,345,378,734	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	61,000,000	Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	BPKAD Kab Banyuwangi	2 Laporan	15,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				156 Laporan	145,000,000	Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	BPKAD Kab Banyuwangi	156 Laporan	10,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						64,000,000							20,000,000	
5 02 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	15,000,000	Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi		2 Dokumen	10,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	49,000,000	Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi		1 Laporan	10,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						150,000,000							150,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				75 Orang	150,000,000	Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi		75 Orang	150,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi umum perangkat daerah	sub kegiatan		sub kegiatan	8 sub kegiatan	886,609,300						8 sub kegiatan	635,609,300	
5 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	150,000,000	Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	BPKAD Kab. Banyuwangi	1 Paket	100,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	150,000,000	Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	BPKAD Kab. Banyuwangi	1 Paket	100,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	100,000,000	Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	BPKAD Kab. Banyuwangi	1 Paket	5,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	185,609,300	Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	BPKAD Kab. Banyuwangi	1 Paket	185,609,300	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	150,000,000	Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	BPKAD Kab. Banyuwangi	1 Paket	100,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				3075 Dokumen	16,000,000	Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	BPKAD Kab. Banyuwangi	3075 Dokumen	10,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				30 Laporan	35,000,000	Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	BPKAD Kab. Banyuwangi	30 Laporan	35,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				100 Laporan	100,000,000	Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	BPKAD Kab. Banyuwangi	100 Laporan	100,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						200,000,000							200,000,000	
5 02 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	25,000,000	Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi		10 Unit	25,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	125,000,000	Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi		12 Unit	125,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				12 Unit	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi		12 Unit	50,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	sub kegiatan		sub kegiatan	3 sub kegiatan	1,087,003,550						3 sub kegiatan	1,077,003,550	
5 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	15,000,000	Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	BPKAD Kab. Banyuwangi	1 Laporan	5,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	295,003,550	Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	BPKAD Kab. Banyuwangi	1 Laporan	295,003,550	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	777,000,000	Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	BPKAD Kab. Banyuwangi	1 Laporan	777,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	sub kegiatan		sub kegiatan	6 sub kegiatan	1,874,710,000						6 sub kegiatan	624,710,000	
5 02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit	209,710,000	Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	BPKAD Kab. Banyuwangi	12 Unit	209,710,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	25,000,000	Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	BPKAD Kab. Banyuwangi	10 Unit	25,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				212 Unit	75,000,000	Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	BPKAD Kab. Banyuwangi	212 Unit	75,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.09 08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				1 Unit	15,000,000	Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	BPKAD Kab. Banyuwangi	1 Unit	15,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	1,500,000,000	Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	BPKAD Kab. Banyuwangi	5 Unit	250,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	50,000,000	Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	BPKAD Kab. Banyuwangi	2 Unit	50,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase dokumen APBD tepat waktu Persentase dokumen pengelolaan perbendaharaan daerah tepat waktu Persentase Perangkat Daerah yang menyusun laporan tepat waktu	% % %		% % %	100 % 100 % 94 %	446,969,896,415						100 % 100 % 94 %	446,569,896,415	
5 02 02 2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Cakupan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	sub kegiatan		sub kegiatan	10 sub kegiatan	3,842,683,800						10 sub kegiatan	3,842,683,800	
5 02 02 2.01 01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	254,692,300	Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	SKPD se kab banyuwangi	2 Dokumen	254,692,300	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	243,342,500	Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	SKPD se kab banyuwangi	2 Dokumen	243,342,500	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.01 03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				58 Dokumen	97,486,100	Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	SKPD se kab banyuwangi	58 Dokumen	97,486,100	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.01 04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				58 Dokumen	98,136,100	Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	SKPD se kab banyuwangi	58 Dokumen	98,136,100	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.01 05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				58 Dokumen	97,279,200	Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	SKPD se kab banyuwangi	58 Dokumen	97,279,200	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.01 06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				58 Dokumen	113,523,400	Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	SKPD se kab banyuwangi	58 Dokumen	113,523,400	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.01 07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				17 Dokumen	1,695,573,100	Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	SKPD se kab banyuwangi	17 Dokumen	1,695,573,100	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				11 Dokumen	753,957,600	Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	SKPD se kab banyuwangi	11 Dokumen	753,957,600	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				1 Dokumen	133,808,100	Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	SKPD se kab banyuwangi	1 Dokumen	133,808,100	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.01.13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				300 Orang	354,885,400	Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	SKPD se kab banyuwangi	300 Orang	354,885,400	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Cakupan koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah	sub kegiatan		sub kegiatan	8 sub kegiatan	1,651,564,850						8 sub kegiatan	1,451,564,850	
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				30000 Dokumen	458,562,800	Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	SKPD se Kab Banyuwangi	30000 Dokumen	458,562,800	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				812 Dokumen	31,159,000	Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	SKPD se Kab Banyuwangi	812 Dokumen	31,159,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				5 Dokumen	163,700,100	Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	SKPD se Kab Banyuwangi	5 Dokumen	163,700,100	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.02.06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank				1 Dokumen	100,000,000	Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	SKPD se Kab Banyuwangi	1 Dokumen	0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 02 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				1791 Laporan	303,230,600	Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	SKPD se Kab Banyuwangi	1791 Laporan	303,230,600	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.02 09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				14 Dokumen	353,038,050	Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	SKPD se Kab Banyuwangi	14 Dokumen	253,038,050	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.02 10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				1 Dokumen	99,938,500	Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	SKPD se Kab Banyuwangi	1 Dokumen	99,938,500	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.02 11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				58 Orang	141,935,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	SKPD se Kab Banyuwangi	58 Orang	141,935,800	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Cakupan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	sub kegiatan		sub kegiatan	12 sub kegiatan	2,408,657,600						12 sub kegiatan	2,408,657,600	
5 02 02 2.03 01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				12 Laporan	85,898,800	Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Banyuwangi	12 Laporan	85,898,800	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				696 Dokumen	342,714,800	Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Banyuwangi	696 Dokumen	342,714,800	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				754 Laporan	222,579,600	Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Banyuwangi	754 Laporan	222,579,600	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				1 Laporan	253,919,500	Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Banyuwangi	1 Laporan	253,919,500	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				4 Dokumen	479,094,000	Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Banyuwangi	4 Dokumen	479,094,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.03.06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				1 Dokumen	219,914,500	Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Banyuwangi	1 Dokumen	219,914,500	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.03.07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				10 Dokumen	152,422,500	Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Banyuwangi	10 Dokumen	152,422,500	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.02.02.2.03.08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				1 Dokumen	38,999,700	Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Banyuwangi	1 Dokumen	38,999,700	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				1 Dokumen	66,999,800	Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Banyuwangi	1 Dokumen	66,999,800	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah				1 Dokumen	78,000,000	Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Banyuwangi	1 Dokumen	78,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				232 Orang	368,114,400	Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Banyuwangi	232 Orang	368,114,400	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.03.12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina				8 Lembaga	100,000,000	Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Banyuwangi	8 Lembaga	100,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	sub kegiatan		sub kegiatan	3 sub kegiatan	438,778,015,165						3 sub kegiatan	438,778,015,165	
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan						398,584,035,750					SKPD Teknis dan Desa se Kab Banyuwangi		398,584,035,750	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	20,000,000,000	Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	SKPD Teknis dan Desa se Kab Banyuwangi	1 Laporan	20,000,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				1 Laporan	20,193,979,415	Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	SKPD Teknis dan Desa se Kab Banyuwangi	1 Laporan	20,193,979,415	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
5 02 02 2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Cakupan pengelolaan data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah	sub kegiatan		sub kegiatan	1 sub kegiatan	288,975,000						1 sub kegiatan	88,975,000	
5 02 02 2.05 02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				1 Dokumen	288,975,000	Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Banyuwangi	1 Dokumen	88,975,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) tepat waktu	%		%	92,73 %	3,051,743,900						92,73 %	2,751,743,900	
5 02 03 2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah	sub kegiatan		sub kegiatan	12 sub kegiatan	3,051,743,900						12 sub kegiatan	2,751,743,900	
5 02 03 2.01 01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun				4 Dokumen	177,999,600	Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	SKPD se Kab Banyuwangi	4 Dokumen	177,999,600	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 03 2.01 02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	115,049,000	Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	SKPD se Kab Banyuwangi	1 Dokumen	115,049,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 03 2.01 03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	103,466,100	Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	SKPD se Kab Banyuwangi	2 Dokumen	103,466,100	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 03 2.01 06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				1 Laporan	383,628,900	Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	SKPD se Kab Banyuwangi	1 Laporan	383,628,900	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 03 2.01 07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				4517 Laporan	1,200,000,000	Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	SKPD se Kab Banyuwangi	4517 Laporan	1,000,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 03 2.01 08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				4 Laporan	109,043,700	Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	SKPD se Kab Banyuwangi	4 Laporan	109,043,700	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 03 2.01 09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	160,408,300				9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	SKPD se Kab Banyuwangi	1 Laporan	160,408,300	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 03 2.01 10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	240,015,700	Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	SKPD se Kab Banyuwangi	2 Dokumen	240,015,700	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 03 2.01 11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				58 Laporan	292,139,000	Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	SKPD se Kab Banyuwangi	58 Laporan	192,139,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 03 2.01 12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				1 Laporan	119,993,600	Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	SKPD se Kab Banyuwangi	1 Laporan	119,993,600	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 03 2.01 13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				58 Orang	150,000,000	Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Tamanbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	SKPD se Kab Banyuwangi	58 Orang	150,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5 02	KEUANGAN						7,970,366,288							0	
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						7,399,866,288							0	
5 02 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						50,000,000							0	
5 02 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Pemulihan Ekonomi Akibat Covid-19 dan Pembukaan Lapangan Kerja		2 Dokumen	0	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang dilaporkan				12 Laporan	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Pemulihan Ekonomi Akibat Covid-19 dan Pembukaan Lapangan Kerja		12 Laporan	0	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5,525,610,925							0	
5 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				5 Dokumen	5,525,610,925		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pemulihan Ekonomi Akibat Covid-19 dan Pembukaan Lapangan Kerja		5 Dokumen	0	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						160,000,000							0	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Penyediaan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1398 Buah	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Pemulihan Ekonomi Akibat Covid-19 dan Pembukaan Lapangan Kerja		1398 Buah	0	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2440 Buah	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Pemulihan Ekonomi Akibat Covid-19 dan Pembukaan Lapangan Kerja		2440 Buah	0	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Waktu Makanan dan Minuman yang Disediakan Jumlah Waktu Penyediaan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Bulan 12 Bulan	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Pemulihan Ekonomi Akibat Covid-19 dan Pembukaan Lapangan Kerja		12 Bulan 12 Bulan	0	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Waktu Terselenggarakannya rapat koordinasi dan konsultasi				12 Bulan	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Pemulihan Ekonomi Akibat Covid-19 dan Pembukaan Lapangan Kerja		12 Bulan	0	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1,614,779,838							0	
5 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah perangko, materai dan benda pos lainnya yang disediakan				1725 Lembar	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Pemulihan Ekonomi Akibat Covid-19 dan Pembukaan Lapangan Kerja		1725 Lembar	0	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						299,979,838		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Pemulihan Ekonomi Akibat Covid-19 dan Pembukaan Lapangan Kerja			0	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan				624 Orang/Bulan	1,309,800,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Pemulihan Ekonomi Akibat Covid-19 dan Pembukaan Lapangan Kerja		624 Orang/Bulan	0	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						49,475,525							0	
5 02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jasa pemeliharaan, biayapemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan				32 Unit	49,475,525		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Pemulihan Ekonomi Akibat Covid-19 dan Pembukaan Lapangan Kerja		32 Unit	0	Badan Pendapatan Daerah
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						570,500,000							0	
5 02 04 2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						570,500,000							0	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 04 2.01 03	Penyuluhan dan Penyebarnya Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Pajak Daerah Jumlah Kegiatan Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pajak Daerah Jumlah Wajib Pajak yang dapat melakukan SPTPD Online Terlaksananya Pendistribusian SPPT PBB P-2				1 Kegiatan 12 Kegiatan 12 Bulan 460 Wajib Pajak 100 %	570,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Pemulihan Ekonomi Akibat Covid-19 dan Pembukaan Lapangan Kerja		1 Kegiatan 12 Kegiatan 12 Bulan 460 Wajib Pajak 100 %	0	Badan Pendapatan Daerah
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
5 03		KEPEGAWAIAN					22,551,643,651							20,216,643,651	
5 03 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%	%	94 %	20,901,643,651						94 %	20,216,643,651	
5 03 01 2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Kinerja Perangkat Daerah yang Direncanakan, Dianggarkan, dan Dievaluasi	Dokumen	Dokumen	8 Dokumen	50,000,000						8 Dokumen	50,000,000	
5 03 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun				4 dokumen	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan	4 dokumen	25,000,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
5 03 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang disusun				4 dokumen	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan	4 dokumen	25,000,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
5 03 01 2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	dokumen	dokumen	16 dokumen	19,531,210,254						16 dokumen	19,531,210,254	
5 03 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				234 Orang/bulan	19,521,210,254		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Badan Kepegawaian, pendidikan dan pelatihan	234 Orang/bulan	19,521,210,254	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
5 03 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Badan Kepegawaian, pendidikan dan pelatihan	4 Laporan	10,000,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
5 03 01 2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah administrasi umum yang disediakan	jenis	jenis	500 jenis	195,000,000						500 jenis	195,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 03 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Badan Kepegawaian, pendidikan dan pelatihan	1 Paket	5,000,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
5 03 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Badan Kepegawaian, pendidikan dan pelatihan	1 Paket	5,000,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
5 03 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Badan Kepegawaian, pendidikan dan pelatihan	1 Paket	50,000,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
5 03 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Badan Kepegawaian, pendidikan dan pelatihan	1 Paket	25,000,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
5 03 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				10 Dokumen	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Badan Kepegawaian, pendidikan dan pelatihan	10 Dokumen	10,000,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
5 03 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25 Laporan	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Badan Kepegawaian, pendidikan dan pelatihan	25 Laporan	100,000,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
5 03 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						235,000,000							0	
5 03 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	15,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi		1 Unit	0	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
5 03 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi		1 Unit	0	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
5 03 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi		2 Unit	0	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
5 03 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah pemenuhan jasa penunjang pemerintahan	bulan		bulan	12 bulan	363,398,397						12 bulan	363,398,397	
5 03 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	5,000,000				9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan	1 Laporan	5,000,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
5 03 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	169,998,397		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan	12 Laporan	169,998,397	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 03 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	188,400,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan	12 Laporan	188,400,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
5 03 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang milik Daerah yang dipelihara	unit		unit	150 unit	527,035,000						150 unit	77,035,000	
5 03 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	77,035,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	5 Unit	77,035,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
5 03 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	10 Unit	0	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
5 03 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	2 Unit	0	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
5 03 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	2 Unit	0	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
5 03 02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase aparatur yang berkinerja baik Persentase penempatan PNS sesuai dengan analisis jabatan	% %		% %	90 % 85 %	1,650,000,000						90 % 85 %	0	
5 03 02 2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah PNS pemerintah kabupaten banyuwangi	pns		pns	9600 pns	450,000,000						9600 pns	0	
5 03 02 2.01 02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				4 Dokumen	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	0	4 Dokumen	0	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
5 03 02 2.01 03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				10 Dokumen	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	0	10 Dokumen	0	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
5 03 02 2.01 06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				1 Dokumen	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	0	1 Dokumen	0	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 03 02 2.01 08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				1 Lembaga	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	0	1 Lembaga	0	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
5 03 02 2.01 10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				0 Dokumen	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	0	0 Dokumen	0	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
5 03 02 2.02	Mutasi dan Promosi ASN						200,000,000							0	
5 03 02 2.02 01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				10 Dokumen	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi		10 Dokumen	0	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
5 03 02 2.02 02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				10 Dokumen	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi		10 Dokumen	0	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
5 03 02 2.03	Pengembangan Kompetensi ASN						300,000,000							0	
5 03 02 2.03 01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya				100 Orang	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi		100 Orang	0	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
5 03 02 2.03 04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				100 Orang	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi		100 Orang	0	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
5 03 02 2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						700,000,000							0	
5 03 02 2.04 02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Dokumen	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi		1 Dokumen	0	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
5 03 02 2.04 04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				60 Orang	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi		60 Orang	0	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
5 03 02 2.04 07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				90 Orang	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi		90 Orang	0	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
5 03 02 2.04 08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				4 Laporan	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi		4 Laporan	0	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
5 04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						1,130,000,000							50,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 04 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%		%	94 %	50,000,000						94 %	50,000,000	
5 04 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah administrasi umum yang disediakan	jenis		jenis	500 jenis	50,000,000						500 jenis	50,000,000	
5 04 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	50,000,000				9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Badan Kepegawaian, pendidikan dan pelatihan	1 Paket	50,000,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
5 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase peningkatan kualitas SDM Aparatur	%		%	80 %	1,080,000,000						80 %	0	
5 04 02 2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah PNS yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis	asn		asn	120 asn	380,000,000						120 asn	0	
5 04 02 2.01 03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				50 Orang	380,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	ASN Kabupaten Banyuwangi	50 Orang	0	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
5 04 02 2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah PNS yang mengikuti diklat Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	ASN		ASN	500 ASN	700,000,000						500 ASN	0	
5 04 02 2.02 07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				1 Laporan	700,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	ASN Kabupaten Banyuwangi	1 Laporan	0	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN														
6 01	INSPEKTORAT DAERAH						12,704,648,071							16,101,400,000	
6 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%		%	94 %	7,903,462,531						94 %	10,951,400,000	
6 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	dokumen		dokumen	9 dokumen	50,000,000						9 dokumen	100,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	INSPEKTORAT		50,000,000	Inspektorat
6.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	25,000,000	Kab. Banyuwangi, Banyuwangi, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	INSPEKTORAT	4 Laporan	50,000,000	Inspektorat
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						7,356,063,116							10,050,000,000	
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				54 Orang/bulan	7,346,063,116				9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi		54 Orang/bulan	10,000,000,000	Inspektorat
6.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5 Laporan	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi		5 Laporan	50,000,000	Inspektorat
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Belanja Jasa Administrasi	bulan		bulan	12 bulan	160,000,000						12 bulan	350,000,000	
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Inspektorat	1 Paket	25,000,000	Inspektorat
6.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Inspektorat	1 Paket	25,000,000	Inspektorat
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Inspektorat	1 Paket	100,000,000	Inspektorat
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25 Laporan	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Inspektorat	25 Laporan	200,000,000	Inspektorat
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Belanja Jasa Administrasi	bulan		bulan	12 bulan	337,399,415						12 bulan	451,400,000	
6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	inspektorat	1 Laporan	25,000,000	Inspektorat

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
6 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	155,999,415		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	inspektorat	1 Laporan	250,000,000	Inspektorat
6 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	176,400,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	inspektorat	1 Laporan	176,400,000	Inspektorat
6 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN						3,195,053,850							3,500,000,000	
6 01 02 2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal						1,988,075,100							2,400,000,000	
6 01 02 2.01 01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				55 Laporan	894,035,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi		55 Laporan	1,000,000,000	Inspektorat
6 01 02 2.01 02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				55 Laporan	894,040,300		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi		55 Laporan	1,000,000,000	Inspektorat
6 01 02 2.01 07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				1 Dokumen 12 Laporan	199,999,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi		1 Dokumen 12 Laporan	400,000,000	Inspektorat
6 01 02 2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu						1,206,978,750							1,100,000,000	
6 01 02 2.02 01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				1 Laporan	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi		1 Laporan	0	Inspektorat
6 01 02 2.02 02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				12 Laporan	1,106,978,750		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi		12 Laporan	1,100,000,000	Inspektorat
6 01 03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI						1,606,131,690							1,650,000,000	
6 01 03 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan						349,993,900							400,000,000	
6 01 03 2.01 01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				3 Rekomendasi	349,993,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi		3 Rekomendasi	400,000,000	Inspektorat

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
6	01 03 2.02	Pendampingan dan Asistensi					1,256,137,790						1,250,000,000			
6	01 03 2.02 01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	hasil survey kepuasan masyarakat				1 laporan 53 perangkat daerah	149,080,902		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	1 laporan 53 perangkat daerah	250,000,000	Inspektorat	
6	01 03 2.02 03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				12 Kegiatan	1,007,056,888		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	12 Kegiatan	750,000,000	Inspektorat	
6	01 03 2.02 04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				56 perangkat daerah	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	56 perangkat daerah	250,000,000	Inspektorat	
7		UNSUR KEWILAYAHAN														
7	01	KECAMATAN					14,926,661,243							0		
7	01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%	%	94 %	14,347,090,843						94 %	0		
7	01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	%	100 %	12,722,186,843						100 %	0		
7	01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	12,722,186,843		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Banyuwangi	25 Orang/bulan	0	Kecamatan Banyuwangi
7	01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	%	100 %	55,000,000						100 %	0		
7	01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Banyuwangi	1 Paket	0	Kecamatan Banyuwangi
7	01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Banyuwangi	1 Paket	0	Kecamatan Banyuwangi
7	01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Banyuwangi	1 Paket	0	Kecamatan Banyuwangi

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Banyuwangi	12 Laporan	0	Kecamatan Banyuwangi
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	1,533,400,000						100 %	0	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	2,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Banyuwangi	12 Laporan	0	Kecamatan Banyuwangi
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	80,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Banyuwangi	12 Laporan	0	Kecamatan Banyuwangi
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1,451,400,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Banyuwangi	12 Laporan	0	Kecamatan Banyuwangi
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	36,504,000						100 %	0	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	36,504,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Banyuwangi	1 Unit	0	Kecamatan Banyuwangi
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik	%		%	82,5 %	554,570,400						82,5 %	0	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%		%	100 %	544,570,400						100 %	0	
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	544,570,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Banyuwangi	1 Dokumen	0	Kecamatan Banyuwangi
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	%		%	100 %	10,000,000						100 %	0	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 02 2.02 01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				1 Dokumen	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Banyuwangi	1 Dokumen	0	Kecamatan Banyuwangi
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan	%		%	25 %	25,000,000						25 %	0	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	%		%	100 %	25,000,000						100 %	0	
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Banyuwangi	12 Laporan	0	Kecamatan Banyuwangi
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						334,497,749							0	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%		%	94 %	29,497,749						94 %	0	
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	13,500,000						100 %	0	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Tukangkayu	1 Paket	0	Kecamatan Banyuwangi
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Tukangkayu	1 Paket	0	Kecamatan Banyuwangi
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Tukangkayu	1 Paket	0	Kecamatan Banyuwangi
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Tukangkayu	12 Laporan	0	Kecamatan Banyuwangi
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	15,997,749						100 %	0	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Tukangkayu	12 Laporan	0	Kecamatan Banyuwangi

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	14,997,749		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Tukangkayu	12 Laporan	0	Kecamatan Banyuwangi
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan	%		%	25 %	305,000,000						25 %	0	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	%		%	100 %	305,000,000						100 %	0	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Tukangkayu		0	Kecamatan Banyuwangi
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Tukangkayu	1 Unit	0	Kecamatan Banyuwangi
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						425,579,458							0	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%		%	94 %	36,399,848						94 %	0	
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	13,500,000						100 %	0	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kel. Tamanbaru	1 Paket	0	Kecamatan Banyuwangi
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kel. Tamanbaru	1 Paket	0	Kecamatan Banyuwangi
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kel. Tamanbaru	1 Paket	0	Kecamatan Banyuwangi
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kel. Tamanbaru	12 Laporan	0	Kecamatan Banyuwangi

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	22,899,848						100 %	0	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Tamanbaru	12 Laporan	0	Kecamatan Banyuwangi
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	21,899,848		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Tamanbaru	12 Laporan	0	Kecamatan Banyuwangi
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan	%		%	25 %	389,179,610						25 %	0	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	%		%	100 %	84,179,610						100 %	0	
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	84,179,610		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Tamanbaru	12 Laporan	0	Kecamatan Banyuwangi
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	%		%	100 %	305,000,000						100 %	0	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Tamanbaru		0	Kecamatan Banyuwangi
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	260,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Tamanbaru	1 Unit	0	Kecamatan Banyuwangi
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0 Pokmas / Ormas	40,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Tamanbaru	0 Pokmas / Ormas	0	Kecamatan Banyuwangi
7		UNSUR KEWILAYAHAN													
7 01		KECAMATAN					338,109,191							0	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%		%	94 %	29,500,000						94 %	0	
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	13,500,000						100 %	0	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Temenggungan	1 Paket	0	Kecamatan Banyuwangi
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Temenggungan	1 Paket	0	Kecamatan Banyuwangi
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Temenggungan	1 Paket	0	Kecamatan Banyuwangi
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Temenggungan	12 Laporan	0	Kecamatan Banyuwangi
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	16,000,000						100 %	0	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Temenggungan	12 Laporan	0	Kecamatan Banyuwangi
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	15,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Temenggungan	12 Laporan	0	Kecamatan Banyuwangi
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan	%		%	25 %	308,609,191						25 %	0	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	%		%	100 %	53,609,191						100 %	0	
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	53,609,191		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Temenggungan	12 Laporan	0	Kecamatan Banyuwangi
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	%		%	100 %	255,000,000						100 %	0	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Temenggungan		0	Kecamatan Banyuwangi
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Temenggungan	1 Unit	0	Kecamatan Banyuwangi

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7						UNSUR KEWILAYAHAN									
7	01						339,776,708							0	
7	01	01												0	
7	01	01												0	
7	01	01	2.06											0	
7	01	01	2.06	01										0	
7	01	01	2.06	03										0	
7	01	01	2.06	04										0	
7	01	01	2.06	09										0	
7	01	01	2.08											0	
7	01	01	2.08	01										0	
7	01	01	2.08	02										0	
7	01	03												0	
7	01	03	2.01											0	
7	01	03	2.01	03										0	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	%		%	100 %	255,000,000						100 %	0		
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kel. Kampung Mandar			0	Kecamatan Banyuwangi	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kel. Kampung Mandar	1 Unit		0	Kecamatan Banyuwangi	
7	UNSUR KEWILAYAHAN															
7 01	KECAMATAN						367,004,197							0		
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%		%	94 %	27,100,000							94 %	0	
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	13,500,000							100 %	0	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kel. Panderejo	1 Paket		0	Kecamatan Banyuwangi	
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kel. Panderejo	1 Paket		0	Kecamatan Banyuwangi	
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kel. Panderejo	1 Paket		0	Kecamatan Banyuwangi	
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kel. Panderejo	12 Laporan		0	Kecamatan Banyuwangi	
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	13,600,000							100 %	0	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kel. Panderejo	12 Laporan		0	Kecamatan Banyuwangi	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12,600,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kel. Panderejo	12 Laporan		0	Kecamatan Banyuwangi	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan	%		%	25 %	339,904,197							25 %	0	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan PEMBERDAYAAN DESA	Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	%		%	100 %	59,904,197						100 %	0	
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	59,904,197		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kel. Panderejo	12 Laporan	0	Kecamatan Banyuwangi
7 01 03 2.02	Kegiatan PEMBERDAYAAN KELURAHAN	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	%		%	100 %	280,000,000						100 %	0	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kel. Panderejo		0	Kecamatan Banyuwangi
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	275,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kel. Panderejo	1 Unit	0	Kecamatan Banyuwangi
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						419,983,902							0	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%		%	94 %	32,145,889						94 %	0	
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	13,500,000						100 %	0	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kel. Karangrejo	1 Paket	0	Kecamatan Banyuwangi
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kel. Karangrejo	1 Paket	0	Kecamatan Banyuwangi
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kel. Karangrejo	1 Paket	0	Kecamatan Banyuwangi
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kel. Karangrejo	12 Laporan	0	Kecamatan Banyuwangi
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	18,645,889						100 %	0	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kel. Karangrejo	12 Laporan	0	Kecamatan Banyuwangi

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	17,645,889		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kel. Karangrejo	12 Laporan	0	Kecamatan Banyuwangi
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan	%		%	25 %	387,838,013						25 %	0	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	%		%	100 %	82,838,013						100 %	0	
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	82,838,013		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kel. Karangrejo	12 Laporan	0	Kecamatan Banyuwangi
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	%		%	100 %	305,000,000						100 %	0	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kel. Karangrejo		0	Kecamatan Banyuwangi
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kel. Karangrejo	1 Unit	0	Kecamatan Banyuwangi
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						374,263,438							0	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%		%	94 %	29,500,000						94 %	0	
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	13,500,000						100 %	0	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kel. Pakis	1 Paket	0	Kecamatan Banyuwangi
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kel. Pakis	1 Paket	0	Kecamatan Banyuwangi
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kel. Pakis	1 Paket	0	Kecamatan Banyuwangi

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kel. Pakis	12 Laporan	0	Kecamatan Banyuwangi
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	16,000,000						100 %	0	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kel. Pakis	12 Laporan	0	Kecamatan Banyuwangi
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	15,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kel. Pakis	12 Laporan	0	Kecamatan Banyuwangi
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan	%		%	25 %	344,763,438						25 %	0	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	%		%	100 %	64,763,438						100 %	0	
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	64,763,438		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kel. Pakis	12 Laporan	0	Kecamatan Banyuwangi
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	%		%	100 %	280,000,000						100 %	0	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kel. Pakis		0	Kecamatan Banyuwangi
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	233,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kel. Pakis	1 Unit	0	Kecamatan Banyuwangi
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0 Pokmas / Ormas	41,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kel. Pakis	0 Pokmas / Ormas	0	Kecamatan Banyuwangi
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						372,335,439							0	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%		%	94 %	26,500,000						94 %	0	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	13,500,000						100 %	0	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kel. Sumberrejo	1 Paket	0	Kecamatan Banyuwangi
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kel. Sumberrejo	1 Paket	0	Kecamatan Banyuwangi
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kel. Sumberrejo	1 Paket	0	Kecamatan Banyuwangi
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kel. Sumberrejo	12 Laporan	0	Kecamatan Banyuwangi
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	13,000,000						100 %	0	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kel. Sumberrejo	12 Laporan	0	Kecamatan Banyuwangi
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kel. Sumberrejo	12 Laporan	0	Kecamatan Banyuwangi
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan	%		%	25 %	345,835,439						25 %	0	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	%		%	100 %	65,835,439						100 %	0	
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	65,835,439		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kel. Sumberrejo	12 Laporan	0	Kecamatan Banyuwangi
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	%		%	100 %	280,000,000						100 %	0	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Sumberrejo		0	Kecamatan Banyuwangi

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	240,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Sumberrejo	1 Unit	0	Kecamatan Banyuwangi
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0 Pokmas / Ormas	35,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Sumberrejo	0 Pokmas / Ormas	0	Kecamatan Banyuwangi
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN														
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%		%	94 %	29,500,000						94 %	0	
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	13,500,000						100 %	0	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kel. Sobo	1 Paket	0	Kecamatan Banyuwangi
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kel. Sobo	1 Paket	0	Kecamatan Banyuwangi
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kel. Sobo	1 Paket	0	Kecamatan Banyuwangi
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kel. Sobo	12 Laporan	0	Kecamatan Banyuwangi
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	16,000,000						100 %	0	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kel. Sobo	12 Laporan	0	Kecamatan Banyuwangi
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	15,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kel. Sobo	12 Laporan	0	Kecamatan Banyuwangi
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan	%		%	25 %	393,424,771						25 %	0	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan PEMBERDAYAAN DESA	Cakupan Koordinasi Kegiatan PEMBERDAYAAN Desa	%		%	100 %	88,424,771						100 %	0	
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan PEMBERDAYAAN Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan PEMBERDAYAAN Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	88,424,771		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kel. Sobo	12 Laporan	0	Kecamatan Banyuwangi
7 01 03 2.02	Kegiatan PEMBERDAYAAN KELURAHAN	Cakupan Kegiatan PEMBERDAYAAN Kelurahan	%		%	100 %	305,000,000						100 %	0	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kel. Sobo		0	Kecamatan Banyuwangi
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	260,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kel. Sobo	1 Unit	0	Kecamatan Banyuwangi
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0 Pokmas / Ormas	40,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kel. Sobo	0 Pokmas / Ormas	0	Kecamatan Banyuwangi
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						416,899,600							0	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%		%	94 %	28,500,000						94 %	0	
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	13,500,000						100 %	0	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kel. Kebalenan	1 Paket	0	Kecamatan Banyuwangi
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kel. Kebalenan	1 Paket	0	Kecamatan Banyuwangi
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kel. Kebalenan	1 Paket	0	Kecamatan Banyuwangi

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kel. Kebalenan	12 Laporan	0	Kecamatan Banyuwangi	
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	15,000,000						100 %	0		
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kel. Kebalenan	12 Laporan	0	Kecamatan Banyuwangi	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	14,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kel. Kebalenan	12 Laporan	0	Kecamatan Banyuwangi	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan	%		%	25 %	388,399,600						25 %	0		
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	%		%	100 %	83,399,600						100 %	0		
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	83,399,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kel. Kebalenan	12 Laporan	0	Kecamatan Banyuwangi	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	%		%	100 %	305,000,000						100 %	0		
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kel. Kebalenan		0	Kecamatan Banyuwangi	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kel. Kebalenan	1 Unit	0	Kecamatan Banyuwangi	
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0 Pokmas / Ormas	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kel. Kebalenan	0 Pokmas / Ormas	0	Kecamatan Banyuwangi	
7	UNSUR KEWILAYAHAN															
7 01	KECAMATAN						421,049,600							0		
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%		%	94 %	34,500,000							94 %	0	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	13,500,000						100 %	0	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kel. Singonegaran	1 Paket	0	Kecamatan Banyuwangi
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kel. Singonegaran	1 Paket	0	Kecamatan Banyuwangi
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kel. Singonegaran	1 Paket	0	Kecamatan Banyuwangi
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kel. Singonegaran	12 Laporan	0	Kecamatan Banyuwangi
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	21,000,000						100 %	0	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kel. Singonegaran	12 Laporan	0	Kecamatan Banyuwangi
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kel. Singonegaran	12 Laporan	0	Kecamatan Banyuwangi
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan	%		%	25 %	386,549,600						25 %	0	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	%		%	100 %	106,549,600						100 %	0	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	106,549,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kel. Singonegaran	12 Laporan	0	Kecamatan Banyuwangi
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	%		%	100 %	280,000,000						100 %	0	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kel. Singonegaran		0	Kecamatan Banyuwangi

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	275,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kel. Singonegaran	1 Unit	0	Kecamatan Banyuwangi
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN														
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%		%	94 %	28,899,276						94 %	0	
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	13,500,000						100 %	0	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kel. Pengantigan	1 Paket	0	Kecamatan Banyuwangi
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kel. Pengantigan	1 Paket	0	Kecamatan Banyuwangi
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kel. Pengantigan	1 Paket	0	Kecamatan Banyuwangi
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kel. Pengantigan	12 Laporan	0	Kecamatan Banyuwangi
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	15,399,276						100 %	0	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kel. Pengantigan	12 Laporan	0	Kecamatan Banyuwangi
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	14,399,276		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kel. Pengantigan	12 Laporan	0	Kecamatan Banyuwangi
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan	%		%	25 %	360,180,121						25 %	0	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	%		%	100 %	80,180,121						100 %	0	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	80,180,121		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kel. Pengantigan	12 Laporan	0	Kecamatan Banyuwangi
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	%		%	100 %	280,000,000						100 %	0	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kel. Pengantigan		0	Kecamatan Banyuwangi
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	275,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kel. Pengantigan	1 Unit	0	Kecamatan Banyuwangi
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						429,700,000							0	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%		%	94 %	34,500,000							94 %	0
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	13,500,000							100 %	0
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kel. Singotrunan	1 Paket	0	Kecamatan Banyuwangi
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kel. Singotrunan	1 Paket	0	Kecamatan Banyuwangi
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kel. Singotrunan	1 Paket	0	Kecamatan Banyuwangi
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kel. Singotrunan	12 Laporan	0	Kecamatan Banyuwangi
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	21,000,000							100 %	0
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kel. Singotrunan	12 Laporan	0	Kecamatan Banyuwangi

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kel. Singotrunan	12 Laporan	0	Kecamatan Banyuwangi
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan	%		%	25 %	395,200,000						25 %	0	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	%		%	100 %	90,200,000						100 %	0	
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	90,200,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kel. Singotrunan	12 Laporan	0	Kecamatan Banyuwangi
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	%		%	100 %	305,000,000						100 %	0	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kel. Singotrunan		0	Kecamatan Banyuwangi
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	270,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kel. Singotrunan	1 Unit	0	Kecamatan Banyuwangi
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0 Pokmas / Ormas	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kel. Singotrunan	0 Pokmas / Ormas	0	Kecamatan Banyuwangi
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						401,497,200							0	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%		%	94 %	29,500,000						94 %	0	
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	13,500,000						100 %	0	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kel. Lateng	1 Paket	0	Kecamatan Banyuwangi
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kel. Lateng	1 Paket	0	Kecamatan Banyuwangi

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kel. Lateng	1 Paket	0	Kecamatan Banyuwangi
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kel. Lateng	12 Laporan	0	Kecamatan Banyuwangi
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	16,000,000						100 %	0	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kel. Lateng	12 Laporan	0	Kecamatan Banyuwangi
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	15,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kel. Lateng	12 Laporan	0	Kecamatan Banyuwangi
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan	%		%	25 %	371,997,200						25 %	0	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	%		%	100 %	91,997,200						100 %	0	
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	91,997,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kel. Lateng	12 Laporan	0	Kecamatan Banyuwangi
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	%		%	100 %	280,000,000						100 %	0	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kel. Lateng		0	Kecamatan Banyuwangi
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	275,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kel. Lateng	1 Unit	0	Kecamatan Banyuwangi
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						382,429,685							0	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%		%	94 %	29,500,000						94 %	0	
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	13,500,000						100 %	0	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kel. Kertosari	1 Paket	0	Kecamatan Banyuwangi
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kel. Kertosari	1 Paket	0	Kecamatan Banyuwangi
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kel. Kertosari	1 Paket	0	Kecamatan Banyuwangi
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kel. Kertosari	12 Laporan	0	Kecamatan Banyuwangi
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	16,000,000						100 %	0	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kel. Kertosari	12 Laporan	0	Kecamatan Banyuwangi
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	15,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kel. Kertosari	12 Laporan	0	Kecamatan Banyuwangi
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan	%		%	25 %	352,929,685						25 %	0	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	%		%	100 %	72,929,685						100 %	0	
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	72,929,685		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kel. Kertosari	12 Laporan	0	Kecamatan Banyuwangi
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	%		%	100 %	280,000,000						100 %	0	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kel. Kertosari		0	Kecamatan Banyuwangi

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	230,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kel. Kertosari	1 Unit	0	Kecamatan Banyuwangi
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0 Pokmas / Ormas	45,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kel. Kertosari	0 Pokmas / Ormas	0	Kecamatan Banyuwangi
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN														
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%		%	94 %	29,500,000						94 %	0	
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	13,500,000						100 %	0	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kel. Kepatihan	1 Paket	0	Kecamatan Banyuwangi
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kel. Kepatihan	1 Paket	0	Kecamatan Banyuwangi
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kel. Kepatihan	1 Paket	0	Kecamatan Banyuwangi
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kel. Kepatihan	12 Laporan	0	Kecamatan Banyuwangi
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	16,000,000						100 %	0	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kel. Kepatihan	12 Laporan	0	Kecamatan Banyuwangi
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	15,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kel. Kepatihan	12 Laporan	0	Kecamatan Banyuwangi
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan	%		%	25 %	349,432,524						25 %	0	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	%		%	100 %	94,432,524						100 %	0	
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	94,432,524		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kel. Kepatihan	12 Laporan	0	Kecamatan Banyuwangi
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	%		%	100 %	255,000,000						100 %	0	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kel. Kepatihan		0	Kecamatan Banyuwangi
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kel. Kepatihan	1 Unit	0	Kecamatan Banyuwangi
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						422,041,357							1,000,000	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%		%	94 %	32,500,000						94 %	1,000,000	
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	13,500,000						100 %	0	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kel. Penganjuran	1 Paket	0	Kecamatan Banyuwangi
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kel. Penganjuran	1 Paket	0	Kecamatan Banyuwangi
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kel. Penganjuran	1 Paket	0	Kecamatan Banyuwangi
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kel. Penganjuran	12 Laporan	0	Kecamatan Banyuwangi
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	19,000,000						100 %	1,000,000	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kel. Penganjuran	12 Laporan	1,000,000	Kecamatan Banyuwangi

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	18,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kel. Penganjuran	12 Laporan	0	Kecamatan Banyuwangi
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan	%		%	25 %	389,541,357						25 %	0	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	%		%	100 %	84,541,357						100 %	0	
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	84,541,357		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Penganjuran	12 Laporan	0	Kecamatan Banyuwangi
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	%		%	100 %	305,000,000						100 %	0	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kel. Penganjuran		0	Kecamatan Banyuwangi
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kel. Penganjuran	1 Unit	0	Kecamatan Banyuwangi
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						357,499,900							0	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%		%	94 %	27,500,000						94 %	0	
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	13,500,000						100 %	0	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kel. Kampung Melayu	1 Paket	0	Kecamatan Banyuwangi
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kel. Kampung Melayu	1 Paket	0	Kecamatan Banyuwangi
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kel. Kampung Melayu	1 Paket	0	Kecamatan Banyuwangi

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kel. Kampung Melayu	12 Laporan	0	Kecamatan Banyuwangi	
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	14,000,000						100 %	0		
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kel. Kampung Melayu	12 Laporan	0	Kecamatan Banyuwangi	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	13,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kel. Kampung Melayu	12 Laporan	0	Kecamatan Banyuwangi	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan	%		%	25 %	329,999,900						25 %	0		
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	%		%	100 %	74,999,900						100 %	0		
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	74,999,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kel. Kampung Melayu	12 Laporan	0	Kecamatan Banyuwangi	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	%		%	100 %	255,000,000						100 %	0		
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kel. Kampung Melayu		0	Kecamatan Banyuwangi	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kel. Kampung Melayu	1 Unit	0	Kecamatan Banyuwangi	
7	UNSUR KEWILAYAHAN															
7 01	KECAMATAN						4,894,936,518							340,720,400		
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%		%	94 %	4,519,216,118							94 %	0	
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	4,305,399,963							100 %	0	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				10 Orang/bulan	4,305,399,963		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul	Kecamatan Giri	10 Orang/bulan	0	Kecamatan Giri	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	55,000,000						100 %	0	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Giri	1 Paket	0	Kecamatan Giri
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Giri	1 Paket	0	Kecamatan Giri
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Giri	1 Paket	0	Kecamatan Giri
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Giri	1 Laporan	0	Kecamatan Giri
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	140,599,055						100 %	0	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Giri	1 Laporan	0	Kecamatan Giri
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	47,999,055		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Giri	12 Laporan	0	Kecamatan Giri
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	90,600,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Giri	12 Laporan	0	Kecamatan Giri
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	18,217,100						100 %	0	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	18,217,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Giri	1 Unit	0	Kecamatan Giri

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik	%		%	82,5 %	350,720,400						82,5 %	340,720,400	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%		%	100 %	340,720,400						100 %	340,720,400	
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	340,720,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Giri	1 Dokumen	340,720,400	Kecamatan Giri
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	%		%	100 %	10,000,000						100 %	0	
7 01 02 2.02 01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				1 Dokumen	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Giri	1 Dokumen	0	Kecamatan Giri
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan	%		%	25 %	25,000,000						25 %	0	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	%		%	100 %	25,000,000						100 %	0	
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Giri	12 Laporan	0	Kecamatan Giri
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						415,398,765							0	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%		%	94 %	56,798,965						94 %	0	
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	13,500,000						100 %	0	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Penataban	1 Paket	0	Kecamatan Giri

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Penataban	1 Paket	0	Kecamatan Giri
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Penataban	1 Paket	0	Kecamatan Giri
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Penataban	12 Laporan	0	Kecamatan Giri
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	43,298,965						100 %	0	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Penataban	12 Laporan	0	Kecamatan Giri
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	21,298,965		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Penataban	12 Laporan	0	Kecamatan Giri
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	21,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Penataban	12 Laporan	0	Kecamatan Giri
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan	%		%	25 %	358,599,800						25 %	0	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	%		%	100 %	53,599,800						100 %	0	
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	53,599,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Penataban	12 Laporan	0	Kecamatan Giri
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	%		%	100 %	305,000,000						100 %	0	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Penataban		0	Kecamatan Giri
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Penataban	1 Unit	0	Kecamatan Giri
7	UNSUR KEWILAYAHAN														

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
7	01						456,134,530								0		
7	01	01					94 %	87,499,769					94 %		0		
7	01	01	2.06				100 %	13,500,000					100 %		0		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Giri	1 Paket	0	Kecamatan Giri
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			1 Paket	1,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Giri	1 Paket	0	Kecamatan Giri
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket	1,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Giri	1 Paket	0	Kecamatan Giri
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Giri	12 Laporan	0	Kecamatan Giri
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	%	100 %	73,999,769					100 %	0	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Laporan	1,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Giri	12 Laporan	0	Kecamatan Giri
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	9,999,769	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Giri	12 Laporan	0	Kecamatan Giri
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	63,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Giri	12 Laporan	0	Kecamatan Giri
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan	%	%	25 %	368,634,761					25 %	0	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	%	%	100 %	63,634,761					100 %	0	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	63,634,761		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Giri	12 Laporan	0	Kecamatan Giri
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	%		%	100 %	305,000,000						100 %	0	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Giri		0	Kecamatan Giri
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	264,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Giri	1 Unit	0	Kecamatan Giri
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0 Pokmas / Ormas	36,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Giri	0 Pokmas / Ormas	0	Kecamatan Giri
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						423,896,105							0	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%		%	94 %	80,496,304							0	
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	13,500,000							0	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Mojopanggung	1 Paket	0	Kecamatan Giri
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Mojopanggung	1 Paket	0	Kecamatan Giri
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Mojopanggung	1 Paket	0	Kecamatan Giri
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Mojopanggung	12 Laporan	0	Kecamatan Giri

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	66,996,304						100 %	0	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Mojopanggung	12 Laporan		0 Kecamatan Giri
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	23,996,304		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Mojopanggung	12 Laporan		0 Kecamatan Giri
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	42,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Mojopanggung	12 Laporan		0 Kecamatan Giri
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan	%		%	25 %	343,399,801						25 %	0	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	%		%	100 %	63,399,801						100 %	0	
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	63,399,801		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Mojopanggung	12 Laporan		0 Kecamatan Giri
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	%		%	100 %	280,000,000						100 %	0	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Mojopanggung			0 Kecamatan Giri
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	275,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Mojopanggung	1 Unit		0 Kecamatan Giri
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						396,868,031							0	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%		%	94 %	81,399,200						94 %	0	
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	13,500,000						100 %	0	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Boyolangu	1 Paket	0	Kecamatan Giri
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Boyolangu	1 Paket	0	Kecamatan Giri
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Boyolangu	1 Paket	0	Kecamatan Giri
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Boyolangu	12 Laporan	0	Kecamatan Giri
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	67,899,200						100 %	0	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Boyolangu	12 Laporan	0	Kecamatan Giri
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	9,899,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Boyolangu	12 Laporan	0	Kecamatan Giri
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	57,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Boyolangu	12 Laporan	0	Kecamatan Giri
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan	%		%	25 %	315,468,831						25 %	0	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	%		%	100 %	60,468,831						100 %	0	
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	60,468,831		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Boyolangu	12 Laporan	0	Kecamatan Giri
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	%		%	100 %	255,000,000						100 %	0	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Boyolangu		0	Kecamatan Giri

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Boyolangu	1 Unit	0	Kecamatan Giri
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN														
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%		%	94 %	3,569,941,107						94 %	0	
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	3,434,770,749						100 %	0	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/bulan	3,434,770,749		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Glagah	15 Orang/bulan	0	Kecamatan Glagah
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	55,000,000						100 %	0	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5,000,000				9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Glagah	1 Paket	0	Kecamatan Glagah
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Glagah	1 Paket	0	Kecamatan Glagah
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Glagah	1 Paket	0	Kecamatan Glagah
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Glagah	12 Laporan	0	Kecamatan Glagah
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	63,195,358						100 %	0	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	2,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Glagah	12 Laporan	0	Kecamatan Glagah
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	23,995,358		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Glagah	12 Laporan	0	Kecamatan Glagah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	37,200,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Glagah	12 Laporan	0	Kecamatan Glagah	
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	16,975,000						100 %	0		
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	16,975,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Glagah	1 Unit	0	Kecamatan Glagah	
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik	%		%	82,5 %	501,050,400						82,5 %	0		
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%		%	100 %	491,050,400						100 %	0		
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	491,050,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Glagah	1 Dokumen	0	Kecamatan Glagah	
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	%		%	100 %	10,000,000						100 %	0		
7 01 02 2.02 01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				1 Dokumen	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Glagah	1 Dokumen	0	Kecamatan Glagah	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan	%		%	25 %	25,000,000						25 %	0		
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	%		%	100 %	25,000,000						100 %	0		
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Glagah	12 Laporan	0	Kecamatan Glagah	
7	UNSUR KEWILAYAHAN															
7 01	KECAMATAN							417,900,959							0	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%		%	94 %	62,900,959						94 %	0	
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	13,500,000						100 %	0	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Banjarsari	1 Paket	0	Kecamatan Glagah
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Banjarsari	1 Paket	0	Kecamatan Glagah
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Banjarsari	1 Paket	0	Kecamatan Glagah
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Banjarsari	12 Laporan	0	Kecamatan Glagah
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	49,400,959						100 %	0	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Banjarsari	12 Laporan	0	Kecamatan Glagah
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	6,400,959		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Banjarsari	12 Laporan	0	Kecamatan Glagah
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	42,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Banjarsari	12 Laporan	0	Kecamatan Glagah
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan	%		%	25 %	355,000,000						25 %	0	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	%		%	100 %	50,000,000						100 %	0	
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Banjarsari	12 Laporan	0	Kecamatan Glagah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	%		%	100 %	305,000,000						100 %	0	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Banjarsari			0 Kecamatan Glagah
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Banjarsari	1 Unit		0 Kecamatan Glagah
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						409,701,039							0	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%		%	94 %	79,701,039							94 %	0
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	13,500,000							100 %	0
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Bakungan	1 Paket		0 Kecamatan Glagah
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Bakungan	1 Paket		0 Kecamatan Glagah
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Bakungan	1 Paket		0 Kecamatan Glagah
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Bakungan	12 Laporan		0 Kecamatan Glagah
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	66,201,039							100 %	0
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Bakungan	12 Laporan		0 Kecamatan Glagah
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	5,201,039		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Bakungan	12 Laporan		0 Kecamatan Glagah
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	60,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Bakungan	12 Laporan		0 Kecamatan Glagah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan	%		%	25 %	330,000,000						25 %	0	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	%		%	100 %	50,000,000						100 %	0	
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Bakungan	12 Laporan		0	Kecamatan Glagah
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	%		%	100 %	280,000,000						100 %	0	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Bakungan			0	Kecamatan Glagah
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	275,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Bakungan	1 Unit		0	Kecamatan Glagah
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						5,065,795,925						4,371,637,425		
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%		%	94 %	4,623,835,525						94 %	4,371,637,425	
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	4,371,637,425						100 %	4,371,637,425	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1 Orang/bulan	4,371,637,425		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Kalipuro	1 Orang/bulan	4,371,637,425	Kecamatan Kalipuro
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	55,000,000						100 %	0	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Kalipuro	1 Paket		0	Kecamatan Kalipuro
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Kalipuro	1 Paket		0	Kecamatan Kalipuro
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Kalipuro	1 Paket		0	Kecamatan Kalipuro

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Kalipuro	1 Laporan	0	Kecamatan Kalipuro
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	172,200,000						100 %	0	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Kalipuro	1 Laporan	0	Kecamatan Kalipuro
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	55,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Kalipuro	1 Laporan	0	Kecamatan Kalipuro
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	115,200,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Kalipuro	1 Laporan	0	Kecamatan Kalipuro
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	24,998,100						100 %	0	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	24,998,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Kalipuro	1 Unit	0	Kecamatan Kalipuro
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik	%		%	82,5 %	416,960,400						82,5 %	0	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%		%	100 %	406,960,400						100 %	0	
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	406,960,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Kalipuro	1 Dokumen	0	Kecamatan Kalipuro
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						10,000,000							0	
7 01 02 2.02 01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				1 Dokumen	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi		1 Dokumen	0	Kecamatan Kalipuro

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan	%		%	25 %	25,000,000						25 %	0	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	%		%	100 %	25,000,000						100 %	0	
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Kalipuro	1 Laporan	0	Kecamatan Kalipuro
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						569,684,840							0	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%		%	94 %	85,489,400						94 %	0	
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	13,500,000						100 %	0	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Kalipuro	1 Paket	0	Kecamatan Kalipuro
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Kalipuro	1 Paket	0	Kecamatan Kalipuro
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Kalipuro	1 Paket	0	Kecamatan Kalipuro
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Kalipuro	1 Laporan	0	Kecamatan Kalipuro
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	71,989,400						100 %	0	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Kalipuro	1 Laporan	0	Kecamatan Kalipuro
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	7,989,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Kalipuro	1 Laporan	0	Kecamatan Kalipuro

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	63,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Kalipuro	1 Laporan	0	Kecamatan Kalipuro
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan	%		%	25 %	484,195,440						25 %	0	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	%		%	100 %	484,195,440						100 %	0	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Kalipuro		0	Kecamatan Kalipuro
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit	285,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Kalipuro	0 Unit	0	Kecamatan Kalipuro
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	194,195,440		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Kalipuro	1 Pokmas / Ormas	0	Kecamatan Kalipuro
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						472,891,050							0	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%		%	94 %	83,492,900						94 %	0	
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	13,500,000						100 %	0	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Bulusan	1 Paket	0	Kecamatan Kalipuro
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Bulusan	1 Paket	0	Kecamatan Kalipuro
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Bulusan	1 Paket	0	Kecamatan Kalipuro
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Bulusan	1 Laporan	0	Kecamatan Kalipuro

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	69,992,900						100 %	0	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Bulusan	1 Laporan		0 Kecamatan Kalipuro
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	5,992,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Bulusan	1 Laporan		0 Kecamatan Kalipuro
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	63,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Bulusan	1 Laporan		0 Kecamatan Kalipuro
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan	%		%	25 %	389,398,150						25 %	0	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	%		%	100 %	389,398,150						100 %	0	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Bulusan			0 Kecamatan Kalipuro
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	275,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Bulusan	1 Unit		0 Kecamatan Kalipuro
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0 Pokmas / Ormas	109,398,150		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Bulusan	0 Pokmas / Ormas		0 Kecamatan Kalipuro
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						550,295,395							0	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%		%	94 %	69,095,395							94 %	0
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	13,500,000							100 %	0
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Kalipuro	1 Paket		0 Kecamatan Kalipuro

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Kalipuro	1 Paket	0	Kecamatan Kalipuro	
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Kalipuro	1 Paket	0	Kecamatan Kalipuro	
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Kalipuro	1 Laporan	0	Kecamatan Kalipuro	
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	55,595,395						100 %	0		
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Kalipuro	1 Laporan	0	Kecamatan Kalipuro	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	12,595,395		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Kalipuro	1 Laporan	0	Kecamatan Kalipuro	
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	42,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Kalipuro	1 Laporan	0	Kecamatan Kalipuro	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan	%		%	25 %	481,200,000						25 %	0		
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	%		%	100 %	481,200,000						100 %	0		
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Kalipuro		0	Kecamatan Kalipuro	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Kalipuro	1 Unit	0	Kecamatan Kalipuro	
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0 Pokmas / Ormas	176,200,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Kalipuro	0 Pokmas / Ormas	0	Kecamatan Kalipuro	
7	UNSUR KEWILAYAHAN															
7 01	KECAMATAN							514,170,660							0	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%		%	94 %	123,696,430						94 %	0	
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	13,500,000						100 %	0	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Gombengsari	1 Paket	0	Kecamatan Kalipuro
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Gombengsari	1 Paket	0	Kecamatan Kalipuro
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Gombengsari	1 Paket	0	Kecamatan Kalipuro
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Gombengsari	1 Laporan	0	Kecamatan Kalipuro
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	110,196,430						100 %	0	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Gombengsari	1 Laporan	0	Kecamatan Kalipuro
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	7,196,430		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Gombengsari	1 Laporan	0	Kecamatan Kalipuro
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	102,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Gombengsari	1 Laporan	0	Kecamatan Kalipuro
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan	%		%	25 %	390,474,230						25 %	0	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	%		%	100 %	390,474,230						100 %	0	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Gombengsari		0	Kecamatan Kalipuro

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Gombengsari	1 Unit	0	Kecamatan Kalipuro
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	185,474,230		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Gombengsari	1 Pokmas / Ormas	0	Kecamatan Kalipuro
7		UNSUR KEWILAYAHAN													
7 01		KECAMATAN					2,619,870,436								0
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%		%	94 %	2,281,200,036						94 %	0	
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%		%	100 %	5,000,000						100 %	0	
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Licin	1 Dokumen	0	Kecamatan Licin
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	2,084,489,036						100 %	0	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	2,084,489,036		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Licin	20 Orang/bulan	0	Kecamatan Licin
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	55,000,000						100 %	0	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Licin	1 Paket	0	Kecamatan Licin
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Licin	1 Paket	0	Kecamatan Licin
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Licin	1 Paket	0	Kecamatan Licin

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Licin	12 Laporan	0	Kecamatan Licin
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	121,916,000						100 %	0	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	2,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Licin	12 Laporan	0	Kecamatan Licin
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	17,916,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Licin	12 Laporan	0	Kecamatan Licin
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	102,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Licin	12 Laporan	0	Kecamatan Licin
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	14,795,000						100 %	0	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	14,795,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Licin	1 Unit	0	Kecamatan Licin
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik	%		%	82,5 %	313,670,400						82,5 %	0	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%		%	100 %	303,670,400						100 %	0	
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	303,670,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Licin	1 Dokumen	0	Kecamatan Licin
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	%		%	100 %	10,000,000						100 %	0	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 02 2.02 01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				1 Dokumen	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Licin	1 Dokumen	0	Kecamatan Licin
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan	%		%	25 %	25,000,000						25 %	0	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	%		%	100 %	25,000,000						100 %	0	
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Licin	12 Laporan	0	Kecamatan Licin
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						2,820,711,567							0	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%		%	94 %	2,372,541,167						94 %	0	
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	2,126,542,067						100 %	0	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/bulan	2,126,542,067		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Wongsorejo	15 Orang/bulan	0	Kecamatan Wongsorejo
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	55,000,000						100 %	0	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Wongsorejo	1 Paket	0	Kecamatan Wongsorejo
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Wongsorejo	1 Paket	0	Kecamatan Wongsorejo
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Wongsorejo	1 Paket	0	Kecamatan Wongsorejo
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Wongsorejo	12 Laporan	0	Kecamatan Wongsorejo

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	176,000,000						100 %	0	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	2,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Wongsorejo	12 Laporan	0	Kecamatan Wongsorejo
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	36,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Wongsorejo	12 Laporan	0	Kecamatan Wongsorejo
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	138,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Wongsorejo	12 Laporan	0	Kecamatan Wongsorejo
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	14,999,100						100 %	0	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	14,999,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Wongsorejo	1 Unit	0	Kecamatan Wongsorejo
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik	%		%	82,5 %	423,170,400						82,5 %	0	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%		%	100 %	413,170,400						100 %	0	
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	413,170,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Wongsorejo	1 Dokumen	0	Kecamatan Wongsorejo
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	%		%	100 %	10,000,000						100 %	0	
7 01 02 2.02 01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				1 Dokumen	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Wongsorejo	1 Dokumen	0	Kecamatan Wongsorejo

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan	%		%	25 %	25,000,000						25 %	0		
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	%		%	100 %	25,000,000						100 %	0		
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Wongsorejo	12 Laporan	0	Kecamatan Wongsorejo	
7	UNSUR KEWILAYAHAN															
7 01	KECAMATAN						2,845,025,980							0		
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%		%	94 %	2,439,655,580							94 %	0	
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	2,237,035,954							100 %	0	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	2,237,035,954		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul 9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Kabat	20 Orang/bulan	0	Kecamatan Kabat	
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	55,000,000							100 %	0	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Kabat	1 Paket	0	Kecamatan Kabat	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Kabat	1 Paket	0	Kecamatan Kabat
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Kabat	1 Paket	0	Kecamatan Kabat
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Kabat	1 Laporan	0	Kecamatan Kabat
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	137,899,009						100 %	0	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan kabat	1 Laporan	0	Kecamatan Kabat
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	39,899,009		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan kabat	1 Laporan	0	Kecamatan Kabat
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	96,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan kabat	1 Laporan	0	Kecamatan Kabat
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	9,720,617						100 %	0	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	9,720,617		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Kabat	1 Unit	0	Kecamatan Kabat
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik	%		%	82,5 %	380,370,400						82,5 %	0	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%		%	100 %	370,370,400						100 %	0	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	370,370,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Kabat	1 Dokumen	0	Kecamatan Kabat
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	%		%	100 %	10,000,000						100 %	0	
7 01 02 2.02 01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				0 Dokumen	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Kabat	0 Dokumen	0	Kecamatan Kabat
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan	%		%	25 %	25,000,000						25 %	0	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	%		%	100 %	25,000,000						100 %	0	
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Kabat	1 Laporan	0	Kecamatan Kabat
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						3,152,396,292							0	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%		%	94 %	2,761,970,892						94 %	0	
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	2,602,782,851						100 %	0	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	2,602,782,851		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Rogojampi	20 Orang/bulan	0	Kecamatan Rogojampi
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	55,000,000						100 %	0	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Rogojampi	1 Paket	0	Kecamatan Rogojampi

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Rogojampi	1 Paket	0	Kecamatan Rogojampi
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Rogojampi	1 Paket	0	Kecamatan Rogojampi
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Rogojampi	12 Laporan	0	Kecamatan Rogojampi
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	96,467,963						100 %	0	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	2,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Rogojampi	12 Laporan	0	Kecamatan Rogojampi
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	19,067,963		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Rogojampi	12 Laporan	0	Kecamatan Rogojampi
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	75,400,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Rogojampi	12 Laporan	0	Kecamatan Rogojampi
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	7,720,078						100 %	0	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	7,720,078		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Rogojampi	1 Unit	0	Kecamatan Rogojampi
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik	%		%	82,5 %	365,425,400						82,5 %	0	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%		%	100 %	355,425,400						100 %	0	
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	355,425,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Rogojampi	1 Dokumen	0	Kecamatan Rogojampi

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	%		%	100 %	10,000,000						100 %	0	
7 01 02 2.02 01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				1 Dokumen	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Rogojampi	1 Dokumen	0	Kecamatan Rogojampi
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan	%		%	25 %	25,000,000						25 %	0	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	%		%	100 %	25,000,000						100 %	0	
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Rogojampi	12 Laporan	0	Kecamatan Rogojampi
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						2,735,205,308							0	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%		%	94 %	2,336,309,908						94 %	0	
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%		%	100 %	9,150,850						100 %	0	
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	9,150,850		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Songgon	1 Dokumen	0	Kecamatan Songgon
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	2,174,929,458						100 %	0	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	2,174,929,458		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Songgon	20 Orang/bulan	0	Kecamatan Songgon
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	55,000,000						100 %	0	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Songgon	1 Paket	0	Kecamatan Songgon
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Songgon	1 Paket	0	Kecamatan Songgon
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Songgon	1 Paket	0	Kecamatan Songgon
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Songgon	12 Laporan	0	Kecamatan Songgon
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	87,239,600						100 %	0	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	2,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Songgon	12 Laporan	0	Kecamatan Songgon
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	22,239,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Songgon	12 Laporan	0	Kecamatan Songgon
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	63,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Songgon	12 Laporan	0	Kecamatan Songgon
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	9,990,000						100 %	0	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	9,990,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Songgon	1 Unit	0	Kecamatan Songgon
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik	%		%	82,5 %	373,895,400						82,5 %	0	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%		%	100 %	363,895,400						100 %	0	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	363,895,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Songgon	1 Dokumen	0	Kecamatan Songgon	
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	%		%	100 %	10,000,000						100 %	0		
7 01 02 2.02 01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				1 Dokumen	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Songgon	1 Dokumen	0	Kecamatan Songgon	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan	%		%	25 %	25,000,000						25 %	0		
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	%		%	100 %	25,000,000						100 %	0		
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Songgon	12 Laporan	0	Kecamatan Songgon	
7	UNSUR KEWILAYAHAN															
7 01	KECAMATAN							2,508,416,224							0	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%		%	94 %	2,111,240,824						94 %	0		
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	1,914,255,524						100 %	0		
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	1,914,255,524		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Singojuruh	20 Orang/bulan	0	Kecamatan Singojuruh	
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	55,000,000						100 %	0		
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Singojuruh	1 Paket	0	Kecamatan Singojuruh	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Singojuruh	1 Paket	0	Kecamatan Singojuruh
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Singojuruh	1 Paket	0	Kecamatan Singojuruh
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Singojuruh	12 Laporan	0	Kecamatan Singojuruh
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	127,000,000						100 %	0	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	2,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Singojuruh	12 Laporan	0	Kecamatan Singojuruh
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	13,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Singojuruh	12 Laporan	0	Kecamatan Singojuruh
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	112,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Singojuruh	12 Laporan	0	Kecamatan Singojuruh
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	14,985,300						100 %	0	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	14,985,300		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Singojuruh	1 Unit	0	Kecamatan Singojuruh
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik	%		%	82,5 %	372,175,400						82,5 %	0	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%		%	100 %	362,175,400						100 %	0	
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	362,175,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Singojuruh	1 Dokumen	0	Kecamatan Singojuruh

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	%		%	100 %	10,000,000						100 %	0	
7 01 02 2.02 01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				1 Dokumen	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Singojuruh	1 Dokumen	0	Kecamatan Singojuruh
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan	%		%	25 %	25,000,000						25 %	0	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	%		%	100 %	25,000,000						100 %	0	
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Singojuruh	1 Laporan	0	Kecamatan Singojuruh
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						2,915,716,699							0	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%		%	94 %	2,301,936,299						94 %	0	
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	%		%	100 %	2,138,973,858						100 %	0	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	2,138,973,858		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Srono	20 Orang/bulan	0	Kecamatan Srono
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi umum perangkat daerah	%		%	100 %	55,000,000						100 %	0	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Srono	1 Paket	0	Kecamatan Srono
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Srono	1 Paket	0	Kecamatan Srono

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Srono	1 Paket	0	Kecamatan Srono
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Srono	12 Laporan	0	Kecamatan Srono
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	92,975,241						100 %	0	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	2,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Srono	12 Laporan	0	Kecamatan Srono
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	20,775,241		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Srono	1 Laporan	0	Kecamatan Srono
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	70,200,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Srono	1 Laporan	0	Kecamatan Srono
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	14,987,200						100 %	0	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	14,987,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Srono	1 Unit	0	Kecamatan Srono
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik	%		%	82,5 %	588,780,400						82,5 %	0	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	%		%	100 %	578,780,400						100 %	0	
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	578,780,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Srono	1 Dokumen	0	Kecamatan Srono

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	%		%	100 %	10,000,000						100 %	0	
7 01 02 2.02 01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				1 Dokumen	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Srono	1 Dokumen	0	Kecamatan Srono
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan	%		%	25 %	25,000,000						25 %	0	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	%		%	100 %	25,000,000						100 %	0	
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Srono	12 Laporan	0	Kecamatan Srono
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						2,828,829,357							0	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%		%	94 %	2,351,908,957						94 %	0	
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	%		%	100 %	2,127,181,696						100 %	0	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	2,127,181,696		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Muncar	20 Orang/bulan	0	Kecamatan Muncar
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi umum perangkat daerah	%		%	100 %	55,000,000						100 %	0	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Muncar	1 Paket	0	Kecamatan Muncar
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Muncar	1 Paket	0	Kecamatan Muncar

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Muncar	1 Paket	0	Kecamatan Muncar
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Muncar	12 Laporan	0	Kecamatan Muncar
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	165,799,861						100 %	0	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	2,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Muncar	12 Laporan	0	Kecamatan Muncar
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	48,599,861		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Muncar	12 Laporan	0	Kecamatan Muncar
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	115,200,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Muncar	12 Laporan	0	Kecamatan Muncar
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	3,927,400						100 %	0	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	3,927,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Muncar	1 Unit	0	Kecamatan Muncar
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik	%		%	82,5 %	451,920,400						82,5 %	0	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	%		%	100 %	441,920,400						100 %	0	
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	441,920,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Muncar	1 Dokumen	0	Kecamatan Muncar

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	%		%	100 %	10,000,000						100 %	0	
7 01 02 2.02 01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				1 Dokumen	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Muncar	1 Dokumen	0	Kecamatan Muncar
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan	%		%	25 %	25,000,000						25 %	0	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	%		%	100 %	25,000,000						100 %	0	
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Muncar	12 Laporan	0	Kecamatan Muncar
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						3,077,863,541							0	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%		%	94 %	2,570,118,141						94 %	0	
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	%		%	100 %	2,317,175,527						100 %	0	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1 Orang/bulan	2,317,175,527		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Cluring	1 Orang/bulan	0	Kecamatan Cluring
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi umum perangkat daerah	%		%	100 %	54,997,300						100 %	0	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4,997,300		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Cluring	1 Paket	0	Kecamatan Cluring
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Cluring	1 Paket	0	Kecamatan Cluring

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Cluring	1 Paket	0	Kecamatan Cluring
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25000000 Laporan	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Cluring	25000000 Laporan	0	Kecamatan Cluring
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	187,947,914						100 %	0	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Cluring	1 Laporan	0	Kecamatan Cluring
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	43,747,914		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Cluring	1 Laporan	0	Kecamatan Cluring
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	142,200,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Cluring	1 Laporan	0	Kecamatan Cluring
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	9,997,400						100 %	0	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	9,997,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Cluring	1 Unit	0	Kecamatan Cluring
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik	%		%	82,5 %	482,745,400						82,5 %	0	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	%		%	100 %	472,745,400						100 %	0	
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	472,745,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Cluring	1 Dokumen	0	Kecamatan Cluring

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	%		%	100 %	10,000,000						100 %	0	
7 01 02 2.02 01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				1 Dokumen	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Cluring	1 Dokumen	0	Kecamatan Cluring
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan	%		%	25 %	25,000,000						25 %	0	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	%		%	100 %	25,000,000						100 %	0	
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				25000000 Laporan	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Cluring	25000000 Laporan	0	Kecamatan Cluring
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						2,357,624,175							0	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%		%	94 %	2,030,153,775						94 %	0	
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	%		%	100 %	1,732,084,025						100 %	0	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1 Orang/bulan	1,732,084,025		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Purwoharjo	1 Orang/bulan	0	Kecamatan Purwoharjo
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi umum perangkat daerah	%		%	100 %	65,061,200						100 %	0	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	15,061,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Purwoharjo	1 Paket	0	Kecamatan Purwoharjo
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5000000 Paket	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Purwoharjo	5000000 Paket	0	Kecamatan Purwoharjo

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Purwoharjo	1 Paket	0	Kecamatan Purwoharjo
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Purwoharjo	1 Laporan	0	Kecamatan Purwoharjo
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	221,049,550						100 %	0	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Purwoharjo	1 Laporan	0	Kecamatan Purwoharjo
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	21,649,550		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Purwoharjo	1 Laporan	0	Kecamatan Purwoharjo
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	197,400,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Purwoharjo	1 Laporan	0	Kecamatan Purwoharjo
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	11,959,000						100 %	0	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	11,959,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Purwoharjo	1 Unit	0	Kecamatan Purwoharjo
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik	%		%	82,5 %	302,470,400						82,5 %	0	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	%		%	100 %	292,470,400						100 %	0	
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	292,470,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Purwoharjo	1 Dokumen	0	Kecamatan Purwoharjo

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	%		%	100 %	10,000,000						100 %	0	
7 01 02 2.02 01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				1 Dokumen	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Purwoharjo	1 Dokumen	0	Kecamatan Purwoharjo
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan	%		%	25 %	25,000,000						25 %	0	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	%		%	100 %	25,000,000						100 %	0	
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Purwoharjo	1 Laporan	0	Kecamatan Purwoharjo
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						2,659,417,509							0	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%		%	94 %	2,182,497,109						94 %	0	
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	%		%	100 %	6,546,574						100 %	0	
7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	6,546,574		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Kecamatan Tegaldlimo	1 Laporan	0	Kecamatan Tegaldlimo
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	%		%	100 %	1,935,276,282						100 %	0	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1 Orang/bulan	1,935,276,282		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Tegaldlimo	1 Orang/bulan	0	Kecamatan Tegaldlimo
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi umum perangkat daerah	%		%	100 %	55,000,000						100 %	0	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Tegaldlimo	1 Paket	0	Kecamatan Tegaldlimo
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Tegaldlimo	1 Paket	0	Kecamatan Tegaldlimo
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif	Kecamatan Tegaldlimo	1 Paket	0	Kecamatan Tegaldlimo
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Tegaldlimo	1 Laporan	0	Kecamatan Tegaldlimo
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	165,679,703						100 %	0	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Tegaldlimo	1 Laporan	0	Kecamatan Tegaldlimo
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	24,479,703		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Tegaldlimo	1 Laporan	0	Kecamatan Tegaldlimo
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	139,200,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Tegaldlimo	1 Laporan	0	Kecamatan Tegaldlimo
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	19,994,550						100 %	0	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	19,994,550		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Tegaldlimo	1 Unit	0	Kecamatan Tegaldlimo
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik	%		%	82,5 %	451,920,400						82,5 %	0	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	%		%	100 %	441,920,400						100 %	0	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	441,920,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Tegaldlimo	1 Dokumen	0	Kecamatan Tegaldlimo
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	%		%	100 %	10,000,000						100 %	0	
7 01 02 2.02 01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				1 Dokumen	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Tegaldlimo	1 Dokumen	0	Kecamatan Tegaldlimo
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan	%		%	25 %	25,000,000						25 %	0	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	%		%	100 %	25,000,000						100 %	0	
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Tegaldlimo	1 Laporan	0	Kecamatan Tegaldlimo
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						2,219,421,781							0	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%		%	94 %	1,864,351,381						94 %	0	
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	%		%	100 %	1,675,185,333						100 %	0	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1 Orang/bulan	1,675,185,333		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Gambiran	1 Orang/bulan	0	Kecamatan Gambiran
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi umum perangkat daerah	%		%	100 %	55,000,000						100 %	0	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatn Gambiran	1 Paket	0	Kecamatan Gambiran

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Gambiran	1 Paket	0	Kecamatan Gambiran
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Gambiran	1 Paket	0	Kecamatan Gambiran
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Gambiran	1 Laporan	0	Kecamatan Gambiran
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	119,199,248						100 %	0	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Gambiran	1 Laporan	0	Kecamatan Gambiran
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	21,799,248		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Gambiran	1 Laporan	0	Kecamatan Gambiran
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	95,400,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Gambiran	1 Laporan	0	Kecamatan Gambiran
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	14,966,800						100 %	0	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	14,966,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Gambiran	1 Unit	0	Kecamatan Gambiran
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik	%		%	82,5 %	330,070,400						82,5 %	0	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	%		%	100 %	320,070,400						100 %	0	
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	320,070,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Gambiran	1 Dokumen	0	Kecamatan Gambiran

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	%		%	100 %	10,000,000						100 %	0	
7 01 02 2.02 01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				1 Dokumen	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Gambiran	1 Dokumen	0	Kecamatan Gambiran
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan	%		%	25 %	25,000,000						25 %	0	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	%		%	100 %	25,000,000						100 %	0	
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Gambiran	1 Laporan	0	Kecamatan Gambiran
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						2,130,416,491								0
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1,786,506,091								0
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1,551,516,895								0
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1 Orang/bulan	1,551,516,895		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi		1 Orang/bulan	0	Kecamatan Bangorejo
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						64,994,500								0
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	14,994,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi		1 Paket	0	Kecamatan Bangorejo
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi		1 Paket	0	Kecamatan Bangorejo
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi		1 Paket	0	Kecamatan Bangorejo

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	1 Laporan	0	Kecamatan Bangorejo	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						159,999,096						0		
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	1 Laporan	0	Kecamatan Bangorejo	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	37,999,096		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	1 Laporan	0	Kecamatan Bangorejo	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	120,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	1 Laporan	0	Kecamatan Bangorejo	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						9,995,600						0		
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	9,995,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	1 Unit	0	Kecamatan Bangorejo	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						318,910,400						0		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						308,910,400						0		
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	308,910,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	0	Kecamatan Bangorejo	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						10,000,000						0		
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				1 Dokumen	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	0	Kecamatan Bangorejo	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						25,000,000							0	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						25,000,000							0	
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi		1 Laporan	0	Kecamatan Bangorejo	
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						2,042,637,468							0	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%		%	94 %	1,733,017,068					94 %		0	
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	1,536,082,900					100 %		0	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1 Orang/bulan	1,536,082,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Siliragung	1 Orang/bulan	0	Kecamatan Siliragung
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi umum perangkat daerah	%		%	100 %	55,000,000						100 %		0
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Siliragung	1 Paket	0	Kecamatan Siliragung
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Siliragung	1 Paket	0	Kecamatan Siliragung
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Siliragung		0	Kecamatan Siliragung
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Siliragung	1 Laporan	0	Kecamatan Siliragung
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	130,998,715						100 %		0
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Siliragung	1 Laporan	0	Kecamatan Siliragung

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	29,998,715		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Siliragung	1 Laporan	0	Kecamatan Siliragung
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	99,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Siliragung	1 Laporan	0	Kecamatan Siliragung
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	10,935,453						100 %	0	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	10,935,453		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Siliragung	1 Unit	0	Kecamatan Siliragung
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik	%		%	82,5 %	284,620,400						82,5 %	0	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	%		%	100 %	274,620,400						100 %	0	
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	274,620,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Siliragung	1 Dokumen	0	Kecamatan Siliragung
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	%		%	100 %	10,000,000						100 %	0	
7 01 02 2.02 01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				1 Dokumen	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Siliragung	1 Dokumen	0	Kecamatan Siliragung
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan	%		%	25 %	25,000,000						25 %	0	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	%		%	100 %	25,000,000						100 %	0	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Siliragung	1 Laporan	0	Kecamatan Siliragung
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						2,604,322,362							0	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	Kasus %		Kasus %	2 Kasus 94 %	2,172,826,962						2 Kasus 94 %	0	
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	1,922,674,762						100 %	0	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1 Orang/bulan	1,922,674,762		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Pesanggaran	1 Orang/bulan	0	Kecamatan Pesanggaran
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	%		%	100 %	55,000,000						100 %	0	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Pesanggaran	1 Paket	0	Kecamatan Pesanggaran
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Pesanggaran	1 Paket	0	Kecamatan Pesanggaran
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Pesanggaran	1 Paket	0	Kecamatan Pesanggaran
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Pesanggaran	1 Laporan	0	Kecamatan Pesanggaran
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	183,200,000						100 %	0	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Pesanggaran	1 Laporan	0	Kecamatan Pesanggaran
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	22,200,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Pesanggaran	1 Laporan	0	Kecamatan Pesanggaran

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	159,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Pesanggaran	1 Laporan	0	Kecamatan Pesanggaran	
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	11,952,200						100 %	0		
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	11,952,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Pesanggaran	1 Unit	0	Kecamatan Pesanggaran	
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik	%		%	82.5 %	406,495,400						82.5 %	0		
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%		%	100 %	396,495,400						100 %	0		
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	396,495,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Pesanggaran	1 Dokumen	0	Kecamatan Pesanggaran	
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	%		%	100 %	10,000,000						100 %	0		
7 01 02 2.02 01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				1 Dokumen	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Pesanggaran	1 Dokumen	0	Kecamatan Pesanggaran	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan	%		%	25 %	25,000,000						25 %	0		
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	%		%	100 %	25,000,000						100 %	0		
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Pesanggaran	1 Laporan	0	Kecamatan Pesanggaran	
7	UNSUR KEWILAYAHAN															
7 01	KECAMATAN							2,649,804,204							0	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2,206,483,804							0	
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1,890,858,430							0	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1 Orang/bulan	1,890,858,430		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi		1 Orang/bulan	0	Kecamatan Genteng
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi umum perangkat daerah	%		%	100 %	60,000,000						100 %	0	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Genteng	1 Paket	0	Kecamatan Genteng
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Genteng	1 Paket	0	Kecamatan Genteng
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Genteng	1 Paket	0	Kecamatan Genteng
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Genteng	1 Laporan	0	Kecamatan Genteng
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	251,000,000						100 %	0	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Genteng	1 Laporan	0	Kecamatan Genteng
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	78,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Genteng	1 Laporan	0	Kecamatan Genteng
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	171,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Genteng	1 Laporan	0	Kecamatan Genteng
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	4,625,374						100 %	0	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
7 01 01 2.09 04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya				1 Unit	4,625,374		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Genteng	1 Unit	0	Kecamatan Genteng	
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik	%		%	82,5 %	418,320,400						82,5 %	0		
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	%		%	100 %	408,320,400						100 %	0		
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	408,320,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Genteng	1 Dokumen	0	Kecamatan Genteng	
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	%		%	100 %	10,000,000						100 %	0		
7 01 02 2.02 01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				1 Dokumen	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Genteng	1 Dokumen	0	Kecamatan Genteng	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan	%		%	25 %	25,000,000						25 %	0		
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	%		%	100 %	25,000,000						100 %	0		
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				25000000 Laporan	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Genteng	25000000 Laporan	0	Kecamatan Genteng	
7	UNSUR KEWILAYAHAN															
7 01	KECAMATAN							2,055,779,672							0	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%		%	94 %	1,714,164,272						94 %	0		
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	%		%	100 %	1,508,238,383						100 %	0		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1 Orang/bulan	1,508,238,383		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Tegalsari	1 Orang/bulan	0	Kecamatan Tegalsari
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi umum perangkat daerah	%		%	100 %	55,000,000						100 %	0	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Tegalsari	1 Paket	0	Kecamatan Tegalsari
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Tegalsari	1 Paket	0	Kecamatan Tegalsari
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Tegalsari	1 Paket	0	Kecamatan Tegalsari
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Tegalsari	1 Laporan	0	Kecamatan Tegalsari
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	140,999,089						100 %	0	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Tegalsari	1 Laporan	0	Kecamatan Tegalsari
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	24,999,089		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Tegalsari	1 Laporan	0	Kecamatan Tegalsari
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	114,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Tegalsari	1 Laporan	0	Kecamatan Tegalsari
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	9,926,800						100 %	0	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	9,926,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Tegalsari	1 Unit	0	Kecamatan Tegalsari

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik	%		%	82,5 %	316,615,400						82,5 %	0	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	%		%	100 %	306,615,400						100 %	0	
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	306,615,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Tegalsari	1 Dokumen	0	Kecamatan Tegalsari
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	%		%	100 %	10,000,000						100 %	0	
7 01 02 2.02 01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				1 Dokumen	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Tegalsari	1 Dokumen	0	Kecamatan Tegalsari
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan	%		%	25 %	25,000,000						25 %	0	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	%		%	100 %	25,000,000						100 %	0	
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Tegalsari	1 Laporan	0	Kecamatan Tegalsari
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						2,360,863,394							0	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%		%	94 %	1,969,292,994						94 %	0	
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	%		%	100 %	1,767,950,932						100 %	0	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1 Orang/bulan	1,767,950,932		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Sempu	1 Orang/bulan	0	Kecamatan Sempu

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi umum perangkat daerah	%		%	100 %	52,943,300						100 %	0	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2,943,300		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Sempu	1 Paket	0	Kecamatan Sempu
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Sempu	1 Paket	0	Kecamatan Sempu
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Sempu	1 Paket	0	Kecamatan Sempu
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Sempu	1 Laporan	0	Kecamatan Sempu
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	148,398,762						100 %	0	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Sempu	1 Laporan	0	Kecamatan Sempu
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	14,998,762		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Sempu	1 Laporan	0	Kecamatan Sempu
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	131,400,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Sempu	1 Laporan	0	Kecamatan Sempu
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik	%		%	82,5 %	366,570,400						82,5 %	0	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	%		%	100 %	356,570,400						100 %	0	
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	356,570,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Sempu	1 Dokumen	0	Kecamatan Sempu

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	%		%	100 %	10,000,000						100 %	0	
7 01 02 2.02 01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				1 Dokumen	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Sempu	1 Dokumen	0	Kecamatan Sempu
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan	%		%	25 %	25,000,000						25 %	0	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	%		%	100 %	25,000,000						100 %	0	
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Sempu	1 Laporan	0	Kecamatan Sempu
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						2,033,508,239							0	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%		%	94 %	1,641,172,839						94 %	0	
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	%		%	100 %	19,405,395						100 %	0	
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	19,405,395		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Glenmore	1 Dokumen	0	Kecamatan Glenmore
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	%		%	100 %	1,324,901,995						100 %	0	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1 Orang/bulan	1,324,901,995		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Glenmore	1 Orang/bulan	0	Kecamatan Glenmore
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi umum perangkat daerah	%		%	100 %	61,318,800						100 %	0	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	11,318,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Glenmore	1 Paket	0	Kecamatan Glenmore
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket 1 Paket	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Glenmore	1 Paket 1 Paket	0	Kecamatan Glenmore
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Glenmore	1 Paket	0	Kecamatan Glenmore
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Glenmore	1 Laporan	0	Kecamatan Glenmore
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	220,399,549						100 %	0	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Glenmore	1 Laporan	0	Kecamatan Glenmore
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	44,999,549		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Glenmore	1 Laporan	0	Kecamatan Glenmore
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	173,400,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Glenmore	1 Laporan	0	Kecamatan Glenmore
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	15,147,100						100 %	0	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	15,147,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Glenmore	1 Unit	0	Kecamatan Glenmore
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik	%		%	82,5 %	367,335,400						82,5 %	0	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	%		%	100 %	357,335,400						100 %	0	
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	357,335,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Glenmore	1 Dokumen	0	Kecamatan Glenmore
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	%		%	100 %	10,000,000						100 %	0	
7 01 02 2.02 01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				1 Dokumen	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Glenmore	1 Dokumen	0	Kecamatan Glenmore
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan	%		%	25 %	25,000,000						25 %	0	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	%		%	100 %	25,000,000						100 %	0	
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Glenmore	1 Laporan	0	Kecamatan Glenmore
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						2,485,322,296							0	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%		%	94 %	2,006,516,896						94 %	0	
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	%		%	100 %	1,770,725,141						100 %	0	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				8 Orang/bulan	1,770,725,141		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Kalibaru	8 Orang/bulan	0	Kecamatan Kalibaru
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi umum perangkat daerah	%		%	100 %	50,000,000						100 %	0	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Kalibaru	1 Paket	0	Kecamatan Kalibaru
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Kalibaru	1 Paket	0	Kecamatan Kalibaru
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Kalibaru	1 Laporan	0	Kecamatan Kalibaru
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	165,809,955						100 %	0	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Kalibaru	1 Laporan	0	Kecamatan Kalibaru
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						20,509,955		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Kalibaru		0	Kecamatan Kalibaru
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	143,300,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Kalibaru	1 Laporan	0	Kecamatan Kalibaru
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	19,981,800						100 %	0	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	19,981,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Kalibaru	1 Unit	0	Kecamatan Kalibaru
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik	%		%	82,5 %	453,805,400						82,5 %	0	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	%		%	100 %	443,805,400						100 %	0	
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	443,805,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Kalibaru	1 Dokumen	0	Kecamatan Kalibaru

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	%		%	100 %	10,000,000						100 %	0	
7 01 02 2.02 01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				1 Dokumen	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Kalibaru	1 Dokumen	0	Kecamatan Kalibaru
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan	%		%	25 %	25,000,000						25 %	0	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	%		%	100 %	25,000,000						100 %	0	
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Kalibaru	1 Laporan	0	Kecamatan Kalibaru
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						2,560,423,948							0	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%		%	94 %	2,150,943,548						94 %	0	
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	%		%	100 %	1,940,644,496						100 %	0	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				24 Orang/bulan	1,940,644,496		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Kalipuro	24 Orang/bulan	0	Kecamatan Blimbingsari
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi umum perangkat daerah	%		%	100 %	55,000,000						100 %	0	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				53 Paket	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Blimbingsari	53 Paket	0	Kecamatan Blimbingsari
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Blimbingsari	1 Paket	0	Kecamatan Blimbingsari

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Blimbingsari	1 Paket	0	Kecamatan Blimbingsari
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Blimbingsari	12 Laporan	0	Kecamatan Blimbingsari
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						155,299,052							0	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi		12 Laporan	0	Kecamatan Blimbingsari
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	29,099,052		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi		12 Laporan	0	Kecamatan Blimbingsari
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	121,200,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi		12 Laporan	0	Kecamatan Blimbingsari
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						384,480,400							0	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						374,480,400							0	
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12 Dokumen	374,480,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi		12 Dokumen	0	Kecamatan Blimbingsari
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						10,000,000							0	
7 01 02 2.02 01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				12 Dokumen	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi		12 Dokumen	0	Kecamatan Blimbingsari
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						25,000,000							0	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						25,000,000							0	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi		12 Laporan	0	Kecamatan Blimbingsari
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM														
8 01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						103,661,330,826							123,658,870,526	
8 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%		%	94 %	3,661,330,826						94 %	3,658,870,526	
8 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen		Dokumen	20 Dokumen	25,000,000						20 Dokumen	30,000,000	
8 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	25,000,000	Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Menjaga Stabilitas Sosial, Keagamaan dan Kerukunan Warga	Bakesbangpol	7 Dokumen	30,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	dokumen		dokumen	12 dokumen	3,193,870,526						12 dokumen	3,193,870,526	
8 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				21 Orang/bulan	3,193,870,526	Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Menjaga Stabilitas Sosial, Keagamaan dan Kerukunan Warga	Bakesbangpol	21 Orang/bulan	3,193,870,526	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum	dokumen		dokumen	12 dokumen	190,000,000						12 dokumen	177,000,000	
8 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Menjaga Stabilitas Sosial, Keagamaan dan Kerukunan Warga	Bakesbangpol	1 Paket	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	10,000,000	Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Menjaga Stabilitas Sosial, Keagamaan dan Kerukunan Warga	Bakesbangpol	2 Paket	12,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Menjaga Stabilitas Sosial, Keagamaan dan Kerukunan Warga	Bakesbangpol	1 Paket	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	50,000,000	Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Menjaga Stabilitas Sosial, Keagamaan dan Kerukunan Warga	Bakesbangpol	2 Paket	55,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Menjaga Stabilitas Sosial, Keagamaan dan Kerukunan Warga	Bakesbangpol	1 Paket	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Menjaga Stabilitas Sosial, Keagamaan dan Kerukunan Warga	Bakesbangpol	1 Dokumen	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				90 Laporan	100,000,000	Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Menjaga Stabilitas Sosial, Keagamaan dan Kerukunan Warga	Bakesbangpol	90 Laporan	110,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen penyediaan jasa	dokumen		dokumen	12 dokumen	227,473,700						12 dokumen	232,000,000	
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	32,093,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Menjaga Stabilitas Sosial, Keagamaan dan Kerukunan Warga	Bakesbangpol	12 Laporan	35,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Laporan	24,980,000				5. Menjaga Stabilitas Sosial, Keagamaan dan Kerukunan Warga	Bakesbangpol	10 Laporan	25,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	170,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Menjaga Stabilitas Sosial, Keagamaan dan Kerukunan Warga	Bakesbangpol	12 Laporan	172,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen pemeliharaan barang	dokumen		dokumen	2 dokumen	24,986,600						2 dokumen	26,000,000	
8.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	24,986,600	Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Menjaga Stabilitas Sosial, Keagamaan dan Kerukunan Warga	Bakesbangpol	3 Unit	26,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
8 01 03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Masyarakat yang Menggunakan Hak Politiknya	%		%	65 %	100,000,000,000						65 %	120,000,000,000	
8 01 03 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase masyarakat yang memiliki hak pilih aktif yang mengikuti sosialisasi pendidikan politik	%		%	25 %	100,000,000,000						25 %	120,000,000,000	
8 01 03 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				325000 Orang	100,000,000,000	Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Menjaga Stabilitas Sosial, Keagamaan dan Kerukunan Warga	Masyarakat yang memiliki hak pilih aktif	325000 Orang	120,000,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
TOTAL							2,568,555,808,064							1,334,020,777,895	

